



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**RESOLUSI KONFLIK PASCA MoU HELSINKI :  
Studi Kasus Langsa Propinsi Aceh**

**Disertasi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Doktor dalam bidang Sosiologi**

**Bambang Wahyudi**  
NPM : 890541003X

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
DEPOK  
JULI 2009**







**UNIVERSITAS INDONESIA**

**RESOLUSI KONFLIK PASCA MoU HELSINKI :  
Studi Kasus Langsa Propinsi Aceh**

Disertasi

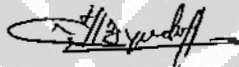
**Bambang Wahyudi  
NPM : 890541003X**

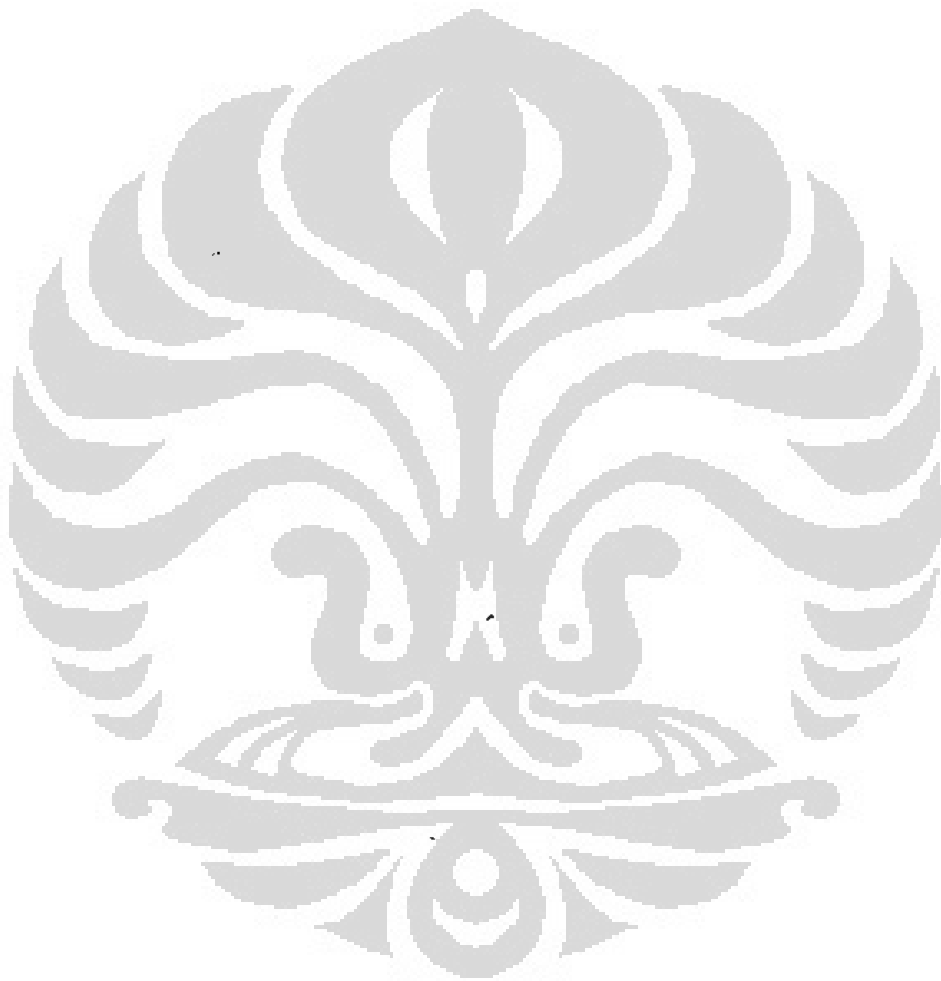
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI  
DEPOK  
JULI 2009**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Bambang Wahyudi  
NPM : 890541003X  
Tandatangan :   
Tanggal : 1 - Juli - 2009



## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Bambang Wahyudi  
NPM : 890541003X  
Departemen : Sosiologi  
Judul Disertasi : **RESOLUSI KONFLIK PASCA MOU HELSINKI :  
STUDI KASUS LANGSA PROVINSI ACEH**

PROMOTOR :

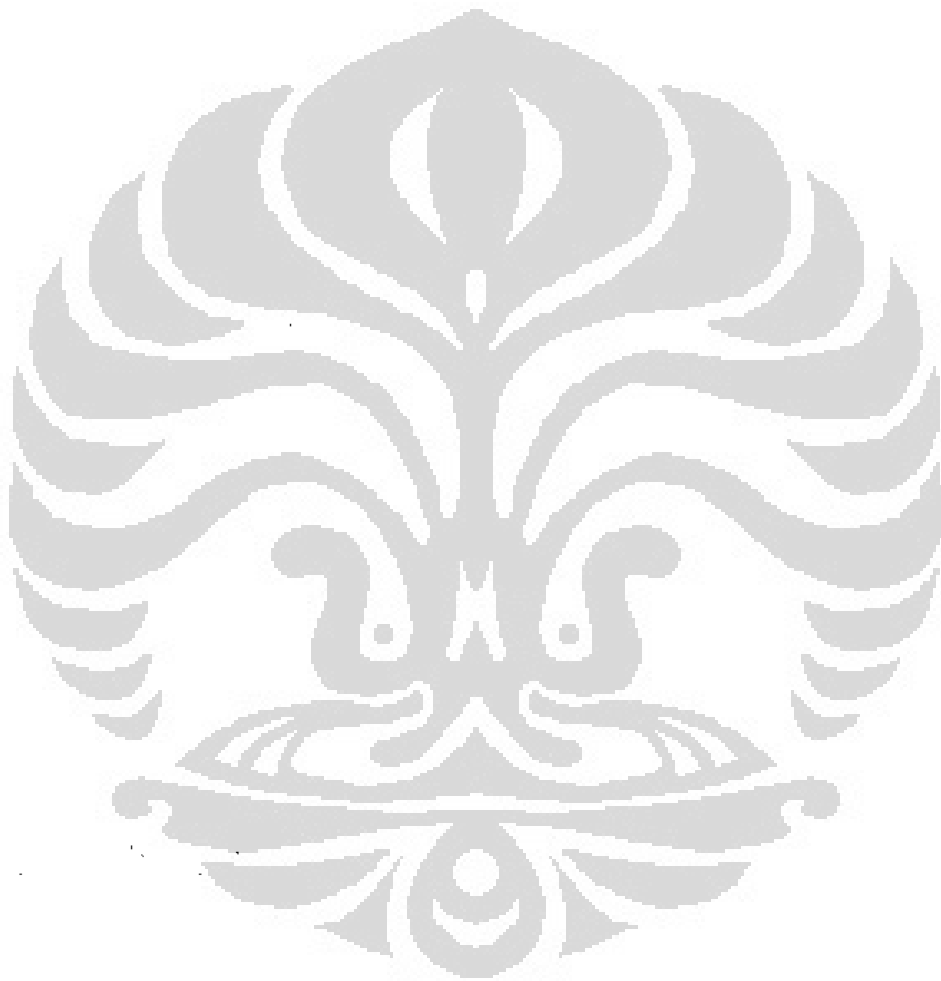


( Dr. Iwan Gardono Sujatmiko )

KO-PROMOTOR :



( Prof. Dr. der. Soz Gumilar R. Somantri )





## LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Bambang Wahyudi  
NPM : 890541003X  
Departemen : Sosiologi  
Judul Disertasi : **RESOLUSI KONFLIK PASCA MOU HELSINKI :  
STUDI KASUS LANGSA PROVINSI ACEH**

**DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :**

**PROMOTOR**



( Dr. Iwan Gardono Sujatmiko )

**KO-PROMOTOR**

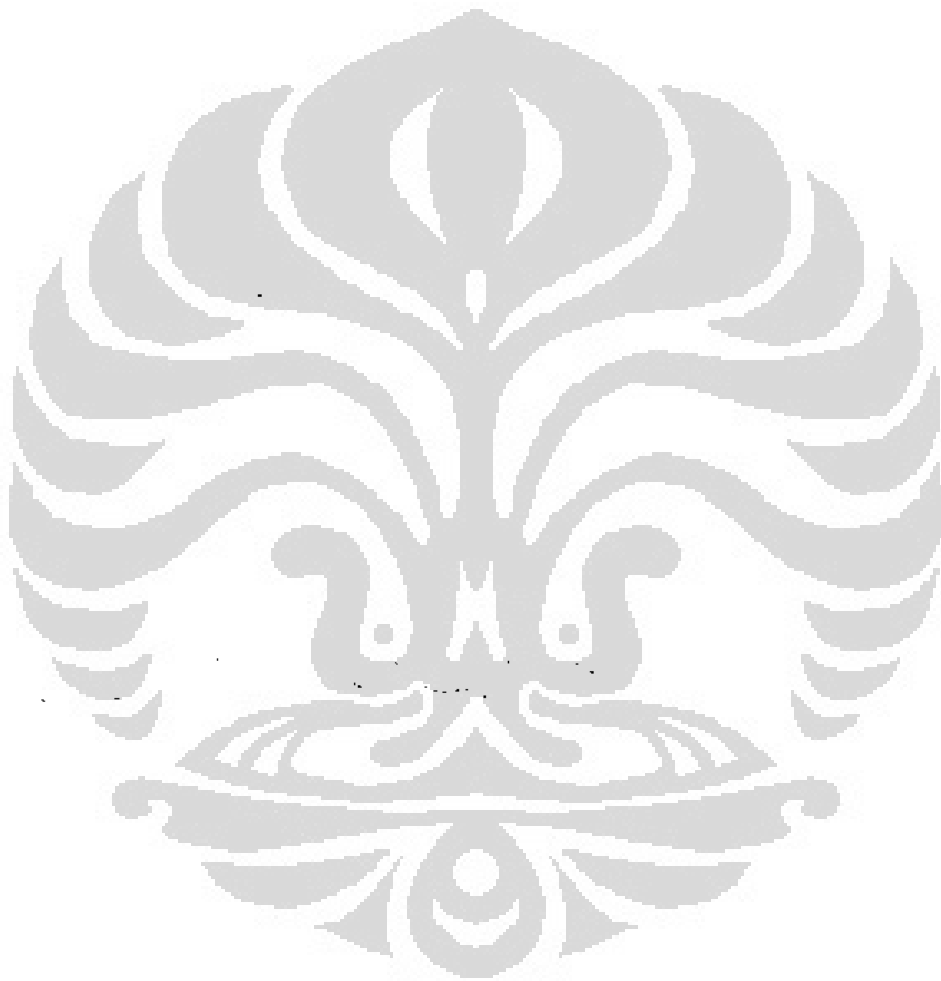


( Prof. Dr. der. Soz Gumilar R. Somantri )

**MENGETAHUI :**  
**KETUA PROGRAM PASCA SARJANA**  
**DEPARTEMEN SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**



( Lugina Setyawati, Ph.D )

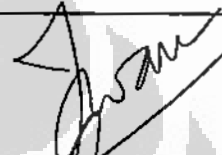
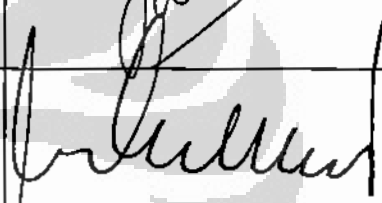

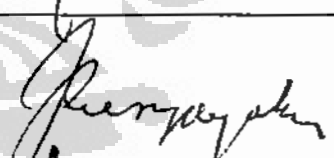

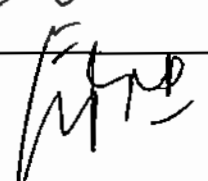
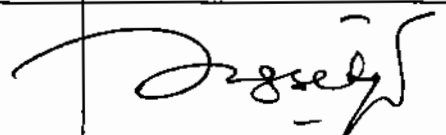


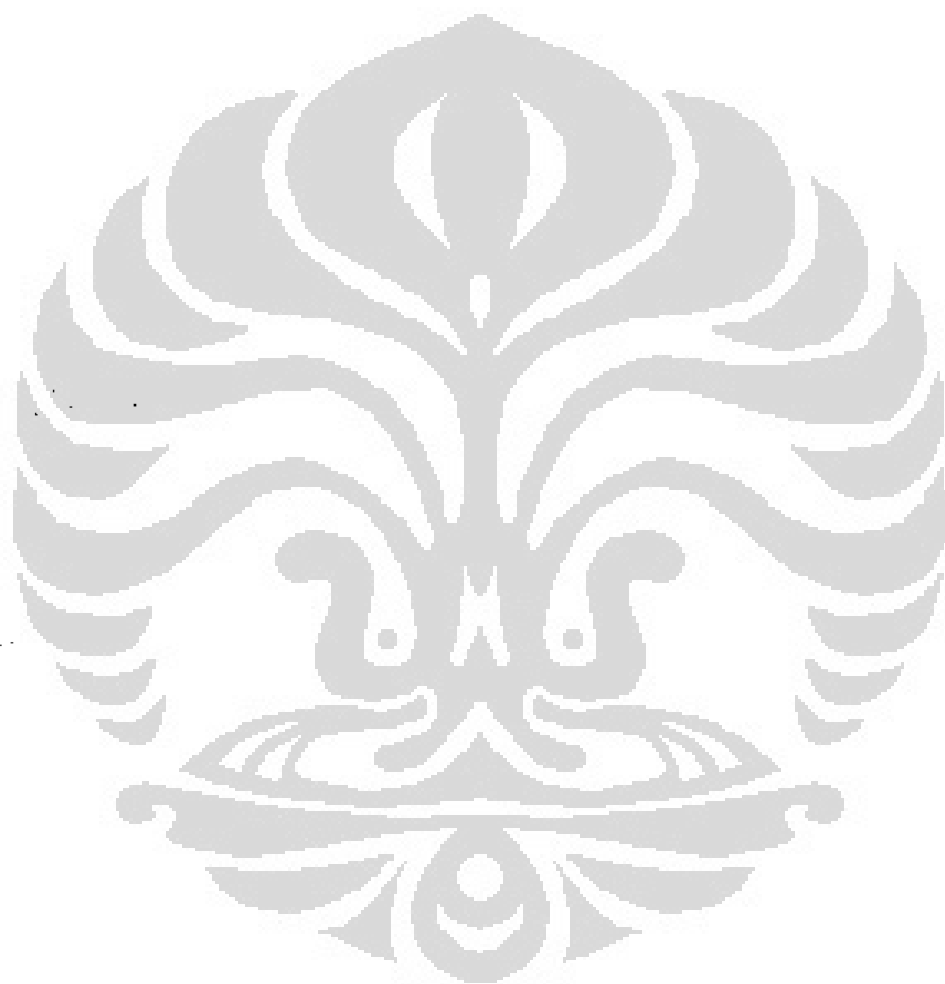
Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Bambang Wahyudi  
NPM : 890541003X  
Departemen : Sosiologi  
Judul Disertasi : **RESOLUSI KONFLIK PASCA MOU HELSINKI :  
STUDI KASUS LANGSA PROVINSI ACEH**

Telaah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Sosiologi pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

### TIM PENGUJI

Promotor	Dr. Iwan Gardono Sujatmiko	
Ko. Promotor	Prof. Dr. der.Soz Gumilar R. Somantri	
<b>Tim Penguji :</b>		
Ketua Sidang	Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono	
Anggota	Dr. Rusydi Syahra	
Anggota	Hanneman Samuel, Ph.D	
Anggota	Dr. Linda Darmayanti, MT.	
Anggota	Lugina Setyawati, Ph.D	



## KATA PENGANTAR

“Ketuklah pintu maka akan dibuka, dan mintalah maka akan diberi”. Demikian besar keagungan Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Suatu keharusan yang membahagiakan bagi saya untuk mengucapkan puji syukur yang mendalam dan terima kasih pada Allah SWT. Penulisan disertasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor Sosiologi, pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Namun demikian, saya menyadari bahwa suatu karya tidak akan mungkin selesai dan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Iwan Gardono Sujatmiko dan Bapak Prof. Dr. der.Soz Gumilar R. Somantri. Sebagai promotor dan ko-promotor, yang dengan empati luar biasa telah membimbing saya dengan sabar, memberikan dorongan semangat dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi pemahaman saya mengenai sosiologi khususnya terkait penulisan disertasi.
2. Kepada seluruh dosen dan Sivitas Akademik di Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia, terutama Dr. Iwan Gardono Sujatmiko, Prof. Dr. der.Soz Gumilar R. Somantri, Fransisca SSE. Seda, Ph.D, Lugina Setyawati, Ph.D, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Prof. Dr. Robet Lawang, Dr. Linda Darmayanti, MT., Prof. Kamanto Sunarto, SH., Ph.D, Dr. Rachman Achwan, Hanneman Samuel, Ph.D yang telah berkenan menjadi penguji internal bagi disertasi ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mbak Lidya, Mas Santoso dan Mbak Widi, semuanya telah membantu dalam penyelesaian semua proses ini. Tak lupa kepada Prof. Dr. Manasse Malo (Alm) ucapan terima kasih dan doa semoga arwah beliau mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.
3. Kepada Bapak Dr. Rusydi Syahra dan Bapak Julian Aldrin Pasha, MA., Ph.D. saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan membaca, mengoreksi dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan disertasi ini, atas kesediaan beliau sebagai penguji eksternal dan sebagai ketua sidang.
4. Kepada Yth. Mayjen TNI Syafnil Armen, S.IP, SH., M.Sc, Bapak Dirjen Kuathan Dephan RI Mayjen TNI Suryadi, M.Sc, Bapak Marsda TNI Teuku Djohan Basyar, S.IP, MM., Bapak Marsda TNI (Purn) Yan Simanjuntak, Bapak Laksma TNI Eddy T. Siswono, Bapak Brigjen TNI Amirudin Usman, S.IP., yang telah membantu dan mengizinkan saya dalam penyelesaian studi, saya ucapkan terima kasih, juga pada Bapak Rochim, Bapak Hari, Ibu Ani dan Staff, juga saya ucapkan terima kasih.
5. Kepada teman-teman seperjuangan “Komunitas Warung Bawah Pohon” di Pascasarjana Sosiologi Angkatan 2005 : Mbak Dr. Erna Karim, Mbak Dr. Limsing Maij, Mbak Cdt. Dr. Mara, Mas Dr. Arief Mudatsir Mandan, Mas Dr. Kharisma Priyo Nugroho, Mas Cdt. Dr. Handry Panemanan, Mas Cdt. Dr. Supo Raharjo, Mas Dr. Miftahuddin dan Mas Cdt. Dr. Chairul Fuad terima kasih atas support, bantuan dan kerjasamanya selama ini. Terima kasih juga saya sampaikan pada Mas Cdt. Dr. Priyono B. Sumbogo, Mbak Cdt. Dr. Ciek Yuliati, Mas Dr.

Kemal Dharmawan, Bang Willem Banguru, SH., M.Si, Bang Ltk. Cku. Amir Mauludin, SE., SH, Mas Ltk. Arh. Erwin, S.IP, Bapak H. Salam, Mas Ir. Joko Pramono, Mas Sidik Prabowo, S.Sos, MM., Mas Drs. Herinto Sidik, M.Si, Mas DR. Ing. Fila Loa, Mas Ir. Julius Torino, Mas M. Zaenal, SH., MH., Mas Rudy Rosadi, SE, MM., dan khususnya Gusti yang telah memberikan support dan membantu dalam penyelesaian studi.

6. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga saya dari Ngandagan dan Kebakdemang. Kepada Ayahanda Bapak Iman Djarkasih (Alm) dan Ibu Sumiyati (Alm) yang telah mengasahi, mendidik, mengasuh dan memacu agar saya tetap sabar dan tabah menjalani hidup. Kami semua tak henti-hentinya berdoa semoga Bapak, Ibu, Adikku Agus (Alm), Aris (Alm), Eni (Alm) dan Bapak Samadi Poerwodiono (Alm) mendapat tempat terbaik disisinya. Saya yakin Bapak, Ibu, Pak Samadi dan Adik-adikku (Alm) sekarang sedang tersenyum di surga melihat keluarga yang ditinggalkannya.
7. Secara khusus terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada istri dan anak-anak tercinta, Mbak Nanik, SH., Mas Aldy, Mbak Nadia. Juga terima kasih pada Ibu Suminah, Mbak Endang, Mas Kulup, Andi, Sapto, Arum dan semua keluarga (banyak banget). Semuanya telah membantu, mendoakan, merasakan dan saling mengasahi dan pengertian yang mendalam memberikan support khusus bagi saya untuk menyelesaikan studi ini.

Budi baik akan dibalas dengan kebaikan pula, demikian juga kebaikan dari semua pihak yang telah saya terima, hanya dapat dipersembahkan kembali kehadirat Allah SWT, sebab hanya Allah SWT yang dapat membalas semuanya itu sesuai dengan bobot dan kebutuhannya masing-masing. Terlepas dari semua kekurangan yang ada, saya berharap semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Amien.

Jakarta, Juli 2009  
Bambang W.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Wahyudi  
NPM : 890541003X  
Program Studi : Scsiologi  
Departemen : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Resolusi Konflik Pasca MoU Helsinki : Studi Kasus Langsa Provinsi Aceh"

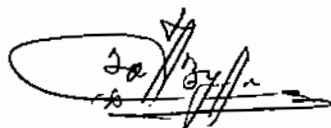
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan merawat tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

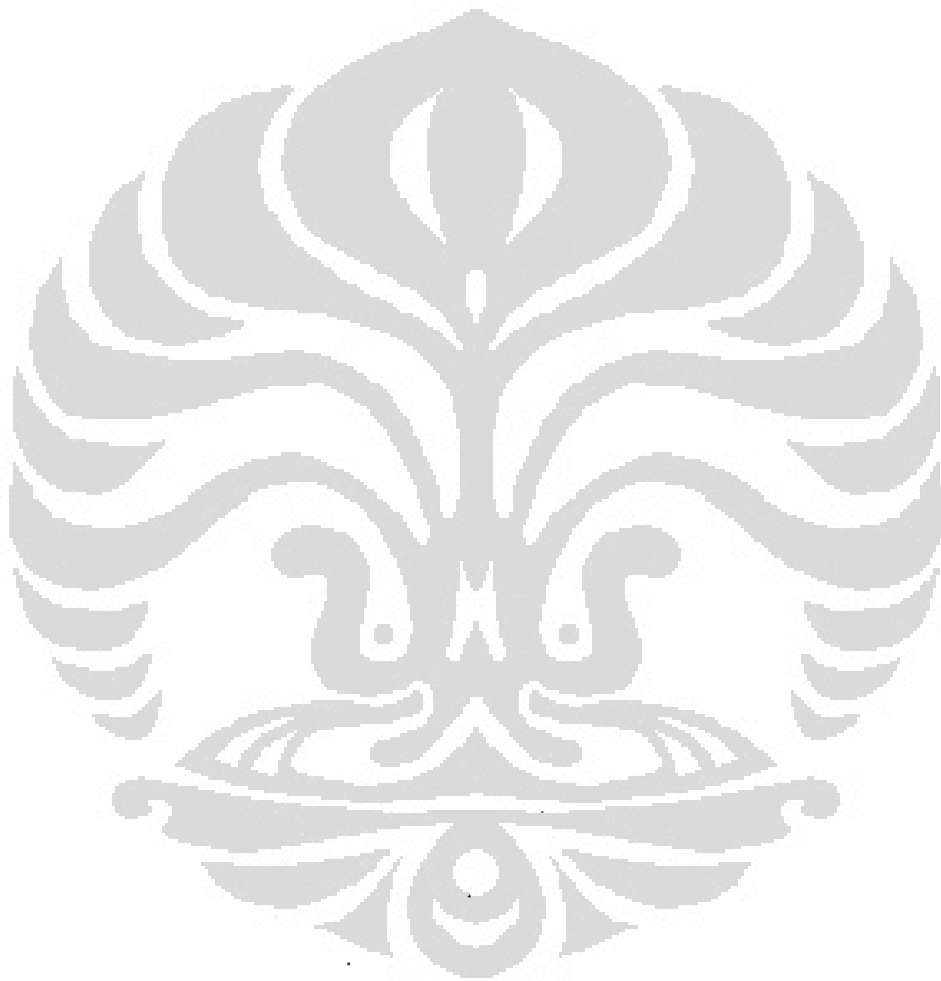
Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 1 Juli 2009

Yang menyatakan



( Bambang Wahyudi )





## ABSTRAK

Nama : Bambang Wahyudi  
Program Studi : Sosiologi  
Judul : RESOLUSI KONFLIK PASCA MoU HELSINKI :  
Studi Kasus Langsa Propinsi Aceh

Berbagai literatur mutakhir mengenai resolusi konflik menunjukkan bahwa persoalan konflik tidak hanya mengenai bagaimana mengakhiri konflik bersenjata (perang), namun juga mengenai hal bagaimana membangun perdamaian pasca penyelesaian perang. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran bagaimana konflik di Aceh mentransformasikan dirinya, kemudian memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pihak-pihak yang saling bermusuhan melakukan rekonsiliasi dan mentransformasikan pertentangan mereka ke dalam kegiatan tanpa kekerasan yang diikuti dengan tindakan pemeliharaan perdamaian yang lebih luas, yang meliputi usaha-usaha untuk mentransformasikan ketidakadilan dan menjembatani posisi yang berseberangan.

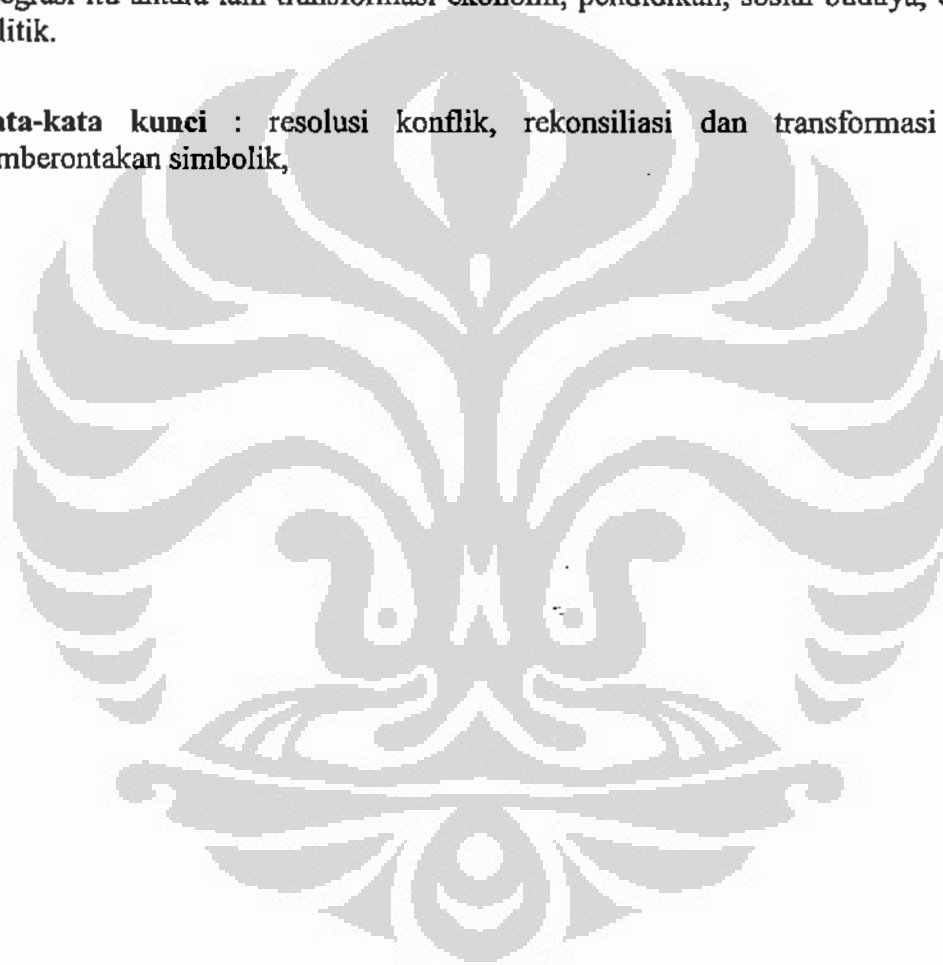
Data di lapangan menunjukkan bahwa cakupan resolusi konflik adalah lebih luas ketimbang upaya pengakhiran konflik, dan dengan cara pandang demikian, kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM adalah sebatas sebuah pengakhiran konflik bersenjata antara kedua belah pihak namun belum tentu pengakhiran konflik antara pihak-pihak yang bertikai di Aceh. Apalagi membangun perdamaian, mentransformasikan keadilan dan menjembatani posisi yang berseberangan. Telah terjadi pergeseran konflik di Aceh, dari konflik yang bersifat vertikal antara "Aceh" dengan "Jakarta", ke konflik horizontal antar masyarakat Aceh sendiri (Aceh GAM dengan Aceh RI). Pergeseran ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki masih menyisakan permasalahan integrasi sosial yang potensial untuk menjadi bahan bakar konflik berikutnya dan mengancam integrasi nasional. Pergeseran konflik juga bisa dilihat dari cara pandang masing-masing pihak yang bertikai. Dari sisi GAM, perjuangan GAM belumlah dianggap selesai dengan konsensi-konsensi dalam MoU Helsinki. Kesejahteraan rakyat Aceh (GAM menyebutnya "bangsa Aceh") dan hak-hak politik masih perlu diperjuangkan. Sedangkan dari pihak Jakarta dan masyarakat Aceh RI melihat perjuangan GAM ini sebagai pemberontakan dan pemberontakan ini telah mengalami transformasi, dari pemberontakan bersenjata ke pemberontakan simbolik.

Data menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang komprehensif masih perlu waktu karena hambatan-hambatan sebagai berikut : sentimen etnis dan kedalaman konflik (dikotomi Aceh dan Jawa), perbedaan kepentingan dan harapan warga Aceh terhadap perdamaian dan perubahan struktur aktor konflik serta potensi konflik laten (situasi anomie). Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan peran serta warga Aceh secara luas termasuk unsur-unsur diluar GAM karena aktor-aktor konflik juga telah berubah, bukan antar "siapa" namun bisa meluas menjadi antar "situasi". Langkah-langkah yang disarankan untuk menuju penyelesaian konflik yang komprehensif menuju perdamaian positif adalah fokus ke rekonsiliasi (fluiditas) dan transformasi konflik,

dalam hal ini adalah transformasi konteks, transformasi struktural, transformasi aktor, transformasi persoalan, transformasi kelompok dan personal.

Resolusi konflik secara sosiologis adalah bagaimana mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial yakni terpenuhinya secara berkesinambungan penghidupan dan berbagai kebutuhan hidup sebagian besar warga masyarakat serta terbukanya peluang bagi tiap warga masyarakat untuk mengaktualisasikan diri masing-masing. Perubahan kemasyarakatan dan pembangunan sosial-ekonomi serta politik merupakan katalisator dan lingkungan pemampu (*enabling environment*) untuk rekonsiliasi dan transformasi konflik. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya integrasi antara pembangunan perdamaian (kesejahteraan) di Aceh melalui upaya rekonsiliasi dan transformasi konflik (*peace and development*). Langkah-langkah integrasi itu antara lain transformasi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan akses politik.

**Kata-kata kunci** : resolusi konflik, rekonsiliasi dan transformasi konflik, pemberontakan simbolik,



## ABSTRACT

Nama : Bambang Wahyudi  
Program Studi : Sosiologi  
Judul : RESOLUSI KONFLIK PASCA MoU HELSINKI :  
Studi Kasus Langsa Propinsi Aceh

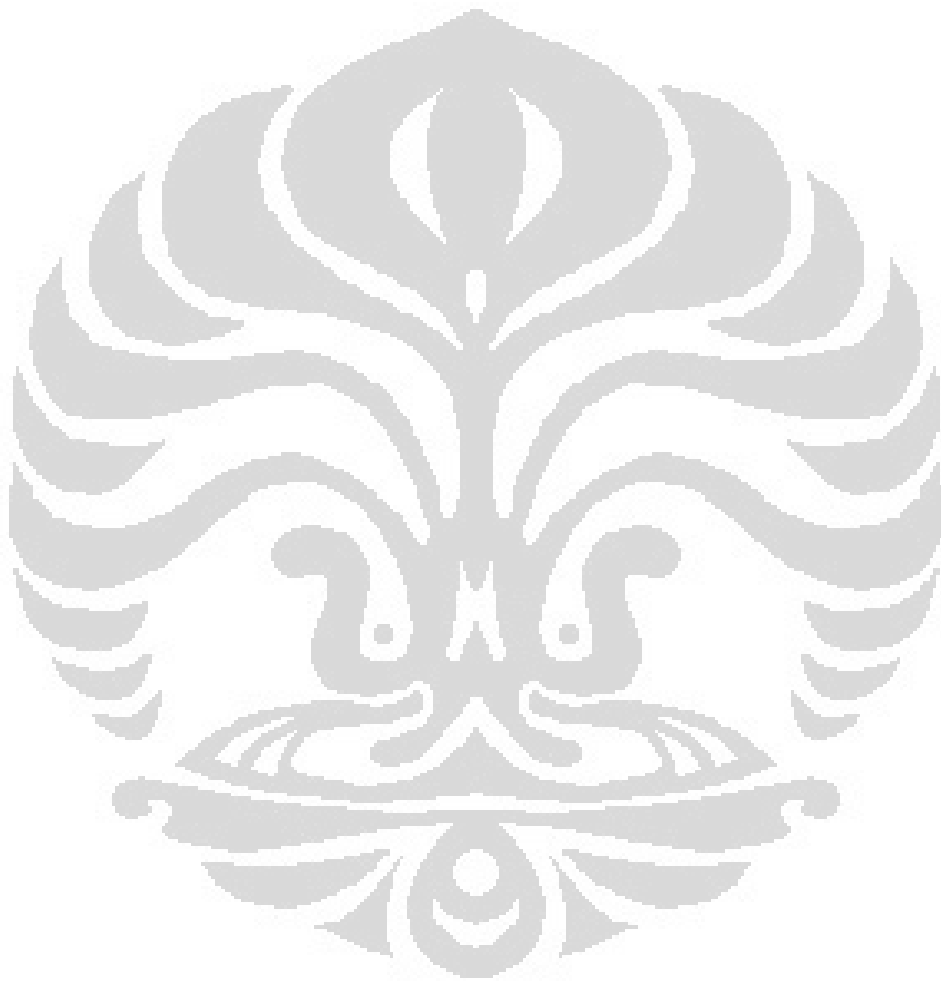
Some text-books in conflict resolution have shown that conflict-related problems are not only concerning with how to stop violence, but also dealing with sustaining peace through development. This research is aimed at a description of conflict transformation in Aceh and to develop a framework for the actors to transform their conflict into a non-violence effort and addressing the root of the conflict that created injustice in the society.

Field data confirmed that the scope of conflict resolution is more than an effort to end war. With this regard, peace agreement between GAM and Government of Indonesia could be seen as an agreement to end violence but not to solve the conflict's problem. Based on the analysis, there is a shift of the conflict in Aceh, from a vertical conflict (between Jakarta and GAM) to a horizontal conflict between community groups. This shift has proven that social integration related problems are beyond MoU Helsinki's imagination. A shift also can be seen from each stand point; GAM believes that their holy mission has not completed yet although MoU Helsinki gives significant benefits to GAM. Welfare of the people of Aceh and their political rights are not fully met. In the other hand, Jakarta still considers GAM is a separatist, rebellion, and GAM has changed their strategy to a symbolic rebellion.

Based on field data, a comprehensive conflict resolution in Aceh is still far away because of some barriers such as ethnic sentiment, fragmented expectations and interests among community groups, and changes in the structure and actors of the conflicts. A comprehensive conflict resolution requires collective efforts from non-GAM groups as well because the conflict is merely between Jakarta and GAM but also between "different situation". Suggested actions for this is focusing on conflict transformation i.e. transformation of context, structural transformation, actors transformation, transformation of issues, and transformation of individual and groups.

Societal change and socio-economic development is the catalyst and an enabling environment for conflict transformation. This research recommends that an integration between peace building and development (peace through development) is a central issue in addition to economic transformation, education, socio-culture development, and access to political structure.

**Key words:** conflict resolution, conflict transformation, social inetegration, symbolic rebellion, *peace and development*



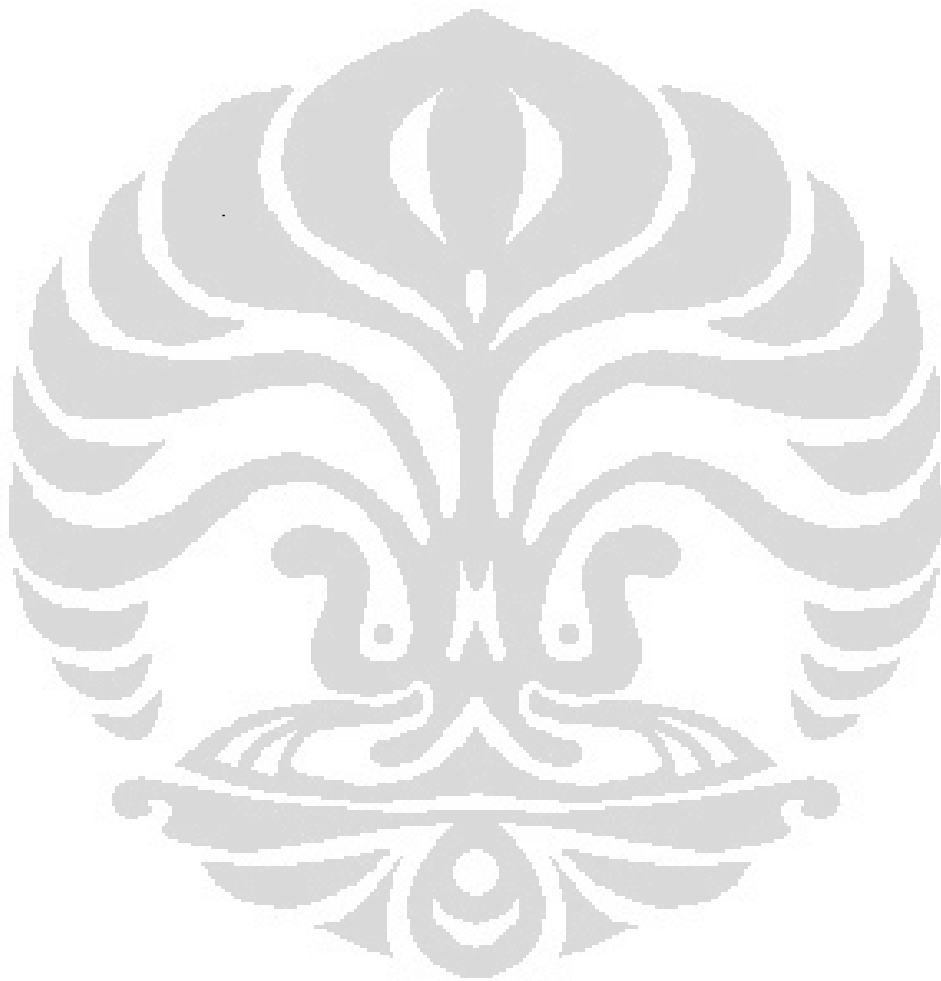
## DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing Disertasi.....	iii
Lembar Pengesahan Disertasi .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	viii
Abstrak .....	ix
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan Dan Pertanyaan Penelitian .....	7
B.1. Permasalahan .....	7
B.2. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritik .....	24
G. Metodologi Penelitian .....	36
G.1. Pendekatan Penelitian .....	36
G.2. Jenis Penelitian .....	37
G.3. Teknik Pengumpulan Data .....	39
G.4. Lokasi Dan Periodesasi Penelitian .....	42
G.5. Analisa Data .....	43
H. Proses Penelitian .....	44
I. Sistematika Penulisan .....	45
<b>BAB II SEJARAH KONFLIK ACEH</b>	
A. Aceh .....	46
B. Penyebab Konflik Aceh .....	49
C. Lingkaran Kekerasan Dan Korban Konflik Aceh .....	55
D. Penanganan Konflik Aceh .....	67
<b>BAB III MASYARAKAT DAN KONFLIK DI LANGSA</b>	
A. Masyarakat Kota Langsa .....	84
A.1. Daerah Tingkat II (Kota) Langsa .....	84
A.2. Struktur Sosial Masyarakat .....	90
A.2.1. Karakteristik Masyarakat .....	90
A.2.2. Struktur Kelembagaan .....	94
A.3. Perkembangan Budaya .....	99
A.4. Ekonomi .....	101
B. Perkembangan Konflik Pasca MoU Helsinki .....	105

<b>BAB IV</b>	<b>DINAMIKA KONFLIK</b>	
	A. Konflik Berlanjut Di Langsa .....	119
	A.1. Sentimen Etnis Dan Kedalaman Konflik .....	119
	A.2. Perbedaan Persepsi Masyarakat Terhadap Perdamaian....	124
	A.3. Perubahan Struktur Konflik Dan Potensi Konflik Laten .....	130
	A.3.1. Perubahan Struktur Konflik .....	130
	A.3.2. Potensi Konflik Laten .....	137
	A.4. Pemberontakan Symbolis .....	141
	B. Perkembangan Konflik Aceh .....	147
<b>BAB V</b>	<b>RESOLUSI KONFLIK</b>	
	A. Pendahuluan .....	153
	A.1. Aceh GAM (GAM / KPA) .....	156
	A.2. Aceh RI (FPSG / PETA) .....	161
	B. Resolusi Konflik Nir Kekerasan .....	149
	C. Rekonsiliasi Konflik .....	173
	D. Transformasi Konflik Menurut Komunitas Non GAM .....	182
	D.1. Manfaat Transformasi Konflik .....	182
	D.2. Saran Komunitas Untuk Transformasi Konflik .....	184
	D.3. Saran Untuk Kelembagaan Dalam Transformasi Konflik ....	187
	E. Analisis .....	190
	E.1. Konflik Aceh GAM dengan Aceh RI .....	190
	E.2. Hambatan Resolusi Konflik .....	192
	E.3. Resolusi Konflik .....	204
	E.3.1. Mediasi .....	205
	E.3.2. Rekonsiliasi Konflik .....	206
	E.3.3. Transformasi Konflik .....	208
<b>BAB VI</b>	<b>IMPLIKASI TEORITIS DAN KEBIJAKAN</b>	
	A. Implikasi Teoritis .....	216
	A.1. Pendahuluan .....	216
	A.2. Rekonsiliasi Konflik .....	220
	A.3. Bagaimana Konflik di Langsa (Aceh) Mentrasformasikan Dirinya .....	222
	A.3.1. Transformasi Konteks .....	225
	A.3.2. Transformasi Struktur .....	226
	A.3.3. Transformasi Aktor .....	227
	A.3.4. Transformasi Persoalan .....	228
	A.3.5. Transformasi Kelompok Dan Personal .....	229
	B. Implikasi Kebijakan .....	241
	B.1. Tantangan Langsa (+ Aceh) Kedepan .....	241
	B.2. Implikasi Kebijakan .....	242
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	248
	B. Rekomendasi .....	251
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>255</b>
	<b>CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE)</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Pola Rekonsiliasi Konflik Di Indonesia .....	15
Tabel 2	: Daftar Informan .....	39
Tabel 3	: Perbandingan Situasi Kriminalitas Sebelum dan Pasca MoU Helsinki.....	58
Tabel 4	: Rekapitulasi Kejadian Kekerasan Menonjol Di Provinsi Aceh Desember 2002 s/d November 2003 .....	63
Tabel 5	: Pengungsi Asal Aceh Yang Berada Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 & 2004 (PASKAL NO 17 TH 2005) .....	64
Tabel 6	: Beberapa Ketetapan Dan Kesepakatan MoU Helsinki .....	80
Tabel 7	: Prosentase Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh .....	104
Tabel 8	: Nama Partai, DPRK Langsa .....	105
Tabel 9	: Daftar Nama Penerima Bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi Kategori Cacat Dan Sakit Korban Konflik BRA Kota Langsa Tahun 2008 .....	107
Tabel 10	: Daftar Nama-Nama Korban Konflik Penerima Bantuan Rumah Dibakar/Dirusak Total Kota Langsa Tahun Anggaran 2008 .....	108
Tabel 11	: Perbandingan Kekuatan/Dukungan Terhadap KPA (Parlok) Dengan PETA (Parnas) Di Kota Langsa.....	116
Tabel 12	: Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 .....	117
Tabel 13	: Suara Pemilihan Langsung Walikota Dan Wakil Walikota Langsa .	118
Tabel 14	: Jumlah Anggota FORKAB Di Provinsi Aceh .....	135
Tabel 15	: Kelompok Aceh RI Di Langsa.....	136
Tabel 16	: Aktor-Aktor Dalam Konflik Aceh .....	155
Tabel 17	: Kategori Dan Jenis GAM Di Aceh.....	159
Tabel 18	: Pekerjaan Aktivitas GAM Sebelum Bergabung Dengan GAM .....	160
Tabel 19	: Front Perlawanan Separatis GAM Di Provinsi Aceh .....	166
Tabel 20	: Perbedaan Antara Damai Positif Dan Damai Negatif .....	195
Tabel 21	: Resolusi Konflik Aceh GAM Dengan Aceh RI .....	215
Tabel 22	: Relevansi Teori Dengan Dinamika Di Lapangan .....	231
Tabel 23	: Implikasi Kebijakan.....	246





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan baru di dalam proses globalisasi diantaranya berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, perubahan politik, ekonomi dan sosial, selanjutnya diikuti dengan munculnya berbagai konflik.<sup>1</sup> Miall (2002 : 3), meyakini bahwa “runtuhnya Uni Soviet mengakhiri periode perang panjang dimana konflik internasional tunggal mendominasi sistem internasional. Sebaliknya konflik internal seperti konflik etnis, konflik separatis dan konflik perebutan kekuasaan pada banyak negara, ternyata berubah menjadi suatu hal yang lazim”.

Jones berpendapat bahwa, konflik nasionalis dan konflik etnis meliputi sekitar 70% dibandingkan dengan konflik kelas dan konflik-konflik lainnya. Nasionalisme memang merupakan faktor penyebab perang yang utama dan paling banyak menimbulkan pertempuran berdarah. Terdapat tiga macam konflik dalam hubungan internasional, yaitu :

“(1) konflik kelas yang meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan eksploitasi ekonomi, (2) konflik nasionalis yang meliputi perselisihan antar kelompok etnis, rasial, dan kelompok berbahasa sama yang merasa dirinya sebagai bangsa, (3) konflik lain yang penyebab utamanya bukan merupakan bentrokan antar kelompok kelas maupun identitas”. (Jones; 1982 : 366)

Michael (1993 : 5), menyimpulkan bahwa berdasarkan tiga macam konflik tersebut, yang menjadi permasalahan serius dunia internasional sekarang adalah konflik nasionalis, yaitu :

“Konflik yang terjadi karena munculnya semangat nasionalisme yang kemudian memicu gerakan separatisme serta keinginan menentukan nasib sendiri (*self determination*) dengan cara membentuk negara-negara baru berdasarkan persoalan sosial dan budaya, persamaan primordial seperti latar belakang ras, etnis dan

---

<sup>1</sup> Menurut Baskoro, konflik memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi pertentangan atau bentrokan persaingan atau gangguan oleh kelompok secara fisik atau benturan antar kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan, atau pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak. Semua makna konflik tersebut tampaknya pada waktu reformasi cukup ramai terjadi di Indonesia (Baskoro, 2002 : 6).

agama. Munculnya rasa nasionalisme juga disebabkan karena adanya perselisihan kepentingan politik dan wilayah”.

Dampak dari konflik nasionalis yang terus berlanjut, maka akan menimbulkan konflik etnis atau perang sipil antara wilayah yang ingin memisahkan diri dengan pemerintahan yang sebenarnya, sebagaimana terjadi di Indonesia, seperti: di Papua, Maluku, Aceh, serta Timor-Timur yang pada akhirnya berhasil lepas/merdeka dari NKRI<sup>2</sup>.

Indonesia pasca Orde Baru, ditandai dengan adanya perubahan wacana politik nasional. Mengakibatkan konflik dengan berbagai tindakan kekerasan (pergolakan) yang menimbulkan korban jiwa, harta benda serta rusaknya fasilitas umum. Kekerasan dalam negeri sekarang sudah menjadi fokus utama penelitian konflik dan upaya-upaya mencegah konflik dimana korbannya lebih besar daripada jumlah korban perang antar negara. Menurut penelitian World Bank tentang 101 konflik bersenjata di seluruh dunia antara tahun 1989 dan tahun 1996, 95 dari konflik bersenjata itu terjadi di dalam negeri. (Kivimaki, 2005 : 117)

Wahyudi (2005 : 2) berpendapat bahwa, reformasi membawa iklim kebebasan bagi rakyat Aceh, dan dimanfaatkan secara efektif oleh gerakan separatis untuk mengobarkan semangat merdeka, sehingga situasi yang terjadi serba liar dan penuh ketidakpastian. Pemerintah sipil lumpuh, hukum dan perangkatnya tidak efektif, ekonomi macet, dan kondisi carut marut seperti itu seolah-olah dibiarkan terus berlanjut.

Masalah kesejahteraan dan keadilan, bersifat ekonomis kemudian melebar menjadi persoalan politik mulai dari yang paling lunak berupa minta perhatian lebih besar dari Pemerintah Pusat, yang moderat berupa otonomi luas, sedang yang paling ekstrim berupa tindakan kekerasan dan aspirasi merdeka pisah dari NKRI.

---

<sup>2</sup> Menurut Nasrul Azwar (2007 : 2), Indonesia sebagai bangsa yang punya keberagaman etnis, perwujudan nasionalismenya tidak sekedar politik dan etnisitas, tetapi juga unsur agama. Islam menjadi supra identity dan fokus kesetiaan yang mengatasi identitas dan kesetiaan etnisitas. Justru Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Aceh, tidak bisa mempertahankan kesetiannya kepada Bangsa Indonesia. Meski Aceh sudah diberi kebebasan memberlakukan syariat Islam, gerakan separatisme tetap berlangsung. Dalam konteks inilah, saat terjadi gerakan separatisme di beberapa daerah, maka yang diperlukan adalah penciptaan keadilan (sosial, ekonomi dan politik) kepada seluruh masyarakat.

Isu menguatnya separatisme<sup>3</sup> dimulai dari pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh sekelompok simpatisan RMS pada peringatan Hari Keluarga Nasional di Lapangan Merdeka Ambon. Pembentangan bendera Benang Raja RMS, bersamaan pentas tarian Cakalele dalam acara tersebut, pengibaran bendera-bendera bintang kejora di Papua dan kecenderungan masih dipakainya atribut GAM di Aceh. Gubernur Lemhanas, Muladi mengatakan bahwa :

“Keadilan sosial yang belum tercapai akan menjadi bibit separatisme sedangkan daerah yang kaya akan sumber daya akan berfikir tentang negara federal atau merdeka. Daerah yang telah memiliki bibit separatisme itu adalah Aceh, Papua dan Maluku. Gerakan semacam itu berbahaya bila punya jaringan internasional, dan sumber daya yang handal serta organisasi yang hirarkhis. Di Aceh masih relevan untuk diperhatikan, karena eks GAM belum merasa mantap dengan undang-undang Pemerintah Aceh dan Partai Lokal”. (Bisnis Indonesia, 11 Juli 2007)

Sulaeman (2005 : 287), mengatakan bahwa, melihat proses lepasnya Timor-Timur dari NKRI (merdeka), setidaknya dapat dijadikan pelajaran berharga dalam membandingkan dengan persoalan dan penyelesaian masalah Aceh. Betapa segelintir pihak menginginkan masalah Aceh, dipecahkan dengan cara seperti kasus Timor Timur yaitu melalui jajak pendapat lokal. Tujuannya adalah wilayah Aceh lepas atau merdeka dari Indonesia.<sup>4</sup>

Sementara konflik di Aceh, sangat tidak mudah diselesaikan secara tuntas, karena permasalahannya semakin kompleks, diantaranya terkait masalah dendam, kesejahteraan, politik, dan ekonomi. Masalah yang paling fundamental adalah keinginan “MERDEKA” lepas dari NKRI. Setiap masalah tersebut semula

<sup>3</sup> Isu separatisme meluas kembali, ketika para mantan gerilyawan GAM di Aceh mendeklarasikan partai lokal bernama GAM, yang menggunakan warna, lambang dan simbol-simbol GAM serta di pimpin oleh mantan panglima perang GAM, Muzakir Manaf.

<sup>4</sup> Menurut Huntington (1994 : 24) dan Joan N. Nelson, tiga strategi dasar tujuan penguasa atau kepentingan penguasa untuk mencapai kekuasaan yakni :

- (1) Beberapa bagian dari kelas-kelas atas dan menengah dapat dibujuk untuk menghentikan atau memperlunak oposisi mereka. Para pemimpin yang mempunyai latar belakang kelas menengah dapat menghimbau dengan prinsip-prinsip ideologi, semangat nasionalisme atau keperluan sendiri yang berpikiran maju dan berjangka panjang. Kadang-kadang mereka dapat tawar menawar untuk memperoleh dukungan, dengan menawarkan kompensasi kepada perorangan atau kelompok sebagai imbalan atau konsesi mereka.
- (2) Penindakan atau represif. Strategi ini memerlukan bantuan militer atau polisi yang dianggap loyal dan efisien.
- (3) Mobilisasi politis golongan-golongan yang tadinya bersikap pasif atau aktif tapi tidak efektif untuk mengimbangi atau mengatasi posisi”.

nampak berdiri sendiri-sendiri, namun pada tahapan selanjutnya saling jalin menjalin dan tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Rynen (2004 : 3), mengatakan, konflik kekerasan di Aceh telah mengakibatkan kehancuran dalam skala luas, yaitu kerusakan lingkungan yang parah, instabilitas regional, melonjaknya jumlah pengungsi yang terusir secara paksa dari tempat tinggalnya dan jumlah korban tinggi. Sedangkan Galtung (1996 : 10), pandangannya tentang konflik adalah sebagai berikut :

“Konflik dipahami sebagai sebuah proses dinamis yang didalamnya struktur, sikap dan perilaku selalu berubah dan saling mempengaruhi. Sebuah struktur konflik yang tidak ditandai oleh sikap dan perilaku konflik yang kasat mata akan disebut sebagai konflik laten. Sikap mengacu kepada kesalahpahaman terhadap kelompok sendiri dan kelompok lawan. Sikap sering kali kali dipengaruhi oleh perasaan seperti ketakutan, kemarahan, dendam, dan rasa tidak suka. Perilaku sebagai komponen ketiga mencakup kerjasama atau sekumpulan gerakan, tampilan, dan tindakan yang menunjukkan kekariban dan permusuhan”.

Dampak dari konflik politik dan tindakan kekerasan yang terjadi di Aceh, diantaranya semakin meluasnya wilayah konflik. Munculnya kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan baru yang anti GAM di Aceh, setelah kekuatan GAM dan TNI POLRI. Kekuatan-kekuatan tersebut tadinya merupakan kekuatan moral, namun berkembang menjadi kekuatan yang mampu mengadakan perlawanan secara fisik dan menentukan.

Dinamika konflik Aceh jika dilihat dari pemikiran Magenda (1982:10), bahwa “kecenderungan diabaikannya tuntutan masyarakat lokal menyebabkan munculnya konflik politik, sehingga terjadi pembelahan yang tajam dan sukar untuk dipertemukan, misalnya pembelahan antara kaum santri dan Islam versus agama-agama lain, ada pula pembelahan antara Jawa dan luar Jawa, antara penduduk asli versus pendatang atau keturunan Cina, antara priyayi dan bangsawan dengan ulama dan orang biasa, antara pusat dan daerah”.

Bencana tsunami yang merenggut kurang lebih 130 ribu nyawa (jauh melampaui angka korban perang Aceh) telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika konflik Aceh, antara GAM dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan faktor “X” yang tidak diperhitungkan oleh pihak-pihak bertikai dan secara temporer dapat meredakan konflik, karena dapat mengetuk

nurani semua pihak untuk berdamai dan melahirkan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.

Pasca tsunami, Pemerintah Indonesia dan GAM menyetujui perjanjian damai di Helsinki dan membawa perubahan konflik di Aceh antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tidak lagi ditandai dengan kekerasan, namun lebih menunjukkan pada konflik nir kekerasan. Proses pembangunan di Aceh kembali berlanjut melalui rekonstruksi, rehabilitasi serta rekonsiliasi ke arah perdamaian positif dan mendapatkan dukungan dari internasional.

Berbagai reaksi dan analisis terhadap MoU Helsinki masih terus berkembang jika dilihat dalam kerangka konflik yang melibatkan tiga pihak, yaitu : Pemerintah Pusat, GAM dan Masyarakat Aceh Non GAM. Langkah yang ditempuh Pemerintah RI dan GAM, masih merupakan tahapan yang memerlukan tindak lanjut di tingkat implementasinya di lapangan. Dengan kata lain, masih dalam tataran penciptaan kesepakatan perdamaian (*peace making*).<sup>5</sup>

Kegagalan pelaksanaan kesepakatan antara Pemerintah RI dan GAM sudah seringkali terjadi, diantaranya kesepakatan bersama tentang jeda kemanusiaan untuk Aceh tanggal 12 Mei 2000 di Swis. Kesepakatan itu ternyata gagal menciptakan perdamaian yang langgeng di Bumi Aceh/ Serambi Mekah (Majalah Tempo, Januari 2003). Jika sebelum MoU Helsinki, konflik bersifat vertikal antara "Aceh" dan "Jakarta" maka sekarang konflik dapat bersifat horizontal antar masyarakat Aceh sendiri. Lebih tepatnya antara elit dan masyarakat bawah. Ketidakpuasan dapat berakumulasi dan potensial mengarah pada ketidakstabilan politik di Aceh sendiri. (Serambi, 25 November 2007)

Potensi konflik horizontal, yaitu adanya masalah pro dan kontra terhadap gerakan separatisme, sulitnya pembauran antara mantan GAM dengan kelompok masyarakat yang pernah disakiti dan menjadi korban konflik serta konflik internal

---

<sup>5</sup> Menurut Miall (2002 : 22-23), dari sudut pandang resolusi konflik, fase tersebut (*peace making*) merupakan tahapan termudah dari keseluruhan proses perdamaian dalam tahapan selanjutnya, tantangan terberat hanyalah bagaimana mengkompromisasikan perbedaan-perbedaan akibat sebuah kesepakatan yang dituangkan ke dalam perjanjian formal antara pihak yang bertikai. Sedangkan menurut Sotjipto (2004, 10), fenomena dari situasi yang berkembang dapat dimungkinkan adanya potensi munculnya konflik baru di bumi Aceh, karena persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan, bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

yang terjadi ditubuh GAM sendiri. Dalam perjanjian MoU Helsinki,<sup>6</sup> “integrasi nasional” telah dilaksanakan, namun belum pada tataran integrasi sosial. Setelah sekitar dua tahun implementasi MoU Helsinki, masih banyak terjadi benturan seperti reintegrasi dan kriminalitas dengan menggunakan senjata api hal tersebut terungkap dalam pertemuan para Ulama Aceh dengan Pangdam Iskandar Muda, pada tanggal 4 September 2007 di Banda Aceh. (Serambi, 5 September 2007)

Pasca MoU Helsinki, rasa aman dan nyaman sebagai landasan membangun saling percaya antara Pemerintah, GAM dan Masyarakat Aceh yang merasa aspirasinya belum terakomodir dalam perjanjian tersebut nampaknya belum sepenuhnya pulih, karena masih kuatnya prasangka bahwa kelompok yang satu akan mengkhianati kelompok lain, kuatnya dominasi dan intervensi kelompok pada perkembangan Aceh. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi arah proses perdamaian positif.<sup>7</sup>

Ju Lan (2005 : 196), berpendapat bahwa persoalan yang masih harus ditarik ke depan untuk dicarikan solusinya adalah :

“Walaupun saat ini MoU Helsinki sudah dianggap sebagai suatu cara penyelesaian konflik Aceh secara damai seperti yang diharapkan banyak orang Aceh dan Non Aceh, tetapi benarkah MoU itu satu-satunya model penyelesaian masalah Aceh? Hal ini penting ditanyakan terutama karena MoU tersebut sepertinya hanya merupakan perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM yang tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat Aceh lainnya, sehingga pertanyaan yang selalu bisa diajukan adalah apakah benar GAM bisa mempresentasikan seluruh masyarakat Aceh?”

Iwan Gardono Sujatniko, dalam artikelnya tentang “*Konflik Aceh dan MoU Helsinki*”, mengatakan bahwa “berbagai reaksi dan analisis terhadap MoU Helsinki hendaknya dilihat dalam kerangka konflik Aceh yang melibatkan tiga

<sup>6</sup> Lihat Nota Kesepahaman Antara Pemerintah RI dan GAM, para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Damai Positif adalah sebuah pola kerja sama dan perpaduan antara kelompok-kelompok besar manusia. Damai positif mengandaikan masyarakat berinteraksi dalam berbagai bentuk kerja sama, mengandaikan organisasi sosial terdiri dari berbagai ragam orang yang dengan sengaja bekerja sama dalam rangka masalah bagi semua. Ia mengandaikan sebuah sistem dimana tidak ada pemenang dan tidak ada pihak pecundang (Irfan, 2006 : 23). Sedangkan menurut Galtung (1998 : 10), Perdamaian positif adalah mengenai keadilan sosial melalui pemerataan kesempatan, distribusi kekuasaan dan sumber daya yang adil, perlindungan yang setara dan penegakan hukum yang tidak berpihak. Konsep perdamaian positif juga memperhatikan akar penyebab perang, kekerasan, dan usaha penuh kesadaran untuk membangun masyarakat yang merefleksikan komitmen-komitmennya.

pihak, Pemerintah Pusat, GAM, dan Masyarakat Aceh. Konflik bersenjata dan kekerasan antara Pemerintah Pusat dengan GAM telah berlangsung sejak tahun 1976, demikian pula antara GAM dengan Masyarakat Aceh”.

Konflik berkepanjangan di Aceh, dampaknya sangat dirasakan oleh Masyarakat Aceh khususnya yang Non GAM (Aceh RI), penyelesaian konflik Aceh masih merupakan tantangan sekaligus jalan yang harus ditempuh, melalui pendekatan resolusi konflik nir kekerasan dan transformasi konflik disesuaikan dengan dinamika lokal di Aceh.<sup>8</sup>

## **B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian**

### **B.1. Permasalahan**

Perkembangan Aceh, khususnya Pasca MoU Helsinki masih menjadi isu internasional, regional maupun nasional dan merupakan topik menarik, serta strategis untuk dikaji secara ilmiah melalui penelitian. Perspektif kemanusiaan dan sejauh mana perdamaian di Aceh dapat bertahan serta bagaimana menuju perdamaian positif. Disamping masyarakat Aceh diharapkan secara aktif ikut berperan positif dalam mewujudkan masa depan Aceh yang lebih baik.

Format dari konflik antara GAM dan Pemerintah serta Masyarakat Aceh Non GAM, lebih mudah pada suatu dikotomis konflik daripada pengintegrasian, atau rekonsiliasi. Integrasi sosial di Aceh masih memerlukan proses panjang dan perlu sinergi dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya, khususnya mereka yang berkonflik. Seharusnya keamanan dan keadilan bisa diupayakan melalui komitmen bersama (perdamaian positif) untuk diimplementasikan secara bertanggung jawab dalam rangka integrasi nasional dan integrasi sosial.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Resolusi konflik, rekonsiliasi sedang hangat diperbincangkan. Ada sejumlah pihak yang masih meragukan dengan perdamaian di Aceh, meski tidak mudah untuk menganalisis tentang hal ini. Namun, menuju damai abadi di Aceh harus menjadi semangat dan mendarah daging bagi semua *stake holder* Aceh khususnya dan semua pihak yang punya atensi terhadap perdamaian di Aceh, disisi lain hal tersebut menjadi penting bagi kedaulatan NKRI.

<sup>9</sup> Menurut Rozi (2006 : 329), peran negara dan kelemahan negara dalam resolusi konflik Aceh, diantaranya terkait perlucutan senjata, penegakan hukum, mengawal akuntabilitas dana intervensi kemanusiaan untuk tidak dikorupsi, membuat peran Negara yang baik dalam resolusi konflik cenderung belum mudah untuk dicapai. Sedangkan menurut Thomas (2002 : 89), negara yang tidak mampu menegakkan klaim mopolitiknya berada di ambang disintegrasi dan menghadapi ancaman perang saudara dan pembubaran suatu negara.

Dalam konflik Aceh, selain GAM juga muncul kelompok anti GAM, keadaan demikian menunjukkan adanya fenomena yang "*problematic*" atau "*paradoks*", dimana dalam setiap daerah konflik, ada gerakan separatisme, kemudian muncul gerakan anti separatisme. Alasan lain yang patut dikemukakan adalah masih kurangnya minat untuk menjadikan kelompok-kelompok yang pro pemerintahan pusat dan anti separatisme (Aceh RI) sebagai subyek penelitian.

Banyak pandangan yang dapat membuka wawasan serta wacana baru tentang konflik Aceh, dilihat dari sisi Pemerintah dan GAM, namun masih sedikit yang memberikan perhatian pada kelompok Masyarakat Aceh Non GAM. Tidak dipungkiri, bahwa berbagai pandangan dan perdebatan tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran penjelasan sementara sebelum dilakukan penelitian. Menurut peneliti, pengetahuan identitas tentang orang Aceh Non GAM, masih diperlukan, meskipun ada beberapa penelitian tentang konflik Aceh. Namun masih sedikit yang berkaitan dengan konflik antara GAM dengan Non GAM. Disamping solusi konflik melalui MoU Helsinki belum dapat menyelesaikan konflik, karena perdamaian positif masih pada tahapan perkembangan yang amat dini.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, dengan munculnya kelompok pro pada Pemerintahan Pusat (anti separatisme) menunjukkan adanya resistensi sosial untuk mengadakan perlawanan terhadap GAM, dan secara sosiologis dapat memberikan implikasi yang menarik bagi analisis empiris maupun teoritis untuk memahami akar permasalahan konflik Aceh dan usaha penyelesaiannya.

Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan dan komitmen perdamaian, sehingga upaya-upaya resolusi konflik di Aceh perlu keseriusan agar dapat memulihkan kondisi integrasi sosial masyarakat Aceh menuju perdamaian positif. Hal tersebut kemungkinan bisa jauh lebih kompleks dibandingkan dengan upaya-upaya pemulihan kerusuhan fisik, bangunan, dan infrastruktur.



## **B.2. Pertanyaan Penelitian**

Dari identifikasi permasalahan tersebut, selanjutnya dapat dikembangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa dalam konflik Aceh khususnya di Langsa, muncul kelompok-kelompok Aceh RI yang anti GAM?
2. Bagaimana masyarakat Langsa menjalani masa damai, termasuk pemahamannya atas perdamaian dan potensi konflik yang akan datang?
3. Bagaimana formulasi resolusi konflik yang dapat dikembangkan menuju perdamaian positif, agar dapat mencegah timbulnya konflik baru di Aceh khususnya Langsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan mengapa muncul kelompok-kelompok Aceh RI yang anti GAM.
2. Menjelaskan dan memahami persepsi masyarakat Langsa dalam menjalani masa damai, serta menemukan potensi konflik yang akan datang di Aceh khususnya Langsa.
3. Menemukan dan mengembangkan formulasi resolusi konflik menuju perdamaian positif agar dapat mencegah timbulnya konflik baru di Aceh khususnya Langsa.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang adanya potensi terhadap munculnya konflik yang bersifat horizontal di Aceh, kemudian dari hasil analisis dapat menemukan formulasi resolusi konflik yang dapat dikembangkan menuju perdamaian positif di Langsa (Aceh). Sehingga konsepsi yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah tentang rekonsiliasi konflik, transformasi konflik dan perdamaian positif.

Sedangkan pada tataran kebijakan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah maupun pihak lain yang berkompeten dalam penyelesaian konflik

Aceh melalui resolusi rekonsiliasi dan transformasi konflik dengan orientasi nir kekerasan.<sup>10</sup>

### **E. Tinjauan Pustaka**

Di Indonesia fenomena timbulnya pembelahan-pembelahan kelompok yang pro dan kontra dengan kekuasaan Pemerintah Pusat, belum bisa diselesaikan dan masih menimbulkan konflik berkelanjutan. Dikotomi masyarakat di daerah konflik, senantiasa mengikuti pihak-pihak yang berkonflik. Sebagaimana yang terjadi di Aceh antara kelompok pro NKRI (Aceh RI) dengan kelompok pro GAM (Aceh GAM). Timor Leste, bekas Provinsi ke 27 Indonesia, pernah terjadi antara kelompok pro kemerdekaan (Fretelin/Falintil) dengan kelompok pro integrasi (PPI), di Papua antara kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia Pendatang (GSMIP). Ambon Maluku ketika Presiden RI Dr. Bambang Susilo Yudhoyono membuka peringatan hari keluarga nasional telah terjadi pembentangan bendera benang raja RMS, bersamaan dengan pentas tarian cakalele yang dibawakan oleh para anggota separatis RMS. Kemudian muncul berbagai aksi demonstrasi anti separatisme RMS baik di Maluku maupun diluar Maluku. Meskipun masih sangat sedikit hal tersebut dijadikan tema atau subyek penelitian, namun dapat dilihat dari beberapa tulisan tentang fenomenanya, seperti di Sulawesi, Maluku, Irian, Tim-Tim dan Sumatera Barat.

Di Sulawesi, pemberontakan Andi Azis, ingin mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT) dan melepaskan diri dari Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS).<sup>11</sup> Dukungan rakyat Sulawesi terhadap Pemerintah Pusat, yakni mengadakan perlawanan terhadap gerakan separatis Andi Azis, diwujudkan dengan pembentukan GAPKI (Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia),

---

<sup>10</sup> Orientasi nir kekerasan, adalah sebuah tindakan sosio politik untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan fisik, dan biasa disebut dengan strategi nir kekerasan.

<sup>11</sup> Buku "Penumpasan Pemberontakan Separatisme di Indonesia" diterbitkan oleh Dinas Sejarah TNI AD Tahun 1978 tentang dukungan Rakyat Sulawesi terhadap Pemerintah Pusat dan mengadakan perlawanan terhadap Pemberontakan Andi Azis yang ingin memerdekakan NIT (Negara Indonesia Timur), melepaskan diri dari RIS (Republik Indonesia Serikat), serta Pemberontakan RMS Soumokil.

meminta NIT dibubarkan.<sup>12</sup> Klimaks dari perjuangan GAPKI adalah dibentuknya Pemerintah Republik Indonesia Kesatuan menggantikan RIS pada tanggal 17 Agustus 1950.

Di Maluku, pemberontakan RMS Soumukil, menuntut kemerdekaan dan ingin mendirikan negara sendiri. Pemberontakan RMS Soumukil dapat ditumpas karena ada salah satu faktor yang menyebabkan dapat ditanggulangnya pemberontakan tersebut, yaitu adanya pihak dalam KNIL sendiri terjadi pemberontakan. Satuan-satuan KNIL berbangsa Indonesia di Manado melucuti komandan-komandannya sendiri (Bangsa Belanda) karena mereka ingin cepat menjadi TNI. Selanjutnya pasukan ini diubah menjadi kesatuan TNI dengan nama Batalyon 3 Mei.<sup>13</sup>

Sejarah masyarakat pro integrasi di Timor-Timur (sekarang Negara Timor Leste), sejak reformasi bergulir di Indonesia, selalu menjadi sasaran berbagai tindakan kekerasan, seperti teror, intimidasi, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pihak pro kemerdekaan. Sehingga mereka bergabung membentuk Pasukan Pejuang Pro Integrasi. Embrio Pasukan Pejuang Timor-Timur sudah ada semenjak sebelum Integrasi Tim-Tim dengan Indonesia, yakni pada saat masyarakat pro integrasi menjadi sasaran tindak kekerasan oleh Falintil pada tahun 1975.<sup>14</sup> Sebagian masyarakat pro integrasi secara suka rela menggabungkan diri untuk melawan tindak kekerasan Fretelin/Falintil.

<sup>12</sup> Ikrar/pernyataan Andi Ijo Karaeng Lalolang, 26 April 1950, sebagai ketua atas nama Pemerintah Sulawesi Selatan, Andi Burhanudin sebagai ketua atas nama Dewan Sulawesi Selatan, bahwa "... sesuai dengan keinginan yang terbesar dari seluruh rakyat Sulawesi Selatan, yang dilahirkan dengan demokrasi, mosi-mosi, statement tanggal 20 Maret 1950 dari Panitia Penegak Republik Indonesia yang meliputi lebih dari 50 partai politik dan organisasi, maka mulai hari ini tanggal 26 April 1950, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan lepas dari Negara Indonesia Timur dan masuk dalam Negara Republik Indonesia Serikat dan kepada Pemerintah Republik Indonesia mendesak agar supaya pernyataan kami ini dengan selekas-lekasnya disahkan". (Disjarah TNI AD, 1978)

<sup>13</sup> Batalyon 3 Mei, adalah pasukan KNIL yang telah diubah namanya sesuai dengan saat dimana mereka memberontak terhadap komandan-komandan Belandanya. KNIL adalah tentara andalan Hindia Belanda yang terdiri dari orang-orang Belanda dan pribumi seperti dari Ambon, Manado, Jawa, Madura dan lainnya, untuk memelihara keamanan dalam negeri, namun pada perang dunia kedua ditugaskan untuk menjaga pertahanan sampai Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1941, sebagian dari mereka memasuki PETA dan kemudian menjadi TNI. Beberapa orang diantaranya kemudian menjadi tokoh TNI, seperti : Soeharto, TB Simatupang, Oerip Soemoharjo, Rs. Suryadarma, Hidayat (Fattah : 2005, 3). Lihat buku "Penumpasan Pemberontakan Separatisme di Indonesia" diterbitkan oleh Dinas Sejarah TNI AD Th. 1978.

<sup>14</sup> Kesaksian FX Lopez dan Cruz, "Kepanikan muncul dalam histeris politik waktu itu (paska jajak pendapat), orang-orang pro integrasi yang merasa dibiarkan sendirian dan terancam aksi intimidasi, teror, penganiayaan dan pembunuhan oleh Falintil pada akhirnya terjebak dalam serentetan aksi kekerasan yang sama. Balas membalas pun terjadi dan masyarakat Tim-Tim

Di era reformasi dimana aparat keamanan tidak berdaya melindungi masyarakat, maka para pejuang integrasi, secara sukarela menganggap sebagai sesuatu yang mendesak untuk kembali menghimpun diri dengan maksud untuk melindungi diri, juga membantu mengamankan Timor-Timur sebagai bagian dari wilayah NKRI dari rongrongan Falintil/Fretelin. Sehingga selain kelompok-kelompok pejuang integrasi yang telah lama ada, maka bermunculan kelompok-kelompok pro integrasi yang baru, sebagai berikut :

“Mahidi (Anaro), Ablai (Manufaki), Besi Merah Putih (Liquisa), Laksaur (Covalima), Sakunar Merah Putih (Ambeno), Angkatan 59/75 Yuniur (Viqueque), Darah Integrasi (Demera), Morok (Manutoto), dan Aitarak (Dili). Selain itu sayap-sayap pendukungnya juga bermunculan secara sukarela diberbagai daerah kabupaten dan kota di Timor-Timur. Kelompok-kelompok integrasi tersebut kemudian dikenal dengan nama Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) dan setelah jajak pendapat di Timor-Timur berubah nama menjadi Pasukan Pejuang Timor-Timur”. (Tavares; 1999 : 5)

Zaky Anwar (1999 : 74), berpendapat bahwa, Pejuang Pro Integrasi (PPI) di wilayah Tim-Tim ada sekitar 20-an kelompok, yang tumbuh secara spontan di daerah-daerah, sebagai respon terhadap aksi teror pihak pro kemerdekaan. Oleh pers barat, PPI disebut milisi bersenjata.<sup>15</sup> Persepsi negara-negara barat jauh berbeda dengan Indonesia terkait sistem pengamanan Indonesia mengenal adanya sistem pengamanan swakarsa.

“Milisi adalah kelompok masyarakat sipil yang dipersenjatai dan dilatih secara militer diluar struktur angkatan bersenjata resmi. Milisi berjuang untuk kepentingan dan tujuan kelompok atau partainya. Sedangkan Pam Swakarsa terbentuk karena inisiatif warga sipil untuk swakarsa didukung Pemerintah secara legal. Di Indonesia, selain Pam Swakarsa terdapat kekuatan Rakyat Terlatih (RATIH) yang meliputi Kamra, Wanra dan Hansip, diatur dalam UU No. 20 Tahun 1982, tentang SISHANKAMRATA”.

Reagen Ijje (2003 : 100) mengemukakan bahwa di Papua, meski tidak secara eksplisit dijelaskan tentang adanya dinamika kelompok yang pro pusat/anti separatisme, namun kelompok-kelompok tersebut ada dan eksis di Papua. Munculnya Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia Pemandang

---

kembali pecah, kembali tercerai berai, kembali mengutub secara amat gawat ke dalam kubu pro integrasi dan kubu anti integrasi”. (Zaky Anwar, 2008 : 48)

<sup>15</sup> Lihat “*Oxford Advanced Learner's Dictionary*”, bahwa “Milisi” diartikan “*Force of civilians trained as soldiers, but nor part of the regular army*”

(GSMIP), setelah bergulirnya reformasi dan terjadinya gelombang pengungsian, akibat kejadian tanggal 6 Oktober 2000. GSMIP adalah merupakan mobilisasi rakyat pendatang untuk menghadapi penyerangan yang dilakukan oleh rakyat dan penduduk setempat/Satgas Papua, serta mengantisipasi penyerangan dari kelompok OPM.

Djopari menjelaskan tentang sengketa yang berkepanjangan di Papua sebagai berikut :

“Dari status Irian Jaya antara Indonesia dengan Belanda harus diakhiri dengan ditandatanganinya suatu perjanjian di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 tanpa melibatkan rakyat Irian Jaya yang dipersengketakan. Sebagai realisasi dari perjanjian tersebut, pada tahun 1969 dilakukan suatu musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PAPERA) oleh suatu dewan sebanyak 1025 orang yang akhirnya dengan mufakat menentukan/memutuskan wilayah Irian Jaya menjadi bagian mutlak dari NKRI. Namun proses integrasi politik tersebut tidak berjalan mulus sebab sejak awal sudah dihadang oleh suatu pemberontakan OPM, yang tujuannya adalah mendirikan Negara Papua Barat dalam jangka pendek dan Negara Melanesia Raya dalam jangka panjang”. (Djopari; 1999 : 167-168)

Pemberontakan DI/TII yang berlokasi di Sulawesi Selatan, merupakan gerakan pemberontakan paling lama keberlangsungannya, yaitu sekitar 15 tahun (1950-1965). Tokoh yang menjadi pemimpin utama dari gerakan DI/TII di daerah ini adalah Letnan Kolonel TNI Abdul Kahar Mudzakar. Anhar Gonggong (2005 : 10-18), menyebutnya sebagai tokoh patriot hingga pemberontak. Dia melawan Jepang, tetapi juga menentang adat kerajaan dan dibuang ke Jawa. Dalam perang kemerdekaan justru tampil sebagai tokoh dari Sulawesi Selatan yang pertama memperoleh pangkat yang cukup tinggi, yaitu perwira menengah, Letnan Kolonel TNI. Karena merasa tersisihkan dari lingkungan jajaran ketentaraan dan kecewa terhadap pemerintah NKRI, Abdul Kahar Mudzakar meninggalkan lingkungan APRI dan bahkan berbalik menentang Pemerintah Negara RI, yang justru pernah ikut diperjuangkannya.

Sedangkan timbulnya DI/TII di Aceh tahun 1953, peristiwa ini terjadi akibat pemerintah melebur Provinsi Aceh masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara Tahun 1950. Menurut Chaedar, Pemerintah Pusat pernah menjanjikan bahwa Provinsi Aceh akan dijadikan sebagai daerah istimewa karena dianggap daerah modal perjuangan Bangsa Indonesia. Tetapi kenyataan dilapangan lain,

bahkan pada saat itu terjadi fitnah dimana-mana dan akhirnya terjadi pembantaian massal, pembunuhan, pemerkosaan, banyak korban jiwa yang tidak bersalah dan tidak mengerti politik. Disamping adanya korban harta benda dari masyarakat yang tidak terlibat dalam kepentingan tersebut. (Chaedar; 1989 : 83)

Di Sumatera Barat, timbulnya PRRI/Permesta akibat adanya kesenjangan antara para panglima di daerah-daerah dan pemimpin mereka di Jakarta, lebih pada ungkapan dari ketegangan-ketegangan dalam struktur politik, khususnya militer, dalam kurun waktu 1945-1966. Sekelompok perwira muda yang merasa perihatin dengan arah gejala kebijakan pemerintah dalam hal politik dan ekonomi. Atas inisiatif masing-masing diambillah langkah-langkah konkrit,<sup>16</sup> dan hal tersebut menimbulkan adanya Dewan Banteng dan Permesta. Namun upaya mengubah kebijakan ekonomi di daerah-daerah tidak ditolerir oleh Pemerintah Pusat.

Setelah PRRI (Pemerintahan Revolusioner RI) di Padang diserang oleh Pemerintah Pusat pada Maret 1958. Selanjutnya semua tokoh Permesta (Perjuangan Semesta) di Ujung Panjang ditangkap kemudian dipenjarakan di Madiun dan Jakarta. Selain para Pemimpin PRRI/Permesta, ribuan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam pasukan PRRI/Permesta menyerahkan diri dan dikirim berangsur-angsur ke Pulau Jawa untuk rehabilitasi.

Sebagian diantara mereka melanjutkan pengabdian di bidang militer berdasarkan syarat tertentu, sebagian lagi kembali dalam kehidupan masyarakat sipil, wiraswasta, pelajar dan mahasiswa. Beberapa perwira, seperti Tedy Tumbelaka ditarik ke Bakin (Badan Koordinasi Intelijen), serta sebagian para perwira mendapat tugas di MBAD (Lerrisa, 1997). Menurut Pane tahun 1959, kubu PRRI terpecah menjadi tiga kelompok, yakni : (1) kelompok yang sangat radikal, masih tetap melanjutkan perjuangannya tanpa ikut sertanya DI/TII, (2) kelompok yang bergabung dengan DI/TII, (3) kelompok para pejuang yang pasrah karena melihat perjuangan tersebut sudah tidak berarti. (Pane, 2001 : 23-24)

---

<sup>16</sup> Lerrisa (1997). Rekonsiliasi lewat MUNAS dan MUNAP di Palembang, terdiri atas lima masalah pokok yakni : (1) pulihnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, (2) mengganti Pimpinan Angkatan Darat, (3) pembentukan Senat, (4) Otonomi Daerah, (5) larangan terhadap komunisme. Kelima masalah tersebut merupakan intisari Rencana Dewan Banteng, Dewan Garuda, pemikiran Simbolon dan Permesta. Dengan demikian Piagam Palembang merupakan platform , perjuangan bersama daerah-daerah bergolak yang diperjuangkan melalui forum resmi MUNAS dan MUNAP.

Menurut peneliti, pola rekonsiliasi yang pernah ada, dalam penyelesaian konflik di Indonesia, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Pola Rekonsiliasi Konflik Di Indonesia**

No	Daerah Konflik	Pola Rekonsiliasi	Resolusi Konflik
1.	Sumatera Barat. PRR/ PERMESTA, Tahun 1958.	<p>Rekonsiliasi mantan PRR/PERMESTA, baik dari kalangan militer, sipil, pelajar dan mahasiswa, yang menyerahkan diri dan direhabilitasi oleh Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian diantara mereka, melanjutkan pengabdianya di bidang militer, berdasarkan syarat tertentu.</li> <li>2. Sebagian kembali dalam kehidupan masyarakat sipil, wiraswasta, pelajar dan mahasiswa.</li> </ol>	<p>Rekonsiliasi yang dilaksanakan secara vertikal maupun horizontal diikuti kesadaran dan komitmen masing-masing pihak. Sehingga rekonsiliasi tidak hanya secara formal saja, tapi punya makna reunifikasi atau substansi, dan dalam perkembangannya lebih bersifat permanen.</p>
2.	Sambas, Kalimantan Barat. Konflik Etnis. Tahun 1997.	<p>Pihak yang bertikai (etnis Dayak dan etnis Madura) melakukan rekonsiliasi dengan duduk dalam satu meja, difasilitasi oleh Pemda, DPR dan Tokoh Masyarakat. Mereka sepakat agar kehidupan normal dan damai bisa terlaksana. Usai pertemuan mereka saling berjabat tangan, berangkulan, untuk melupakan konflik yang pernah terjadi dan sepakat menatap kehidupan masa depan yang rukun.</p>	<p>Rekonsiliasi dilaksanakan karena adanya kesadaran bersama, khususnya mereka yang bertikai, untuk saling menjaga komitmen masing-masing terhadap perdamaian. Dalam perkembangannya berlanjut rekonsiliasi politik dan sosial seperti asimulasi (perkawinan) antar etnis, sehingga rekonsiliasi dapat bertahan lama, dan lebih bersifat permanen.</p>

No	Daerah Konflik	Pola Rekonsiliasi	Resolusi Konflik
3.	Mataram, Nusa Tenggara Barat. Konflik Patemon, Karang Genteng, Tahun 2001.	Konflik Patemon Karang Genteng, secara formal belum pernah diadakan rekonsiliasi, dan oleh Pemkot dibangun tembok yang memisahkan antara kedua desa tersebut. Namun rekonsiliasi dilakukan secara alami, melalui komunikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja di ladang, datang ke tempat hajatan (mayoritas kaum perempuan) dan dalam kegiatan ekonomi secara perlahan komunikasi antar individu dari kedua desa tersebut mulai mencair meskipun tidak secara terbuka, karena masih sensitif dicurigai sebagai mata-mata antar kelompok.	Rekonsiliasi, meskipun belum dilakukan secara formal, namun dalam proses komunikasi mulai mencair dengan sendirinya, karena kepentingan dan keterkaitan individu dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Namun dinamikanya masih rentan terhadap konflik.
4.	Sulawesi Tengah. Konflik Poso, Tahun 2001.	Pertemuan Malino untuk Poso pada tanggal 18 sampai dengan 20 Desember 2001, yang dihadiri oleh perwakilan dari tokoh-tokoh yang bertikai, selanjutnya dikenal dengan kesepakatan deklarasi Malino 2.	Masing-masing komunitas yang bertikai menunjukkan kesepakatan perdamaian, dan mempunyai komitmen untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian bersama, yang difasilitasi oleh pemerintah yang lebih bersikap dan bertindak sebagai mediator dan motivator dalam penyelesaian konflik. Sehingga lebih bersifat permanen dan tahan lama.

Sumber : Diolah dari daerah-daerah konflik di Indonesia.



Telaah terhadap literatur yang relevan dengan topik dan fokus studi ini, dilakukan dengan membuat resume dan tinjauan substansi serta teori yang digunakan, diantaranya dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebagai berikut :

*From Peace Making to Peace Building (The case of Aceh)*, oleh Dr. Iwan Gardono Sudjtmiko; Perkembangan perdamaian dan dinamika kekuasaan di Aceh pasca tsunami, khususnya muatan dan prediksi tentang MoU Helsinki. Resolusi konflik Aceh seharusnya dilihat dari segitiga *stake holder*, yakni Pemerintah Pusat, GAM dan Masyarakat Aceh, baik sebagai pihak yang berkonflik, pelaku, korban maupun pihak lain yang terkena dampak dari konflik Aceh. Perdamaian adalah sesuatu yang bersifat dinamis, bisa dikatakan perdamaian negatif dan perdamaian positif, sedangkan yang diharapkan di Aceh adalah perdamaian positif.

GAM berhasil membuat otonomi khusus menjadi otonomi khusus “plus” yang selanjutnya merupakan modal politik para calon tokoh dan parpol bentukan GAM dalam Pemilu Eksekutif (2006) serta Pemilu Legislatif (2009). Pengintegrasian kembali GAM harus dilihat dari konteks integrasi antara Pemerintah dengan GAM serta Mantan Anggota GAM dengan Masyarakat Aceh, diantaranya dengan pengampunan, rehabilitasi, dukungan hidup dan ganti rugi. Pengintegrasian GAM dengan masyarakat masih dalam proses, terutama jika dilihat dari dimensi agama, politik dan tempat tinggal.

Ada beberapa skenario penting yang kemungkinan terjadi antara Pemerintah Indonesia, GAM dan Masyarakat Aceh dalam pemilihan Eksekutif tahun 2006 dan pemilihan Legislatif tahun 2009 sebagai berikut :

- 1) Jika pemerintah Indonesia yang menang melalui partai politik nasional akan mendorong GAM untuk berintegrasi dengan partai politik lain, sehingga GAM akan mati secara politis dan organisasi.
- 2) Jika GAM yang memenangkan pertempuran, maka GAM akan memperluas kekuatan dan kekuasaannya melalui KPA sebagai gelanggang politik GAM.
- 3) Jika masyarakat sipil dengan partai politik lokal baru yang menang, dinamika politik akan meningkatkan integrasi dengan orang-orang lokal, Pemerintah Pusat dan GAM sehingga akan membangun Aceh baru.

Dalam konteks teori yang digunakan dalam tulisan tersebut, yaitu apa yang disampaikan oleh Hugh Miall tentang lima jenis perubahan bentuk konflik, maka perkembangan konflik di Aceh dapat dikatakan masuk pada tahapan kedua tentang perubahan struktural yang berhubungan dengan kekuasaan, sedangkan perubahan selanjutnya masih dalam proses.

*Why The Madurese ? Ethnic Conflict in West and East Kalimantan Compared*, oleh Huub De Jonge dan Gerben Nooteboom : Memberikan gambaran tentang situasi yang terjadi di Kalimantan dan Aceh, dimana latar belakang penyebab kekerasan konflik dapat dilihat dari dimensi sikap budaya, kecemburuan ekonomi, keterbatasan akses pada sumber daya alam serta kompetisi politik/kelembagaan pasca Orde Baru. Kalau di Kalimantan antar suku Madura dengan suku Dayak dan suku Melayu, sedangkan di Aceh antara suku Jawa dengan suku Aceh.

Suku Madura di Kalimantan Timur sebagian besar sebagai pekerja tidak terdidik, tidak tertarik pada pendidikan, anak-anak mereka sering membantu mencari uang yang bekerja sebagai buruh bangunan. Transportasi dan industri, kehidupan ekonomi mereka pas-pasan, dapat dikatakan miskin dibandingkan suku lain, meski ada yang sukses namun tetap tidak terdidik dan tinggal di eselon masyarakat yang lebih rendah, kebanyakan tinggal di kota besar, seperti: di Balikpapan dan Samarinda. Kekerasan di Kalimantan Timur dapat dikatakan sebagai imbas isu dari Sambas, Sampit dan kekalahan dari suku Madura, penyebaran kekerasan sampai ke Samarinda menyebabkan timbulnya anti suku Madura di Kalimantan Timur.

Sedangkan suku Madura di Kalimantan Barat secara ekonomis, cenderung lebih kaya dibandingkan kelompok suku lain, yang mendorong kecemburuan dan kekaguman kelompok suku lain. Lebih terdidik dan banyak tinggal di desa-desa atau pantai, meski ada sebagian yang tinggal di Pontianak, namun tetap terlihat eksklusif dari kelompok suku lain. Kekerasan konflik di Kalimantan Barat antara suku Madura dengan Dayak sudah seringkali terjadi. Pada masa Orde Baru, suku Dayak dikesampingkan dalam proses pembangunan ekonomi, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, lapangan kerja, dan hampir dikeluarkan dari posisi kekuasaan lokal, daerah, maupun tingkat provinsi, serta diabaikannya kultur

Dayak, karena dianggap primitif dan tidak sejalan dengan kultur nasional. Sedangkan konflik antara suku Madura dengan suku Melayu karena adanya luapan kebencian yang tidak terbendung dari suku Melayu terhadap tindakan suku Madura. Pada orang-orang Melayu, selanjutnya mengadakan perlawanan dan pembalasan dengan cepat dan dibantu oleh Dayak serta suku lain khususnya di wilayah Sambas.

Perbedaan yang dapat dilihat dari kedua daerah tersebut adalah mengenai komposisi kesukuan dari populasi, sikap budaya, akses ke sumber alam, dan kompetisi politis, di samping karakteristik suku Madura dan suku Dayak maupun Melayu. Situasi yang terjadi di Kalimantan, juga terjadi di Aceh di mana latar belakang dan penyebab konflik kekerasan juga dapat dilihat dari dimensi sikap budaya, kecemburuan ekonomi, akses pada sumber daya alam, serta kompetisi politik pasca Orde Baru.

Secara eksplisit tidak diuraikan tentang teori yang digunakan, namun dari berbagai kutipan dan penjelasan yang ada, peneliti mencoba membedah permasalahan konflik kekerasan yang terjadi dengan melihat pada permasalahan budaya, ekonomi, dan politik atau kelembagaan.

*Horizontal Inequalities, Ethnic Separatism and Violent Conflict (The Case of Aceh, Indonesia)* oleh Brown, Graham : Memberikan gambaran tentang perbedaan antara Pemerintah Pusat dengan Masyarakat Aceh Khususnya GAM, dan perbedaan horizontal khususnya Masyarakat Aceh (GAM) dengan kaum pendatang (khususnya transmigran suku Jawa) yang membawa dampak ketidakpercayaan pada Pemerintah Pusat serta timbulnya perasaan anti Jawa. Kedua hal tersebut, mendorong adanya deklarasi kemerdekaan Aceh Sumatera, oleh GAM. Dimana kondisi tersebut menimbulkan sentimen etnis dan saling menguatkan serta mempengaruhi yang menyebabkan kekerasan konflik separatis di Aceh menjadi berkepanjangan .

Konflik Aceh permasalahannya sangat kompleks terutama Pemerintah Pusat sendiri yang menciptakan, dengan penguasaan sumber daya alam khususnya gas dan minyak serta program transmigrasi terutama dari Jawa untuk melindungi kepentingan ekonomi serta keamanan. Dinamika tersebut mengurangi kepercayaan pada Pemerintah Pusat, dan kaum muda diasumsikan menjadi

simpatisan GAM. Perbedaan horizontal antara Masyarakat Aceh dan para Transmigran Jawa terkait masalah kesenjangan ekonomi, perbedaan sosial budaya, kompetisi politik serta pemahaman terhadap agama, sehingga menimbulkan perasaan anti Jawa. Perbedaan vertikal dan horizontal tersebut menjadi sumber pernyataan kemerdekaan Aceh Sumatera oleh GAM dan kondisi tersebut saling menguatkan yang membuat kekerasan konflik separatis di Aceh menjadi berkepanjangan.

Perbedaan dominan kesukuan merupakan faktor penting yang sering berhubungan dengan batas wilayah atau posisi peta bumi sebagai batas luar. Pada akhirnya pengalaman sejarah lokal atau naratif yang berbeda, dapat menginformasikan peran orang tua, sehingga merupakan alasan subur timbulnya paham separatisme.

Dalam konteks teori, tidak nampak spesifikasi pembahasan teori yang digunakan dalam menganalisa kekerasan dan perbedaan horizontal di Aceh.

*Prospect for Peace and Indonesia's Survival*, oleh M.N. Djuli : Memberikan gambaran tentang dinamika kekerasan konflik yang terjadi di Indonesia, seperti di Aceh, Maluku, Papua dan Kalimantan. Sehingga muncul suatu pertanyaan masih adakah harapan Indonesia untuk survive? Hal tersebut dapat dianalisa, apakah para pemimpin Indonesia berkeinginan menerima keaneka ragaman dilihat sebagai hal yang negatif, karena mereka terikat pada komitmen mempertahankan bentuk NKRI dan mencegah timbulnya disintegrasi bangsa. Fenomena tersebut yang sekarang sedang terjadi di Aceh.

Keuntungan paling nyata dan jelas adalah peningkatan kemampuan mereka untuk menentukan jenis operasi dan memperoleh senjata. Keuntungan pemberontak memperoleh akses dari distribusi dan produksi opium meliputi aset keuangan diperbesar dan dapat meningkatkan kemampuan militer. Hal tersebut mendukung perluasan kekuatan lain yaitu aktor bersenjata Peru dan Kolumbia yang bersifat kemiliteran. di samping dapat memperluas pilihan taktis dan strategis untuk meningkatkan hubungan dengan populasi lokal, meliputi hak kekuasaan lebih besar dengan masa lokal. Dengan adanya koneksi terhadap ekonomi narkoba secara sederhana juga memperoleh sumber daya keuangan lebih besar dari akses mereka pada kehidupan perekonomian yang gelap, dimana

mereka dapat merubah kemampuan militer untuk melakukan kegiatan intelijen, yang ikut berperang agar tidak mudah dikalahkan.

Pemerintah dalam menjawab *insurgency-drug nexus* dengan mengoptimalkan operasi intelijen untuk kegiatan kontra terorisme, lawan gerilya. Mengusahakan strategi pemberantasan peredaran dan produksi narkotika dengan mengadopsi lawan gerilya seperti berkonsentrasi pada larangan atau pencegahan distribusinya, serta meningkatkan efektivitas kedua-duanya.

Dalam konteks teori, peneliti tidak menguraikan tentang teori yang digunakan secara jelas, namun uraian dalam pembahasannya mengarah pada *drug-insurgency* dengan memanfaatkan perekonomian gelap peredaran dan produksi opium/narkotika, serta penanggulangannya.

*Explaining The Violent Solution in Indonesia*, oleh Freek Colombijn : Memberikan gambaran tentang konflik lokal, sosial, religius, dan kesukuan di Indonesia. Solusinya cenderung menggunakan kekerasan, karena kekerasan mempunyai latar belakang historis yang mendalam. Pada akhirnya penggunaan kekerasan dipertimbangkan atau dianggap sah oleh gerakan separatis, terutama sekali sah untuk melawan terhadap orang luar. Sehingga muncul semangat etnonasionalisme dan primordialisme berlebihan. Dalam perkembangannya perilaku kejam telah memperoleh aura revolusioner, terutama dikalangan anak muda, sebagaimana terjadi di Aceh. Sehingga perlu adanya perubahan manajemen resolusi konflik di Indonesia dengan pendekatan nir kekerasan.

Konflik di Indonesia tidak dapat dilihat dari satu dimensional, tetapi harus dipahami dalam suatu kerangka yang kompleks dengan memperhatikan beberapa area serta mencakup berbagai perbedaan agama, etnis, kultur. Pemerintah cenderung menolak untuk mengakui adanya hak orang pribumi khususnya di daerah konflik seperti Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan. Kebijakan pemerintah menjadi tersesat, tidak adil, represif dan bersifat membedakan. Mereka sudah merampas sumber daya, transmigrasi yang dipaksakan dan penyalahgunaan hak asasi manusia oleh aparat serta terjadinya erosi nilai-nilai tradisional.

Survive atau tidaknya Indonesia dalam prospek perdamaian, masih dalam proses panjang, hal tersebut tergantung pada analisa apakah para pemimpin Indonesia mau menerima keanekaragaman sebagai hal yang positif mengarah

pada transparansi pembangunan kebangsaan, sehingga negara akan survive dan berhasil baik. Tetapi jika mereka melihat keanekaragaman sebagai sesuatu hal yang negatif, yang harus dihancurkan karena mereka masih merasa terikat dengan mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka negara tidak akan survive dan keberhasilannya masih perlu dipertanyakan.

Secara spesifik tidak ada penjelasan tentang teori yang digunakan, penjelasan teori konflik disebabkan adanya perbedaan akses terhadap sumber daya alam, perbedaan kultur, suku, bahasa dan sosial politik dalam menganalisis konflik dan perdamaian.

*Diyat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik di Provinsi Aceh*, oleh Azhari Yahya dan M. Jafar Hussein : Memberikan gambaran bahwa Diyat dinilai cukup efektif untuk meredam kemarahan yang ada pada korban/ahli waris korban. Melalui Diyat, setidaknya dapat mengurangi tendensi dendam dan dapat mencegah atau mengatasi jatuhnya korban lebih banyak lagi dikemudian hari. Diyat dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya. Meskipun Diyat bukan merupakan satu-satunya cara dalam menyelesaikan konflik di Aceh.

Dinamika kekerasan yang melanda Indonesia pasca Orde Baru dapat dijelaskan dengan tiga pendekatan umum, sebagai berikut :

- 1) Memusatkan analisa pada akar konflik, seperti konflik di Aceh, perlawanan GAM terhadap Pemerintah Pusat.
- 2) Menganalisa kekerasan yang dianggap sebagai warisan dari rezim Orde Baru seperti militerisme, monopoli penggunaan kekerasan dan ledakan kebencian serta ketidakadilan.
- 3) Menganalisa konsentrasi pada kesinambungan kekerasan dari hasil penyederhanaan budaya, pandangan ini terutama sekali populer di antara Militer Indonesia dan Polisi.

Konflik sosial, lokal, religius dan kesukuan di Indonesia, alternatif solusinya cenderung menggunakan kekerasan, karena penggunaan kekerasan mempunyai akar historis yang mendalam penggunaan kekerasan dipertimbangkan sah, terutama sekali sah untuk melawan terhadap orang luar dan perilaku kejam telah memperoleh aura revolusioner, terutama di kalangan anak muda.

Teori Albert Bandura, perilaku agresif diperkuat manakala pelaku sudah mengalami bahwa perilakunya telah mendapatkan hadiah dan sukses. Seperti di Maluku dapat diungkapkan dengan kata-kata “semua orang telah menjadi keras, bahkan anak-anak perempuan tidak lagi bermain-main dengan boneka, tapi bermain-main dengan meriam”. Dimasa mendatang, manakala kita mempunyai perselisihan, maka kita akan menyelesaikannya dengan meriam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Bireuen menyambut positif konsep Diyat yang ditawarkan Pemerintah, untuk menghilangkan atau dapat mengurangi tendensi dendam yang ada pada pihak korban dan ahli warisnya. Pelaksanaan pemberian Diyat di Kabupaten Bireuen masih sangat terbatas, karena terbatasnya dana yang tersedia. Dalam pelaksanaan pemberian Diyat ada 4 (empat) hal yang menjadi kendala bagi Pemerintah, yaitu: (1) belum terdatanya korban secara akurat, (2) belum kondusifnya keamanan daerah, (3) terbatasnya dana yang dimiliki, (4) belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Walaupun penerapan Diyat itu belum mampu menyelesaikan konflik secara total. Namun dapat mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi, karena keinginan balas dendam dari keluarga korban kekerasan konflik mendapatkan perhatian dan ganti rugi.

*The Coca Connection, Conflict and Drugs in Colombia and Peru*, oleh Vanda Febbab-Brown : Kemungkinan adanya akses terhadap ekonomi narkotika, secara sederhana dapat memberikan sumber daya keuangan lebih besar pada gerakan separatis, atas akses mereka kepada perindustrian dan produksi narkotika, lewat modus operandi gelap, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan jenis operasi. Disamping hal tersebut dapat juga untuk memperoleh persenjataan dan logistik yang memungkinkan perluasan jaringan dan wilayah *operasi in surgency*. Fenomena tersebut juga terjadi di Aceh dengan ditemukannya hektaran ladang ganja khususnya di daerah rawan konflik, hutan dan pegunungan, seperti di wilayah timur dan utara (Bireuen, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur).

Tidak dijelaskan secara eksplisit teori yang digunakan, namun dari tinjauan pustaka mencoba menggunakan ajaran Islam, disamping pendapat beberapa tokoh terkait pentingnya ganti rugi terhadap korban kekerasan.

Dari studi-studi tersebut di atas, setidaknya dapat memberikan gambaran tentang penyebab konflik, dinamika konflik dan resolusi konflik, serta relevansinya dengan fokus penelitian resolusi konflik Aceh. Namun secara teoritis dalam studi-studi tersebut belum membahas masalah rekonsiliasi dan transformasi konflik untuk penyelesaian konflik, dalam rangka mewujudkan perdamaian positif.

#### F. Kerangka Teoritik

Secara teoritik, topik penelitian ini membahas tentang konflik, yang dilihat sebagai sebuah proses sosial dan dapat dianalisis dalam tiga dimensi, yaitu dimensi penyebab terjadinya konflik, dinamika konflik dan resolusi konflik.<sup>17</sup> Secara umum teori konflik hanya menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi jika dalam relasi sosial antar kelompok/institusi terdapat ketimpangan, eksploitasi serta dominasi.<sup>18</sup> Konflik selalu ada dalam kehidupan manusia dan inheren dalam hubungan antar manusia, meski tidak mudah untuk memahami konflik nyata (*real conflict*) dalam masyarakat dan negara.<sup>19</sup>

Konflik Aceh, meski sudah dipelajari dengan bermacam-macam cara dan pendekatan penyelesaian konflik, namun tetap masih berpotensi menimbulkan konflik. Karena konflik di Aceh cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak, disamping mempunyai sejarah pertikaian yang panjang. Konflik berkepanjangan di Aceh, telah membawa perdebatan dan argumentasi politik baik dikalangan elit legislatif, eksekutif maupun masyarakat luas. Sementara penduduk Aceh sendiri khususnya yang Non GAM, masih dalam kondisi yang tidak kondusif.

Potensi konflik sosial di Aceh disebabkan berbagai hal yang tidak terjadi secara kebetulan, demikian pula dinamikanya, karena konflik tidak terjadi secara

<sup>17</sup> Lawang (1986, 162), Pentingnya perhatian yang utama umumnya terhadap berbagai teori konflik adalah mengenal dan menganalisa kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, sebab dan bentuknya dan dalam banyak hal, akibatnya dapat menimbulkan perubahan sosial.

<sup>18</sup> Menurut William Perdue (1982 : 305), penyebab konflik bermacam-macam, tergantung pada dinamika kasus, sementara dalam teori konflik sangat menekankan sebab konflik pada adanya tiga variabel yaitu ketimpangan eksploitasi dan dominasi.

<sup>19</sup> Menurut Ju Lan (2005 : 10-11), di Indonesia konflik-konflik yang terjadi umumnya lebih dikategorikan sebagai "konflik separatis" dan "konflik antara pusat dan daerah", yang cenderung dilihat sebagai "konflik vertikal" dan "konflik komunal" yang dianggap sebagai "konflik horizontal", dimana didalamnya termasuk "konflik etnis dan agama" dan "konflik perebutan sumber daya alam".



tiba-tiba melainkan selalu disertai dengan indikasi awal. Selanjutnya bagaimana resolusi konflik akan dapat dikembangkan, hal itu tergantung pada para pihak yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, baik pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk menentukan langkah dan bentuk penyelesaiannya.

Resolusi konflik di Aceh tidak bisa lepas dari konteks kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan pendekatan demokratis atau strategi nir kekerasan. Dengan melibatkan GAM, masyarakat Aceh Non GAM dan Pemerintah Pusat, untuk pencegahan konflik, dan terwujudnya perdamaian positif di Aceh. Dalam konteks ini peran negara menjadi penting, karena negara menjadi lembaga yang diberi otoritas mengatur tata relasi dalam masyarakat.<sup>20</sup> Namun bentuk resolusi konflik yang digunakan, akan sangat ditentukan oleh bagaimana peran negara dan keseimbangan interaksi antara tiga pihak yaitu GAM, Non GAM dan Negara.

Institusi negara dalam dimensi resolusi konflik dapat diperankan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, dalam hal ini oleh aktornya (Pejabat) sebagai penengah untuk mencegah atau meredam konflik. Namun hendaknya tetap “netral” dan berperan sebagai juri, dengan mengedepankan pendekatan nir kekerasan atau sesuai dengan mekanisme demokrasi. Hubungan negara dan masyarakat menjadi penting dalam penyelesaian konflik Aceh, untuk memadukan/ menyeleraskan antara pendekatan *top down* dengan *bottom up*.

Konflik Aceh sebelum MoU Helsinki adalah konflik antara kelompok bersenjata (GAM) dengan TNI/POLRI (Pemerintah Pusat) dan kelompok Non GAM (FPSG) dengan berbagai bentuk organisasinya. Sedangkan pasca MoU Helsinki dipersepsikan konflik terjadi antara Aceh GAM dengan Aceh RI. Sehingga telah merubah peta konflik. Pemerintah (Negara) akan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses pencegahan dan penyelesaian konflik tersebut, disisi lain harus berperan sebagai “juri” yang netral, dan bersinergi dengan *stake holder* yang lain.

<sup>20</sup> Menurut Rousseau (1968 : 7), negara diberi kewenangan sebagai “juri” yang memiliki kewenangan utama dalam menata relasi sosial dalam masyarakat. Sedangkan menurut Prayogo (2007 : 15) dalam manajemen konflik, negara menjadi manajer (juri), yang memberi jaminan atas hak pemilikan serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Peneliti dalam menganalisis resolusi konflik di Aceh khususnya Langsa menggunakan teorinya Hugh Miall, dalam bukunya berjudul “Resolusi Damai Konflik Kontemporer” (Terjemahan Tri BS, 2002), dan merupakan karya bersama Oliver Ramsbofham, Tom Woodhouse. Buku ini<sup>21</sup> menurut peneliti cukup komprehensif dan dapat merespon atas isu-isu yang berkaitan dengan proses pencegahan konflik dan resolusi konflik, dan relevan dengan dinamika di lapangan. Meskipun diakui bahwa dalam teori-teori sosiologi (dan studi-studi sosio) agak kurang (secara sistemik dan empirik) membahas resolusi konflik, dan bidang tersebut lebih sering dibahas oleh multi disiplin seperti politik dan hubungan internasional.

Miall menawarkan banyak alternatif tentang resolusi konflik. Pemikiran resolusi konflik berangkat dari asumsi bahwa konflik sebagai aspek intrinsik yang tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial. Sehingga konflik diartikan sebagai ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan berbagai hambatan yang dihasilkan. Namun cara menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan, sehingga perlu merespon cara menangani konflik tersebut. Menurut Miall<sup>22</sup>, pandangan klasik terhadap dinamika konflik adalah sebagai berikut:

<sup>21</sup> Menurut Chris Mitchel dari George Mason University, bahwa buku tersebut didasarkan atas survey terhadap model kerangka kerja berbagai komponen resolusi konflik, menghubungkannya satu sama lain untuk kemudian menjadi bangunan resolusi konflik kontemporer, yang membahas lapangan analisis dan resolusi konflik sampai akhir abad 20 dan awal abad ke 21. (Mukhsin Jamil ; 2007 : 73)

<sup>22</sup> Hugh Miall, Oliver Ramsbofham, Tom Woods juga mengadopsi pandangan Curle (1971) dan Lederach (1995) yang menggagas resolusi model transformatif. Mengadopsi pula pandangan Galtung (1966) model resolusi konflik dengan unsur bentuk segi tiga, yaitu kontradiksi, sikap dan perilaku. Disamping mengadopsi juga pandangan Boulding (1985), tentang model intervensi pihak ketiga. Dalam pandangan Curle (1971) dan Lederach (1995), bahwa resolusi konflik, transformasi dari hubungan yang tidak damai, konflik laten, menjadi hubungan yang damai dan dinamis, melewati pendidikan (kehati-hatian), konfrontasi dan negosiasi dan restrukturisasi hubungan yang lebih adil dan lebih wajar.

1. Resolusi konflik (simetris atau tidak simetris) dengan asumsi bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga dengan unsur-unsur (1) kontradiksi, (2) sikap, dan (3) perilaku (Galtung, 1996). Kontradiksi merujuk kepada dasar situasi konflik yang termasuk kepada ketidakcocokan tujuan pihak-pihak (termasuk ketidakcocokan nilai sosial dan struktur sosial). Pada konflik yang tidak simetris kontradiksi ditentukan oleh pihak yang bertikai, yang mengembangkan stereotype. Sikap merupakan elemen emosional, kognitif dan konatif (kehendak). Perilaku merupakan aspek objektif seperti hubungan struktural, kepentingan material atau perilaku yang bertentangan mempunyai sumber-sumber konflik. Pada suatu konflik total ketiga unsur tersebut muncul bersama-sama. Konflik model segi tiga kontradiksi, sikap dan perilaku demikian resolusinya adalah melibatkan seperangkat perubahan dinamis

“Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan yang tepat. Karena Konflik biasanya terjadi ketika dua atau lebih manusia terserap dalam dinamika yang berbeda dan kadang-kadang saling berbenturan dalam dimensi-dimensi yang berbeda pula. Dalam situasi demikian, kelompok-kelompok yang bertikai akan bersikap, bertindak dan bereaksi dengan cara kekerasan menegasi satu sama lain”. (Miall; 2002 : 7-8)

Dalam kasus Aceh, kelompok-kelompok anti separatisme dan pro pusat (Aceh RI), pada awalnya merupakan individu-individu yang lemah, namun karena desakan situasi yang mengancam keberadaan dan keamanannya serta menjadi sasaran dan korban kekerasan, pada akhirnya mereka membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang sependaritaan dan kondisinya relatif sama. Maka terbentuklah mobilisasi kelompok untuk membela diri dan mengadakan perlawanan pada kelompok lain, yang dianggap menekan dengan berbagai tindakan kekerasan.

---

yang melibatkan penurunan perilaku konflik, perubahan sikap dan mentransformasikan hubungan atau kepentingan yang bertentangan yang berada dalam inti struktur konflik.

2. Resolusi konflik kontemporer, yaitu resolusi yang dimulai sebelum terjadi konflik kekerasan, untuk konflik tidak simetris yang adalah model resolusi transformasi konflik, yaitu anggapan konflik inheren dalam kekuasaan yang tidak seimbang, kebutuhan yang tidak terpenuhi, akan menimbulkan adanya kesadaran, mobilisasi dan pemberdayaan, yang mengarah kepada konflik konfrontasi terbuka. Proses resolusi selanjutnya negosiasi, kemudian hubungan diubah dengan keseimbangan baru dan merubah sikap, maka akan menghasilkan kesepakatan dengan kekuasaan yang seimbang.

Teori resolusi konflik lainnya muncul sebagai alternatif yang ditawarkan oleh para ahli diantaranya :

1. Resolusi cara tradisional yaitu membantu pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi “zero-sum” (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) agar melihat konflik sebagai “non zero-sum” (keduanya dapat memperoleh hasil atau keduanya tidak dapat memperoleh hasil) dan membantu yang bertikai ke arah yang positif.
2. Resolusi dengan keputusan dikotomi yang tegas bekerjasama atau berseberangan diantara pihak-pihak yang berkonflik.
3. Resolusi dengan intervensi pihak ketiga, menggunakan kekuasaan baik secara kekerasan maupun secara lunak (Boulding, 1989).

Sedangkan Imam, Prasodjo. *Diskusi Resolusi Konflik, pada Kelompok Kajian Hubungan Sosial dan Resolusi Konflik Unpad*, Bandung 7 Februari 2002. Prasodjo dari “Ceric” UI menawarkan pendekatan resolusi konflik dengan prinsip membangun dan memperbaharui nilai kepercayaan (*trust*) untuk dialog damai, membangun partisipasi masyarakat dan bantuan kemanusiaan (unit tanggung jawab cepat) mulai dari temporer sampai berkelanjutan. Ia berprinsip bahwa dialog damai akan terwujud melalui kepercayaan semua pihak.

Adanya masyarakat korban konflik Aceh, maka akan menyisakan semakin panjangnya daftar orang-orang yang sakit hati dan dendam yang berkelanjutan, dalam perkembangannya dapat tampil sebagai salah satu penyebab atau bahkan penyebab utama dari konflik berikutnya semakin akut. Mobilisasi kelompok dengan melihat strategi dan tindakan komunal merupakan upaya untuk menelusuri jejak dimana kelompok-kelompok yang tidak puas mengartikulasikan mobilisasi, menentukan tujuan dan strategi yang pada akhirnya mengerahkan tantangan yang demiliterisasi terhadap pemegang kekuasaan. Ini jelas sekali integral dengan pembentukan konflik. (Miall; 2002 : 21)

Dengan munculnya konflik, maka sebuah formasi konflik akan segera terbentuk, karena didasari kepentingan masing-masing pihak yang saling bertikai atau karena adanya relasi antara mereka berubah menjadi hubungan saling menekan agar tujuan mereka tercapai. Selanjutnya masing-masing pihak kemudian mengorganisasikan kelompok dan sumber daya mereka disekitar struktur tersebut.

Dinamika konflik Aceh, berpeluang semakin dalam dan lebih bersifat horizontal karena perkembangan kelompok-kelompok dominan justru dapat menyeret kelompok-kelompok lain, yang merasa termarjinalkan ke dalam konflik baru. Keadaan ini akan lebih mempersulit upaya melacak konflik yang sebenarnya karena akar penyebab terjadinya konflik berkepanjangan masih tetap ada. Akibatnya dapat menimbulkan konflik tambahan atau konflik baru, yang semakin kebingungan terhadap persoalan aslinya.

Intensitas dan eskalasi konflik Aceh dapat dilihat dari bentuk konflik dan aktor atau lembaga yang terindikasi masih terlibat konflik Pasca MoU Helsinki. Meski fenomena sekarang lebih menunjukkan perbedaan, terkait dengan adanya perubahan struktur konflik dan penyebab konflik antara sebelum dan Pasca MoU Helsinki. Namun apakah proses damai Helsinki akan berhasil mengakhiri konflik, dan sejauh mana pengaruh perubahan kondisi tersebut terhadap usaha mencapai perdamaian positif di Aceh khususnya di Langsa, untuk menggantikan siklus kekerasan yang seakan sudah melekat, karena konflik di Aceh dianggap identik dengan kekerasan.

Selama akar permasalahan belum dapat tertangani dengan baik, maka selama itulah potensi konflik akan selalu ada. Untuk kasus Aceh, permasalahan konflik telah begitu mengakar, mulai dari persoalan agama, sosial, ekonomi, politik, keamanan dan integrasi. Setiap akar permasalahan, meskipun semula berdiri sendiri-sendiri, namun perkembangannya menjadi saling terkait dan jalin menjalin satu sama lain, akhirnya sulit diselesaikan secara parsial. Selama energi resistensi masih ada dalam diri rakyat Aceh dan keinginan untuk merdeka masih menjadi harapan perjuangan pada tahapan berikutnya, maka semua usaha damai yang telah dijalankan hanya berguna untuk memperlambat munculnya gelombang konflik kekerasan baru di Aceh. Sehingga konflik tidak hanya dilihat antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, namun juga harus dilihat hubungan antara rakyat Aceh sendiri, khususnya Aceh GAM dengan Aceh RI.

Mengacu pada perkembangan dinamika konflik Langsa (Aceh) diperlukan resolusi konflik, untuk merubah fenomena perdamaian negatif menjadi perdamaian positif, menurut Miall adalah :

“Pendekatan resolusi konflik akan dapat menunjukkan akar penyebab konflik dengan kekerasan dalam sebuah kerangka dan proses yang memungkinkan pihak-pihak bermusuhan dapat mentransformasikan situasi tanpa penggunaan kekerasan. Resolusi konflik tidak hanya berkaitan dengan persoalan pihak-pihak yang bertikai tetapi juga dengan perubahan sosial, psikologi, politik dan insentif pihak-pihak yang bertikai serta kemampuan sosial atau institusional yang menentukan apakah sebuah penyelesaian dapat diterima dan berdaya guna”. (Miall; 2002 : 13)

Insentif selektif datangnya bisa dari internal organisasi kelompok tersebut maupun dari negara. Karena insentif ini dapat mempengaruhi munculnya kelompok tersebut dan memberi warna dalam implementasi kegiatannya. Meski dalam kasus tertentu mereka enggan terlibat dalam permasalahan insentif baik yang datangnya dari organisasi maupun negara. Apalagi jika insentif tersebut berupa uang, karena dampaknya akan dapat mempengaruhi intensitas gerakan maupun motivasi para anggota kelompok. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai dan justru dapat menimbulkan perpecahan/konflik internal kelompok. Namun disisi lain, jika dikelola dengan baik, hal tersebut dapat dijadikan faktor pendorong utama dalam penyelesaian konflik, sejauh kompensasi atau insentif yang diterima atau diberikan seimbang

dan dapat memenuhi harapan semua pihak, sesuai dengan porsi dan status individu maupun kelompok.

Banyak kelompok perlawanan tidak mampu menawarkan insentif selektif yang nyata pada anggotanya, karena mereka kekurangan sumber daya yang mencukupi untuk melakukan hal tersebut dan secara langsung maupun tidak akan mengganggu prospek keberhasilan kelompok. Karena keuntungan yang terprivatisasi tidak akan dapat membangun organisasi besar dan kohesif. Disamping insentif selektif juga dapat menjelaskan kondisi organisasi yang ada kurang berdasarkan kesepakatan bersama atau kolektif. Keberhasilan organisasi, setidaknya memerlukan mekanisme dengan melaksanakan peraturan tertentu, dan keberhasilan mereka juga dipengaruhi kemampuan memberikan insentif selektif yang mampu mengundang para pengikutnya untuk berpartisipasi secara aktif, termasuk didalamnya adalah penghargaan pribadi.

Pasca Helsinki, pemberian bantuan keuangan yang banyak kepada Provinsi Aceh dan bantuan dana korban konflik atau kompensasi kepada masing-masing kelompok, dari sisi jumlah sudah menimbulkan kecemburuan, hal tersebut bukannya membantu penyelesaian konflik permanen, bahkan sebaliknya dapat dikatakan sebagai bibit-bibit konflik baru. Karena mereka dimanjakan dengan fasilitas dan pembagian dana kompensasi yang besarnya dan pelaksanaannya justru menjadi salah satu sumber masalah konflik di Aceh, karena hal tersebut tanpa dibarengi dengan sistem pendampingan yang intensif.

Masih banyak permasalahan internal di Langsa (Aceh) dan berpotensi munculnya konflik baru, khususnya masalah pembauran antara mantan GAM dengan kelompok masyarakat yang pernah disakiti dan keluarganya ada yang jadi korban tindakan kekerasan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa konflik sudah sangat terorganisir dan semakin nampak jelas batas-batasnya, bahkan dikotomi diantara masyarakat Aceh sudah pula terjadi, yakni mengikuti pihak-pihak yang berkonflik (antara pro NKRI dan pro GAM). Selanjutnya dari perspektif tentang *conflict setting* di Aceh, kita bisa membedakan beberapa macam konflik, seperti : *pertama*, konflik antar elit yang dalam hal ini bisa dikatakan antara elit pusat (NKRI) dan sebagian elit lokal (GAM). *Kedua*, konflik terjadi diantara elit lokal sendiri yang melibatkan eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, seperti dalam

isu mendukung dan menolak pemekaran Provinsi ALA (Aceh Lauser Antara) dan ABAS (Aceh Barat Selatan) di samping konflik komunal antar kelompok di masyarakat (Aceh GAM dengan Aceh RI).

Resolusi konflik di Aceh, perlu mempertimbangkan adanya organisasi atau kelompok-kelompok lokal yang mempunyai kedekatan dengan sumber konflik dan sangat mengenal pelaku/korban utama, serta kondisi lokal. Perdamaian positif dalam bentuk empati, solidaritas dan komunitas penduduk di Aceh menjadi penting dalam penelitian ini, melalui pendekatan resolusi konflik interaktif (negosiasi) dan bila diperlukan konsultasi dengan pihak ketiga (mediasi) disamping menggunakan karakteristik lokal sebagai pendekatan pemecahan masalah. Pemikiran Miall, tentang tahapan resolusi konflik adalah sebagai berikut:

“Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah diubah. Sementara transformasi konflik merupakan pengembangan dari penyelesaian konflik tujuannya adalah mentransformasikan hubungan sosial yang tidak adil. Istilah ini juga digunakan untuk memahami proses perdamaian, dimana transformasi bermakna sebuah urutan langkah-langkah transisi yang diperlukan”. (Miall; 2002 : 14)

Namun, tahapan yang diperlukan adalah membedakan antara posisi pihak-pihak yang bertikai dan kepentingan serta kebutuhan tersembunyi mereka, sehingga kepentingan pihak-pihak yang berbeda dapat direkonsiliasikan. Selanjutnya diperlukan upaya transformasi dalam resolusi konflik nir kekerasan di Aceh. Karena hubungan antara pengendali konflik dengan kekerasan dan penyelesaian konflik tidak selalu bersifat langsung. Akhirnya akar penyebab konflik dapat tetap ada tanpa meletusnya perang, dan hal tersebut sering menimbulkan konflik tambahan yang semakin kebingungan terhadap persoalan aslinya.

Selanjutnya dalam melihat ruang lingkup resolusi konflik dan mengakhiri konflik kekerasan, Hugh Miall mengakui fluiditas proses konflik, dimana konflik secara inheren bersifat dinamis dan penyelesaian konflik harus terlibat dengan pergeseran hubungan yang kompleks :

“Banyak teori konflik yang mempertimbangkan persoalan aktor dan kepentingan sebagai sesuatu yang sudah ada dan berdasarkan landasan ini melukiskan usaha untuk menemukan sebuah solusi guna meredakan atau menghilangkan kontradiksi antar mereka. Meskipun demikian persoalan, aktor dan kepentingan selalu berubah setiap waktu sebagai akibat dari dinamika sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Bahkan jika kita berhubungan dengan aspek non struktural konflik, seperti preferensi aktor, tidak ada jaminan bagi asumsi stabilitas, yang biasanya dibuat dalam pendekatan teoritis permainan untuk studi konflik. Faktor situasi baru, pengalaman pembelajaran, interaksi dengan lawan dan pengaruh-pengaruh lainnya akan memperlihatkan bahwa preferensi aktor bukan sesuatu yang given”. (Miall; 2002 : 249)

Pendekatan resolusi konflik, diharapkan dapat menunjukkan akar penyebab konflik, agar memungkinkan pihak-pihak yang bermusuhan dan bertentangan dapat rekonsiliasi dan mentransformasikan ketidakadilan serta membuka komunikasi. Oleh karena itu proses damai yang saat ini dijalankan harus diikuti dengan usaha transformasi konflik yang menyeluruh disemua aspek dan terus menerus untuk memastikan perdamaian permanen dapat terwujud di wilayah Aceh. Agar tidak mengulangi kegagalan dari proses damai seperti yang telah terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Teori tentang transformasi konflik tanpa kekerasan, diperlukan sebagai sebuah kerangka bagi langkah-langkah analisa menuju pengakhiran konflik, disamping untuk memikirkan tentang kemungkinan melakukan intervensi dalam konflik. Untuk itu peneliti mengacu pada pemikiran Miall, tentang lima aspek penting dalam transformasi konflik, sebagai berikut :

“Resolusi konflik dalam kelompok atau antar kelompok, diperlukan transformasi konflik tanpa kekerasan dengan menganalisa lima aspek yaitu: (1) transformasi konteks, (2) transformasi struktur, (3) transformasi aktor, (4) transformasi persoalan, (5) transformasi kelompok dan personil”.<sup>23</sup> (Miall; 2002 : 250-252)

<sup>23</sup> “(1) Transformasi Konteks. Konflik dilihat dalam konteks lokal, nasional, regional dan internasional, yang seringkali bersifat kritis bagi kelanjutan konflik. Perubahan dalam konteks kadang-kadang dapat mempunyai efek lebih dramatis dibandingkan perubahan di dalam pihak-pihak yang bertikai atau dalam hubungan mereka. (2) Transformasi Struktural. Struktur konflik adalah seperangkat aktor, persoalan dan tujuan atau hubungan yang tidak sesuai yang merupakan konflik itu sendiri. (3) Transformasi Aktor. Pihak-pihak yang bertikai harus menentukan kembali arah mereka, mengabaikan atau memodifikasi kembali tujuan yang ingin dicapai dan mengadopsi perspektif yang berbeda secara radikal. (4) Transformasi Persoalan. Konflik ditentukan oleh posisi pihak yang bertikai mengenai berbagai isu. Ketika mereka mengubah posisi, atau ketika persoalan kehilangan sifatnya yang menyolok mata atau persoalan baru muncul, maka konflik berubah.



Pemimpin nasional dan lokal mempunyai tanggung jawab pertama dan utama untuk mencegah, mengelola dan menransformasikan konflik internal dengan kekerasan, disamping terletak pada mereka yang terlibat, terutama pada pemimpin nasional, dan lokal. Perlunya melestarikan proses perdamaian yang berkelanjutan juga memperkuat otonomi lokal dan kemampuan bagi penyelesaian konflik setempat. Transformasi konflik mempersyaratkan perubahan nyata dalam kepentingan, tujuan atau definisi dirinya sendiri atau pihak-pihak yang terlibat.

Proposisi teoritik Hugh Miall :

1. Mobilisasi kelompok dengan melihat strategi dan tindakan komunal, merupakan upaya untuk menelusuri jejak dimana kelompok-kelompok yang tidak puas mengartikulasikan mobilisasi, menentukan tujuan dan strategi, yang pada akhirnya mengerahkan tantangan yang dimiliterisasi terhadap pemegang kekuasaan. Ini jelas sekali integral dengan pembentukan konflik.
2. Konflik biasanya terjadi ketika dua atau lebih manusia terserap dalam dinamika yang berbeda dan kadang-kadang saling berbenturan dalam dimensi-dimensi yang berbeda pula. Dalam situasi demikian, kelompok-kelompok yang bertikai akan bersikap, bertindak dan bereaksi dengan cara kekerasan menegasi satu sama lain.
3. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan menentukan pilihan-pilihan yang tepat.
4. Dalam penyelesaian konflik, bukan hanya pihak-pihak yang bertikai saja, namun juga pihak yang terimbas konflik.
5. Resolusi konflik akan dapat menunjukkan akar penyebab konflik dengan kekerasan dalam sebuah kerangka dan proses yang memungkinkan pihak-pihak bermusuhan dapat mentransformasikan situasi tanpa penggunaan kekerasan.

---

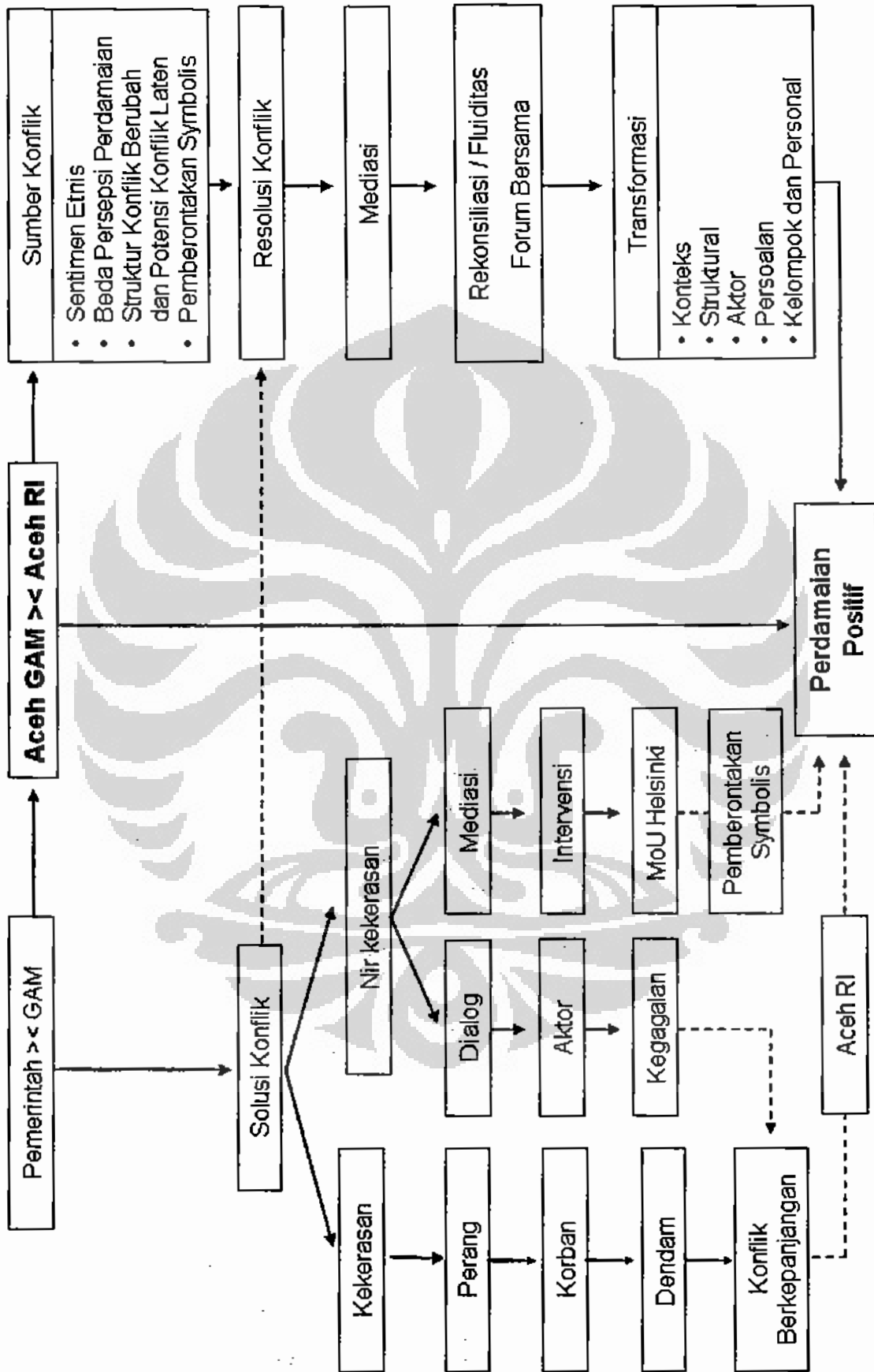
Membingkai kembali persoalan dapat membuka jalan bagi penyelesaian. (5) Transformasi kelompok dan personal. Pemimpin nasional perlu menyatukan dan menawarkan rekonsiliasi, pemimpin pemerintah perlu memutuskan untuk menerima lawan-lawannya ke dalam pemerintah".

6. Resolusi konflik tidak hanya berkaitan dengan persoalan pihak-pihak yang bertikai tetapi juga perubahan sosial, psikologi, politik dan insentif pihak-pihak yang bertikai, serta kemampuan sosial, atau institusional yang menentukan apakah sebuah penyelesaian dapat diterima dan berdayaguna.
7. Rekonsiliasi konflik, mengakui pentingnya fluiditas dengan pergeseran hubungan yang kompleks dalam proses rekonsiliasi.
8. Transformasi konflik, bermakna sebuah urutan langkah-langkah transisi yang diperlukan, dan merupakan perubahan terdalam dari proses penyelesaian konflik.
9. Resolusi konflik dalam kelompok atau antar kelompok, diperlukan transformasi konflik tanpa kekerasan dengan menganalisa lima aspek yakni : (1) transformasi konteks, (2) transformasi struktur, (3) transformasi aktor, (4) transformasi persoalan, (5) transformasi kelompok dan personal.
10. Resolusi konflik mempunyai tiga dimensi yakni : (1) Bidang akademis dan praktis khusus, yaitu sebagai tujuan dan aktivitas yang bersifat universal dan dipraktikkan oleh orang-orang seluruh dunia yang mungkin sadar atau tidak tentang istilah resolusi konflik. (2) Sebagai rumusan, merupakan diskripsi sebuah keberhasilan dalam proses perdamaian. (3) Relevan bagi kritik Gender.

Permasalahan teoritis, dalam perspektif Hugh Miall, adalah apakah dalam penyelesaian konflik Aceh, selama ini sudah mencerminkan upaya rekonsiliasi dan transformasi konflik. Jawaban sementara untuk hal tersebut adalah belum, karena dinamikanya belum menunjukkan struktur sosial yang lebih adil, dan kenapa hal itu masih terjadi, karena masyarakat Aceh Non GAM tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik Aceh. Sementara Aceh sendiri bukan hanya terdiri dari GAM saja, tapi ada elemen-elemen lain yang tidak sepaham dengan GAM bahkan menentangnya.

Selanjutnya, menurut peneliti, model analisis resolusi konflik yang dapat dikembangkan dalam penyelesaian konflik di Langsa (Aceh) pasca MoU Helsinki, dapat dilihat dalam skema (pembahasannya pada bab tersendiri) sebagai berikut :

**Model Analisis Resolusi Konflik**



## G. Metodologi Penelitian

### G.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah pendekatan yang menempatkan pandangan peneliti terhadap sesuatu yang diteliti secara subyektif, maksudnya peneliti sangat menghargai dan memperhatikan pandangan subyektif setiap subyek yang diteliti. Cresswel (2003 : 157), pada pendekatan kualitatif, peneliti harus selalu memahami pemaknaan individu (*subyektif meaning*) dari subyek penelitian, dia harus melakukan interaksi yang intensif dengan pihak yang diteliti, termasuk di dalamnya harus mampu memahami dan mengembangkan kategori-kategori, pola-pola dan analisa terhadap proses-proses sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang ditelitinya.

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari fakta sosial<sup>24</sup> secara empiris, lebih lanjut Creswell menjelaskan hal tersebut sebagai berikut :

- (1) Peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya hasil atau produk.
  - (2) Peneliti kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuat hidup, pengalaman, dan struktur dunianya masuk akal.
  - (3) Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk mengumpulkan dan menganalisa data, data didekati melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin.
  - (4) Peneliti kualitatif melibatkan lapangan, peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau insitusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya.
  - (5) Penelitian bersifat diskriptif, dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar.
  - (6) Proses penelitian kualitatif bersifat induktif.”
- (Creswell; 1994 : 140)

Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Asumsi dasar fakta sosial adalah, bahwa gejala sosial itu nyata, dan dapat mempengaruhi kesadaran individu, oleh karena itu dapat dipelajari secara empiris.

<sup>25</sup> Gumilar R. Somantri berpendapat dalam tulisannya yang berjudul “Memahami Metode Kualitatif” bahwa, keterlibatan dan interaksi peneliti kualitatif dengan realitas yang dicermatinya merupakan salah satu ciri mendasar dari metode penelitian kualitatif. Gaya penelitian kualitatif

Penggunaan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa : *Pertama*, untuk mengungkap fenomena timbulnya kelompok-kelompok pro pemerintah pusat dan anti gerakan separatisme, pemahaman masyarakat Langsa (Aceh) terhadap perdamaian dan potensi konflik yang akan datang serta menemukan formulasi resolusi konflik yang dapat dikembangkan menuju proses perdamaian positif. Maka lebih tepat dengan pendekatan kualitatif. *Kedua*, pertimbangan subyektif peneliti, bahwa dinamika yang terjadi di lapangan penelitian atau proses sosial yang diteliti, mencakup proses dinamis dan pemahamannya akan sulit dilakukan melalui suatu kuantifikasi (pengukuran) yang bersifat matematis terhadap gejala tersebut.

Selain pertimbangan tersebut juga berdasarkan pada tujuan penelitian kualitatif yaitu :

“*Pertama*, memahami makna (*meaning*), berangkat dari apa yang dikatakan oleh partisipan dalam studi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, situasi-situasi yang ada, dan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi subyek penelitian. *Kedua*, memahami konteks khusus yang berkaitan dengan tindakan-tindakan orang-orang yang berada di dalam lingkup subyek yang diteliti. *Ketiga*, mengidentifikasi fenomena yang tidak bisa diantisipasi berikut pengaruhnya dan mengembangkan teori-teori baru tentang masalah yang diteliti. *Keempat*, memahami proses melalui berbagai peristiwa-peristiwa dan tindakan terjadi, dan *kelima*, mengembangkan penjelasan kausal”. (Maxwell, 1996 : 17-20)

## G.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis<sup>26</sup>, metode deskriptif analisis dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung) pasca MoU Helsinki sampai dengan Pemilu 2009. Tujuan utama kita dalam menggunakan metode ini adalah “untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat

---

berusaha mengkonsentris realitas dan memahami maknanya. Sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subyek dengan jumlah relatif sedikit.

<sup>26</sup> Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas sosial yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. (Creswell 2007 : 68)

penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu". (Consuelo; 1993 : 71)

Selanjutnya mencoba memahami suatu fenomena, dengan menggunakan strategi studi kasus<sup>27</sup>, penelitian studi kasus dilakukan melalui pengamatan, kelompok diskusi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan subyek informan kunci. Studi kasus ditandai dengan kegiatan untuk mengumpulkan data dalam upaya peneliti mengganti proses terjadinya peristiwa atau pengalaman aktor sosial dalam suatu kejadian (Creswell; 1994 : 71).

Mengarah pada tujuan penelitian, maka dilaksanakan melalui studi kasus yang merupakan kombinasi dari pengamatan, untuk memperoleh gambaran menyeluruh baik komunitas yang diteliti, kelompok, situasi maupun institusi, untuk menemukan pola resolusi konflik yang dapat dikembangkan sekaligus mencegah timbulnya konflik baru. Menurut Rk. Yin (2003 : 13), bahwa ada beberapa sumber data yang diperkenankan dalam studi kasus, seperti : dokumen, rekaman, arsip, wawancara, pengamatan langsung serta observasi partisipan dan perangkat-perangkat lainnya.

Pelibatan informan kunci berjumlah 20 informan yang ditetapkan secara *purposive* (sengaja), karena masalahnya berkaitan dengan konflik dimana tidak setiap individu (warga masyarakat) mengetahui permasalahan konflik, berdasarkan peran individu tersebut, kemudian diperluas dengan menggunakan metode *snow ball* (bola salju)<sup>28</sup>, yakni berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan terdahulu sehingga dari informan yang satu ke informan yang lain dapat diperoleh informasi yang saling melengkapi.

---

<sup>27</sup> Untuk studi kasus, kelebihanannya tampak bila mana : pertanyaan "mengapa" atau "bagaimana" akan diarahkan ke serangkaian peristiwa kontemporer, dimana penelitiannya hanya memiliki peluang yang terbatas untuk melakukan kontrol terhadap suatu peristiwa.

<sup>28</sup> Digunakannya Snow Ball, untuk memudahkan komunikasi dan penciptaan raport, salah satu kultur di Aceh adalah menghargai silaturahmi yang direkomendasikan oleh kelompok atau orang-orang yang dianggapnya sejalan berdasarkan perjuangannya maupun kelompoknya, hal ini mempermudah peneliti melakukan wawancara. Informan yang diwawancarai memahami tentang gejala yang diteliti, karena keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan kelompok-kelompok gerakan pro NKRI dan informan yang mempunyai pemahaman tentang Aceh dalam konteks konflik, perdamaian serta resolusi konflik.

Penelitian kualitatif merupakan metode yang relevan, jika digunakan untuk mendapatkan data kualitatif melalui proses wawancara langsung. Informan<sup>29</sup> yang sudah ditemui dan diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Daftar Informan**

No	Informan	Keterangan
1	A	Bireun, 10 Februari 2008
2	B	Bireun, 9 Februari 2008, 2 September 2008
3	C	Langsa, 17 Maret 2008
4	D	Banda Aceh, 25 Agustus 2008
5	E	Langsa, 26 Oktober 2008
6	F	Banda Aceh, 25 Agustus 2008
7	G	Aceh Tengah, 24 Februari 2008
8	H	Banda Aceh, 24 Juli 2008
9	I	Meulaboh, 15 April 2008
10	J	Langsa, 24 Juli 2008
11	K	Langsa, 28 Oktober 2008
12	L	Langsa, 1 November 2008
13	M	Langsa, 25 Februari 2008
14	N	Tapak Tuan, 10 November 2008
15	O	Langsa, 29 Oktober 2008
16	P	Langsa, 25 Oktober 2008
17	Q	Langsa, 2 November 2008
18	R	Langsa, 30 Oktober 2008
19	S	Langsa, 15 Maret 2008
20	T	Langsa, 3 November 2008

### G.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara obyektif. Dalam studi ini peneliti menggunakan instrumen kualitatif sebagai berikut :

<sup>29</sup> Dari 20 Informan tersebut, selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi : 1) Anti GAM, 12 Orang (A, B, G, H, I, L, M, N, P, R, S, T) dan 2) Pro GAM, 1 orang (O), sedangkan yang netral 7 orang (C, D, E, F, J, K, Q). Untuk membangun rapport terhadap Informan yang Pro GAM, dilakukan peneliti ketika bersama-sama mengikuti Pelatihan Tutorial "*Conflict Resolution Management at Distrik and Provincial Levels in Indonesia*" yang diselenggarakan oleh kemitraan Indonesia dan Australia. Sehingga dapat tercipta komunikasi secara intim dan Informan dapat mengemukakan gagasan serta perasaannya dengan bebas. Disamping meminimalkan perbedaan status dan lebih mudah untuk mendapatkan Informan yang dibutuhkan.

### (1) Wawancara tak berstruktur

Salah satu teknik yang relevan, dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, atau biasa dikenal dengan istilah wawancara tak berstruktur. Wawancara mendalam adalah teknik wawancara yang didasarkan oleh rasa skeptis yang tinggi. (Muhamad dan Djaali; 2003:104)

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung, dan dapat berlangsung dalam suasana yang dinamis, sehingga menuntut kepekaan peneliti untuk bagaimana membangun hubungan yang baik dengan informan, agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta dilapangan. Hubungan yang berlangsung terus menerus, dikemas dengan pengertian bahwa wawancara bukan sekedar alat dan bagian semata, tapi lebih daripada itu merupakan suatu seni peneliti,<sup>30</sup> dapat membangun raport yang baik dan sangat membantu proses penelitian.

Wawancara tak berstruktur<sup>31</sup> dilakukan dengan informan kunci, yang terdiri dari : *Pertama*, para pengurus dan anggota serta simpatisan kelompok PETA (Aceh-RI) dan Tokoh ALA dan ABAS, baik yang pernah duduk atau sedang menjabat di lingkungan eksekutif dan legislatif maupun akademisi serta pengusaha. Karena mereka yang secara langsung terlibat dan memahami proses terbentuknya kelompok Pro-NKRI (FPSG/PETA) dan merasakan dinamika konflik di Aceh baik sebelum maupun pasca MoU Helsinki. *Kedua*, Ketua FORKAB Aceh yang memahami kelompok Pro-GAM dan mewakili kelompok GAM yang menyerah sebelum MoU Helsinki, memahami perjuangan GAM serta ikut aktif mengikuti perkembangan perdamaian di Aceh. *Ketiga*, ulama dan aktifis perempuan, tokoh masyarakat, mantan pejabat serta akademisi yang memahami terhadap perkembangan konflik Aceh dan berkepentingan pada perdamaian di Aceh.

<sup>30</sup> Menurut James dan Dean, wawancara hendaknya tidak hanya dilihat sebagai seni saja, wawancara menurut mereka merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan dapat memberi kenikmatan dan kepuasan. (James dan Dean; 1999 : 305)

<sup>31</sup> Wawancara tidak berstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara termasuk karakteristik sosial budaya informan yang diwawancarai.



## (2) Studi Dokumentasi dan Literatur

Studi dokumentasi dan literatur<sup>32</sup> dilakukan untuk menelaah berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan dinamika konflik dan perdamaian di Aceh, dan kelompok-kelompok Pro-NKRI (Aceh RI).

## (3) Observasi

Metode observasi<sup>33</sup> dilakukan untuk melihat bagaimana pengurus PETA dan masyarakat menjalani perdamaian dan menyikapi potensi konflik yang masih ada di Langsa (Aceh). Dilakukan pula observasi terhadap obyek yang relevan, seperti obyek fisik, kegiatan sosial dan organisasi serta kegiatan lain yang terkait, hasilnya direkam dan di foto. Hasil observasi ini akan sangat membantu dalam memperkaya data untuk membuat kesimpulan.

## (4) Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok<sup>34</sup> dilakukan di Hotel Sriwijaya Jakarta dengan 7 orang dari kelompok PETA dan pendukung ALA dan ABAS pada tanggal 23 Juli 2008 dan dengan kelompok PETA di Langsa, membahas dinamika konflik di Langsa (Aceh) Pasca MoU Helsinki dan resolusi konflik menuju Aceh damai di masa depan sekaligus konfirmasi data wawancara individual.

Penggunaan instrumen kualitatif tersebut didasarkan pada alasan<sup>35</sup> sebagai berikut :

“(1) Dari pengalaman penelitian sebelumnya, para pihak yang berkonflik cenderung bersikap hati-hati dalam memberikan informasi terhadap orang yang belum dikenalnya, sehingga peneliti harus membuka raport dengan tidak hanya cukup satu kali kunjungan.

<sup>32</sup> Studi dokumentasi dilakukan pada surat-surat, memoir, foto sedangkan literatur melalui berita koran, artikel majalah, berita TV dan buletin yang dapat memberikan gambaran/fenomena yang terjadi untuk melengkapi jawaban pertanyaan penelitian.

<sup>33</sup> Peneliti berperan sebagai pengamat, namun tidak terlalu aktif, atau secara langsung melibatkan diri dalam suatu kegiatan masyarakat yang menjadi subyek pengamatan.

<sup>34</sup> Diskusi kelompok, cukup riskan bila dilakukan di Aceh untuk itu diskusi terfokus penulis lakukan ketika para tokoh PETA pendukung ALA dan ABAS sedang berada di Jakarta, untuk mempersiapkan seminar kebangsaan dalam rangka memperteguh NKRI. Meneropong Masa Depan Aceh, Pembentukan Provinsi ALA dan ABAS pada tanggal 24 Juli 2008 di DPP-PDI Perjuangan, Lenteng Agung Jakarta.

<sup>35</sup> Beberapa alasan mengapa metode kualitatif digunakan, antara lain untuk melihat proses, makna dan substansi penelitian; lihat John C. Cresswell, *Research Design, Qualitative an Quantitative Approach*, Sage Publications, 1994, p.145-146.

(2) Dari segi informasinya para informan tidak dengan mudah memberikan informasi yang dianggap penting karena informasi ini dapat berkaitan dengan kepentingan kelompok atau orang tertentu.

(3) Tidak semua orang didalam komunitas mengetahui persis permasalahan konflik dan resolusi konflik.”

#### **G.4. Lokasi Dan Periodesasi Penelitian**

Kasus utama dalam studi ini adalah resolusi konflik di Langsa (Aceh) pasca MoU Helsinki, konflik di Aceh sebenarnya terkonsentrasi di beberapa daerah kabupaten/kota saja. Perbedaan intensitas konflik antar kabupaten/kota cukup signifikan. Konflik lebih terkonsentrasi di sebelah utara dan kawasan pantai timur. Alasan penelitian masalah dan pemilihan lokasi Kota Langsa didasarkan pada pertimbangan bahwa :

1) Karena kekuatan antara kelompok yang pro-GAM di Kota Langsa dan anti-GAM relatif berimbang. Perimbangan dua kekuatan ini penting karena salah satu fokus penelitian ini ialah analisis terhadap masyarakat Aceh non-GAM. Analisis terhadap masyarakat non-GAM penting karena perjanjian damai harusnya mengikutsertakan sedikitnya tiga pihak: GAM, pemerintah RI, dan orang Aceh non-GAM (Gardono, 2004); dengan kata lain bukan hanya pihak yang bertikai, namun juga pihak yang terimbas konflik (Miall, 2002). Kekuatan yang berimbang akan memberikan gambaran yang lebih dinamis ketimbang daerah yang didominasi salah satu kekuatan saja, oleh GAM seperti Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Calang atau sebaliknya dimana yang non-GAM lebih dominan seperti di daerah Ala dan Abas.

2) Pada tahun 2001 s/d 2003 peneliti pernah melakukan studi lapangan di tempat yang sama, sehingga pengalaman sebelumnya sangat membantu melengkapi pemahaman masalah. Dengan demikian, banyak hal yang dapat dipelajari dan dikembangkan terkait dengan perkembangan konflik dan resolusi konflik.

Konflik GAM dan Pemerintah RI tidak hanya terjadi di wilayah Aceh saja, namun juga di Jakarta (dalam pengertian perbedaan dan tarik menarik kepentingan), juga di masyarakat internasional (berebut pengaruh opini internasional). Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada pengertian konflik yang

mengambil tempat di Langsa (Aceh). Perbedaan ini perlu karena dalam analisis kemudian akan ditemui apa yang disebut pemberontakan bersenjata dan pemberontakan non-bersenjata, serta konflik lokal yang lebih bersifat horizontal. Perbedaan berdasarkan lokasi ini nantinya akan berguna dalam upaya melokalisir lokasi konflik dan bagaimana mengatasi konflik. Periode waktu dan kajian mengenai asal-usul konflik Aceh, pemetaan aktor-aktor konflik, dan situasi pasca MoU Helsinki sudah banyak dilakukan. Namun analisis mendalam terhadap dinamika pihak Non GAM belum banyak dilakukan. Periode penelitian ditetapkan antara pasca MoU Helsinki ditandatangani sampai dengan Pemilu 2009. Bencana tsunami dan simpati masyarakat global terhadap krisis kemanusiaan pasca tsunami dianggap ikut mendorong semangat perdamaian. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa diluar periode ini tidak menjadi fokus analisis sekalipun mungkin akan memberikan data tambahan dan terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam periode analisis.

#### **G.5. Analisa Data**

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisa data dengan mengklasifikasikan data terkait kelompok-kelompok pro NKRI, potensi konflik dan resolusi konflik. Menurut Miles dan Hubermans, terkait dengan analisa data adalah sebagai berikut :

“Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data, sebagai sekumpulan informan tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Hubermans; 1992 : 16-18)

Data yang diperoleh melalui wawancara (rekaman dan pencatatan), diskusi kelompok dipindahkan dalam bentuk tulisan, selanjutnya dilakukan pengelompokan data. Data yang berhubungan dengan masalah penelitian disatukan dan data yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian tidak dimasukkan agar memudahkan dalam mengolahnya. Untuk menganalisa hasil temuan di lapangan, peneliti mendiskusikannya dengan artikel dan makalah yang sejenis. Sementara data foto dan catatan lapangan yang diperoleh dari lapangan,

kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Demikian juga dengan data sekunder, diseleksi sejak saat pengumpulan, sehingga analisis dapat dilakukan terhadap data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian.

#### **H. Proses Penelitian**

Dalam proses penelitian, status peneliti yang bukan orang Aceh, dan juga sebagai seorang aparat, hal tersebut dapat berpengaruh pada subyektifitas. Namun peneliti telah melakukan pendekatan dan berbaur dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan subyek penelitian dalam jangka waktu yang relatif lama baik dalam penugasan, sedangkan selama penelitian dibantu oleh orang Aceh (Akademisi). Dinamika tersebut setidaknya dapat mengurangi atau meminimalisir perbedaan status serta membangun rapport dalam konteks penelitian untuk kepentingan Akademis.

Wawancara tak berstruktur dengan Informan dapat dilakukan dan dinamikanya tidak mengurangi kualitas dari studi ini, maupun menghalangi kinerja peneliti, dan dalam beberapa hal justru membantu dalam mengakses data yang dibutuhkan maupun observasi langsung ke lokasi penelitian. Meski diakui bahwa dalam proses penelitian terdapat beberapa hal khusus yang menjadi pertimbangan dan perhatian peneliti. Agar hal tersebut tidak menjadi hambatan/keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Fenomena traumatis terhadap dampak yang ditimbulkan dalam memberikan keterangan kepada peneliti, hal tersebut dimungkinkan karena masyarakat masih trauma akibat konflik berkepanjangan dan fenomena potensi konflik lokal di Aceh.
- 2) Terbatasnya nara sumber, karena dari substansi topik konflik adalah topik yang sensitif dan cukup sulit mencari nara sumber yang mau berbagi informasi secara terbuka. Peneliti harus membangun rapport, sekaligus menjelaskan terkait studi ini hanya untuk kepentingan akademik. Namun demikian hambatan dan keterbatasan tersebut tidak mengurangi kualitas studi ini dan tidak menghalangi kerja peneliti.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian tentang Resolusi Konflik Pasca MoU Helsinki : Studi Kasus Langsa, Provinsi Aceh. Dibagi dalam 7 bab, dengan uraian sebagai berikut :

Bab satu, penulisan dan elaborasi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, tehnik pengumpulan data, lokasi dan periode waktu studi dan analisa data, proses penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, penulisan dan elaborasi tentang sejarah konflik Aceh yang berisi: Aceh, penyebab konflik Aceh, lingkaran kekerasan dan korban konflik Aceh, penanganan konflik Aceh.

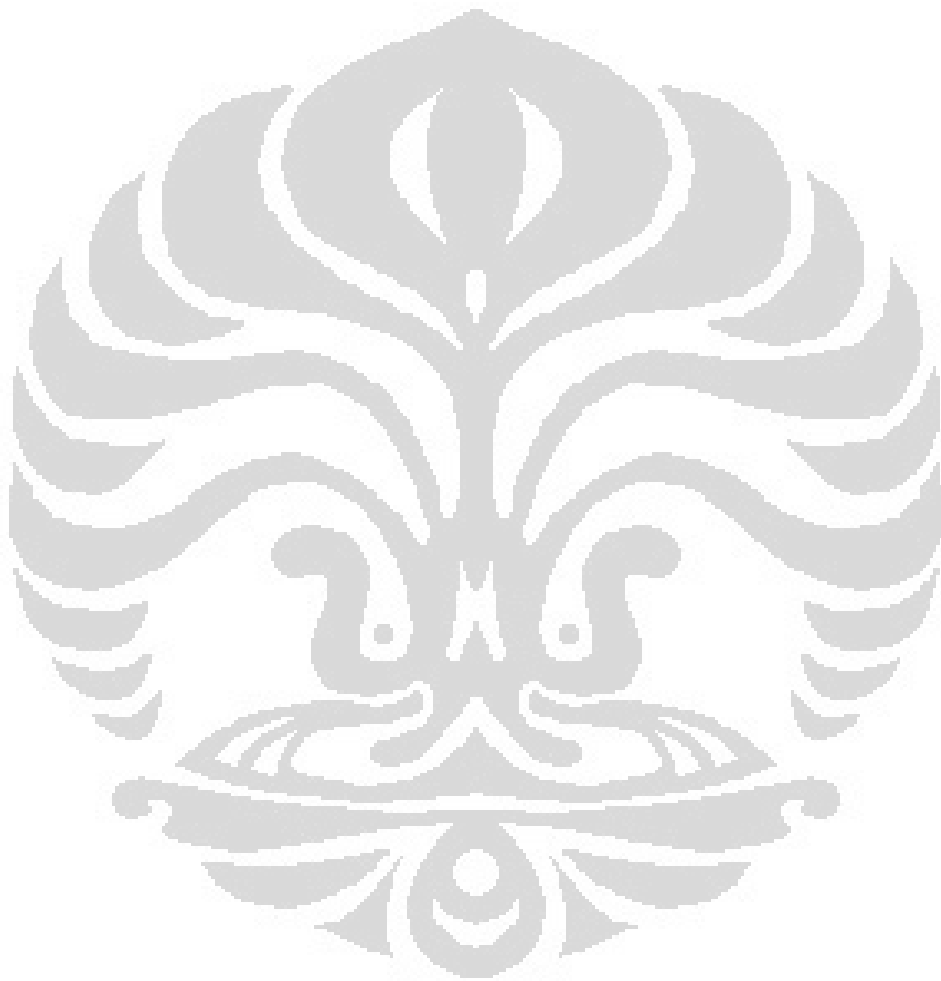
Bab tiga, penulisan dan elaborasi tentang masyarakat dan konflik di Langsa, berisi tentang Langsa, masyarakat Kota Langsa dilihat dari struktur sosial terutama karakteristik masyarakat dan struktur kelembagaan, perkembangan budaya dan ekonomi serta perkembangan konflik Langsa pasca MoU Helsinki.

Bab empat, dinamika konflik yang berisi tentang konflik berlanjut di Langsa menguraikan tentang kondisi Langsa (Aceh) yang masih rentan konflik disebabkan sentimen etnis dan kedalaman konflik, perbedaan persepsi terhadap perdamaian, perubahan struktur konflik dan potensi konflik laten, dan pemberontakan symbolis. Serta perkembangan konflik di Aceh.

Bab lima, resolusi konflik menguraikan tentang pendahuluan, resolusi konflik nir kekerasan, rekonsiliasi konflik, transformasi konflik membahas manfaat transformasi, saran komunitas untuk transformasi konflik dan saran untuk kelembagaan dalam transformasi konflik, serta analisis.

Bab enam, implikasi teoritis dan kebijakan. Penulisan dan elaborasi tentang implikasi teoritis terdiri dari pendahuluan, rekonsiliasi konflik, kemudian bagaimana konflik di Langsa (Aceh) mentransformasikan dirinya dilihat dari aspek transformasi konteks, transformasi struktur, transformasi aktor, transformasi persoalan, transformasi kelompok dan personil. Sedangkan implikasi kebijakan menguraikan tentang tantangan Langsa (Aceh) kedepan serta implikasi kebijakan yang disarankan.

Bab tujuh, penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II SEJARAH KONFLIK ACEH

### A. Aceh

Aceh<sup>36</sup> atau Atjeh merupakan bagian Provinsi Indonesia yang terletak di bagian ujung utara Pulau Sumatera. Ada banyak julukan yang dilekatkan pada wilayah tersebut seperti : Serambi Mekah, Tanah Lhee Sagoe, Tanah Rencong. Semua sebutan tersebut menunjukkan dinamika sejarah Aceh yang lekat dengan konflik. Selanjutnya disebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, meskipun banyak pihak, seringkali hanya menyebutnya Aceh.<sup>37</sup> Namun hal tersebut mempunyai pengaruh psikologis, dan secara tidak langsung justru mendorong terjadinya konflik, karena memberikan konotasi sebuah negara sendiri. Sehingga banyak pemimpin GAM khususnya, mereka menyebut dan mengaku sebagai Bangsa Aceh bukan suku Aceh. Dalam perkembangan berikutnya sebutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diganti menjadi Aceh pasca Pemilu 2009.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Aceh relatif kecil, karena daerah ini terus dilanda konflik. Banyak penduduknya yang migrasi ke provinsi lain, karena dianggap lebih aman. Dilain pihak perpindahan penduduk dari provinsi lain ke Aceh, justru mengalami penurunan, sehingga penambahan penduduk hasil migrasi neto menurun drastis.<sup>38</sup>

Aneka ragam bahasa, adat istiadat serta kebudayaannya, bernuansa ke-Islaman atau banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam Arab. Perkembangan sejarah dan peradaban suku bangsa Aceh mempunyai keunikan tersendiri, terutama banyaknya integrasi etnik atau campuran dan akhirnya ada yang disebut

<sup>36</sup> Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Th. 2009, tanggal 7 April 2009/11 Robiulakhir 1430, tentang penggunaan sebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan dalam tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Aceh.

<sup>37</sup> Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam meniti kemerdekaan, bahkan dalam kontribusi Aceh dalam pembangunan. Sementara kedudukan Aceh yang menjadi bagian dari Indonesia telah mengalami perubahan status dari daerah Administratif Sumatra Utara, sebagai Daerah Istimewa hingga Aceh. Provinsi Aceh mempunyai 17 kabupaten, 4 kota, 228 kecamatan, 642 mukim, 112 kelurahan dan 5.947 desa. (Banda Aceh: Pemprov Aceh, 2004)

<sup>38</sup> Lihat Pemerintah Provinsi Aceh, Profil Provinsi Aceh, 2004 Banda Aceh : Pemprov Aceh 2004. Penduduk di Provinsi Aceh 4.218.486 jiwa (sebelum tsunami) terdiri dari 2.119.628 jiwa laki-laki dan 2.098.858 jiwa perempuan. Penduduk ini hanya mengalami pertumbuhan 1,26 persen.

etnik Aceh.<sup>39</sup> Pembentukan identitas orang Aceh diperkirakan oleh sejarawan Anthony Reid telah berlangsung sejak terjadinya persentuhan antara peradaban di Aceh dengan jaringan internasional melalui perdagangan dan persebaran agama Islam. (Anthony Reid; 2006 : 20)

Orang Aceh dalam peta ini didapati beberapa kelompok masyarakat yang memiliki khazanah budaya dan adat-istiadat yang beragam. Meskipun ada kesamaan dan kemiripan, namun dijumpai pula perbedaan dalam teknis pelaksanaan atau bahkan dalam hal yang amat substansial khususnya terkait adat istiadat. Kekayaan khazanah adat ini tidak terlepas dari asal-usul terbentuknya masyarakat pada periode awal yang mendiami daerah ini. Karena lahirnya tradisi dalam masyarakat terbangun dari latar belakang kehidupan kelompok, agama, kepercayaan dan aturan-aturan penting yang disusun bersama, demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Tsunami disatu sisi telah mengakibatkan duka Aceh yang semakin dalam. Ratusan ribu orang tewas dalam waktu sekejap, bahkan jumlah korban tsunami menambah besar jumlah korban konflik Aceh yang sudah berjalan beberapa dekade.<sup>40</sup> Tapi disisi lain, justru melahirkan hikmah dicapainya perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah RI melalui MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, banyak kemajuan yang telah diperoleh dan cukup dirasakan oleh masyarakat yang berada di Aceh. Namun disisi lain timbul berbagai

<sup>39</sup> Menurut Rani, Etnik Aceh atau suku Aceh diduga berasal dari India dan Timur Tengah. Suku bangsa Aceh mempunyai kemiripan dengan etnik melayu yang hidup di nusantara maupun dengan semenanjung melayu lainnya. Kedatangan imigran Aceh sebelumnya membawa suatu peradaban baru bagi penghuni Aceh sebelumnya, seperti suku mante dan melayu tua yang sudah lama berdomisili di Aceh. Disamping itu terdapat kesamaan warna kulit dan bentuk wajah dengan orang India dan Timur Tengah, sehingga kuat dugaan bahwa suku Aceh tersebut berasal dari Hindustan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum masehi dan awal tahun masehi, banyak imigran dari India dan Timur Tengah berdomisili di Aceh (Rani, 2003 : 1). Bahasa Aceh merupakan bahasa yang berkembang sesuai dengan perkembangan budaya Aceh sendiri. Bahasa Aceh sudah mengalami proses perubahan yang panjang, perubahan ini dipengaruhi oleh pertukaran budaya dengan bangsa asing di dunia. Menurut Asyik bahasa Aceh merupakan turunan dari satu rumpun bahasa yang dinamakan Austronesia (Ismuha, 1988 : 142).

<sup>40</sup> Sejarah konflik di Aceh dimulai tahun 1520 dalam perang dengan Portugal, perang melawan Belanda, Jepang, Perang Cumbok, konfrontasi dengan Pemerintah RI dalam pemberontakan DI/TII, serta GAM dalam upaya menuntut kemerdekaan/pemisahan diri dengan Indonesia. Lihat Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke 19*, Terjemahan Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor, Th. 2005.



permasalahan, yang apabila dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik, maka akan mengganggu terciptanya perdamaian di Aceh.<sup>41</sup>

Penduduk di Provinsi Aceh terdiri atas beberapa etnik dan ras, sekaligus antara etnik tersebut mempunyai kebudayaan tersendiri yang berbeda. Keragaman budaya di Aceh merupakan suatu hal yang alamiah sejak awal perkembangan peradaban Aceh sendiri. Provinsi Aceh merupakan *a multi ethnic moeslim province*.<sup>42</sup>

Etnik Aceh ini diperkirakan berasal dari negara India, Indo Cina dan Persia, yang umumnya berdomisili di daerah pedalaman maupun di pesisir Aceh. Etnik Aceh terdiri dari : Etnik Aceh, Etnik Gayo, Etnik Tamiang, Etnik Alas, Etnik Aneuk Jamee, Etnik Kluet, Etnik Melayu Singkil, Etnik Defayan, dan Etnik Sigulai.<sup>43</sup> (Rani; 2003 : 39)

Mayoritas etnis di Aceh : Aceh, Gayo dan Alas. Masyarakat etnis Aceh mendiami daerah pantai, Suku Gayo dan Alas mendiami dataran tinggi Aceh, Suku Gayo sebelah utara dan Suku Alas di sebelah selatan.

Kehidupan multikultural di Aceh telah lama terjalin sedemikian rupa sejak interaksi bangsa-bangsa masuk ke Aceh. Adanya interaksi di Aceh menimbulkan

<sup>41</sup> Menurut Simon; Permasalahan (konflik) akan bermuara positif bila dapat dikelola dengan baik. Sehingga akan terbangun kepercayaan dan kesadaran bahwa manusia memang memiliki keragaman dan saling menghargai satu sama lain. Upaya saling menghargai, saling memahami, mengakui kekeliruan dan keterbatasan diri sendiri merupakan konflik yang bermuara pada nilai positif. (Simon; 2001 : 79)

<sup>42</sup> Lihat Aris Ananta, *"The Population and Conflict Aceh"*, Singapore, ISEAS, 2007, hal. 22. Pada tahun 2000, sekitar 97,03% penduduk Provinsi Aceh beragama Islam, dan 2,30% sisanya adalah Kristen. Secara etnik, terdapat delapan etnik yang hidup dan tinggal di Provinsi Aceh yaitu Aceh, Jawa, Gayo, Alas, Singkil, Simeuleu, Batak dan Minangkabau. Sebagian besar orang Aceh tinggal di Pesisir Barat Aceh, orang-orang Jawa tinggal di daerah perkebunan (pedalaman) sedangkan Gayo dan Alas di daerah pegunungan.

<sup>43</sup> Etnik Gayo merupakan salah satu sub etnik Aceh yang hidup dan berkembang di dataran tinggi tanah Gayo. Etnik Gayo ini merupakan sub etnik yang mendekati atau hampir sama dengan etnik Batak. Dilihat dari bahasanya yang mirip dengan bahasa dan budaya Tapanuli, Etnik Gayo banyak hidup di pedalaman Aceh Tengah (Zainudin, 1961:26). Sedangkan menurut Rani, Etnik Tamiang, menurut sejarah merupakan turunan dari melayu yang berasal dari kerajaan Sriwijaya, merupakan etnik pendatang di Aceh banyak tinggal di Kuala Simpang Aceh Tamiang, etnik ini dapat dengan cepat menyatu dengan etnik lainnya di Aceh karena kelembutan serta keramahannya. Etnik Tamiang sering disebut dengan melayu taming atau Aceh Tamiang. Etnik Alas, secara antropologi mendekati etnik Karo yang ada di Sumatra Utara, bahasa adat istiadat dan pakaiannya juga mirip, masih mempunyai marga keturunan serta kedekatannya dengan suku batak sangat erat tinggal di Aceh Tenggara. Etnik Aneuk Jamee (dalam bahasa Aceh, kamu pendatang) merupakan etnik pendatang. Etnik Kluet merupakan salah satu turunan dari etnik Alas. Etnik Singkil adalah etnik yang hidup di daerah Singkil. Etnik Defayan dan Sigulai, etnik ini hidup di daerah Pulau Simeuleu, etnik ini merupakan turunan dari etnik Nias di Sumatra Utara, tapi penganut agama Islam. (Rani. 2003 : 39-42)

adaptasi dan asimilasi menjadi masyarakat yang plural. Sehingga masyarakat Aceh sejak zaman dahulu sudah terbuka dan kehidupannya pun berjalan secara alamiah, dapat menerima pembaharuan bagi perkembangan dan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi untuk kemajuan daerahnya sendiri, meski pada perkembangannya banyak diwarnai religi Islam.

Menurut seorang Informan G, dari wawancara tanggal 24 Februari 2008, menyampaikan :

“Secara histories suku bangsa Aceh terjadi karena adanya integrasi imigrasi atau pendatang dari luar, sehingga lahirnya suatu etnik Aceh yang kebanyakan tinggal di sepanjang pantai utara Aceh. Disamping ada etnik lain yang mengaku sebagai suku asli Aceh seperti etnik Gayo, etnik Tamiang, etnik Alas, etnik Ameuk Jamee (Pendatang), etnik Melayu Singkil. Perkembangannya saling beradaptasi dan berasimilasi menjadi masyarakat yang pluralis, meski etnik Aceh merupakan bagian dari etnik yang lain yang ada di Provinsi Aceh. Sebenarnya kalau obyektif kita melihat dari jumlah penduduk Aceh secara keseluruhan maka akan terlihat penduduk yang kontra dengan GAM lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk yang pro dengan GAM meskipun sulit dipersentasikan dengan data statistik.”

## **B. Penyebab Konflik Aceh**

Konflik Aceh dimulai dalam perang mengusir Portugal, berikutnya adalah melawan Belanda. Setelah menjadi bagian dari NKRI, konflik dengan Pemerintah Pusat dalam pemberontakan DI/TII, Perang Cumbok dan perlawanan GAM terhadap Pemerintah Pusat, menuntut merdeka, memisahkan diri dari NKRI.

Semenjak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Aceh sering digambarkan sebagai salah satu daerah yang tingkat resistensinya paling besar terhadap Pemerintah Pusat (Jakarta).<sup>44</sup> Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat dimulai saat Presiden Soekarno membubarkan dan melikuidasi Provinsi Aceh kedalam Provinsi Sumatera Utara. Diberlakukannya Undang-Undang No. 5

<sup>44</sup> Menurut Pane, Konflik Aceh diawali dari peristiwa Perang Cumbok tahun 1945 berakhir tahun 1946. Sejak Indonesia diproklamkan kemerdekaannya oleh Ir. Soekarno dan Muh. Hatta di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Teuku Muhammad Daud Cumbok sangat menentang kaum ulama dan kaum bangsawan Aceh yang mendukung Soekarno dan Muh. Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia dalam memproklamkan serta menjalankan pemerintahan baru. Kaum Hulu Balang tidak sependapat dan tidak setuju, maka mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang baru saja diproklamkan, inilah awal dimulainya perlawanan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat. (Pane, 2001:3)

Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, menggantikan UU No. 18 Tahun 1965 yang didalamnya diatur mengenai keistimewaan Aceh, hal tersebut sekaligus menandai berakhirnya status Aceh sebagai daerah istimewa. Dampaknya menjadikan permasalahan konflik di Aceh menjadi semakin rumit.

Pada tanggal 21 April 1953 dilaksanakan kongres alim ulama se-Indonesia yang berlangsung di Medan (Sumatera Utara) yang diketuai oleh Daud Beureueh, kongres ini dilaksanakan membahas tentang perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia (RI) menjadi Negara Islam Indonesia (NII). NII diproklamkan tanggal 17 Agustus 1949 oleh Kartosoewirjo di Jawa Barat. Ide ini menjadi motivator dari tokoh Islam radikal di seluruh Indonesia termasuk di Aceh NII terus menyusun kekuatan, dan membentuk pasukan DI/TII di Aceh. (Anhar Gonggong, 2004 : 2)

Gerakan ini berhasil membawa sebuah bentuk otonomi bagi Aceh, dengan diberlakukannya daerah istimewa, untuk mengatur daerahnya terutama dalam hal agama, adat istiadat dan pendidikan. Akan tetapi pada kenyataannya kebijakan ini tidak diberlakukan secara ideal.

Perlawanan Aceh kepada Pemerintah Pusat kembali meletus tanggal 15 Februari 1958, dengan sebutan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta. Bentuk perlawanan ini mereka lakukan karena Pemerintah Pusat kurang memperhatikan kondisi daerah, kemudian periode Agustus 1961 Daud Beureueh memproklamkan berdirinya Negara Republik Islam Aceh. Gerakan inipun berakhir setelah disetujui tentang pembahasan Syariat Islam dan Tentara Rakyat Aceh yang telah menyerah mau bergabung dengan kemiliterannya diterima dalam tubuh TNI dan diberi pangkat setingkat dengan jabatannya di Tentara Rakyat Aceh. (Pane, 2001 : 27-30)

Setelah Orde Lama berakhir, diganti Orde Baru dipimpin Presiden Soeharto Aceh kembali digoncang konflik. Soeharto menindak segala bentuk kegiatan yang bertujuan melawan Pemerintah Pusat. Terjadi kecemburuan sosial yang tinggi akibat ketidakadilan dalam berbagai bidang sosial, seperti pembagian tenaga kerja lokal dan pusat serta pembagian hasil bumi. Banyaknya tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di Provinsi Aceh membuat penduduk Aceh merasa tersisih dari tenaga kerja yang berasal dari Jawa.

Akumulasi dari berbagai permasalahan tersebut kemudian melahirkan sebuah gerakan pemisahan diri dibawah bendera Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF), yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah Pusat kemudian meresponnya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menumpas gerakan tersebut, termasuk operasi militer. Namun konflik tidak kunjung usai, kekecewaan masyarakat Aceh semakin kuat, akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Pada tahun 1976, Hasan Tiro memelopori pemberontakan Rakyat Aceh (GAM) terhadap Pemerintah Pusat, dengan memanfaatkan isu-isu kolonialisasi Jawa Indonesia terhadap sumber-sumber alam di Aceh dan berhasil meraih simpati masyarakat. Berhasilnya pembentukan komunitas basis yang loyal, telah membuat GAM berkembang menjadi suatu organisasi yang kuat, baik dari anggota maupun kekuatan militernya.<sup>45</sup> Organisasi ini dirintis pertama kali oleh Hasan Tiro yang sebelumnya juga terlibat dalam gerakan DI/TII di tahun 1953, sempat diangkat oleh DI/TII sebagai duta besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ledakan kebencian<sup>46</sup> yang disalurkan melalui berbagai bentuk tindakan kekerasan telah menelan banyak korban jiwa, harta benda, kebanyakan yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak tahu menahu dan berperan pasif, orang-orang yang bukan pribumi asli (pendatang) serta orang-orang yang bekerja pada instansi pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI. Hal ini menjadi sumber utama konflik Aceh menjadi berkepanjangan dan sulit mencari solusinya. Konflik di Aceh dari segi waktu dan intensitasnya telah berkembang menjadi salah satu konflik yang paling brutal di Indonesia. Kesimpulan ini diambil dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan HAM yang terjadi di Aceh.

---

<sup>45</sup> Menurut Al Chaidar (1990 : 7), pada masa pemerintahan Soeharto yakni tahun 1989 ratusan anggota GAM yang dilatih di Libia kembali ke Aceh. Usaha pelatihan angkatan bersenjata GAM ini dirintis oleh Hasan Tiro, sekitar 400 personel dilatih secara militer oleh pemerintah Libia yang juga menyediakan dukungan finansial terhadap gerakan ini. Setelah menyelesaikan pelatihan masing-masing personel juga memperoleh tunjangan sebesar US \$ 500 untuk kembali ke Aceh. Mereka masuk ke Indonesia dan memulai gerakannya di Aceh medan dan Jakarta. Para personil ini kemudian dikenal sebagai Angkatan Gerakan Aceh Merdeka atau AGAM.

<sup>46</sup> Menurut Smelser, ledakan kebencian adalah mobilisasi tindakan atas dasar kepercayaan umum untuk menuntut tanggung jawab dari suatu pranata atas suatu keadaan/peristiwa yang tidak dikehendaki. (Smelser, 1962 : 9)

Beberapa hal yang diduga keras juga memperkuat rasa kebencian dan ketidakpuasan masyarakat Aceh pada Pemerintah Pusat, antara lain adalah sebagai berikut :

- “(1) Perasaan orang Aceh dijajah oleh orang non Aceh terutama oleh orang Jawa.
- (2) Dendam terhadap berbagai kekejaman masa lalu baik semasa DI/TII maupun semasa Orde Baru dalam penyelesaian konflik GAM itu sendiri.
- (3) Kekayaan alam bumi Aceh dirasakan tidak kompensir secara proporsional oleh Pemerintah Pusat jadi dapat dikatakan aspek ketidakadilan.
- (4) Janji-janji Pemerintah Pusat, dirasakan belum sepenuhnya ditepati khususnya yang berkenaan dengan tiga aspek keistimewaan Aceh yaitu bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat.
- (5) Ketidak seriusan Pemerintah Pusat dalam menangani konflik Aceh”. (Jurnal Hukum Ultimatum, Agustus 2003)

Pendapat senada disampaikan Tippe (2000 : 75-78), bahwa ada lima hal pokok yang harus dipisahkan dengan tegas terkait akar permasalahan konflik di Aceh, yang berkepanjangan, antara lain :

- “(1) Ketidakpuasan kolektif Masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat, terutama akibat tidak berimbangnya neraca keadilan ketika membagi hasil-hasil sumberdaya alam Aceh antara pusat dan daerah, kondisi inilah yang berlangsung dalam rentan waktu puluhan tahun.
- (2) Kehadiran kelompok GAM yang ingin memisahkan diri dari NKRI melalui tindakan separatis, bersenjata, radikal dan seara struktural muda Aceh dan merupakan kelompok tradisional idealis.
- (3) Kelompok-kelompok diluar GAM, yang mempresentasikan kaum intelektual muda Aceh dan merupakan kelompok tradisional idealis.
- (4) Kelompok elit tradisional yang terdiri dari ulama dan tokoh masyarakat.
- (5) Kurang tegas dan serius serta tidak mapannya Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan konflik di daerah tani”.

GAM menjadi perhatian publik dan Pemerintah Pusat, setelah mereka menegaskan kembali keberadaannya di tengah krisis multi dimensi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kebangkitan gerakan ini merisaukan

pemerintah lokal maupun pusat, apalagi ketika gerakan ini semakin membesar dan sulit dipadamkan.<sup>47</sup>

Iwan Gardono dalam Julan, mencatat beberapa gerakan bernuansa konflik pemerintah versus masyarakat yang terjadi di Aceh pada masa lalu, yaitu :

“(1) Tuntutan pencabutan DOM oleh Dewan Ulama pada 28 Mei 1998, (2) Tuntutan serupa oleh mahasiswa (Komite Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh) pada 11 Agustus 1998, (3) Tuntutan mahasiswa mencakup 80% hasil sumber alam untuk Aceh, amnesti dan aboksi bagi tahanan politik dan hukuman bagi pimpinan militer (pelanggaran HAM) pada 10 Desember 1998, (4) Pada 7 Januari 1999 tuntutan yang diajukan oleh Gubernur, Komandan Korem, DPRD dan Rektor Universitas berisi 5 (lima) hal : a) pengusutan pelanggaran HAM di era DOM, b) amnesti dan rehabilitasi semua tahanan politik, c) pelaksanaan otonomi luas dan pemberian 80% dari hasil sumber daya alam, d) pelaksanaan Syariah, e) dukungan pada Presiden Habibie dan Integrasi Indonesia, (5) Permintaan untuk referendum mulai dikumandangkan oleh kongres mahasiswa dan pemuda, pada 4 Februari 1999, (6) Pengulangan tuntutan referendum pada 8 November 1999.” (JULAN. 2005 : 74)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak GAM, untuk memperjuangkan keinginannya baik dari segi diplomasi, agar memperoleh dukungan dari dalam dan luar negeri. Termasuk kegiatan bersenjata melalui pendidikan militer diluar negeri maupun di Aceh, untuk mengadakan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat. Sementara argumen Pemerintah Pusat memerangi GAM, karena GAM ingin melepaskan diri dari NKRI atau merdeka. Bahkan sudah membuat susunan pemerintahannya sendiri sampai ke tingkat desa dan memiliki angkatan perang yang dinamakan TNA (Teuntara Neugara Aceh) dengan Wali Negara Hasan Tiro.

Jauh sebelum terjadinya gempa dan tsunami, situasi Aceh memang sangat kompleks, yang disebabkan konflik kekerasan yang berlangsung dalam periode berlainan. Aceh menunjukkan ironisme antara identitas Aceh sebagai Serambi Mekah sekaligus sebagai serambi kekerasan (Kontras, Februari 2006). Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah Aceh. Menurut Bhakti, dinamika konflik Aceh adalah sebagai berikut :

<sup>47</sup> Selama sepuluh tahun di Aceh mengalami penderitaan akibat DOM, akhirnya GAM berhasil membakar atau menghasut orang Aceh untuk memberontak sebagai balas dendam kepada Pemerintah Pusat. Tahun 1989-1998 merupakan periode yang paling berdarah dalam sejarah konflik Aceh. (Kamaruddin Hasan. 2008 : 178)

“*Pertama*, konflik dalam konteks kolonialisme Belanda dan masa Pendudukan Jepang. Belanda menjajah Aceh sekitar 70 tahun menyebabkan rusaknya tatanan sosial, ekonomi dan politik di Aceh disatu sisi, serta mengubah stratifikasi sosial dengan berkembangnya sistem ekonomi kapitalistik melalui masuknya perkebunan di Aceh. Politik kolonial itu sekaligus menajamkan persaingan diantara kelompok elit di Masyarakat Aceh. Pendudukan Jepang berlangsung dalam periode singkat dari 1942-1945 pun mengakibatkan menajamnya pembelahan sosial terutama dengan penerapan “politik keseimbangan” antara kelompok elit ulama dan ulebalang. *Kedua*, setelah berakhirnya pendudukan Jepang, Rakyat Aceh menyaksikan konflik sosial antara kaum ulebalang dan ulama yang dikenal dengan “Perang Cumbok” yang berlangsung antara bulan Desember 1945 sampai Februari 1946. *Ketiga*, munculnya gerakan Darurat Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dipimpin oleh Gubernur Militer Aceh, Tengku Daud Beureueh, bermula dari keputusan pemerintahan Soekarno dan Hatta menyatukan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. *Keempat*, di masa Orde Baru, terjadilah konflik kekerasan antara RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berlangsung sejak 1976. Konflik ini bermula dari perlakuan tidak adil oleh Pemerintah Pusat terhadap Rakyat Aceh, terutama dalam pembagian hasil dan pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan ekonomi yang dirasakan oleh Rakyat Aceh dalam program pembangunan Orde Baru memicu sebagian aktor elit, yang kemudian memproklamkan Aceh merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro”. (Bhakti; 2008 : 41-43)

Berakhirnya masa Orde Baru yang tragis dan diganti dengan masa Reformasi, membawa iklim kebebasan bagi rakyat Aceh. Beberapa peluang memang didapat pada masa reformasi ini, seperti dicabutnya status DOM bagi Aceh, diberlakukannya usaha-usaha rekonsiliasi dengan cara damai dan ditandai juga dengan permintaan maaf Pemerintah Pusat, yang pada saat itu oleh BJ. Habibie, atas kesalahan pendahulunya. Namun masa reformasi di bawah kepemimpinan Presiden BJ. Habibie ini tidak berlangsung lama. Justru ketika keadaan mulai relatif tenang, ada perubahan wacana politik nasional yang berdampak pada proses rekonsiliasi itu. Berbagai pendekatan yang diambil oleh pemerintah transisi sejak masa B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri pada akhirnya mengalami jalan buntu sehingga permasalahan konflik Aceh masih berlarut-larut dan berkepanjangan.

Konflik antara GAM dengan Pemerintah RI, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus

2005. Pemerintah Republik Indonesia dan GAM menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

MoU Helsinki, menandai berakhirnya konflik bersenjata di Aceh. Ruang perdamaian ini kemudian mendorong aliran dana dari para donor internasional untuk membantu pemulihan pasca bencana di Aceh. Ketika NGO Internasional dalam konteks bantuan mengalir masuk ke Aceh, beberapa NGO lokal kemudian menjadi mitra mereka. Sementara NGO internasional hanya sedikit yang memahami tentang isue-isue konflik yang masih sangat sensitif, serta dinamikanya masih tetap mewarnai proses rekonstruksi, rehabilitasi dan reintegrasi di Aceh.

Fenomena konflik di Aceh masih membawa perdebatan, baik dikalangan elit legislatif, eksekutif dan masyarakat luas. Sementara penduduk Aceh sendiri masih dalam kondisi yang rentan konflik.

### C. Lingkaran Kekerasan Dan Korban Konflik Aceh

Berbagai pihak sudah melakukan berbagai upaya penanggulangan kekerasan.<sup>48</sup> Namun kerusuhan masih kerap terjadi di Aceh, karena kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap berbagai permasalahan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya, ekonomi, politik, dan keamanan di Aceh.

Dinamika konflik Aceh mengakibatkan banyak korban disebabkan oleh :

“*Pertama*, merupakan tanggapan terhadap tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di masa lalu. *Kedua*, adanya janji dari pemimpin pemberontak untuk mendiskusikan secara adil sumberdaya alam seperti gas dan minyak bumi kepada warga Aceh, jika kemerdekaan dicapai oleh gerakan separatis tersebut. *Ketiga*, gerakan itu menggunakan sejarah masa lalu untuk memperkuat identitas kolektif mereka yang berbeda dari Indonesia.” (Tippe, 2000 : 75-78)

Semua tindakan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh GAM, dengan alasan demi perjuangan, untuk merealisasikan keinginan merdeka untuk

<sup>48</sup> Kedua belah pihak menyepakati bentuk-bentuk aksi yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan seperti menghadang, menyerang, menembak kecuali bela diri, menganiaya, membunuh, menculik/ menyandera, meledakkan, membakar, merampas harta benda, mengancam atau mengintimidasi, meneror, pelecehan, menangkap diluar prosedur, memperkosa dan menggeledah diluar prosedur (Kontras no 124).



kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun justru mengorbankan Rakyat Aceh yang tidak mau mendukung GAM, karena tidak semua Rakyat Aceh bersimpati dan mendukung atau menjadi anggota GAM. Sehingga potensi dan wilayah konflik di Aceh, menjadi melebar dari konflik vertikal, kemudian muncul pula konflik horizontal.

Kekerasan merupakan lingkaran setan, kekerasan akan melahirkan kekerasan, kemudian lahirlah masyarakat yang penuh budaya kekerasan, yang belum ditemukan di Aceh adalah pemutusan budaya kekerasan. Tidak sedikit masyarakat sipil yang justru menjadi pelaku kekerasan,<sup>49</sup> seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan, perampokan, penembakan, pengrusakan, intimidasi dan lain-lain sebagaimana yang terjadi di Aceh. Arendt (1970 : 65), penggunaan kekerasan pada saat konfrontasi dalam suatu peristiwa, sering terjadi karena kekerasan dianggap lebih cepat mengubah suatu kondisi. Amarah maupun kekerasan, pada kondisi tertentu dianggap satu-satunya upaya untuk mendapatkan keadilan, namun hal itu bukan berarti manusia yang terlibat tidak manusiawi. Amarah dan kekerasan mengarah pada irasionalitas ketika keduanya diarahkan untuk menciptakan keadilan yang baru.

Kenyamanan hidup di Aceh pada masa DOM dan pasca DOM serta pasca MoU Helsinki sama-sama bermasalah meski intensitas tindakan kekerasannya berbeda. Pada masa DOM orang dibunuh, diculik atau ditangkap dan ditahan, seakan merupakan tindakan pembenaran yang dilindungi hukum. Pasca DOM, situasinya nyaris tidak ada perbedaan orang diculik di rumahnya, ditembak di depan anak istrinya, di pasar bahkan pada saat hendak ke mesjid dan pulang tadarus. Sementara tak ada yang berani bertanya apalagi mengusut siapa

---

<sup>49</sup> Kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM, ternyata tidak hanya dilakukan oleh Aparatus Pemerintah pada konflik seperti yang terjadi di Aceh, masyarakat sipil juga terlibat berbagai tindak kekerasan. Ketika aparat pemerintah negara terlibat, biasanya dalih yang digunakan adalah patuh terhadap pemerintah demi stabilitas pertahanan keamanan. Namun apabila masyarakat sipil terlibat, seperti juga kasus Mei, alasan yang dikemukakan adalah karena termakan oleh provokasi dari pihak-pihak yang tidak jelas identitasnya (Pitaloka, 2004 : 78). Menurut Poerwandari, "kekerasan dapat dilakukan oleh individu, oleh kelompok, mungkin oleh negara (baik oleh aparaturnya, maupun sebagai suatu sistem), dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban maupun yang tidak kenal korban, dapat merupakan bentuk penyelesaian masalah personal, bentuk rekayasa kelompok produk kebencian suku, agama dan sebagainya. Masuk didalamnya kekerasan laki-laki terhadap orang lain, individu maupun kelompok, terhadap perempuan, mungkin juga kekerasan perempuan terhadap manusia lain, tidak mustahil pula kekerasan manusia terhadap dirinya sendiri melalui mutilasi, pembunuhan diri." (Poerwandari, 2002, 325)

pelakunya. Pasca MoU Helsinki tetap marak adanya intimidasi perampokan bersenjata, penculikan, pembunuhan dan pemerasan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya senjata ilegal yang beredar di Aceh, sebagai sarana kekerasan.

Dinamika kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM ternyata tidak hanya dilakukan aparat pemerintah pada konflik seperti yang terjadi di Aceh, terlihat masyarakat sipil khususnya yang bersenjata terlibat dalam berbagai tindak kekerasan. Ketika aparat negara terlibat, biasanya dalih yang digunakan adalah patuh terhadap pemerintah demi stabilitas pertahanan dan keamanan. Namun jika masyarakat sipil terlibat dengan mudah dikatakan bahwa pelakunya adalah GPK,<sup>50</sup> atau karena adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak jelas identitasnya, yang menempatkan masyarakat umum dalam sudut ketakutan. Tiada hari tanpa nyawa yang melayang, bumi Aceh itu setiap hari basah dengan darah anak-anak negerinya sendiri.

Aceh pasca DOM jumlah nyawa yang melayang tanpa sebab yang jelas mencapai 530 orang, artinya bila diakumulasi setiap hari mencapai satu sampai tiga orang tewas di Aceh. Angka itu meroket 40,4% dibanding masa DOM yang jelas yang menelan korban 13221 jiwa dalam rentang waktu 10 tahun (1989-1998) ini pertanda bahwa telah terjadi proses dehumanisasi yang besar dalam konflik Aceh, ungkap Syaefudin Bantasyam, SH. MH Direktur Eksekutif FP-HAM Aceh (Media Indonesia 30-12-1999). Sementara berbagai kejadian tindakan pidana yang menonjol sebelum MoU dan pasca MoU Helsinki adalah sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), adalah lebel yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada gerakan yang menentang di daerah tersebut, hal tersebut berbeda dengan pemahaman masyarakat di daerah. Bagi Pemerintah Pusat, aspirasi bersenjata yang mengganggu stabilitas NKRI diberi label GPK (separatis).

**Tabel 3**  
**Perbandingan Situasi Kriminalitas Sebelum MoU dan Pasca MoU**

No.	Jenis Kasus	22 Sebelum MoU (15-10-2003 s/d 14-08/2005 )	22 Setelah MoU (15-10-2005 s/d 14-08-2007 )
1	Rampok dgn Senpi	10	172
2	Curas	29	126
3	Curat	4	125
4	Curanmor	15	519
5	Ancam/Peras	37	52
6	Penganiayaan	23	182
7	Pengrusakan	9	29
8	Pajak Nanggroe	25	32
9	Perompakan	2	9
10	Sweeping / GAM	20	8
11	Bakar Ranmor	8	5
12	Narkoba	104	316
13	Pemb/Kebakaran	51	184
14	Unras	15	76
Jumlah		352	1833

Sumber : Polda Aceh

Sebelum adanya MoU Helsinki, GAM sering melakukan dan menebarkan teror<sup>51</sup>, seperti kekerasan maupun intimidasi untuk mempengaruhi secara destruktif agar masyarakat Aceh patuh dan takut pada GAM.

Konflik di Aceh sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya terorisme di Aceh. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan serta pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia pada dasarnya meletakkan pelanggaran serius dalam konflik di Aceh, khususnya dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh GAM. Selain perbuatan tersebut nyata-nyata dapat dijerat melalui kitab undang-undang hukum

<sup>51</sup> Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. (Penjelasan UU No. 15 Tahun 2003 tentang terorisme).

pidana, meskipun dalam pembuktiannya banyak mengalami kendala, karena hampir tidak ada yang bersedia menjadi saksi, disamping juga dapat dikategorikan sebagai terorisme, yang membawa muatan politik melalui berbagai tindakan kekerasan dengan menimbulkan atau menebarkan rasa takut dan targetnya juga tidak pandang bulu.

Jika kita melihat kembali ke belakang tampak bahwa semua nestapa kemanusiaan di Aceh diawali dari beberapa hal sebagai berikut :

1) Pada tahun 1953, terjadi "Perang Kaum Republikan" dibawah pimpinan Tgk. Daoed Bereueuh, yang biasa disebut Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh, mengakibatkan tidak kurang 4000 Putera Aceh menjadi syahid (Hamid; 2006 : 4).

2) Sejak tahun 1976, ketika Aceh bergolak kembali, munculnya Atjeh-Sumatera National Liberation Front (ASNLF). Selanjutnya disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut merdeka lepas dari NKRI.

3) Pada tanggal 7 bulan Agustus 1998, tepatnya hari Jumat. Saat itu Jenderal Wiranto menyatakan bahwa status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang diberlakukan sejak 1989 dicabut dan selanjutnya keamanan diserahkan kepada rakyat Aceh. Wiranto yang saat itu menjabat Pangab juga minta maaf atas perlakuan militer terhadap rakyat Aceh selama kurun waktu 10 tahun. Selain dinyatakan di pendopo Aceh Utara, pencabutan DOM juga diumumkan Wiranto kepada ribuan jemaat Sholat Jum'at di Masjid Baiturrahman Lhoksemawe. (Harian Waspada, tanggal 2 Agustus 2003)

Setelah itu, di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur kerusuhan merajalela, pembobolan lembaga pemasyarakatan Lhoksemawe dan pengibaran bendera GAM menjadi sangat semarak. Aksi demi aksi lain terus mengikuti perjalanan waktu dan merambah ke daerah-daerah lain di Aceh. Aksi kekerasan di Aceh seperti berlangsung secara sistematis dan jor-joran. Aksi penembakan misterius, pembakaran gedung sekolah, instansi, rumah orang-orang yang semasa DOM akrab dengan TNI POLRI seakan sudah menjadi pemandangan biasa sampai tahun 2003.

Selain harta dan nyawa, tidak kalah mengerikan dari korban yang menonjol di Aceh adalah hancurnya fasilitas umum seperti kantor dan gedung

sekolah bagi anak-anak yang masih membutuhkan bekal pengetahuan. Terlepas dari taktik perang mereka, yang jelas sudah lebih dari 1.000 gedung sekolah terbakar. Siapa pelakunya? Tidak jelas dan tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Yang terang mereka adalah kelompok sipil bersenjata. (Koran Tempo, 7 Juli 2003)

Ironis, pendidikan dijadikan sasaran kemarahan yang membabi buta, seharusnya pendidikan dijaga bersama oleh dua pihak yang bermusuhan. Bukankah keduanya juga sama-sama anak bangsa dan membutuhkan pendidikan bagi anak-anaknya. Bukankah dengan peradabanlah kita bisa menganggap diri kita sebagai manusia. Konflik telah mengakibatkan kehancuran dalam skala luas, meruntuhkan negara, kerusakan lingkungan yang parah, instabilitas regional, melonjaknya jumlah pengungsi dan terusir secara paksa dari tempat tinggalnya dan jumlah korban sipil yang tinggi.

Selama konflik Aceh, kebanyakan yang menjadi korban adalah orang yang lemah, berperan pasif dan tidak agresif, tidak ikut serta menyumbang bagi terjadinya pembunuhan atas dirinya, atas kesalahan pelaku yang dianggap sebagai orang yang agresif dan kejam (Sheley, 1987 : 132). Orang-orang lemah pada akhirnya membentuk suatu kelompok berdasarkan kesamaan nasib, untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah yang berkuasa. Asas semacam ini oleh Smelser disebut sebagai ledakan kebencian dimana masyarakat sudah cukup banyak mengalami penderitaan.

Ledakan kebencian yang disalurkan melalui berbagai bentuk kekerasan telah menelan banyak korban jiwa, harta benda, kebanyakan yang menjadi korban adalah orang-orang yang bukan pribumi asli (pendatang) serta orang-orang yang bekerja pada instansi pegawai negeri sipil dan TNI / POLRI. Hal ini menjadi sumber utama konflik Aceh menjadi berkepanjangan dan sulit mencari solusinya. Terkait kekerasan dan pelaku kekerasan, menurut laporan Amnesti Internasional adalah sebagai berikut :

“Ketidak mampuan pemerintah menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Aceh menyebabkan masalah tersebut belum terpecahkan, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pelanggaran yang sama dimasa depan. Namun tanggung jawab tidak hanya terletak pada Pemerintah Indonesia saja, pertanggung jawaban juga harus ditujukan pada pimpinan GAM. Apakah ini

sebagai kebijaksanaan organisasi atau bukan, bahwa anggota organisasi ini juga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan sewenang-wenang, penganiayaan dan intimidasi terhadap pegawai negeri, TNI/POLRI dan keluarganya, penduduk sipil termasuk mereka yang dituduh sebagai mata-mata (cuak) dan orang non Aceh penduduk desa transmigran, membakar sekolah-sekolah dan bangunan-bangunan publik, merusak kendaraan dan harta benda yang dimiliki perorangan maupun perusahaan".<sup>52</sup> (Amnesty Internasional, AI Indek ASA, 21/07/1993)

Terlepas dari pihak mana yang mendahului, fakta dilapangan menunjukkan bahwa tindak kekerasan tetap merajalela dari hari ke hari kondisi masyarakat Aceh kian tak menentu, mereka senantiasa dalam keadaan dan suasana tunggang langgang. Dampak konflik berakibat sangat buruk bagi tatanan kehidupan sosial masyarakat Aceh. Tak pelak bila konflik tersebut semakin banyak menelan korban jiwa baik dari kalangan TNI/POLRI, anggota GAM terlebih-lebih masyarakat sipil.<sup>53</sup>

Seharusnya dalam melakukan peperangan adalah menentukan garis-garis besar sebab dan maksud yang ingin dituju, GAM seharusnya memerangi ketidakadilan pemerintah, menolong si lemah, dengan menegakkan keadilan. Kekuatan yang ada di tangan mereka hendaknya digunakan untuk menghukum orang yang bersalah dan melakukan pelanggaran serta penganiayaan, bukan sebaliknya melakukan tindakan kekerasan kepada warga masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik dan tidak berdosa.

Masyarakat umum yang menjadi korban, bukanlah orang-orang yang terlibat dalam sengketa, dan sekalipun ada yang terlibat itu disebabkan oleh situasi, dan bukan karena kesadaran atau keinginannya, melainkan tidak ada jalan

<sup>52</sup> Menurut Abu Jihad, Ketua Front Mujahidin Islam Aceh, "... tindakan kekerasan seperti pembunuhan, dan penculikan terhadap warga masyarakat Aceh yang bertentangan dengan GAM merupakan metode teror politik yang diperlihatkan kepada lawan politiknya bahwa mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan yang perlu diperhitungkan. Teror politik seperti penyanderaan sengaja diciptakan sebagai strategi yang dianggap paling efektif untuk merebut perhatian massa. Semakin massa memberikan perhatian, semakin sukses aksi politiknya". (Abu Jihad, 2001 : 10)

<sup>53</sup> Momoretorium (penghentian) kekerasan yang pernah disepakati bersama antara pihak TNI/POLRI dan GAM terhitung tanggal 15 Januari sampai 15 Februari 2001 tidak dapat tersosialisasikan karena tensi kekerasan di Aceh masih tetap tinggi. Kurang sebulan dalam rentang waktu tersebut, setidaknya telah terjadi 45 kali kontak tembak, 4 kasus peledakan bom, 8 kasus penyiksaan, 1 orang digorok lehernya, 1 ditusuk, 2 kasus perampokan serta 8 kasus penculikan, 5 kasus pembakaran rumah penduduk serta menyebabkan 3 gelombang pengungsian besar, pungli dan sweeping oleh GAM masih sering terjadi (Kontras, Juli 2003).

lain baginya, hanya sekedar usaha untuk mempertahankan diri, ditengah-tengah situasi krisis dan kritis tersebut. Orang-orang ini telah menjadi korban ketidaktahuan dan ketidak mampuannya. Mereka adalah orang-orang yang lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk menghindari dari situasi yang melilitnya.

Diantara mereka tidak sedikit yang luka berat atau ringan bahkan tidak sedikit pula anak-anak menjadi piatu atau seorang ibu yang sedih berkepanjangan karena kehilangan anak laki-lakinya yang menjadi kesayangannya. Demikian pula tidak jarang tindakan amoral dalam bentuk perkosaan, kawin paksa dan semacamnya.

Adanya dekadensi moral yang melanda orang-orang yang sekiranya menjadi panutan di mata rakyat, tapi justru melakukan tindakan-tindakan tercela, hanya menguntungkan diri dan kelompoknya, seperti yang dikatakan oleh Nitibaskara (Kompas, 16 Juni, 2000) akan menyebabkan perilaku individualistik semakin mewabah. Lambat laun perilaku tidak memperdulikan orang banyak akan menjadi sebuah nilai (*value*), sedangkan secara eksekif nilai-nilai pengabaian terhadap orang lain itu mudah diwujudkan dalam tindakan yang tidak menyenangkan yang pucaknya adalah kekerasan terhadap orang lain.<sup>54</sup>

Dalam strategi perangnya GAM seringkali terlihat menggunakan tindak kekerasan, baik kepada aparat pemerintah maupun kepada warga masyarakat biasa. Besar kemungkinan tindak kekerasan, terutama yang ditujukan kepada warga masyarakat biasa ini sebagai suatu upaya intimidasi disebabkan ide perjuangan GAM memudar di kalangan masyarakat Aceh. Dugaan ini diperkuat dengan munculnya kekuatan baru setelah kekuatan GAM dan TNI/POLRI, yaitu kekuatan masyarakat, yang mengatasnamakan Front Perlawanan Separatis GAM sebagai kekuatan penyeimbang GAM. Para keluarga korban akibat tindak kekerasan GAM setidaknya menyimpan rasa dendam untuk menuntut balas atas

<sup>54</sup> Tingginya angka kekerasan diantaranya disebabkan oleh :

1. Budaya kekerasan yang dipertontonkan oleh ORBA selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun.
2. Pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan aparat hukum, yang mengakibatkan perasaan kecewa, marah, kegelisahan sosial dan anomie dari sebagian masyarakat bawah.
3. Untuk sebagian masyarakat merasakan bahwa hukum ternyata sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan akan rasa keadilan, damai, tenteram, maka secara naluriah kondisi tersebut kemudian memunculkan mekanisme pertahanan diri, antara lain berupa reaksi berbentuk main hakim sendiri.
4. Terjadi anomie dalam masyarakat. (Kompas, 16 Juni 2000)

kematian keluarga mereka. Bila demikian kenyataannya, maka masyarakat bagi GAM akan menjadi musuh baru, dan dalam perspektif pertarungan kekuasaan tersebut, bisa jadi kekuatan rakyat bergabung dengan TNI/POLRI dalam menumpas kekuatan GAM.

Konflik di Aceh telah berkembang menjadi salah satu konflik yang paling brutal di Indonesia. Begitu banyak tindak kekerasan yang terjadi seiring dengan konflik tersebut yang tentunya sangat mungkin terwujud sebagai suatu bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia dengan skala besar.

Memang, bagi sementara orang, korban-korban tadi tidaklah dapat secara jelas diidentifikasi apakah mereka adalah korban kekerasan dari pihak GAM atau dari pihak TNI POLRI atau pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Namun kita bisa amati data-data yang berhasil dikumpulkan oleh dokumen-dokumen pemerintah yang paling tidak menunjukkan sisi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh GAM.

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Kejadian Kekerasan Menonjol Di Provinsi Aceh**  
**Desember 2002 s/d November 2003**

No	Jenis Kejadian	Jumlah
1.	Pengrusakan fasilitas umum	23
2.	Pembakaran fasilitas dan gedung sekolah	124
3.	Perampokan	102
4.	Penculikan	129
5.	Penyanderaan	11
6.	Pembunuhan	266
7.	Intimidasi	72
8.	Sweeping POK GAM	21
9.	Penyerangan	178
10.	Terjadi kontak tembak antara GAM dgn TNI/POLRI	695
11.	Peledakan Bom / Granat	36
Total		1657

Sumber : Polda Aceh

Dari sajian tabel di atas maka terlihat berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok GAM, dimana sebagian besar tindak kekerasan tersebut merupakan tindak kekerasan yang menjadikan warga sipil atau anggota masyarakat biasa menjadi korban. Hanya kontak senjata yang jelas-jelas merupakan bentrokan antara kelompok GAM dengan aparat Pemerintah, seperti



TNI dan POLRI. Selebihnya, banyak tindak kekerasan tersebut mempunyai target atau sasaran yakni warga sipil.

Sementara warga masyarakat Aceh yang mengungsi karena adanya konflik, khususnya penduduk etnis Jawa masih tersebar di luar Aceh. Mereka mengalami situasi yang dilematis, mereka tetap bertahan ditempat pengungsian, dengan mata pencaharian yang tidak jelas, mau kembali ke Aceh keselamatannya tidak terjamin.<sup>55</sup>

**Tabel 5**  
**Pengungsi Asal Aceh Yang Berada**  
**Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 & 2004**  
**(PASKAL NO 17 TH 2005)**

No	Kabupaten	KK		Keterangan
		2002	2003	
1	Medan Kota	221	334	555
2	Deli Serdang	2066	5503	7569
3	Langkat	19186	2406	21592
4	Dairi	1194	119	1313
5	Asahan	142	-	142
6	Simalungun	566	-	566
7	Binjai	908	-	908
8	Karo	487	414	901
9	Tebing Tinggi	-	189	189
JUMLAH		24770	8965	33735

Sumber : Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005

Mereka harus rela meninggalkan keluarga dan harta bendanya hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Sejauhmana bantuan pemerintah khususnya dapat menjangkau sampai pada sasaran yang tepat. Nampaknya masih ada pengungsi yang terus memperjuangkan bantuan yang seharusnya menjadi haknya. Terkait hal tersebut mungkin masih diperlukan transparansi pihak terkait serta kajian/penelitian lebih lanjut tentang berbagai permasalahan terkait dengan pengungsi, karena hal tersebut sangat bertolak belakang dengan besarnya bantuan baik yang berbentuk materiil maupun non materiil yang mengalir ke Aceh.

Diskripsi peristiwa kekerasan yang dilakukan kelompok GAM seperti yang ada pada tabel bentuk kekerasan yang dilakukan GAM menunjukkan bahwa,

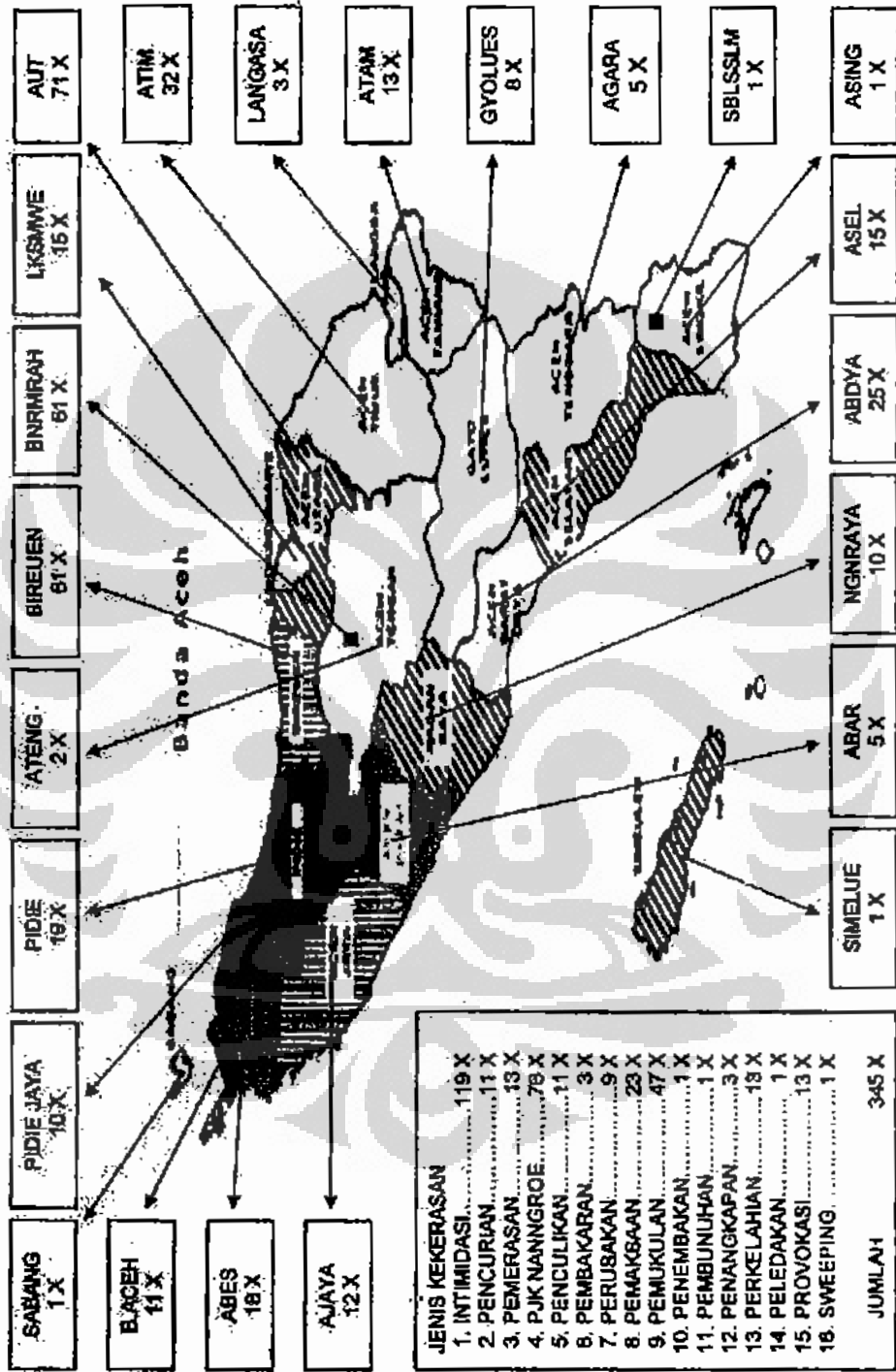
<sup>55</sup> Mereka tetap bertahan di luar Aceh, hidup ditempat-tempat pengungsian yang tidak layak untuk kehidupan normal dan mata pencaharian yang tidak jelas, seperti yang menjadi tukang becak, pembantu rumah tangga, kuli bangunan, tukang parkir, bahkan tidak sedikit yang menjadi pelacur untuk mempertahankan hidupnya.

target kekerasan yang dilakukan oleh kelompok GAM tersebut pada umumnya adalah warga masyarakat sipil. Terkait dengan upaya pemaksaan eksistensi mereka di kalangan masyarakat umum. Intimidasi, perijinan jika ada kegiatan, pengumpulan dana dengan kedok pembayaran pajak (Pajak Nanggroe), guna mendanai gerakan mereka adalah suatu alasan yang sangat mengedepan.

Fenomena kekerasan di Aceh, masih tetap berlangsung pasca MoU Helsinki, selanjutnya dapat dikatakan sebagai potensi munculnya konflik baru, khususnya tentang sulitnya pembauran antara mantan GAM dengan kelompok masyarakat yang menjadi korban tindakan kekerasan, atau pernah disakiti dan keluarganya ada yang menjadi korban, yakni masyarakat Aceh Non GAM.



**PETA KEKERASAN YANG DILAKUKAN MANTAN GAMIKPA  
PERIODE : JANUARI S/D NOVEMBER 2008**



#### D. Penanganan Konflik Aceh

Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya paling plural, dan selalu dihantui oleh gerakan sparatisme. Struktur masyarakat Indonesia, ditandai oleh heterogenitas etnik dan bersifat unik. Secara horizontal ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan primordialisme. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh perbedaan vertikal antara lapisan-lapisan atas dan lapisan bawah.

Sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, NKRI selalu dirongrong oleh gerakan separatisme; diantaranya, gerakan separatis DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, PRRI/PERMESTA Kahar Muzakar di Sulawesi, APRA, PKI, DI/TII di Aceh, dan RMS di Maluku yang menyisakan luka lama. Bahkan sampai sekarang gerakan itu masih terus berlangsung di Papua dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) masih ada di provinsi paling timur Indonesia.

Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk, selalu menimbulkan persoalan integrasi nasional.<sup>56</sup> Pluralitas masyarakat yang bersifat multidimensional itu akan dan telah menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal. Sementara stratifikasi sosial berpengaruh pada bentuk integrasi yang bersifat vertikal. Beberapa sifat dasar yang selalu dimiliki masyarakat majemuk, dijelaskan oleh Nasikun adalah sebagai berikut :

- “(1) Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan, atau lebih cepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu sama lain.
- (2) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer.
- (3) Kurang mengembangkan consensus diantara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar.
- (4) Secara relatif seringkali terjadi konflik diantara kelompok yang satu dengan yang lainnya.
- (5) Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi, dan
- (6) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain”. (Nasikun; 1989 : 1)

<sup>56</sup> Samuel Hatington, pernah berkomentar bahwa pada akhir abad ke 20, Indonesia adalah negara yang punya potensi paling besar untuk hancur, setelah Yugoslavia dan Uni Soviet akhir abad 20 an. Sementara Clifford Gerts, antropolog yang Indonesianis ini pernah mengatakan, kalau bangsa Indonesia tidak pandai-pandai memmanagement keanekaragaman etnik, budaya dan solidaritas etnik, maka Indonesia akan pecah menjadi negara kecil-kecil. (Kompas, Agustus 1994)

GAM di Aceh dimulai 4 Desember 1976, ketika Muhammad Hasan Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Tiro dan para pengikut setianya telah terlibat dalam pemberontakan Darul Islam 1953, tetapi kali ini pemberontakan mereka yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara jelas berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, kekuatan bersenjata GAM mulai menyerang pasukan pemerintah, dan mengundang kembali operasi penumpasan pemberontakan oleh pemerintah. Pada tahun 1983, kekuatan GAM sudah dikalahkan di lapangan dan Hasan Tiro lari keluar negeri. Ia bersama beberapa pengikutnya akhirnya menjadi warga negara Swedia.

GAM merasa cukup kuat untuk sekali lagi menjajal pemerintah Indonesia, menyerang pasukan pemerintah, warga sipil dan orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Pemerintah membalas dengan operasi militer dan tindak penumpasan berskala besar. Pada tahun 1992, tampak bahwa pemerintah mengendalikan situasi sepenuhnya. Namun demikian, ternyata pengendalian situasi ini juga membawa dampak negative yang tidak ringan. Operasi militer yang dilakukan ternyata disinyalir ditandai dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam skala besar. Pelanggaran hak asasi manusia di Aceh menjadi sorotan publik tidak lama setelah Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya pada tahun 1998.

Ditekan oleh teriakan publik di seluruh Indonesia atas penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Pangab Jenderal Wiranto kemudian meminta maaf atas ekses-ekses militer dari 1989 sampai 1998 dan atas nama pemerintah mencabut status Aceh sebagai sebuah daerah operasi militer. Ternyata situasi konflik sejak saat itu tidak kunjung mereda. GAM dengan cepat memanfaatkan demoralisasi militer, melancarkan serangan besar-besaran. Konfrontasi bersenjata dimulai lagi.

Presiden Abdurrahman Wahid, pernah mengadakan dialog antara Pemerintah dengan GAM. Tawaran tersebut segera disambut secara positif oleh faksi GAM pimpinan Hasan di Tiro. Mei 2000, wakil dari Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani di Jenewa sebuah dokumen yang disebut "Saling Pengertian bagi Jeda Kemanusiaan untuk Aceh" (Waspada, 2 Mei

2000). Keterlibatan HDC pertama kali di Indonesia dimulai pada bulan Agustus 1999 ketika Presiden Abdurrahman Wahid meminta HDC untuk memfasilitasi dialog kemanusiaan guna menyelesaikan konflik Aceh. (Kompas, 16 Desember 2002)

HDC berhasil memfasilitasi berbagai dialog di Genewa yang kemudian melahirkan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 12 Mei 2000 tentang jeda kemanusiaan untuk Aceh di Genewa, Swiss. Langkah ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau gerbang menuju penyelesaian konflik. Namun kekerasan masih terus terjadi di Aceh, jeda kemanusiaan tetap dilanjutkan dan bahkan diperpanjang waktunya hingga 15 Januari 2001. Berikutnya tanggal 18 Maret 2001, Pemerintah Indonesia dan GAM menyetujui Satu Zona Aman (*Peace Zone*) di Aceh, yang meliputi Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen.

Bagi sejumlah anggota parlemen, akademisi dan media massa, pertemuan di Jenewa itu mempresentasikan internasionalisasi masalah Aceh. Reaksi negative ini menjadi lebih mudah dimengerti karena banyak kalangan menilai lepasnya Provinsi Timor Timur sebagai konsekuensi dari internasionalisasi<sup>57</sup> masalah Timor Timur. Sebenarnya GAM menginginkan pihak ketiga yang menjadi mediator dalam perundingan untuk menyelesaikan konflik Aceh adalah PBB. Permintaan ini ditolak oleh Pemerintah Indonesia karena trauma dengan apa yang terjadi di Timor-Timur (Kompas, 4 Desember 2002). Indonesia dalam kasus ini hanya menginginkan pihak ketiga sebagai peran fasilitator saja (Kompas, 24 November 2002). Akhirnya Pemerintah RI dan GAM memilih NGO, HDC daripada PBB atau ASEAN.

Beberapa alasan yang menyebabkan Pemerintah RI dan GAM menolak PBB atau ASEAN sebagai mediator adalah sebagai berikut :

“Pihak Pemerintah Indonesia menginginkan pihak ketiga yang menjadi mediator dalam memfasilitasi berbagai perundingan dengan GAM adalah organisasi regional di tingkat Asia Tenggara

<sup>57</sup> HDC berhasil membawa RI-GAM secara bersama-sama ke meja perundingan pada bulan Januari 2000, yang kemudian disusul dengan serangkaian dialog yang dihadiri kedua belah pihak. Meskipun tidak memiliki kepercayaan terhadap Pemerintah Indonesia, GAM segera menerima tawaran dialog dengan tujuan menginternasionalisasi kasus Aceh dan mendapatkan dukungan atau simpati dari Amerika atau negara-negara Eropa dengan harapan mereka mau menekan Indonesia agar melepaskan Aceh. GAM juga berharap dialog ini dapat mengekspose seluruh kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukan TNI terhadap Warga Aceh. (Hasil FGD, penelitian Iskandar Zulkarnaen dkk)

yaitu ASEAN. Permintaan ini ditolak oleh GAM karena curiga terhadap Malaysia dan Singapura yang kemungkinannya akan lebih cenderung memihak Pemerintah Indonesia". (Zulkarnaen, 2005, 4)

Di tengah derasnya kritik, Presiden Abdurrahman Wahid terus mengupayakan dialog, hingga pada Januari 2001 kedua pihak mencapai "Saling Pengertian Sementara". Berisi banyak ketentuan yang memungkinkan pengaturan mengenai pemeriksaan pelanggaran yang terjadi dan menjalankan upaya-upaya membangun saling kepercayaan. Sayangnya, sementara dialog berjalan, kontak senjata juga tetap terjadi diantara kedua belah pihak, menyebabkan macetnya dialog yang dirintis tersebut. Konflik kekerasan berjalan terus, tingkat kekerasan di Aceh, semakin meningkat seiring dengan tekanan politik domestik terhadap Presiden Abdurrahman Wahid, dan diakhiri dengan turunnya Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya sebagai Wakil Presiden RI.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, perundingan tetap dilakukan, proses negosiasi yang terus dilanjutkan dengan harapan GAM mau menerima otonomi khusus Aceh sebagai pijakan awal. Puncak dari rangkaian dialog tersebut terjadi pada tanggal 8 dan 9 Desember 2002. GAM yang dipimpin oleh Zaini Abdullah dan Hasan Tiro, dan Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, kembali bertemu untuk membicarakan kesepakatan penghentian permusuhan atau *Cessation of Hostility Agreement (CoHA)*. Kesepakatan tersebut ditanda tangani pada tanggal 9 Desember 2002 oleh Zaini Abdullah sebagai wakil GAM, dan Wiryono Sastro Handoyo wakil dari Pemerintah Indonesia. (Kompas, 10 Desember 2002)

Sama seperti waktu-waktu lalu, seiring dengan berkembangnya dialog yang berjalan tersendat-sendat, konflik bersenjata juga tetap mewarnai kekerasan di Aceh. Dampak dari semua ini, berkembanglah kekerasan yang menyebabkan begitu seringnya pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan begitu banyak orang Aceh meninggalkan tempat tinggal mereka. Sedangkan semua ini menyebabkan buruknya kehidupan sosial-ekonomi di Aceh. Kerusakan luar biasa telah menyebabkan kehidupan sosial-ekonomi Aceh anjlok, padahal provinsi ini

terhitung kaya dengan sumber-sumber alam. Sejak Oktober 1999 s/d 2003 satu-satunya perangkat hukum yang masih berfungsi di Provinsi Aceh cuma POLRI dengan segala keterbatasannya. Sedangkan kejaksaan dan pengadilan sudah lumpuh, para jaksa dan hakim banyak yang ikut mengungsi dan menyelamatkan diri bersama keluarganya.

Situasi ini kemudian membawa dampak perdebatan masalah penyelesaian konflik Aceh, baik eksekutif maupun legislatif. Satu pihak menginginkan penyelesaian terbaik melalui dialog dalam kerangka sebuah pendekatan komprehensif, yang juga mencakup penggunaan militer dan pekerjaan polisi. Sementara pihak lain menganggap bahwa pemerintah tidak perlu mengadakan perundingan dengan sebuah gerakan separatis yang kalah dan lemah yang tidak mendapat dukungan internasional tetapi harus menumpasnya dengan kekuatan militer. (Waspada, 23 April 2002)

Pertemuan lanjutan antara GAM dan Wakil Pemerintah awal Mei 2002 membuahkan formalisasi dokumen Februari yang dikeluarkan Henri Dunant Centre. Pada tanggal 10 Mei 2002, kedua pihak menandatangani sebuah Pernyataan Bersama, yang secara umum formulasi dokumen tersebut berisi :

- “(1) Konflik akan dihentikan dan perdamaian ditegakkan selama periode transisi, dan otonomi khusus akan diterima sebagai penyelesaian final atas konflik.
- (2) Selama periode transisi, sikap permusuhan dihentikan, sedangkan proses penciptaan saling percaya diintensifkan, dan kehidupan sosial-ekonomi di Aceh dinormalkan dengan program bantuan kemanusiaan dan bantuan ekonomi dari Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional.
- (3) Dialog yang mencakup semua unsur masyarakat Aceh, termasuk GAM, akan menjadi forum konsultatif bagi pencapaian penyelesaian damai yang ternegosiasikan atas masalah Aceh. Penyelesaian ini didasarkan atas Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sebuah undang-undang yang disetujui di masa Presiden Abdurrahman Wahid yang memberi status otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Setelah selesainya dialog semua unsur Aceh tersebut, maka diadakan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh untuk memungkinkan para pengikut GAM berpartisipasi dalam pemilihan nasional Indonesia 2004.” (Waspada, 11 Mei 2002)

Kesulitan timbul ketika kedua pihak menginterpretasikan secara berbeda isi dokumen yang sama. Pemerintah berpikir bahwa dokumen itu sudah



mengamankan komitmen GAM menerima Undang-Undang Aceh sebagai sebuah langkah awal. Sedangkan GAM mengartikan isi dokumen itu hanya sebagai bahan pertama untuk dibahas bersama.

Juru bicara utama GAM, Sofyan Ibrahim Tiba, setibanya kembali di Aceh, membantah dengan keras bahwa GAM sudah menerima Undang-Undang Aceh. Perbedaan tafsir ini kemudian diperburuk oleh unsur-unsur bersenjata yang mengklaim sebagai kekuatan GAM dan mulai menyerang fasilitas-fasilitas pemerintah. Khususnya tiang-tiang listrik dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak. TNI bereaksi dengan mengerahkan lebih banyak serdadu ke Aceh dan mengintensifkan operasi penumpasan kerusuhan. Pada bulan Agustus 2002, Pemerintah memperlunak sikap dengan pengumuman dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. "Kami mengharapkan babak perundingan baru dengan GAM dalam bulan September, mungkin bukan perundingan formal, tetapi kami akan terus meretas jalan bagi penyelesaian secara damai". (Serambi, 18 Agustus 2002)

Di awal September, Pemerintah mengajukan sebuah rancangan persetujuan untuk menghentikan sikap permusuhan kepada *Henri Dunant Centre* (HDC) untuk membuat perbaikan atas rancangan tersebut. Meski beberapa isu masih harus diselesaikan, persetujuan penghentian permusuhan direncanakan untuk disepakati 9 Desember 2002.

Secara esensial, rancangan persetujuan itu menuntut pembentukan sebuah Komite Keamanan Bersama oleh Pemerintah Indonesia, GAM dan HDC yang terdiri dari 150 anggota. Komite ini bertugas memantau pelaksanaan penghentian permusuhan, menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran dan untuk mengambil langkah-langkah, termasuk sanksi-sanksi guna memulihkan ketenangan.

Undang-undang Otonomi Khusus Aceh akan menjadi titik awal bagi dialog semua unsur masyarakat Aceh menuju Pemilihan Umum 2004. Masalah-masalah yang belum terselesaikan, termasuk rincian mengenai waktu dan cara penyerahan senjata oleh GAM dan hal-hal yang mesti dilakukan oleh TNI. Keseluruhan proses dirancang untuk membuang senjata dan politik, HDC merasa yakin bahwa penandatanganan persetujuan tersebut akan terlaksana sesuai jadwal.

Komunitas internasional merasa berkepentingan dalam proses ini dan menunjukkan dukungannya yaitu menyelenggarakan konferensi negara-negara donor di Tokyo, 3 Desember 2002, 6 hari menjelang penandatanganan perjanjian tersebut. Konferensi yang dipandu bersama oleh Jepang, AS dan badan-badan pendanaan internasional itu bertujuan menghimpun dana bagi pembangunan kembali Aceh setelah kedua pihak menandatangani Persetujuan Penghentian Permusuhan itu.

Dampak umum dari penandatanganan perjanjian Penghentian Permusuhan (CoHA) di Jenewa 9 Desember 2002 ialah kegembiraan besar rakyat Aceh, terutama karena perjanjian itu sudah dianggap sebagai sebuah perjanjian perdamaian. Rakyat Aceh merasa bahwa perdamaian sudah di tangan mereka dan mereka tak hendak melepaskannya lagi. Tetapi faktanya ialah, senjata terus saja menyalak. Dengan kerinduan yang begitu besar akan perdamaian setelah sekian lama dilelahkan konflik, maka kegagalan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan pukulan sangat berat bagi rakyat Aceh.

Meskipun Insiden dengan korban tewas turun secara dramatis, dan perkembangan positif ini semestinya menjadi momentum perdamaian, tetapi nyatanya tidak demikian. Permusuhan jalan terus, hingga sulit dibayangkan bahwa kesepakatan itu masih bisa dilaksanakan.

Saling tuding antara TNI dan GAM mengenai pelanggaran persetujuan pun terjadi. Ini ditambah dengan menyebarnya laporan bahwa anggota JSC diintimidasi warga sipil setempat, hal yang dibantah pihak militer. Dengan alasan keamanan, anggota JSC pun mundur dari Aceh, ini sejalan dengan keluhan Pemerintah bahwa JSC tidak efektif karena adanya pernyataan-pernyataan negatif terkait dengan perkembangan situasi di Aceh. Sementara daripada memenuhi isi CoHA, yakni dihentikannya permusuhan, GAM justru menggalang demonstrasi pro kemerdekaan dan menciptakan opini atau persepsi umum bahwa hasil akhir pelaksanaan persetujuan Genewa adalah Kemerdekaan Aceh.

Konsolidasi GAM dengan merekrut tenaga-tenaga baru untuk perjuangannya dan mengangkat perwira-perwira baru, sekaligus melakukan perluasan struktur politiknya dari kampung ke kampung. Pemerintah bawah tanah yang dikembangkan GAM ini disertai praktik pemungutan pajak yang disebut

“Pajak Nanggroe”. Berdampak pada citra buruk *Henri Dunant Centre* (HDC) yang bertugas sebagai pengawas penyerahan senjata GAM.

Pemerintah kemudian mengajukan protes keras kepada HDC, menuding GAM telah melanggar kewajiban-kewajibannya dalam CoHA. Atas dasar ini Pemerintah menuntut segera diadakan sidang Dewan Bersama (*Joint Council*) yang terdiri dari Pemerintah, GAM dan HDC. Dewan Bersama ini diciptakan CoHA sendiri dengan tugas menyelesaikan perselisihan akibat pelaksanaan CoHA yang tidak bisa diselesaikan JSC. Tuntutan diadakannya pertemuan Dewan Bersama itu diajukan kepada HDC awal April 2003 dan Pemerintah menyebutnya sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan CoHA.

Pemerintah sudah mengambil semua langkah yang fleksibel bersamaan dengan kesabaran yang kian mendekati batas. Di pihak lain GAM tidak menunjukkan fleksibilitasnya dengan alasan yang tidak jelas, dan juga tampak mempermainkan itikad baik Pemerintah. Maka pertanyaan besar sekarang ialah : Apakah berikutnya? Jawabannya boleh jadi bisa ditarik dari pengalaman di masa lalu. Sejak perundingan dimulai awal Januari 2000, komitmen GAM terhadap perjanjian yaitu GAM menerima suatu pengaturan, seperti jeda kemanusiaan, tapi menggunakannya hanya untuk tujuan konsolidasi kekuatan, hanya untuk membuka kembali pertempuran ketika pihaknya yakin memiliki kekuatan politik dan senjata yang memadai. Di sisi lain Pemerintah selalu mencoba menggunakan jalan damai sebelum memutuskan operasi militer.<sup>58</sup>

Pernyataan bersama 10 Mei dan CoHA 9 Desember 2003 memang bukanlah dokumen yang sempurna tetapi memadai sebagai peta jalan yang jelas dengan penerimaan Undang-Undang Aceh sebagai titik tolak, disusul dengan penghentian permusuhan, dialog segenap unsur masyarakat Aceh dan akhirnya Pemilihan Umum 2004. Ketika format yang akurat dan jadwal dialog semua unsur Aceh itu belum diputuskan, pemilihan yang disebutkan dalam CoHA adalah Pemilihan Umum Indonesia 2004. Pemerintah dan GAM telah dinyatakan dalam

---

<sup>58</sup> Menurut Syamsul, pilihan strategi militer akan sangat ditentukan oleh bagaimana angkatan bersenjata digunakan untuk mematahkan lingkaran kekerasan bersenjata yang sedang terjadi, sehingga intervensi militer yang tetap berkaitan dengan proses perdamaian secara keseluruhan. Dalam konteks militer, intervensi militer cenderung berasosiasi dengan mekanisme kekerasan, namun mekanisme kekerasan tidak identik dengan penghancuran. Mekanisme ini harus dilihat sebagai kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mempengaruhi perilaku lawan. (Syamsul, 2007 : 29)

bagian pembukaan CoHA, di mana dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan GAM mempunyai sasaran obyektif yang sama, yaitu memenuhi aspirasi rakyat Aceh untuk hidup dengan aman secara bermartabat, damai, sejahtera dan adil. Kecenderungan GAM menjadikan perdamaian sebagai jalan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Padahal satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan bersama ialah dengan mematuhi naskah dan semangat CoHA dan mempertahankan tujuan bersama. Menurut penjelasan Farhan sebagai berikut :

“Para pengamat melihat bahwa GAM mempergunakan CoHA (dan sebelum jeda kemanusiaan) untuk melakukan konsolidasi. Hal ini dikemukakan langsung oleh Edward Aspinall kepada saya. Artinya GAM tidak beranjak dari cita-cita semula dan hanya menjadikan gencatan senjata sebagai taktik, ke dalam untuk konsolidasi (termasuk merekrut anggota baru) dan keluar berharap mendapat dukungan internasional bagi perjuangannya. Sementara Kiki Syahnakri, melihat perundingan dengan formula HDC, jika tetap dilanjutkan, hanya akan memperbesar kemungkinan “Aceh Merdeka” menjadi kenyataan. Hal ini karena GAM dengan strategi *buying time* akan menjadikan fase damai sebagai momentum konsolidasi dengan terus berupaya memperbesar kekuatan bersenjata serta menggalang dukungan rakyat dengan segala cara, baik persuasif, propaganda maupun intimidasi. Rapat GAM di Nisam, Aceh Utara pada tanggal 3-5 Januari 2003 sebagai salah satu contoh konsolidasi”. (Farhan Hamid; 2006 : 137)

Dengan menjalankan seluruh kesabaran dan fleksibilitas menghadapi GAM, Pemerintah berusaha mempertahankan sebuah pilihan moral yang tinggi dan melakukan tindakan selektif. Pemerintah harus memformulasikan kembali kebijakan atas Aceh, memilih salah satu dari dua pilihan: menjalankan operasi militer, atau mencoba lagi jalan damai.

Pada waktu itu proses perdamaian, untuk sebagian orang, secara politis, tampak tidak lagi menjadi pilihan yang menarik. Sedangkan di sisi lain, pandangan bahwa perdamaian harus diupayakan dengan segala cara sudah dinyatakan oleh banyak politisi terkemuka, oleh para Ulama dan orang-orang Aceh pada umumnya. Dalam CoHA ditetapkan batas waktu 5 bulan bagi GAM merampungkan proses melepaskan senjata, hingga batas waktu yang ditentukan, jika tidak tercipta kesepakatan, maka Pemerintah akan melancarkan operasi militer di Aceh.

Penyelesaian konflik Aceh dengan konsep nir kekerasan, artinya yang dilakukan melalui proses dialog berhasil membuat kesepakatan. Namun permasalahan pokok tidak pernah berhasil ditemukan, yaitu menemukan titik kompromi mengenai isu fundamental, mengenai apakah Aceh tetap bagian integral dari NKRI atau menjadi merdeka. Para Pemimpin Indonesia selalu mengedepankan menjaga integritas wilayah dan sebaliknya, mencegah disintegrasi bangsa. Sementara para Pemimpin GAM tetap bersikukuh mengenai hak untuk memerdekakan diri. Hal tersebut mendorong Pemerintah untuk menggunakan pendekatan kekerasan melalui operasi militer.

Ketika operasi militer akhirnya diputuskan, operasi itu mesti dipersiapkan secara berhati-hati, sehingga yang terjadi di lapangan nanti bukanlah perang dalam pengertian tradisional melainkan perang kemanusiaan yang didasarkan pada pengakuan bahwa situasi politik yang sedemikian rumit di Aceh tidak bisa semata-mata diselesaikan secara militer.

Lebih dari itu, ada risiko bahwa aksi militer bisa menjadi bumerang bagi RI kalau korban sipil menjadi berlebihan. Karenanya operasi militer harus dirancang tidak saja untuk memenangkan pertempuran dalam kontak senjata, tetapi terutama memenangkan hati dan pikiran rakyat Aceh. Tuntutan dewasa ini ialah, walaupun operasi militer itu sah adanya, operasi itu sendiri harus sedemikian rupa sehingga menghindari “kerusakan besar-besaran”. Apabila korban sipil berjatuhan, rasa dendam baru timbul pada sebagian rakyat Aceh, dan ini hanya akan mempersulit pencapaian tujuan dari apa yang disebut sebagai “perang kemanusiaan” itu.

Harapan untuk damai kemudian muncul kembali, ketika disepakati diadakannya pertemuan bersama pada tanggal 17 dan 18 Mei 2003 di Tokyo, dimana kedua belah pihak tidak saling bertemu muka dalam sebuah ruangan forum. Setelah melalui pembahasan yang ketat, upaya dialog untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai praktis gagal, dan berhenti pada tanggal 18 Mei 2003, saat GAM menolak menerima draft pernyataan Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengajukan counter drafnya. Disusul respon Pemerintah Indonesia terhadap penolakan GAM sangat cepat dan tegas.

Seperti yang diprediksi oleh banyak pihak, proses penyelesaian konflik di Aceh melalui upaya damai akhirnya banyak menemui hambatan, setelah pertemuan di Tokyo pada tanggal 18 Mei 2003 gagal mencapai kesepakatan. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 2003 pukul 00.00 Pemerintah RI memberlakukan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang “Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Aceh”. Kepres ini berlaku selama enam bulan dan bisa diperpanjang (Sulaeman, 2005 : 281).<sup>59</sup> Pada kenyataannya status berlakunya Kepres tersebut diperpanjang selama enam bulan, meskipun banyak suara pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, CoHA menjadi diabaikan dan peran HDC terhenti. Pada tahap inilah kemudian HDC telah gagal menjalankan perannya sebagai fasilitator perdamaian di Aceh.

Diantara dasar pemberlakuan darurat militer adalah :

(a) Bahwa rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah, baik melalui penetapan otonomi khusus untuk Aceh, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif maupun dialog bahkan yang dilakukan di luar negeri sekalipun, ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan GAM untuk memisahkan diri dari NKRI dan menyatakan kemerdekaannya. (b) bahwa dalam kondisi seperti itu, dan semakin meningkatnya tindak kekerasan bersenjata yang kian mengarah pada tindakan terorisme yang dilakukan GAM, tidak hanya merusak ketertiban dan ketentraman masyarakat, mengganggu kelancaran roda pemerintahan, dan menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan, tetapi semakin memperluas dan memperberat penderitaan masyarakat Aceh. (Farhan, 2006:142)

Selanjutnya, mulai tanggal 19 Mei 2004 status darurat militer diturunkan menjadi darurat sipil. Penurunan status darurat ini berlaku untuk enam bulan. Pada tanggal 1 Juni 2004 Presiden Megawati menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2004 tentang “Pelaksanaan operasi terpadu dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi Aceh”. Inpres ini mengatur organisasi pelaksana operasi terpadu selama darurat sipil di Aceh. Selanjutnya pada era Presiden Susilo

<sup>59</sup> Ternyata operasi militer di Aceh mendapat dukungan publik cukup luas, hasil survei nasional yang diadakan oleh International Foundation For Electoral System (IFES) pada tanggal 1 Juni – 5 Juli 2003 dengan 3000 responden di 32 provinsi di Indonesia, menunjukkan hanya 6% responden yang menolak operasi militer. Saat ditanya mengenai solusi penyelesaian masalah Aceh, 50% responden melihat perlunya dilakukan operasi militer, baik operasi terpadu (20%) maupun operasi militer murni (30%), hanya 29% responden mendukung langkah melanjutkan dialog dengan GAM. (IFES, Agustus 2003)

Bambang Yudhoyono, status darurat sipil di Aceh diperpanjang melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2004 tentang “Pernyataan perpanjangan keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat sipil di Provinsi Aceh”, yang berlaku efektif mulai tanggal 19 November 2004.

Langkah-langkah resolusi konflik Aceh yang pernah berlangsung antara lain :

1. Juli 1998, setelah Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, Gubernur Aceh Syamsuddin Machmud meminta penghapusan status DOM di Aceh kepada Presiden BJ. Habibie.
2. 7 Agustus 1998, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mencabut status DOM Aceh dan meminta maaf kepada rakyat Aceh atas kesalahan pendahulunya.
3. Agustus 1998, Presiden BJ. Habibie meminta maaf kepada rakyat Aceh semasa Aceh masih dalam status DOM.
4. 8 Januari 1999, sebanyak 39 orang tokoh Aceh yang dipimpin Gubernur Aceh dan Ketua DPRD menemui Presiden BJ. Habibie guna menuntut otonomi Aceh seluas-luasnya.
5. 26 Maret 1999, Presiden BJ. Habibie berkunjung ke Aceh dan berjanji menerapkan syariat Islam di Aceh.
6. 28 Oktober 1999, masyarakat Aceh yang disponsori SIRA berkumpul menuntut referendum damai dengan opsi pisah dari NKRI atau bergabung dengan otonomi seluas-luasnya yang lebih terkenal dengan Sumpah Rakyat Aceh 1.
7. 8 Nopember 1999, Sidang Umum masyarakat pejuang reformasi Aceh (SU MPRA), Sumpah Rakyat Aceh 2 yang dihadiri sekitar 2 Juta rakyat Aceh berkumpul di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
8. 14 Nopember 1999, Presiden Abdurrahman Wahid menjanjikan nasib Aceh kelak akan ditentukan oleh rakyat Aceh.
9. 19 Pebruari 2000, disepakati bahwa masa depan Aceh secara umum dan wanita Aceh secara khusus terletak pada pelaksanaan syariat Islam secara konsekwen.
10. 12 Mei 2000, disepakati perjanjian bersama mengenai jeda kemanusiaan untuk Aceh (*Joint understanding on humanitarian pause for Aceh*) di Davos Swiss yang diwakili oleh Hasan Wirayuda (RI) dan Zaini Abdullah (GAM).
11. 9 Januari 2001, GAM dan RI setuju mentransformasikan perjuangan GAM dari kekuatan bersenjata ke perjuangan politik.
12. 19 Agustus 2001, Presiden Megawati mengesahkan UU Aceh.
13. 8 September 2001, Presiden Megawati berkunjung dan berdialog dengan tokoh-tokoh Aceh membahas permasalahan konflik Aceh.
14. 30 Juni-1 Juli 2001, dialog antara GAM dan RI mengenai gencatan senjata di Genewa Swiss.
15. 9 Desember 2002, kesepakatan bersama kedua ditanda tangani di Genewa Swiss disaksikan oleh Martin Griffith dari HDC.

16. Maret 2003, Presiden Megawati memberlakukan syariat Islam.
17. Mei 2003, Presiden Megawati memberlakukan Darurat Militer di Aceh." (Tempo Mei 2003)

Proses selanjutnya dinamika konflik Aceh yang hanya dipandang dari konflik antara Pemerintah dengan GAM, sebagai bagian penting dari kompleksitas permasalahan Aceh, sejak awal dilihat oleh Pemerintah sebagai masalah dalam negeri. Apa yang dilakukan GAM untuk merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia adalah pemberontakan separatisme. Garis kebijakan ini tetap dipegang teguh oleh pemerintah pasca Orde Baru, baik dimasa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, maupun dimasa Susilo Bambang Yudhoyono.

Berbagai pendekatan yang diambil oleh Pemerintah dalam penyelesaian konflik Aceh, sejak masa B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri pada akhirnya mengalami jalan buntu, sehingga penyelesaian masalah Aceh menjadi berlarut-larut. Namun yang perlu dicatat, dari upaya penyelesaian konflik pada masa tersebut adalah digunakannya aspek dialog dan mediasi meskipun dalam tataran operasionalnya masih diwarnai dengan kekuatan bersenjata.

Upaya dialog dan perundingan dengan GAM sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah Aceh terus dilakukan meskipun ada yang bersifat informal, karena mulai April 2005 sudah sering diadakan perundingan antara delegasi Pemerintah dan delegasi GAM sudah beberapa kali bertemu tatap muka dan merundingkan solusi politik (perdamaian) untuk mengakhiri konflik Aceh di Helsinki, dan secara formal baru pada tanggal 15 Agustus 2005 di sepakati penandatanganan MoU Helsinki. (Informan B, Bireuen, 9 Februari 2008)

Kesepakatan perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005, yang dikenal dengan MoU Helsinki meliputi beberapa hal, diantaranya adalah mengenai Pemerintah Aceh, Reintegrasi Ekonomi dan Sosial Mantan Anggota GAM. Pengaturan ulang peran TNI/POLRI di Aceh. Berdasarkan MoU Helsinki, Pemerintah mencoba mereintegrasikan GAM ke dalam masyarakat dan memberikan bantuan ekonomi serta kesempatan dalam Pilkada/Pembentukan Partai Lokal di Aceh. (Bahkti : 2008, 21)



**Tabel 6**  
**Beberapa Ketetapan Dan Kesepakatan MoU Helsinki**

No	Pokok Persoalan	Ketetapan
1	Pemerintahan Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceh akan menjalankan kewenangan di seluruh urusan publik, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan negara, keamanan negara, masalah moneter fiskal, kebebasan dan peradilan dan kebebasan beragama, dan kebijakan lain yang berada dalam kewenangan Pemerintah Republik Indonesia.</li> </ul>
2	Partisipasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan umum akan dilaksanakan bulan April 2006 untuk Pilkada Gubernur dan pejabat daerah terpilih lainnya, dan pada tahun 2006 untuk DPRD Aceh.</li> <li>- Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal (dengan jalan mengamandemen UU Pemilu) dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU.</li> </ul>
3	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceh berhak melakukan pinjaman luar negeri.</li> <li>- Aceh berhak atas 70% dari pendapat dari kekayaan alamnya.</li> <li>- Aceh akan diberikan hak dan tidak dihalangi untuk membuka akses luar negeri melalui laut dan udara.</li> <li>- Perwakilan GAM akan dilibatkan dalam BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) Aceh pasca-tsunami.</li> </ul>
4	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh anggota militer di Aceh akan diadili dalam pengadilan sipil di Aceh.</li> </ul>
5	HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadilan Ham dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan didirikan.</li> </ul>

No	Pokok Persoalan	Ketetapan
6	Amnesti	- Anggota GAM akan diberikan amnesti dan tahanan politik akan dibebaskan.
7	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GAM akan membubarkan anggota bersenjata yang berjumlah 3.000 dan menghancurkan 840 senjatanya antara 15 September dan 31 Desember 2005.</li> <li>- Secara bersamaan, pasukan militer dan polisi non-organik akan ditarik dan hanya 14.700 pasukan organik militer dan 9.100 anggota polisi organik yang tetap berada di Aceh.</li> </ul>
8	Pengawasan	- Uni Eropa dan anggota ASEAN akan berperan dalam Aceh Monitoring Mission (AMM). Tugas lembaga tersebut adalah mengawasi proses pelaksanaan HAM, demobilisasi, pelucutan senjata, dan kemajuan reintegrasi dan menengahi perselisihan.

Sumber : Tim Sosialisasi Aceh Damai

Terlepas dari dinamika tersebut, pada tanggal 2 September 2005 di Jakarta, Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu (GNBB) yang dideklarasikan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan sejumlah tokoh lainnya mengeluarkan pernyataan sikap dengan menolak nota kesepahaman (MoU) damai RI-GAM di Helsinki 15 Agustus 2005. Adapun isi pernyataan sikap tersebut adalah :

- “(1) Penandatanganan MoU akibat dari semangat reformasi yang berlebihan dalam situasi yang tidak menentu tahun 1999.
- (2) MoU Aceh dinilai mengancam integritas NKRI, padahal persoalan Aceh sebenarnya telah diselesaikan melalui cara-cara damai dan demokrasi melalui pemberlakuan otonomi khusus.
- (3) MoU tersebut melanggar UUD 1945 berikut peraturan perundang-undangan lainnya, memecah belah bangsa, juga sangat menyakitkan mayoritas rakyat Aceh yang ingin hidup damai, sejahtera, adil, demokratis, bermartabat dalam bingkai NKRI.
- (4) Menolak segala campur tangan asing di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke yang berupaya memecah belah Indonesia

dan memberi peluang kehadiran gerakan separatis di Aceh dan Papua maupun daerah lainnya di Indonesia.

(5) Kepada TNI/POLRI agar melaksanakan tanggung jawab bela negara dan melindungi Bangsa Indonesia dari ambang kehancuran serta menyeru segenap kekuatan dan potensi kebangsaan untuk kesatu padu dan mengambil langkah demi menyelamatkan NKRI.

(6) Masyarakat diharap tetap tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan saling bahu membahu dengan TNI/POLRI untuk bersama dalam menghadapi setiap ancaman dari GAM.

(7) Meminta negara-negara sahabat, para relawan baik dari dalam maupun dari luar negeri, ataupun pihak-pihak yang saat ini terlibat dalam pembangunan Aceh pasca tsunami tetap bekerja dengan sebaik-baiknya.”

Sementara Ketua Tim Perunding Indonesia, Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM) menyampaikan argumen sebagai berikut :

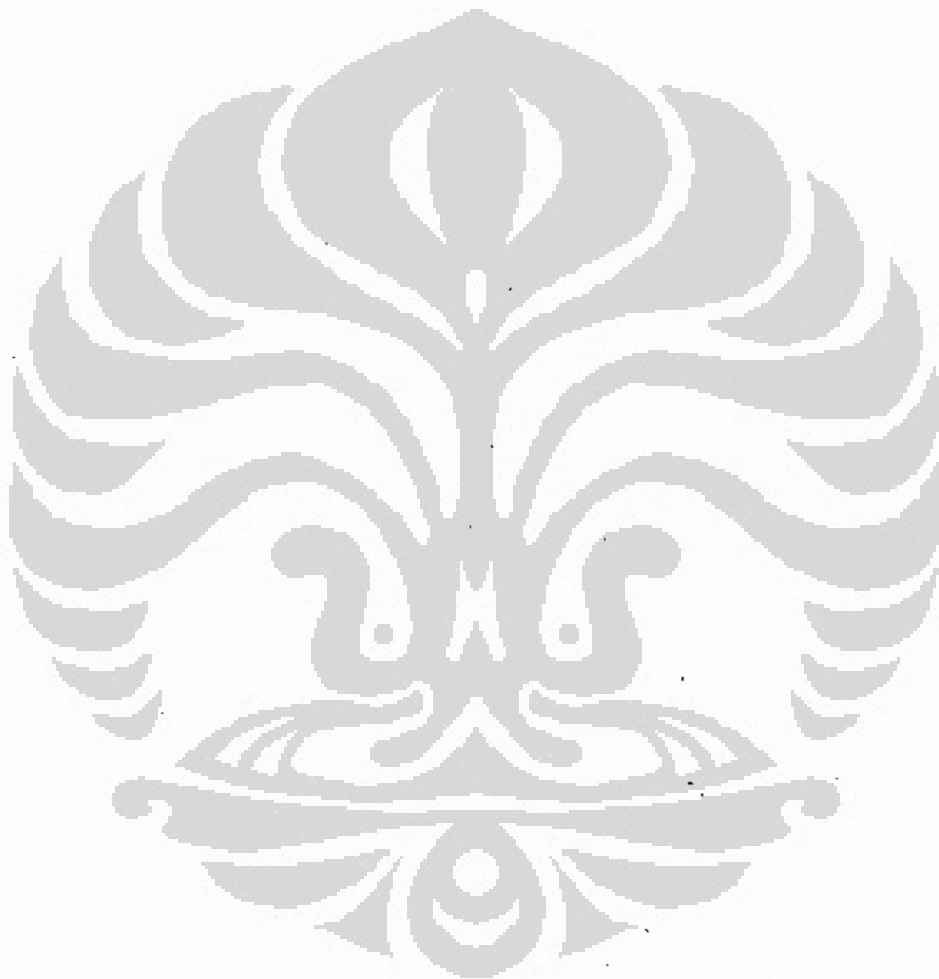
“Pertama gempa dan tsunami yang membawa derita bagi rakyat diharapkan menggugah kesadaran pihak GAM untuk berunding. Pemerintah berkepentingan ingin segera melaksanakan rekonstruksi dan pembangunan di Aceh. Kedua, GAM menilai baru sekarang berjanji akan menyelesaikan Aceh secara menyeluruh dan permanen. Ketiga, pengaruh masyarakat internasional yang meminta GAM realistik dan tidak menuntut kemerdekaan. Mereka mendorong GAM untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui perundingan dengan Pemerintah RI.” (Kompas, 18 Agustus 2005)

Solusi politik yang diambil oleh Pemerintah Indonesia sejak era reformasi, mulai dari jeda kemanusiaan, kesepakatan penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement, CoHA*) hingga MoU Helsinki merupakan pelaksanaan uji coba (*Try and error*) dalam mencari solusi politik terbaik bagi penyelesaian konflik Aceh. (Bhakti : 2008, 6)

Masalah pro dan kontra terhadap MoU Helsinki masih menjadi fenomena yang problematis karena hal tersebut masih merupakan tahapan awal yang masih memerlukan tindak lanjut di tingkat implementasinya di lapangan, terutama permasalahan pembauran antara mantan GAM (KPA) dengan kelompok-kelompok masyarakat yang pernah disakiti dan menjadi korban konflik, seperti kelompok-kelompok yang tergabung dalam Front Perlawanan Separatis GAM yang sekarang telah berubah menjadi Pembela Tanah Air (PETA), disamping kelompok FORKAB yang sudah dianggap sebagai pengkhianat terhadap perjuangan GAM, karena mereka telah lebih dahulu bergabung dengan

Pemerintah RI sebelum penandatanganan MoU Helsinki. Dinamika Parlok dengan Parnas, dan isu pemekaran daerah ALA dan ABAS.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa, konflik Aceh belum berakhir, meski aktor konfliknya cenderung berubah menjadi konflik lokal antara masyarakat Aceh sendiri. Resolusi konflik menjadi penting untuk mencapai perdamaian di Aceh dalam proses pembangunan kembali Aceh paska konflik, dan tetap dalam kerangka NKRI sesuai amanat MoU Helsinki.



### **BAB III**

## **MASYARAKAT DAN KONFLIK DI LANGSA**

### **A. Masyarakat Kota Langsa**

#### **A.1. Daerah Tingkat II (Kota) Langsa**

Langsa merupakan kota pesisir, memiliki penduduk yang sangat heterogen seperti : Aceh, Jawa, melayu, Gayo, Padang, Batak dan Cina. Langsa adalah salah satu Daerah Tingkat II (Kota), dari 21 Kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dengan luas wilayah 262.41 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 113.837 jiwa, jumlah kecamatan dan desa saat ini adalah 5 kecamatan dan 51 desa atau gampong (Profil Daerah Langsa, 2008). Kota Langsa secara geografis dikelilingi oleh sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Timur dan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Di sebelah Timur, dapat mengakses secara cepat ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kota Langsa sebelumnya merupakan Ibukota Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, berdiri sebagai Daerah Tingkat II (Kota) setelah ada pemekaran dari Aceh Timur, dengan UU No. 3 Tahun 2001.

Komposisi jumlah penduduk mayoritas di Langsa, berasal dari etnis Aceh dan etnis Jawa, dimana tempat tinggalnya cenderung mengelompok dalam setiap lorong maupun Gampong. Etnis Cina berada di wilayah pusat perkotaan, sedangkan etnis lain karena jumlahnya relatif sedikit cenderung berada di perkotaan. Dari 5 kecamatan, Kecamatan Langsa Barat, mayoritas penduduknya etnis Aceh, Langsa Baru dan Langsa Lama mayoritas penduduknya etnis Jawa. Sedangkan Langsa Kota dan Langsa Timur penduduknya relatif beragam, namun tetap nampak terkonsentrasi pada setiap lorong maupun Gampong sesuai dengan komunitasnya. Seperti etnis Cina dan Padang banyak tinggal di Langsa Kota sebagai pedagang. Sementara etnis Batak dan Melayu lebih banyak berasimilasi dengan etnis Jawa melalui perkawinan. Dari hasil wawancara dari 51 desa yang ada di Kota Langsa, 15 desa didominasi oleh mayoritas pendukung GAM, 20 desa mayoritas berpenduduk yang Anti GAM (Pendukung PETA dan Pro NKRI), sedangkan 16 desa lainnya berpenduduk hampir berimbang antara pendukung GAM dengan pendukung PETA (Aceh GAM dan Aceh RI) serta mereka yang dalam posisi netral seperti keturunan Cina.

Kondisi demografi tersebut berpengaruh pada posisi dan komposisi konflik, seiring dengan berkobarnya konflik antara GAM dengan Pemerintah Pusat. Karena adanya dikotomi Aceh dengan Jawa (etnonasionalisme Aceh dengan kolonialisme Jawa), sehingga dengan stigma tersebut, etnis Jawa dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, dalam bahasa GAM disebut sebagai "CUAK" (mata-mata) dan bagi etnis Aceh yang mendukung Indonesia juga disebut dengan istilah "CUAK" (Pengkhiatan), sebagian mereka yang menjadi PNS atau TNI/POLRI, termasuk keluarganya. Dalam perkembangan konflik Aceh, khususnya pasca Orde Baru, mereka yang dianggap "CUAK" banyak yang diculik, kemudian dibunuh atau hilang tanpa ditemukan jejaknya, dan di Langsa dikenal dengan istilah pembantaian para "CUAK". Fenomena kekerasan tersebut yang memberi kontribusi signifikan terhadap munculnya perlawanan pada GAM secara terbuka, terbentuknya kelompok-kelompok yang Anti GAM dan pro pada Pemerintah Pusat.

Pada saat ini, Kota Langsa sebagai Daerah Tingkat II, masih berada dalam fase transisi, kendatipun tugas dan tanggung jawab pemerintahan pada tataran konsepsi batasan administratif telah terpisah dengan jelas dari Kabupaten Aceh Timur. Namun pada tataran implementasi yang mampu mencerminkan diskripsi Kota Langsa yang sesungguhnya secara komprehensif perlu pembenahan secara serius. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dominasi Aceh Timur masih sangat kental dirasakan di Kota Langsa, karena roda pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, masih berada di wilayah Kota Langsa. Sehingga wajah Kota Langsa, masih merupakan representasi dari Aceh Timur,<sup>60</sup> hal tersebut seringkali menimbulkan gesekan yang dapat memicu timbulnya konflik. Karena kantor pemerintahan, instansi Polres dan DPRD Aceh Timur masih berada di Kota Langsa, sehingga berbagai kegiatan demonstrasi/unjuk rasa, ormas, LSM banyak dilakukan di Kota Langsa. Disisi lain Kota Langsa sangat memungkinkan menjadi

---

<sup>60</sup> Kabupaten Aceh Timur, dalam konflik Aceh dikenal sebagai daerah basis GAM, pada pasca MoU Helsinki dipimpin oleh kepala daerah, berasal dari mantan GAM. Sedangkan Kota Langsa dipimpin oleh kepala daerah yang pernah diculik dan disandera oleh GAM dimasa konflik.

sentral ekonomi, khususnya di wilayah bagian timur Provinsi Aceh,<sup>61</sup> bahkan dapat dikatakan sebagai Serambi Medan.<sup>62</sup>



### **Unjuk Rasa Yang Dilakukan Di Kota Langsa**

Sebagai Daerah Tingkat II, Pemerintah Kota Langsa memiliki hak otonomi untuk menjalankan pembangunan daerah sendiri sebagaimana daerah kabupaten/kota lainnya. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah memberikan hak kepada daerah untuk melaksanakan sebahagian besar tugas Pemerintah Pusat di daerah. Terutama terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Pembangunan semua sektor diperlukan, untuk mencapai eksistensi kebijakan pembangunan daerah, yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bila dikaitkan dengan kondisi Langsa pada saat ini, maka perlu pendekatan rekonstruksi, rehabilitasi dan reintegrasi pasca konflik, untuk mendukung proses pencapaian pembangunan fisik maupun non fisik. Kota Langsa secara geografis dapat berinteraksi lebih mudah dengan Provinsi Sumatera Utara yang keberadaannya lebih maju dari Provinsi Aceh, maka dapat diarahkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan daerah.

<sup>61</sup> Kota Langsa berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan adanya potensi perikanan (kelautan), karena Kota Langsa memiliki pelabuhan yang memungkinkan daerah ini menjadi pintu gerbang perdagangan internasional. Hal tersebut dapat mempercepat pembangunan Kota Langsa.

<sup>62</sup> Kota Langsa berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara, hanya berjarak sekitar 246 km dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, Medan. Langsa memiliki banyak kemiripan dengan Medan, dan warga Langsa lebih senang bepergian ke Medan daripada ke Banda Aceh, jarak tempuh sekitar 3 jam perjalanan darat ke Medan. Sedangkan jarak tempuh ke Banda Aceh sekitar 8 jam.

Ditinjau dari letak geografis, sektor perhubungan, komunikasi dan perdagangan, maka Kota Langsa sangat memungkinkan menjadi sentral ekonomi, khususnya di wilayah bagian timur Provinsi Aceh, karena didukung oleh :

1. Kota Langsa berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan adanya potensi kelautan (perikanan).
2. Kota Langsa memiliki pelabuhan yang memungkinkan daerah ini menjadi pintu gerbang perdagangan internasional.<sup>63</sup>

Sejak lama Langsa dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa, khususnya hasil bumi dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan paling banyak dari Medan dan Sumut.<sup>64</sup> Peran sebagai kota otonomi sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur mendatangkan keuntungan bagi Kota Langsa. Dua kegiatan perekonomian daerah otonom menyatu di satu tempat menyebabkan Langsa berpotensi memacu bidang perdagangan dan jasa. Meskipun kedepan Ibu Kota Aceh Timur tidak lagi bertempat di Langsa.<sup>65</sup> Perdagangan dan jasa masih bisa menjadi sektor unggulan. Tahun 2001 lapangan usaha perdagangan dari kecamatan-kecamatan yang kemudian membentuk Kota Langsa ini menyumbang 43 persen bagi perdagangan Aceh Timur (Profil Kota Langsa).

Kota Langsa memiliki pelabuhan dengan kapasitas ekspor-impor, Pelabuhan Kuala Langsa di Kecamatan Langsa kota menyimpan peluang besar melalui pergerakan perekonomian Kota Langsa. Arus ekspor-impor barang sejak lama dilakukan di pelabuhan tersebut. Sebelum terjadi konflik, Pelabuhan Kuala Langsa menjadi tempat pengapalan beberapa komoditas ekspor seperti udang beku, arang kayu bakau, hasil laut, dan pertanian dari daerah sekitar Aceh dan Sumut. Arang kayu bakau yang dihasilkan dari pesisir pantai Langsa dan Kabupaten Aceh Timur masih aktif di ekspor ke Malaysia. Pemkot Langsa tetap berupaya menarik investor untuk mengembangkan Pelabuhan Kuala Langsa, agar

<sup>63</sup> Lihat Kajian Strategis Potensi Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Langsa bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.

<sup>64</sup> Barang-barang kebutuhan pokok dan barang pertanian yang di distribusikan dari daerah di serap oleh tiga pasar pemerintah, sembilan pasar desa, dan sekitar 80 kelompok pertokoan yang tersebar di lima kecamatan (Profil Daerah Kota Langsa Tahun 2007).

<sup>65</sup> Sebenarnya Ibu Kota Aceh Timur ada di IDI/ dekitar 20 km dari Kota Langsa, namun sampai saat ini belum difungsikan maksimal, pusat pemerintahan masih tetap di Langsa. Ada berbagai alasan yang menjadi alasan seperti masalah anggaran transportasi pegawai dan keamanan.



mampu menggerakkan perekonomian tersebut.<sup>66</sup> Bahkan hanya Kuala Langsa yang dapat menjadi sumber PAD untuk membiayai pembangunan kota selain PBB.

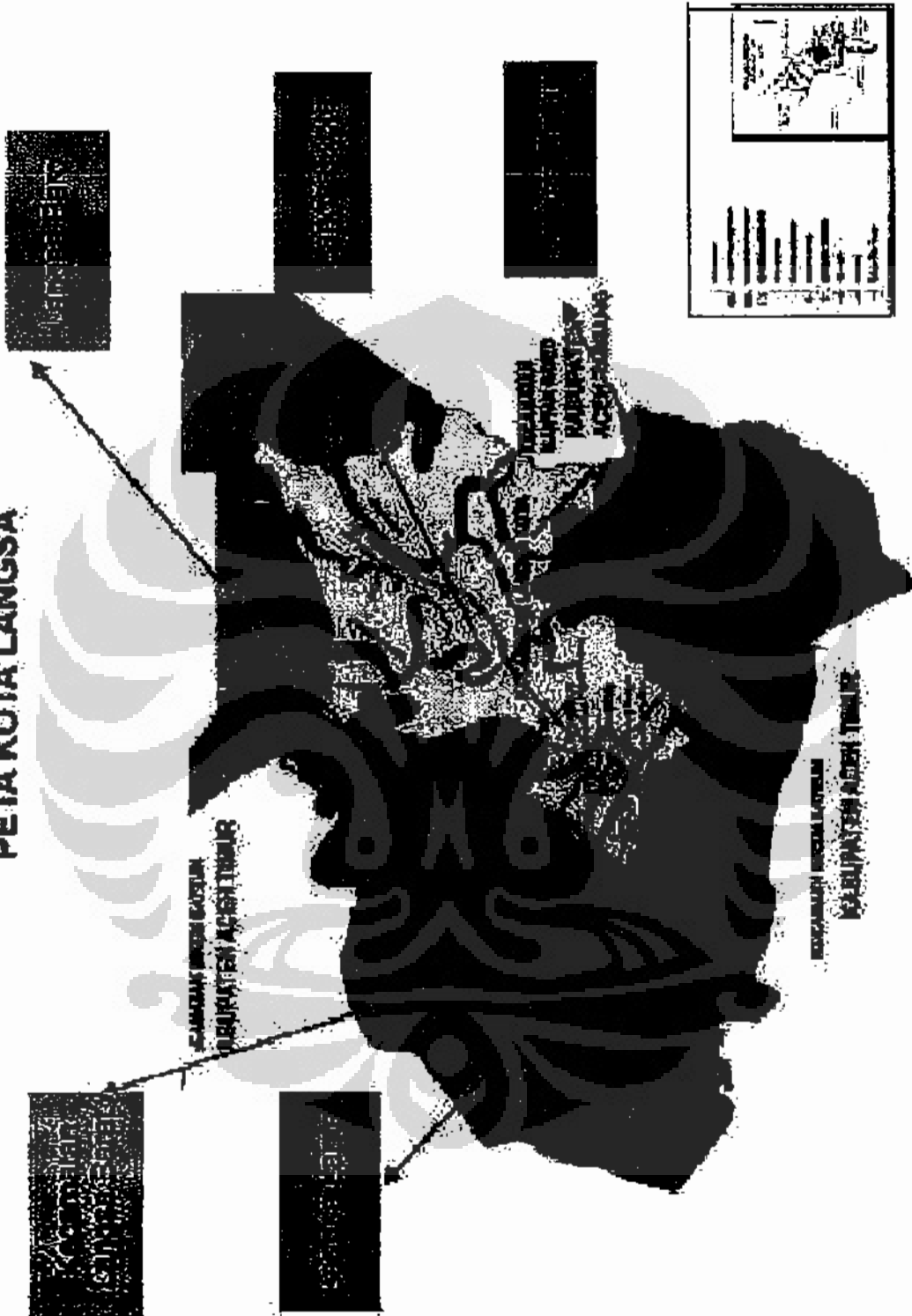
Kemampuan Pemerintah Kota Langsa, untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan daerah menjadi semakin penting dalam mempercepat proses pembangunan daerah, yakni potensi ekonomi yang dapat diunggulkan dalam mempercepat proses pembangunan daerah ini, antara lain sektor pertanian, industri pengolahan kayu, perdagangan, hotel, restoran serta jasa.

Sebagaimana kota lain di Aceh, Langsa tidak memiliki fasilitas hiburan untuk memenuhi kebutuhan warganya. Namun pemandangan warung kopi disepanjang jalan Ahmad Yani, jalan Protokol dua jalur yang membelah Kota Langsa, nampak susunan kursi santai sampai emperan toko, cukup ramai didatangi warga yang bersantai, sambil memperhatikan warga lain yang lalu lalang terkadang diselingi dengan diskusi politik dan proyek serta bisnis, sebagaimana kebiasaan hidup keseharian masyarakat Aceh. Di malam hari, pusat keramaian beralih di alun-alun kota, bekas kompleks stasiun kereta api depan taman kota dan pelataran parkir pusat pasar Kota Langsa.

---

<sup>66</sup> Sudah seringkali dilakukan pertemuan dan perjanjian kerjasama dengan investor asing untuk menanamkan modal di Kota Langsa, namun sampai saat ini belum ada yang terealisasi, meskipun Pemkot berjanji akan banyak memberikan kemudahan birokrasi. Hal yang masih dipertimbangkan para investor karena masih diragukan jaminan keamanan Aceh kedepan. (Wawancara peneliti dengan Informan Eksekutif Pemkot Langsa pada Oktober 2008 di Langsa)

# PETA KOTA LANGSA



## A.2. Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial secara sosiologis, dapat dikatakan mengenai sesuatu yang terdiri atas bagian yang saling tergantung dan membentuk suatu pola tertentu. Bagian dari sesuatu tersebut dapat terdiri atas pola perilaku individu atau kelompok, institusi, maupun masyarakat (Kamanto; 2004:52). Perubahan struktur sosial masyarakat Langsa pasca MoU Helsinki perlu mendapatkan perhatian karena ada peristiwa penting yang menyebabkan perubahan yaitu situasi perdamaian. Hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku individu atau kelompok, institusi maupun masyarakat, karena berpotensi menimbulkan konflik bila tidak dikelola dengan baik. Sebab konflik dapat juga dipahami sebagai perwujudan dari interaksi antara pelaku konflik dan struktur kemasyarakatan dimana konflik itu terjadi. Struktur sosial masyarakat menurut peneliti dapat berpengaruh terhadap dinamika konflik, untuk itu diperlukan pembahasan lebih lanjut, seperti karakteristik masyarakatnya dan struktur kelembagaan.

### A.2.1. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik<sup>67</sup> masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses perdamaian atau sebaliknya justru berpotensi menimbulkan konflik. Sebagaimana masyarakat Aceh pada umumnya, masyarakat Langsa dalam kesehariannya juga senang berlama-lama duduk di warung kopi sambil bercerita panjang lebar tanpa judul pembicaraan yang jelas. Ini dilakukan sampai mereka pulang ke rumahnya masing-masing, dalam ungkapan bahasa Aceh disebut dengan, “peh rantam atau peh keureupuk” artinya pembual atau obrolan yang tidak berisi.. Ada juga diantara mereka yang gemar terhadap cerita bohong, mengunjing orang lain dan ada juga yang senang berjudi

<sup>67</sup> Karakter adalah sifat-sifat atau watak-watak yang secara historis dimiliki warga suatu kaum, terbentuk setelah adanya pertimbangan dan proses rasionalitas dan biasanya dipengaruhi oleh emosionalitas dan image yang secara intrinsik melekat dalam keinginan “ego kolektif” suatu kaum, dan kemudian diwariskan secara transgenerasional (Fuad Mardhalillah, 2007) Sumber : <http://article.melayu.online.com>.

seperti mengadu ayam, dan meueen batee.<sup>68</sup> Karakteristik masyarakat Langsa tidak jauh beda dengan karakteristik masyarakat Aceh umumnya.

Pada dasarnya orang Aceh taat mengikuti syariat Islam. Ironisnya, walaupun dendam yang menurut ajaran Islam dilarang namun temperamen dan nilai kultural orang Aceh lebih mengedepan. Sampai sekarang masih ada pemeo “darah dibayar dengan darah” dan “nyawa dibayar dengan nyawa”, sebagai umat Islam pastilah mereka percaya kepada Rukun Iman yang ke enam yakni percaya kepada Takdir atau percaya bahwa kadar baik dan buruk datangnya dari Allah, namun dalam kehidupan bermasyarakat pemeo tersebut di atas masih cukup menonjol, terutama yang berkenaan dengan kekerasan seperti kematian, kecacatan, keterlukaan dan keteraniayaan yang disebabkan oleh kekejaman, penganiayaan dan pembantaian serta kesewenang-wenangan dan kebrutalan lainnya.

Muliadi Kurdi (2007 : 4), dalam artikelnya, “Karakteristik Masyarakat Aceh”, secara rinci menguraikan tentang apa yang disebutnya dengan, “Karakter Budaya Rendah”, artinya kepercayaan dan alam pikiran sebagian penduduk masih didominasi dan dilatarbelakangi oleh kondisi normatif yang Islami, maka ada sikap dan perilaku masyarakat yang masih percaya pada alam pikiran yang berbau mitos atau magis, antara lain :

“(1) Sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan dari penguasa baik dari segi ekonomi, politik, maupun kalangan sosial kemasyarakatan. (2) Lemah dalam hal-hal yang menyangkut inisiatif, kualitas, lebih-lebih dalam keberanian inovasi termasuk keberanian mengambil resiko. (3) Telah sangat menurun (kurang) dalam hal kepercayaan diri, sehingga yang dikemukakan adalah rasa-rasa khawatir dan takut. (4) Kurang memiliki rasa tanggung jawab, bahkan cenderung untuk lari dari tanggung jawab, mencari kambing hitam atau mencari alasan-alasan tertentu yang tidak jarang beresiko merugikan orang lain. (5) Sangat kurang kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, baik pemimpin agama, politik maupun pimpinan-pimpinan adat. (6) Dimana satu sisi terlihat sangat moralistic, tetapi di sisi lain sering kali melalaikan “etika” kelalaian menimbulkan rasa malu serta dimunculkan ungkapan baru yang berbunyi, “Meunyoe thaet ta pateh haba kitab meu boh u tupe kap han tateumeung rasa.”

<sup>68</sup> Menurut Kasyim, praktik maksiat seperti prostitusi terselubung berkedok salon-salon kecantikan dan karaoke, minuman keras bahkan narkoba sekalipun. Meski kelompok Islam garis kekras berkali-kali melakukan protes, bahkan turun ke jalan, praktek-praktek ilegal dan haram itu bagai tidak bisa dihentikan. (Kasyim; 2005 : 30)

Karakteristik masyarakat Langsa, khususnya etnis Aceh, dapat dikatakan sama dengan karakteristik masyarakat Aceh dari etnis yang lain. Kondisi ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dengan yang dianggap sebagai penduduk pendatang seperti Jawa, Cina, Padang, dan Batak. Nampak adanya kesenjangan, hal tersebut berpengaruh pada sikap dan perilaku yang kontra produktif seperti kecemburuan dan kecurigaan serta rentan atau berpotensi konflik.

Sedangkan sebagian besar masyarakat dari etnis Jawa ada kecenderungan hidup berkelompok dan dalam wilayah yang sama, seperti di kampung Jawa. Hal tersebut dipengaruhi oleh konflik bersenjata dan kekerasan yang berkepanjangan di Aceh, dan seringkali mereka menjadi korban berbagai tindakan kekerasan. Sehingga dengan berkelompok-kelompok mereka dapat saling melindungi dan bersama-sama atau bekerja sama dalam menghadapi ancaman maupun mengatasi permasalahan yang muncul akibat konflik.

Fenomena tersebut memberikan kontribusi pada munculnya kelompok-kelompok yang anti GAM, dan dalam perkembangannya pro pada Pemerintah Pusat. Seperti Front Masyarakat Aceh RI (Front Matari) yang dibentuk oleh mantan Walikota Langsa dan Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG) serta Front Penyelamat Merah Putih (FPMP), secara umum merupakan representasi dari FKWJ (Forum Komunikasi Warga Jawa) dan PUJAKESUMA (Putra Jawa Kelahiran Sumatera) serta sebagian etnis Aceh yang dianggap "CUAK" (Pengkhiatan) oleh GAM karena menjadi PNS atau TNI/POLRI. Sehingga di Langsa pertukaran sandera/korban penculikan merupakan hal yang tidak asing lagi antara kelompok Aceh GAM dengan Aceh RI, karena pada dasarnya mereka saling mengenal dan seringkali berada dalam wilayah yang hanya berbeda lorong atau desa.

Petikan ungkapan dari Atin. dalam suatu wawancara di Langsa pada awal November, memberikan gambaran tentang "Keacehan", sebagai berikut :

".....kami bukan suku Aceh tapi kami bangsa Aceh dan suatu saat itu akan tercipta. Kami dulu bangsa dan suatu saat kami akan menjadi bangsa. Jadi arahnya tetap merdeka, kalau Hasan Tiro tidak melakukan perjuangan itu, maka akan timbul 100 Hasan Tiro untuk membuktikan bahwa Aceh kini bisa lepas, bisa merdeka. Itulah yang terjadi di lapangan, melalui pantauan individu,

kelompok-kelompok dan kawan-kawan dari mereka yang sangat kelihatan intimidasi parlok di Pantai Utara. Jangan pilih parnas karena itu milik orang Jawa, tapi pilihlah parlok karena ini milik kita, partainya orang Aceh.”

Orang Aceh adalah orang yang tinggal di Provinsi Aceh, terlepas etniknya apa. Namun identitas menjadi komoditas yang masih laku, perbedaan “orang Jawa dan orang Aceh” menjadi motor penggerak GAM bersenjata dan GAM politik (Informan L, Langsa, 1 November 2008). Ungkapan diatas, mencerminkan keberagaman, karena di Langsa penduduknya sangat heterogen, yaitu Aceh dan Jawa (mayoritas), sedangkan yang lain seperti Melayu, Gayo, Batak, Padang dan Cina. Namun justru orang seperti Atin inilah, yang tidak diperhitungkan dalam setiap perundingan antara GAM dan Pemerintah RI.

Pada akhirnya konsepsi kebangsaan orang Langsa secara umum cenderung mengikuti pihak-pihak yang berkonflik, yakni pendukung GAM, merasa sebagai Bangsa Aceh dan pendukung RI, memposisikan diri sebagai Bangsa Indonesia. Sedangkan yang “Netral” lebih menunjukkan pada entitas masing-masing, khususnya dari keturunan Cina, dimana hal tersebut dirasa lebih aman bagi mereka, meskipun tidak dipungkiri ada sebagian yang mendukung GAM maupun RI, namun hal tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk etnis lainnya.

Sikap dan perilaku yang berakar dari karakteristik dan anggapan primordial yang berlebihan ini, akan berimbas pada hubungan satu kelompok dengan kelompok lain menjadi renggang. Mulai berkurangnya derajat solidaritas yang terbangun dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam berinteraksi, sekaligus meningkatkan egoisme pribadi maupun kelompok.

Pemahaman terhadap karakteristik “Ureung Aceh”, diperlukan dalam konteks kehidupan yang damai dalam masyarakat Aceh. Menurut Bock (1980 : 85), pemahaman terhadap unsur-unsur karkater dan identitas yang terdapat dalam pikiran setiap warga dari suatu kelompok masyarakat etnis menjadi penting. Namun pemahaman itu bukan dalam konteks penaklukan, tetapi lebih dalam konteks membangun harmoni, yang dapat menghindarkan kemungkinan konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dinamika pasca MoU Helsinki di Langsa juga dipengaruhi oleh keberagaman etnis (mayoritas etnis Aceh dan etnis Jawa) dan karakteristik masyarakatnya.

### A.2.2. Struktur Kelembagaan

Jika mengikuti analisis yang sering digunakan dalam kajian mengenai *civil society*, dimana dibedakan antara negara, *civil society*, dan sektor swasta. Maka menarik untuk dilihat fluktuasi dan keberagaman masing-masing dan kontribusinya terhadap dinamika konflik. Dari sisi relasi kekuasaan, dalam kehidupan sehari-hari secara kultur masyarakat Langsa (Aceh) masih mempraktekkan nilai dan norma relasi kekuasaan masa kerajaan, seperti tradisi pemberian jabatan kepada tetua (Tuha Peut) kepada pemegang jabatan di setiap level pemerintahan.<sup>69</sup> Struktur kelembagaan masyarakat Aceh dapat membentuk suatu sistem masyarakat yang stabil dan menjadi sebuah lembaga yang dapat menjaga atau sebagai pengadilan sosial dalam masyarakat. Menurut Sanusi,

“Seperti disebutkan dalam Kanun Meukuta Alam Al-Asyi, bahwa Kerajaan Aceh Darussalam tersusun dari Gampong (kampung/kelurahan), Mukim (federasi gampong-gampong), Nanggroe (kecamatan), Sagou (federasi dan beberapa nanggroe dan kerajaan/negara). Untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut : Gampong, yang disebut juga Meunasah, dipimpin oleh seorang Keusyik (Kepala Desa) dan seorang Imam Rawatib dengan dibantu oleh sebuah staf yang bernama Tuha Peut. Pemerintahan Gampong ini mendapatkan hak otonomi yang luas. Mukim, yaitu federasi dari beberapa gampong, paling kurang delapan gampong. Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim dan seorang Kadhi Mukim serta dibantu oleh beberapa orang wakil. Setiap Mukim dibangun sebuah Mesjid Jum’at”. (Sanusi; 2005 : 64)

Kehadiran lembaga tersebut adalah sebagai pengontrol dan pengendali terhadap sosial keagamaan yang ada di dalam lembaga kemasyarakatan Aceh. Dalam hal ini, strata sosial dalam masyarakat Aceh ada lima yaitu Gampong, Mukim, Sagou, Nanggroe dan Kerajaan atau Negara yang sekarang terkenal dengan sebutan Aceh.

<sup>69</sup> Kasyim. Berdasarkan pendekatan historis, lapisan masyarakat Aceh yang paling menonjol dapat dikelompokkan pada dua golongan yaitu golongan umara dan golongan ulama. Umara dapat diartikan sebagai pemerintah atau pejabat pelaksana pemerintah dalam suatu unit wilayah kekuasaan (Sultan, Ulee Balang, Panglima Sagoe, Kepala Mukim dan Keuchiek). Sementara golongan ulama yang menjadi pimpinan yang mengurus masalah-masalah keagamaan (hukum atau syariat Islam) dikenal sebagai pemimpin keagamaan atau masuk kelompok elit religius. Kelas masyarakat Aceh juga dapat dilihat dari segi harta yang mereka miliki ada golongan orang kaya yang disebut golongan hartawan. Golongan mayoritas yang paling menonjol di Aceh yaitu lapisan rakyat biasa yang diistilahkan dalam sebutan Ureung Leuwe/orang banyak. (Kasyim, 2005 : 63-64)

Menurut Bhakti (2008 : 352), gampong di Aceh mengalami tekanan luar biasa dimasa konflik. Akibat tekanan luar bisa telah membuat kelembagaan Gampong yang ada praktis lumpuh, segenap struktur kelembagaan yang ada praktis tak berfungsi, kecuali yang bertahan hanya lembaga Keuchik (kepala Gampong), akibatnya segala urusan Gampong bertumpu pada diri Keuchik.

Suatu Gampong yang terdiri dari sejumlah kepala keluarga yang dipimpin oleh seorang Keuchik (Kepala Desa)<sup>70</sup> dan seorang wakil Keuchik. Dalam hal ini gampong mempunyai seorang imam atau ahli agama yang mengurus bidang sosial keagamaan. Demikian juga gampong mempunyai ureung tuha atau tuha peut atau dengan sebutan LMD/LKMD di Indonesia pada umumnya. Seorang kepala gampong bertanggung jawab kepada Mukim. Suatu gampong mempunyai sebuah Meunasah sebagai tempat pertemuan atau tempat musyawarah yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat ataupun untuk menyelesaikan pertengkaran atau perselisihan anggota masyarakat. Gampong atau kampung mempunyai beberapa lingkungan atau dusun, yang dipimpin oleh kepala dusun atau di Pulau Jawa terkenal dengan sebutan RT. Suatu gampong juga sudah mempunyai sebuah Balee tempat pertemuan adat dan sebuah Mesjid Jum'at atau masjid tempat shalat Jum'at.

Gampong dalam masyarakat Aceh merupakan suatu sistem kemasyarakatan yang dapat mengatur diri sendiri sekaligus gampong sebagai suatu kesatuan yang mengorganisasikan masyarakat yang berdomisili di lingkungan administrasi atau lingkungan hukum desa, hingga sampai saat ini masih berlaku tradisi seperti ini di Aceh.

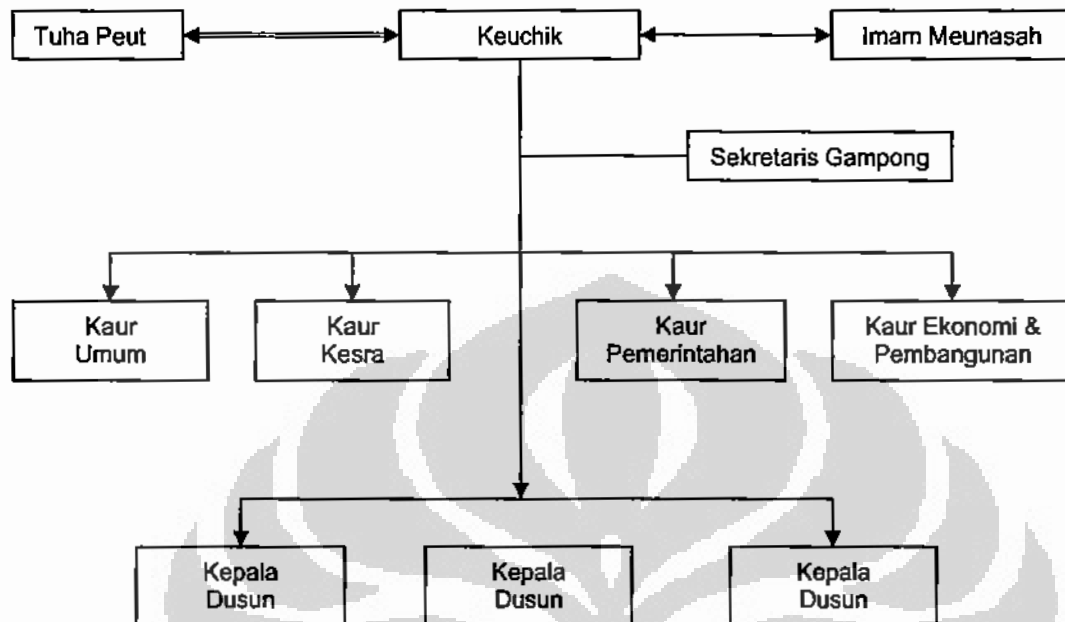
---

<sup>70</sup> Keuchik (Geuchik) dalam perspektif Gampong tidak hanya berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat dan wilayah. Keuchik juga sebagai pemangku adat di tingkat Gampong. Dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan masyarakat, Keuchik dibantu Tuha Peut (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tuha Peut umumnya memikul tugas rangkap, disamping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu, dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.






Struktur Pemerintahan Gampong adalah sebagai berikut :

### Struktur Pemerintahan Adat Gampong



Keterangan :

-  Garis konsultatif
-  Garis koordinat
-  Garis komando

Sumber : Sanusi M. Syarif (2005)

Sementara jabatan Imam Meunasah walau mungkin masih dianggap sebagai jabatan yang cukup prestisius di Gampong, namun peran dan fungsinya sudah jauh berkurang. Berbeda dengan Imam Meunasah tempo dulu, Imam Meunasah pada Gampong era kini tugas dan fungsinya telah sedemikian menyempit hingga terpaku pada tugas memimpin shalat jamaah di Meunasah. Itupun lantaran jumlah jamaah shalat yang amat sedikit, Imam Meunasah hanya memimpin shalat maghrib di meunasah. Selebihnya, pada saat-saat shalat wajib lainnya (subuh, dzuhur, ashar dan isya) Imam Meunasah mungkin lebih memilih shalat di masjid atau bahkan di rumahnya sendiri. Tugas lain yang masih tersisa ialah bersama-sama kepala dusun atau Keuchik mengurus kalau ada warga yang meninggal dunia. Tugas penting Imam Meunasah sebagai tempat penyelesaian kasus-kasus yang bernuansa agama tidak ditemui lagi. (Bhakti; 2008 : 358-359)

Adat dan agama (Islam) telah sedemikian rapi bekerja sama dalam penyusunan struktur sosial masyarakat Aceh, namun hal ini tidak berarti tidak ada

konflik didalamnya, seperti penerapan syariah Islam sedikit banyak telah membuka peluang itu. Dalam struktur lembaga adat bisa kita lihat peran (role) dan sekaligus kontestasi antara adat dan agama. Dalam pengamatan peneliti, kontestasi dan hubungan saling menguntungkan antara adat dan agama adalah penting dalam memahami dinamika konflik di Langsa (Aceh) karena masing-masing pihak seringkali menggunakan simbol-simbol adat dan agama. Seperti diungkapkan oleh Suryadi (Langsa, 2 November 2008), salah satu warga Aceh dalam wawancara dengan peneliti, “..... tidak berperannya ulama, karena ulama sudah masuk politik praktis”.

Selanjutnya seorang ulama (Informan E, di Langsa, 26 Oktober 2008), yang diwawancarai peneliti, mengatakan “..... untuk mengatasi konflik yang berkelanjutan, pendekatan adat dan budaya sepertinya sulit dilakukan, karena pelaku adat dan budaya sudah terlibat di dalam konflik. Seperti Mpu sudah terlibat dengan konflik MUNA, IASA sudah terlibat konflik dengan MADA (Majelis Aneuk Dayyah Aceh) LAKA dengan lembaga adat KPA, terkait Wali Nanggroe. Kesemua itu muaranya adalah motif perebutan kepercayaan, politik dan kekuasaan keagamaan di Aceh.” Sementara informan lain (Informan L, Langsa, 26 November 2008), mengatakan bahwa :

“Kalau dulu tokoh adat dan tokoh agama di jaman Pak Harto, Pak Karno, yang namanya Kecik atau Imam, orang naik sepeda pun turun, sekarang kecik bebuih mulut, imam bebuih mulut tak didengar itu kan hanya teori tua peut. Misalnya Geuchik bicara masalah gotong royong, nah mau kecik gotong royong sendiri, ada yang datang juga enggak. Pak imam begitu juga, begitu ada yang meninggal orangnya seratus, begitu antar ke kuburan yang antar dua puluh, maka Pak Imam berdirilah disitu sendiri, jadi rasa segan itu tidak ada lagi di Aceh. Siapa ulama di Aceh ini yang disegani, sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu nampak Pak Imam saja, salaman cium tangan, sekarang apa itu Imam, zakat fitrah dia duluan yang banyak, kita dikasih beras murah. Apa itu geuchik bangdes-bangdes, jalan tetap becek. Jadi penghormatan sudah luntur. Kalau dulu ada duduk pak Geuchik orang hormat semua, sekarang tidak ada lagi sudah tidak ada lagi kepercayaan”.

(Informan L)

Sebenarnya peraturan dan tata cara yang mengatur tentang kehidupan masyarakat Aceh sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh. Namun perubahan sistem kemasyarakatan dan kekerabatan di Langsa yang lebih dominan dengan

sistem kebudayaan di Pulau Jawa atau kebudayaan lain yang ada di Indonesia sesuai dengan kemajuan perkembangan zaman. Nilai-nilai tradisi sudah bercampur dengan nilai-nilai kebudayaan lain, lemahnya kontrol sosial di Aceh serta tidak adanya lagi karisma tokoh agama dan tokoh adat yang dihormati dan disegani, membuat masyarakat Aceh berjalan sendiri-sendiri sesuai keinginan kelompok masing-masing.

Kontrol sosial sangat diperlukan terhadap seseorang atau sekelompok orang untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan jalannya organisasi dari mulai tingkat desa sampai ke pemerintahan kota yang bersifat mendidik, mengajak sekaligus kadang-kadang memaksa individu atau kelompok masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan, nilai-nilai, serta norma-norma yang berlaku.

Seharusnya tradisi ke Islaman di Aceh membuat seluruh masyarakat harus taat dan tunduk pada peraturan Syariat Islam.<sup>71</sup> Namun di Kota Langsa, yang memiliki penduduk yang sangat heterogen, pemberlakuan syariat Islam yang merupakan bagian dari otonomi khusus Provinsi Aceh tidak terlalu menyolok, misalnya pandangan perempuan tidak berjilbab merupakan hal yang lumrah di Langsa, keberadaan “salon-salon” terselubung cukup banyak.

Sistem kekerabatan di Aceh pada umumnya masih berpengaruh kepada ajaran agama Islam, hubungan keluarga dalam masyarakat Aceh terdiri dari Wali, Karong dan Kaom.<sup>72</sup> Namun hal tersebut sudah tidak lagi efektif di Langsa, karena sudah banyak warga pendatang.

---

<sup>71</sup> Menurut Kasyim, Penerapan Syariat Islam secara kaffah merupakan dambaan masyarakat Aceh dan seluruh Tokoh Agama di Aceh, sejak dahulu, yaitu sejak Provinsi itu menyatu dengan NKRI. Tetapi, harapan dan impian masyarakat itu berkali-kali diabaikan oleh para petinggi di Jakarta, sehingga menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Syariat Islam yang berlaku di Aceh, justru ketika Provinsi ini sudah larut dalam konflik. Selain itu, para generasi muda Aceh yang mayoritas lulusan sekolah agama, juga kurang mendapat respon dan prioritas di berbagai lapangan pekerjaan. (Kasyim, 2005, 34-35)

<sup>72</sup> Rani, wali adat adalah ayah dan semua kaum laki-laki setempat dari kerabat istri yang menjadi penolong rumah tangga bila timbul kesukaran. Karong adalah semua saudara dari pihak ibu, fungsi karong dalam masyarakat Aceh sama dengan semua fungsi wali. Fungsi karong juga sebagai pelindung, bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, sosial, keamanan dan keselamatan keluarga. Kaom adalah gabungan saudara dari pihak wali dan karong, berfungsi untuk saling membantu antar sesama kaum baik secara moral maupun sosial, ekonomi dan keamanan. Kaom sangat besar pengaruhnya di Aceh dan berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat. (Rani, 2003 : 78)

### A.3. Perkembangan Budaya

Hampir semua unsur kebudayaan yang ada di Langsa pada umumnya masih bersumber atau masih bernuansa Islam.<sup>73</sup> Hal ini yang menjadi unik, karena dari beberapa etnik, yang berbeda karakter di Langsa dapat saling mendukung tanpa ada perselisihan konflik budaya, artinya, tidak menimbulkan keretakan budaya.

Perbedaan kultur kebudayaan terlihat dari daerah mana ia berasal dan bertempat tinggal, serta karakternya masing-masing. Pada umumnya karakter orang Aceh selalu keras, karena kebiasaan orang Aceh untuk berperang sejak zaman Kerajaan Aceh.<sup>74</sup> Percampuran etnik dapat menimbulkan kultur kebudayaan baru, dan dapat masuk dalam kebudayaan asli atau kebudayaan lama Aceh. Kebudayaan dari berbagai etnik di Aceh dapat diterima oleh masyarakat Aceh asal tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Keunikan ini yang menjadi corak utama kebudayaan Aceh. Perbedaan ini dapat terlihat dari bahasa, adat istiadat, pakaian adat, kebiasaan sampai dengan ciri khas dari menu makannya yang berbeda.

Kebudayaan sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan perkembangan agama di dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan sangat berpengaruh pada karakter individu di tempat tinggal suatu masyarakat atau daerah tertentu. Kekhasan budaya Aceh dapat dilihat dari ketahanan budaya yang digoncang oleh konflik yang berkepanjangan di Aceh, tetap eksis dan bertahan sebagaimana kebudayaan lain di Nusantara.

Keunikan dan kemiripan budaya Aceh dapat terlihat juga dari bentuk keseniannya, terutama pada bentuk seni tari. Seni tari Aceh yang gerakannya sangat cepat dan heroic tersebut cenderung mendekati seni tari dari India belakang. Demikian juga cara berpakaian orang Aceh pada daerah pedesaan sangat mirip dengan cara berpakaian orang Hindu. Kenyataan lain juga jelas terlihat dari bentuk sanggul dan pakaian adat orang Aceh mirip Hindu bercampur India, serta jamuan

<sup>73</sup> Kasyim, Budaya Aceh yang santun dan berafiliasi dengan Islam, sejak konflik sedikit tenang seperti api dalam sekam. (Kasyim, 2005 : 29)

<sup>74</sup> Menurut Kasim, Semboyan menarik tentang orang Aceh : "ORANG ACEH DAPAT DIBUNUH TAPI TAK DAPAT DITAKLUKAN", artinya bahwa kekerasan dan bedil hanya bisa membunuh orang Aceh secara lahiriah, bukan secara bathiniyah. Sehingga semangat berperang atas dasar dendam dan ketidakadilan terus berkobar dari generasi ke generasi. Dampaknya, jalan menuju penyelesaian konflik Aceh bertambah rumit. (Kasim, 2005 : 9)

dan ramuan makanan yang disajikan mirip juga dengan kebudayaan India. Misalnya orang Aceh di daerah pedesaan selalu makan sirih sebagai pencuci mulut setelah makan, ini sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional di India.

Percampuran budaya yang sangat dominan saat ini adalah dari budaya Islam yang bersal dari daerah Timur Tengah. Sumber aspirasi kebudayaan Aceh dipengaruhi oleh Islam, misalnya dalam hal cara berpakaian dan tradisi-tradisi perkawinan serta budaya-budaya lain yang disesuaikan dengan agama Islam. Setelah datangnya Islam ke Aceh semua unsur ataupun budaya lokal, seperti budaya Hindu dihapuskan kecuali yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya acara-acara peusejeuk, yang diambil manfaat positifnya.

Pokok-pokok pikiran budaya Aceh selalu berpedoman pada Islam, karena masyarakat Aceh menganggap karya manusia digunakan untuk mempertahankan hidup dan sebagai bentuk dari aspirasi masyarakat setempat yang mempunyai budaya. Masyarakat Aceh sangat mementingkan hubungan manusia dengan penciptanya, disamping hubungan manusia dengan manusia. Terciptanya hubungan baik antara sesama umat manusia di Aceh dapat dilihat dari setiap acara kenduri atau hajatan masyarakat Aceh, semua warga ikut membantu.

Peradaban Aceh umumnya lebih banyak terpengaruh pada kebudayaan Hindu atau Campa terutama pada bentuk bahasa sehari-harinya, setelah datangnya pengaruh kebudayaan Hindia, masyarakat Aceh dapat menerima pengaruhnya Hindu sampai datangnya ajaran dan kebudayaan Islam. Kebudayaan Aceh sangat kuat dipengaruhi oleh budaya Islam, tetapi masih nampak sisa-sisa budaya Hindu, pengaruh Hindu dapat dilihat pada saat-saat upacara-upacara tradisional. Menurut Alvin, bahwa budaya tradisional sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat, pada tempat mana budaya-budaya tradisional tersebut melekat, dan ini berarti budaya tradisional selalu mengalami perubahan yang dinamis (Alvin; 1990 : 66). Selanjutnya budaya tradisional mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Aceh berubah seiring dengan perubahan perkembangan zaman itu sendiri. Oleh karena itu pengaruh dan hubungan antar budaya tersebut dapat berjalan serta berlangsung

secara harmonis dan tidak terjadi benturan konflik budaya. Zaman kolonial, Orde Baru sampai pada zaman reformasi terjadi benturan budaya di dalam masyarakat Aceh.

Bentuk kesenian<sup>75</sup>, tarian serta kebudayaan lainnya seperti adat istiadat, perkawinan, sistem pemerintahan, tetapi semuanya tidak bertentangan dengan ajaran serta Syariat Islam. Meskipun tidak menutup kemungkinan, heterogenitas etnis di Langsa dapat memunculkan konflik, karena adanya pertukaran atau penyesuaian kultur masing-masing warga masyarakat.

#### A.4. Ekonomi

Sejarah Aceh adalah sejarah pragmatisme. Untuk urusan-urusan ekonomi, Kesultanan Aceh pernah bergabung dengan siapapun termasuk dengan kekuatan penjajah sekalipun. Menggambarkan kisah yang penuh heroisme pahlawan sejati dan para pengkhianat. Karakter inilah yang berkembang hingga sekarang dalam institusi-institusi masyarakat di Aceh. (Achmad, 1999 : 5)

Kemiskinan merupakan ancaman bagi rusaknya perdamaian yang telah ada. Kemiskinan inilah yang kemudian menjadikan tingkat kejahatan atau kriminalitas di Aceh meningkat. Menurut catatan kepolisian, telah terjadi 49 kasus perampokan bersenjata, aksi kriminalitas pasca penandatanganan MoU Helsinki meningkat drastis hingga 372% (Jakarta Post, 6 Juni 2006). Pangdam Iskandar Muda, Supiadin, sendiri menegaskan masih banyaknya senjata yang beredar di tangan kaum kriminal ([www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), Kamis, Juni 2006). Sementara masih ada warga Aceh yang terpaksa menjadi pengungsi dan hidup dalam keterbatasan, akibat konflik yang berkepanjangan.

Kemiskinan akan berpengaruh pada kemampuan dan kemauan individu atau masyarakat untuk mengakses pendidikan. Sedangkan terbatasnya sumber-sumber kehidupan manusia, diantaranya dipengaruhi oleh sejauhmana setiap masyarakat untuk mengakses berbagai kemajuan. Disamping bagaimana setiap

<sup>75</sup> Kegiatan kesenian di Aceh selalu diawali dengan ucapan *Bismillah*, serta busana dan pakaian penari Aceh yang berbusana muslim. Kesenian Aceh pada umumnya terdiri dari seni tari, seni sastra, dan cerita rakyat. Kesenian Aceh mempunyai tradisional seperti : bernafaskan Islam, ditarikan oleh banyak orang, pengurangan gerak serupa relatif banyak, memakan waktu penyajian (*running time*) relatif panjang, merupakan kombinasi dari tari, musik dan sastra. Pola lantai yang terbatas, pada awalnya pertumbuhannya disajikan dalam kegiatan khusus berupa upacara-upacara gerak tubuh terbatas. (Ismuha, 1988 : 71-72)

individu dapat mengadopsi sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri, melalui jalur pendidikan formal,<sup>76</sup> sampai jenjang pendidikan tertinggi, melalui jalur formal, maupun non formal. Keterbatasan pendidikan akan berpengaruh terhadap kemampuan dan perilaku masyarakat yang rentan terhadap penyimpangan. Sedangkan keterbatasan sumber-sumber kehidupan juga akan mendorong kecemburuan sosial, pertentangan atau konflik dalam masyarakat.

Masyarakat yang berada dalam kemiskinan sangat mudah untuk kembali terjebak dalam berbagai kerusuhan atau konflik sosial. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah karena ketimpangan sosial ekonomi, ketidakadilan dan kemiskinan. Apabila permasalahan kemiskinan tidak ditangani dengan baik, maka dapat memicu timbulnya konflik kembali di Aceh.

Penuturan seorang informan di Langsa adalah sebagai berikut :

“Pengangguran di Aceh cukup banyak, PT. Damar Siput total karyawannya kena PHK, PT. Tambang Langsa juga di PHK, akibatnya pengangguran bertambah. Tukang babat rumput seminggu tiga kali kerja, mantan GAM yang nganggur banyak jadi kontraktor minta proyek ke Pemda, itu yang bisa. Yang tidak bisa seharian nongkrong di warung kopi, sambil menjadi pengamat politik dan ekonomi, apalagi harga kebutuhan naik, minyak susah didapat, semua kebutuhan didatangkan dari Medan, sampai sebutir telur ayam dan bebek tidak ada di Aceh, semua didatangkan dari luar, tidak ada pabrik di Aceh yang bisa menyerap tenaga kerja. Apalagi kalau NGO Asing sudah cabut dari Aceh, maka makin banyak pengangguran. Sebenarnya Aceh gampang, bagaimana mengenyangkan rakyat dulu, urusan perut tercukupi, karena dimana ada kemiskinan maka akan mudah di doktrin dan diarahkan. Geuchik kamu ngomong bisa karena perut kenyang, Pak Imam sekarang sudah bergaji, tapi apa yang kita dapat, “selop Jepang” pun terpaksa kita angkat. Masyarakat di Kota Langsa kita lihat megah, cerah, tapi sebetulnya isinya enggak. Pembinaan perlu dana, prasarana, perlu jaminan keamanan agar bisa menjangkau sampai ke desa-desa karena mereka tidak begitu mengerti tentang Indonesia, bagi mereka yang penting nyaman agar tidak diganggu oleh GAM, maka apapun namanya kita ikuti saja, sementara pembinaan ini belum terjadi”. (Informan L, Langsa, 1 November 2008)

---

<sup>76</sup> Tidak banyak orang Aceh yang mau bekerja keras, dan menuntut ilmu pengetahuan. Karena ada anggapan sejak zaman Hindia Belanda, masyarakat enggan bahkan dilarang belajar di sekolah-sekolah, karena ditakutkan akan menjadi kafir. Hal ini menjadi salah satu indikator yang membuat masyarakat Aceh kalau kita datang ke desa-desa, ada yang tidak mengerti tulis bacaan bahasa Indonesia, tapi mereka pandai menulis dan membaca bahasa Arab.

Disisi lain prediksi tentang jumlah penduduk miskin di Aceh (2005), sebanyak 1.101.368 orang, atau sekitar 26,5% jumlah penduduk. Jumlah balita yang kekurangan gizi 10,46% dan ini lebih tinggi dari angka rata-rata nasional, yang pada tahun yang sama hanya 8%. Tingkat pengangguran terbuka telah mencapai 17,23% dari angkatan kerja (RPJM-NAD 2005).

Kemiskinan<sup>77</sup> adalah permasalahan yang terkait dengan hak-hak dasar warga masyarakat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi seperti terbatasnya produksi bahan-bahan makanan, dan hampir semua didatangkan dari luar daerah. Sehingga harganya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat yang berpendapatan rendah. Terbatasnya akses kelompok berpendapatan rendah ke pelayanan kesehatan dan pendidikan serta sempitnya peluang pekerjaan dan peluang usaha. Hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan dampaknya juga rentan konflik.

Pasca konflik, masalah utama di Langsa dan daerah Provinsi Aceh saat ini adalah kemiskinan yang diderita hampir separuh penduduk. Tentu kondisi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan ke depan daerah dan masyarakatnya. Tidak saja berpengaruh terhadap pemulihan kondisi kehidupan masyarakat tapi juga akan berpengaruh terhadap proses perdamaian ke depan. Informan K, wawancara tanggal 28 Oktober 2008, di Langsa, mengatakan :

“..... Inilah masyarakat Aceh, ada sebuah karakter di Aceh ini yang sulit, dia lebih menikmati dengan teror, makanya ongkos damai lebih mahal daripada ongkos konflik, costnya lebih tinggi, karena tidak berani lapor terhadap situasi, sudah jelas melanggar hukum, sudah jelas membawa senjata di depan mata, dia akan bilang “HANA TEPU” (enggak tahu), karena apa, terancam, itu masyarakat pers pun terancam, ketika dia memberitakan hal-hal yang negatif dia langsung ditelepon, diancam, lari dikejar, bahkan diculik, hal itu terjadi di Aceh.”

Menurut data Bank Dunia tahun 2006, kemiskinan di Aceh sebagian besar adalah fenomena pedesaan, dengan lebih dari 30% rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan. Informan L, wawancara tanggal 1 November 2008 di Langsa, menyampaikan :

<sup>77</sup> Ahmad Arif (2004), kantong kemiskinan di Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, jumlah angka kemiskinan itu tampaknya semakin tinggi karena penari kerja yang melapor sebanyak 96.530 orang. Namun yang tertampung hanya 1.414 orang atau 1,46 persen, angka riil pengangguran diperkirakan 10 kali lebih banyak. (Kompas, 13 Desember 2004)



“Masih banyak masyarakat yang tidak makan, sedangkan di desa sudah tidak ada yang digarap, petani menjerit, biasa sawit harga Rp. 3.000 sekarang jadi Rp. 300, sehingga banyak sawit yang tidak dipanen. Karena untuk ongkos metiknya saja tidak bisa tertutupi. Tapi kalau pegawai tidak terasa, karena kerja berat atau ringan tetap saja dapat gaji. Tingkat Ketua PSSI saja gak ada beras, kemarin saya kasih Rp. 30.000 untuk beli beras, mereka itu diajak kekiri, kekanan ikut saja, yang penting keluarganya bisa makan daripada nganggur, kalau konflik lagi masuk GAM saja, ngerampok pun jadi, daripada stress gini, memang gila yang belum kalau di tingkat Alur II, Langsa, 60% nganggur, berjualan juga sudah susah.”

Terkait masalah pengangguran, dan GAM seorang informan I, dari hasil wawancara tanggal 15 April 2008, menyampaikan :

“Sebenarnya Aceh terbagi menjadi tiga bagian, Pesisir Utara sampai Timur adalah orang-orang Aceh yang berasal dari luar, mereka yang banyak mendukung GAM, kecuali Langsa dan Tamiang ada dari suku Jawa. Kemudian bagian tengah banyak suku Gayo dan bagian barat selatan campuran dari Batak, Jawa, Padang dan lain-lain. Sebelum reformasi daerah tersebut bukan wilayah konflik. Tapi setelah reformasi, GAM mulai mengembangkan sayapnya dengan merekrut pemuda-pemuda pengangguran, dan sebelum MoU Helsinki sudah ada upaya pemekaran ALA-ABAS.”

Sementara kondisi kemiskinan di seluruh Provinsi Aceh yang dibuat oleh Kantor BPS pada tahun 2006.

**Tabel 7**  
**Prosentase Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin
1	Banda Aceh	223,829	38,987	17,42
2	Aceh Besar	295,957	116,338	39,31
3	Pidie	517,697	267,168	51,61
4	Biren	361,528	150,834	41,72
5	Aceh Utara	523,717	275,923	52,69
6	Kota Lhokseumawe	167,362	25,615	15,31
7	Aceh Timur	331,636	189,168	57,04
8	Kota Langsa	122,865	23,151	18,84
9	Aceh Tamiang	225,011	84,778	37,68
10	Bener Meriah	136,226	40,872	30,00
11	Aceh Tengah	36,227	39,996	29,36
12	Kota Sabang	24,498	13,312	54,34

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin
13	Aceh Jaya	98,796	35,656	36,09
14	Aceh Barat	195,000	57,423	29,45
15	Nagan Raya	143,985	52,476	36,45
16	Aceh Barat Daya	115,358	42,798	37,10
17	Aceh Selatan	197,719	71,567	36,20
18	Aceh Singkil	124,758	73,844	59,19
19	Aceh Tenggara	150,776	73,896	49,01
20	Gayo Lues	66,448	26,927	40,52
21	Simeuleu	59,097	16,947	28,68
Jumlah		4,218,490	1,717,676	40,72

Sumber : Kantor BPS Aceh Tahun 2006

Masalah kemiskinan penduduk dan banyaknya pengangguran, akibat konflik yang berkepanjangan dapat memicu tindakan kriminal karena frustrasi dalam menghadapi perkembangan situasi. Apalagi tingkat pengangguran di Langsa (Aceh) menjadi salah satu persoalan tersendiri, karena yang menganggur sebagian besar adalah mantan kombatan yang pernah memegang senjata.

#### **B. Perkembangan Konflik Langsa Pasca MoU Helsinki**

Paska MoU Helsinki di Kota Langsa, menjadi menarik untuk dijadikan fokus penelitian karena di daerah tersebut kecenderungan kekuatan relatif sama dan pertentangan diantara kelompok GAM (KPA) dengan kelompok Non GAM (PETA). Dibutuhkan perhatian lebih spesifik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Aceh.



**Unjuk Rasa Front PETA Minta Pembubaran GAM**

**Tabel 8**  
**Nama Partai, DPRK Langsa**

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Partai Aceh	6
2	Partai Sira	1
3	Partai Demokrat	6
4	Partai Golkar	3
5	Partai Hanura	2
6	PAN	2
7	PKS	2
8	PDIP	1
9	PBR	1
10	PKNU	1
11	PPP	1
12	Partai Gerindra	1

Sumber : KPU Kota Langsa Tahun 2009

**TABEL 10**  
**DAFTAR NAMA-NAMA KORBAN KONFLIK PENERIMA BANTUAN RUMAH DIBAKAR / DIRUSAK TOTAL**  
**KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	
				DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
I	Kec. Langsa Lama				
1	Hasan	Langsa, 1930	Pensiunan TNI	Baroh	Langsa Lama
2	Almun Tadar	Langsa, 05-05-1962	Wiraswasta	Baroh	Langsa Lama
3	Idris A.	Langsa, 19-08-1958	Petani/Perkebunan	Baroh	Langsa Lama
II	Kec. Langsa Timur				
4	Amirullah	Langsa, 26-03-1968	Petani/Perkebunan	Bukit Meudang Ara	Langsa Timur
5	Usman Sulaiman	Langsa, 01-07-1957	Nelayan	Sungai Lueng	Langsa Timur
6	Arsyad	B. Meutuah, 18-01-1942	Petani/Perkebunan	Buket Meutuah	Langsa Timur
7	Habibah	B. Meutuah, 10-11-1968	Ibu Rumah Tangga	Buket Meutuah	Langsa Timur
8	Saudah	Matang Panyang, 1953	Petani/Perkebunan	Matang Panyang	Langsa Timur
III	Kec. Langsa Baro				
9	M. Thaib NS	Langsa, 09-01-1953	Petani/Perkebunan	Geudubang Aceh	Langsa Baro
IV	Kec. Langsa Barat				
10	Nurhayati	Simpang Lhee, 1962	Tukang Cuci	Simpang Lhee	Langsa Barat
11	Razali Hasan	Langsa, 24-12-1969	Wiraswasta	Gp. Jawa	Langsa Kota
V	Kec. Langsa Kota				
12	Fatimah	Raja Tua, 03-07-1974	Ibu Rumah Tangga	Alue Beurawe	Langsa Kota

Sumber : Sekretariat BRA Kota Langsa Tahun 2008

**TABEL 9**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KATEGORI cacat & SAKIT KORBAN KONFLIK**  
**BADAN REINTEGRASI-DAMAI ACEH (BRA) KOTA LANGSA TAHUN 2008**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT		KATEGORI	PEKERJAAN
				KECAMATAN	DESA/GAMPONG		
1	Ir. Bukhari	Laki-laki	B. Aceh, 01-01-1963	Langsa Kota	Paya Bujok Blang Pase	Cacat	Pensiunan PLN
2	Upik Mutia	Perempuan	Langsa, 04-04-1950		Gampong Teungoh	Cacat	Jualan
3	Teguh Ismanjaya	Laki-laki	Langsa, 29-09-1955		Gampong Jawa	Cacat	Wiraswasta
4	Husaini	Laki-laki	Langsa, 31-12-1968		Blang Seumbong	Cacat	Wiraswasta
5	Zabniar	Perempuan	Langsa, 18-05-1988		Alue Beurawe	Cacat	Eks. Pelajar
6	Nasrul Nurdin	Laki-laki	Langsa, 01-07-1978		Alue Beurawe	Cacat	Nelayan
7	Kamariah	Perempuan	Langsa, 01-07-1945		Alue Beurawe	Cacat	Ibu Rumah Tangga
8	Muhamad W. A.	Laki-laki	Sigli, 17-08-1974		Tualang Teungoh	Sakit	Wiraswasta
9	Rusli	Laki-laki	Langsa, 19-07-1968	Langsa Timor	Gp. Alue Pineng	Cacat	Temak
10	Ibnu Hasan	Laki-laki	Jangka, 01-07-1930		Sukarejo	Cacat	Tani
11	M. Yakop Hasan	Laki-laki	Langsa, 11-12-1964		Sukarejo	Cacat	Nelayan
12	Usman Majid, SE	Laki-laki	Samalanga, 01-01-1965		Matang Panyang	Sakit	Wiraswasta
13	Idris Jamin	Laki-laki	Langsa, 01-07-1986		Sungai Lueng	Sakit	Buruh Bangunan
14	Rusli	Laki-laki	Langsa, 01-07-1943	Langsa Lama	Gp. Baro	Cacat	Temak Unggas
15	Amril Mukminin Amzah	Laki-laki	Langsa, 10-01-1954		Gp. Meurandeh	Cacat	Jualan Monja
16	Abu Bakar Umar	Laki-laki	Sigli, 01-07-1954		Baroh Langsa Lama	Sakit	Sakit
17	Alamsyah M. Nur	Laki-laki	Bayu Lancok, 09-08-1967	Langsa Barat	Telaga Tujuh	Cacat	-
18	M. Basyah Daud	Laki-laki	Aceh Utara, 01-07-1958		Kuala Langsa	Cacat	Nelayan
19	Tabrani	Laki-laki	Langsa, 09-07-1968		Matang Seulimeng	Cacat	PNS
20	Faisal	Laki-laki	Idi, 25-02-1974	Langsa Baro	Birem Puntong	Cacat	Wiraswasta

Sumber : Sekretariat BRA Kola Langsa Th. 2008

Aktor konflik di Aceh menjadi bertambah, muncul kelompok-kelompok baru yang ingin diakui eksistensinya, mereka dalam posisi saling berseberangan, rentan terhadap konflik, bahkan sudah terjadi konflik kekerasan, meski intensitasnya menurun.



#### **Pelantikan Pengurus Baru Front PETA Aceh Timur Di Langsa**

Menurut penuturan salah seorang informan adalah sebagai berikut:

“Kalau kita lihat, konflik-konflik terjadi, karena masalah ekonomi, kalau orang sudah senang sudah malas, GAM yang banyak duit dan tidak dapat duit, di partai tentang nomor urut Caleg, kemudian dari enam Parlok, Partai Aceh lah yang paling dominan, mereka berjanji jika menang akan melakukan pembangunan besar-besaran dibantu 30 negara tanpa melalui poros Jakarta. Sehingga ada ketergantungan diantara mereka. Sehingga jadi konflik, kalau PETA di Langsa saya lihat banyak kelompok-kelompoknya, seperti ada Front Matari, Front Laskar Rakyat, Front Anak Bangsa, Front Hubul Watani, Front Merah Putih, Front FPMP, seharusnya disatukan supaya ada kesepakatan dan koordinasi, jangan saling mengklaim, ini yang syah. Kalau PETA dan KPA secara idiologi kita tetap bertentangan. (Informan L, Langsa, 1 November 2008)

Ada sejumlah persoalan terkait dengan pelaksanaan kesepakatan damai Helsinki sebagai berikut :

“(1) Usaha demobilisasi dan pelucutan senjata GAM dan penarikan Pasukan Non Organik TNI dari Aceh diartikan berbeda oleh GAM dan Pemerintah. Sesuai MoU Helsinki, GAM harus meninggalkan sayap militernya. Selain itu, Pasukan Non Organik TNI dan POLRI harus ditarik dari Aceh.

(2) Reintegrasi mantan anggota GAM baik dari aspek politik, ekonomi, dan sosial merupakan tugas sulit. Beberapa faktor dalam masalah ini adalah masalah pendanaan, kompensasi yang tidak transparan, kecemburuan dari korban konflik Aceh terhadap GAM

oleh masyarakat Aceh, dan keengganan GAM untuk memberikan daftar anggotanya pada pemerintah yang didasari pada ketakutan GAM akan kegagalan MoU yang berbuntut pada mudahnya TNI/POLRI untuk mengetahui kekuatan dan lokasi GAM di Aceh.

(3) Meskipun pemerintah mendirikan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang terdiri atas Pemerintah, LSM, Intelektual dan Anggota GAM, lembaga ini tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya dana, kewenangan yang terbatas, ketidakjelasan tugas kerja dan program.

(4) Percepatan Reintegrasi GAM juga bergantung pada penerimaan masyarakat Aceh. Oleh karenanya di beberapa daerah di Aceh dilakukan upacara "Peusejuek" (penyejuk atau berdamai) oleh pemerintah dan masyarakat.

(5) Penerimaan MoU dan Reintegrasi GAM tidak menyentuh aspek integritas sikap dan psikologi secara utuh terhadap NKRI. Anggota GAM berpendapat jika proses perdamaian gagal, mereka akan memilih untuk kembali ke hutan dan hutan lagi". (Waspada Online, [www.waspada](http://www.waspada), 31 Agustus 2005)

Kenyataan dilapangan mengenai implementasi kesepakatan selalu banyak menemui kendala dan kegagalan. Kegagalan implementasi biasanya terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Disamping kegagalan implementasi berkaitan erat dengan karakteristik perang, ketika perasaan takut lebih besar daripada kepercayaan terhadap musuh, perang dapat berlanjut. Sebagaimana yang disampaikan seorang informan, "selama ini mereka pengganggu sekarang ini diambil pengganggu dikasihkan ke kita. Jadi sekarang posisinya terbalik, orang-orang yang nasionalitas dianggap pengganggu sedangkan orang-orang yang mantan pemberontak dipercayai. Ini yang terjadi sehingga ada penikaman dari belakang, yang tahu ini kita dan pusat tidak pernah tahu atau tidak mau tahu". (Informan M)

Menurut peneliti, bisa jadi kesepakatan perdamaian ditanda tangani dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Pertama*, desakan dan sorotan internasional terhadap Aceh, terkait dampak tsunami yang merenggut sekitar 130.000 nyawa Rakyat Aceh (jauh melampaui korban perang Aceh) untuk memudahkan bantuan terhadap rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. *Kedua*, demoralisasi di kalangan anggota GAM, mengetuk nurani mereka untuk berdamai. *Ketiga*, munculnya gerakan perlawanan rakyat terhadap GAM, terjadi hampir diseluruh kota dan kabupaten, tergabung dalam Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG/PETA). Justru dari rakyat sendiri (Non GAM) yang memahami medan dan kondisi GAM, khususnya keberadaan

Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), sehingga mereka tidak berani pulang menengok keluarganya yang tinggalnya masih membaur didaerah pemukiman penduduk, dan mungkin menjadi korban gelombang tsunami. *Keempat*, para mantan anggota AGAM yang sudah bergabung atau menyerah untuk bergabung dengan NKRI, membentuk FORKAB (Forum Komunikasi Anak Bangsa). *Kelima*, tidak semua Rakyat Aceh bersimpati dan mendukung perjuangan GAM, terlebih adanya berbagai tindakan kekerasan di Aceh membuat dan menebarkan rasa takut pada masyarakat.<sup>78</sup>

Dalam rentang waktu 2006, sampai dengan saat ini di Aceh masih ditandai dengan tingginya angka kriminalitas dengan menggunakan senjata api seperti perampokan, pengeroyokan dan pembunuhan serta main hakim sendiri. Masih kuatnya kultur konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat seperti aksi teror, intimidasi dan provokasi serta pungutan liar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Selain permasalahan kriminalitas dan kultur konflik yang masih kuat juga ada permasalahan reintegrasi yang belum dapat diselesaikan khususnya dalam penanganan hak-hak korban konflik. Berbagai permasalahan tersebut telah menimbulkan “perasaan takut” yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Menurut Wahyudi, untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang mengarah pada tindak kekerasan, maka semua pihak sebaiknya menyamakan persepsi tentang konflik Aceh. Sehingga lebih efektif apabila segala bentuk perundingan yang dilaksanakan dapat melibatkan semua unsur yang terkait dalam konflik Aceh, khususnya GAM yang berada di Aceh, Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG), yang belakangan sering kita dengar eksistensinya, tokoh masyarakat formal maupun informal termasuk para ulama. Sehingga komitmen dan kesepakatan yang telah dicapai dalam perundingan langsung dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pihak, tidak hanya oleh Pemerintah dan GAM. (B. Wahyudi, Jurnal Paskal : Vol.4 No. 17, Agustus 2005)

<sup>79</sup> Dikutip dari “*Keynote Speech*” Pangdam Iskandar Muda, disampaikan pada lokakarya menyongsong Aceh damai di masa depan. Pada tanggal 27 Mei 2008 di PT. Arum LNG Kompleks, Lhokseumawe, Provinsi Aceh.





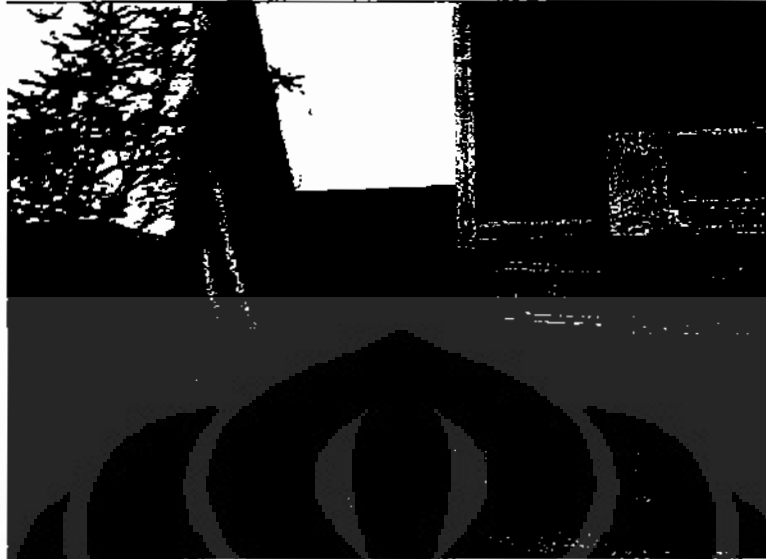
**Foto Di Kampung Jawa, Kota Langsa**

Tentang perkembangan konflik di Langsa, seorang informan menyampaikan :

“Bagaimanapun korban konflik Langsa meninggalkan luka dan kenangan yang pahit, mereka yang dipaksa atau terpaksa menjadi pengungsi sangat terpukul dan mengalami trauma mendalam, mungkin trauma tersebut akan terobati, selain dengan saling memaafkan juga para pengungsi tersebut, yang sebagian besar orang kita jawa diperbolehkan kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dengan suasana damai. Karena ditempat itulah kelahiran dan tempat mereka dibesarkan, sekaligus tempat mencari nafkah dengan berdagang dan bertani. Tapi banyak saudara kita jawa yang mengungsi dan tidak berani kembali kerumahnya karena keadaan tidak aman”. (Informan L, Langsa, 1 November 2008)

Salah satu faktor pendukung ditanda tangannya MoU Helsinki adalah adanya pendekatan “jual-beli”. Aceh mendapat otonomi plus, pemberlakuan syariat Islam, self government dan parlok. Sementara Pemerintah RI menjaga agar Aceh tetap dalam wilayah NKRI. Dinamika selanjutnya di Langsa yang komposisi penduduknya sangat heterogen, beberapa hal di atas justru berpotensi menjadi bahan bakar untuk konflik berikutnya. Syariat Islam sebagai contoh, bisa digunakan penguasa untuk memaksa lawan politiknya dengan atas nama agama, bagi yang tidak sepaham bisa dianggap bukan bagian dari “Aceh Baru”, dan lebih jauh dikatakan sebagai anti MoU atau anti perdamaian, dimana hal ini banyak

ditujukan pada masyarakat Aceh Non GAM yang tergabung dalam kelompok PETA.



**Bendera Dan Kantor Partai Aceh Di Langsa**

Fenomena konflik pasca MoU Helsinki, masih belum menunjukkan akan segera tuntas, artinya konflik masih dapat dilihat atau mungkin dirasakan oleh masyarakat Aceh. Seorang ulama di Langsa (Informan E, 26 Oktober 2008), mengatakan bahwa konflik masih ada, tapi dalam bentuk lain. Ada pergeseran konflik dari bersifat vertikal antara GAM atau KPA dengan Pemerintah Pusat, beralih kepada konflik horizontal yang menurut pengamatan saya konflik horizontal itu terbagi menjadi dua item sebagai berikut :

“ *Pertama*, konflik internal KPA antara kombatan dengan non kombatan atau inti motifnya ekonomi dan fasilitas antara tentara GAM dengan sipil GAM. Kemudian konflik kombatan yang turun pra helsinki dengan kombatan yang turun pasca helsinki ini motifnya sosial ekonomi juga khususnya berkaitan dengan prestise dan keterlantaran GAM pra helsinki. Kemudian konflik antara petinggi KPA dengan para Inang Bale ini juga motifnya sosial ekonomi dimana mereka tidak diperhatikan, mereka mau diposisikan dengan para kombatan atau non kombatan/sipil, mereka tidak punya skill atau keahlian tertentu. Sehingga akhirnya mereka tergeser baik oleh kombatan maupun kombatan sipil lain dari kalangan GAM, sehingga nasib mereka diterlantarkan oleh petinggi KPA. *Kedua*, konflik yang bersifat eksternal ini khususnya antara PETA, FORKAB dengan KPA motifnya adalah HANKAM IDO (Pertahanan Keamanan dan Ideologi). Kemudian konflik dari kalangan keagamaan, ini berkaitan dengan trust (kepercayaan), kekuasaan politik masyarakat antara Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Majelis Ulama NA atau MUNA yang didirikan oleh partai politik PA. Kemudian konflik antara MADA (Majelis Anak Dayak Aceh) dengan IASA yaitu Ikatan Anak Santri Aceh ini juga sama berkaitan dengan trust (kepercayaan) politik di Aceh kekuasaan dan keagamaan, kemudian konflik antara LAKA (Lembaga Adat Kebudayaan Aceh) dengan KPA, berkaitan dengan persoalan kekuasaan adat Wali Nanggroe, dimana LAKA itu menginginkan Wali Nanggroe itu dipilih karena tokoh Aceh itu bukan hanya Hasan Tiro, tetapi itu dari pihak KPA menginginkan agar Wali Nanggroe itu adalah Hasan Tiro yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan sistem keturunan anak beliau atau orang yang diwasiatkan oleh beliau untuk meneruskan jabatan kewalian negara. Kemudian konflik antara birokrat nasionalis dengan birokrat etnis – etno nasionalis yang berada pada kekuasaan pemerintahan yang ada sekarang khususnya berkaitan dengan karir struktur yang ada di pemerintahan, jadi birokrat yang nasionalis ini jadi cenderung tergeser disemua lini di wilayah-wilayah Aceh yang sekarang dikuasai oleh birokrat etno nasionalis. Seperti misalnya di Aceh Timur, bupatinya dari pihak KPA birokratnya juga yang memegang posisi strategis semuanya dari KPA yang pengertiannya tinggi-tinggi yang sudah mengikuti jenjang pendidikan struktural yang sudah diatur pemerintah RI itu justru dibangukan panjangkan sehingga banyak kemudian mereka pindah ke Kota Langsa, karena di Aceh Timur itu tidak lagi dipakai, kemudian konflik berkaitan dengan wilayah yaitu utara, timur dengan ALA ABAS ini berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan keadilan pembangunan. Kemudian konflik etno nasionalis yang cenderung kultur dengan kawan agamis yang cenderung menginginkan syariat islam, ini motifnya sosial keagamaan.



**Kantor Partai Aceh Yang Dibakar Massa Tak Dikenal  
Di Perbatasan Kota Langsa**

Dinamika konflik Aceh Paska MoU Helsinki, masih hangat dibicarakan dan menjadi perdebatan, seminar dan diskusi dengan tema “Konflik dan Perdamaian di Aceh” sering dilaksanakan yang difasilitasi oleh elit politik, eksekutif, akademisi maupun pihak-pihak yang punya atensi terhadap perdamaian di Aceh.



**Para Panelis Lokakarya Menyongsong Aceh Damai Di Masa Depan  
(Lhokseumawe Aceh, 27 Mei 2008)**

Tindakan kekerasan, saling serang dan jatuhnya korban tewas dan luka masih mewarnai Aceh, memang yang dirasakan sulit di Langsa (Aceh) adalah menjaga dan mengimplimentasikan proses perdamaian. Dengan kata lain, sekarang masih dalam proses penciptaan perdamaian (*peace meaking*). Perkembangan di Langsa (Aceh) paska MoU Helsinki, masih rentan terhadap konflik dan berpotensi munculnya konflik baru, meski hal tersebut lebih banyak terjadi diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat baik yang tergabung dalam organisasi masyarakat maupun organisasi politik, khususnya Aceh GAM dengan Aceh RI. Masih ada senjata yang beredar, baik laras panjang maupun pendek, dan masih sering terjadi benturan antara dua kelompok tersebut, seperti masalah pro dan kontra terhadap Pemerintah Pusat, GAM/KPA menolak pemekaran, PETA mendukung pemekaran ALA dan ABAS, KPA mendukung Parlok sedangkan PETA mendukung Parnas.

**TABEL II**  
**PERBANDINGAN KEKUATAN/DUKUNGAN**  
**TERHADAP KPA (PARLOK) DENGAN PETA (PARNAS)**  
**DI LANGSA**

No	Kec. Langsa Barat		Kec. Langsa Baru		Kec. Langsa Kota		Kec. Langsa Lama		Kec. Langsa Timur	
	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1	Pb. Bromo	KPA	Timbang Langsa	PETA	Alue Beurawe	KPA	Pondok Keumuning	PETA	Matang Cengai	KPA
2	Lhokbani	KPA	Pondok Kelapa	PETA	Tualang Barou	KPA	Sido Dadi	PETA	Simpang Wie	KPA
3	Kuala Langsa	KPA	Pb. Tunong	PETA	GPG Balang	KPA	Pondok Pabrik	PETA	Matang Panjang	KPA
4	SPG Lee	KPA	Kedubang Aceh	PETA	GPG Jawa	PETA	Meurandeh	PETA	Sungai Lueng	KPA
5	Sungai Pauh	KPA	Alue Dua	PETA	GPG Tengoh	sama	Seulalah	PETA	Matang Setui	KPA
6	Telaga Tujuh	KPA	Karang Anyar	PETA	GPG Meutia	sama	Sido Rejo	PETA	Alur Merbau	PETA
7	Seuriget	KPA	Kedubang Jawa	PETA	Pekan Langsa	sama	Baroh Langsa Lama	PETA	Bukti Rata	PETA
8	Matang	Sama	Pb. Seulemek	PETA	GPG Daulat	sama	Asam Petik	PETA	Suko Rejo	PETA
9	Seumeng	Sama			Pb. Blang Pase	sama	GPG Baru	sama	Bukit Meutuah	sama
10	Pb. Tengah	Sama			Blang Senibung	sama			Alue Pinang	sama
11									Sukit Pulo	sama
12									Senebuk Antara	sama
13									Sinta Raja	sama
14									Bukit Medang Ara	sama

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

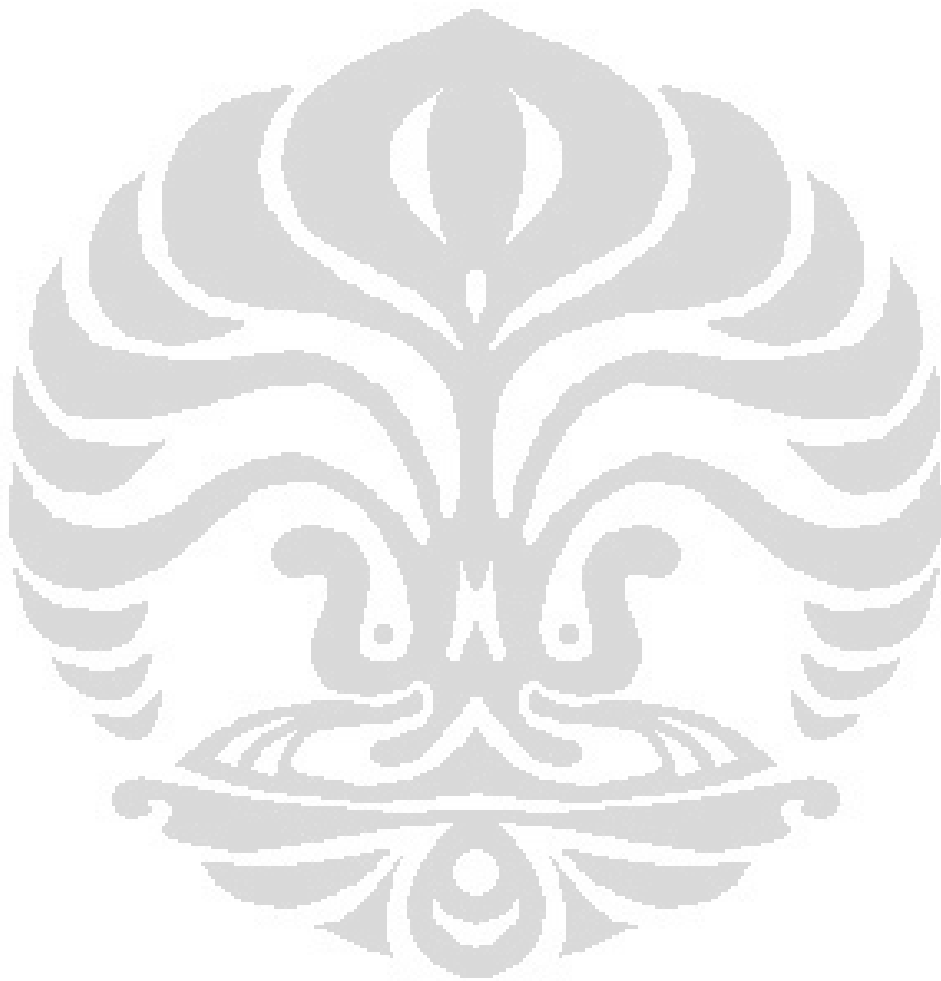
**TABEL 13**  
**SUARA PEMILIHAN LANGSUNG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA**

No	Nama Pasangan Calon Walikota	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota			Jumlah Akhir	Persentase (%)
		Langsa Barat	Langsa Timur	Langsa Kota		
1	Drs. Zulkifli Zainon, MM Drs. Saifuddin Razali	7.395	7.128	9.040	23.563	40,95%
2	Drs. Ridwan Hanafiah, SH, MA Drs. H. Anwar Hasan	699	569	736	2.004	3,54%
3	Alibasyah Tanjung Tgk. Syech Muhajir Usman, S.Ag	1.766	1.556	2.600	5.922	10,45%
4	H.M Jamil Hasan, SE Rahmadi Yahya, SE	988	1.262	1.248	3.498	6,23%
5	Drs. Syahrir Aka, M.Si Dr. H. Syahriruddin, MM	2.557	2.026	1.764	6.347	11,11%
6	Drs. Abdullah Gade Tgk. Zainal Abidin	3.838	4.227	1.639	9.704	27,72%
	Jumlah Suara Sah	17.243	16.768	23.027	57.038	64,64%
	Jumlah Suara Tidak Sah	933	1.207	901	3.041	0,34%
	Jumlah Pemilih Yg Tidak Menggunakan Hak Pilih	10.991	7.392	9.774	28.157	31,91%
	Yang Menggunakan Hak Pilih	18.176	17.975	22.928	60.079	68,08%

Sumber : KPU Kota Langsa Tahun 2007

**TABEL 12**  
**REKAPITULASI HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009**

NO	DPRK	PARLOK	PARNAS	JML	DPRD	PARLOK	PARNAS	JML
1.	Kota Banda Aceh	10	20	30	Banda Aceh	34	35	69
2.	Aceh Besar	14	21	35				
3.	Kota Langsa	7	18	25				
4.	Kota Lhokseumawe	15	10	25				
5.	Aceh Utara	33	12	45				
6.	Bireuen	26	9	35				
7.	Kabupaten Pidie Jaya	16	8	24				
8.	Kota Sabang	6	14	20				
9.	Aceh Timur	28	7	35				
10.	Pidie	36	9	45				
11.	Subulussalam	-	20	20				
12.	Aceh Tenggara	1	24	25				
13.	Aceh Tengah	3	27	30				
14.	Bener Meriah	4	21	25				
15.	Aceh Singkil	-	25	25				
16.	Aceh Tamiang	9	21	30				
17.	Gayo Lues	1	19	20				
18.	Aceh Barat	10	20	30				
19.	Aceh Jaya	15	5	20				
20.	Nagan Raya	4	21	25				
21.	Simeulue	2	18	20				
22.	Aceh Barat Daya	9	16	25				
23.	Aceh Selatan	11	19	30				
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>384</b>	<b>644</b>		<b>34</b>	<b>35</b>	<b>69</b>





## **BAB IV DINAMIKA KONFLIK**

### **A. Konflik Berlanjut Di Langsa**

Perkembangan di Langsa pasca MoU Helsinki masih rentan terhadap konflik dan berpotensi adanya konflik laten, yang sewaktu-waktu dapat meledak, jika ada pemicunya. Penanganan konflik di Langsa memang apinya sudah dipadamkan, tetapi baranya masih menyala. Meski hal tersebut lebih banyak terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat yang pro GAM dengan masyarakat yang Anti GAM (KPA dengan PETA dan FORKAB).

Rasa aman dan nyaman sebagai landasan membangun saling percaya antara GAM (KPA) dengan masyarakat Aceh Non GAM (PETA), yang aspirasinya belum terakomodir dalam MoU Helsinki, nampaknya belum sepenuhnya pulih. Pada dasarnya, disebabkan oleh kuatnya prasangka bahwa kelompok yang satu akan mengkhianati kelompok yang lain. Disamping masih kuatnya dominasi dan intervensi kelompok pada perkembangan pembangunan. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada proses perdamaian dan melatar belakangi mengapa konflik masih berlanjut.

Ada beberapa hal yang menurut peneliti, dapat dikatakan sebagai indikator yang melanggengkan konflik dan menghambat proses perdamaian positif.

#### **A.1. Sentimen Etnis Dan Kedalaman Konflik**

Konflik berkepanjangan di Aceh khususnya di Langsa, salah satunya adalah bersandar pada masalah perbedaan etnis dan sentimen satu etnis terhadap etnis lainnya. Dengan demikian dapat menimbulkan kecurigaan etnis dan dapat memicu munculnya konflik diantara dua belah pihak. Sebagaimana di Langsa, mayoritas penduduknya adalah etnis Aceh dan etnis Jawa, meskipun ada etnis lain, seperti : Melayu, Gayo, Batak, Padang dan Cina.

Perbedaan-perbedaan yang ada dalam kelompok maupun antar kelompok itu merupakan hasil dinamika sosial yang berlangsung secara alamiah selama dan pasca konflik. Misalnya terbentuk proses emosionalitas dan rasionalitas, baik yang tumbuh di dalam kelompoknya masing-masing, maupun saat mereka harus

hidup berdampingan dengan berbagai kelompok lain yang ada di sekelilingnya. Semua proses tersebut membentuk perbedaan-perbedaan antar kelompok, yang terus terjadi hingga terbentuknya perbedaan dan pertentangan kelompok (etnis) itu sendiri. Di Langsa (Aceh), perbedaan-perbedaan tersebut yang diwarnai dengan sejarah konflik yang berkepanjangan, akhirnya terakumulasi dan terekspresikan menjadi sentimen etnis, dan dalam perkembangannya justru berpengaruh terhadap kedalaman konflik itu sendiri.

Sentimen etnis<sup>80</sup> (pembedaan etnis) cenderung lebih kuat di Langsa, terutama antara sebagian suku Aceh terhadap keturunan Jawa, dan secara signifikan berkontribusi terhadap munculnya kelompok-kelompok Aceh RI. Hal tersebut berpengaruh pada kedalaman konflik. Bersumber dari sejarah dan hubungan sosial yang timpang selama ini menjadi hambatan komunikasi antara kedua kelompok etnik tersebut. Disamping adanya keputusan politik yang dianggap menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, juga berdampak pada konflik etnik yang berkepanjangan.<sup>81</sup>

Di lain pihak, ketidakpuasan dalam ranah kultural, dapat meningkatkan solidaritas politik, primordialisme, etnonasionalisme, dan gerakan separatisme, pada setiap etnis tertentu. Disamping adanya kekecewaan akibat represi negara, dan eksploitasi pusat atas kekayaan daerah, maka semangat nasionalisme etnik di kalangan kelompok tertindas makin tumbuh kuat. Salah satu ikatan kuat yang

<sup>80</sup> Sentimen etnis (etnisitas), mempertegas untuk tujuan memlibera dan memperkuat batasan-batasan etnis untuk semakin membedakan "kami" melawan "mereka". Disini etnisitas dijadikan kendaraan untuk menegakkan kohesi sosial dan solidaritas dari masing-masing etnis. Selanjutnya dikatakan, ketika etnis pendatang baru terus berdatangan dan bertempat tinggal di wilayah-wilayah komunal, jumlah populasi komunitas tersebut akan jauh melampaui sumber daya lingkungan yang tersedia. Struktur hubungan antar etnis antara para pendatang dan anggota masyarakat lokal pun berubah seiring dengan para pendatang mulai memasuki sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya merupakan lahan eksklusif bagi masyarakat lokal atau mereka menciptakan aktivitas ekonomi yang berbeda dengan masyarakat lokal. Masyarakat etnis lokal jadi menderita, karena hilangnya hak-hak istimewa di bidang ekonomi dan politik. Akhirnya hubungan simbolik antara kedua kelompok etnis tersebut berubah menjadi perebutan sumber daya, termasuk kedudukan dan kekuasaan. (Abubakar, 2006 : 87)

<sup>81</sup> Menurut Magenda, dinamika tersebut disebabkan adanya beberapa hal seperti, *Pertama*, berhubungan dengan penempatan orang-orang Jawa dalam jabatan tertentu. *Kedua*, isu jwanisasi pada tingkat massa, khususnya program transmigrasi. *Ketiga*, kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa". (Magenda, 1990 : 12)

menumbuhkan semangat nasionalisme etnik di Aceh, misalnya adalah memori pengalaman ketertindasan dan kekerasan yang menimbulkan dendam.<sup>82</sup>

GAM memberikan stereotipe pemerintah sebagai neokolonialisme Belanda dengan, misalnya sebutan “pemerintah penjajah Jawa”, atau *Javanese colonial government*.<sup>83</sup> Kolonialisme pemerintah pusat telah menjajah secara kultural (hegemoni nilai kultur Jawa sebagai akibat dari program transmigrasi), secara ekonomi (eksploitasi ekonomi untuk kepentingan orang “Jawa”), dan secara politik adanya dominasi Jawa dalam birokrasi dan militer (Asnawi; 2002 :32). Senada dengan hal tersebut, seorang informan di Langsa mengatakan :

“Kalau Aceh ini akan membangun dengan baik, bukan membangun desa, membangun transmigran, kalau etno nasionalisme Aceh berjalan terus, itu akan dihabisi transmigrasi yang dari Jawa. Yang jelas sampai sekarang mereka sangat benci terhadap orang Jawa, yang marga O, akan jadi musuh dan diusir dari Aceh, karena itu karakteristik orang Aceh”. (Informan K, Langsa, 28 Oktober 2008)

Bangkitnya nasionalisme etnik tidak saja sebagai proses dekolonialisme, tapi juga berangkat dari imajinasi-imajinasi kolektif di kalangan etnik tentang identitas, dan sejarah masa silam, yang bisa menyatukan semangat kebersamaan. Imajinasi-Imajinasi itu menemukan justifikasi historisnya, misalnya, ketika orang-orang Aceh pernah berada pada masa keemasan (*the golden age*) di bawah kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda.<sup>84</sup>

Semakin kuat konflik etnis diantara dua kelompok yang bertikai, dapat dibaca etnis Aceh dan etnis keturunan Jawa yang ada di Langsa (Aceh), maka

<sup>82</sup> Keikutsertaan anggota dalam suatu kelompok dan anggapan bahwa tindak kekerasan sebagai sesuatu yang suci memberantas kejahatan, tentunya harus ada justifikasi bahwa mereka adalah pengemban misi untuk melepaskan diri dari cengkeraman pihak yang dianggap menekan.

<sup>83</sup> Menurut Hacker, ada banyak cara-cara lain bahwa kekerasan dirasionalisasikan, seperti dengan menjelek-jelekan musuh dan menyatakan keikutsertaan mereka dalam kekerasan sebagai sesuatu yang suci memberantas kejahatan. (Hacker; 1996 : 7).

<sup>84</sup> Aceh sebagaimana yang dikatakan Anthony Reid, merupakan “sebuah bangsa baru yang lebih memiliki kekuatan ekonomi dan politik ketimbang solidaritas etnik”. Integrasi beberapa kerajaan kecil di Aceh dalam pemerintahan Sultan Mughayat Syah, hanyalah sebuah entitas tunggal yang didorong oleh hasrat untuk mengendalikan pusat-pusat perdagangan pesisir. Tetapi hanya dibawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636), kerajaan Aceh mampu mengkonsentrasikan seluruh perdagangan Aceh dipelabuhannya. (Siegel, 1979 : 8)

semakin dalam pula permusuhan diantara keduanya. Konflik antar kelompok dan solidaritas kelompok dapat membuat tekanan untuk terjadinya konflik.<sup>85</sup>

Jika kita cermati konflik di Aceh khususnya kelompok GAM, dalam melakukan tindakan kolektif berupa perlawanan terhadap negara, serta dalam melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap warga masyarakat Aceh yang tidak mendukung perjuangannya, mereka sebut dengan istilah cuak dan sipai. Pada akhirnya juga berdampak pula pada munculnya perilaku dan aksi kolektif kelompok (cuak dan keluarga sipai serta korban lain) yang menjadi kekuatan baru dan melakukan tindakan kolektif berupa perlawanan terhadap GAM. Dalam perkembangan pasca MoU Helsinki mengkristal menjadi KPA dengan PETA dan muncul kelompok baru FORKAB. Menurut Informan P, hal tersebut juga lebih dikenal sebagai anak kandung, anak tiri, dan anak haram. (Informan P, Langsa, 25 Oktober 2008)

Menurut Sofyan Ali (Ketua FPSG Aceh) dalam jumpa pers di Hotel Sultan Banda Aceh, Juni 2003 mengatakan bahwa :

“Ada tiga akidah yang telah dilanggar oleh GAM, *pertama* menganggap kafir dan haram hukumnya bagi masyarakat Aceh yang mengakui NKRI. *Kedua*, menghalalkan darah orang Jawa untuk dibunuh. *Ketiga*, memeras, merampok, menculik, menyiksa, dan membunuh masyarakat yang bertentangan dengan GAM, sebagai teror agar mereka patuh pada kekuasaan GAM”. (Informan A)

Selain sentimen etnis yang ada dalam masyarakat Aceh, kehidupan beragama juga dapat dianggap sebagai faktor pendukung terhadap ke dalaman konflik antara GAM dengan Pemerintah RI dan antara GAM dengan masyarakat Aceh, khususnya yang tergabung dalam kelompok Front Perlawanan Separatis GAM.<sup>86</sup>

Mereka percaya bahwa Tuhan tidak hanya berkenan dengan tindakan mereka, tetapi Tuhan itu menuntut tindakan mereka. Sebab tindakan mereka dianggap suci, merupakan cerminan suatu perasaan yang dikombinasikan antara

<sup>85</sup> Menurut Coser (1976 : 67), kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam itu bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Kekompakan yang semakin tinggi dari suatu kelompok itu dampaknya pada kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.

<sup>86</sup> Menurut Hoffman, fakta yang menunjukkan sekitar seperempat dari semua kelompok teroris dan sekitar separuh diantaranya adalah yang paling berbahaya di atas bumi terutama semata termotivasi oleh perhatian religius. (Hoffman; 1993 : 12)

mengharapkan masa depan dan balas dendam untuk masa lalu, seperti menghalalkan darah orang Jawa dan menganggap kafir bagi mereka yang membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah RI.<sup>87</sup>

Dalam masyarakat Aceh, kehidupan beragama sangatlah dominan sehingga seringkali menentukan segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh, misalnya dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda,<sup>88</sup> persepsi mereka bahwa agama menegaskan tentang hal-hal yang diperbolehkan untuk menegakkan keadilan dan perjuangan bagi penindasan dan penggrogotan nilai-nilai masyarakat seperti (1) perang syahid, berjuang sampai titik darah penghabisan, (2) membunuh kaum penindas, (3) pembinasaaan penguasa yang dholim.

Dukungan-dukungan agama seperti itu besar kemungkinan diberlakukan sebagai faktor pendukung atau penguat konflik yang terjadi antara GAM dengan NKRI dan GAM dengan FPSG. Membunuh, membom, membakar, memeras, menculik dan beberapa tingkah laku kekerasan lainnya, yang ditujukan pada Pemerintah dengan segala aparatnya, dan simpatisannya menjadi hal yang menurutnya di benarkan Agama.<sup>89</sup>

Lebih jauh lagi, agama dibuat seolah-olah mempunyai pembenaran bagi tindak kejahatan dan malapetaka yang muncul akibat teror yang dilakukan para teroris. Agama dibuat berfungsi sebagai sesuatu yang memberikan : (1) suatu test iman; (2) suatu produk kemauan bebas; (3) bagian dari rencana Tuhan; atau (4) fungsional bagi orang yang dibiarkan belajar dari kesalahan. Dengan demikian teroris dengan mudah menggunakan alasan pembenaran ini untuk lebih memantapkan tindak kejahatan atau kekerasan mereka. (Kraemer, 2004 : 25)

<sup>87</sup> Bagi siapa yang tidak membela kehormatan agama, dalam arti pihak lawan adalah dianggap sebagai pihak yang dholim, maka mereka dianggap melalaikan tugas agama.

<sup>88</sup> Perang melawan bangsa-bangsa kolonial, terutama Inggris dan Belanda, mereka dengan semangat tradisi keislamannya yang kuat, Rakyat Aceh bangkit dengan gegap gempita menyambut seruan jihad para ulamanya, motto perjuangan "*Udep Saree Mate Syahid*" (Hidup mulia, mati syahid). Hal ini berlangsung terus sampai kedatangan Jepang dan agresi Belanda kedua. (Tippe, 2000 : IX)

<sup>89</sup> Menurut Stitt, dalam kondisi yang demikian maka pemimpin kelompok yang melakukan tindakan separatis, baik dalam bentuk anarkhis atau terorisme sangat berperan dalam menerapkan muslihat pada anggotanya untuk menuju ke arah penggunaan terorisme yang sukses atas nama agama, dimana hal ini terletak pada kemampuan meyakinkan pengikut atau orang yang masuk agama ini bahwa sebuah "tugas yang dilalaikan" ada di dalam bagian pokok dari agama itu. (Stitt; 2003 : 7)

Adalah penting untuk memahami praktek kesyahidan di dalam konteks teroris. Yang tidak hanya mengerjakan perekrutan pelayanan suci dan tujuan lain setelah kematian mereka, tetapi juga merupakan suatu mitologi utuh yang dikembangkan di sekitar mereka. Target yang dipilih tidak untuk tujuan strategis, tetapi untuk tujuan simbolis. Gagasan ini akan menghasilkan suatu kesan bahwa kelompok adalah lebih kuat dan lebih besar dibanding apa yang sesungguhnya ada. Dengan demikian dapat memicu munculnya konflik, dan secara signifikan memberikan kontribusi terhadap kedalaman konflik.

#### A.2. Perbedaan Persepsi Masyarakat Terhadap Perdamaian

Fenomena di Langsa (+ Aceh) dapat tercium dua aroma sekaligus pasca MoU Helsinki, yaitu aroma perdamaian dan aroma konflik. Aroma perdamaian mungkin lebih tepat dibaca sebagai perdamaian antara GAM dengan Pemerintah RI serta sebagian masyarakat yang mendukung perjuangan GAM. Sedangkan aroma konflik, antara GAM/KPA dengan FPSG/PETA dan FORKAB.

Masyarakat dalam melihat perdamaian sekarang, menurut Informan E (Wawancara tanggal 26 Oktober 2008 di Langsa) :

“Jadi masyarakat meskipun tidak terkatakan, dari perilaku masyarakat itu jelas mengatakan bahwa perdamaian yang ada sekarang ini adalah perdamaian yang semu, perdamaian yang nampak dipermukaannya damai, tapi didalamnya tidak damai. Banyak agenda-agenda yang tersimpan, karena itu jadi beberapa dari perilaku pada saat konflik vertikal antara Pemerintah dengan GAM itu masih tetap berlangsung, itu berlangsung pada saat damai dikumandangkan termasuk Pajak Nanggroe, kemudian persen dari pembangunan yang bersumber dari dana APBD, dana APBA tetap berlangsung. Pasca MoU Helsinki, Aceh kini masuk dalam era perdamaian. Selain perdamaian, MoU Helsinki juga mengantarkan Aceh dalam suatu masa transisi, dimana masyarakat Aceh masih berada dalam suatu situasi kekhawatiran. Karena masih banyak beredar senjata ilegal di tangan pihak-pihak tertentu, yang ditandai dengan meningkatnya tindakan kriminalitas menggunakan senjata api baik laras pendek maupun laras panjang”.

Disisi lain timbul harapan baru bagi masyarakat agar bisa merasakan kenyamanan dalam beraktifitas sesuai dengan bidang profesinya masing-masing dan kembali pada habitat komunitasnya. Seperti sebuah harapan, informan lain mengatakan, “.... *Peace is the dream all people in Aceh*, dengan damai orang bisa

kembali ke habitat masing-masing, ke kebun, sawah, dan lain-lain. Namun potensi konflik mungkin masih ada tapi horizontal nanti kita lihat setelah pemilu". (Informan C, 17 Maret 2008)

Masa transisi di Langsa (+ Aceh) masih diwarnai oleh merebaknya konflik-konflik internal, kemiskinan dan pengangguran, memburuknya situasi transisi diawali dengan terjadinya polarisasi yang tajam di tingkat elit, karena sibuk memperebutkan sumber daya politik dan ekonomi. Seperti menjamurnya partai-partai baru khususnya di tingkat lokal, oleh karena itu era transisi bisa dikatakan sebagai era pertarungan politik yang krusial bagi masyarakat (Nurlif, Tim Edisi Juli 2008). Fenomena parlok,<sup>90</sup> akan bermuara negatif dan berdampak negatif pula bagi masyarakat dan demokrasi, apabila fenomena itu sekedar menjadi manifestasi dari fanatisme keacehan, yang tentu saja akan menyuburkan praktek manipulasi dan menghasilkan demokrasi semu, serta rentan terhadap konflik.

Dengan adanya Parlok di Aceh, Informan I (Banda Aceh, 15 April 2008) berpendapat bahwa :

"Pendirian Partai Lokal atau Partai GAM, yang pernah diusulkan oleh GAM bertentangan dengan semangat perdamaian, harusnya dicegah timbulnya partai lokal yang mengancam integrasi, pemerintah ada tiga hal semangat yang harus dipegang, *pertama* semangat perdamaian, *kedua* semangat reintegrasi, *ketiga* tidak melahirkan faktor-faktor disintegrasi baru. Meski yang disetujui akhirnya partai PA, tapi yang ada di otak langsung tangkap Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Peran MoU Helsinki jelas tentang Perdamaian, Reintegrasi baik nasional maupun sosial, kemudian amnesti dan kompensasi, yang penting disitu ada kontrak sosial baru, membangun Aceh baru untuk NKRI".

Sebenarnya masyarakat Aceh menginginkan perdamaian dalam arti yang sesungguhnya, yaitu damai dalam kehidupan, damai dalam hati dan pikiran, agar mudah mencari rezeki, mudah dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi serta

<sup>90</sup> Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, Senin (7/7) di Jakarta, mengumumkan enam partai lokal di Aceh, sebagai berikut :

1. Partai Aceh
2. Partai Aceh Aman Sejahtera
3. Partai Bersatu Atjeh
4. Partai Daulat Atjeh
5. Partai Rakyat Atjeh
6. Partai Suara Independen Rakyat Aceh

(Tim Edisi Juli 2008)

silaturahmi dengan sanak saudara. Kini telah datang secercah harapan cahaya perdamaian yang ditiup dari Helsinki untuk kehidupan masyarakat Aceh damai yang abadi. Sehingga ada kewajiban bagi kita untuk menyebarkan dan mensosialisasikan perdamaian dalam kehidupan (Informan S, 15 Maret 2008). Cahaya perdamaian sudah mulai memancarkan sinarnya di Bumi Aceh, biarlah sinar itu tetap terang dan jangan ada yang berusaha untuk menjadikannya gelap kembali, artinya proses perdamaian terus diupayakan maksimal jangan sampai terjadi konflik kembali di bumi Aceh.

Menurut Darwis, gambaran tentang perdamaian di Aceh dapat diberikan melalui beberapa pertanyaan. Jawabannya benar atau salah, ada di dalam hati kita masing-masing, apakah setelah MoU Helsinki masyarakat merasa senang, atau masih ada yang merasa terancam (Haba Rakyat, Agustus 2007). Sementara Informan C mengatakan bahwa, perdamaian belum sesuai harapan, damai dan merdeka, tidak dijajah secara moral, adil dan kondusif. Memang masyarakat secara umum tidak mau tahu permasalahan, ikut gelombang dan tidak punya sikap. Cukup begini saja, enggak perlu yang lain. (Informan C, 17 Maret 2008)

Dalam praktek dan implementasi upaya konsolidasi perdamaian mencatat banyak permasalahan dan kekurangan seperti :

“*Pertama*, sifat politisi proses konsolidasi perdamaian sering dianggap enteng, padahal tiada satupun pelaksana kegiatan yang bersifat netral dalam dampaknya. *Kedua*, kenyataan di lapangan, kebanyakan kebijakan perdamaian biasa terhadap penguasa. Selama ini, proses perdamaian yang dilakukan penguasa memakai pendekatan top down yang melibatkan politisi, panglima, tokoh perang, tokoh agama dan suka dalam bingkai konferensi diplomasi perdamaian yang sifatnya seremonial. Upaya diam-diam dan bottom up yang dilakukan sering kurang diperhatikan”. (Yuniarti, 2002 : 13)

Menurut Informan S, stabilitas keamanan<sup>91</sup> dan kepastian hukum di Aceh belum begitu baik. Adanya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh kelompok

<sup>91</sup> Suedi Husein, Polda Aceh, Hakekat Keamanan itu sendiri adalah terjaminnya setiap orang yang berada dalam suasana bebas dari gangguan fisik maupun psikis (*security*) bebas dari rasa kekhawatiran keselamatan dirinya, miliknya hak dan kehormatannya (*safety*) adanya rasa kepastian dan bebas dari bahaya (*surety*) serta merasa damai (*peace*), sehingga bukan saja dapat mendorong bagi timbulnya kegairahan dalam memberikan karya dan cipta yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan, namun juga mampu mencegah serta meniadakan benih-benih bagi timbulnya gangguan yang merusak tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



tertentu terhadap berbagai sektor usaha, yang sampai saat ini masih berlangsung dan jelas-jelas hal tersebut melanggar aturan. Akan tetapi seakan-akan itu menjadi hal yang resmi dan wajar. Fakta lain, di hampir semua media cetak dan elektronik memberitakan kejadian-kejadian kriminalitas yang terjadi di masyarakat Aceh semakin tinggi sehingga prediksi ke arah Aceh yang damai menjadi rusak. (Informan S, Langsa, 16 Maret 2008)

Perdamaian di Aceh masih di dominasi oleh kontrol dan kekerasan (damai negatif),<sup>92</sup> keterpisahan dan keterputusan hubungan antara kelompok-kelompok yang berseberangan masih sangat menyolok. Hal ini belum menunjukkan perbaikan pada keadaan damai jangka panjang, yang sangat membutuhkan sebuah pola kerja sama dan perpaduan antara kelompok-kelompok yang ada. Sementara masyarakat masih menginginkan perdamaian dalam arti sebenarnya, yaitu damai dalam kehidupan, damai dalam hati dan pikiran agar mudah mencari rezeki, mudah dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi serta silaturahmi dengan sanak saudara. Artinya orang bisa kembali ke habitatnya masing-masing, ke kebun, ke sawah, berdagang, nelayan melaut dan lain-lain, utamanya jangan ada dusta diantara kita.

Menurut Abubakar, damai positif mengandaikan masyarakat yang berinteraksi dalam pelbagai bentuk kerjasama : mengandaikan organisasi sosial yang terdiri dari pelbagai ragam orang yang dengan sengaja bekerja sama dalam rangka masalah bagi semua. Ia juga melibatkan usaha yang menciptakan keadaan-keadaan positif yang dapat mengatasi sebab-sebab utama konflik yang menghasilkan kekerasan. (Abubakar. 2006, 25)

Keraguan tentang perdamaian di Aceh, juga dapat dilihat apakah damai jilid 2 ini akan abadi atau seumur jagung seperti halnya HDC. Terkait hal tersebut menurut Zulkarnaen, ada beberapa kesulitan dan kritikan mulai dari proses dialog sampai dengan materinya diantaranya sebagai berikut :

<sup>92</sup> Banualam, damai negatif adalah suatu keadaan yang menuntut serangkaian s truktur sosial yang memberikan keamanan dan perlindungan dari tindakan-tindakan kekerasan fisik langsung yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bangsa terhadap yang lainnya. Penekanan dalam damai negatif diberikan kepada kontrol atas kekerasan. Strategi utamanya adalah keterputusan hubungan dimana kelompok-kelompok yang berkonflik dipisahkan satu sama lain. Secara umum, kebijakan damai negatif semata-mata perwujudan kekerasan itu sendiri. Karenanya, kebijakan ini dianggap tidak memadai untuk menjamin keadaan damai jangka panjang. Malahan dengan menekan dihilangkannya ketegangan sebagai akibat dari konflik sosial, maka upaya-upaya damai negatif justru dapat mengarah kepada kekerasan yang lebih besar dimasa depan. (Banualam, 2006 : 23)

“(1) Dari proses dialog, mereka yang kontra yang mengkritik kebijakan tersebut mulai dianggap tertutup dan terkesan sangat eksklusif. Materi-materi yang dikandung juga dinilai kebablasan dan banyak melanggar undang-undang yang berlaku, seperti masalah kewenangan membentuk partai lokal dan penentuan suku bunga tersendiri yang berbeda dengan Bank Sentral, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkesan terlalu memberi ruang gerak yang terlalu bebas bagi GAM. Kesepakatan itu dianggap telah melampaui undang-undang otonomi khusus bahkan jauh lebih radikal dibanding sistem negara federal sekalipun.

(2) Beberapa pihak, baik TNI maupun kelompok sipil di parlemen maupun non parlemen banyak yang menolak kesepakatan tersebut karena khawatir Aceh bernasib sama dengan Timor-Timur, lepas dari NKRI.

(3) Pihak GAM sendiri ada keraguan apakah benar ia akan mematuhi atau tidak. Mendamaikan para pemimpin kelompok bertikai adalah mudah, yang sulit adalah mendamaikan para pengikutnya. Tidak ada jaminan kesepakatan elit tersebut akan dipatuhi pasukannya di lapangan. Ketika saat para pemimpin politik berjabat tangan menyepakati perjanjian damai, militer masing-masing pihak di tingkat lapangan tetap saling membunuh baik karena alasan ketidaktahuan maupun ketidaksetujuannya”.  
(Zulkarnaen, 2005)

Situasi perdamaian di Aceh berdasarkan pantauan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Damai masih bersifat sementara, karena hanya disepakati dua pihak yaitu GAM dan Pemerintah RI dan sekedar ketiadaan perang.
2. Masih menyimpan bibit permusuhan dan saling curiga, khususnya antara GAM dan Non GAM (KPA, PETA, FORKAB).
3. Masih didominasi oleh kontrol dan kendali keamanan.
4. Kelompok-kelompok yang ada masih bersifat unit-unit besar saling berseberangan cenderung terpusat dan orientasi penyeragaman.
5. Masih berpotensi pada konflik kekerasan.

Sedangkan Muzakir Manaf, Ketua KPA, mengatakan bahwa, menyongsong Aceh damai dimasa depan ditinjau dari perspektif perdamaian pasca MoU Helsinki :

“1) Untuk menyongsong Aceh damai perlu diawali dengan menghilangkan prasangka dan rasa curiga, menggantinya dengan sikap saling percaya. 2) Perlu dibangun komunikasi antar komponen yang berlawanan pada masa konflik secara terus menerus, menciptakan rasa saling percaya, rela dan ikhlas untuk

saling memahami dan mengerti, jujur dan memiliki komitmen yang kuat serta mampu berlaku adil". (Muzakir Manaf, Lhokseumawe, 17 Mei 2008)

Dilain pihak, Sofyan Ali, Ketua PETA Aceh (Bireuen, tanggal 10 Februari 2008), pandangannya terhadap MoU Helsinki adalah sebagai berikut :

"Pandangan Front dengan adanya MoU Helsinki ini bagus, karena dari dulu kita mengajak mereka untuk bergabung dengan NKRI. Setelah adanya perdamaian, saya lihat reintegrasi tidak berjalan, setelah MoU seolah-olah ada masyarakat kelas satu dan kelas dua, seperti kami yang sekarang ini disebut PETA, tidak berfungsi di Aceh. Kami ditinggalkan, malah pemerintah memberikan angin pada mereka. Kami ini dilihat sebagai rakyat yang tidak punya hak di Aceh, hanya dilihat sebelah mata, tetapi kami tidak pernah merasa tersingkir, karena kami merasa hidup di NKRI. Dan hari ini mereka sedang hiforia dengan apa yang mereka dapatkan, tapi hanya semu, artinya tidak bisa berakhir untuk selamanya, perdamaian mereka hiforianya semu, hanya sementara".

Tidak dipungkiri bahwa, pasca MoU Helsinki, memang banyak kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh, khususnya dalam perkembangan sistem politik yang lebih demokratis. Namun disisi lain masih banyak permasalahan yang timbul, dan dampak dominonya bila dibiarkan akan mengganggu terciptanya perdamaian di Langsa (+ Aceh) di masa yang akan datang. Disamping hal tersebut merupakan potensi konflik yang dapat muncul kembali di masa yang akan datang. Menurut Informan I, "damai di Aceh ini seperti kedondong, diluar mulus, indah, bagus dilihat orang luar, tapi didalamnya berserabut. Makanya saya menghimbau kalau luarnya bagus, maka didalamnya juga harus bagus. Jangan diluarnya bagus tapi didalamnya tidak bagus, karena takut sama GAM". (Informan I, 15 April 2008)

Format dari konflik antara GAM dengan Pemerintah RI serta masyarakat Aceh Non GAM lebih mudah pada suatu dikotomis konflik dari pada pengintegrasian, dengan kata lain lebih semerbak aroma busuk konfliknya dibandingkan aroma bunga perdamaian, jika didekati dan dirasakan/dicium dari Bumi Serambi Mekah. Penduduk Kota Langsa yang dikenal sangat heterogen, namun jika dilihat dari kelompok-kelompok tempat tinggal mereka, maka akan cenderung homogen, artinya dominasi kelompok terlihat pada Gampong yang ditempati oleh masyarakat baik penduduk Aceh GAM maupun Aceh RI. Hal

tersebut berpengaruh signifikan terhadap pola atau konstruksi rekonsiliasi di berbagai sektor. Misalnya dalam bidang politik, melalui proses pilkada maupun pemilu, komunitas sosial dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam komunitas/ormas yang ada juga sangat kental diwarnai oleh dominasi kelompok masing-masing, termasuk jarang ditemui perkawinan antara keluarga GAM dengan Non GAM, karena masing-masing keluarga tersebut biasanya sudah melekat label GAM dan Non GAM. Dalam bidang ekonomi, hanya di pasar yang nampak terjadi pembauran, karena terjadinya proses jual-beli secara bebas, sedangkan usaha bersama dalam bidang ekonomi juga belum nampak.

Dengan demikian, rehabilitasi, rekonsiliasi dan reintegrasi sosial di Langsa (+ Aceh) masih merupakan proses panjang dan perlu resolusi konflik yang sinergi dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Khususnya mereka yang terlibat sebagai aktor-aktor dalam konflik, sekaligus sebagai aktor-aktor dalam menciptakan proses perdamaian positif, karena akan berpengaruh positif pada integrasi nasional maupun integrasi sosial.

### **A.3. Perubahan Struktur Konflik Dan Potensi Konflik Laten**

#### **A.3.1. Perubahan Struktur Konflik**

Struktur konflik adalah seperangkat aktor, persoalan dan tujuan atau hubungan yang tidak sesuai dan merupakan konflik itu sendiri. Jika akar penyebab konflik terletak dalam struktur hubungan tempat pihak-pihak yang bertikai bergerak maka transformasi struktur ini diperlukan untuk menyelesaikan konflik. (Miall, 2002 : 250)

Penyelesaian konflik Aceh pada era pemerintahan orde baru dengan orientasi kekerasan, mengakibatkan konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh, dan membawa pada suasana perang yang lebih bertujuan pada pembinasan pihak lawan serta orang-orang atau kelompok-kelompok yang dianggap membantu daripada pencapaian tujuan perjuangannya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa jalan kekerasan akan melahirkan bentuk kekerasan baru sekaligus dapat menarik pihak-pihak yang tadinya tidak ikut berkonflik, akhirnya melibatkan diri dalam konflik. Utamanya karena menjadi imbas dan korban kekerasan, disamping

adanya dimensi lain terkait dengan kesamaan faham, perasaan senasib dan peluang kerja sama yang dianggapnya benar dan dapat dilakukan.

Dalam konflik Aceh ada kelompok GAM yang mewakili sebuah “pemberontakan” selanjutnya sering disebut sebagai gerakan separatis, yang melakukan perlawanan kepada pemerintah pusat dengan segala taktik dan strateginya. Disisi lain muncul kelompok-kelompok yang mewakili sebuah gerakan anti separatisme dan pro pemerintah pusat.

Seorang tokoh masyarakat/ulama di Langsa, dalam wawancara dengan peneliti di Langsa, tanggal 28 Oktober 2008, mengatakan bahwa :

“Jadi, karena yang ada di Aceh ini mayoritas beragama Islam pada saat separatis hidup kemudian mereka melakukan hal-hal yang destruktif terhadap masyarakat sipil yang lain, maka kemudian mulai dengan konsep Islam apabila hak-hak kita itu diganggu maka kita punya kewajiban mempertahankan hak-hak kita itu. Jadi dengan dasar konsep seperti itulah kemudian timbul perlawanan-perlawanan kepada pihak separatis GAM itu dengan rasa nasionalis kebanggaan yang kuat, karena mereka tahu bahwa dengan nasionalis kebanggaan yang ada pada diri mereka itu, mereka bisa hidup dengan damai dengan tenang di Aceh, tetapi dengan timbulnya separatis yang cenderung etnis nasionalis itu, nasionalis mereka kebanggaan mereka itu merasa terganggu atau diusik sehingga munculah perlawanan-perlawanan masyarakat sipil dalam bentuk Front PETA atau laskar-laskar lainnya. Dalam pandangan Islam, yang namanya mukharadin atau gerakan pengacau keamanan atau bugha pemberontakan yang dilakukan pada sebuah kekuasaan negara yang syah, maka hukumnya sangat berat di dalam Islam, tidak hanya dihukum mati tapi mayatnya harus disalib selama tiga hari tiga malam baru boleh dikuburkan, itulah tegasnya hukum Islam berkaitan dengan gerakan pengacau keamanan, mukharadin atau bugha, pemberontakan terhadap sebuah negara yang syah”.

Dengan demikian, aktor konflik di Aceh dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu *pertama*, gerakan separatisme yang kontra terhadap Pemerintah Pusat dan menginginkan kemerdekaan. *Kedua*, pihak pemerintah pusat dengan alasan mempertahankan kedaulatan NKRI. *Ketiga*, gerakan anti separatisme yang pro dengan pemerintah pusat dengan alasan tetap ingin bergabung dengan kedaulatan NKRI.

Perubahan politik pada era reformasi mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Aceh, dari orientasi kekerasan ke orientasi nir

kekerasan, atau dapat dikatakan lebih demokratis. Puncaknya dengan dicapainya kesepakatan MoU Helsinki antara GAM dengan Pemerintah RI.<sup>93</sup> Untuk sementara dapat dikatakan bahwa pihak GAM dan Pemerintah RI sudah berdamai dengan segala konsekwensinya. Pandangan Bhakti dalam melihat permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

“Pasca MoU Helsinki, proses perdamaian telah berjalan dengan baik dan kekerasan yang terhambat telah menurun. Kondisi ekonomi masyarakat diharapkan segera akan meningkat berbarengan dengan stabilnya kondisi keamanan. Namun begitu, sejak upaya pelaksanaan MoU Helsinki, jenis konflik telah berubah dari konflik vertikal antara Pemerintah Pusat dengan GAM menjadi konflik horizontal antar komponen masyarakat, terutama berkaitan dengan distribusi kompensasi ekonomi bagi mantan anggota GAM dan penguasaan aset-aset ekonomi dan politik oleh para mantan kombatan. Sejalan dengan hal tersebut, Nurhasyim dalam makalahnya menyampaikai potensi konflik horizontal antara mantan GAM dengan milisi masih terbuka, kemungkinan milisi menjadi pemicu konflik horizontal di masa datang”. (Bhakti; 2008 : 3-4)

Perkembangan konflik Aceh cenderung mengalami pergseran dari konflik vertikal menuju konflik horizontal, akibatnya struktur konfliknya, juga mengalami pergeseran, terutama aktornya mengalami perubahan, tadinya antara pemerintah pusat dengan GAM. Perkembangan selanjutnya konflik terjadi antara mantan GAM/KPA dengan mantan Front/PETA. Mereka ingin menunjukkan eksistensinya masing-masing, dan tetap berpotensi konflik, disamping telah terjadi konflik internal ditubuh GAM sendiri.

Seperti yang pernah diungkapkan dalam metrorialitas, tentang konflik internal diantara mantan anggota GAM pasca MoU Helsinki, yaitu terjadinya pembelahan kelompok diantara mereka, seperti kelompok politik, kelompok pengusaha, kelompok birokrat serta anggota GAM yang kehidupannya tetap susah. Pendapat yang disampaikan oleh Zulkarnaen, sebagai berikut :

“Terdapat keraguan yang mungkin saja terjadi terhadap kepemimpinan Hasan Tiro. Sejauhmana Hasan Tiro masih dapat mengontrol seluruh pasukan GAM (KPA) di Aceh, mengingat

<sup>93</sup> Jumlah konflik tetap meningkat, kekerasan tetap tinggi, telah terjadi 149 konflik baru pada Mei 2008, dan 166 pada Juni 2008. Mantan Pemimpin Milisi Pro Jakarta (PETA) mengatakan : “kondisi keamanan sekarang tidak ada beda dengan sebelum MoU. Sementara KPA dan Gubernur Aceh menerangkan, kejadian tersebut dapat memulai konflik horizontal antara masyarakat pesisir dan pedalaman, antar GAM dan bukan GAM”. (World Bank, 1 Mei s/d 30 Juni 2008)

GAM saat ini telah berkembang dan terfragmentasi ke dalam berbagai faksi. Hasan Tiro dan pemimpin lainnya bermukim di Swedia selama hampir dua dekade, sementara para pejuang GAM tinggal di Aceh. Perbedaan ini menjadi pertimbangan mengenai apakah GAM memiliki tingkat koherensi struktur organisasi atau tidak. Sebab meskipun para pemimpin militer GAM memiliki loyalitas tinggi terhadap para pemimpinnya di Stockholom, ada keraguan para Pemimpin Swedia mampu mengontrol sayap-sayap militernya di lapangan. Selain itu, antara Hasan Tiro dan orang-orang GAM di lapangan banyak memiliki perbedaan visi tentang hendak dibawa kemana, jika Aceh berhasil merdeka. Tiro menginginkan negara sekuler, sementara sebagian orang di lapangan menginginkan negara Islam". (Zulkarnaen, 2005, 11)

Fenomena yang menunjukkan bahwa konflik masih ada di internal mantan anggota GAM yang tergabung dalam KPA, maupun mantan anggota GAM yang tergabung dalam FORKAB dengan BRA yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Sementara lambatnya pembangunan rumah pengungsi, kualitas pembangunan yang tidak bagus, banyaknya pembangunan perumahan yang ditinggal lari oleh kontraktornya dengan berbagai alasan. Kondisi tersebut memicu munculnya ketidakpuasan dan rasa kecewa di kalangan pengungsi yang terakumulasi menjadi konflik internal, khususnya terkait dengan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR) (Warsilah. 2007. 42). Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada ketidakpuasan, berpengaruh pada proses transformasi ke arah perdamaian, maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah maupun GAM dalam implementasi kesepakatan MoU Helsinki.

Seperti yang disampaikan Sarbini Ketua FORKAB Aceh Jaya dalam konferensi pers tanggal 22 Juni 2008 di Wisma Kuta Alam Banda Aceh, pasca rapat akbar seluruh perwakilan FORKAB dari kabupaten/kota, sebagai berikut :

"Alokasi dana bantuan bagi 500 orang mantan kombatan GAM yang menyerah pra MoU Helsinki, dengan pagu 5 milyar atau 10 juta per orang, bantuan itu dinilai sangat kurang dan tidak adil. Diakuinya bahwa FORKAB sendiri tahun 2006 sudah mendapat bantuan dana reintegrasi untuk 3.200 anggotanya, tapi dari 11.347 anggota FORKAB saat ini, sisa yang belum mendapat bantuan mencapai 9.147 orang. Ini penghinaan bagi FORKAB, apa perlu FORKAB kembali angkat senjata agar permintaannya dipenuhi? Yaitu minimal penerima bantuan sebesar 6.000 orang, tujuannya dengan jumlah bantuan bagi 6.000 orang, kita bisa membaginya

kepada 3.147 sisanya. Terakhir kalau tidak dihiraukan maka kami akan naik gunung saja". (Serambi, 22 Juni 2008)

Permasalahan lain muncul dan berkaitan dengan masalah struktural lainnya, yaitu adanya anggapan tentang anak kandung dan anak tiri pada kelompok-kelompok masyarakat Aceh. Bahkan ada kelompok masyarakat yang mendapat stigma sebagai anak haram. Disamping ketimpangan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan, ketimpangan sosial politik yang berujung pada kecemburuan kekuasaan, yang seringkali memancing adanya tindakan kekerasan. Informan P (Langsa, 25 Oktober 2008) menerangkan :

"Setelah MoU, Front bagaikan anak haram, kami ragu dengan keberadaan Merah Putih di Aceh. Hukum tidak berjalan dan tidak maximal, meski berdasarkan pasal 30 mengadakan perlawanan, tapi tidak ada arti paksa. MoU terutama di TK I dan kota/kabupaten sampai dengan kecamatan, seolah-olah ada pihak nomor satu, di Aceh yaitu di pihak GAM, sekarang KPA. Kita sedih karena kita tersisih sama dengan anak ayam kehilangan induk, apalagi kekuatan terbesar disini adalah kekuatan rakyat, bukan TNI/POLRI maka maunya Pemerintah harus ada desakan khusus yang netral, jangan hanya mendengarkan satu pihak, dia mengatakan Aceh damai, Aceh aman, tapi intimidasi masih berjalan, perampokan dan pembunuhan".

Sementara warga masyarakat Aceh yang mengungsi, dan harus rela meninggalkan keluarga dan harta bendanya hanya untuk menyelamatkan hidupnya karena adanya konflik, khususnya penduduk etnis keturunan Jawa, sampai saat ini masih tersebar di luar Aceh seperti di Tanjungpura, Pangkalan Brandan, Binjai, Langkat, Brastagi dan Medan. Mereka masih mengalami situasi yang dilematis, mereka tetap bertahan di tempat pengungsian dengan mata pencaharian yang tidak jelas, mau kembali ke Aceh keselamatannya tidak terjamin, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan.

Seorang Informan E, Ulama/Tokoh Masyarakat di Langsa, tanggal 26 Oktober 2008 menerangkan, terkait fenomena konflik pasca MoU Helsinki di Provinsi Aceh bahwa :

"Ya konflik di Aceh masih ada tapi lain, ada pergeseran konflik dari bersifat vertikal antara GAM dengan RI, beralih pada konflik horizontal, yang menurut pengamatan saya konflik horizontal itu terbagi menjadi dua item penting, yaitu pertama konflik internal KPA, khususnya antara kombatan dengan non kombatan,



kemudian kombatan yang turun pra Helsinki (FORKAB) dengan kombatan yang turun pasca Helsinki (KPA). Sedang yang kedua, konflik yang bersifat eksternal, ini khususnya antara KPA dengan PETA dan FORKAB.

Berkaitan dengan berbagai hal tersebut di atas, diperlukan adanya identifikasi terhadap retorika persoalan yang masih berkembang di Langsa (+ Aceh), dimana telah terjadi perubahan struktur konflik, yang menuntut adanya penanganan secara terkoordinasi dan serius, dengan mengedepankan cara-cara nir kekerasan. Konflik yang sangat menonjol sekarang adalah konflik internal di tubuh mantan anggota GAM dan konflik eksternal antara mantan anggota GAM/KPA dengan mantan anggota Front Perlawanan Separatis GAM/PETA. Dinamikanya masih saja ditandai dengan meningkatnya berbagai tindakan kekerasan. Meski pihak yang berhadapan sudah berbeda, kalau sebelum MoU Helsinki antara GAM dengan Pemerintah RI, tapi pasca MoU Helsinki antara GAM (KPA) dengan FPSG (PETA) sementara FORKAB lebih cenderung bersinergi dengan PETA.<sup>94</sup>

**Tabel 14**  
**Jumlah Anggota FORKAB di Provinsi Aceh**

NO	KABUPATEN / KOTA	KEKUATAN
1	Tamiang	311
2	Langsa	59
3	Aceh Timur	187
4	Sabang	78
5	Nagan Raya	74
6	Lhokseumawe	130
7	Pidie	301
8	Aceh Jaya	65
9	Aceh Selatan	290

<sup>94</sup> Lihat Anggaran Dasar Organisasi Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB), terdaftar di Pengadilan Negeri Jantho. No.WIDR.PR.10-157, tanggal 5-9-2006, MUKADDIMAH: "..... kepada para pahlawan, pejuang keluarga, sahabat, rekan-rekan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan darah dan air mata. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahannya dan Allah SWT Ridho atas pengorbanannya sehingga mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Kami sekumpulan anak bangsa yang sadar akan amanah dari pendahulu, yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan cita-citanya, dalam kesempatan ini melalui cara dan kemampuan yang dimiliki, akan kami pertahankan dan kami perjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sampai titik darah dan tetes air mata terakhir kami. Akhirul kata, semoga dengan berkumpulnya kami di FORKAB, dapat mendukung perdamaian yang telah terjadi di bumi Aceh yang abadi dan semoga apa yang kami lakukan dapat menyatukan kami semua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia selamanya. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amien". (AD dan ART FORKAB)

NO	KABUPATEN / KOTA	KEKUATAN
10	Gayo Luwes	38
11	Bireuen	241
12	Bener Meriah	169
13	Banda Aceh	32
14	Aceh Utara	216
15	Aceh Tengah	90
16	Aceh Besar	539
17	Aceh Barat Daya	283
18	Aceh Barat	70
Jumlah		3272

Sumber : Sekretariat FORKAB Tahun 2008

**Tabel 15**  
**Kelompok Aceh RI Di Langsa**

No	Kelompok
1	Front Perlawanan Separatis GAM (PETA)
2	Front Penyelamat Merah Putih
3	Front Masyarakat Aceh RI
4	Front Hubul Watani
5	Front Laskar Rakyat
6	Front Komunikasi Anak Bangsa
7	Forum Komunikasi Warga Jawa
8	Puja Kesuma

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

Dalam struktur konflik di Aceh sekarang secara umum dapat dilihat dari dua kelompok, yakni Aceh GAM dan Aceh RI.<sup>95</sup> Struktur konflik seringkali melibatkan persoalan tentang ketidakadilan dan tujuan-tujuan yang saling tidak sejalan. Konflik-konflik semacam ini seringkali menuntut usaha yang intensif, perlu waktu untuk menghasilkan perubahan yang konstruktif, menuju perdamaian positif.

<sup>95</sup> Menurut Ju Lan dalam MoU, masalah yang paling mendasar berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat tidak tersentuh sama sekali, tidak ada satu butirpun yang membahas masalah sosial budaya dan bagaimana membangun Aceh secara keseluruhan. Mereka semua yang mengaku mewakili masyarakat Aceh sama sekali tidak berpikir untuk Aceh. Mereka adalah dua kelompok bernama Aceh-RI dan Aceh-GAM yang sarat dengan kepentingan masing-masing. (JU LAN. 2005 : 193)

### A.3.2. Potensi Konflik Laten

Potensi konflik laten di Langsa (+ Aceh) antara Aceh GAM dengan Aceh RI,<sup>96</sup> akan bermuara negatif dan berujung pada konflik terbuka, bila tidak dikelola dengan baik.<sup>97</sup> Pasca Helsinki, arus perubahan yang bersifat mendadak dari fenomena konflik ke aroma perdamaian, nampaknya lebih menunjukkan pada titik kritikalnya daripada sekedar pembangunan yang stabil dan terukur sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti disampaikan Informan P, sebagai berikut :

“Rasa aman dan nyaman sebagai landasan membangun saling percaya antara berbagai kelompok-kelompok yang ada di Aceh nampaknya belum sepenuhnya pulih. Kalau yang mengatakan tidak ada konflik di Aceh, oh itu salah, mereka hanya mendengar. Kalau mau tahu konflik di Aceh, turun ke lapangan, pasca MoU masih konflik, kami dimusubi sama mereka, kalau kita memang orang NKRI. Jadi sudah solid dan menghormat MoU, kita tidak menganggap mereka musuh, tapi mereka yang menganggap kita musuh”. (Informan P, Langsa 25 Oktober 2008)

Masyarakat masih mengalami kondisi yang sangat dilematis artinya masyarakat masih sangat berhati-hati dalam berinteraksi, disebabkan oleh masih kuatnya prasangka bahwa kelompok yang satu akan mengkhianati kelompok yang lain, atau kelompok yang satu, akan menyerang kelompok yang lain.<sup>98</sup> Kondisi tersebut masih memperlihatkan betapa sulitnya menggapai secercah kehidupan yang nyaman di Langsa (+ Aceh). Seperti yang disampaikan Informan B, sebagai berikut :

“Kami sekarang terjepit bahkan selalu diawasi karena KPA ada dimana-mana dan dia bisa memanggil siapa saja untuk diperiksa, semua orang tahu itu, bahkan kalau ada kejadian dari orang kita cepat sekali diproses tapi kalau mereka yang berbuat ditutup-tutupi

<sup>96</sup> From PETA Aceh, akan berupaya untuk menghapus dan menghilangkan segala bentuk serta tindak tanduk Gerakan Separatis Aceh Merdeka (GAM), sehingga perdamaian yang langgeng dan sejahtera sesuai dengan cita-cita dari seluruh masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya (AD/ART PETA Aceh).

<sup>97</sup> Konflik biasanya dimulai dari ketegangan-ketegangan yang bersifat laten, lalu berkembang menjadi konflik terbuka berupa pergerakan kekuatan, bila melampaui ambang toleransi, maka konflik yang ada menjurus pada sifat-sifat destruktif dan pelanggaran-pelanggaran (Ury; 1999 : 27)

<sup>98</sup> Zulfadli Ismard dan Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Rakyat Aceh (GEMPAR) menyatakan, rentetan kejadian selama ini adalah suatu hal yang patut disayangkan. Seharusnya, pada masa damai ini semua pihak harus menahan diri, menghilangkan kerikil-kerikil yang berpotensi konflik serta sama-sama merawat perdamaian. (Serambi, 23 Maret 2007)

kami tidak tahu lagi kemana harus mengadu”. (Informan B, 11 April 2008)

Pada dasarnya telah terjadi pergeseran konflik dari konflik vertikal ke konflik horizontal meskipun masih bersifat *laten*. Seorang Informan F, 25 Agustus 2008 (aktivis perempuan) :

“Siapa bilang Aceh sudah tidak ada konflik, memang kalau dilihat dari luar nampaknya aman, tapi kalau kita masuk ke dalam nampak sekali konflik, sekarang masyarakat Aceh sendiri yang konflik. Saya pernah dipanggil KPA dan ditanya bahwa saya sudah ditebak dan dikatakan bukan Aceh asli gara-gara saya katakan bersama kawan-kawan di Ule Kareng Banca Aceh tempat kami ngobrol bahwa yang melanggar HAM tidak TNI saja tapi GAM juga. Karena keluarga saya jadi korban keduanya dan saya tidak setuju kalau Aceh merdeka”.

Dinamika tersebut selanjutnya dapat dilihat dari hal sebagai berikut :

(1) Pasca perjanjian damai semestinya GAM harus membubarkan diri tetapi faktanya GAM hanya mengganti nama menjadi KPA (Komite Peralihan Aceh). KPA lebih solid dan sudah membentuk jaringan sampai ke desa-desa, selanjutnya membentuk partai lokal dan secara formal masuk dalam jajaran legislatif. Sementara GAM artinya Gerakan Merdeka.

(2) Keinginan para tokoh GAM mendirikan partai politik lokal itu harus diwaspadai sebagai gerakan yang membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh karena itu, pemerintah pusat haruslah waspada jangan sampai lahir GAM jilid ke dua setelah perjanjian Helsinki hal tersebut disampaikan oleh Ferri Murisydan Baldan, mantan ketua Panitia khusus RUU Pemerintahan Aceh DPR RI. (Tempo, 17 Juli 2007)

Fenomena yang kemudian cukup menarik yang ada di Aceh adalah timbulnya pembelahan-pembelahan kelompok diantaranya Komite Peralihan Aceh (KPA) yang merupakan representasi dari pembubaran militer GAM pada tanggal 27 Desember 2005 yang semakin kuat dan berpengaruh terhadap perkembangan Aceh.<sup>99</sup> Pembela Tanah Air (PETA) yang juga merupakan

<sup>99</sup> Laporan ICG menyatakan “pekerjaan dan kontrak kerja kini memihak kepada pemenang : kesetiaan pada GAM telah menggantikan koneksi dengan Pemerintah Pusat ataupun komandan tentara setempat sebagai kunci bagi kesempatan politik atau usaha, mantan komandan sayap bersenjata GAM sekarang disebut Komite Peralihan Aceh (KPA), menjadi Pemerintah Bayangan. (Crisis Group Asia Report No. 39, Oktober 2007:1)

representasi dari Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG) yang kondisinya semakin terjepit dan mulai menurun. Serta Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) yang didalamnya terdiri dari mantan anggota GAM yang telah lebih dahulu bergabung dengan NKRI sebelum ditandatanganinya perjanjian MoU Helsinki. Berbagai kelompok tersebut mendapatkan dana kompensasi yang besarnya bervariasi dari BRA sehingga secara formal keberadaannya mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat. Meski secara tidak langsung kelompok-kelompok tersebut saling berseberangan dan rentan terhadap konflik.

Problem dan prospek Aceh pasca MoU Helsinki terkait dengan integrasi masyarakat dan anggota-anggota mantan GAM, karena perang selalu menghasilkan kebencian, dendam dan trauma di dalam masyarakat. Persoalan dendam di Aceh susah dihilangkan karena sudah bersifat turun temurun dan itu bisa menjadi konflik di masyarakat Aceh sendiri. Yang ada di Aceh juga masalah ekonomi, kecemburuan dan kesenjangan sosial karena GAM mendapat tanah luas, sedang kami yang bela NKRI tidak dapat apa-apa, tapi GAM malah enak. (Sumber Informan R, 17 Maret 2008)

Dari pantauan peneliti, potensi munculnya konflik pasca penandatanganan MoU Helsinki, setidaknya bisa dilihat dari persoalan yang nampak dilapangan seperti :

*“Pertama, keyakinan akan perdamaian yang masih menimbulkan pro dan kontra terkait keikhlasan untuk sinergi dengan mantan kawan yang dianggap sebagai lawan atau yang memang dari awal munculnya konflik sudah menjadi lawan. Kedua, sejauhmana mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan kehidupan sosialnya. Ketiga, terkait sanksi hukum, yang masih menghantui karena tindakan kekerasan yang pernah dibuatnya, baik sanksi hukum formal (Pengadilan HAM), maupun sanksi sosial balas dendam dari masyarakat yang pernah menjadi korbannya selama konflik.”*

Adanya permasalahan internal di Langsa (+ Aceh) merupakan potensi konflik laten, diantaranya disebabkan permasalahan identitas, kesenjangan sosial dan ekonomi, politik, prasangka dan dendam.<sup>100</sup> Sementara permasalahan lain

<sup>100</sup> Menurut Gurr (1970 : 24), penelitian mengenai berbagai kelompok etnik dan komunal yang aktif dalam berpolitik menunjukkan bahwa mobilisasi dan strategi mereka didasarkan pada interaksi antara dua kategori yaitu kekecewaan akibat perlakuan pilih kasih dan perasaan identitas kelompok merupakan landasan dasar bagi mobilisasi dan menentukan jenis tuntutan yang diajukan para pemimpin gerakan. Kekecewaan hanya akan menimbulkan tindak kekerasan politik pada ras

yang juga potensial terhadap munculnya konflik baru di Langsa adalah permasalahan dukungan terhadap ALA-ABAS serta dinamika persaingan Parlok dan Parnas karena secara umum Parlok didukung KPA, sedangkan Parnas banyak didukung PETA. Fenomena tersebut, diantaranya juga tertuang dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Front PETA Kota Langsa pada tanggal 27 Agustus 2007 (Sumber Dokumen PETA) adalah sebagai berikut :

“Kami atas nama Front Pembela Tanah Air menuntut kepada Komite Peralihan Aceh (KPA) untuk tidak menggunakan atribut dan lambang GERAKAN ACEH MERDEKA kami sangat menyesalkan penggunaan atribut dan lambang tersebut, karena ini mengingatkan peristiwa yang lalu, peristiwa yang sangat menyakitkan kami tidak mau peristiwa yang lalu terulang kembali, masyarakat belum kering meneteskan air mata, kini sudah menghadang peristiwa menyedihkan di depan mata, masyarakat masih ingat mayat bergelimpangan dimana-mana, kenapa kejadian semacam ini justru akan ditimbulkan kembali, jangan nodai kesepakatan damai yang telah dicapai yang sudah banyak memakan korban, jangan menambah lagi penderitaan masyarakat, masyarakat sudah banyak menderita, berikan kesempatan masyarakat untuk menikmati kedamaian yang sangat diidam-idamkan apapun alasannya kami tidak dapat menerimanya karena berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, GAM sudah dibubarkan dan sudah tidak ada lagi GAM kenapa KPA memaksakan menggunakan atribut dan lambang GAM dengan demikian Parlok GAM melanggar perjanjian Helsinki yang berarti pengkhianati perjanjian damai, apa KPA masih menginginkan konflik kembali? Apa masih kurang banyak masyarakat yang harus dijadikan korban, kami semua ingin hidup damai, aman, tentram....”

---

komunitas, kalau dilakukan mobilisasi atas konflik yang terjadi, dan dipengaruhi oleh empat faktor yakni : Pertama, semakin besar perbedaan antar kelompok. Kedua, adanya faktor kondisi eksternal. Ketiga, derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Keempat, control represif oleh kelompok-kelompok dominant. Sedangkan menurut Charles Tilly (1978 : 7), tindakan kekerasan merupakan hasil dari kalkulasi para pemimpin yang memobilisasi sumber daya kelompok untuk menanggapi peluang politik yang berubah. Kekerasan politik itu terjadi bukan karena ekspresi emosional masyarakat, tetapi merupakan tindakan rasional atau tindakan instrumental untuk mencapai kepentingan politik tertentu, ringkasnya kekerasan politik adalah hasil kalkulasi politik.



### **Penyerahan Pernyataan Sikap Front PETA Kepada DPRK Langsa**

#### **A.4. Pemberontakan Symbolis**

Pernyataan resmi pembubaran militer GAM dibacakan juru bicara TNA Soefyan Daood di Kantor GAM Banda Aceh. Selasa 27 Desember 2005, surat itu ditandatangani Panglima GAM Muzakir Manaf. Selanjutnya dibentuk Komite Peralihan Aceh (KPA) yang tetap dikomandoi Muzakir Manaf. KPA bertugas membimbing para mantan anggota GAM, sekaligus memberikan sanksi bila mereka melakukan pelanggaran. Hal tersebut menandai peralihan gerakan bersenjata menjadi gerakan politik, hanyalah sebuah fase baru belum sebuah akhir. (Kompas, 28 Desember 2005)

GAM adalah Gerakan Aceh Merdeka, secara eksplisit makna dan nuansa merdeka masih mewarnai perjuangan GAM, yang belum atau tidak mau membubarkan diri pasca MoU Helsinki, meski perjuangannya sudah berubah dari perjuangan bersenjata, menjadi perjuangan politik, dengan melebur TNA menjadi KPA. Namun struktur dan sifat komandonya belum mengalami perubahan. Menurut Iwan Gardono, "GAM akan memperluas kekuasaannya melalui KPA sebagai gelanggang politik GAM". Terkait hal tersebut seorang Informan (C) menyatakan pendapatnya ketika ditanyakan mengenai eksistensi GAM kedepan, sebagai berikut :

"Dalam MoU Helsinki tidak menyebutkan pembubaran GAM, maka sampai kapanpun tetap GAM akan wujud, tidak bubar, Pemerintah RI tidak bisa membubarkan GAM. Termasuk status

keberadaan Wali Nanggroe Hasan Tiro, secara turun menurun sampai kapanpun, kecuali GAM sendiri yang membubarkan diri. Tapi kalau dipaksa maka jika GAM bubar, NKRI juga harus bubar”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman warga tentang isi MoU Helsinki, sebenarnya cukup memadai. Bagi mereka, akar konflik bukanlah masalah ketimpangan, konflik Aceh dan Jawa saja<sup>101</sup>, eksploitasi, maupun dominasi. Namun akar konflik adalah sederhana, yakni ingin merdeka. Dengan demikian, jika GAM masih boleh ada dengan keinginannya untuk merdeka,<sup>102</sup> maka konflik tetap akan berjalan terus. Yang terjadi sekarang adalah berhentinya kekerasan, namun konflik itu tetap ada selama keinginan merdeka tetap ada, termasuk nuansa strategis dan politis tetap ada didalamnya inilah yang disebut sebagai pemberontakan simbolis. Menurut Iwan Gardono, bagaimanapun GAM masih mengadakan “pemberontakan simbolis” meski hal tersebut tidak dikenal dalam aturan formal, seperti Konstitusi Indonesia, otonomi khusus maupun dalam MoU Helsinki. Sedangkan menurut Gubernur Lemhanas, Muladi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2007 pukul 09.11 di Jakarta, adalah sebagai berikut :

“Lemhanas tentu menyikapi apa saja, namanya kajian boleh saja. Saya yakin apa itu Aceh, apa itu pemimpin-pemimpin mantan GAM sudah sepakat dengan NKRI, logis tidak? Apabila Partai GAM dikhawatirkan akan berujung permintaan referendum untuk kemerdekaan, kalau dilihat ini sudah bisa dilihat petanya. Partai lokal berdiri, kemudian menguasai parlemen dan parlemen bisa bicara apa saja, termasuk minta referendum”.

Selanjutnya, Muladi menyampaikan, hasil penelitian lembaganya bahwa GAM masih menginginkan Aceh merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanda-tandanya jelas, GAM sudah menguasai Pemerintah

<sup>101</sup> Menurut peneliti kalau penyebabnya ketimpangan, tentunya banyak daerah lain yang mengalami ketimpangan juga akan melakukan jalan yang sama dengan Aceh. Ketimpangan juga bukan alasan karena masih ada daerah di Jawa yang tertinggal dan mereka tidak melakukan pemberontakan.

<sup>102</sup> Lihat hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan wawancara tatap muka terhadap 1.015 orang yang dipilih secara acak dari wilayah Aceh, pada pertengahan Maret 2006 mendapatkan data bahwa lebih dari separuh Rakyat Aceh masih meragukan GAM benar-benar tidak akan memperjuangkan pemisahan Aceh dari NKRI. Rakyat Aceh masih meragukan apakah perdamaian akan langgeng, artinya GAM tidak sepenuhnya dipercaya akan menghapuskan keinginannya untuk memisahkan diri dari Indonesia. GAM masih akan memperjuangkan keinginannya, namun hanya bersalin strategi dari perjuangan bersenjata ke perjuangan lewat diplomasi. (Kompas, 29 Maret 2006)



Aceh lewat Pilkada 2006 lalu, yang dimenangkan pentolan GAM, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Bila partai GAM nanti lolos dan memenangkan Pemilu 2009, serta menguasai Parlemen Aceh, maka kemerdekaan sudah di depan mata, karena itu dia minta GAM ditumpas secara yuridis.<sup>103</sup>

Selama ini Aceh banyak dilihat dari kacamata Indonesia, mungkin perlu juga kita balik cara pandangnya, bagaimana Aceh melihat Indonesia. Indonesia melihat Aceh dengan sudut pandang yang mengasumsikan satu dominasi, tetapi kalau dengan sudut pandang kedua (dari mata orang Aceh) platform nya adalah akomodasi. Mungkin menarik misalnya bagaimana orang Aceh memaknai Indonesia, memaknai hidup bersama dalam satu platform Republik, dan apakah sebetulnya cita-cita yang ingin kita raih lewat ke-Indonesia-an bersama warga Indonesia.

Menurut Nezar Patria (2008), fase-fase Aceh bersama Republik Indonesia sering sekali dilupakan baik oleh gerakan yang menentang Republik maupun gerakan yang mempertahankan Republik. Padahal kalau dikembalikan kepada fase-fase setelah tahun 1945-1953, fase dimana Aceh menunjukkan kesetiaan dan loyalitas luar biasa mendukung kaum Republikan pada waktu itu mungkin bisa dijadikan platform, bahwa Aceh pernah bersama-sama dengan Indonesia untuk satu cita-cita. Tapi kenapa sekarang cita-cita itu seperti tenggelam. Orang sepertinya lupa bahwa Aceh bersama dengan suku bangsa yang lain untuk mendirikan satu nasion yang kita sebut dengan Indonesia. Aceh pernah membuktikan bersama dengan suku-suku lain/daerah lain di Republik ini melebur mencoba mempertahankan apa yang kita sebut Indonesia. Tapi bagian itu seringkali seperti dilupakan, baik oleh mereka yang mempertahankan maupun melawan Republik. Lebih lanjut Nezar Patria mengatakan,

“Memang ada ketegangan yang boleh dikatakan meningkat dalam enam bulan terakhir di sepanjang Pantai Timur Aceh, dari Banda Aceh sampai ke Langsa, Aceh Timur. Pada umumnya ada banyak aksi penculikan, perampokan dengan motif uang. Jadi kita bisa katakan aksi itu termasuk kriminal, bukan aksi protes politik tidak setuju dengan perdamaian dan lain-lain. Ketegangan yang terjadi di Aceh itu sifatnya kriminal. Saya kira tidak perlu dikhawatirkan

<sup>103</sup> Sementara Wapres Yusuf Kalla tidak terlalu yakin dengan kesimpulan Lemhanas tersebut. Menurut Wapres, orang-orang GAM tidak mungkin melepaskan diri dari NKRI, sebab NKRI adalah sebuah pilihan final antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang tertuang dalam MoU Helsinki, sejumlah pihak juga berpendapat begitu.

secara serius, maksudnya, tidak akan dapat mengancam perdamaian. Yang diperlukan yaitu satu tindakan tepat untuk mengantisipasi atau menangani aksi kriminal ini. Harus secara tepat karena kita tahu banyak pelaku aksi kriminal, seperti yang sudah ditangkap dan diinterogasi polisi adalah bekas anggota kombatan (istilah untuk pasukan tempur darat) yang pernah bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kalau ditangani secara tidak tepat maka seakan-akan gerakan itu memiliki motif-motif lain yang tidak setuju dengan perjanjian damai Helsinki, dan sebagainya”.

Tentang meningkatnya tindakan kriminal di Aceh, Informan K, di Langsa, tanggal 8 Oktober 2008, mengatakan, “Kenapa sekarang GAM memiliki kekuatan, karena publik menganggap mereka masih memiliki senjata, satu-satunya sebagai sumber akan menimbulkan konflik kembali adalah senjata yang sering digunakan untuk tindakan kriminal. Jadi jangan salah kalau tindakan kriminal bukan hanya kepentingan ekonomi, tapi menjelang dan pasca Pemilu 2009 akan lebih kepada kepentingan politik kekerasan”. Selanjutnya Zulkarnaen, berdasarkan hasil sementara FGD, mengatakan bahwa :

“Kondisi riil di Aceh tidak tergambarkan oleh berbagai prediksi bagi terlaksananya sebuah kesepakatan. Di pihak GAM, penerimaan atas inisiatif proses damai melalui dialog diselimuti berbagai maksud lain. GAM yakin tidak bisa mengalahkan TNI. Proses damai hanyalah strategi agar GAM tetap survive. GAM yakin akan terjadi di integrasi di Indonesia seperti halnya Soviet. Bagi GAM, kesepakatan damai antara Indonesia dengan GAM bukanlah hal penting, melainkan GAM hanya membutuhkan upaya-upaya agar dirinya tetap survive hingga saat dis integrasi itu tiba. Proses damai akan menjadikannya aman dari tindakan militer Indonesia. Pembicaraan damai hanya merupakan upaya GAM untuk melakukan konsolidasi organisasi”.<sup>104</sup>

Sementara kekuatiran bahwa GAM tetap bertujuan merdeka, hanya melalui jalur politik, Zakaria (Informan C, di Langsa) menyatakan keyakinannya bahwa tujuan GAM adalah kemerdekaan :

“Setelah pemilu dimenangkan parlok, mungkin mereka akan meneruskan perjuangannya, pasca MoU Helsinki nampak sekali

<sup>104</sup> Iskandar Zulkarnaen, Ketua Pusat Studi Sosial Politik, dan Dosen FISIP Universitas Malikussaleh. Peneliti pada The Aceh Institute. Email: [is\\_zulkarnaen@yahoo.com](mailto:is_zulkarnaen@yahoo.com). Tulisan tersebut merupakan hasil sementara dari penelitian FGD politik pada The Aceh Institute Tahun 2005. Team Peneliti Iskandar Zulkarnaen, M. Akmal, Zulkam, Taufik Abdullah, Muhammad Rizwan.

efoianya dan slogan-slogannya. Parlok kesemuanya sama, maka semakin mudah untuk lepas dari NKRI”.

Namun Nezar Patria menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu :

“Saya kira setelah mereka sepakat dengan perjanjian Helsinki maka persoalan merdeka bukan lagi menjadi platform GAM. Mungkin mereka sudah menafsirkan bahwa yang dibutuhkan sekarang bukan lagi merdeka seperti yang dicanangkan sejak awal, tetapi mencoba mengisi yang mereka yakini sebagai self government, seperti yang mereka sebut dalam tahap-tahap perundingan di Helsinki tiga tahun yang lalu. Saya belum menemukan satu pernyataan politik dari pimpinan-pimpinan GAM seperti Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakaria Zaman bahwa mereka akan terus berjuang untuk memerdekakan Aceh dari Republik Indonesia (RI). Sama sekali tidak ada pernyataan seperti itu. Saya pikir secara politik kelihatannya hal itu bukan lagi menjadi platform bagi GAM, apalagi setelah mereka bertransformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik”.

Kalau keinginan merdeka itu sudah tidak ada, lalu kemana arah perjuangan gerakan politik GAM sekarang? Nezar menjelaskan lebih lanjut :

“Seperti sering mereka ungkapkan dengan bahasa mereka sendiri bahwa mereka ingin memulihkan hak-hak ekonomi dan politik rakyat Aceh, dan membuat apa yang mereka sebut sebagai bangsa Aceh itu kembali bermartabat dan berdaulat atas diri mereka sendiri. Saya tidak tahu sebenarnya masyarakat yang mereka bayangkan ke depan bagi Aceh. Namun kalau dari arah politik, dari arah program yang mereka cita-citakan maka platformnya kurang lebih pada keadilan dan kesejahteraan buat rakyat Aceh”.

Sampai disini sepertinya Nezar perlu diingatkan dengan pertanyaan lanjutan mengenai aspek “bagaimana” memulihkan hak-hak ekonomi dan politik orang Aceh karena sebenarnya yang menjadi perbedaan dengan pemerintah RI adalah dalam hal “bagaimana”, karena tujuannya adalah sama yaitu kesejahteraan rakyat Aceh.

Jikalau pemulihan hak-hak ekonomi dan politik menjadi tujuan GAM, seharusnya GAM sudah selesai dengan ditandatanganinya MoU Helsinki karena hampir semua hak-hak tersebut dipenuhi oleh MoU. Hak-hak rakyat Aceh bahkan melebihi hak-hak warga negara lainnya yang tinggal di provinsi lain. Dari sini bisa dilihat perbedaan pandangan tentang sumber konflik, yang pesimis akan berlangsungnya perdamaian melihat bahwa akar konflik bukan mengenai

kebutuhan dasar manusia (identitas, keamanan, ekonomi) karena sepanjang konflik bisa diterjemahkan kedalam bahasa kebutuhan, sebuah hasil yang memuaskan kedua belah pihak dapat ditemukan (Miall 2002:14). Yang pesimistis menyajikan data tentang pembagian hasil migas antara Aceh dan pemerintah RI dimana bagian untuk Aceh makin besar dan pemenuhan hak-hak politiknya. Dengan terpenuhinya keinginan itu, harusnya hal ini sudah mengakhiri keinginan GAM untuk merdeka, namun buktinya tidak.

Menurut Informan H, di dalam GAM sendiri masih ada faksi-faksi yang ingin merdeka,

“GAM sekarang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, terutama GAM yang benar-benar ingin damai, kedua GAM yang setengah hati untuk damai, kemudian GAM yang sama sekali tidak mau menyerah untuk damai, dengan alasan sudah banyak kurban di pihak GAM yang rela mempertaruhkan nyawa untuk memerdekakan Aceh. Itu tidak hanya cukup ditukar dengan uang beberapa juta rupiah dan tanah beberapa hektar. Saya juga mantan GAM, sekarang ada teman-teman seperjuangan yang dijadikan ajudan, ada yang dapat proyek tapi tidak seluruhnya dapat, saya dulu juga berjuang. Tapi sekarang kami dianggap pengkhianat dan tidak layak mendapatkan bantuan”. (Ketua FORKAB, 24 Juli 2008)

Selanjutnya Informan T mengatakan, “Apapun ceritanya tujuan mereka hanya merdeka, enggak ada lain hanya merdeka, sekarang tergantung pemerintah pusat, tolong lihat betul-betul kondisi Aceh sekarang, kalau pemerintah pusat enggak jeli, ya tunggu aja kedepan Aceh merdeka. Sekarang kita masih terikat sama MoU, tapi nanti kalau sudah ada referendum ingin merdeka, sudah ada pihak dunia lain yang mengatur”. Sedangkan Informan E di Langsa, mengatakan bahwa :

“Memang kalau terbukti Parlok mempunyai agenda tersembunyi maka dengan mereka memperoleh kursi yang signifikan, seperti yang mereka perjuangkan, maka yang sering diilustrasikan oleh LSM asing, dimana ada sebuah provinsi yang bisa merdeka, maka dengan adanya dukungan dari Uni Eropa, plus yang naik dalam kasus Aceh, legislatifnya lebih dari 2/3 adalah pihak mereka, kemudian aparaturnya adalah pihak mereka, dalam hal ini eksekutif, maka secara otomatis status mereka mewakili masyarakat Aceh sudah signifikan. Jadi dengan tanda tangan rame-rame saja, bukti hitam di atas putih, legislatif, eksekutif kemudian didukung oleh tokoh non formal, maka dibentuklah seperti MUNA, lalu dibentuk

lembaga adat baru menyaingi LAKA, maka komplitalah bahwa masyarakat Aceh itu mayoritas layak untuk dilepas, karena mereka sudah mewakili kemauan rakyat, dimana 2/3 legislatif, eksekutif ditambah dengan lembaga-lembaga yang non formal yang mewakili rakyat”.

Yang kemudian menarik untuk dianalisa adalah apa sebenarnya keinginan GAM itu. Keinginan untuk merdeka bisa dipahami karena hal itu menjadi jawaban atas berbagai kesulitan hidup rakyat Aceh. Lebih mudah untuk menjelaskan ke rakyat banyak bahwa kemiskinan mereka itu karena Aceh masih bersama RI, sehingga solusi yang paling mudah diberikan ke rakyat atas problem kemiskinan mereka adalah lepas dari RI. Fenomena ini juga terjadi di berbagai kasus separatisme.<sup>105</sup> Sumber konflik awalnya diyakini karena ketimpangan, penindasan, dan dominasi. Namun setelah wilayah itu merdeka, rakyatnya masih tinggal dalam penindasan, ketimpangan dan dominasi.

Jadi sebenarnya pemberontakan itu bukan alat untuk mengatasi keadaan. Dengan data demikian, peneliti mengambil kesimpulan sementara bahwa ketimpangan, eksploitasi, dan dominasi RI atas kehidupan ekonomi dan politik Aceh bukanlah alasan sebenarnya dari pemberontakan GAM pasca MoU Helsinki. Kemungkinan ada agenda lebih besar lagi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara “saudagar” dan dinamika tersebut yang masih menjadi sumber konflik antara GAM dan Non GAM.

## **B. Perkembangan Konflik Aceh**

Mengapa konflik di Aceh masih berlanjut. Pembahasan ini tidak lepas dari apa yang sudah diuraikan pada pemahaman tentang konflik berlanjut di Langsa. Secara umum hal-hal seperti : sentimen etnis, perubahan struktur konflik dan potensi konflik laten, perbedaan persepsi terhadap perdamaian serta pemberontakan simbolis dapat dikatakan terjadi di hampir seluruh wilayah Aceh, hanya tensi atau nuansa konfliknya cenderung berbeda, karena hal tersebut

<sup>105</sup> Secara umum, diakui bahwa konflik vertikal biasanya diawali dengan munculnya aspirasi dan tuntutan masyarakat berkenaan dengan ketimpangan, ketidakadilan atau aspirasi politik tertentu yang tidak terpenuhi. Dalam situasi demikian ini, ide separatisme dibawa oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI dapat mempengaruhi masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah. Dikutip dari sambutan Meko Polkam, Widodo AS, pada diskusi pembangunan politik dalam rangka resolusi konflik di daerah, di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2004.

dipengaruhi oleh situasi wilayah dan masyarakatnya (daerah basis GAM atau sebaliknya daerah basis yang masyarakatnya menentang atau tidak sepeham dengan keberadaan GAM atau KPA).

Menurut Iwan Gardono Sudjatniko, ketegangan sosial yang mungkin dapat menjadi penghambat perdamaian adalah sebagai berikut :

- “(1) Golongan yang tidak setuju dengan pengintegrasian kembali dan ganti rugi untuk GAM. Karena mereka mau menerima pengintegrasian kembali dengan imbalan ganti rugi akibat konflik.
- (2) Lebih dari 50% masyarakat Aceh meragukan itikad GAM dengan gerakan separatisnya menuntut kemerdekaan benar-benar sudah ditinggalkan. Hal tersebut didukung hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia).
- (3) Permintaan 11 Kabupaten dengan 1,4 juta orang atau 35% dari penduduk Aceh membentuk provinsi baru Aceh Barat Daya dan Aceh Lauser terpisah dengan Provinsi Aceh, namun dalam MoU Helsinki, batas Aceh meliputi semua kabupaten menolak pembentukan provinsi baru, atau separatisme regional.
- (4) Dampak dari pelaksanaan Syariat Islam memungkinkan timbulnya gesekan antara GAM dengan Pemerintah Pusat atau GAM dengan masyarakat Aceh Non GAM.
- (5) Akibat Pilkada 2006, dimana pecundang tidak menerima hasil pemilihan sehingga muncul konflik horizontal”.

Pemekaran ALA dan ABAS, saat ini merupakan dilema bagi Pemerintah Pusat, dan PEMDA Aceh.

“Usulan pembentukan Provinsi Ala dan Abas, sebenarnya sudah ada tahun 2003 sebelum perjanjian Helsinki ditandatangani, dan tidak melanggar demokrasi, untuk memperjelas identitas nasionalisme Aceh, sebagai Aceh baru atau Aceh masa depan, setelah bencana tsunami dan konflik yang menghancurkan segala sendi kehidupan di Aceh dan paska Helsinki. Seharusnya Pemerintah Pusat merespon serius tentang pembentukan Provinsi Ala dan Abas yang ditandatangani oleh para bupati dan ketua DPRD yang bergabung dalam ALA dan ABAS serta didukung oleh masyarakat Ala dan Abas. Untuk meningkatkan percepatan dan penataan pembangunan, keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh, dalam keragaman karakteristik daerah, politik, ekonomi, dan sosial budaya, penegakan syariat Islam, memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat Aceh.” (Informan I, 5 April 2008)

Fenomena dari situasi yang berkembang di Provinsi Aceh dapat dimungkinkan adanya potensi munculnya konflik<sup>106</sup> baru di bumi Aceh, karena persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau kepercayaan, bahwa aspirasi pihak-pihak yang ada dalam anatomi konflik Aceh belum dapat terakomodir atau tercapai secara simultan. Teungku Zulyadi dalam makalahnya yang berjudul Menakar Nasionalisme Masyarakat Aceh, mengatakan bahwa perdamaian Aceh sekarang seperti api dalam sekam, kelihatannya tidak bergejolak namun masih menyimpan bara-bara pemberontakan yang menjadi bom waktu untuk masa ke depan. Meskipun sangat tidak diharapkan hal tersebut akan terjadi serta adanya pergeseran konflik laten menjadi konflik terbuka baik vertikal maupun horizontal.

Disamping hal tersebut di atas, masih ada beberapa hal yang diprediksi dapat merusak perdamaian di Aceh, seperti isu kesetiaan pada NKRI, banyaknya senjata liar yang masih ada di Aceh, masalah pembubaran GAM, kompensasi yang tidak adil, konsolidasi GAM masalah parpol lokal. (Sumber Informan P, 29 April 2008)

Dalam diskusi kelompok di Jakarta tanggal 23 Juli 2008 yang diikuti 7 orang dari kelompok PETA yang mendukung pemekaran Provinsi Ala dan Abas. Terungkap bahwa permasalahan yang masih tertinggal di Aceh sekarang dapat menimbulkan potensi konflik adalah masalah kelompok KPA dan PETA serta FORKAB, isu pemekaran ALA dan ABAS masalah identitas, kemudian masalah ekonomi yaitu kesenjangan sosial dan kecemburuan, masalah politik atau kekuasaan dan masalah prasangka saling mencurigai dan masalah dendam yang sampai sekarang susah untuk dihilangkan.<sup>107</sup>

Masih banyaknya pengungsi korban konflik khususnya dari keturunan Jawa, yang belum berani kembali ke daerah asal mereka karena alasan keamanan dan masih kuatnya dominasi kelompok GAM khususnya di daerah-daerah pedesaan. Disamping tidak tersedianya lapangan kerja, sebagai hal penting dalam

<sup>106</sup> Indra Jaya Piliang, Perdamaian Aceh : Evaluasi dan proyeksi, potensi konflik dalam tubuh GAM bias terjadi pada sejumlah level sebagai berikut :

1) Antara Petinggi GAM dengan komponen dilevel menengah potensi konflik ini menyangkut posisi politik dan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan ekonomi. 2) Antara Pimpinan Menengah GAM dengan level bekas prajurit di lapangan hanya ada 3.000 anggota GAM yang memperoleh dana reintegrasi, selebihnya harus berjuang sendiri. Padahal, anggota GAM lebih banyak dari angka itu. 3) Antara GAM dengan komponen lainnya yang dirugikan selama ini.

<sup>107</sup> Wawancara dan diskusi kelompok dengan pengurus dan anggota PETA, pendukung pemekaran daerah ALA dan ABAS di Hotel Sriwijaya, Jakarta, Agustus 2008.

mengurangi munculnya frustrasi sosial dalam masyarakat. Sehingga rentan terhadap provokasi dan tindakan kriminal ditambah dengan masih adanya senjata api baik laras pendek maupun panjang, dalam genggaman orang-orang tertentu akan sangat berpeluang dan berpotensi munculnya konflik.

Persoalan integrasi terutama tentang penerimaan sosial masyarakat terhadap mantan anggota GAM dan bagaimana adaptasi kehidupan mereka setelah cukup lama berada di gunung. Sehingga perlu normalisasi kehidupan terkait pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya. MoU Helsinki terkesan penyelesaian konfliknya bermuara pada GAM dan Pemerintah RI, sedangkan masyarakat Aceh khususnya yang Non GAM belum tersentuh, tidak mendapat perhatian dan berpotensi menimbulkan persoalan tersendiri.

Menurut laporan hasil pemantauan World Bank/DSF konflik di Aceh 31 Januari 2006 (hasil wawancara), bahwa di Aceh masih seringkali terjadi perselisihan atau ketidaksepahaman diantara komunitas di Aceh terhadap MoU Helsinki, seperti kasus berikut ini :

“(1) Kepala Desa Aceh Utara, “Masyarakat tidak mau banyak tahu mengenai MoU karena setelah itu mereka akan mempunyai banyak pikiran. Meskipun begitu, ada beberapa yang bilang MoU berarti kemandirian. Beberapa bilang itu berarti federalisme, beberapa bilang bila nanti kita memilih partai politik lokal Aceh bisa bebas.  
 (2) Pemimpin Pemuda Anti Separatis Aceh Selatan, “Bila kamu bertemu masyarakat dan terutama GAM, kamu perlu menjelaskan pada mereka bahwa arti sebenarnya dari MoU Helsinki adalah Aceh akan tetap menjadi bagian dari Indonesia dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) diterima. Jika kamu mengatakan pada mereka, mereka akan mendengar, beberapa GAM menolak mengakui ini dan berkata bahwa MoU tidak seperti itu.”

Gambaran keadaan tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Sekjen PETA, Informan B tanggal 2 September 2008 sebagai berikut :

“Abdul Wahab (35) Ketua PETA Kecamatan Cot Girik meninggal, kemungkinan gara-gara Wahab melarang orang untuk membayar pajak Nanggroe dan menyarankan untuk menyumbang Meunasah. Diberondong dengan senjata Ak, didekat rumah tetangganya yang sedang pesta dan pelaku sempat menanyakan “siapa lagi” sebelum pergi dengan motor Jupiter MX, kejadian tersebut bisa juga ada kaitannya dengan kejadian tahun 2006 lalu ketika salah seorang keponakan Wahab yang bekerja diculik oleh kelompok KPA (Kelompok Sikliwon) dan ketika itu kita lakukan tindakan culik balas, yang kami culik saat itu Ipar Sikliwon (Ibrahim) sebagai



barter. Dengan peristiwa ini, maka catatan pahit sudah bertambah buat kami orang-orang yang cinta NKRI. Oleh karena itu, kami sangat berharap pada yang berwenang untuk benar-benar dapat mengambil kebijakan yang tidak menguntungkan sepihak. Kami menilai proses perdamaian di Aceh hanya menguntungkan pihak-pihak yang anti NKRI.

Perjuangan kemerdekaan di Aceh dapat mengalami transformasi dari pertempuran bersenjata, ke pertempuran politik. KPA dan Parpol lokal dapat menjadi legitimasi dan formalisasi Gerakan Aceh Merdeka. Bila pada saatnya kemampuan politik ini dapat memobilisasi dukungan masyarakat, maka tuntutan referendum bagi kemerdekaan Aceh tidak dapat dihindarkan (Prasojo, 2006. 25). Seorang Informan F, 9 September 2008 di Jakarta mengatakan :

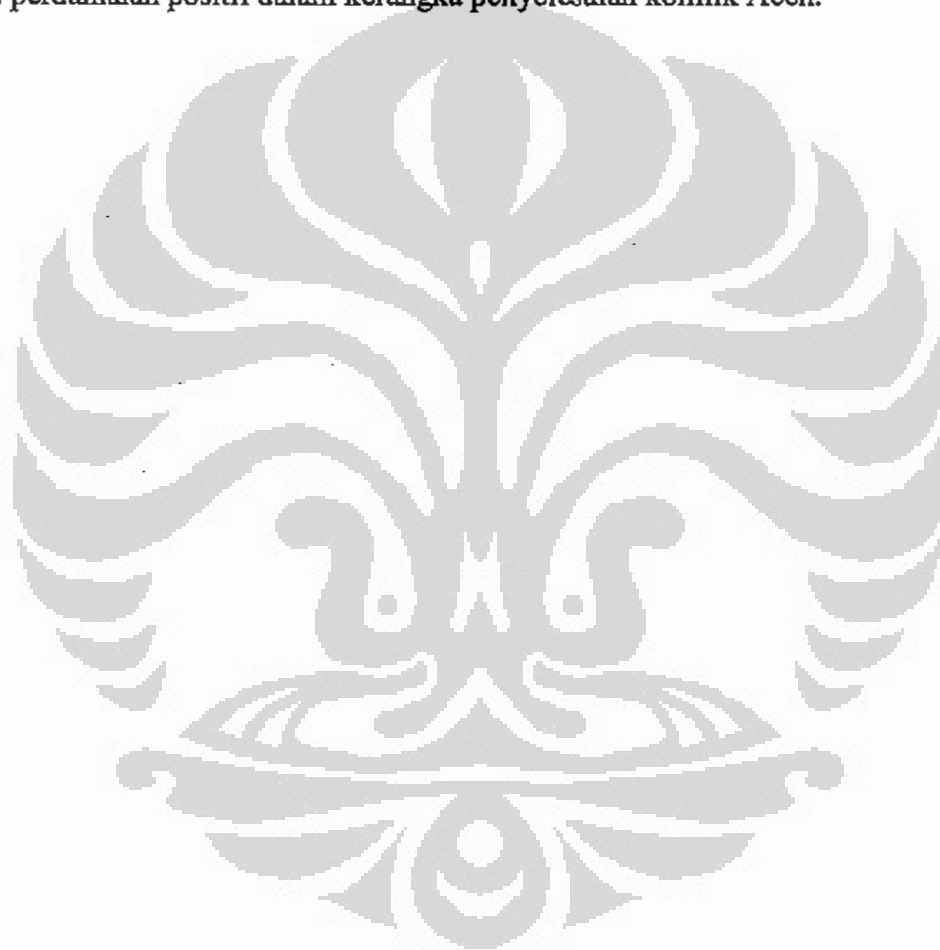
“Sebenarnya ide untuk membuat partai lokal sudah ada sejak zaman Gusdur jadi Presiden dan baru terealisasi sekarang setelah MoU Helsinki. Indonesia lebih susah berdaulat di Aceh dibandingkan pihak asing. Sekarang MoU Helsinki dijadikan segala-galanya sebagai undang-undang. Nanti kalau partai lokal menang, rencananya tahun 2012 merintis untuk merdeka melalui yudisial review terhadap UUPA, selanjutnya menentukan dua pilihan lewat keinginan mendeklarasikan kemerdekaan langsung atau lewat referendum dan tahun 2014 merdeka penuh lepas dari NKRI”.

Melalui pembentukan partai lokal, setidaknya dapat diprediksi bisa menjadi alat GAM dalam menggalang kekuatan massa dengan mengalihkan pada perjuangan politik untuk tujuan akhir memisahkan dari NKRI. Sebab dalam kesepakatan MoU Helsinki tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa GAM akan dibubarkan atau membubarkan diri, sehingga kekhawatiran akan terjadinya dis integrasi bangsa atau lebih spesifik Aceh lepas dari NKRI seperti Timor-Timur mungkin hanya masalah waktu.

Bagaimanapun para pihak di Aceh, masih merasa ada utang yang belum lunas terbayar. Utang itu ada jauh sebelum diberlakukannya otonomi khusus, yakni aspirasi pembentukan Provinsi Aceh Lauser Antara (Provinsi ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (Provinsi ABAS). Untuk merespon aspirasi tersebut, merupakan tugas konstitusional penyelenggara negara, khususnya DPR-RI untuk menindak lanjuti/ membahas usulan pembentukan kedua provinsi tersebut dalam bentuk UU, sekaligus sebagai ikhtiar untuk memberi kontribusi sebesar-besarnya

bagi penyelesaian masalah Aceh, dalam perspektif pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh Provinsi Aceh. Agar dicapainya perdamaian yang sesungguhnya, berdimensi jangka panjang dan permanen.<sup>108</sup>

Perdamaian positif yang diharapkan oleh masyarakat Aceh kedepan masih dalam proses panjang dan masih belum dapat diprediksi dinamikanya. Potensi konflik yang ada masih merupakan problema utama. Diperlukan perhatian dan peran positif dari berbagai pihak yang terlibat untuk menetralsir permasalahan, yaitu resolusi konflik yang mengarah pada rekonsiliasi dan transformasi konflik, menuju perdamaian positif dalam kerangka penyelesaian konflik Aceh.



---

<sup>108</sup> Eka Santosa/Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, *Meneropong Masa Depan Aceh, Pembentukan Provinsi ALA dan ABAS Sebagai Solusi*, Makalah disampaikan dalam diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan tanggal 24 Juli 2008 di Jakarta. Sedangkan dalam perolehan Pemilu 2009, untuk kursi DPRA : Partai Aceh mendapatkan 34 kursi, Partai Sira 1 kursi, Partai Daulat Aceh 1 kursi dan Parnas 33 kursi.

## BAB V RESOLUSI KONFLIK

### A. Pendahuluan

Resolusi konflik,<sup>109</sup> dapat menciptakan beragam tahapan penyelesaian konflik, konflik di Langsa khususnya dan Aceh pada umumnya, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Perlu dicarikan solusinya agar tidak bermuara negatif, artinya konflik tersebut dapat berujung pada tindakan kekerasan, yaitu : pertengkaran/ penyanderaan, penganiayaan, pembunuhan, diskriminasi dan berbagai tindakan kekerasan lainnya, sehingga menjadi konflik terbuka karena perdamaian positif sulit diwujudkan.

Proses perdamaian di Aceh, diperlukan normalisasi kehidupan sosial dan normalisasi hubungan antar kelompok yang berbeda atau berseberangan. Agar potensi konflik kekerasan dan tindakan kriminal, yang bisa menjadi pemicu konflik antar warga masyarakat/kelompok dapat diredam. Dengan menanamkan sikap saling percaya diantara internal anggota kelompok maupun eksternal dengan anggota kelompok sosial lain.<sup>110</sup>

Konflik sebagai sebuah proses, biasanya diawali oleh adanya penyebab konflik, kemudian mengapa konflik masih tetap berlanjut di Langsa (+ Aceh)<sup>111</sup>, selanjutnya dapat berkembang menjadi sebuah gerakan nyata, dan terbukanya kembali konflik kekerasan yang sudah berlangsung lama, secara umum dipahami antara kelompok Aceh GAM (GAM/KPA) dengan Aceh RI (FPSG/PETA). Sehingga proses resolusi konflik merupakan langkah yang perlu ditempuh, untuk mencegah terjadinya letupan peristiwa kekerasan, antara Aceh GAM dengan Aceh RI sekaligus langkah menuju perdamaian positif. Berikut ini, secara khusus akan

<sup>109</sup> Menurut Miall, resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa struktur konfliknya telah berubah. (Miall; 2002 : 3)

<sup>110</sup> Interaksi sosial dalam kelompok sosial dapat dilihat dari kelompok yang anggota-anggotanya saling mengenal dan ada kerja sama (internal kelompok). Disisi lain ada kelompok yang anggota-anggotanya diartikan sebagai lawan oleh kelompok lainnya (eksternal kelompok).

<sup>111</sup> Aceh GAM, dapat dipahami sebagai anggota GAM, atau masyarakat yang simpati dan mendukung perjuangan GAM/KPA, sedangkan Aceh RI adalah masyarakat Non GAM, khususnya mereka yang menjadi anggota Front/PETA dan masyarakat yang simpati atau mendukung keberadaannya (FPSG/PETA dan FORKAB).

memberikan gambaran tentang Aceh GAM dan Aceh RI, sebagai bagian penelitian ini.

Secara umum kelompok dan aktor konflik Aceh dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu : *pertama* adalah aktor dan kelompok yang terlibat langsung dalam konflik Aceh sejak 1976-2003 yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (baca: Pemerintah RI). Termasuk dalam kategori Pemerintah RI adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan aparaturnya, serta TNI dan POLRI. *Kedua*, aktor dan kelompok yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik. *Ketiga*, aktor dan kelompok di luar kategori pertama dan kedua yang dapat disebut sebagai “aktor dan kelompok gelap” dalam konflik Aceh. (Nurhasim; 2003 : 33)



**Tabel 16**  
**Aktor-Aktor Dalam Konflik Aceh**

GAM		Pemerintah RI	Masyarakat Aceh	
Aktor Di Aceh	Aktor Di Luar Aceh		Aktor Perlawanan	Aktor Diluar Ketiganya
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Idiologi Tokoh masyarakat formal/non formal (ulama, intelektual, eksekutif, legislatif, bisnis)</li> <li>- Dendam Keluarga GAM korban konflik, AGAM/KPA</li> <li>- Cantoi Preman, mafia, birokrat, kontraktor, avonturir politik</li> <li>- Elit/masyarakat pendukung GAM/ tidak transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GAM Hasan Tiro di Swedia</li> <li>- MP GAM di Malaysia</li> <li>- Kelompok/Negara yang berkepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Pusat dan Aparaturnya</li> <li>- TNI</li> <li>- POLRI</li> <li>- Kelompok/elit yang berkepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Front Perlawanan Separatis GAM/ korban kekerasan</li> <li>- GAM (Cuak) FKWJ dan Pujakesuma</li> <li>- Elit/masyarakat Pendukung front perlawanan/tidak transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NGO's</li> <li>- Intelektual/mahasiswa</li> <li>- Tokoh masyarakat formal/non formal</li> <li>- Masyarakat netral/ tidak transparan</li> <li>- Masyarakat Aceh, tinggal di luar Aceh</li> </ul>

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

### A.1. Aceh GAM (GAM / KPA)

Hasan Tiro<sup>112</sup> tahun 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Gerakan Aceh Merdeka (GAM), muncul diantaranya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat. Lewat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perkembangannya memanfaatkan isu-isu kolonialisme Jawa Indonesia, eksploitasi terhadap sumber-sumber alam di Aceh, hal tersebut dimaksudkan untuk meraih simpati masyarakat. Berhasilnya pembentukan komunitas basis yang loyal pada GAM, membuat GAM berkembang menjadi suatu organisasi yang kuat, baik dari anggota maupun kekuatan militernya.

Deklarasi kemerdekaan tersebut ditanggapi oleh Pemerintah RI, dengan menganggap bahwa, GAM sebagai kelompok pemberontak (separatis), dengan tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah munculnya GAM, sebenarnya tidak terlepas dari sejarah konflik Aceh sebelumnya, yaitu antara Pemerintah RI dengan DI/TII Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureuh.<sup>113</sup>

GAM lahir pada masa Orde Baru, secara sosiologis yang menjadi penyebab munculnya GAM, karena sebagian masyarakat Aceh, terutama mereka yang menjadi tokoh-tokoh GAM, memandang bahwa Pemerintah Orde Baru tidak mempunyai kesungguhan dalam membangun wilayah Aceh. Disamping tidak mempunyai niat mensejahterakan masyarakatnya.

<sup>112</sup> Lihat Bhakti, Hasan Muhammad Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada tahun 1976. Jika dia mengubah pikirannya dikemudian hari, terutama sejak ia belajar di New York di tahun 1960-an, hal ini terutama berkait dengan kekecewaannya terhadap cara pemerintah di Jakarta dalam memperlakukan Aceh. Terlebih setelah penemuan cadangan gas alam dalam jumlah besar pada tahun 1971 di Arun, Lhokseumawe. Pemberontakan Aceh kembali muncul dengan nama baru "Gerakan Aceh Merdeka" (GAM) yang dipimpin oleh Hasan Tiro walau gerakan ini baru didirikan pada 20 Mei 1977, Hasan Tiro memilih hari lahir GAM pada tanggal 4 Desember 1976. Sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera.

<sup>113</sup> Menurut Sulaeman, "Sejak 1 September 1954, ketika itu masih dalam masa DI/TII di Aceh, Hasan Tiro yang berada di New York mengirim sepucuk surat ultimatum kepada Perdana Menteri Sastro Amijoyo dengan tuntutan agar Pemerintah RI menghentikan *genocide* atau penumpasan pemberontakan DI/TII, melepaskan semua tahanan dan melakukan perundingan dengan pemimpin pemberontak. Jika sampai batas waktu tanggal 20 September 1954 semua tuntutan itu tidak diindahkan, ia mengancam akan membuka Perwakilan Diplomatik DI/TII di PBB dan seluruh dunia" (Sulaiman, 2000:13). Sedangkan menurut Rahman, jika ditelusuri latar belakangnya, sebenarnya cita-cita pembentukan GAM itu sendiri sudah berlangsung cukup lama. Benihnya sudah ditanam sejak 1 September 1954 dan nampak separatisnya cukup menonjol, karena ingin membentuk perwakilan di PBB dan seluruh dunia, diluar perwakilan Negara Republik yang sudah ada. Sejak awal tujuan Hasan Tiro dengan GAM nya adalah kemerdekaan diluar negara Indonesia yang sudah merdeka. (Rachman, 2004 : 36)

Label<sup>114</sup> yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada gerakan yang menentang di daerah berbeda-beda. Bagi Pemerintah Pusat tuntutan terkait masalah ekonomi dan politik biasa disebut dengan “GPK” (Gerakan Pengacau Keamanan). Sementara dari perspektif Aceh, sikap yang memprotes Pemerintah Pusat tersebut dinamakan dengan sebutan “GAM” (Gerakan Aceh Merdeka). Dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan “GSBA” (Gerakan Separatis Bersenjata Aceh). Oleh label inilah, para pendukung dan tokoh separatis, mengunggulkan dan mengumandangkan nama pergerakan mereka dengan sebutan GAM dan dilengkapi oleh bala militernya dengan sebutan “AGAM” (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka) atau “TNA” (Tentara Nasional Aceh).

Para tokoh GAM dan AGAM inilah, yang membakar semangat sebagian rakyat Aceh untuk bangkit memperjuangkan kemerdekaan Aceh, memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>115</sup>. Hal ini berbeda dengan munculnya DI/TII Aceh, dimana para tokohnya berupaya untuk tidak memisahkan diri dari Negara RI, tetapi cenderung pada keinginan agar menjadikan Islam sebagai alternatif bentuk Negara Indonesia, dikenal sebagai NII (Negara Islam Indonesia). Karena NII dianggap lebih menjanjikan bagi kemajuan Aceh dan masyarakatnya.

Pasca DOM, berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, politik dan agama telah memberikan sumbangan bagi munculnya kembali perasaan dan pandangan antipati luas terhadap Pemerintah Pusat. Akan tetapi tidak semua rakyat Aceh bersimpati dan mendukung atau menjadi anggota organisasi tersebut. Bahkan secara terang-terangan mereka yang tidak sepaham dengan GAM, justru mengadakan perlawanan. Bagi GAM kemerdekaan Aceh adalah harga mati

<sup>114</sup> Pembahasan dalam teori labeling menekankan pada dua hal yakni : (1) menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang/kelompok-kelompok tertentu diberi label. (2) Pengaruh/efek dari label tersebut sebagai suatu konsekwensi dari perbuatan yang telah dilakukan. (William; 1988 : 4)

<sup>115</sup> Menurut Smelser (1962 : 9), terdapat empat komponen bagi suatu tindakan sosial yang disebut tingkah laku kolektif, yakni : (1) gerakan yang berorientasi nilai, yaitu gerakan kolektif yang dimobilisasi oleh kepercayaan umum yang mengimpikan perumusan ulang, nilai-nilai. (2) gerakan yang berorientasi norma, adalah mobilisasi tindakan yang didasari oleh kepercayaan umum yang mengimpikan ulang perumusan ulang norma-norma. (3) ledakan kebencian adalah mobilisasi tindakan atas dasar kepercayaan umum untuk menuntut tanggung jawab dari suatu pranata atas suatu keadaan/peristiwa yang tidak dikehendaki. (4) kegilaan dan kepanikan adalah bentuk-bentuk tingkah laku yang dilandasi oleh suatu redefinisi umum terhadap fasilitas yang ada.

karena merupakan suatu langkah perlindungan terhadap sejarah pemerintahan di Tanah Aceh. (Rachman, 2004 : 44)

Jika dilihat dari namanya sebenarnya sudah sangat jelas apa tujuan gerakan ini, yaitu suatu kemerdekaan. Sebagaimana Hasan Tiro dalam deklarasi kemerdekaan Aceh Sumatera (*Declaration of Independence of Aceh Sumatera*) pada tanggal 4 Desember 1976 :

“Kami Rakyat Aceh Sumatera menggunakan hak kami bagi penentuan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah pemerintahan terhadap tanah air kami, dengan ini memperlakukan bahwa diri kami bebas dan merdeka dari segala kontrol politik region asing Jakarta dan rakyat asing di Pulau Jawa. Kita, Rakyat Aceh, Sumatera, tidak akan berselisih dengan orang-orang Jawa jika mereka tinggal di negeri mereka sendiri, dan jika tiada mencoba menjadi penguasa atas kita. (Nurhasim. 2003)

Latar belakang munculnya GAM sama sekali tidak mengemukakan dengan cukup kondisi-kondisi yang mengutamakan Islam sebagai dasar dari munculnya gerakan tersebut. Pulangnya Hasan Tiro ke Aceh dalam rangka mendeklarasikan GAM (1976) justru membawa perubahan konsep, dimana konsep kenegaraannya banyak bertentangan dengan Islam serta tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat Aceh. Disamping itu banyak persoalan kontroversial yang dimunculkan oleh Hasan Tiro sehingga melahirkan sikap pro dan kontra dengan teman seperjuangannya sejak awal. (Al Chaedar, 1999)

Menurut Solahudin Wahid (Komnas HAM), bahwa : di daerah-daerah pedalaman orang takut pada GAM, memang ada yang bersumpah pada GAM. Sementara itu GAM sendiri juga beragam, ada GAM yang ideologis ingin memisahkan diri dari NKRI, ada pula yang jadi GAM karena korban Operasi Militer. Ada lagi GAM yang preman dan residivis, serta ada GAM yang oportunist (Suara Karya, 11 Oktober 2003). Sedangkan menurut Suradi, “ada yang disebut GAM Radikal, yaitu kelompok GAM beraliran keras, mereka lebih senang melakukan pembunuhan, perampokan, pembakaran gedung sekolah dan rumah penduduk, kontak fisik dengan anggota TNI/POLRI dan bagi siapa yang tidak mendukung perjuangan GAM. Sedang GAM gadungan adalah suatu kelompok yang memanfaatkan dan mencari keuntungan dengan adanya konflik, guna dapat merampok, teror dan pemerasan terhadap rakyat”. (Suradi; 2003 : 40-41)



**Tabel 17**  
**Kategori Dan Jenis GAM Di Aceh**

<b>Gam</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
Idiologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh masyarakat (Formal, informal)</li> <li>- Kaum intelektual</li> <li>- Kelas menengah</li> <li>- Tidak transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyebarkan opini, dan paham separatis</li> <li>- Tidak terlibat langsung dalam gerakan bersenjata</li> <li>- Mendukung dan mencari logistik, dan dukungan politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merdeka</li> <li>- Ekonomi</li> <li>- Politik</li> </ul>
Dendam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generasi dendam akibat operasi militer, (keluarga korban konflik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlibat langsung dalam gerakan bersenjata, sangat militan dan menjadi inti dalam gerakan bersenjata</li> <li>- Dalam struktur komando GAM</li> <li>- Terlibat tindakan kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merdeka</li> <li>- Balas dendam</li> <li>- Ekonomi</li> </ul>
Cantoi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preman</li> <li>- Mafia</li> <li>- Birokrat</li> <li>- Kontraktor</li> <li>- Avonturir politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak dalam struktur komando, tapi patuh pada komando</li> <li>- Terlibat langsung/tidak langsung dalam tindakan kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi</li> <li>- Karir</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Pekerjaan</li> </ul>

Sumber : Diolah berdasarkan hasil wawancara

Seorang Informan J, di Langsa, 24 Juli 2008, mengatakan bahwa :  
 “mereka yang dulu hidup dilayani oleh penduduk, karena dibawah ancaman senjata tidak pernah kesulitan memenuhi kebutuhannya, namun sekarang mereka harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan segala keterbatasannya, ditambah lagi menanggung beban keluarga. Sementara realita yang sekarang dihadapi tidak mendukung untuk mencari pekerjaan dan menafkahi keluarganya”.

The World Bank Report 2006, menyimpulkan bahwa :

“konflik antara pemerintah RI dan GAM yang berlangsung sejak tahun 1970 dan telah menelan ribuan korban jiwa, akhirnya menemukan titik terang dengan diakhirinya konflik melalui penanda tangan perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang difasilitasi oleh

Pemerintah Swedia karena beberapa petinggi GAM memang bermukim di negara itu. Delapan bulan setelah terjadinya bencana tsunami di Provinsi Aceh, tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2005, nota kesepahaman damai RI dengan GAM ditandatangani”.

Data yang telah dihimpun oleh The World Bank mengenai pekerjaan aktivis GAM, sebelum bergabung dengan Gam adalah sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Pekerjaan Aktivitas GAM Sebelum Bergabung Dengan GAM**

No	Jenis Pekerjaan Sebelum Menjadi Aktivis GAM	Prosentase Jumlah
1	Petani	30,2 %
2	Pedagang Kecil	19,8 %
3	Pelajar	10,4 %
4	Bekerja secara temporal	8,9 %
5	Nelayan	7,8 %
6	Tidak memiliki pekerjaan	5,4 %
7	Pedagang besar	3,2 %
8	Sopir	3,1 %
9	Service	2,0 %
10	Lainnya	9,6 %

Sumber : The World Bank 2006

Dari data tersebut terlihat hanya sekitar 25% dari aktivis GAM yang sebelumnya bekerja, sedangkan sisanya dapat dikatakan belum memiliki pekerjaan permanen. Sehingga pasca Helsinki masih perlu perhatian dan reformasi bidang sosial-ekonomi melalui program dan proses pendampingan, peningkatan kehidupan sosial ekonomi dan jaminan masa depannya, termasuk keluarganya. Sementara masih ada banyak anggota GAM yang tersebar di luar negeri, seperti Malaysia, Swedia atau Thailand bahkan di Aceh sendiri. Namun tidak ada jaminan bahwa semua anggota GAM tersebut akan patuh pada pimpinan GAM yang berada di tanah air, maupun di luar negeri.

Pasca penandatanganan nota kesepahaman damai tersebut, ada 840 pucuk senjata api yang diserahkan oleh GAM, dan ada sekitar 3000 mantan TNA dan yang kembali bergabung dengan Pemerintah RI, yang dalam perkembangannya berubah menjadi KPA, sedangkan yang non kombatan ada sekitar 15.000 orang

lagi (Ketua FORKAB). Selanjutnya dalam penelitian ini, disebut sebagai Aceh GAM.

## A.2. Aceh RI (FPSG / PETA)

Latar belakang terbentuknya front :

“Negara saya dalam UUD 1945 pada pasal 30 menerangkan bahwa apabila negara dalam keadaan bahaya, maka semua warga negara wajib bela Negara, dan pada saat itu pemerintah menyatakan Aceh dalam keadaan bahaya untuk itu secara bersama-sama kami tergugah membela Negara sesuai pada UUD 1945 pasal 30. Tidak ada organisasi yang membawahi front, namun ada cabang-cabang dan namanya juga sendiri-sendiri, namun semua dibawah saya. Agar perdamaian ini tercapai GAM jangan lagi membunuh, menculik, mengambil pajak Nanggroe, namun kenyataan dimana-mana GAM tetap membunuh, menculik, intimidasi, sedangkan saya dan rakyat Aceh menginginkan damai. Kami lebih suka mati syahid membela NKRI dan melawan daripada mati dianggap cuak dan hal itu hina bagi kami. Saudara saya dan banyak anggota keluarga front yang mati dibunuh karena dituduh cuak untuk itu kami melawan”<sup>116</sup>

Aktivitas front semuanya sama menginginkan perdamaian dan melindungi rakyat. Tugas front sama diseluruh Aceh yaitu melindungi rakyat dan sama-sama membangun Aceh (Informan A, 7 Februari 2008). Sementara informan B, mengatakan bahwa : pemulihan keamanan, khususnya di Kabupaten Bireun dan umumnya di Aceh dari segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh GAM, dan atas kesadaran sendiri dan tanggung jawab, kami dari masyarakat perlu untuk membentuk Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG). Sehingga dapat memberantas GAM tersebut sampai ke akar-akarnya karena GAM telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang membawa penderitaan secara berkepanjangan dan tidak dapat ditolerir. (Informan B, 9 Februari 2008)

<sup>116</sup> Dikutip dari wawancara pers, antara Sofyan Ali (YAN PT) Ketua Front Perlawanan Separatis GAM Provinsi Aceh dengan wartawan The Asahi Shimbun Jepang a.n Takeshi Futitani dan Muhamad Surya sebagai juru bicara dan didampingi jurnalistik The Asahi Shimbun Lhokseumawe Sdr. Ayi Jepriana, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2005, pukul 14.00 WIB di Kantor Front Jalan PJKA , Bireuen.



**Pembakaran Bendera GAM oleh FPSG**

Dalam kondisi konflik, maka sadar ataupun tidak sadar setiap yang berselisih akan berusaha untuk meningkatkan dan mengabdikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam diantara sesama anggotanya membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama (Nasikun, 1989 : 12). Di Aceh muncul kekuatan baru setelah kekuatan GAM dan TNI/POLRI (Pemerintah) yaitu kekuatan masyarakat, yang mengatasnamakan Front Perlawanan Separatis GAM. Sebagian besar terdiri dari para keluarga korban akibat tindak kekerasan GAM, yang masih menyimpan rasa dendam untuk menuntut balas kematian keluarga mereka, yang dianggap Cuak.

Istilah cuak dalam pandangan GAM adalah :

“..... bagi GAM bahwa pertarungan kekuasaan memiliki makna sebuah resistensi politik akibat kezaliman yang dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah dan seluruh aparat dalam pandangan GAM adalah penjajah. Sebagaimana mereka menisbatkan kepada Belanda pun kepada pendukung pemerintah. Mereka dianggapnya sebagai antek-antek penjajah, istilah yang diberlakukan dalam kalangan mereka adalah para Cuak. Sikap politik ini kemudian menjadi doktrin dalam perjuangan mereka. Namun sayangnya mereka pun dalam menjual ide-idenya kepada masyarakat lewat berbagai tindakan kekerasan”. (Abu Jihad, 2001 : 11)

Sementara dalam Statement Yusra pada tanggal 29 Juli 2001, program Hasan Tiro semenjak ia berada di Aceh, gunannya untuk mengubur para cuak, Sipai (sebutan TNI/POLRI versi GAM) dan orang Aceh yang bergabung dengan pemerintah pusat (Abu Jihad, 2001 : 38). Orang kita yang dianggap Cuak dan dibunuh oleh GAM tidak sedikit jumlahnya, bahkan sampai pasca MoU, kami

masih dijadikan sasaran seperti yang terjadi di Aceh Tengah dan Bireun. (Informan B, 24 Juli 2008)

Sebenarnya embrio tumbuhnya kelompok anti separatisme atau kelompok yang pro terhadap pemerintah pusat,<sup>117</sup> dapat dikatakan telah ada seiring dengan berkobarnya konflik GAM dengan Pemerintah RI, meski eforia munculnya kelompok-kelompok tersebut justru nampak setelah jatuhnya orde baru. Dalam kasus konflik Aceh, timbulnya kelompok-kelompok yang anti separatisme dan cenderung pro pusat, diantaranya sebagai dampak dari berbagai tindakan kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh GAM, sejak reformasi mulai bergulir di Indonesia.<sup>118</sup> Masyarakat yang dianggap bertentangan dengan idialisme perjuangan GAM, dan membantu pemerintah pusat di cap sebagai Cuak.<sup>119</sup> Sehingga secara terus menerus menjadi sasaran teror, intimidasi, penculikan dan pembunuhan sementara aparat keamanan, ada keterbatasan dan tidak dapat melindunginya, sehingga ada istilah pembantaian para Cuak di Langsa (+ Aceh).

Selanjutnya Abu, mengatakan bahwa :

“Amat disayangkan sekali dari seluruh rangkaian kejahatan politik negara ini, kenapa milisi bersenjata GAM Hasan Tiro sampai ikut bermain dalam menciptakan anarkhisme di Aceh? Sementara rakyat butuh perlindungan, akan tetapi mereka menjadikannya sasaran. Alasannya, karena rakyat tidak mendukung perjuangan, maka dianggap sebagai musuh. Jadi siapa saja dari Rakyat Aceh yang tidak mau terlibat dalam perjuangan GAM kena hukum diperangi. Sudah banyak pengakuan penduduk baik dari para pedagang, pegawai, ulama, tokoh masyarakat yang dirinya diancam akan dibunuh karena tidak menyeter dana. Mereka akan menghabiskan semuanya”. (Abu. 2000, 111)

Kalau dicermati, sebenarnya tindakan kekerasan seperti pembunuhan dan penculikan terhadap warga masyarakat Aceh, merupakan metoda teror politik

<sup>117</sup> Fenomena konflik di daerah-daerah di Indonesia, dalam perkembangannya kemudian muncul pembelahan-pembelahan kelompok yang pro dan kontra dengan kekuasaan Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang terjadi di Aceh antara kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan kelompok FPSG (Front Perlawanan Separatis GAM).

<sup>118</sup> Catatan tentang pelanggaran GAM : Human Right Watch (2003, Vol 13 : No. 4) prihatin terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh GAM. GAM mempunyai catatan panjang tentang perilaku penyiksaan di Aceh. Mereka yang paling beresiko terkena kekerasan oleh GAM, seperti etnis Jawa, atau mereka yang dicurigai menolong militer.

<sup>119</sup> Para korban akibat tindakan kekerasan GAM, seperti pembunuhan para cuak, setidaknya menyimpan rasa dendam untuk menuntut balas kematian keluarga mereka. Dalam perkembangan kasus konflik Aceh, kebanyakan yang menjadi korban, adalah orang yang lemah, berperan pasif dan tidak agresif, tidak ikut serta menyumbang bagi terjadinya pembunuhan atas dirinya, atas kesalahan pelaku yang dianggap sebagai orang agresif dan kejam. (Sheley, 1987 : 132)

yang sengaja diperlihatkan pada lawan politiknya, bahwa mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan yang perlu diperhitungkan. Teror politik, seperti penyanderaan dan intimidasi sengaja diciptakan sebagai strategi yang dianggap paling efektif untuk merebut perhatian massa dan memaksakan kehendak. Wawancara tanggal 10 Februari 2008 dengan Ketua Front/PETA (Informan A) tentang latar belakang terbentuknya front bahwa ada tiga akidah yang telah dilanggar oleh GAM yaitu :

“Menganggap kafir bagi masyarakat Aceh yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghalalkan darah orang Jawa untuk dibunuh karena dianggap sebagai bangsa penjajah, serta memeras, merampok, menculik, menyiksa dan membunuh masyarakat yang bertentangan dengan GAM sebagai teror agar mereka patuh terhadap kekuasaan GAM”.



Depan Café Citra Jl. A.Yani Kota Langsa

Orang-orang yang lemah pada akhirnya membentuk suatu kelompok dan merasa senasib untuk mengadakan perlawanan. Anggota front, bukan menganggap saudara kita berbeda faham sebagai musuh, apabila mereka tidak menjadikan dirinya sebagai musuh, mereka tidak memusuhi masyarakat yang cinta kepada tanah air, bila mereka memusuhi masyarakat yang cinta kepada tanah air maka saat itu pula menjadi musuh kita bersama (Sumber Informan G, 26 Juli 2008). Sementara alasan Informan B, untuk bergabung dengan FPSG, adalah karena : “rumah kakek dan nenek saya dibakar, mereka dibunuh dan baru tahun 2003 saya berani mencari dan menemukan makam mereka setelah dikasih tahu

orang kampung yang disuruh membantu pemakamannya. Saya dari kecil ikut kakek dan nenek saya, maka saya bergabung dengan front". (Sumber Informan B, 9 Februari 2008)

Dengan demikian kenyataannya bahwa masyarakat buat GAM akan menjadi musuh baru, dan dalam perspektif pertarungan tersebut, bahwa kekuatan rakyat, menjadi bergabung dengan TNI/POLRI dan menjadi gerakan sosial<sup>120</sup> yang anti separatisme dan pro kepada pemerintah pusat. Dalam AD/ART FPSG jelas dikatakan bahwa maksud dan tujuan front adalah *pertama* membangun ke Indonesiaan pemikiran masyarakat Aceh ke dalam bingkai NKRI, *kedua* mengikis habis ideologi/faham separatis GAM secara menyeluruh.<sup>121</sup>

Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di era reformasi mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif terkait masalah keamanan. Perputaran ekonomi, dan sebagian roda pemerintahan di Aceh tidak berfungsi khususnya daerah-daerah yang intensitas konfliknya sangat tinggi seperti Pidie, Bireun, Aceh Utara dan Aceh Timur. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari.

Pembunuhan misterius, penculikan dan pemerasan serta intimidasi maupun teror yang merajalela, membuat kehidupan masyarakat Aceh khususnya Non GAM selalu diliputi perasaan was-was. Ketakutan dan dibawah tekanan sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk mengungsi, sebagai wujud dari perasaan tidak aman, untuk hidup di daerahnya sendiri.<sup>122</sup>

Bagi mereka yang tidak mengungsi pada akhirnya bergeser ke daerah perkotaan, kemudian membentuk kelompok-kelompok untuk saling melindungi dan membela diri. Puncak dari perlawanan rakyat yang pada akhirnya mengkristal, sehingga muncul organisasi perlawanan terhadap separatis GAM, dan terjadi hampir diseluruh daerah kabupaten dan kota dengan membawa sifat

<sup>120</sup> Gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang ditandai adanya kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang yaitu mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. Ciri lain gerakan sosial adalah penggunaan cara yang berbeda di luar institusi yang ada. (Kamanto, 2004 : 199)

<sup>121</sup> Anggota front merasa punya kewajiban turut menjaga keselamatan bersama masyarakat lainnya, bila kita sebagai WNI yang baik, harus turut serta menjaga keutuhan negara kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Haba Rakyat, Edisi II Agustus 2007)

<sup>122</sup> Sebagian dari mereka sekitar 100 KK sudah kembali ke Aceh, difasilitasi oleh Bupati Bener Meriah. Tapi kehidupannya juga masih memperhatikan karena tidak mendapat tanah yang cukup untuk digarap dalam rangka mempertahankan hidupnya. Sementara untuk kembali ke daerah asal mereka tidak berani karena alasan keamanan. (Informan M, 25 Februari 2008)

kedaerahannya masing-masing. Kemudian secara terbuka dan lantang mengibarkan bendera perlawanan kepada GAM dimulai di Bireun dengan nama Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG) di pimpin Sofyan Ali. Kemudian disusul dengan perlawanan terbuka di hampir seluruh kabupaten dan kota. Pada akhirnya mereka bergabung menjadi satu dan Sofyan Ali diangkat menjadi ketua FPSG Aceh. Pembentukan aksi perlawanan rakyat di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 19**  
**Front Perlawanan Separatis GAM Di Provinsi Aceh**

No	Kabupaten/Kota	Organisasi
1	Kab. Aceh Besar	Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG)
2	Kota Banda Aceh	Gerakan Penyelamat Aceh Republik Indonesia (GPA-RI)
3	Kab. Sabang	Ormas Pembela NKRI (Ormas NKRI)
4	Kab. Pidie	Gerakan Rakyat Anti Separatis Aceh (GEURASA)
5	Kab. Bireun	Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG)
6	Kota Lhoksemawe	Benteng Rakyat Anti Separatis (BERANTAS)
7	Kab. Aceh Timur	Front Penyelamat Merah Putih (FPMP)
8	Kota Langsa	Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG)
9	Kab. Tamiyang	Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG)
10	Kab. Aceh Barat	Front Perlawanan dan Pembela Rakyat Teuku Umar (Front TUM)
11	Kab. Aceh Jaya	Front Anti Gerakan Separatis Aceh Merdeka (FAGSAM)
12	Kab. Nagan Raya	Front Perlawanan Garuda Merah Putih (FPGM)
13	Kab. Aceh Tengah	Gerakan Perlawanan Separatis GAM (FPSG)
14	Kab. Bener Meriah	Persatuan Perlawanan Rakyat Merah Putih
15	Kab. Aceh Selatan	Gerakan Perlawanan Separatis GAM Teuku Cut Ali (FPSG-TCA)
16	Kab. Aceh Singkil	Gerakan Perlawanan Separatis GAM (FPSG)
17	Kab. Abdya	Gerakan Perlawanan Separatis GAM Teuku Peukan (GPSG-TP)
18	Kab. Aceh Tenggara	Front Perlawanan Separatis GAM (FP-SG)
19	Kab. Gayo Luwes	Front Perlawanan Separatis (FPSG)

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

Sedangkan kelompok-kelompok front perlawanan yang ada di Langsa adalah : Front Matari, Front Laskar Rakyat, Front Anak Bangsa, Front Hubul Watani, Front Merah Putih, Front Penyelamat Merah Putih, Front Perlawanan Separatis GAM. Perbedaan nama kelompok-kelompok tersebut kebanyakan didasarkan pada lokasi tempat tinggal dan kelompok paguyuban yang sudah ada



seperti FKWJ (Forum Komunikasi Warga Jawa), membentuk Front Laskar Rakyat, tapi semuanya adalah PETA.



**Depan Rumah Sakit Umum Langsa**

Dalam setiap perkembangan konflik di daerah yang bertentangan dengan Pemerintah Pusat, biasanya disebut sebagai gerakan separatis, kemudian muncul kelompok-kelompok anti separatis dan pro pemerintah RI. Dalam kasus Aceh, seperti yang disampaikan Informan E (Langsa, 26 Oktober 2008) sebagai berikut :

“Jadi, karena di Aceh ini mayoritas beragama Islam pada saat separatis hidup, kemudian mereka melakukan hal-hal yang destruktif terhadap masyarakat sipil yang lain, maka kemudian mulai dengan konsep Islam, yakni apabila hak-hak kita itu diganggu maka kita punya kewajiban mempertahankan hak-hak kita itu. Jadi dengan dasar konsep seperti itulah kemudian timbul perlawanan-perlawanan kepada pihak separatis GAM itu dengan rasa nasionalis kebanggaan yang kuat, karena mereka tahu bahwa dengan rasa nasionalis yang ada pada mereka itu, mereka bisa hidup dengan damai, dengan tenang di Aceh. Tetapi dengan timbulnya separatis yang cenderung etnis nasionalis itu, nasionalis mereka, kebanggaan mereka itu merasa terganggu atau diusik, sehingga muncullah perlawanan-perlawanan masyarakat sipil dalam bentuk Front Perlawanan PETA atau laskar-laskar lainnya.”

Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG), pertama kali didirikan di Bireun, berkantor di jalan Komplek PJKA Bireun, selanjutnya dijadikan Kantor Pusat FPSG dan Pasca MoU Helsinki berubah menjadi PETA, selanjutnya kantor pusatnya pindah ke Banda Aceh, di jalan SA. Mahmudsyah banda Aceh jumlah

anggota kader PETA yang militan sekitar 6.500 orang, dari jumlah itu yang sudah menerima bantuan sebanyak 5.000 orang, sisanya masih menunggu per orang mendapat 10 juta rupiah, meski tidak terlalu menyolok karena alasan keamanan. (Informan B, 9 Februari 2008)

Fungsi dan tugas pokok organisasi PETA, adalah sebagai berikut :

1) Sebagai wadah tempat berhimpun generasi muda dalam rangka untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2) Berperan serta secara aktif untuk membentengi masyarakat dari pengaruh ideologi separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI serta bertanggung jawab menjaga stabilitas daerah demi kepentingan nasional ditinjau dari aspek ipoleksosbud hankamnas. 3) Berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan dan perekat persatuan dalam wadah NKRI yang abadi. 4) Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan (Dikutip dari AD/ART PETA).

Bahkan perkembangannya kekuatan baru gerakan anti separatisme tersebut lebih memahami tentang karakteristik medan maupun kondisi GAM, khususnya mereka yang tergabung dalam TNA. Hal tersebut merupakan ancaman baru bagi GAM, sehingga mereka tidak berani pulang secara terbuka untuk menengok keluarganya yang tinggalnya masih membaur di daerah pemukiman penduduk. Sehingga sering terjadi barter jika ada keluarga front yang diculik dan disandra oleh kelompok GAM. Kemudian anggota keluarga GAM yang menculik di daerah tersebutpun diambil oleh kelompok FPSG. Biasanya diselesaikan dengan sistim barter antar sandera (korban penculikan). Dengan demikian keberadaannya setidaknya berdampak pada demoralisasi dikalangan milisinya.

Kekuatan ini yang luput dari pengamatan kelompok GAM, karena dalam strategi perang gerilya, masyarakat merupakan tumpuhan, siapa yang dekat dengan masyarakat akan mengendalikan dan nantinya akan berpeluang besar untuk memenangkan pertarungan. Oleh karena itu aksi teror dan kekerasan terhadap masyarakat Aceh Non GAM justru akan merugikan aksi politik dan perjuangan GAM sendiri. Sehingga bermunculan gerakan baru yang anti separatisme dan mengadakan perlawanan terhadap GAM.

Pasca MoU Helsinki nama PETA mungkin datang dari pemerintah sendiri, dalam APBN langsung disebutkan nama PETA yang akan mendapatkan bantuan

dampak konflik sebanyak 6.500 orang dan itu sudah merupakan paket, tapi yang keluar sekarang baru untuk 5.000 orang. Nama FPSG tidak boleh muncul lagi dan akan dibubarkan paksa, tapi kesepakatan secara tertutup sebenarnya masih tetap FPSG karena sudah ada legalitas hukumnya juga dengan nama FPSG. (Informan B, 23 Juli 2008)

Perkembangan konflik selanjutnya mengalami pergeseran dari konflik vertikal, ke arah konflik horizontal. Dengan kata lain, meskipun telah ada kesepakatan damai antara RI dengan GAM, namun secara empiris masih nampak adanya konflik lokal antara Aceh RI dengan Aceh GAM. Meski cenderung bersifat laten, namun dinamikanya masih ditandai dengan berbagai tindakan kekerasan. Hal tersebut semakin menguatkan eksistensi masing-masing kelompok yang berlawanan. Konflik yang masih berlanjut diantaranya terkait masalah identitas, perbedaan persepsi terhadap perdamaian, kesenjangan sosial dan ekonomi, politik dan dendam, serta masalah-masalah lain yang dapat menghambat terwujudnya perdamaian positif. Konflik-konflik semacam ini seringkali menuntut usaha yang intensif, perlu waktu untuk menghasilkan perubahan yang konstruktif.

#### **B. Resolusi Konflik Nir Kekerasan**

Resolusi konflik pada hakekatnya adalah upaya proses penyelesaian konflik, dengan cara nir kekerasan, dan lebih mengedepankan cara-cara demokratis, maka proses resolusinya adalah melalui cara-cara dialog, konsensus untuk mencapai kesepakatan damai untuk kepentingan bersama, tanpa ada yang merasa menang dan kalah (*win-win solution*). Proses ini juga melibatkan upaya untuk mendorong perubahan perilaku yang positif dari para aktor konflik, dan akhirnya menangani sebab-sebab konflik guna melangkah lebih maju kepada penciptaan suatu hubungan yang langgeng diantara kelompok-kelompok Aceh RI dan Aceh GAM. Resolusi konflik tersebut sekaligus mengandung arti serangkaian proses guna mencegah dan menyelesaikan konflik.

Di Langsa (+ Aceh) masih diperlukan adanya usaha intensif untuk mencari cara-cara nir kekerasan dengan membuka celah, ruang komunikasi melalui dialog maupun mediasi antar pihak-pihak yang berkonflik. Sebab tanpa adanya dialog atau mediasi, maka kemungkinan strategi yang dipakai adalah pemaksaan dengan

kekerasan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang banyak pihak mengatakan sedang dikembangkan/berproses dalam membangun perdamaian di Aceh.

Strategi resolusi konflik umumnya termasuk untuk penyelesaian konflik Aceh, pada prinsipnya berusaha menghindari cara-cara kekerasan, karena untuk penyelesaian konflik yang tuntas memang justru harus diupayakan terjadinya suatu transformasi konflik dari bentuk resolusi konflik yang bersifat keras atau perang ke arah resolusi konflik yang bersifat nir kekerasan, dari perdamaian negatif ke arah perdamaian positif. (Rachman, 2004 : 28)

Masyarakat di Langsa (+ Aceh) merupakan unsur potensial dalam rangka mencari perdamaian yang adil<sup>123</sup> dan positif, dalam perjuangan resolusi konflik, dengan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap peran setiap warga melalui mekanisme demokratis dan nir kekerasan. Terkait hal ini, menurut pantauan peneliti :

“Di Langsa (+ Aceh) perlu adanya pembinaan intensif dalam rangka mengubah adanya eksklusifisme atau miskomunikasi dari masing-masing kelompok untuk memperbaiki interaksi sosial yang rusak akibat konflik yang berkepanjangan sehingga sering terjadi saling mencurigai dan hilangnya kepercayaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyadaran kembali seperti : saling silaturahmi dan kegiatan gotong royong, pengembangan sanggar seni dan budaya Aceh, perlombaan olah raga, mengadakan sunatan massal, pernikahan massal, kerja bakti dan lain-lain. Pertemuan warga dapat diawali dari tingkat lorong atau gampong, karena pada dasarnya mereka saling mengenal dan biasanya masih banyak terkait hubungan kekerabatan. Semua kegiatan tersebut dapat difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga adat, agama, termasuk pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perdamaian di Aceh”.

Momentum solidaritas sosial pasca MoU Helsinki sebaiknya digunakan untuk membangun kembali dialog-dialog perdamaian, membangun komunikasi yang sempat terputus akibat konflik berkepanjangan, terutama Aceh GAM dan Aceh RI, serta komponen masyarakat lainnya yang menjadi korban perseteruan antara GAM dengan Pemerintah RI.

---

<sup>123</sup> Adil dalam artian terpenuhinya hak-hak asasi bagi setiap warga masyarakat di Aceh, adalah faktor yang utama untuk melandasi damai positif.

Keterbukaan dan kesadaran dari masing-masing kelompok, setidaknya memerlukan proses yang panjang, ketika kepercayaan secara perlahan terbangun dan terakumulasi, selanjutnya jangan ada dusta diantara kita atau kelompok-kelompok yang ada. Artinya jangan ada lagi agenda-agenda tersembunyi yang akan berpengaruh pada peran negatif masyarakat dalam proses perdamaian. Pada kenyataannya, memelihara kepercayaan (*trust building*) untuk memelihara perdamaian adalah upaya yang lebih berat dibandingkan dengan mencapai perdamaian itu sendiri. Sedikit banyak pasti ada suatu kecurigaan antara pihak-pihak yang berdamai. Apalagi bagi kelompok-kelompok yang secara formal atau non formal belum pernah menyatakan perdamaian.

Dalam wawancara dengan informan D, 26 Juli 2008, mengatakan bahwa :

“Yang sudah disepakati, dilaksanakan dengan tulus, kita harus sadar lebih dahulu bahwa konflik di Aceh berjalan lama jadi tidak bisa satu atau dua hari diselesaikan. Karena kita hidup memang diciptakan untuk berkelompok-kelompok dan masing-masing punya ego sendiri-sendiri. Hakekat sebagai manusia punya naluri yang berbeda-beda, persatuan akan kuat bila masing-masing kelompok diberi keleluasaan. Filosofinya keluarga, dalam kehidupan rumah tangga anak akan tumbuh kemudian punya keluarga, bisa sebagai kepala keluarga dan punya kehendak untuk bersatu serta pasti pada saat-saat tertentu akan berkumpul untuk melepas kerinduan dan bercengkrama satu sama lain, dan merasa sebagai sebuah keluarga yang hidup rukun dan damai.”

Pola pendekatan persuasif perlu dilakukan untuk melindungi para pengungsi korban konflik yang tidak berdaya, dan untuk mengembalikan kerukunan hidup diantara kelompok-kelompok yang berbeda. Saling menghormati dan menghargai serta toleransi adalah hal-hal yang perlu dikembangkan dan dijunjung tinggi, agar interaksi sosial dapat berjalan damai dan tentram. Pentingnya musyawarah, ketika timbul masalah yang harus diselesaikan bersama, adalah hal-hal yang dapat menjelma sebagai kekuatan perdamaian yang lebih besar, atau dapat dikatakan sebagai sebuah transformasi konflik menuju proses perdamaian positif. Jangan sampai ada persepsi bahwa perdamaian sudah terkubur entah dimana bersama jasad keluarga korban konflik yang tidak ditemukan, karena hal tersebut dapat menimbulkan dendam yang berkepanjangan dan lingkaran kekerasan yang tidak jelas pangkal dan ujungnya.

Bagaimana caranya meminimalisir polarisasi yang ada, dan bagaimana idealnya identitas etnis maupun kelompok-kelompok yang ada perlu disosialisasikan dalam kehidupan sosial yang baru pasca MoU Helsinki. Melalui pertemuan-pertemuan yang mengandung makna perdamaian atau tetap mengembangkan wacana perdamaian antara kelompok-kelompok yang berseberangan, dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta individu-individu yang punya pengaruh dan peranan dalam proses perdamaian seperti elit pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat baik yang tinggal di Aceh maupun diluar Aceh yang dapat berperan sebagai mediator.<sup>124</sup>

Untuk mengurangi atau menghilangkan kecurigaan dalam memandang kelompok-kelompok yang lain, perlu pemahaman tentang sikap moderat semua etnis yang ada yang mengakui bahwa keberadaan mereka semua adalah Rakyat Aceh, saudara sendiri dan mereka semua perlu diperlakukan secara damai dan toleran. Karena perdamaian merupakan unsur pertama dan utama dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat Aceh. Menjaga perdamaian berarti pula menjaga keharmonisan dan merupakan kewajiban semua elemen masyarakat Aceh. Mereka memiliki peran penting untuk menuju perdamaian positif, diantaranya melalui pengembangan struktur kelembagaan, membentuk forum komunikasi dan memberdayakan "ruang komunikasi publik, serta membangun kesepakatan bersama berbasiskan kemitraan dan saling pengertian.

Perkembangan konflik Aceh Pasca MoU Helsinki, sudah dalam kondisi yang kompleks dan cukup ruwet, sehingga cukup sulit untuk menemukan resolusi konflik yang tepat dan manjur. Perlu pendekatan secara bertahap, tetap dalam bingkai lokalitas dan didekati secara lokalitas. Dengan melibatkan semua pihak terkait, terutama aktor konflik untuk berperan positif dan memahami akar konflik dengan meningkatkan proses-proses partisipatif, dimulai dari tingkat bawah atau tingkat gampong (*bottom up approach*) sampai tingkat mukim dan terus dikembangkan minimal sampai tingkat Provinsi Aceh. Selanjutnya diperlukan rekonsiliasi antara kelompok Aceh GAM dengan Aceh RI (KPA dengan PETA dan FORKAB).

---

<sup>124</sup> Mediator yang tepat, melalui kegiatan mediasi, setidaknya dapat menghasilkan pemecahan konflik, bagi pihak-pihak yang betikai, sekaligus dapat memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang selama konflik jarang dipertemukan secara langsung untuk perdamaian.

### C. Rekonsiliasi Konflik

Konflik Aceh tidak mudah untuk diselesaikan, meskipun sudah ada MoU Helsinki, tetapi bukan berarti persoalan sudah selesai. Masalah separatisme (konflik GAM-RI), akar persoalannya tidak sederhana dan sudah melebar, dengan bertambahnya aktor konflik, dan hal itu justru terjadi pasca MoU Helsinki, yang mengarah pada konflik komunal/konflik lokal. Sementara konflik GAM-RI belum terselesaikan secara tuntas terkait “tuntutan separatisme”. Kemudian muncul dinamika konflik antara Aceh RI dengan Aceh GAM yang berkembang di Langsa dan Provinsi Aceh.

Belum tampak adanya agenda serius yang mempromosikan inisiatif-inisiatif penciptaan perdamaian dan rekonsiliasi jangka panjang melalui penciptaan perdamaian di Aceh, khususnya terhadap dinamika konflik internal masyarakat Aceh, terkait Aceh RI dengan Aceh GAM, maupun etnis Aceh dan etnis keturunan Jawa yang berada di Langsa maupun Provinsi Aceh. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah untuk aktor-aktor yang terlibat konflik pasca penandatanganan MoU Helsinki.

Indikasi pergeseran ke arah konflik horizontal di Langsa (+ Aceh), terjadi bersamaan dengan perubahan cukup menyolok dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta keamanan, yang berpotensi timbulnya kesenjangan antar kelompok masyarakat, seperti kemiskinan dan peluang pekerjaan serta pembagian kekuasaan. Sehingga muncul kecemburuan pada kelompok tertentu, sementara kelompok lain merasa termarginalkan.

Penyelesaian konflik Aceh melalui MoU Helsinki hanya melibatkan Pemerintah Indonesia dan GAM saja, sedangkan GAM tidak dapat mengklaim mewakili masyarakat Aceh, karena ada yang anti GAM. Sehingga dinamika konflik di Aceh belum menunjukkan pada proses perdamaian positif yang diharapkan. Karena belum seluruh komponen masyarakat yang berada di Aceh mempunyai komitmen sama dan sinergi dalam implementasi MoU Helsinki. Seharusnya perdamaian adalah kepentingan dan tanggung jawab bersama komponen masyarakat.

Pendapat seorang informan, terkait MoU Helsinki adalah sebagai berikut :

“Penandatanganan damai dilakukan GAM dan kami bukan GAM, jadi apa urusannya dengan GAM karena kami sudah damai dengan RI. Apa yang dilakukan GAM untuk rakyat Aceh dan Pemerintah RI klaim mewakili rakyat Indonesia dan rakyat Aceh Non GAM. Sekarang yang tertinggal di Aceh masalah perdamaian antara kelompok yang pro dan kontra, hal itu justru semakin meruncing. Jadi perlu sosialisasi perdamaian dan bagaimana membangun budaya damai. Perdamaian semua setuju perlu rekonsiliasi”.  
(Informan C, Langsa, 1 Maret 2008)

Dinamika konflik di Langsa khususnya, memang diperlukan kearifan masyarakat, yang sekarang cenderung terkotak-kotak dalam organisasi sosial dan organisasi partai politik untuk membangun interaksi sosial. Agar lebih cepat terjadi komunikasi maximum diantara kelompok untuk mencari solusi permasalahan yang masih tertinggal di Langsa (+ Aceh). Sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dan bekerja sama untuk kepentingan bersama, dalam memaknai perdamaian yang diharapkan.

Terkait rekonsiliasi, Informan J dan K di Langsa menuturkan bahwa: “Rujuk atau rekonsiliasi adalah salah satu cara terbaik bagi penyelesaian konflik Aceh. Sebab rekonsiliasi merupakan ruhnya perdamaian yang mengemas perbedaan pendapat menjadi sebuah rahmat, bukan saling membunuh” (Informan J, 24 Juli 2008). Untuk menghindari perpecahan karena provokasi dari pihak-pihak yang menginginkan konflik Aceh terus hidup. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bekerja keras menciptakan, membangun dan memupuk kembali rasa kebersamaan yang sudah melemah. (Informan K, 17 Juni 2008)

Dalam konflik Aceh, yang sudah berlangsung lama, rekonsiliasi yang tulus merupakan proses yang kompleks.<sup>125</sup> Bertolak dari fenomena tersebut, maka perlu adanya kerjasama dan kebersamaan sebagai alternatif jawaban atau upaya dari masyarakat Aceh, untuk lebih mengembangkan sikap saling menghargai, tenggang rasa dan kesediaan untuk berbaur serta tidak membuat kelompok-

<sup>125</sup> Perlu pendekatan yang kompromistis dan persuasive dalam mengambil langkah-langkah menuju proses rekonsiliasi atau menuntaskan proses rekonsiliasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal seperti, pengalaman pahit dimasa lampau, adanya isu dan fitnah dari masing-masing pihak yang cenderung menyudutkan dan mencari pembenaran sendiri, kerusakan yang sudah terjadi, penderitaan yang ditimbulkan, sebagai korban konflik yang membakar kebencian dan perasaan dendam tak kunjung usai serta perlakuan ketidakadilan yang direpresentasikan dengan berbagai tindakan kekerasan.



kelompok yang ada menjadi eksklusif. Perlu kebijaksanaan dan keikhlasan masyarakat untuk menerima kembali mantan-mantan anggota GAM, sebaliknya mantan GAM juga perlu keikhlasan untuk membaur dan menerima kembali para pengungsi korban konflik, seperti penduduk keturunan etnis Jawa yang masih banyak tersebar di luar Aceh, dan kebanyakan mengalami situasi yang dilematis, mereka tetap bertahan di tempat pengungsian, mata pencaharian tidak tetap, kalau kembali ke Aceh masih trauma akan keselamatannya tidak terjamin, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan.

Bagaimanapun korban konflik Aceh meninggalkan luka dan kenangan pahit, mereka yang dipaksa atau terpaksa menjadi pengungsi sangat terpukul dan mengalami trauma mendalam, mungkin trauma tersebut akan terobati selain dengan saling memaafkan, juga para pengungsi tersebut diperbolehkan kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dengan suasana damai. Karena di tempat itulah kelahiran dan tempat mereka dibesarkan sekaligus mencari nafkah dengan berdagang dan bertani. Tapi banyak saudara kita Jawa yang mengungsi dan tidak berani kembali ke rumahnya karena masalah keamanan.

Melalui rujuk dan rekonsiliasi diharapkan dapat menghilangkan atau mengikis istilah warga kelas satu dan kelas dua atau istilah anak kandung, anak tiri dan anak haram bagi kelompok-kelompok yang ada di Aceh paska MoU Helsinki. Sebagaimana yang disampaikan Informan I (Banda Aceh, tanggal 15 April 2008), “..... kalau perlu bubarkan dulu GAM atau KPA, FPSG atau PETA dan FORKAB, biar kita bisa menyatu”. Pendapat serupa disampaikan Informan O, di Langsa sebagai berikut :

“Agar Aceh bisa menuju proses perdamaian yang positif, konsepnya masing-masing pihak, apakah pemerintah plus TNI/POLRI maupun GAM, maunya mereka itu adalah tidak ada lagi kekhawatiran, saling curiga, kemudian itu semua demi untuk rakyat. Kalau masih ada curiga, maka bermasalah terus Aceh ini. Rencananya besar dalam benak saya, keberadaan KPA itu kan sebelum ada partai, itu lembaga, sekarang partai sudah ada, apa KPA itu baru bubar, setelah orang itu punya perwakilan di dewan, ini saya masih ragu, ini kalau menurut saya setelah ada partai yang sah secara hukum. Partai sudah ada jadi untuk apa KPA ini”.  
(Informan O, Langsa, 29 Oktober 2008 )

Kebijaksanaan dan keikhlasan masyarakat untuk menerima kembali mantan-mantan anggota GAM harus teraktualisasi melalui keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang dapat menjadi simbol pemersatu. Untuk itu integrasi masyarakat mantan anggota GAM bukan melulu menjadi tanggung jawab Negara, tetapi perlu dikembalikan kepada tradisi masyarakat Aceh.<sup>126</sup> Dengan melibatkan para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, tokoh adat serta berbagai komponen lain yang kompeten dan punya atensi terhadap perdamaian di Aceh.<sup>127</sup>

Kedamaian masih memungkinkan untuk dicapai melalui rekonsiliasi konflik, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan secara intensif yang mempunyai makna sosial, ekonomi dan politik, antara kelompok-kelompok yang berseberangan. Dapat difasilitasi oleh masyarakat sendiri, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk mencoba memahami akar dan potensi konflik, dengan mempertimbangkan orang-orang yang terlibat, lingkungan sosialnya, sejarahnya, persoalan-persoalan yang terkait, dan berbagai faktor penyebab atau setidaknya memberikan kontribusi bagi munculnya konflik baru di Aceh.

Fenomena konflik dengan berbagai persoalan yang masih tertinggal di Aceh, dikarenakan adanya kegagalan dalam melakukan identifikasi masalah, sehingga akar permasalahan konflik belum tertangani dengan baik.<sup>128</sup> Pendekatan sebaiknya berawal dari masyarakat tingkat bawah dan berbagai kelompok-kelompok yang ada dengan berbagai varian persoalannya. Selanjutnya dapat dibuat skala prioritas dalam rangka mencairkan mis komunikasi yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat (Aceh GAM dengan Aceh RI). Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pergeseran konflik yang mengarah pada tindakan kekerasan, semua pihak sebaiknya menyamakan persepsi tentang

<sup>126</sup> "Dimana bumi dipihak, disitu langit dijunjung". Istilah ini penting untuk disosialisasikan di Langsa (+ Aceh), untuk menghindari mis komunikasi, dan menyambung kembali hubungan yang telah rusak akibat konflik.

<sup>127</sup> Menurut Iwan Gardono Sudjatmiko, hal-hal yang mendukung perdamaian di Aceh diantaranya : orang-orang bosan konflik, trauma tsunami dan peningkatan pri kemanusiaan, para Pemimpin NKRI, GAM dan Internasional telah bersepakat untuk menjaga perdamaian dan pendonor.

<sup>128</sup> Mengapa konflik yang terjadi di daerah-daerah sulit untuk diselesaikan dan sering timbul kembali berwujud konflik kekerasan, karena dalam setiap langkah penyelesaian konflik, apinya sudah padam, tetapi baranya masih ada sehingga ditiup sedikit apinya menyala kembali. Disamping disebabkan beberapa hal seperti : 1) perebutan tanah, 2) ketidakadilan dalam berbagai macam kesempatan (ekonomi, politik, pendidikan), sehingga ada masalah yang belum terselesaikan, 3) generasi muda yang tidak sekolah dan tidak bekerja, 4) penegakan hukum yang masih loyo, 5) jatuhnya kepercayaan terhadap hampir semua lembaga (formal, adat). (Tamrin Tomagola, dalam wawancara Metro TV, tanggal 26 Januari 2009)

dinamika konflik Aceh. Selanjutnya perlu melibatkan potensi masyarakat setempat baik formal maupun informal, seperti Pemerintah Indonesia, Pemda Provinsi, Pemda Kota/Kabupaten Aceh, masyarakat sipil di Aceh dan Indonesia termasuk lembaga adat dan agama,<sup>129</sup> untuk mempromosikan perdamaian positif, keadilan dan demokrasi di Aceh. Sehingga komitmen maupun kesepakatan yang telah dicapai, dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pihak yang berkopentent dalam penyelesaian konflik Aceh.

Dalam sejarah adat Aceh diketahui, bahwa konflik yang terjadi dalam komunitas masyarakat gampong, baik yang bersifat individual (internal keluarga), antar individu maupun antar kelompok, diselesaikan dengan bingkai adat dan agama. Pola agama dan adat ini ternyata dapat membawa kepada kedamaian yang abadi dan permanen (Syahrial. 2006:5). Namun dalam perkembangannya, nilai-nilai adat dan agama tersebut mulai luntur, dan menjadi kurang dipercaya lagi oleh masyarakat. Sehingga perlu dibangun kembali kepercayaan pada lembaga adat dan agama tersebut, melalui kerjasama dengan PEMDA dan Tokoh Masyarakat, untuk mensosialisasikan dan menghidupkan kembali lembaga tersebut, memberikan dukungan sarana yang dibutuhkan.

Sebenarnya Peusejiuek Sayam<sup>130</sup>, semacam Tepung Tawar, sudah lama kita usulkan agar dilakukan, untuk kita berdamai. GAM kita suruh ngomong bahwa perbuatannya selama ini salah dan minta maaf secara terbuka pada rakyat atau korban konflik, kalau perlu potong lembu, kita berpeluk-pelukan, bila perlu nangis untuk menunjukkan bahwa dia menyesal. Tapi hal itu tidak pernah di dengar dan tidak mau dilakukan (Informan B, 23 Maret 2008). Informan E di Langsa lebih jauh mengatakan:

“.... untuk menyelesaikan konflik Aceh, diperlukan mediator dengan multi pendekatan. Pendekatan adat dan budaya ini sepertinya tidak bisa lagi diberlakukan untuk solusi konflik Aceh,

<sup>129</sup> Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang terikat dengan agama dan nilai adat. Keberadaan ajaran agama dan adat bagi masyarakat Aceh menjadi penting, karena kedua komponen inilah yang menjadi standar perilaku masyarakat sehari-hari. Ajaran agama dan norma adat, juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat Aceh. (Syaefudin. 1982 : 75)

<sup>130</sup> Sayam adalah salah satu upaya merujuk kembali yang dikenal di Aceh, antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan pemberian kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku terhadap korban atau ahli waris korban, khususnya yang berkaitan dengan rusak atau tidak berfungsinya anggota tumbuh, pendeknya Sayam merupakan kompensasi dari keluarganya darah dari seseorang akibat penganiayaan.

karena pelaku adat dan budaya sudah terlibat dalam konflik, ulama sudah terlibat, KPU dan MUNA, kemudian santri ada dua model santri, kemudian dari segi LAKA, juga tadi yang menginginkan Wali Nanggroe itu keturunan ini, mereka terlibat semuanya. Sehingga alternatif yang masih nampak tidak ada konflik interest, keinginan terjun ke dalam konflik ini, seperti halnya “Forum Rektor di Aceh atau tokoh kampung yang netral. Ini alternatif yang bisa menjadi mediator konflik. Disamping ormas atau organisasi sosial keagamaan yang cenderung nasionalis dan tidak kedaerahan, serta tidak terlibat dalam kancah konflik selama ini”.

Menurut Informan M, bahwa : “fungsi lembaga, adat dan sosial di tingkat gampong dan mukim di wilayah Provinsi Aceh belum ada yang dilibatkan secara efektif dalam proses penyelesaian konflik dan memfasilitasi perdamaian, dikarenakan masih adanya beberapa kendala. Diantaranya pejabat yang belum dapat berfungsi optimal karena masih adanya trauma konflik yang mengakibatkan pada tindakan kekerasan, disamping semakin menguatnya peran mantan anggota GAM dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) yang sampai di tingkat gampong dan mukim”. (Informan M, 25 Februari 2008)

Sedangkan Informan F, mengatakan, “sebaiknya dalam setiap langkah resolusi dan rekonsiliasi konflik, perlu melibatkan perempuan, jangan perempuan hanya dijadikan tukang masak atau maaf hanya dijadikan pemuas nafsu saja. Karena perempuan adalah korban yang tidak berdaya dan terbesar, sehingga punya kepentingan dalam resolusi konflik dan perempuan adalah penduduk terbesar di Aceh, bila ingin memenangkan hati orang Aceh maka menangkan hati perempuan Aceh”. (Informan F, 8 September 2008)

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik antar masyarakat Aceh adalah *Diyat*.<sup>131</sup> *Diyat* dinilai cukup efektif untuk meredakan kemarahan yang ada pada keluarga korban/ahli waris korban, dapat mengurangi tendensi dendam dan dapat mencegah atau mengatasi jatuhnya korban lebih banyak lagi. Pola pendekatan resolusi konflik di Aceh dengan berorientasi pada nilai-nilai kultur Rakyat Aceh melalui lembaga adat dan agama perlu dikembangkan dengan pemanfaatan simbol-simbol dan norma kultural sebagai pemersatu para pihak yang berkonflik.

<sup>131</sup> *Diyat* adalah bahasa arab, artinya pengganti jiwa atau pengganti anggota tubuh yang rusak. Pengganti ini dapat berupa harta atau uang, jadi ganti rugi diserahkan oleh pelaku atau ahli warisnya kepada keluarga korban atau ahli warisnya akibat pembunuhan atau penganiayaan.

Menurut Informan C, “permasalahan yang berkaitan dengan dendam di Aceh susah dihilangkan karena sudah bersifat turun menurun, konflik di Aceh ada yang bilang klaim keturunan, mengapa muncul DI/TII dan GAM karena di Aceh unsur dendam tidak bisa dihilangkan. Untuk mengurangi bisa juga dengan perbaikan kesejahteraan yang konflik di Aceh justru mereka yang sudah sejahtera, yang lain-lain kena imbasnya”. (Informan C, 1 Maret 2008)

Perjanjian Helsinki seharusnya dapat menumbuhkan harapan masa depan yang damai. Namun sejauh ini, masyarakat yang menjadi korban konflik langsung dan terhimpit oleh dampak berbagai pola penyelesaian konflik, belum pernah dilibatkan secara aktif, agar mereka ikut pula berperan positif dalam mewujudkan perdamaian, khususnya masyarakat Aceh Non GAM yang tergabung dalam kelompok PETA.

Informan D, 26 Juli 2008 mengungkapkan bahwa :

“(1) Irwandi seharusnya memposisikan diri sebagai Pemimpin Aceh, bukan pemimpin salah satu kelompok saja, sehingga punya kewajiban untuk mempersatukan kelompok-kelompok yang masih berseberangan di Aceh. (2) Kalau Indonesia terpecah-pecah, kekuatannya akan melemah, Indonesia sebagai negara Islam terbesar, sehingga jika Aceh lepas dari Indonesia maka Islam jadi terpecah, itu yang diinginkan oleh non muslim. (3) Indonesia masih ada nilai tawar dengan status Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dunia internasional, sehingga jika Aceh lepas maka Islamnya tidak punya pengaruh di dunia internasional seperti Brunai, meskipun kondisi sumber daya alamnya tinggi.”

Sebaiknya untuk membangun kepercayaan sangat diperlukan komitmen yang kuat dan jelas diantara kelompok-kelompok yang sekarang ada, untuk mencari kesepahaman dan kesepakatan. Pentingnya komunikasi/dialog, apabila muncul masalah-masalah baru, untuk merubah kesan eksklusifisme atau mencairnya kebekuan antar kelompok, dan tidak langsung menjadikan masalah-masalah tersebut sebagai sesuatu yang menghambat dalam mencari solusi. Masalah yang cukup krusial menurut pantauan peneliti adalah sebagai berikut :

“Menonjolkan identitas masing-masing sebagai pihak yang saling berlawanan, karena masing-masing terikat pada kebijakan organisasi dan hal tersebut mempunyai efek terhadap munculnya permasalahan lain, seperti kesenjangan sosial, kecemburuan terkait ketidaksamaan dalam pembagian uang kompensasi dan jadup serta bayangan masa depan yang suram, membuat frustrasi, dan timbul

rasa kecurigaan serta sensitifitas terhadap sikap atau perilaku orang/kelompok, sementara pihak keamanan dan birokrasi sudah mulai kehilangan kharismanya.”

Perbedaan dan perdebatan terkait berbagai kepentingan kelompok bahkan individu diantaranya permasalahan ekonomi, sosial dan politik, hendaknya dijadikan sebagai keberagaman yang dapat disinergikan melalui sarana dialog dan mediasi. Disesuaikan dengan nuansa adat dan agama, maupun penyadaran dengan sentuhan kemanusiaan untuk perdamaian dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan habitatnya. Sebagaimana yang disampaikan Informan J, di Langsa sebagai berikut :

“Penyelesaian konflik lewat sentuhan kejiwaan (spiritual) dan keagamaan (religius) akan melahirkan kesadaran-kesadaran batin tentang pemahaman bahwa perang, dendam dan sesuatu yang bersifat keduniawian adalah tidak penting dan berharga dari kehidupan diakhirat kelak. Artinya, jika kesadaran pihak-pihak yang bertikai tersentuh bahwa perdamaian dan persaudaraan itu jauh lebih berharga dan mulia dari pada permusuhan, dendam dan perang, maka jalan menuju penyelesaian konflik Aceh secara permanen akan semakin terbuka”. (Informan J, 24 Juli 2008)

Aceh dengan berbagai persoalan pelik seperti kemanusiaan, hukum, agama, ekonomi, sosial budaya dan aspek kehidupan lain, maka tidak ada pilihan bahwa resolusi konflik Aceh harus dilakukan dengan sentuhan kemanusiaan seperti dialog, mediasi, rekonsiliasi dan pembinaan atau membangun budaya damai, jangan lagi dengan kekerasan dan saling membunuh. Karena akan tetap melahirkan kekerasan baru dari satu generasi ke generasi korban konflik lainnya.

Sulitnya mencapai rekonsiliasi pada periode sebelum Helsinki, mungkin adalah sebuah fakta yang nyata tentang kegagalan mempertimbangkan masa lalu dalam skenario resolusi konflik. Keberadaan dan identitas masyarakat Aceh dari masa ke masa yang menafikan keberadaan dan identitas kelompok lainnya (Non Aceh) yang juga bertempat tinggal di wilayah Aceh, seperti etnis Jawa, etnis Batak, etnis Padang, etnis Cina dan etnis-etnis lainnya. (LAN. 2005 : 189)

Perlu disadari bahwa di Langsa (+ Aceh), selain kelompok GAM masih ada kelompok lain seperti ulama, LSM, mahasiswa, kelompok front akademisi dan pengusaha. Perdamaian atau kesepakatan proses perdamaian serta implementasinya perlu melibatkan kelompok-kelompok tersebut karena GAM

hanya merupakan sebagian dari masyarakat Aceh artinya tidak semua Rakyat Aceh adalah GAM.

Menurut pantauan peneliti dalam resolusi rekonsiliasi konflik :

“Perlu adanya sinergi antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, termasuk kelompok elit yang sampai saat ini masih mendominasi pergerakan dan perkembangan kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Aceh-GAM dan masyarakat Aceh NKRI. Karena kedua kelompok tersebut sarat dengan kepentingan dan argumen pembenarannya masing-masing. Sehingga upaya-upaya rekonsiliasi hendaknya dapat menyentuh persoalan mendasar dan substansi kedua kelompok tersebut melalui pendekatan yang berbeda-beda dalam upaya membangun perdamaian positif dengan sebuah pola kerja sama dan perpaduan antara kelompok. Meski kita sadari, bahwa sesungguhnya belum ada “resep paling manjur” yang dapat diterapkan untuk mengatasi segala jenis konflik, tapi setidaknya dapat merubah situasi yang ada menjadi nir kekerasan bukan semata-mata untuk menghilangkan konflik atau nir konflik dan masing-masing kelompok dapat merasakan adanya perlakuan keadilan, keterlibatan dan kenyamanan untuk merealisasikan aktivitasnya meski dalam berbagai perbedaan, tapi dapat hidup rukun dan damai. Hal tersebut merupakan langkah bijak menuju damai bukan sebaliknya dengan kebijakan yang cenderung terlihat sebagai politik balas dendam dan saling mengintimidasi/membunuh untuk menunjukkan kekuatan masing-masing kelompok. Sebab sehebat apapun politik seperti itu, justru akan bermuara kepada dendam yang tak berkesudahan, dimana dendam akan melahirkan dendam baru dan seterusnya”.

Masalah rekonsiliasi, hendaknya melibatkan semua aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, dan semua komponen masyarakat Aceh yang berkepentingan terhadap perdamaian berkelanjutan di Aceh. Penandatanganan MoU Helsinki dapat dikatakan sebagai langkah awal rekonsiliasi yang dilakukan antara GAM dengan RI. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana rekonsiliasi antara GAM dengan Non GAM? Maka masih perlu dikembangkan resolusi rekonsiliasi konflik antara pihak GAM dengan pihak Non GAM yang sekarang diwakili oleh kelompok KPA dan PETA serta FORKAB. Rekonsiliasi menyangkut semua bidang kehidupan agar dapat membuka komunikasi, merubah eksklusifisme dan mencairnya kelompok-kelompok Aceh RI dengan Aceh GAM. Diperlukan peran positif masyarakat, untuk menghindari adanya kecurigaan terhadap agenda-agenda tersembunyi diluar komitmen perdamaian, serta

menghilangkan dominasi kelompok dalam proses pembangunan Aceh baru dalam bingkai NKRI.

Perdamaian yang mengabaikan dimensi rekonsiliasi di Langsa (+ Aceh) sama dengan perdamaian formal yang belum menyentuh substansi. Proses deformasi perdamaian menuju tahapan pelibatan seluruh potensi masyarakat adalah model rekonsiliasi untuk membangun Aceh baru. Disamping rekonsiliasi dapat mengandung makna reunifikasi dan mencairnya kebekuan faksi atau kelompok yang ada dalam masyarakat, artinya bukan hanya pihak yang bertikai, agar tidak muncul dendam yang berkepanjangan dan rentan konflik horizontal.

#### **D. Transformasi Konflik Menurut Komunitas Non GAM**

##### **D.1. Manfaat Transformasi Konflik**

Perubahan struktur konflik pasca MoU Helsinki yang lebih bersifat horizontal, tentunya memerlukan langkah penyelesaian konflik. Disesuaikan dengan dinamika konflik. Tanggung jawab terletak pada masyarakat Aceh khususnya, serta para pemimpin lokal, regional dan nasional atau pihak terkait lainnya untuk mencegah, mengelola dan selanjutnya mentransformasikan konflik tersebut dalam upaya menuju Aceh damai.

Diharapkan setelah terjadi rekonsiliasi, akar permasalahannya dapat dipahami, maka perlu ditransformasikan untuk membangun budaya damai dan peningkatan kapasitas kelembagaan baik formal maupun non formal. Langkah rekonsiliasi setidaknya dapat dijadikan sebagai sebuah tahapan awal perjalanan transformasi konflik.<sup>132</sup>

Transformasi konflik secara tidak langsung dapat memberikan kesadaran pada pihak-pihak yang berkonflik, bahwa hal tersebut penting untuk dilakukan,

---

<sup>132</sup> Menurut Miall, Transformasi konflik merupakan pengembangan dari penyelesaian konflik, tujuannya untuk mentransformasikan hubungan sosial yang tidak adil. Dan istilah ini digunakan untuk memahami proses perdamaian, dimana transformasi bermakna sebuah urutan langkah-langkah transisi yang diperlukan. Dan transformasi konflik merupakan tingkat perubahan terdalam dalam proses penyelesaian konflik. (Miall, 2002 :31) Sedangkan menurut Lederach, Transformasi konflik merupakan upaya untuk merubah dinamika konflik ke dinamika perdamaian, disamping melihat akar konflik perlu juga dikembangkan akar perdamaian. Selanjutnya dapat ditransformasikan melalui kegiatan-kegiatan nyata, untuk mengubah situasi, membangun pemahaman atas perspektif yang berbeda tentang penyebab dan dinamika konflik, juga bekerja secara pro aktif dan bersama-sama memecahkan masalah dalam rangka mendukung pendekatan transformatif. (Lederach; 1997 : 23)



karena adanya keyakinan bahwa, manusia atau masyarakat dapat berubah ke arah perbaikan. Transformasi<sup>133</sup> sudah dilakukan oleh GAM dengan RI melalui perundingan demi perundingan, dan hal tersebut merupakan bagian dari tahapan transformasi. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa hal tersebut belum dilakukan oleh pihak GAM dan Non GAM (Aceh GAM dengan Aceh RI), bukankah melalui MoU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 seharusnya dapat membawa perubahan terhadap kondisi perdamaian dan dinamika konflik yang terjadi di Langsa (+ Aceh).

Konflik dapat memiliki konsekuensi yang merusak jika dibiarkan, tetapi konsekuensi yang ada dapat dimodifikasi atau ditransformasikan sehingga citra diri, hubungan, dan struktur sosial mengalami perbaikan. Biasanya hal ini melibatkan transformasi konteks, aktor, struktur, persoalan, kelompok dan personil, seperti yang disampaikan oleh Miall. Selanjutnya transformasi konflik yang efektif dapat berguna untuk meningkatkan pemahaman bersama menuju perdamaian yang positif.

Proses damai yang saat ini dijalankan, sebaiknya diikuti dengan usaha transformasi konflik yang menyeluruh disemua aspek dan dilakukan terus menerus, dalam proses perdamaian yang positif (permanen) dapat terwujud di Langsa dan Provinsi Aceh. Transformasi gerakan yang telah dilakukan oleh GAM mengandung makna integrasi nasional, namun tidak kalah pentingnya juga harus dilihat sejauh mana proses integrasi sosialnya, melalui dinamika integrasi sosial (program reintegrasi) mantan GAM/KPA dengan masyarakat Aceh yang Non GAM (Aceh RI) untuk mencegah timbulnya konflik komunal (horizontal). Seperti yang disampaikan Adi Tjondro, melihat kondisi Aceh secara umum, adalah sebagai berikut :

“Banda Aceh sekarang lebih kosmopolitan, ikon kapitalisme global banyak kita temukan di Aceh, bahkan yang di Medan tidak ada, di Aceh ada, ini semua membuat Aceh mengalami globalisasi materialistik lebih cepat, jadinya transformasi sosial di Aceh tidak berubah, meski trilyunan uang masuk ke Aceh. Transformasi konflik di Aceh diperlukan tidak hanya untuk mengakhiri atau mencegah timbulnya konflik baru, melainkan juga untuk memulai

<sup>133</sup> Penyelesaian konflik Aceh telah mengalami perubahan, dari pendekatan kekerasan menjadi pendekatan nir kekerasan melalui dialog/perundingan dan mediasi. Disisi lain pola perjuangan GAM juga telah mengalami perubahan, dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan lewat jalur politik.

sesuatu yang baru dan baik, dengan mempertimbangkan dalam diri masing-masing pihak yang bertikai". (Aditjondro; 2008 : 2)

Rekonsiliasi dan transformasi konflik dapat dikembangkan di Langsa (+ Aceh) dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun budaya damai untuk mencairkan kebekuan masing-masing kelompok, sekaligus untuk membuka ruang komunikasi, yang selama ini mengalami kebuntuan. Informan E (Langsa, 26 Oktober 2008) mengatakan bahwa :

"Transformasi sangat penting, untuk membangun trust, satu kepercayaan bersama, diawali dengan bentuk-bentuk komunikasi yang sederhana dan memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih konkrit bahwa dengan damai helsinki itu, mereka tidak mempunyai keinginan untuk mengarahkan pada merdeka atau mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. Agar hal Itu bisa dipahami oleh pihak PETA, dan pihak sana juga bisa memahami bahwa mengapa PETA melakukan perlawanan tidak lebih hanya mencintai negaranya dan melawan kekerasannya. Jika kesadaran itu ada pada kedua belah pihak maka itu cara paling baik untuk menyelesaikan konflik".

Transformasi konflik punya makna menggeser konflik kekerasan pada suatu kondisi yang dapat dikembangkan dengan suatu kerja sama antara pihak yang pro dan kontra (Aceh GAM dengan Aceh RI), sampai tercapainya suasana damai. Karena orang-orang dengan latar belakang yang berbeda pada prinsipnya bisa bekerjasama dengan baik, jika mereka sudah menyadari bahwa perdamaian merupakan kebutuhan bersama dan sesuatu yang mereka harapkan. Disamping penguatan basis sosial, ekonomi dan politik, keamanan hal yang perlu diperhatikan adalah, adanya peran pendidikan yang merupakan upaya konkrit dalam membawa masyarakat pada pemahaman yang benar terhadap makna perdamaian, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **D.2. Saran Komunitas Untuk Transformasi Konflik**

Perdamaian yang tidak aktif dipertahankan, akan kembali mengarah kepada pembusukan, dan godaan untuk kembali berkonflik, dan involusi perdamaian yang jalan ditempat. Mungkin secara formal kita masih berdamai, tapi secara substansial tidak layak lagi dikatakan perdamaian (Teuku Kemal Fasya, Bogor, 19-20 April 2008). Reintegrasi tidak berjalan, tidak ada satu elemen masyarakat yang menjembatani untuk dudukkan mereka ini (Aceh GAM-Aceh

RI). Sebagaimana yang disampaikan Informan A, bahwa, “orang yang menjadikan mereka duduk untuk mengatakan misi dan visinya ini tidak ada sehingga reintegrasi tidak berjalan” (Bireuen, 10 Februari 2008). Artinya diperlukan kerja sama dan kerja semua pihak yang punya atensi maupun berkewajiban terhadap proses perdamaian.

Opini komunitas tentang transformasi konflik, merupakan pendapat informan, yang menggambarkan bagaimana komunitas, melihat konflik serta bagaimana harapan mereka atas penyelesaian konflik pasca MoU Helsinki. Meski pandangan komunitas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya secara internal akan terkait dengan keadaan dalam komunitas, sementara secara eksternal akan terkait dengan pengalaman serta arah dari perkembangan konflik itu sendiri. Hal ini penting untuk diungkapkan dan dianalisis, karena dalam penyelesaian konflik yang sudah dilaksanakan belum pernah secara jelas melibatkan pihak masyarakat Aceh Non GAM.<sup>134</sup> Disamping mereka merupakan bagian dari aktor konflik, juga merupakan pihak yang ikut menentukan proses perdamaian positif di Aceh. Pada kenyataannya komunitas Non GAM, juga perlu diperhatikan bagaimana harapan mereka terhadap penyelesaian konflik, menurut komunitas tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa mereka ada, agar tidak terjadi upaya diskriminasi dan primordialisasi, tapi sebaliknya justru memiliki arti yang lebih dalam bagi proses demokratisasi dan perdamaian di Langsa (+ Aceh). Sehingga tersedia ruang-ruang publik untuk melakukan berbagai aktifitas, termasuk transformasi kegiatan menuju suasana damai permanen di Aceh. Sebagaimana yang disampaikan Informan K, sebagai berikut :

“Upaya untuk membangun perdamaian permanen yang paling berat adalah ruhnya MoU, yaitu membangun saling percaya. Ketika membangun rasa saling percaya yang harus diperbuat adalah bagaimana seluruh ucapan, tindakan dan perilaku semuanya menghindari konflik, mengarah pada damai. Menghindari konflik berarti menghindari permusuhan, berusaha untuk damai, bagaimana menjaga keamanan. Orang tidak akan merasa damai kalau dia tidak aman, artinya tidak ada permusuhan. Solusinya adalah membangun kepercayaan disetiap lini kehidupan, terutama tokoh-tokohnya. Proses menyakinkan kepercayaan kedua belah

<sup>134</sup> Kasyim, “jangan pernah mengabaikan aspirasi rakyat di lapisan manapun, karena dalam teori demokrasi, suara rakyat adalah suara “Tuhan”. Tanpa ada rakyat, tidak mungkin sebuah negara bisa berdiri dan dibentuk”. (Kasyim. 2005, 111)

pihak, harus sangat dijaga di lapangan makanya dibentuk FKK".  
(Informan K, Langsa, 28 Oktober 2008)

Semua pihak yang konsen dengan usaha pembangunan di Aceh, sebaiknya secara bersama melihat akar perdamaian, yang perlu dikembangkan guna mendukung proses perdamaian. Membuat kondisi yang diperlukan bagi perdamaian positif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan cara yang komprehensif menurut komunitas.<sup>135</sup> Komunitas dapat mengacu pada pengertian komunitas lokal, seperti yang dikemukakan oleh Green dan Haines (2002 : 4).

Dalam upaya tersebut perlu diawali dengan mengadakan pendekatan pada masing-masing kelompok, diadakan pertemuan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, untuk bersama-sama menggagas perdamaian dan mendinginkan suasana. Selanjutnya perlu kerjasama, mensosialisasikan setiap hasil pertemuan pada masyarakat Aceh khususnya, untuk merubah wacana konflik ke suasana damai, dan dibarengi dengan pendampingan, untuk memelihara perdamaian berkelanjutan.

Menurut Informan M, "di Aceh, forum bersama menjadi penting untuk menjembatani kelompok-kelompok yang berseberangan, misalnya forum menuju masyarakat damai yang akan menggagas pertemuan-pertemuan bersama, dalam rangka merencanakan dan merealisasikan konsep-konsep perdamaian. Melalui orang-orang terdekat, kemudian melebar pada lokasi-lokasi lain, dibangun tali silaturahmi, dan mencoba melupakan masa lalu untuk menyambut masa depan Aceh damai" (Informan M, 25 Februari 2008). Sedangkan menurut Informan E, bahwa : "forum bersama diperlukan di Langsa, karena tanpa ada satu kebersamaan yang diawali dengan komunikasi kemudian dibentuk forum bersama, maka tidak akan pernah ada titik temu, yang ada saling curiga. Tapi kalau sudah berada dalam satu forum yang sama atau paling tidak saling mengenal curiga itu mulai berkurang dan dengan dialog-dialog lanjutan akan terselesaikan" (Informan E, Langsa, 26 Oktober 2009).

<sup>135</sup> Sedangkan menurut Rukminto, mengacu pada pengertian komunitas dalam arti komunitas lokal, berarti melihat komunitas. Sekurang-kurangnya mempunyai tiga unsur dasar yaitu : (1) adanya batas wilayah atau tempat (territory or place), (2) merupakan suatu "organisasi sosial", atau institusi sosial yang menyediakan kesempatan untuk para warganya agar dapat melakukan interaksi antar warga, (3) interaksi sosial yang dilakukan terjadi karena adanya minat ataupun kepentingan yang sama (Rukminto; 2008 : 117-118). Hal tersebut cukup relevan dengan pengertian komunitas dalam penelitian ini.

### D.3. Saran Untuk Kelembagaan Dalam Transformasi Konflik

Perdamaian berkelanjutan, setidaknya mensyaratkan institusionalisasi yang mendalam, dalam proses partisipatif untuk menjamin rasa aman dan kehidupan yang damai pasca MoU Helsinki. Pembangunan perdamaian dan keamanan berkelanjutan, akan sangat berguna bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas sesuai habitatnya masing-masing dan memberikan peluang untuk mengembangkan diri, serta meningkatkan kesejahteraan. Disamping suasana damai juga mendukung terlaksananya bagi sistem pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Menurut peneliti, terkait akar perdamaian, sebagai berikut : “akar perdamaian dapat dilihat dari nilai sosial yang telah ada seperti toleransi, saling menghargai dan saling percaya serta saling mendukung (Asah, Asuh dan Asih). Disisi lain dapat dilihat dari institusi seperti struktur lembaga masyarakat (keluarga, agama, adat, dan non pemerintah). Keberhasilan implementasi damai di Langsa (+ Aceh) sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi-institusi dalam menjaga kestabilan sistem paska konflik”. Sedangkan Rasmussen, berpendapat bahwa, “agar upaya menuju damai lebih efektif, maka para *policy makers*, kaum elit yang mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan masyarakat harus mendukung, termasuk para pemimpin militer dan elit politik sipil di parlemen” (Rasmussen; 1997 : 42-43). Menurut Mufti, “transformasi terkait dengan kombatan seperti kemampuan tempur, afiliasi dan jaringan serta potensi-potensi negatif yang pernah digunakan pada masa konflik. Pemaksaan untuk tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku mungkin membantu membatasi dan menekan penggunaannya, namun tidak otomatis menghilangkannya”. (Mufti; 2007 : 3)

Transformasi gerakan sosial GAM mengandung konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam hal reintegrasi mantan GAM ke dalam masyarakat, sesuai muatan MoU Helsinki. Sehingga program reintegrasi perlu penanganan secara serius terutama penanganan terhadap para mantan kombatan, dengan pertimbangan masih banyaknya senjata yang beredar di Aceh. Hal tersebut agar diperhatikan dan tidak dapat diabaikan untuk menjamin langgengnya sebuah perdamaian. Mereka rawan untuk mencederai perdamaian dengan berbagai alasan, disamping dapat dimobilisasi untuk mendukung para pihak yang tidak puas

dengan substansi kesepakatan damai, bahkan berpengaruh signifikan terhadap arah formulasi perdamaian.

Problema transformasi bidang sosial dan ekonomi bagi kombatan GAM dan korban konflik, sebaiknya sebanding dengan transformasi bidang politik, dan disertai dengan pendampingan yang intensif. Khususnya terkait kompensasi agar tepat sasaran dan bisa dikembangkan untuk perbaikan ekonomi untuk kelangsungan hidup mereka beserta keluarganya.<sup>136</sup> Karena problema kompensasi inilah yang selalu membelenggu salah satu pihak dalam perundingan damai, seperti dalam beberapa perundingan sebelumnya yang mengalami kegagalan. Seperti disampaikan Informan N (10 April 2008),

“Memberikan bantuan keuangan yang banyak pada Provinsi Aceh dan bantuan dana korban konflik atau kompensasi kepada masing-masing kelompok, dari sisi jumlah sudah menimbulkan kecemburuan, hal itu justru bukan membantu bahkan sebaliknya dapat dikatakan sebagai racun yang menebarkan bibit-bibit konflik baru”.

Perdamaian yang berkelanjutan, menunjukkan proses perdamaian yang positif dalam jangka waktu yang lama, sehingga perlu memasukkan unsur penguatan institusi formal maupun non formal. Disesuaikan dengan dinamika lokal, sebagai unsur bagi mediasi konflik dan perubahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan program bina damai<sup>137</sup>, untuk membuat kondisi yang diperlukan bagi perdamaian positif dan berkelanjutan.

Ukuran dari bina-damai tersebut terkait dengan isu inti dari pemanfaatan kondisi masyarakat dan pemerintah (Negara). Walaupun dalam prosesnya akan melibatkan kerjasama antar lembaga dengan isu yang beragam, namun hal tersebut bertujuan untuk mencegah pecahnya atau terjadinya konflik, kekerasan yang baru, dan dapat menjalin konsolidasi perdamaian. Dalam hal ini proses transformasi konflik dapat mengacu pada individu, kelompok, institusi atau aktor yang terlibat di dalam konflik maupun yang akan terimbas oleh konflik.

<sup>136</sup> Pada dasarnya tujuan pemberian dana kompensasi yang dikenal dengan dana Pemberdayaan Ekonomi (PE), adalah untuk pemberdayaan ekonomi para korban konflik, baik secara individu maupun kelompok, dalam merespon bagi kebutuhan dasar.

<sup>137</sup> Program bina damai, pada dasarnya merupakan program yang dapat mendukung terciptanya suasana damai, seperti padat karya, gotong royong, koperasi, silaturahmi, olah raga bersama, kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lain. Sejauh semua program tersebut dikelola dengan baik, sehingga berdampak positif.

Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan di Aceh, darimana kita mau menyelesaikan persoalan, karena masalahnya terlalu banyak, maka kita mulai saja dari bawah, masing-masing pemimpin daerah menyelesaikan persoalan dari bawah (Informan Q, Langsa, 2 Nopember 2008). Dengan demikian jalur komunikasi dapat dibangun dalam upaya menyelesaikan konflik, sampai pada tingkat pemahaman persoalan, yang ada di masyarakat dari tingkat gampong, kecamatan, kabupaten dan kota serta tingkat Provinsi Aceh. Akhirnya sampai pada tingkat penyelenggara negara, untuk mengambil kebijakan, terkait terwujudnya perdamaian positif di Aceh. Karena komunikasi dapat dikatakan sebagai jantung dari konflik dan resolusi konflik. Seperti yang disampaikan Informan E di Langsa, sebagai berikut :

“Sesuai dengan pergeseran konflik dari vertikal ke horizontal, maka negara harus berperan mencari solusi, dari pihak-pihak yang berkonflik secara horizontal tadi sesuai dengan motifnya. Kalau yang motifnya itu sosial ekonomi ya terapi sosial ekonomi, kalau konfliknya terkait dengan pertahanan dan keamanan serta ideologi, pendekatannya disesuaikan. Sehingga tidak ada rasa saling curiga, makanya sangat dibutuhkan sebuah forum. Karena rasa curiga akan hilang manakala kita dalam satu forum yang sama, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Bisa dilakukan oleh pemerintah pusat bisa juga oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan satu rancangan dasar, pemikirannya itu kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun yang paling bagus itu sebenarnya, sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, agar terkesan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah Aceh secara keseluruhan”. (Informan E, Langsa 26 Oktober 2008)

Untuk membangun dan memupuk kembali rasa kebersamaan yang sudah melemah, perlu turun tangan pemerintah. Untuk menghindari perpecahan, karena provokasi dari pihak-pihak yang menginginkan konflik Aceh terus hidup (Informan J, Langsa, 24 Juli 2008). Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Informan K bahwa, untuk menghindari perpecahan karena provokasi dari pihak-pihak yang menginginkan konflik Aceh terus hidup, maka pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bekerja keras menciptakan, membangun dan memupuk kembali rasa kebersamaan yang sudah melemah. (Informan K, Langsa, 28 Oktober 2008)

Sementara dalam proses perdamaian di Aceh, menurut Informan O, bahwa : “perdamaian di Aceh itu, kalau rakyat ingin tetap tenang dan damai, karena

sudah betul-betul trauma dengan masa lalu. Semoga KPA, FORKAB, PETA punya *positif thinking* dan ada pihak-pihak tertentu apakah ALA dan ABAS, berjuanglah sesuai koridor hukum, jangan mempengaruhi rakyat seperti mengingat masa lalu, buru sana-buru sini, jadi jangan dipaksa, karena itu yang menyebabkan perdamaian akan terganggu” (Langsa, 29 Oktober 2008). Peran pemerintah sangat diperlukan khususnya dalam penegakan hukum, untuk mengurangi atau membatasi pelanggaran norma sosial maupun norma hukum, yang berdampak signifikan terhadap munculnya konflik baru di Aceh.

Proses demokrasi masih tetap merupakan langkah transformasi konflik yang perlu dikedepankan menyangkut lima aspek transformasi konflik dalam proses penyelesaian konflik, yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya (Analisis). Pentingnya membangun komunikasi menempatkan pihak-pihak yang berkonflik pada suatu kesamaan dan kebersamaan serta memberikan kesempatan untuk menghilangkan sikap saling curiga, dan dominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Semuanya bergantung pada masyarakat Langsa (+ Aceh) khususnya dan pemerintah daerah (kab/kota dan Provinsi) serta pemerintah pusat, disamping tentunya, adalah pihak lain yang punya atensi, terhadap perdamaian.

## **E. Analisis**

### **E.1. Konflik Aceh GAM Dengan Aceh RI**

Sebagaimana sudah diuraikan pada bab terdahulu bahwa, masih ada dua aroma sekaligus yang dapat dicium dan dilihat di Langsa (Aceh), yakni aroma konflik dan aroma perdamaian. Aroma perdamaian mungkin lebih tepat dibaca sebagai perdamaian antara GAM dengan Pemerintah RI. Sedangkan aroma konflik bisa dilihat dari antar masyarakat Aceh sendiri (GAM dengan Non GAM) sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran konflik di Aceh, meskipun masih bersifat laten, namun dinamikanya masih sering ditandai dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan. Jika sebelum MoU Helsinki, konflik bersifat vertikal antara “Aceh” dengan “Jakarta”, maka sekarang konflik dapat bersifat horizontal antar masyarakat Aceh sendiri (Aceh GAM dengan Aceh RI).

Dalam konflik Aceh, selain GAM juga muncul kelompok anti GAM, keadaan demikian menunjukkan fenomena yang “problematik” atau “paradoks”,



dimana ada gerakan separatisme, kemudian muncul gerakan anti separatisme. Fenomena yang cukup menarik adalah timbulnya pembelahan-pembelahan kelompok yang pro dan kontra terhadap Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang terjadi di Aceh antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan kelompok Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG), pasca MoU Helsinki berubah menjadi KPA dengan PETA, kemudian muncul Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB). Sedangkan Aceh RI (PETA) Kota Langsa, diantaranya Front Matari, Front Laskar Rakyat, Front Anak Bangsa, Front Hubul Watani, Front Merah Putih, Front Penyelamat Merah Putih, dan Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ).

Konflik biasanya dimulai dari ketegangan-ketegangan yang bersifat laten, kemudian dapat berkembang menjadi konflik terbuka, berupa pergerakan kekuatan kelompok untuk menunjukkan eksistensinya, maka konflik dapat menjurus pada sifat-sifat destruktif, dan menjadi konflik terbuka. Potensi konflik laten di Langsa (Aceh) antara Aceh GAM dengan Aceh RI, akan bermuara negatif dan berujung pada konflik terbuka, bila tidak dikelola dengan baik.

Permasalahan tersebut masih menjadi isu strategis, baik di tingkat internasional, regional, nasional, maupun di tingkat lokal. Ditingkat lokal, tokoh masyarakat Langsa (+ Aceh) baik formal maupun non formal. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat, juga secara aktif ikut berperan dalam mewujudkan masa depan Aceh yang lebih baik, dan tetap dalam kerangka NKRI. Namun satu hal yang perlu diingat dan disadari bahwa persoalan di Aceh bukan hanya permasalahan Rakyat Indonesia yang berada di Aceh saja, melainkan juga permasalahan Rakyat Indonesia secara keseluruhan, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan perdamaian positif di Aceh dan tetap dalam kerangka NKRI. Untuk mencegah terjadinya dis integrasi bangsa.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa konsep resolusi konflik yang dapat memberikan harapan pada proses perdamaian positif masih diperlukan, dalam konteks integrasi sosial. Berbagai reaksi dan analisis terhadap MoU Helsinki, hendaknya dilihat dalam kerangka konflik Aceh yang melibatkan tiga pihak, yakni: Pemerintah Pusat, GAM dan Masyarakat Aceh. Konflik bersenjata dan kekerasan antara Pemerintah Pusat dengan GAM telah berlangsung sejak

tahun 1976, demikian pula antara GAM dengan masyarakat Aceh. Hal tersebut didasarkan pada format dari konflik antara GAM dengan Pemerintah Pusat, serta masyarakat Aceh Non GAM lebih mudah pada suatu dikotomi konflik daripada pengintegrasian, dan rekonsiliasi. Bahkan dikotomi antara masyarakat Aceh sudah pula mengikuti pihak-pihak yang berkonflik tersebut (antara Pro NKRI dan Pro GAM).

Integrasi sosial, masih memerlukan proses panjang dan perlu sinergi dari berbagai pihak yang punya atensi terhadap perdamaian, terutama mereka yang berkonflik. Upaya-upaya resolusi konflik perlu keseriusan untuk dapat memulihkan kondisi integrasi sosial masyarakat Aceh menuju perdamaian positif. Karena melalui MoU Helsinki apinya sudah dipadamkan, tetapi bara apinya masih ada dan setiap saat bisa menyala kembali. Ada beberapa hal, yang menurut peneliti dapat dikatakan sebagai hambatan resolusi konflik.

## **E.2. Hambatan Resolusi Konflik**

Beberapa hambatan resolusi konflik di Langsa (Aceh) yang perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut :

### **1) Sentimen Etnis dan Kedalaman Konflik**

Satu hal yang paling menonjol dalam hal ini adalah adanya dikotomi Aceh dan Jawa atau etnis Aceh dan etnis Jawa, yang dimaknai sebagai situasi etnonasionalisme Aceh dan kolonialisme Jawa, hal tersebut dijadikan sebagai “*Comen Denomator*” seperti menghalalkan darah orang Jawa dan Cuak untuk dibunuh.

Konflik berkepanjangan di Aceh, dan masih dirasakan dampaknya hingga saat ini, salah satunya adalah bersandar pada perbedaan permasalahan etnis, yakni sentimen satu etnis (Aceh) terhadap etnis lainnya (Jawa). Dampaknya menimbulkan kecurigaan etnis dan dapat memicu munculnya konflik diantara dua belah pihak. Di Langsa (+ Aceh) sangat diwarnai oleh sejarah konflik yang berkepanjangan, akhirnya terakumulasi dan terekspresikan menjadi sentimen etnis. Dalam perkembangannya justru berpengaruh pada kedalaman konflik itu sendiri, terutama antara sebagian suku Aceh terhadap keturunan Jawa di Aceh.

Semakin kuat konflik etnis diantara dua kelompok yang bertikai, maka semakin dalam pula permusuhan diantara keduanya. Konflik antar kelompok dan solidaritas kelompok dapat membuat tekanan untuk terjadinya konflik. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam itu bertambah tinggi, karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Kekompakan yang semakin tinggi dari suatu kelompok itu dampaknya pada kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan konflik.

## **2) Perbedaan Persepsi Masyarakat Terhadap Perdamaian Di Aceh**

Pasca MoU Helsinki, Aceh kini masuk dalam era perdamaian. Masalah yang paling serius adalah tahap penjagaan perdamaian, yaitu sejauhmana implementasi atas kesepakatan yang dihasilkan selama perdamaian. Masih banyak interpretasi berbeda atas apa yang tertuang dalam perjanjian Helsinki, yang justru berpengaruh pada dinamika konflik. Dinamikanya masyarakat masih berada dalam suatu situasi kekhawatiran, karena masih banyak beredar senjata illegal ditangan pihak-pihak tertentu, yang ditandai dengan meningkatnya tindakan kriminalitas dengan menggunakan senjata api baik laras pendek maupun laras panjang.

Masa transisi di Aceh masih diwarnai oleh merebaknya konflik-konflik internal seperti, kemiskinan, pengangguran. Memburuknya situasi transisi diawali terjadinya polarisasi yang tajam ditingkat elit, karena sibuk memperebutkan sumber daya politik dan ekonomi, seperti menjamurnya partai-partai baru khususnya di tingkat lokal. Oleh karena itu era transisi bisa dikatakan sebagai era pertarungan politik yang krusial bagi masyarakat. Fenomena parlok akan berdampak negatif bagi masyarakat dan demokrasi Aceh, apabila fenomena itu sekedar menjadi manifestasi dari fanatisme ke Acehan. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada semangat perdamaian, dan terjadinya mis komunikasi terkait integrasi nasional maupun integrasi sosial.

Perdamaian di Langsa nampaknya masih didominasi oleh kontrol dan adanya keterpisahan serta keterputusan hubungan antara kelompok-kelompok yang berseberangan. Hal ini tidak menunjukkan perbaikan pada keadaan damai

jangka panjang, yang sangat membutuhkan sebuah pola kerjasama dan perpaduan antara kelompok-kelompok tersebut. Sementara masyarakat Langsa sendiri masih menginginkan perdamaian dalam arti sebenarnya, yaitu damai dalam kehidupan, damai dalam hati dan pikiran, agar mudah mencari rezeki, mudah dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi serta silaturahmi dengan sanak saudara. Orang bisa kembali ke aktivitas habitatnya masing-masing, ke kebun, ke sawah, berdagang, nelayan melaut dan lain-lain. Utamanya jangan ada dusta diantara mereka.

Perdamaian di Aceh yang masih perlu mendapat perhatian serius, didasarkan pada perkembangan situasi, seperti : 1) damai hanya sekedar ketiadaan perang, 2) masih adanya bibit permusuhan dan perbedaan persepsi tentang perdamaian, khususnya antara GAM dan Non GAM (KPA dengan PETA dan FORKAB), 3) masih didominasi oleh kontrol dan kendali keamanan, 4) kelompok-kelompok yang ada masih bersifat unit-unit besar, yang saling berseberangan dan cenderung terpusat serta berorientasi penyeragaman, 5) adanya tuntutan pemekaran wilayah ALA dan ABAS, 6) masih berpotensi pada konflik kekerasan.

Tabel 20  
Perbedaan Antara Damai Positif Dan Damai Negatif

No	Damai Negatif	Damai Positif	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Damai sementara</li> <li>• Sekadar ketiadaan perang</li> <li>• Menyimpan bibit permusuhan dan saling curiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Damai jangka panjang</li> <li>• Bukan sekedar ketiadaan perang</li> <li>• Mempromosikan keadilan, kepercayaan, dan empati</li> </ul>	Ciri-ciri
2	Kontrol dan kendali keamanan	Kerjasama dan dialog	Penekanan
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memutus hubungan antara kelompok (<i>Disasosiatif</i>)</li> <li>• Damai dimulai dari atas ke bawah (<i>Trickle down strategy</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan hubungan antara kelompok (<i>Asosiatif</i>)</li> <li>• Damai dimulai dari bawah ke atas (<i>Trickle up strategy</i>)</li> </ul>	Strategi
4	Rendah	Tinggi	Interaksi sosial
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit besar</li> <li>• Pemusutan</li> <li>• Orientasi penyeragaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit kecil</li> <li>• Otonom</li> <li>• Orientasi keragaman</li> </ul>	Organisasi sosial
6	Menghapus kekerasan yang bersifat langsung	Mengelola sebab-sebab kekerasan: sikap dan struktur	Orientasi kebijakan
7	Mengarah kepada kekerasan yang lebih besar di masa depan	Menjamin damai jangka panjang	Implikasi

Sumber : Irwan Abubakar dan Chaidar S. Banualim, Th. 2006.

Meskipun tidak dikatakan, dari perilaku masyarakat itu jelas mengatakan bahwa perdamaian yang ada sekarang ini adalah perdamaian yang semu, perdamaian yang nampak dipermukaannya damai tapi di dalamnya tidak damai. Masih ada agenda-agenda yang tersimpan, perilaku pada saat konflik vertikal antara Pemerintah dengan GAM itu masih tetap berlangsung, seperti pajak nanggroe, intimidasi dan berbagai tindakan kekerasan lainnya.

Rekonsiliasi dan reintegrasi sosial sebagai akar perdamaian di Langsa (Aceh), masih merupakan proses panjang. Perlu sinergi dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya khususnya aktor-aktor yang mewarnai dalam konflik, untuk mewujudkan proses perdamaian positif. Damai positif mengandaikan masyarakat yang berinteraksi dalam pelbagai bentuk kerjasama; mengandaikan organisasi sosial yang terdiri dari pelbagai ragam orang, yang dengan sengaja bekerjasama dalam rangka kemaslahatan bagi semua. Ia juga melibatkan usaha yang menciptakan keadaan-keadaan positif yang dapat mengatasi dan menghindari sebab-sebab utama konflik yang menghasilkan kekerasan.

### 3) Perubahan Struktur Konflik dan Potensi Konflik Laten

Melihat cakupan resolusi konflik yang luas, penghambat resolusi konflik juga bersifat cair, inheren, dan dinamis. Oleh karena itu, penyelesaian konflik juga harus bersifat cair dan terlibat dengan pergeseran hubungan yang kompleks. Dengan pengertian ini, konflik sejatinya bukan antar aktor-aktornya, namun lebih merupakan hubungan yang dinamis antara satu situasi dengan situasi lainnya. Persoalan, aktor, dan kepentingan selalu berubah dan motor perubahan ini tidak melulu aktornya saja. Hal ini menjelaskan mengapa terbunuhnya pemimpin pemberontakan tidak selalu mengakibatkan berakhirnya suatu konflik. Hal-hal berikut ini menunjukkan bahwa struktur konflik di Aceh telah dan sedang berubah dan resolusi konflik masih mempunyai banyak tantangan.

#### a. Perubahan Struktur Konflik

Aktor konflik di Aceh dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu *pertama*, kelompok GAM yang mewakili sebuah pemberontakan sering disebut sebagai gerakan separatis yang melakukan perlawanan kepada Pemerintah Pusat dengan segala

taktik dan strateginya, pasca MoU Helsinki telah merubah gerakan bersenjata menjadi perjuangan lewat jalur politik. *Kedua*, Pemerintah Pusat dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI. *Ketiga*, gerakan anti separatisme pro pada Pemerintah Pusat dengan alasan tetap ingin mempertahankan kedaulatan NKRI di Bumi Aceh dan mengadakan perlawanan terhadap berbagai tindakan kekerasan GAM. Meskipun yang tampak dipermukaan adalah konflik vertikal lebih menonjol yaitu antara GAM dengan Pemerintah RI.

Sebenarnya embrio tumbuhnya kelompok anti separatist (Pro Pusat), yang di Aceh dikenal dengan Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG) dan pasca MoU Helsinki lebih dikenal dengan sebutan PETA, telah ada seiring dengan berkobarnya konflik GAM dengan Pemerintah RI. Meski euforia munculnya kelompok-kelompok tersebut justru setelah jatuhnya orde baru, sebagai dampak dari berbagai tindakan kekerasan yang tidak terkendali, pada masa reformasi mulai bergulir di Indonesia. Masyarakat yang dianggap bertentangan dengan idealisme perjuangan GAM, dan membantu Pemerintah Pusat di cap sebagai "CUAK", mereka menjadi sasaran teror, intimidasi, penculikan dan pembunuhan, di Langsa dikenal dengan pembantaian para Cuak. Para keluarga korban akibat tindakan kekerasan, seperti pembunuhan para Cuak, setidaknya menyimpan rasa dendam, demikian juga para keluarga korban konflik lainnya, sehingga permasalahan dendam sulit dihapuskan.

Perkembangan kasus konflik Aceh, kebanyakan yang menjadi korban adalah orang yang lemah, beperan pasif dan tidak agresif, tidak ikut serta menyumbang bagi terjadinya pembunuhan atas dirinya, atas kesalahan pelaku yang dianggap sebagai orang yang agresif dan kejam. Orang-orang yang lemah dan merasa senasib pada akhirnya membentuk suatu kelompok untuk mengadakan perlawanan. Sehingga terbentuklah Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG) diberbagai daerah kab/kota di Aceh dengan nama dan bentuk organisasi yang berbeda-beda, sesuai ciri daerah masing-masing. Kekuatan baru anti gerakan separatisme tersebut lebih memahami tentang karakteristik Aceh maupun kondisi GAM, khususnya kombatan GAM, dan keberadaannya setidaknya berdampak pada demoralisasi dikalangan GAM. Meski banyak pihak yang mengatakan bahwa mereka adalah milisi.

Namun hal tersebut perlu ditarik terhadap pemahaman dilapangan, karena dinamikanya kelompok front merupakan bagian dari upaya masyarakat yang terancam keselamatan jiwanya oleh GAM, sehingga melakukan perlawanan. Sementara yang disebut sebagai milisi adalah kelompok rakyat yang dilatih oleh militer, dipersenjatai untuk melawan musuh negara. Sedangkan bentuk perlawanan rakyat terhadap GAM tersebut tidak menggunakan senjata dan mereka tidak pernah dilatih oleh militer. Kelompok anti separatis dan pro kepada Pemerintah Pusat dapat dipahami sebagai gerakan sosial dan merupakan perilaku kolektif yang ditandai dengan kepentingan bersama dan memiliki tujuan mempertahankan eksistensinya dari serangan kekerasan pihak lain, disamping ikut mempertahankan kedaulatan negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, Pasal 30, tentang Hak Bela Negara, untuk mencegah terjadinya dis integrasi bangsa.

Mereka adalah bagian dari Rakyat Aceh yang menjadi korban konflik. Korban dikalangan rakyat yang tidak ikut-ikutan biasanya akan menyisakan semakin panjang daftar orang-orang yang sakit hati, serta dendam yang susah diobati, dan suatu ketika kelak dapat tampil sebagai salah satu penyebab konflik. Bahkan penyebab utama dari konflik berikutnya, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal, yang semakin akut.

Struktur konflik di Langsa (+ Aceh) pasca MoU Helsinki, secara umum dapat dilihat dari dua kelompok, yakni Aceh GAM dan Aceh RI, yang merupakan potensi konflik laten, diantaranya terkait masalah identitas, kesenjangan sosial dan ekonomi, politik, prasangka dan dendam. Struktur konflik seringkali melibatkan persoalan tentang ketidakadilan dan tujuan-tujuan yang saling tidak sejalan. Konflik-konflik semacam ini seringkali menuntut usaha yang intensif, perlu waktu untuk menghasilkan perubahan yang konstruktif menuju perdamaian positif.

#### b. Potensi Konflik Laten

Pasca Helsinki, arus perubahan di Aceh menunjukkan adanya pembelahan-pembelahan kelompok yang berpotensi munculnya konflik horizontal, meskipun masih bersifat laten, karena pada perkembangannya kelompok-kelompok tersebut saling berseberangan, dipenuhi ketegangan saling curiga, dan masih kuatnya



prasangka bahwa kelompok yang satu akan mengkhianati kelompok lain. Berakibat pada masyarakat Aceh yang mengalami kondisi dilematis. Artinya masyarakat masih sangat berhati-hati dalam berinteraksi.

Dinamika di lapangan, konflik diantaranya disebabkan adanya faktor identitas kelompok kesenjangan sosial dan ekonomi, politik, prasangka dan dendam. Dinamika tersebut menunjukkan adanya situasi ketidak pastian atau dikenal dengan situasi anomie diantaranya dapat dilihat dari situasi atau keadaan sebagai berikut :

1. Rendahnya "Trust" pada Pemerintah, karena ketidak pastian situasi politik.
2. Ketidak pastian dalam kehidupan ekonomi.
3. Tidak ada harapan pada kehidupan masa depan (membuat orang/kelompok menjadi pesimis).
4. Terjadi individual anomie, karena tujuan hidupnya tidak jelas, mudah direkrut untuk melakukan pembunuhan dan tindakan kekerasan.
5. Sesuatu yang diberikan atau didapat adalah merupakan haknya dan bukan merupakan pemberian atau bantuan dari orang lain/pihak luar.
6. Karakter temperamental cukup menonjol.

Dalam situasi ketidak pastian membuat seseorang lebih mudah dipengaruhi untuk bergabung dengan kelompok dan melakukan berbagai tindakan kekerasan seperti membunuh maupun menculik dan menyiksa. Disamping kondisi kemiskinan yang cenderung dipertahankan di Langsa (Aceh), sehingga alternatif yang dapat mengentaskan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan rakyat hanya ada satu alternatif yaitu merdeka secara teritorial (lepas dari NKRI), karena sebelum merdeka, maka selama itu kondisi relatif kemiskinan/tidak sejahtera, selalu dipelihara. Pemanfaatan kondisi psikologis masyarakat, ada kecenderungan dibuat kondisi ketidak pastian (anomie) dengan berbagai tindakan intimidasi, konflik fisik, pengangguran dan pemiskinan, dengan kata lain dicabut hak-haknya supaya memberontak dan tetap terpeliharanya sifat kepahlawanan dan Tumbila (balas dendam/melalui Milad GAM), sehingga situasi anomie menjadi laten.

Hal lain yang perlu dipahami, karena adanya persoalan keamanan dan ideologi, serta hak-hak sipil mereka yang merasa terganggu dengan pola perjuangan masing-masing kelompok yang bertentangan. Satu kelompok

menginginkan Aceh lepas dari NKRI, sementara kelompok yang lain tidak menginginkan Aceh lepas dari NKRI. Jadi sepanjang masih ada agenda tersembunyi yang bersifat etnonasionalisme Aceh, maka persoalan rekonsiliasi antara KPA dan PETA tidak akan pernah terselesaikan. Hal itu akan mengkristal menjadi potensi konflik laten, yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik terbuka.

Ketegangan-ketegangan yang bersifat laten, dapat berkembang menjadi konflik terbuka, berupa pengerahan kekuatan kelompok masing-masing. Bila sudah melampaui ambang batas toleransi maka konflik yang ada akan menjurus kepada sifat-sifat destruktif, dan saling berusaha menghancurkan serta membinasakan lawan, tidak lagi fokus pada persoalan atau kepentingan dari masing-masing kelompok.

#### **4) Pemberontakan Symbolis**

Dalam pengembangan diskusi dengan sosiolog UI, Dr. Iwan Gardono Sujatniko, bahwa "Pemberontakan Symbolis" masih mewarnai perjuangan GAM Pasca MoU Helsinki, meskipun telah terjadi perubahan pola perjuangan dari gerakan bersenjata ke perjuangan politik, namun nuansa merdeka masih mewarnai perjuangan GAM.

Sementara dalam perspektif Merton, konflik di Aceh bisa dilihat sebagai sebuah cara adaptasi sebagian orang Aceh terhadap struktur sosial dan situasi anomie yang ditimbulkannya. Dengan cara pandang demikian, konflik seharusnya ditangani dengan perubahan struktur sosial dan transformasi berbagai konteks yang menyebabkan situasi anomie. Pemberontakan (Rebellion) merupakan salah satu tipologi adaptasi terhadap tindakan/tekanan struktur yang dialami.

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan. (Weda; 1996 : 32)

Merton (1986 ; 194), menyebutkan lima tipologi adaptasi atau penyesuaian diri terhadap tindakan/struktur yang dialami yaitu :

- “1) Conformity, penyesuaian diri atau konformitas, yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat.
- 2) Inovation, Inovasi yaitu menemukan cara-cara baru dengan mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- 3) Ritualism, ritualisme atau kepasrahan (pembiasaan), dimana masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan.
- 4) Retreatism, penarikan diri, dimana warga masyarakat menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.
- 5) Rebellion, pemberontakan merupakan reaksi yang sama sekali berbeda dengan keempat tindakan sebelumnya, dimana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha mengganti atau mengubah seluruhnya.”

Teori Deprivasi Relatif Gurr, bertolak dari perbandingan seseorang atau kelompok dengan orang atau kelompok lainnya, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli untuk digunakan di dalam berbagai penelitian yang mereka lakukan, khususnya di dalam permasalahan pemberontakan yang bersifat politik. Konsep kekerasan politik yang didefinisikan Gurr terasa sangat luas karena meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah ancaman penggunaan kekerasan secara bersama. Konsep itu termasuk revolusi, perang gerilya, kudeta, kerusuhan dan pemberontakan. Gurr (1970 : 24), melihat bahwa kekerasan politik terjadi ketika banyak anggota masyarakat yang menjadi marah, ketika terdapat jurang pemisah antara harapan-harapan yang dimiliki terhadap sesuatu yang diinginkan. Jurang pemisah ini melahirkan suatu kondisi yang disebut “Kekerasan Relative” (*Relative Deprivation*).

Lebih lanjut Merton mengatakan bahwa pemberontakan menyiratkan reaksi tindakan untuk melembagakan (*institutionalize*) tujuan-tujuan baru dan cara-cara baru secara meluas. Pemberontakan adalah upaya-upaya untuk mengganti struktur dan tatanan sosial budaya yang ada dengan yang baru. Seorang pemberontak menginginkan sebuah tatanan baru, bukan mengubah, namun mengganti.

GAM pasca MoU Helsinki: Pemberontak atau bukan? Jawabannya adalah jika NKRI dengan segala tatanannya diterima oleh GAM, maka dalam perspektif

Merton, GAM bukanlah pemberontak, namun tengah atau sedang beradaptasi dengan struktur dengan cara menyesuaikan diri atau mencari terobosan-terobosan dalam kehidupan bersama warga Indonesia lainnya. Namun jikalau GAM menolak struktur sosial budaya turunan NKRI dan tetap berkeinginan untuk mengganti dengan struktur yang baru (sistem politik baru, sistem ekonomi baru, hubungan luar negeri sendiri, dll) maka boleh dikatakan bahwa sebenarnya GAM tidak sedang menyesuaikan diri atau berinovasi, namun sedang memberontak, sekalipun tanpa senjata.

Untuk mencapai tujuannya, pemberontakan biasanya menciptakan sebuah mitos mengenai pentingnya struktur yang baru. Orang-orang direkrut untuk mempercayai hal itu, misalnya menciptakan keyakinan bahwa kita tidak mungkin lebih baik kondisi ekonomi (makmur) jikalau masih berada dalam struktur yang lama, segala kegagalan atau kekurangan saat ini disebabkan oleh struktur yang menindas, jawaban satu-satunya untuk keluar dari penderitaan ini ialah merdeka. Keyakinan-keyakinan ini menurut Merton mempunyai dua fungsi. Pertama, untuk menampung rasa frustrasi atas penderitaan yang ada, dan yang kedua, untuk menggambarkan kondisi struktur yang baru yang dituju. Keyakinan ini lama-kelamaan akan menjadi doktrin yang memonopoli imaginasi. (Merton; 1968:194)

GAM adalah Gerakan Aceh Merdeka, secara eksplisit makna dan nuansa merdeka masih mewarnai perjuangan GAM, yang belum atau tidak mau membubarkan diri pasca MoU Helsinki, dengan alasan bahwa yang melakukan perundingan adalah Pemerintah RI dan GAM, bila GAM dibubarkan atau membubarkan diri, maka mereka tidak dapat mengontrol pelaksanaan muatan/point-point perundingan di lapangan atau pada tahap implementasinya. Meski perjuangannya sudah berubah dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik, dengan melebur TNA menjadi KPA, namun struktur dan sifat komando masih cenderung sama dan semakin kuat sampai wilayah pedesaan. GAM akan memperluas kekuasaannya melalui KPA dan Parlok khususnya Partai Aceh, sebagai gelanggang perjuangan politiknya. Bagaimanapun GAM masih mengadakan "Pemberontakan Symbolis", meski hal tersebut tidak dikenal dalam aturan formal, seperti konstitusi Indonesia, otonomi khusus maupun dalam MoU Helsinki.

Hal lain yang dipahami oleh masyarakat di lapangan seperti :

- 1) Sebutan Pemerintah Aceh, DPR Aceh, Partai Aceh dan Bangsa Aceh.
- 2) Dampak psikologis, setiap melihat bendera PA, yang mirip dengan bendera GAM, dan dikibarkan oleh orang KPA (Mantan Kombatan GAM).
- 3) Parlok adalah partainya orang Aceh, sedangkan Parnas adalah partainya orang Jawa.
- 4) Dalam acara-acara seremonial, menyambut kedatangan Hasan Tiro ke Aceh, yang dikibarkan hanya bendera PA, tidak pernah dibarengi atau dikibarkannya bendera merah putih. Bahkan bendera merah putih pernah diturunkan, di halaman Masjid Banda Aceh saat acara berlangsung. Dan Hasan Tiro belum pernah bicara damai dalam kerangka NKRI.
- 5) Kondisi Aceh sekarang ini, akar konflik bukan lagi masalah ketimpangan, dominasi dan eksploitasi, karena secara ekonomi sudah ada pembagian yang menguntungkan GAM, secara sosial budaya, sudah diberikan otonomi khusus plus, sudah diberlakukan Syariat Islam di Aceh. Secara politik sudah banyak dipegang oleh pihak GAM. Bahkan Pemerintah Pusat sudah mau memberikan fasilitas dan cenderung “mengalah” dalam arti Aceh mau apa silahkan yang penting masih dalam bingkai NKRI, agar tidak terjadi “dis Integrasi Bangsa”.
- 6) Sampai saat ini GAM masih eksis, bahkan semakin solid, KPA adalah AGAM dan struktur komandonya relatif sama serta anggotanya masih dirahasiakan. Sementara masih banyak senjata api baik laras panjang maupun laras pendek yang beredar. Namun belum ada kemauan atau tanda-tanda GAM akan membubarkan diri, meskipun sudah ada KPA, dan Parlok, khususnya Partai Aceh. Sedangkan GAM, artinya adalah Gerakan Aceh Merdeka. Meskipun perjuangan sudah dirubah menjadi perjuangan lewat jalur politik, namun masih merupakan perjuangan GAM. Sebab kalau tujuannya adalah memulihkan hak-hak ekonomi dan politik orang Aceh, hal tersebut sudah dapat dikatakan terpenuhi. Tapi kalau tujuan selanjutnya adalah memperjuangkan kesejahteraan Rakyat Aceh, bukankah hal itu sama dengan tujuan Pemerintah Indonesia.
- 7) Milad GAM setiap tanggal 4 Desember. Dengan adanya Milad GAM, justru memberikan kontribusi terpeliharanya potensi konflik laten, harus dalam

kegiatan penting dalam Milad tersebut adalah : Pertama, doa untuk syuhada, memberikan kesan bahwa ada pihak yang dituduh sebagai kafir harbi (kafir yang harus diperangi) karena telah membunuh syuhada. Kedua, santunan bagi anak yatim syuhada, karena anak yatim syuhada itu sama dengan anak pahlawan, sehingga harus diperlakukan sebagai pahlawan juga. Disamping itu anak syuhada tersebut harus tumbila (harus membalas dendam atas kematian orang tuanya yang mati syahid), dan perjuangannya harus tetap dilanjutkan.

Fenomena tersebut di atas setidaknya menunjukkan bahwa, pemahaman masyarakat tentang isi MoU Helsinki cukup memadai. Bagi mereka akar konflik bukanlah masalah ketimpangan, dominasi dan eksploitasi antara Aceh dan Pemerintah Pusat karena kalau dilihat sudah banyak yang diberikan untuk Aceh pasca MoU Helsinki. Namun demikian, mengapa potensi konfliknya masih terasa dan perdamaian positif belum terwujud. Karena akar konfliknya sederhana, yakni **“ingin merdeka”**. Dengan demikian jika GAM masih boleh ada dengan keinginannya untuk merdeka, maka konflik tetap akan jalan terus. Yang terjadi sekarang adalah berkurangnya kekerasan, namun konflik itu tetap ada, selama keinginan merdeka tetap ada, dan nuansa strategis serta politis masih tetap ada didalamnya. Inilah menurut peneliti yang disebut sebagai pemberontakan simbolis.

Selama pemberontakan simbolis dalam pengertian tersebut masih ada, dan agenda tersembunyi tetap ada. Maka Aceh akan terpuruk dalam kubangan konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan, karena bisa berujung pada konflik komunal/horizontal dan merupakan potensi konflik laten yang harus dicermati dan perlu resolusi konflik.

### **E.3. Resolusi Konflik**

Perkembangan konflik Aceh pasca MoU Helsinki sudah dalam kondisi yang kompleks dan cukup ruwet, sehingga cukup sulit untuk menemukan resolusi konflik yang tepat. Perlu mediator dengan multi pendekatan, melalui peran dan partisipasi positif masyarakat terutama aktor konflik serta semua pihak yang punya atensi terhadap perdamaian di Aceh. Upaya mencari model resolusi konflik yang komprehensif dan sesuai dengan dinamika lokal di Langsa (Aceh), akan

sangat membantu dalam menemukan akar konflik, sekaligus mengatasinya dengan memupuk dan mengembangkan akar perdamaian.

Resolusi konflik di Aceh, diperlukan upaya serius yang mencerminkan upaya untuk merubah struktur sosial dan interaksi sosial yang rusak akibat konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya akan diuraikan sesuai tahapan, dalam penulisan berikut :

### **E.3.1. Mediasi**

Mediasi, merupakan cara “aman” bagi pihak-pihak yang bertikai untuk bertemu dengan tetap memberikan kesempatan pada mereka untuk memegang kendali atas berbagai persoalan hubungan dan hasil-hasilnya.

Mediasi di Langsa (Aceh) diperlukan dalam membangun penyelesaian konflik, melalui intervensi pihak ketiga, dalam usaha membantu pihak-pihak bertikai untuk mencari pemecahan masalah konflik Aceh GAM dengan Aceh RI. Dibutuhkan partisipasi dan tanggungjawab negara dan masyarakat yang dapat di implementasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta tokoh masyarakat khususnya yang berada di Langsa (Aceh). Untuk bertindak sebagai mediator dalam usaha mempromosikan dan memfasilitasi pertemuan, dalam mencari kesepakatan dan kesepakatan melalui dialog dan komunikasi, bertujuan merubah eksklusivisme kelompok dan mencairnya kebekuan hubungan antar kelompok. Disamping itu membangun kepercayaan dan komitmen yang kuat ke arah perdamaian positif, disisi lain proses pembangunan berperspektif damai, masih memerlukan keseriusan melalui aspek pemerataan program pembangunan, serta penguatan peran pemerintahan Kota Langsa (Aceh) secara lebih maksimal, demokratis dan tidak diskriminatif.

Dalam proses mediasi di Kota Langsa dapat dilakukan oleh Forum Rektor, Pemerintah Pusat, Pemda Aceh maupun pemerintah daerah kota, yang memahami dinamika konfliknya. Dalam proses mediasi perlu mempertimbangkan tokoh/kelompok yang berkonflik, sejarahnya, lingkungan sosialnya, persoalan-persoalan terkait, dan berbagai faktor yang menyebabkan atau setidaknya memberikan kontribusi bagi munculnya konflik baru di Aceh pasca MoU Helsinki.

Perbaiki struktur sosial yang lebih adil, diperlukan dengan membangun koalisi atau terbentuknya forum bersama yang dapat dilahirkan melalui proses mediasi, berorientasi problem dan aktor, dengan menciptakan rasa aman. Mengajak untuk saling memahami, terhadap berbagai permasalahan yang dapat memicu dan memacu timbulnya konflik baru, selanjutnya bersama-sama mengatasi dan mencari solusi damai lestari, seperti yang diharapkan masyarakat.

Berbagai persoalan pasca MoU Helsinki, seperti masih adanya perbedaan-perbedaan etnik yang mempengaruhi kedalaman konflik, perbedaan identitas dan kultural kelompok, masih adanya perbedaan persepsi terhadap perdamaian yang berpotensi terhadap konflik laten, serta nuansa pemberontakan simbolis sebagai cerminan bahwa masih terjadi “konflik vertikal” dan konflik horizontal. Maka mediasi bisa jadi merupakan cara paling konstruktif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena mediasi memiliki potensi bagi terjadinya rekonsiliasi dan transformasi serta terciptanya perdamaian positif. Prospek mediasi di Langsa dapat difasilitasi oleh Forum Rektor, Pemkot, dan Pemda Aceh. Sedangkan di Aceh dapat difasilitasi oleh Pemda Aceh, maupun Pemerintah Pusat.

### **E.3.2. Rekonsiliasi Konflik**

Resolusi konflik, merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara nir kekerasan, dapat dilakukan dengan dialog dan mediasi sesuai dengan dinamika konflik itu sendiri, yang lebih mengedepankan cara-cara demokratis. Dalam usaha menangani sebab-sebab konflik terkini di Aceh serta membangun hubungan baru dan tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Aceh RI dengan Aceh GAM), melalui sarana komunikasi dan tata relasi yang baru. Agar kebekuan kelompok-kelompok tersebut dapat mencair dan bersama-sama serta bekerjasama membangun perdamaian di Aceh, dengan kata lain membangun konsep “REKONSILIASI”.

Rujuk atau rekonsiliasi adalah salah satu cara dalam penyelesaian konflik di Aceh, sebab rekonsiliasi merupakan ruhnya perdamaian yang mengemas perbedaan menjadi sebuah rahmat dan sebuah kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Rekonsiliasi yang tulus merupakan proses yang kompleks, perlu pendekatan yang kompromistis dan persuasif. Hal ini penting karena kondisi di



Langsa ( Aceh) masih dipengaruhi oleh beberapa hal seperti : pengalaman pahit dimasa lalu, fitnah, penderitaan, trauma, dendam yang tak kunjung usai. Rekonsiliasi aktor-aktor yang terlibat konflik atau berpotensi menimbulkan konflik pasca MoU Helsinki menjadi penting.

Diperlukan kerjasama dan kebersamaan sebagai alternatif jawaban atau upaya dari masyarakat Aceh untuk lebih mengembangkan sikap saling menghargai, tenggang rasa dan kesediaan untuk membaaur serta tidak membuat kelompok-kelompok yang ada menjadi eksklusif. Toleransi adalah hal-hal yang perlu dikembangkan dan dijunjung tinggi, agar interaksi sosial dapat berjalan damai dan tentram. Masyarakat Aceh merupakan unsur potensial dalam rangka mencari perdamaian yang positif. Momentum solidaritas sosial pasca MoU Helsinki sebaiknya digunakan untuk membangun kembali dialog-dialog perdamaian, membangun komunikasi yang sempat terputus akibat konflik.

Semua kegiatan tersebut dapat difasilitasi oleh pemerintah (Daerah dan Pusat), tokoh formal atau non formal termasuk pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perdamaian. Semua memiliki peran penting untuk membangun Aceh baru yang damai. Dinamika selanjutnya diperlukan pengembangan struktur kelembagaan, dengan membentuk forum komunikasi dan memberdayakan "ruang komunikasi publik", membangun kesepakatan bersama berbasis kemitraan dan saling pengertian. Karena tanpa ada satu kebersamaan yang diawali dengan komunikasi, kemudian membentuk forum bersama, maka tidak akan pernah ada titik temu, sebaliknya yang ada saling curiga. Tapi kalau sudah ada dalam satu forum yang sama, atau paling tidak saling mengenal, curiga itu mulai berkurang dan dengan dialog-dialog lanjutan, mis komunikasi dan konflik akan terselesaikan. Sehingga diperlukan rekonsiliasi antara pihak Aceh RI dengan Aceh GAM (KPA-PETA dengan/dan FORKAB), melalui mencairnya kelompok-kelompok yang eksklusif menjadi inklusif, untuk menciptakan kerjasama dan kebersamaan mengarah pada perdamaian positif di Aceh.

Perdamaian yang mengabaikan rekonsiliasi, sama dengan perdamaian formal yang belum menyentuh substansi. Proses deformasi perdamaian menuju tahapan pelibatan seluruh potensi masyarakat adalah model rekonsiliasi untuk membangun perdamaian. Disamping itu rekonsiliasi akan mengandung makna

Reunifikasi dan mencairnya kebekuan faksi-faksi atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Artinya tidak hanya pihak yang bertikai saja, agar tidak muncul dendam yang tidak berkesudahan dan rentan munculnya konflik horizontal. Diharapkan melalui rekonsiliasi, dapat dipahami akar permasalahan konflik, kemudian dapat diidentifikasi akar perdamaian yang perlu dikembangkan atau melalui proses transformasi mengarah pada pengelolaan konflik dengan baik, agar akhirnya bermuara pada perdamaian positif. Sehingga "Forum Bersama" sudah semestinya mendapatkan prioritas untuk segera dibentuk. Secara serius dibantu oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat dan secara resmi dapat dimasukkan dalam APBK/APBA agar berkesinambungan dan implementasinya program mempunyai komitmen yang jelas dan ada dukungan dana. Disamping perlunya melibatkan perempuan dalam setiap langkah resolusi konflik baik dalam proses rekonsiliasi maupun transformasi, karena perempuan adalah korban terbesar juga merupakan penduduk terbesar baik di Langsa maupun di Aceh. Sebagaimana seorang Informan perempuan mengatakan bahwa "bila ingin memenangkan hati orang Aceh, maka harus memenangkan dulu hati perempuan Aceh". Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan lebih memberikan peran aktif dan positif pada perempuan Aceh dalam proses resolusi konflik.

Selanjutnya rekonsiliasi di Langsa, perlu diprioritaskan rekonsiliasi elit yakni Pejabat Eksekutif (Bupati dan Walikota serta Pejabat Eksekutif lainnya dan staff), termasuk tokoh KPA dengan tokoh PETA. Sedangkan rekonsiliasi massa dapat dimulai melalui pendekatan wilayah (Gampong, Kecamatan dan Pemkot) dengan melibatkan tokoh formal maupun non formal yang berpengaruh. Sedangkan di Aceh, rekonsiliasi elit Ketua KPA dengan Ketua PETA kemudian diikuti tokoh-tokoh KPA dan PETA lainnya (termasuk pendukung ALA dan ABAS).

### **E.3.3. Transformasi Konflik**

Setelah terjadi rekonsiliasi, dan dapat dipahami tentang akar permasalahan konfliknya, maka perlu ditransformasikan dalam proses membangun budaya damai dan peningkatan kapasitas kelembagaan baik formal maupun non formal.

Langkah rekonsiliasi setidaknya dapat dijadikan sebagai sebuah tahapan awal perjalanan “Transformasi Konflik”.

Transformasi konflik secara tidak langsung dapat memberikan kesadaran pada pihak-pihak yang berkonflik, bahwa hal tersebut penting untuk dilakukan, karena manusia atau masyarakat dapat berubah ke arah perbaikan. Transformasi konflik punya makna menggeser konflik kekerasan pada suatu kondisi yang dapat dikembangkan dengan suatu kerjasama antara pihak Aceh RI dengan Aceh GAM. Sampai tercapainya suasana damai, karena dengan latar belakang yang berbeda pada prinsipnya bisa bekerjasama dengan baik, jika mereka sudah menyadari bahwa perdamaian merupakan kebutuhan bersama dan merupakan sesuatu yang mereka harapkan. Disamping penguatan basis sosial, ekonomi dan politik serta keamanan, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya peran pendidikan yang benar terhadap makna perdamaian dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendekatan resolusi konflik, menunjukkan akar penyebab konflik dengan kekerasan pihak-pihak yang bermusuhan dengan pertentangan dapat mentransformasikan ketidakadilan dan penyumbatan komunikasi yang berseberangan. Oleh karena itu proses damai yang saat ini dijalankan harus diikuti dengan usaha transformasi konflik, yang menyeluruh disemua aspek dan terus menerus untuk memastikan perdamaian permanen dapat terwujud. Agar tidak mengulangi kegagalan seperti proses damai yang telah berlangsung pada masa-masa sebelumnya.

#### 1) Transformasi Konteks

Perubahan dalam konteks dapat mempunyai efek lebih dramatis dibandingkan perubahan pada pihak-pihak yang bertikai atau dalam hubungan mereka. Pasca MoU Helsinki, mengandung pengertian bahwa konflik terkait dengan konteks internasional dan nasional, telah berubah menjadi konteks lokal dan dapat disederhanakan lagi menjadi konflik dalam konteks antar kelompok, yakni kelompok yang pro GAM (Aceh GAM) dan kelompok yang pro RI (Aceh RI), jika dilihat di lapangan konflik terjadi antara GAM/KPA dengan FPSG/PETA dan FORKAB.

Perubahan pada konteks tentu akan berpengaruh pada usaha penyelesaian konflik. Selanjutnya perlu dicermati bagaimana mengidentifikasi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Agar pihak-pihak yang terlibat peran dalam konflik serta potensinya dalam penanganan konflik tersebut dapat dipahami Dengan kata lain perlu pemahaman terhadap konflik dari perspektif Aceh GAM dan Aceh RI, sehingga mempermudah bagaimana proses pendekatan, agar dapat membuka kembali hubungan yang telah terputus antara kedua kelompok tersebut akibat konflik selama ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dialog-dialog lanjutan untuk berdamai, dengan dibantu mediator. Agar mengarah pada proses penyembuhan dari berbagai hal yang telah dialami di masa lampau, dan masing-masing kelompok dapat membebaskan diri dari cengkraman masa lalu, tidak lagi tergantung secara emosional (dominan) pada orang atau kelompok yang mereka benci.

Dinamika konfliknya masih dapat dilihat, hal tersebut disebabkan karena transformasi interaksi antara pihak GAM/KPA dengan PETA sama sekali belum tersentuh. Disamping proses pemberian bantuan atau santunan (Diyat) kurang adanya pendampingan yang intensif. Bahkan cenderung dibiarkan (pembiaran), sehingga bukan menyelesaikan konflik tapi justru sebaliknya berpotensi pada munculnya konflik internal, di dalam masing-masing kelompok dan konflik eksternal antara kedua kelompok tersebut. Reintegrasi belum berjalan, karena belum ada satu elemen masyarakat atau institusi formal/non formal yang dapat menjembatani untuk mendudukkan KPA dengan PETA dan FORKAB.

Transformasi konteks, berangkat dari dinamika kedua kelompok yang secara formal maupun informal belum pernah melakukan perundingan/dialog. Maka diperlukan intervensi dari pihak lain (dapat difasilitasi pemerintah, tokoh masyarakat formal/non formal) untuk menjembatani perubahan pola hubungan positif. Dalam memperluas pemahaman maupun kemampuan pihak-pihak yang bertikai, untuk menyadari dan menerima harkat dan martabat pihak lain. Sekaligus memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyadari atau mengakui aneka kesalahan dan memperbaiki hubungan.

Aneka kejadian dimasa lalu atau kesan-prasangka tertentu yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun, bisa membuat orang/kelompok sangat kaku atau

tidak mau mencoba menempuh solusi dengan memperbaiki relasi atau hubungan agar terjadi integrasi sosial. Kejelasan tentang tujuan, peran, tanggung jawab dan perbedaan pandangan tentang pengalaman masa lalu perlu diselesaikan, sebelum menangani permasalahan konflik lainnya. Selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan diberbagai bidang kehidupan, berdasarkan skala prioritas, sesuai dengan kondisi dan situasi daerah yang dapat membangun kembali hubungan antara kelompok-kelompok yang bertikai.

## 2) Transformasi Struktur

Struktur konflik merupakan seperangkat aktor, persoalan dan tujuan atau hubungan yang tidak sesuai, dan merupakan konflik itu sendiri. Konflik menyangkut struktur, seringkali melibatkan persoalan tentang keadilan dan tujuan-tujuan yang saling tidak sejalan, maka transformasi struktur ini diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Transformasi konflik mengakui bahwa perdamaian dan keadilan tidak terpisahkan. Perdamaian tanpa keadilan bukanlah perdamaian sejati, sementara keadilan tanpa perdamaian tidak akan bertahan lama.

Untuk merubah struktur konflik seringkali menuntut usaha intensif untuk menghasilkan perubahan yang diharapkan. Maka diperlukan intervensi yang dapat dilakukan dengan pihak yang dapat dipercaya oleh kelompok yang bertikai. Melalui transformasi struktur diharapkan dapat mengurangi dominasi kelompok, saling curiga dan pada akhirnya bisa bersama-sama dan bekerja sama untuk membangun perdamaian yang positif.

MoU Helsinki berpengaruh signifikan terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat, mereka lebih leluasa untuk melakukan aktivitasnya, sesuai dengan profesi dan habitatnya masing-masing. Sehingga lebih mudah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan atau mengadakan inovasi diberbagai bidang secara bersama dalam rangka menangkap, menyerap dan mengembangkan berbagai bantuan sosial ekonomi dan teknologi. Agar pasca MoU Helsinki dapat dilanjutkan dengan komitmen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang bertikai untuk melakukan perundingan perdamaian, dan menyepakati tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk belajar hidup bersama dan saling

menerima perbedaan diantara mereka, dalam usaha mewujudkan perdamaian positif.

### 3) Transformasi Aktor

Pihak-pihak yang bertikai harus menentukan kembali arah mereka, mengabaikan atau memodifikasi kembali tujuan yang ingin dicapai dan dapat menerima perbedaan sebagai suatu kekuatan yang dapat dikemas dalam bingkai demokrasi, untuk mewujudkan perdamaian. Pemisahan pihak-pihak yang bertikai dan pengintegrasian mereka merupakan bentuk perubahan penting. Perubahan aktor yang berkonflik juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Banyak konflik menjadi semakin mudah diselesaikan, manakala terjadi perubahan dalam kepemimpinan para pihak.

MoU Helsinki secara signifikan telah merubah beberapa aktor dalam konflik Aceh. Kini damai di Langsa (Aceh) merupakan kebutuhan utama bagi seluruh elemen masyarakat. Perdamaian telah mendorong semua pihak untuk menahan diri dan mencoba saling memahami dan harus berinteraksi. Seharusnya tidak ada alasan bagi pihak manapun, baik itu KPA, PETA dan FORKAB, termasuk TNI/POLRI yang merupakan representasi dari Pemerintah Pusat untuk bertindak diluar bingkai perdamaian.

### 4) Transformasi Persoalan

Konflik ditentukan oleh posisi pihak yang bertikai mengenai berbagai isu. Ketika mereka mengubah posisi, atau persoalan baru muncul, maka konflik berubah. Hal ini menjadi penting dalam transformasi konflik, dengan meringkai kembali persoalan, agar dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik. Sangat jelas ketika GAM merubah posisinya atas isu kemerdekaan, maka perundingan dapat menghasilkan kesepakatan, karena disisi lain Pemerintah Indonesia juga memberikan otonomi seluas-luasnya (otonomi plus), dan mereka dapat merintis perjuangannya melalui jalur politik, disamping implementasi syariat Islam, pemerintahan lokal dan partai lokal serta wali nangroe.

Sementara kesadaran untuk mencapai kemerdekaan dari Indonesia sudah terlanjur membumi, keinginan merdeka masih terdapat di sejumlah kalangan

mantan kombatan GAM, karena menjadi pemberontak itu sudah menjadi tujuan utama berdirinya GAM. MoU Helsinki telah membuat perubahan secara fundamental, dimana perjuangan GAM telah mengalami pergeseran dari perjuangan bersenjata ke perjuangan melalui jalur politik (transformasi dalam bidang politik). Terlepas dari prediksi bahwa GAM melalui perjuangan politiknya tetap untuk menuju perjuangan Aceh merdeka. Namun persoalan komitmen GAM untuk tidak lagi menuntut kemerdekaan atau Aceh lepas dari NKRI, masih menjadi isu fundamental yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika konflik Aceh pasca Helsinki, sekaligus menghambat terwujudnya perdamaian positif di Langsa (Aceh).

Dari fenomena yang ada, sebenarnya inti persoalannya pada pemberontakan simbolis yang dirasakan oleh masyarakat Non GAM di Langsa (Aceh), maka persoalan perbedaan pandangan tersebut yang akhirnya berpengaruh dan membias pada persoalan-persoalan lainnya. Transformasi isu merdeka, mestinya dijabarkan bukan merdeka lepasnya Aceh dari NKRI. Tapi merdeka dalam pengertian *self government* dan kebebasan masyarakat, untuk mendapatkan perlindungan akan hak-hak mereka dan kewajiban sebagai warga negara, seperti di daerah-daerah lain. Dimana perbedaan-perbedaan kepentingan dapat diimplementasikan melalui jalur politik, sosial budaya, ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Sesuai makna demokrasi dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia maupun di Aceh. Perubahan posisi sangat berhubungan dengan perubahan kepentingan dan perubahan tujuan, termasuk perubahan bagi transformasi aktor, transformasi konteks dan transformasi struktur konflik.

##### 5) Transformasi Kelompok dan Personal

Tanggung jawab pertama dan utama untuk mencegah, mengelola dan mentransformasikan konflik internal dengan kekerasan terletak pada mereka yang terlibat atau para pemimpin kelompok, terutama pada pemimpin nasional, dan lokal. Disamping perlunya melestarikan proses perdamaian yang berkelanjutan juga memperkuat otonomi lokal dan kemampuan bagi penyelesaian konflik setempat. Transformasi konflik mempersyaratkan perubahan nyata dalam kepentingan, tujuan atau definisi dirinya sendiri atau pihak-pihak yang terlibat.

Pemimpin nasional dan pemimpin daerah perlu menyatukan dan menawarkan rekonsiliasi terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik baru di Aceh, seperti KPA, PETA dan FORKAB termasuknya di dalamnya ALA dan ABAS, akan lebih bijak apabila dapat memutuskan dan menerima lawan-lawannya ke dalam pemerintahan atau lembaga yang dapat membawa pengaruh pada suasana kondusif dan terwujudnya perdamaian positif. Hal tersebut tetap harus diikuti dengan perubahan dalam hati dan pikiran para aktor yang berkonflik, agar dapat memberikan kesadaran bahwa perdamaian dan persaudaraan jauh lebih mulia dan berharga dari pada bermusuhan. Adanya kesadaran dan kesatuan gerak dan tujuan yang sama demi membangun Aceh baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, maka jalan menuju penyelesaian konflik Aceh secara permanen akan semakin jelas.

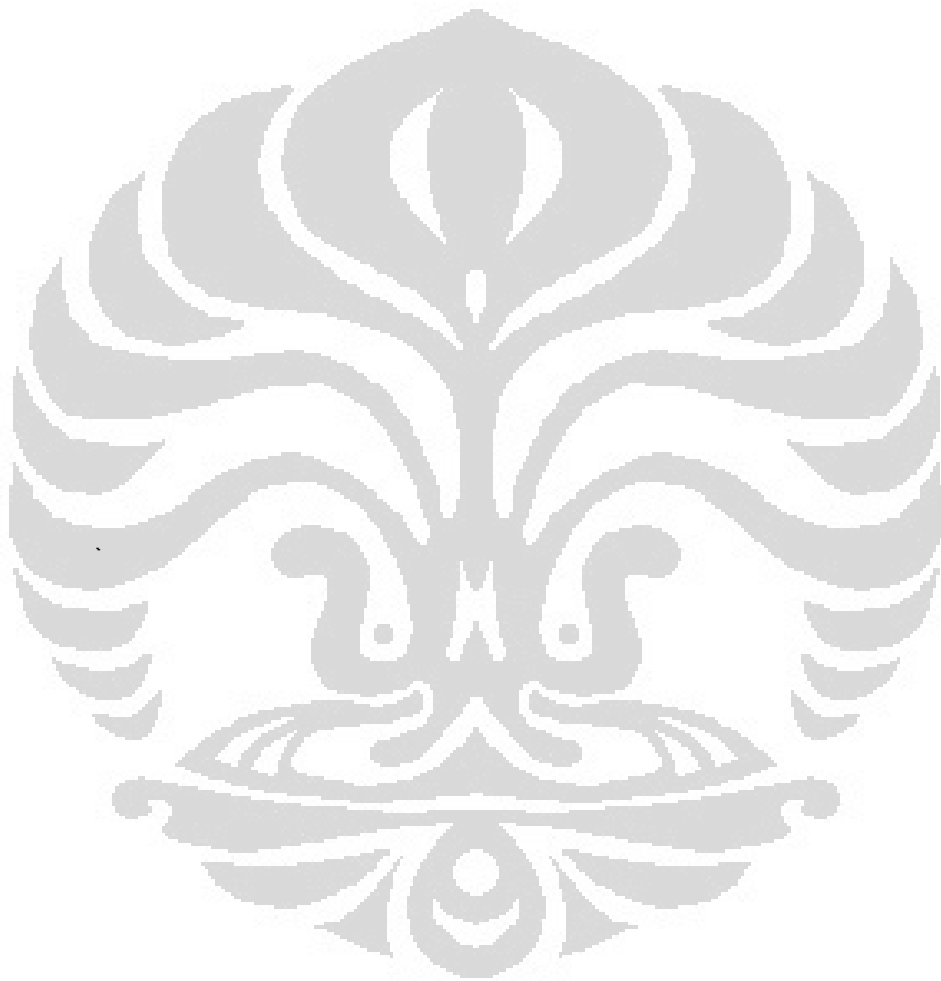
Transformasi konflik punya makna menggeser kekerasan pada suatu kondisi yang dapat dikembangkan dengan suatu kerjasama antara pihak yang pro dan kontra di Aceh, sampai tercapainya suasana damai, karena orang-orang dengan latar belakang yang berbeda pada prinsipnya bisa bekerja sama dengan baik, jika mereka sudah menyadari bahwa perdamaian merupakan kebutuhan dan sesuatu yang mereka harapkan. Disamping penguatan basis sosial, ekonomi dan politik hal yang perlu diperhatikan adalah adanya peran pendidikan yang merupakan upaya konkrit dalam membawa masyarakat pada pemahaman yang benar terhadap makna perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.



Tabel 21  
Resolusi Konflik Aceh GAM Dengan Aceh RI

NO	RESOLUSI KONFLIK	LANGSA	ACEH
1	Mediasi → langkah "aman" bagi pihak bertikai untuk bertemu, difasilitasi mediator, untuk mencari kesepakatan dan kesepakatan melalui dialog dan komunikasi, untuk mengubah eksklusifisme kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum rektor</li> <li>- Pemkot</li> <li>- Pemda Aceh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda Aceh</li> <li>- Pemerintah Pusat</li> </ul>
2	Rekonsiliasi → intinya rujuk kembali dan mengandung makna reunifikasi, serta mencairnya kebekuan hubungan kelompok untuk bersamasama dan bekerja sama membangun komunikasi yang terputus dengan membentuk "FORUM BERSAMA"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi elit               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat eksekutif (Bupati/Walikota)</li> <li>- Ketua/Tokoh KPA dengan PETA</li> </ul> </li> <li>2. Rekonsiliasi Massa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui pendekatan wilayah (Lorong, Gampong, Mukim, Kecamatan dan Kota), melibatkan tokoh formal/hon formal termasuk perempuan.</li> </ul> </li> </ol>	Rekonsiliasi elit, utamanya KPA (MM) dengan PETA (PT) dan FORKAB (NL) diikuti dengan tokoh-tokohnya termasuk pendukung ALA dan ABAS.
3	Transformasi → mengundang makna menggeser konflik kekerasan dengan membangun/membina perdamaian, melalui urutan langkah-langkah transisi yang diperlukan, dan merupakan perubahan terdalam dari proses penyelesaian konflik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks → Konflik nasional → lokal (Langsa) → antar kelompok (Aceh GAM dengan Aceh RI)</li> <li>2. Struktur → Intervensi pihak yang dipercaya oleh kelompok bertikai, untuk membangun kepercayaan dan mengurangi dominasi.</li> <li>3. Aktor → Perubahan kepemimpinan para pihak, mencoba saling memahami dan mendorong perdamaian perlu melibatkan perempuan.</li> <li>4. Persoalan → Merubah isu fundamental merdeka (Teritori) menjadi <i>self government</i> dan perjuangan kepentingan diimplementasikan melalui mekanisme demokrasi.</li> <li>5. Kelompok dan Personal → Kesadaran dan keikhlasan para pemimpin, menerima pihak lawan dalam pemerintahan kelompoknya, untuk kepentingan masyarakat.</li> </ol>	

Sumber : Diolah dari hasil wawancara



## **BAB VI**

### **IMPLIKASI TEORITIS DAN KEBIJAKAN**

#### **A. Implikasi Teoritis**

##### **A.1. Pendahuluan**

Dalam bab-bab terdahulu telah diuraikan bahwa peran resolusi konflik tidak hanya tentang persoalan bagaimana mengakhiri konflik bersenjata (perang), namun juga mengenai hal bagaimana membangun perdamaian pasca perang. Untuk mampu melaksanakan kedua peran ini, proses resolusi konflik harus mampu menunjukkan akar penyebab konflik dalam sebuah kerangka kerja yang memungkinkan pihak-pihak yang bermusuhan dapat rujuk kembali melalui rekonsiliasi, kemudian mentransformasikan pertentangan mereka kedalam kegiatan tanpa kekerasan. Sebab rangkaian kegiatan rekonsiliasi dan serangkaian transformasi diperlukan, yang kalau tidak ada, justru akan mempertahankan kekerasan. (Miall; 2002 : 249)

Dalam pemeliharaan perdamaian yang lebih luas, tindakan transformatif ini adalah meliputi usaha-usaha untuk mentransformasikan ketidakadilan dan menjembatani posisi yang bersebarangan (Miall 2000:244). Dengan kerangka demikian, kita menyadari bahwa cakupan resolusi konflik adalah lebih luas ketimbang upaya pengakhiran konflik, dan dengan cara pandang demikian, kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM adalah sebatas sebuah pengakhiran konflik bersenjata antara kedua belah pihak namun belum tentu pengakhiran konflik antara pihak-pihak yang bertikai di Langsa (Aceh). Fakta dilapangan menunjukkan bahwa konflik masih terjadi. Menurut Miall konflik, termasuk konflik etnis, bukannya tidak dapat dihindarkan, tetapi sebenarnya dapat dicegah dalam arti mencegah konflik bersenjata atau konflik massa dengan kekerasan. Namun sumber-sumber potensial konflik perlu diidentifikasi dan dianalisa, selanjutnya diperlukan berbagai usaha resolusi konflik. (Miall; 2002 : 149-151)

Bagian berikut ini, setidaknya dapat menjelaskan mengapa (secara teoretis) perspektif resolusi konflik masih relevan digunakan dalam analisis konflik di Langsa (Aceh). Dinamika konflik Aceh pasca MoU Helsinki, masih

merupakan topik menarik untuk diikuti perkembangannya dari perspektif resolusi konflik. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran sebagai berikut :

(1) Masih ada dua aroma sekaligus yang dapat dicium dan dilihat di Langsa (Aceh), yakni aroma konflik dan aroma perdamaian. Aroma perdamaian mungkin lebih tepat dibaca sebagai perdamaian antara GAM dengan Pemerintah RI. Sedangkan aroma konflik bisa dilihat antara masyarakat Aceh sendiri (Aceh GAM dengan Aceh RI) sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran konflik, meskipun lebih bersifat laten, namun dinamikanya masih sering ditandai dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan. Karena konflik biasanya dimulai dari ketegangan-ketegangan yang bersifat laten, lalu berkembang menjadi konflik terbuka, berupa pengerahan kekuatan, maka konflik yang ada akan menjurus pada sifat-sifat destruktif dan pelanggaran-pelanggaran. Konflik menurut Miall, konflik biasanya terjadi ketika dua atau lebih manusia terserap dalam dinamika yang berbeda, dan kadang-kadang saling berbenturan dalam dimensi-dimensi yang berbeda pula. Dalam situasi demikian, kelompok-kelompok yang bertikai akan bersikap, bertindak dan bereaksi dengan cara kekerasan, menegasi satu sama lain (Miall; 2002 : 8). Jika sebelum MoU Helsinki, konflik bersifat vertikal antara “Aceh” dengan “Jakarta”, maka sekarang konflik dapat bersifat horizontal antar masyarakat Aceh sendiri.

(2) Permasalahan di Aceh khususnya Langsa masih menjadi isu strategis, baik di tingkat internasional, regional, nasional, maupun di tingkat lokal. Ditingkat lokal, tokoh masyarakat formal maupun non formal dan masyarakat Aceh secara aktif hendaknya ikut berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan masa depan Aceh yang lebih baik, dan tetap dalam kerangka NKRI. Namun satu hal yang perlu diingat dan disadari bahwa persoalan di Aceh bukan hanya permasalahan Rakyat Indonesia yang berada di Aceh saja, melainkan juga permasalahan Rakyat Indonesia secara keseluruhan, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan perdamaian positif di Aceh, sekaligus mencegah timbulnya dis integrasi bangsa. Sebagaimana yang dikatakan Miall, bahwa tanggung jawab pertama dan utama untuk mencegah, mengelola dan mentransformasikan konflik internal dengan kekerasan terletak pada penduduk

negara-negara yang terlibat konflik terutama pada semua pemimpin regional, nasional dan lokal. (Miall; 2002 : 350)

(3) Dalam konflik Aceh, selain GAM juga muncul kelompok anti GAM, keadaan demikian menunjukkan fenomena yang “problematis” atau “paradoks”, dimana dalam setiap daerah konflik di Indonesia, setiap ada gerakan separatisme, kemudian muncul gerakan anti separatisme. Fenomena yang cukup menarik adalah timbulnya pembelahan-pembelahan kelompok yang pro dan kontra terhadap Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang terjadi di Aceh antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan kelompok Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG), pasca MoU Helsinki berubah menjadi KPA dan PETA, kemudian muncul Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB). Dalam pandangan Miall, bahwa munculnya mobilisasi kelompok dengan melihat strategi dan tindakan komunal, merupakan upaya penting untuk menelusuri jejak dimana kelompok-kelompok yang satu tidak puas, akan mengartikulasikan keluhan dengan mobilisasi, menentukan tujuan dan strategi, yang pada akhirnya mengarahkan tantangan terhadap pemegang kekuasaan. (Miall; 2002 : 137)

(4) Secara teoritis, konflik selalu ada dalam kehidupan manusia dan inheren dengan hubungan antar manusia dalam sebuah proses sosial. Analisis sosiologis tentang konflik, pada umumnya membahas tentang dimensi penyebab konflik, perkembangan konflik dan resolusi konflik dalam arti bagaimana menemukan formulasi resolusi konflik yang dapat dikembangkan dalam penyelesaian konflik menuju perdamaian positif. Terkait konflik Aceh meski sudah ada kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Pusat dan GAM serta berbagai cara dan pendekatan yang dilakukan pasca MoU Helsinki. Namun fakta di lapangan masih mengindikasikan berpotensi menimbulkan konflik. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya mencari model resolusi konflik yang komprehensif, namun dapat digunakan secara empirik di Aceh merupakan hal yang penting. Karena konflik di Aceh cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak, disamping mempunyai sejarah pertikaian yang cukup panjang. Miall mengatakan bahwa, dalam penyelesaian konflik, bukan hanya pihak yang bertikai, namun juga pihak yang terimbas konflik (Miall; 2002 : 253). Selanjutnya dalam menganalisa resolusi konflik, menggunakan teorinya Hugh Miall, dalam bukunya, “*Contemporary*

*Conflict Resolution*”, terjemahan Tri BS (2002) yang merupakan karya bersama, Oliver Ramsbolon, Tom Woodhouse. Karena menurut peneliti cukup komprehensif dan dapat merespon atas isu-isu yang berkaitan dengan proses pencegahan konflik dan resolusi konflik di Langsa (Aceh). Miall, dalam buku tersebut banyak menguraikan tentang berbagai konflik, sifat dan karakter konflik, peran mediasi dan negosiasi dalam konflik, serta cara mengelola, melokalisasikan dan menyelesaikan konflik secara damai, sehingga merupakan bangunan resolusi konflik kontemporer sebagai alternatif yang relevan terhadap dinamika konflik di Langsa (Aceh).

Setidaknya dari empat hal tersebut, dinamika konflik di Langsa (Aceh) masih diperlukan resolusi konflik nir kekerasan, karena format dari konflik antara GAM dengan Pemerintah Pusat serta masyarakat Aceh Non GAM lebih mudah pada suatu dikotomi konflik daripada pengintegrasian, dan rekonsiliasi, bahkan dikotomi antara masyarakat Aceh, sudah pula mengikuti pihak-pihak yang berkonflik tersebut (Aceh RI dengan Aceh GAM). Miall, pandangannya terhadap dinamika konflik adalah :

“Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan yang tepat”. (Miall; 2002 : 7-8)

Integrasi sosial di Langsa (Aceh) masih memerlukan proses panjang dan perlu sinergi dari berbagai pihak yang punya atensi terhadap perdamaian, terutama mereka yang berkonflik, maupun pihak lain yang terimbas konflik terutama tokoh masyarakat Aceh baik formal maupun non formal, termasuk para pemimpin nasional maupun lokal/elit pemerintah sebagai representasi dari Pemerintah.Negara. Karena dalam pandangan Miall, kelompok masyarakat tersebut juga harus bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik. Upaya-upaya resolusi konflik perlu keseriusan untuk dapat memulihkan kondisi integrasi sosial masyarakat menuju perdamaian positif, karena apinya sudah dipadamkan, tetapi bara apinya masih ada dan setiap saat bisa menyala kembali.

## A.2. Rekonsiliasi Konflik

Ruang lingkup resolusi konflik dan mengakhiri konflik kekerasan, menurut Miall adalah pentingnya pendekatan luas yang mengakui fluiditas proses konflik, dimana konflik secara inheren bersifat dinamis dan penyelesaian konflik harus terlibat dengan pergeseran hubungan yang kompleks :

“Banyak teori konflik yang mempertimbangkan persoalan aktor dan kepentingan sebagai sesuatu yang sudah ada dan berdasarkan landasan ini melukiskan usaha untuk menemukan sebuah solusi guna meredakan atau menghilangkan kontradiksi antar mereka meskipun demikian persoalan, aktor dan kepentingan selalu berubah setiap waktu sebagai akibat dari dinamika sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Bahkan jika kita berhubungan dengan aspek non struktural konflik, seperti preferensi aktor, tidak ada jaminan bagi asumsi stabilitas, yang biasanya dibuat dalam pendekatan teoritis permainan untuk studi konflik. Faktor situasi baru, pengalaman pembelajaran, interaksi dengan lawan dan pengaruh-pengaruh lainnya akan memperlihatkan bahwa preferensi aktor bukan sesuatu yang given”. (Miall; 2002 : 249)

Resolusi konflik merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara nir kekerasan, dapat dilakukan dengan dialog dan mediasi sesuai dengan dinamika konflik itu sendiri, dan lebih mengedepankan cara-cara yang demokratis. Dalam usaha menangani sebab-sebab konflik terkini di Aceh serta membangun hubungan baru dan tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Aceh RI dengan Aceh GAM), melalui sarana komunikasi dan tata relasi yang baru, agar kebekuan kelompok-kelompok tersebut dapat mencair dan bersama-sama serta bekerjasama membangun perdamaian di Aceh, dengan kata lain membangun konsep “REKONSILIASI”.

Rujuk atau rekonsiliasi adalah salah satu cara dalam penyelesaian konflik di Aceh, sebab rekonsiliasi merupakan ruhnya perdamaian yang mengemas perbedaan menjadi sebuah rahmat dan sebuah kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Rekonsiliasi yang tulus merupakan proses yang kompleks, perlu pendekatan yang kompromistis dan persuasif, hal ini penting karena kondisi di Aceh masih dipengaruhi oleh beberapa hal seperti : pengalaman pahit dimasa lalu, fitnah, penderitaan, trauma, dendam yang tak kunjung usai. Rekonsiliasi aktor-aktor yang terlibat konflik atau berpotensi menimbulkan konflik pasca MoU Helsinki menjadi penting.

Diperlukan kerjasama dan kebersamaan sebagai alternatif jawaban atau upaya dari masyarakat untuk lebih mengembangkan sikap saling menghargai, tenggang rasa dan kesediaan untuk membaaur dan tidak membuat kelompok-kelompok yang ada menjadi eksklusif. Toleransi adalah hal-hal yang perlu dikembangkan dan dijunjung tinggi, agar interaksi sosial dapat berjalan damai dan tentram. Masyarakat Aceh merupakan unsur potensial dalam rangka mencari perdamaian yang positif. Momentum solidaritas sosial pasca MoU Helsinki sebaiknya digunakan untuk membangun kembali dialog-dialog perdamaian, membangun komunikasi yang sempat terputus akibat konflik.

Semua kegiatan tersebut dapat difasilitasi oleh pemerintah, lembaga adat atau agama, tokoh formal atau non formal termasuk pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perdamaian. Semua memiliki peran penting untuk membangun Aceh baru yang damai. Dinamika selanjutnya diperlukan pengembangan struktur kelembagaan, dengan membentuk forum komunikasi dan memberdayakan "ruang komunikasi publik", membangun kesepakatan bersama berbasiskan kemitraan dan saling pengertian. Tanpa ada satu kebersamaan yang diawali dengan komunikasi, kemudian membentuk forum bersama, maka tidak akan pernah ada titik temu, yang ada saling curiga. Tapi kalau sudah ada dalam satu forum yang sama, atau paling tidak saling mengenal, curiga itu mulai berkurang dan dengan dialog-dialog lanjutan, mis komunikasi dan konflik akan terselesaikan.

Menurut Miall, resolusi konflik dan proses mengakhiri konflik kekerasan diperlukan fluiditas proses konflik dimana konflik secara inheren bersifat dinamis dan dalam penyelesaian konflik harus terlibat dengan hubungan yang kompleks. Sehingga diperlukan rekonsiliasi, antara pihak Aceh RI dengan Aceh GAM (KPA dengan PETA dan FORKAB), melalui mencairnya kelompok-kelompok yang eksklusif menjadi inklusif untuk menciptakan kerjasama dan kebersamaan mengarah pada perdamaian positif.

Perdamaian yang mengabaikan rekonsiliasi, sama dengan perdamaian formal yang belum menyentuh substansi. Proses deformasi perdamaian menuju tahapan pelibatan seluruh potensi masyarakat adalah model rekonsiliasi untuk membangun perdamaian. Disamping rekonsiliasi di Aceh akan mengandung



makna Reunifikasi dan mencairnya kebekuan faksi-faksi atau kelompok-kelompok, yang ada dalam masyarakat. Artinya tidak hanya pihak yang bertikai saja, agar tidak muncul dendam yang tidak berkesudahan dan rentan munculnya konflik horizontal.

### **A.3. Bagaimana Konflik Di Aceh Mentrasformasikan Dirinya**

Sebenarnya tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai pengakhiran perang di Aceh. Perkembangan di Aceh pasca MoU Helsinki, masih rentan terhadap konflik dan berpotensi adanya konflik laten, yang sewaktu-waktu dapat meledak kembali jika ada pemicunya. Meski hal tersebut lebih banyak terjadi diantara kelompok-kelompok Aceh RI dengan Aceh GAM, terutama menjelang Pemilu 2009 atau bahkan pasca Pemilu. Fenomena kekerasan di Aceh merupakan lingkaran setan, kekerasan akan melahirkan kekerasan, kemudian lahir lah masyarakat yang penuh budaya kekerasan, karena yang belum ditemukan di Aceh adalah pemutusan budaya kekerasan, terutama terkait dengan permasalahan dendam, bahkan di Aceh konflik justru diidentikkan dengan kekerasan.

Permasalahan dendam agak sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat di Aceh, termasuk di Langsa. Sebagaimana dalam pembahasan tentang karakteristik masyarakat Aceh. Temperamen dan kultur orang Aceh lebih mengedepan, meskipun sudah diberlakukan Syariat Islam, namun banyak juga yang tidak melakukan rukun-rukunnya secara baik. Disisi lain, masih ada pemeo, yang mengatakan bahwa “darah dibayar dengan darah”. Semestinya, sebagai umat Islam, pastilah percaya adanya rukun ke enam, yakni percaya kepada “takdir”, atau percaya bahwa kadar baik dan buruk, datangnya dari Allah. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemeo tersebut masih sangat menonjol, dan cukup signifikan mempengaruhi konflik kekerasan. Sehingga permasalahan dendam hampir menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Rasa aman dan nyaman sebagai landasan membangun saling percaya antara GAM dan masyarakat Aceh Non GAM yang aspirasinya belum terakomodir dalam MoU Helsinki, nampaknya belum sepenuhnya pulih. Pada dasarnya disebabkan kuatnya prasangka bahwa kelompok yang satu akan

mengkhianati kelompok yang lain, disamping masih kuatnya dominasi dan intervensi kelompok pada perkembangan pembangunan di Aceh. Pekerjaan dan kontrak kerja kini memihak kepada pemenang : kesetiaan kepada GAM telah menggantikan koneksi dengan Pemerintah Pusat ataupun komandan tentara setempat sebagai kunci bagi kesepakatan politik dan usaha, sementara mantan komandan sayap bersenjata GAM, sekarang disebut Komite Peralihan Aceh (KPA), menjadi Pemerintah Bayangan. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada proses perdamaian dan sekaligus mendorong terjadinya situasi konflik, serta mengapa konflik di Langsa (Aceh) masih berlanjut pasca MoU Helsinki.

Resolusi konflik di Aceh sebenarnya perlu mempertimbangkan terhadap organisasi atau kelompok-kelompok lokal yang mempunyai keuntungan karena kedekatan dengan sumber konflik dan sangat mengenal pelaku utama, nilai budaya dan kondisi lokal. Yang menjadi tujuan utama disini adalah penelitian perdamaian positif dalam bentuk empati, solidaritas dan komunitas penduduk di Langsa (Aceh), kemudian dapat dikatakan sebagai penyelesaian konflik interaktif (negosiasi) dan konsultasi dengan pihak ketiga (mediasi) dengan menggunakan karakteristik pendekatan pemecahan masalah keacehan atau menurut peneliti bisa dikatakan sebagai Acehmologi. Dalam pandangan Miall,

“Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah berubah. Sementara transformasi konflik merupakan pengembangan dari penyelesaian konflik tujuannya adalah mentransformasikan hubungan sosial yang tidak adil. Istilah ini juga digunakan untuk memahami proses perdamaian, dimana transformasi bermakna sebuah urutan langkah-langkah transisi yang diperlukan. (Miall; 2002 : 13)

Ada beberapa hal yang menurut peneliti dapat dikatakan sebagai hambatan resolusi konflik sebagaimana yang diuraikan dalam Bab III, tentang konflik yang masih berlanjut di Langsa (dan Aceh). Beberapa sumber konflik tersebut masih ada dan dalam bentuk yang lebih diperkuat kedalam pertentangan berikutnya, diidentifikasi pada tingkatan negara, sosial, dan juga terdapat dalam kepentingan kelompok, elit dan individu. Kita tahu bahwa kekerasan membuat beberapa kelompok dapat mengambil keuntungan dari berlanjutnya konflik

tersebut. Bahkan pada intensitas rendah, secara ekonomi dan psikologis, pada keberlanjutan konflik, seperti bisa dilihat dengan adanya (paramiliter) KPA. Situasi di Langsa (Aceh) lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kelompok yang merasa dirugikan kalau konflik berlanjut, seharusnya juga mulai menunjukkan keseriusannya, bahwa mereka mampu meyakinkan banyak pihak tentang dinamika konflik ini bisa diselesaikan dengan dialog dan mediasi.

Setelah terjadi rekonsiliasi, dan dapat dipahami tentang akar permasalahan konfliknya, maka perlu ditransformasikan dalam proses membangun budaya damai dan peningkatan kapasitas kelembagaan baik formal maupun non formal. Langkah rekonsiliasi setidaknya dapat dijadikan sebagai sebuah tahapan awal perjalanan "Transformasi Konflik".

Transformasi konflik secara tidak langsung dapat memberikan kesadaran pada pihak-pihak yang berkonflik di Langsa, bahwa hal tersebut penting untuk dilakukan, karena manusia atau masyarakat dapat berubah ke arah perbaikan. Transformasi konflik punya makna menggeser konflik kekerasan pada suatu kondisi yang dapat dikembangkan dengan suatu kerjasama antara pihak Aceh RI dengan Aceh GAM, sampai tercapainya suasana damai. Karena kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda pada prinsipnya bisa bekerjasama dengan baik, jika mereka sudah menyadari bahwa perdamaian merupakan kebutuhan dan sesuatu yang mereka harapkan. Disamping penguatan basis sosial, ekonomi, politik dan keamanan hal yang perlu diperhatikan adalah adanya peran pendidikan yang benar terhadap makna perdamaian dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendekatan resolusi konflik, menunjukkan akar penyebab konflik dengan kekerasan, pihak-pihak yang bermusuhan dengan pertentangan dapat mentransformasikan ketidakadilan dan penyumbatan komunikasi yang berseberangan. Oleh karena itu proses damai yang saat ini dijalankan harus diikuti dengan usaha transformasi konflik yang menyeluruh disemua aspek dan terus menerus untuk memastikan perdamaian permanen dapat terwujud, agar tidak mengulangi kegagalan dari proses damai yang telah berlangsung pada masa-masa sebelumnya.

Teori tentang transformasi konflik tanpa kekerasan, sebagai sebuah kerangka bagi langkah-langkah analisa menuju penyelesaian konflik dan untuk memikirkan tentang kemungkinan melakukan intervensi dalam konflik. Untuk itu diperlukan analisis lima aspek transformasi konflik, yakni transformasi konteks, transformasi struktur, transformasi aktor, transformasi persoalan dan transformasi kelompok dan personal. (Miall; 2002 : 250-252)

### **A.3.1. Transformasi Konteks**

Menurut Miall, perubahan dalam konteks dapat mempunyai efek lebih dramatis dibandingkan perubahan pada pihak-pihak yang bertikai atau dalam hubungan mereka. Pasca MoU Helsinki, mengandung pengertian bahwa konflik terkait dengan konteks internasional, nasional dan lokal. Menurut peneliti konflik di Langsa (Aceh) telah berubah menjadi konteks lokal, selanjutnya dapat disederhanakan lagi menjadi konflik dalam konteks antar kelompok, yakni kelompok Aceh GAM dengan Aceh RI, jika dilihat di lapangan konflik terjadi antara GAM/KPA dengan FPSG/PETA dan FORKAB.

Perubahan pada konteks tentu akan berpengaruh pada usaha penyelesaian konflik, dalam hal ini perlu dicermati bagaimana mengidentifikasi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Agar perannya serta potensinya dalam penanganan konflik tersebut dapat dipahami, dengan kata lain perlu pemahaman terhadap konflik dari perspektif Aceh GAM dan Aceh RI, sehingga mempermudah bagaimana proses pendekatan, untuk membuka kembali hubungan yang telah terputus antara kedua kelompok tersebut akibat konflik selama ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dialog-dialog lanjutan untuk berdamai, agar mengarah pada proses penyembuhan dari berbagai hal yang telah dialami di masa lampau, agar masing-masing kelompok dapat membebaskan diri dari cengkraman masa lalu, tidak tergantung secara emosional (dominan) pada orang atau kelompok yang mereka benci.

Transformasi konteks, dimulai dari dinamika kedua kelompok yang secara formal maupun informal belum pernah melakukan perundingan/dialog, maka diperlukan intervensi dari pihak lain (dapat difasilitasi pemerintah, lembaga adat dan agama, serta tokoh masyarakat (formal/non formal) untuk menjembatani

perubahan pola hubungan positif. Disamping memperluas pemahaman maupun kemampuan pihak-pihak yang bertikai untuk menyadari dan menerima harkat dan martabat pihak lain, meskipun dilatar belakangi berbagai perbedaan. Sekaligus memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyadari atau mengakui aneka kesalahan dan memperbaiki hubungan.

Aneka kejadian dimasa lalu atau kesan-prasangka tertentu yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun bisa membuat orang/kelompok sangat kaku atau tidak mau mencoba menempuh solusi dengan memperbaiki relasi atau hubungan agar terjadi integrasi sosial. Kejelasan tentang tujuan, peran, tanggung jawab dan perbedaan pandangan tentang pengalaman masa lalu perlu diselesaikan, sebelum menangani permasalahan konflik lainnya.

### **A.3.2. Transformasi Struktur**

Menurut Miall, struktur konflik merupakan seperangkat aktor, persoalan dan tujuan atau hubungan yang tidak sesuai yang merupakan konflik itu sendiri. Konflik menyangkut struktur, seringkali melibatkan persoalan tentang keadilan dan tujuan-tujuan yang saling tidak sejalan, maka transformasi struktur ini diperlukan untuk menyelesaikan konflik.

Transformasi konflik mengakui bahwa perdamaian dan keadilan tidak terpisahkan. Perdamaian tanpa keadilan bukanlah perdamaian sejati, sementara keadilan tanpa perdamaian tidak akan bertahan lama..

Untuk merubah struktur konflik seringkali menuntut usaha intensif untuk menghasilkan perubahan yang diharapkan. Diperlukan intervensi pihak yang dapat dipercaya oleh kelompok yang bertikai, pasca MoU Helsinki dapat dilanjutkan dengan komitmen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang bertikai untuk melakukan perundingan perdamaian, dan menyepakati tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, untuk belajar hidup bersama saling menerima perbedaan diantara mereka. Melalui transformasi struktur diharapkan dapat mengurangi dominasi kelompok, saling curiga dan pada akhirnya bisa bersama-sama dan bekerja sama untuk membangun perdamaian positif di Langsa (Aceh).

### A.3.3. Transformasi Aktor

Menurut Miall, pihak-pihak yang bertikai harus menentukan kembali arah mereka, mengabaikan atau memodifikasi kembali tujuan yang ingin dicapai. Jika mengikuti Miall, maka kelompok-kelompok yang ada, hendaknya menerima perbedaan sebagai suatu kekuatan yang dapat dikemas dalam bingkai demokrasi untuk mewujudkan perdamaian di Langsa (Aceh). Pemisahan pihak-pihak yang bertikai dan pengintegrasian mereka merupakan bentuk perubahan penting. Perubahan aktor yang berkonflik juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Banyak konflik menjadi semakin mudah diselesaikan, manakala terjadi perubahan dalam kepemimpinan para pihak.

MoU Helsinki meskipun tidak terlalu signifikan telah merubah beberapa aktor dalam konflik Aceh, kini damai di Aceh merupakan kebutuhan utama bagi seluruh elemen masyarakat Aceh. Perdamaian telah mendorong semua pihak untuk menahan diri dan mencoba saling memahami dan harus berinteraksi. Seharusnya tidak ada alasan bagi pihak manapun, baik itu KPA, PETA, FORKAB, termasuk TNI/POLRI yang merupakan representasi dari Pemerintah Pusat untuk bertindak diluar bingkai perdamaian.

Dalam pandangan Miall, faktor situasi baru, pengalaman pembelajaran, interaksi dengan lawan, dan pengaruh-pengaruh lainnya, akan memperlihatkan bahwa preferensi aktor bukan sesuatu yang given. Memang diakui bahwa situasi baru di Aceh akan berpengaruh signifikan terhadap dinamika konflik. Namun pandangan Miall, mengindikasikan perubahan situasi baru dimana konflik itu terjadi. Sedangkan dalam kasus Aceh, perubahan situasi baru, yang justru berpengaruh signifikan terhadap dinamika konflik lokal di Aceh, adalah perubahan situasi baru di luar Aceh yakni Jakarta (Pemerintah Pusat). Perubahan situasi di tingkat pusat, akan berpengaruh pada peta situasi konflik di Aceh. Maka konflik di Aceh, bukan lagi konflik antara siapa lawan siapa, tapi konflik antara situasi apa lawan situasi apa. Hal itu ditandai dengan lawan bisa menjadi kawan, dan kawan justru bisa menjadi lawan.

Disisi lain data lapangan menunjukkan bahwa aktor konflik di Langsa (Aceh), dalam hal ini aktor elit konflik (Aceh GAM dengan Aceh RI), berpengaruh signifikan dalam proses penyelesaian konflik, artinya jika aktor elit

dapat menunjukkan pandangan dan sikap rujuk dan mencerminkan rekonsiliasi, maka hal tersebut dapat berpengaruh signifikansi ke aktor yang lain. Karena pola komando dan struktur organisasi (KPA/Aceh GAM dan PETA/Aceh RI) masih sangat dominan. Sehingga rekonsiliasi dalam pandangan Miall, dikatakan sebagai tahapan awal dalam penyelesaian konflik. (Miall; 2002 : 149)

#### **A.3.4. Transformasi Persoalan**

Menurut Miall, konflik ditentukan oleh posisi pihak yang bertikai mengenai berbagai isu. Ketika mereka mengubah posisi, atau ketika persoalan kehilangan sifatnya yang menyolok mata, atau persoalan baru muncul, maka konflik berubah, hal ini menjadi penting dalam transformasi konflik.

Dengan membingkai kembali persoalan dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik. Sangat jelas ketika GAM merubah posisinya atas isu kemerdekaan, maka perundingan dapat menghasilkan kesepakatan damai karena disisi lain Pemerintah Indonesia juga memberikan otonomi luas, lebih pada pemerintahan dan mereka dapat merintis perjuangannya melalui jalur politik, implementasi syariat Islam, pemerintahan lokal dan politik lokal. Sedangkan masalah Wali Nanggroe, sampai sekarang belum ada keputusan. Meskipun pernah dirapatkan oleh DPRA dengan Pemda, namun belum ada keputusan dan kesepakatan. Wali Nanggroe rencananya akan dikawal oleh pasukan khusus, bukan dari TNI/POLRI, tapi dari GAM, eks Libya dan dipersenjatai. Tidak menutup kemungkinan Qanun tentang Wali Nanggroe akan dibahas dan diundangkan pasca Pemilu 2009, setelah adanya kemenangan Parlok (PA) ditingkat DPRA, yakni PA 34 kursi, SIRA 1 kursi, PDA 1 kursi dan Parnas 33 kursi. Sementara jumlah kursi di tingkat DPRA 69 kursi.

Sementara pihak GAM, kesadaran untuk mencapai kemerdekaan dari Indonesia sudah terlanjur membumi, keinginan merdeka kemungkinan masih terdapat di sejumlah kalangan terutama mantan kombatan GAM, karena menjadi pemberontak itu sudah menjadi tujuan utama berdirinya GAM. MoU Helsinki telah membuat perubahan secara fundamental, dimana perjuangan GAM telah mengalami pergeseran dari perjuangan bersenjata ke perjuangan melalui jalur politik (transformasi dalam bidang politik), dan terlepas dari prediksi bahwa GAM melalui perjuangan politiknya tetap untuk menuju Aceh mereka. Namun

persoalan komitmen GAM untuk tidak lagi menuntut kemerdekaan atau Aceh lepas dari NKRI, hal tersebut masih menjadi isu fundamental dan berpengaruh signifikan terhadap dinamika konflik di Langsa (Aceh) yang masih berlanjut pasca Helsinki, sekaligus menghambat terwujudnya perdamaian positif.

Dinamika konflik yang ada, sebenarnya inti persoalannya pada “pemberontakan simbolis” yang dirasakan oleh masyarakat Non GAM di Langsa dan Aceh, maka persoalan perbedaan pandangan tersebut, pada akhirnya berpengaruh dan membias pada persoalan-persoalan lainnya. Mengikuti pemikiran Miall, transformasi isu merdeka, mestinya dijabarkan bukan merdeka lepasnya Aceh dari NKRI. Tapi merdeka dalam pengertian kebebasan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan akan hak-hak mereka dan kewajiban sebagai warga negara. Seperti di daerah-daerah lain, dimana perbedaan-perbedaan kepentingan dapat diimplementasikan melalui jalur politik, sosial budaya, ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Sesuai makna demokrasi dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia maupun di Aceh. Perubahan posisi persoalan sangat berhubungan dengan perubahan kepentingan dan perubahan tujuan.

#### **A.3.5. Transformasi Kelompok Dan Personal**

Menurut Miall, tanggung jawab pertama dan utama untuk mencegah, mengelola dan mentransformasikan konflik internal dengan kekerasan terletak pada mereka yang terlibat, terutama pada pemimpin nasional. Kalau mengikuti pemikiran Miall, lebih banyak bersifat umum (nasional). Sehingga perlu untuk kita persempit, atau disederhanakan dalam konteks lokal. Dimana sebaiknya para pemimpin lokal, Walikota Langsa dan Gubernur Aceh, sudah waktunya untuk menerima lawan-lawannya dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Tidak lagi sebagai pemimpin kelompok, yang mengakibatkan terpinggirnnya para pejabat yang berbeda prinsip atau pemahaman, terkait konflik yang terjadi di Aceh (dikotomi Aceh GAM dengan Aceh RI), seharusnya hal tersebut sudah tidak ada, karena semuanya adalah untuk kepentingan Rakyat Aceh. Dampak perlakuan tersebut di Langsa (Aceh) dikenal dengan duduk “dibangku panjang”. Disisi lain, penting juga melestarikan proses perdamaian yang berkelanjutan juga memperkuat otonomi lokal dan kemampuan bagi penyelesaian konflik setempat.



Transformasi konflik mempersyaratkan perubahan nyata dalam kepentingan, tujuan atau definisi dirinya sendiri atau pihak-pihak yang terlibat.

Pemimpin nasional dan pemimpin daerah perlu menyatukan dan menawarkan rekonsiliasi terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik baru di Aceh, seperti KPA, PETA dan FORKAB termasuk didalamnya para pendukung ALA dan ABAS. Selanjutnya akan lebih bijak apabila dapat memutuskan dan menerima lawan-lawannya ke dalam pemerintahan atau lembaga yang dapat membawa pengaruh pada suasana kondusif dan terwujudnya perdamaian positif. Hal tersebut tetap harus diikuti dengan perubahan dalam hati dan pikiran kelompok dan personil yang berkonflik, agar dapat memberikan kesadaran bahwa perdamaian dan persaudaraan jauh lebih mulia dan berharga dari pada bermusuhan. Adanya kesadaran dan kesatuan gerak serta tujuan yang sama demi membangun Aceh baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Langsa (Aceh), maka jalan menuju penyelesaian konflik Aceh secara permanen akan semakin jelas.

Selanjutnya salah satu bagian penting dalam penulisan disertasi, dalam sosiologi adalah melihat kembali teoritik hasil-hasil temuan terhadap kerangka teori atau kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisis kasus. Hasil temuan lapangan diperlakukan sebagai kenyataan empirik baru untuk melihat kembali apakah kerangka teori yang digunakan relevan, perlu penambahan atau bahkan tidak relevan dalam menjelaskan kasus.

Dari temuan lapangan, terlihat bahwa secara umum cukup relevan implikasi teoritik, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab I, untuk menjelaskan suasana kehidupan sosial, dimana integrasi sosial dan integrasi politik di Langsa (Aceh) dapat terwujud apabila ditopang atau dilanjutkan dengan resolusi konflik, melalui berkembangnya norma-norma atau nilai yang terkandung dalam rekonsiliasi (fluiditas kelompok) dan transformasi konflik. Disertasi ini telah menguji dan memverifikasi teori Hugh Miall, namun karena konflik Aceh sangat multi kompleks, sehingga teori Hugh Miall lebih pada mekanisme dan untuk menyentuh pada substansi konflik, maka ada beberapa bagian yang perlu penambahan, penyederhanaan, jika disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 22**  
**Relevansi Teori Dengan Dinamika Di Lapangan**

NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
1	Konflik	<p>Konflik biasanya terjadi, ketika dua atau lebih manusia terserap dalam dinamika yang berbeda, dan kadang-kadang saling berbenturan dalam dimensi-dimensi yang berbeda pula. Dalam situasi demikian, kelompok-kelompok yang bertikai akan bersikap, bertindak dan bereaksi dengan cara kekerasan, menegasi satu sama lain. (Miall; 2002 : 8)</p>	<p>Ada dua aroma sekaligus yang dapat dicium dan dilihat di Langsa (Aceh), yakni aroma konflik dan aroma perdamaian. Aroma perdamaian lebih tepat dibaca antara GAM dengan Pemerintah RI. Sedangkan aroma konflik terjadi antara masyarakat Aceh sendiri (GAM dengan Non GAM). Dinamikanya masih ditandai dengan berbagai tindakan kekerasan, menjerus pada sifat-sifat destruktif dan pelanggaran-pelanggaran, dan cenderung untuk saling menyerang antar kelompok dan tidak lagi berpedoman pada pencapaian tujuan, tapi bagaimana menyerang lawan mengalami peningkatan pasca MoU Helsinki.</p>	<p>Relevan.            Perkembangan konflik antara Aceh GAM (GAM/ KPA) dengan Aceh RI (FPSG/PETA) diwarnai dengan berbagai tindakan kekerasan, seperti: pembunuhan, penculikan, intimidasi, pembakaran, pemerasan, dan lain-lain. Tidak lagi konsen pada tujuan masing-masing kelompok, tapi lebih pada bagaimana menyerang kelompok lain.</p>

NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
2	Resolusi Konflik	<p>a. Dalam penyelesaian konflik, bukan hanya pihak yang bertikai, namun juga melibatkan pihak yang terimbas konflik. (Miall; 2002 : 253)</p> <p>b. Menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan pilihan-pilihan yang tepat. (Miall; 2002 : 7-8)</p>	<p>Meski sudah ada kesepakatan damai, antara Pemerintah Pusat dengan GAM, serta berbagai cara dan pendekatan yang dilakukan pasca MoU Helsinki, namun fakta dilapangan masih berpotensi menimbulkan konflik, dan terjadi pergeseran konflik. Karena pihak Non GAM tidak dilibatkan.</p> <p>Proses penyelesaian konflik dan penanganan pasca konflik di Aceh cenderung bersifat <i>Top Down</i>, dan masih meninggalkan bibit konflik. Artinya apinya sudah dipadamkan, tapi baranya masih ada dan siap menyala kembali.</p>	<p>Relevan.</p> <p>Mengikuti pemikiran Miall, seharusnya penyelesaian konflik Aceh melibatkan tiga pihak, yakni Pemerintah Pusat, GAM dan pihak Non GAM. Karena konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadi di Aceh antara Pemerintah Pusat dengan GAM sejak tahun 1976, demikian pula antara GAM dengan masyarakat Aceh.</p> <p>Relevan.</p> <p>Perlu dikembangkan konsep penyelesaian konflik yang bersifat <i>bottom up</i>, sebagai alternatif agar sinergi dan sesuai dengan dinamika lokal dan membangun budaya damai.</p>

NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
3.	Rekonsiliasi	Ruang lingkup resolusi konflik dan mengakhiri konflik kekerasan, diperlukan pendekatan luas yang mengakui fluiditas proses konflik, dimana konflik secara inheren bersifat dinamis dan penyelesaian konflik harus terlibat dengan pergeseran hubungan yang kompleks. (Miall: 2002 : 249)	<p>Pasca MoU Helsinki, perkembangan situasi dilapangan menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Damai hanya sekedar ketiadaan perang.</li> <li>2. Masih terjadi konflik antara GAM/KPA dengan Non GAM/PETA (Aceh GAM dengan Aceh RI)</li> <li>3. Kelompok-kelompok yang ada, cenderung eksklusif, dan bersifat unit-unit besar, yang saling berseberangan dan cenderung terpusat, serta berorientasi penyeragaman.</li> <li>4. Berpotensi munculnya dinamika konflik kekerasan.</li> </ol>	<p>Relevan.</p> <p>Perlu dikembangkan dan membangun hubungan baru dan tahan lama, diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Aceh GAM dengan Aceh RI) melalui sarana komunikasi dan tata relasi yang baru, agar kekuatan kelompok-kelompok tersebut dapat mencair, tidak eksklusif dan bersama-sama serta bekerja sama membangun perdamaian positif di Langsa (Aceh). Dengan kata lain membangun konsep rekonsiliasi, rujuk kembali dan mengandung makna reunifikasi.</p>

NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
4.	Transformasi Konflik	<p>Transformasi konflik merupakan pengembangan dari penyelesaian konflik, tujuannya untuk mentransformasikan hubungan sosial yang tidak adil dan istilah ini digunakan untuk memahami proses perdamaian dimana transformasi bermakna sebuah urutan langkah-langkah transisi yang diperlukan, dan transformasi konflik merupakan perubahan terdalam untuk proses penyelesaian konflik (Miall; 2002 : 31). Untuk itu,</p>	<p>Penyelesaian konflik di Aceh selama ini belum mencerminkan upaya rekonsiliasi dan transformasi konflik, karena belum menunjukkan perbaikan struktur sosial yang lebih adil. Kenapa hal tersebut terjadi, karena masyarakat Aceh Non GAM tidak dilibatkan. Sementara Aceh sendiri bukan hanya terdiri dari GAM saja, tapi ada elemen-elemen lain yang tidak sepaham dengan GAM, bahkan menentangnya.</p>	<p>Relevan.</p> <p>Setelah adanya proses rekonsiliasi, dan dapat dipahami akar permasalahan konfliknya, maka perlu ditransformasikan dalam proses pembinaan perdamaian dengan pengembangan akar perdamaian, dan peningkatan kapasitas kelembagaan baik formal maupun non formal. Langkah rekonsiliasi, setidaknya dapat dijadikan sebagai sebuah tahapan awal perjalanan "Transformasi Konflik"</p>

NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
	a. Transformasi Konteks	<p>diperlukan analisis lima aspek transformasi konflik yakni : transformasi konteks, transformasi struktur, transformasi aktor, transformasi persoalan, transformasi kelompok dan personil. (Miall; 2002 : 250-252)</p> <p>Konflik dapat dilihat dalam nasional, regional dan internasional yang seringkali bersifat kritis bagi kelanjutan konflik.</p>	<p>Pasca MoU Helsinki, telah terjadi perubahan konteks konflik, dan akan berpengaruh pada usaha penyelesaian konflik. Perubahan terjadi dari konteks internasional dan nasional. Selanjutnya menurut peneliti dapat disederhanakan lagi menjadi konflik lokal, bahkan konflik antar kelompok yakni kelompok Aceh</p>	<p>Relevan tapi bersifat umum. Dapat, yakni lebih disederhanakan lagi menjadi konflik lokal, bahkan konflik antar kelompok, yang dinamikanya justru lebih kritis bagi kelanjutan konflik di Langsa (Aceh).</p>

NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
	b. Transformasi Struktur	Struktur konflik adalah seperangkat aktor, persoalan dan tujuan atau hubungan yang tidak sesuai,	<p>GAM dengan Aceh RI (GAM/KPA dengan FPSG/PETA dan FORKAB). Berpotensi menimbulkan konflik baru di Langsa (Aceh). Sehingga konflik tetap berlanjut, dan menghambat proses perdamaian positif. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sentuhan etnis dan kedalaman konflik.</li> <li>2. Perbedaan persepsi terhadap perdamaian.</li> <li>3. Perubahan struktur konflik dan potensi konflik laten.</li> <li>4. Pemberontakan symbolis.</li> </ol> <p>Pasca MoU Helsinki, telah terjadi perubahan struktur konflik dari konflik vertikal antara Pemerintah RI dengan GAM, menjadi konflik horizontal antara</p>	<p>Relevan. Konflik yang menyangkut struktur, seringkali melibatkan persoalan tentang keadilan dan tujuan-tujuan</p>

NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
	c. Transformasi Aktor	yang merupakan konflik itu sendiri.  Pihak-pihak yang bertikai harus menentukan kembali arah mereka, mengabaikan atau memodifikasi kembali tujuan yang ingin dicapai.	kelompok GAM dan Non GAM (Aceh RI dengan Aceh GAM). Masing-masing kelompok bersifat eksklusif dan dinamikanya masih sering ditandai dengan berbagai tindakan kekerasan.  MoU Helsinki, meskipun tidak terlalu signifikan telah merubah beberapa aktor konflik, kini damai di Aceh merupakan kebutuhan utama bagi seluruh elemen masyarakat Aceh. Banyak konflik menjadi semakin mudah diselesaikan, manakala terjadi perubahan dalam kepemimpinan para pihak. Seharusnya tidak ada alasan bagi pihak manapun (KPA, PETA, FORKAB) untuk bertindak diluar bingkai	yang saling tidak sejalan, maka diperlukan transformasi konflik.  Dikelola dengan baik sehingga akan terbangun kepercayaan saling memahami dan menghargai, dengan membangun komunikasi yang baik antar kelompok-kelompok tersebut.  Relevan.  Pengintegrasian pihak-pihak yang bertikai dan perubahan aktor yang berkonflik merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik.  Kritik.  Persepsi tentang aktor konflik di Aceh bukan lagi siapa lawan siapa, tapi sudah bergeser menjadi situasi apa lawan situasi apa, karena dalam



NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
	d. Transformasi Persoalan	Konflik ditentukan oleh posisi pihak yang betikai mengenai berbagai isu, ketika mereka mengubah posisi. Dengan membingkai kembali persoalan, maka dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik.	<p>perdamaian. Tapi fakta di lapangan justru sebaliknya, dan dapat berujung pada potensi konflik.</p> <p>GAM, dengan merubah posisinya dan perubahan isu kemerdekaan, maka dapat menghasilkan kesepakatan damai dengan Pemerintah Indonesia (MoU Helsinki). Namun persoalan komitmen GAM untuk tidak lagi menuntut kemerdekaan atau Aceh lepas dari NKRI, hal tersebut masih menjadi isu fundamental yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika konflik di Aceh pasca MoU Helsinki. Dari fenomena yang ada, sebenarnya inti persoalannya pada pemberontakan simbolis, akhirnya berpengaruh dan membias pada</p>	<p>situasi tertentu, lawan bisa menjadi kawan dan sebaliknya kawan bisa menjadi lawan.</p> <p>Relevan.</p> <p>Transformasi isu merdeka, dapat dijabarkan bukan merdeka, lepasnya Aceh dari NKRI. Tapi merdeka dalam pengertian <i>self government</i> dan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hidup nyaman sesuai habitat masing-masing.</p>

NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
	e. Transformasi Kelompok dan Personil	Pemimpin Nasional, perlu menyatukan dan menawarkan rekonsiliasi, pemimpin pemerintah perlu memutuskan untuk menerima lawan-lawannya ke dalam pemerintah.	<p>persoalan lainnya. Karena kesadaran mencapai kemerdekaan lepas dari Indonesia sudah terlanjur membumi dan menjadi tujuan utama berdirinya GAM. Sampai saat ini, GAM masih eksis, artinya apakah yang akan diperjuangkan GAM, lewat jalur politik. Kalau tujuannya kesejahteraan Rakyat Aceh, bukankah hal itu sama dengan tujuan Pemerintah Indonesia.</p> <p>Pasca MoU Helsinki, belum pernah dilakukan atau ditawarkan rekonsiliasi, baik oleh Pemimpin Nasional maupun pemimpin lokal. Karena kelompok Non GAM (FPSG/ PETA) Pasca MoU Helsinki, justru dianggap sebagai sumber konflik, maka ada kecenderungan untuk tidak</p>	<p>Relevan.</p> <p>Tanggung jawab pertama dan utama untuk mencegah, mengelola dan mentransformasikan konflik, terletak pada mereka yang terlibat terutama, pada pemimpin nasional dan lokal. Disamping perlunya melestarikan</p>

NO	ASPEK	TEORI	TEMUAN LAPANGAN	
			FAKTA LAPANGAN	RELEVAN
			<p>diakui keberadaannya, dan dianggap sebagai milisi. Bahkan ada dikotomi terhadap keberadaan mereka, khususnya di lingkungan eksekutif, sehingga muncul istilah anak kandung, anak tiri dan anak haram dan duduk dibangku panjang (tidak punya jabatan).</p>	<p>proses perdamaian yang berkelanjutan. Yang terpenting disini adalah, kesediaan para pemimpin lokal, untuk tetap menerima lawannya dalam pemerintahan yang dipimpinnya.</p>

Sumber : Diolah dari analisis teori dengan fakta di lapangan.

## **B. Implikasi Kebijakan**

### **B.1. Tantangan Langsa (Aceh) Kedepan**

Pembangunan perdamaian pasca perang, jauh lebih sulit. Pertama, adanya tantangan untuk mencegah terulangnya lagi sebuah perang. Kedua, tantangan untuk mengkonstruksi perdamaian yang dapat mempertahankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai, dan akhirnya pada hubungan antara kedua tantangan tersebut. (Miall; 2002 : 303)

Dengan kata lain, pentingnya mengubah peperangan menjadi politik tanpa kekerasan. Ciri ini pada akhirnya merupakan inti penyelesaian konflik itu sendiri, dimana merubah politik perang ke dalam politik perdamaian. Jika mengikuti pemikiran Miall tersebut, maka tantangan pembangunan perdamaian pasca MoU Helsinki, adalah sebagai berikut :

1. Mencegah konflik bersenjata muncul kembali. Menilik hambatan-hambatan resolusi konflik yang telah dipaparkan diatas, konflik bersenjata masih dimungkinkan terjadi. GAM adalah dinamis, demikian juga dengan Pemerintah RI, sementara senjata ilegal masih beredar. Pertentangan-pertentangan internal didalam masing-masing pihak bisa mengubah situasi menjadi lebih buruk. MoU Helsinki bukanlah akhir sebuah konflik, namun dapat dikatakan sebagai sarana, dimana pihak yang bertikai dapat menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan perang (dan hal ini seringkali adalah akar dari konflik itu sendiri). Hal yang mungkin paling sulit adalah untuk meyakinkan faksi-faksi militer dalam masing-masing pihak bahwa kepentingan mereka bisa diselesaikan melalui bukan perang. Bagi TNI dan sayap militer GAM yang terbiasa “bernegosiasi” dengan senjata, penyelesaian kepentingan dengan “omong-omong” saja tidaklah mudah, dan perlu penyesuaian.
2. Menciptakan perdamaian yang dapat mempertahankan dirinya sendiri. Hal ini terkait dengan penyelesaian akar konflik yang tidak selalu harus melalui bantuan pihak ketiga dan harus bersifat menyeluruh baik melalui reformasi konstitusional dan institusional, rekonstruksi dan rekonsiliasi sosial, dan pembangunan kembali politik, ekonomi, dan komunitas yang tercerai berai. Ini adalah usaha kolosal yang tidak ringan. Karena perang yang sudah

berlangsung lama telah mengakibatkan defisit dalam modal utama pembangunan di Langsa (Aceh). Krisis kepercayaan dan kemiskinan menjadi tantangan awal yang harus dijawab oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah (GAM) dan Pemerintah Pusat (RI).

Disamping dua hal di atas, perlu juga diperhitungkan tentang pentingnya kualitas pembangunan perdamaian yang dipengaruhi juga oleh dinamika politik di Pemerintah RI, akibat situasi ekonomi dan politik lokal. Oleh karena itu, tantangan pembangunan perdamaian di Aceh khususnya Langsa kedepan, perlu mengantisipasi perubahan-perubahan dalam Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan RI, dalam penanganan pembangunan ekonomi dan hubungan antar kelompok lokal di Langsa (Aceh). Agar dapat membuat kebijakan yang terintegrasi dan sekaligus mendukung integrasi sosial dan integrasi nasional.

## **B.2. Implikasi Kebijakan**

Langkah bijak dan arif menuju perdamaian positif di Langsa (Aceh), diantaranya perlunya memberikan rasa aman terhadap hari depan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti :

### **a) Bidang Ekonomi**

(1) Proyek pembukaan perkampungan baru (Program Rumah Kebun), dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan Tambak Inti Rakyat (TIR). Kedua program tersebut memungkinkan dilaksanakan karena luas lahan yang masih cukup tersedia di Provinsi Aceh, sedang di Langsa yang dapat dikembangkan adalah TIR. PIR diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan pengangguran, sedangkan TIR juga diprioritaskan pada masyarakat miskin dan pengangguran, terutama nelayan tradisional yang bertempat tinggal disepanjang garis pantai. Pendampingan dilakukan oleh Pemerintah, pemilik modal maupun pihak lain yang terkait, seperti NGO baik lokal maupun internasional. Dalam program PIR diberikan sekitar dua hektar dan TIR sekitar satu hektar pada setiap kepala keluarga dengan pertimbangan. Program PIR 1,5 Ha untuk perkebunan, dan TIR 0,5 Ha untuk tambak, hasilnya dapat dipakai untuk mencicil kredit modal kebun

atau modal tambak. Setelah pembayaran lunas, kepada mereka diberikan sertifikat hak milik tanah dan rumah. Masing-masing 0,5 Ha untuk membangun perumahan dan pekarangan untuk ditanami tanaman yang dapat segera dipasarkan dan menghasilkan, seperti sayuran, buah-buahan, dan ternak unggas, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena sampai saat ini kebutuhan sembako di Aceh masih banyak didatangkan dari luar Aceh. Dalam proyek ini sebaiknya dibangun secara terpadu, lengkap dengan fasilitas rumah, pendidikan, sarana ibadah dan sarana transportasi agar penghuninya tidak terisolir dari dunia luar.

- (2) Proyek Penggemukan Ternak, dengan luas lahan yang cukup tersedia dan adanya tradisi megang di Langsa (Aceh), maka proyek ini memungkinkan untuk dilaksanakan, karena selama ini kebutuhan daging didatangkan dari luar Aceh, seperti Lampung dan daging impor. Adapun jenis ternak yang cocok dipelihara seperti lembu, kerbau, dan kambing, dapat dikerjakan secara berkelompok dibawah pembinaan dan pendampingan intensif koperasi atau Pemkot/Pemda, serta pihak lain dengan cara kepada masing-masing kelompok diberikan modal kerja baik untuk pembelian ternak, pengadaan lahan, pembangunan kandang, sampai pada penanaman rumput gajah sebagai pakan ternak. Diharapkan dalam waktu dua sampai tiga bulan perawatan ternak sudah bisa dijual kembali.
- (3) Pembinaan terhadap UKM, pembukaan pabrik/industri agar dapat menyerap tenaga kerja disamping pembinaan intensif pada peluang home industri seperti souvenir khas Aceh, peralatan rumah tangga dan jajanan, sebagaimana yang sudah ada di Langsa (Aceh). Bisa difasilitasi oleh pemerintah, pemilik modal maupun LSM.

#### b) Bidang Pendidikan

Pembukaan pesantren modern dan terpadu, perlu mendapatkan prioritas pelaksanaannya, para santri diprioritaskan kepada anak-anak miskin dan korban konflik di Aceh. Untuk menunjang program ini perlu dibuka sekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA. Disamping memberikan kesempatan pada mereka untuk meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi baik di Langsa (Aceh) maupun diluar

Aceh, dibantu atau difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah atau lembaga-lembaga lain yang terkait bidang pendidikan. Untuk di Langsa sudah ada STAIN dan UNSAM serta PTS lain.

Kebijakan ekonomi dan pendidikan punya makna prioritas untuk dilakukan di Langsa (Aceh). Karena kemiskinan penduduk, akibat konflik yang berkepanjangan dapat meningkatkan frustrasi sosial, dan dapat memicu berbagai tindakan kriminal. Disamping tingkat pengangguran juga menjadi salah satu persoalan yang masih ada pasca MoU Helsinki, terutama mantan kombatan.

#### c) Bidang Sosial Budaya

Diperlukan berbagai kegiatan yang dapat membangun atau memperbaiki relasi sosial, seperti diadakan pertemuan dan silaturahmi, pendekatan kekerabatan yang dapat melanjutkan re-integrasi sosial, seperti penyelenggaraan ritual atau upacara kenduri dan "peusejeuk" (semacam acara tepung tawar) untuk meleraikan persengketaan kelompok Aceh GAM dan Aceh RI (KPA dengan PETA dan FORKAB) yang dilengkapi syarat lain, termasuk "Bulukat Kuneng" (nasi ketan kuning) dan potong lembu atau kambing, bila memungkinkan saling berpelukan untuk saling memaafkan. Sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan dinamika ke Aceh, dan sesuai dengan program reintegrasi yang diamanatkan dalam MoU Helsinki, maupun program pemerintah. Disamping untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal maupun non formal/lembaga adat dan agama.

Pembentukan "Forum Bersama" yang terdiri dari kelompok-kelompok KPA, PETA, FORKAB, serta ormas dan orpol lain, yang dapat mencerminkan lintas profesi maupun kelompok seperti partai, akademisi, status sosial dan ekonomi serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan, agar kebekuan kelompok dapat mencair dan tidak eksklusif. Untuk membangun hubungan baru yang damai dan tahan lama semua komponen masyarakat, melalui sarana komunikasi dan tata relasi yang baru. "Forum Bersama" perlu dibentuk dan dibantu oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dan dimasukkan dalam APBK/APBA, agar dapat merespon setiap perkembangan permasalahan secara positif dengan membangun perdamaian. Pelibatan perempuan dalam forum

bersama, maupun dalam setiap langkah resolusi konflik menjadi sangat penting. Perempuan merupakan penduduk terbesar di Aceh, maka proses pendekatan dan usaha memperoleh simpati atau memenangkan hati orang Aceh perlu memenangkan hati perempuan Aceh.

#### d) Bidang Politik

Momentum transformasi perjuangan GAM dari gerakan bersenjata, berubah menjadi KPA, selanjutnya merubah perjuangan lewat jalur politik dengan membentuk parlok (Partai Aceh). Perlu mendapat perhatian dan diikuti oleh kelompok lain dengan mengedepankan mekanisme demokrasi. Dengan demikian tidak perlu lagi dikotomi Aceh RI dan Aceh GAM. Termasuk kepentingan ormas, dan kelompok-kelompok yang masih berkonflik, agar diimplementasikan melalui saluran politik (Parlok dan Parnas), yang berlaku dan syah menurut hukum. Persaingan memperjuangkan kepentingan yang berbeda, sejauh masih dalam koridor NKRI, untuk menghilangkan atau mengurangi memori konflik di masa lalu.

#### e) Bidang Hukum

Perlunya supremasi hukum di Langsa (Aceh) artinya tidak membedakan dari kelompok Aceh GAM maupun Aceh RI, semuanya mendapatkan perlindungan dan kewajiban yang sama didepan hukum, Agar tidak terjadi sentimen dan perlakuan yang tidak adil, karena masalah yang masih tersisa pasca MoU Helsinki diantaranya terkait masalah penegakan hukum. Diharapkan lembaga-lembaga penegak hukum dan kehadiran aparat penegak hukum, harus dapat menjadi solusi atas persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat Aceh. Disamping pentingnya penerapan tanggung jawab pemerintahan pada tataran konsepsi batasan administratif antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kota Langsa. Artinya implementasi yang mampu mencerminkan diskripsi Kota Langsa yang sesungguhnya, secara komprehensif perlu membenahan secara serius.

Selanjutnya berbagai bidang kebijakan tersebut, jika dihubungkan dengan teoritik Hugh Miall, khususnya untuk Kota Langsa, maka dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 23  
Implikasi Kebijakan

No	Kebijakan	Teori	Saran	Pelaku
1.	<p>Ekonomi.</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi, dengan memberikan dukungan pengembangan kegiatan usaha produktif yang berkelanjutan.</p>	<p>Konflik hanya dapat diselesaikan, ketika akar motif lain, seperti identitas, keamanan dan keberuntungan hidup dapat terpenuhi. (Miall; 2002 : 14)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyek pembukaan perkampungan baru dengan konsep TIR dan penggemukan ternak.</li> <li>2. Pembinaan UKM, dan home industri.</li> <li>3. Membangun dan memberdayakan pelabuhan Kuala Langsa, sebagai pelabuhan dan pariwisata sebagai sumber PAD serta pembangunan industri/pabrik untuk menyerap tenaga kerja.</li> </ol>	<p>Pemerintah, Pengusaha, LSM.</p>
2.	<p>Sosial Politik.</p> <p>Reintegrasi dan integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p>	<p>Pentingnya fluiditas, dengan pergeseran hubungan yang kompleks dalam proses rekonsiliasi, dilanjutkan dengan transformasi konflik yang bermakna sebuah urutan langkah-langkah</p>	<p>Pembentukan forum bersama, yang terdiri dari kelompok-kelompok KPA, PETA dan FORKAB serta Ormas/Orpol lain, yang dapat mencerminkan lintas profesi/kelompok, partai, olah raga, ekonomi, sosial budaya dan diklat agar kebekuan kelompok dapat mencair dan tidak eksklusif. Artinya dapat rujuk kembali</p>	<p>Pemerintah, Tokoh formal/non formal termasuk perempuan, LSM.</p>

No	Kebijakan	Teori	Saran	Pelaku
		transisi yang diperlukan, dan merupakan perubahan terdalam dari proses penyelesaian konflik. (Miall; 2002 : 249-252)	sekaligus mengandung makna reunifikasi, untuk membangun hubungan baru yang tahan lama dan pengembangan/pembinaan budaya damai antara Aceh RI dengan Aceh GAM maupun kelompok-kelompok lainnya, melalui sarana komunikasi dan tata relasi yang baru.	
3.	Hukum. Kota Langsa sebelumnya merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Selanjutnya berdiri sendiri sebagai daerah Tingkat II (Kota) Langsa, setelah ada pemekaran Kab. Aceh Timur yang diatur dalam UU No.3 Th. 2001.	Mediator yang berkuasa dapat mengubah tidak hanya struktur komunikasi, tetapi juga keseimbangan kekuasaan. (Miall; 2002 : 15)	1. Peningkatan kinerja lembaga-lembaga hukum dan aparat hukum yang independen. Sehingga mendukung terwujudnya suasana kondusif dan damai. 2. Penerapan tanggung jawab Pemerintah Kota Langsa, sesuai dengan konsep administrasi dan implementasinya di lapangan terutama pembagian aset daerah masing-masing dan memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur ke wilayah Aceh Timur (IDI)	Pemda Aceh, Tokoh Masyarakat.

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

Solusi perdamaian melalui MoU Helsinki, memang secara signifikan telah mengurangi eskalasi konflik. Namun demikian dari hasil analisis terhadap solusi konflik tersebut belum dapat menyelesaikan konflik, artinya belum mewujudkan perdamaian positif, jika tidak dilanjutkan dengan upaya resolusi konflik. Fakta di lapangan menunjukkan masih terjadi konflik antara Aceh GAM (GAM/KPA) dengan Aceh RI (FPSG/PETA), dan kemudian muncul FORKAB. FORKAB merupakan forum bagi mantan kombatan GAM yang menyerah sebelum MoU Helsinki, dan dalam perkembangannya FORKAB cenderung bersinergi dengan kelompok PETA, karena dianggap telah mengkhianati perjuangan GAM/KPA.

Dinamika konflik fisik masih sering terjadi dalam bentuk kekerasan, seperti penculikan, penyanderaan, pembunuhan, pajak nanggroe, pembakaran dan intimidasi. Sementara konflik antara GAM dengan Pemerintah Pusat dalam bentuk "Pemberontakan Symbolis", dan hal ini berpengaruh signifikan terhadap timbulnya konflik horizontal. Konflik di Langsa (Aceh) masih berlanjut, karena adanya sentimen etnis dan kedalaman konflik, perbedaan persepsi terhadap perdamaian, perubahan struktur konflik dan potensi konflik, serta pemberontakan simbolis. Disamping secara umum di Aceh juga berkembangnya tuntutan pemekaran daerah ALA dan ABAS.

Banyak pendapat mengatakan bahwa, teori konflik melihat sumber konflik dari adanya dominasi, ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Namun dinamika sekarang di Aceh pembagian atau distribusi itu sudah ada perubahan dan sudah dibagi sesuai MoU Helsinki dan otonomi luas, status sosial dan kekuasaan di Aceh sekarang relatif lebih baik untuk pihak GAM. Pemberlakuan syariat Islam, partai lokal yang diikuti dengan perubahan hal-hal diluar ekonomi, bahkan juga cenderung didominasi oleh kelompok GAM. Sementara Aceh mendapatkan perlakuan khusus dan terkesan memberi ruang gerak yang terlalu bebas bagi GAM, karena dalam materi kesepakatan tersebut telah dianggap melampaui undang-undang otonomi khusus bahkan jauh lebih radikal, dan secara substansi dapat dikatakan sama dengan negara federal. Pemerintah Pusat sudah mau

memberikan fasilitas dan cenderung “mengalah” dalam arti Aceh (GAM) mau apa saja silahkan yang penting masih dalam bingkai NKRI, agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.

Permasalahannya adalah mengapa potensi konfliknya masih terasa dan perdamaian positif belum terwujud. Hal tersebut diantaranya dikarenakan dalam kesepakatan MoU Helsinki hanya melibatkan Pemerintah dan GAM saja, sedangkan keduanya tidak secara jelas dapat mengklaim mewakili masyarakat Aceh. Dengan kata lain, MoU tersebut sepertinya hanya merupakan perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan GAM dan tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat Aceh lainnya yang terimbas konflik (Aceh RI). Masih ada kelompok yang anti GAM yang merasa belum terwakili, sehingga struktur sosial yang adil belum dapat diwujudkan, meskipun di Aceh sudah ada Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Forum Koordinasi dan Komunikasi Aceh (FKK). Dengan demikian kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan GAM adalah sebatas sebuah pengakhiran konflik bersenjata antara kedua belah pihak. Namun belum tentu pengakhiran konflik antara pihak-pihak yang bertikai di Langsa (Aceh). Artinya seperti menyimpan api dalam sekam, apinya sudah dipadamkan, tetapi bara apinya masih ada dan setiap saat dapat menyala kembali.

Permasalahan teori konflik, jika mengacu pada teori Hugh Miall, konflik yang berkelanjutan di Langsa (Aceh) diantaranya dikarenakan dalam penyelesaian konflik Aceh (MoU Helsinki) tidak melibatkan masyarakat Non GAM (Aceh RI) yang secara langsung menjadi korban dan terimbas konflik. Disamping penyelesaian konflik selama ini belum mencerminkan upaya rekonsiliasi (fluiditas) dan transformasi konflik yang menganalisis tentang transformasi konteks, transformasi struktur, transformasi aktor, transformasi persoalan dan transformasi kelompok dan personil.

Langkah resolusi konflik dalam rangka mencari akar permasalahan yang potensial mendorong munculnya konflik baru dan menghambat proses menuju perdamaian positif dan kesejahteraan sosial di Langsa (Aceh). Sementara data lapangan menunjukkan bahwa hambatan-hambatan atau berlanjutnya konflik ditandai oleh hal-hal seperti : (1) Sentimen etnis dan kedalaman konflik yaitu

adanya dikotomi Aceh dan Jawa (etnonasionalisme Aceh dan kolonialisme Jawa) yang selama ini dipelihara sebagai "*comen denomator*". (2) Perbedaan persepsi dan kepentingan terhadap perdamaian. (3) Perubahan struktur konflik yang mengalami pergeseran dari konflik vertikal (GAM dengan Pemerintah Pusat) menjadi konflik horizontal (masyarakat Aceh sendiri, yakni antara masyarakat Aceh GAM dengan masyarakat Aceh RI). (4) Potensi konflik laten, yakni situasi anomie atau situasi ketidakpastian yang cenderung dipelihara. (5) Pemberontakan simbolis, yang merupakan sumber atau akar konflik di Langsa (Aceh). Fenomena tersebut justru menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan sosial (kesejahteraan sosial) pemerataan kesempatan dan distribusi kekuasaan dan sumber daya alam, perlindungan dan penegakan hukum yang tidak berpihak serta usaha-usaha membangun masyarakat yang dapat merefleksikan tentang komitmen perdamaian.

Diakui bahwa secara umum, teoritik Hugh Miall cukup relevan untuk menjelaskan suasana kehidupan sosial, dimana integrasi sosial dan integrasi nasional di Langsa (Aceh) dapat terwujud apabila ditopang atau dilanjutkan dengan resolusi konflik melalui berkembangnya norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung dalam rekonsiliasi (fluiditas) dan transformasi konflik. Disertasi ini telah menguji dan memverifikasi teori Hugh Miall, namun konflik Aceh sangat multi kompleks, sehingga teoritik Hugh Miall lebih pada mekanisme dan belum dapat menyentuh pada substansi konflik. Maka ada beberapa bagian yang perlu penambahan atau penyederhanaan jika disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Dalam hal ini menurut peneliti perlu adanya atau lahirnya teori orisinil, dalam memperkaya atau melengkapi teori Hugh Miall, yakni resolusi konflik komprehensif dan dapat digunakan secara empirik jika disesuaikan dengan perkembangan dinamika konflik dan dapat merefleksikan kondisi lokal serta pemetaan kelompok-kelompok yang bertikai.

Sumber konflik di Aceh termasuk Langsa bukan lagi dominasi, ketimpangan dan eksploitasi ekonomi tapi lebih ke ideologi, yakni disatu sisi GAM masih diragukan komitmennya untuk tetap tidak memperjuangkan merdeka, dan disisi lain pihak Non GAM (Aceh RI) masih menginginkan Aceh tetap dalam wilayah NKRI. Dalam perkembangan konflik Aceh khususnya Langsa masih dipengaruhi oleh perkembangan situasi politik baik di pusat maupun di daerah,

sehingga perkembangan konfliknya bukan lagi siapa lawan siapa, tapi cenderung bergeser menjadi situasi apa lawan situasi apa, terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik, karena dalam situasi tertentu lawan bisa menjadi kawan dan sebaliknya kawan bisa menjadi lawan.

Apapun permasalahannya di Langsa (Aceh), harus tetap dipecahkan melalui proses mengedepankan mekanisme demokrasi, bila tidak maka berpotensi berbalik arah dari demokrasi menjadi konflik bersenjata. Untuk itu upaya-upaya resolusi konflik perlu keseriusan dengan mengembangkan rekonsiliasi dan transformasi konflik untuk membangun integrasi sosial masyarakat dan integrasi nasional, sekaligus membangun perdamaian yang permanen di Langsa (Aceh).

Usaha penyelesaian konflik, akhirnya dapat dilihat sebagai proses dialog berkelanjutan dan sebuah refleksi antara tiga elemen, seperti dinamika yang membentuk konflik yang harus ditangani, teori yang memberi kerangka bagaimana pemahaman terhadap dinamika tersebut, untuk dapat mencari model resolusi konflik yang komprehensif dan dapat digunakan secara empirik. Disisi lain diperlukan pengalaman praktis mereka yang berkompeten terhadap perdamaian di Aceh khususnya Langsa dalam mengimplementasikannya menuju perdamaian positif dan secara sosiologis terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat.

## **B. Rekomendasi**

Ada beberapa hal yang secara umum perlu direkomendasikan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Secara garis besar rekomendasi mengacu pada tahapan resolusi konflik sebagaimana telah dibahas dalam bab-bab terdahulu melalui dialog dan mediasi untuk terjadinya rekonsiliasi, sehingga dapat membangun saling percaya dan membangun kerja sama antara pihak Aceh RI dan Aceh GAM, karena hal tersebut merupakan kunci utama menuju perdamaian positif di Aceh khususnya di Langsa. Termasuk didalamnya konsolidasi perdamaian para pihak yang bertikai, agar dapat bekerja sama dalam sistem konstitusional dan institusional yang berlaku. Perbaiki kerangka kerja yang menyebabkan ketidak setaraan, peningkatan hubungan jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta

pengembangan proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, rekonsiliasi dan pengakuan. Rekonsiliasi dimaksudkan untuk aktor-aktor yang terlibat konflik serta semua stake holder yang terlibat dalam pembangunan Aceh baru untuk mewujudkan perdamaian permanen. Rekonsiliasi mencakup semua bidang kehidupan dengan mentransformasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik.

2) Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai representasi dari peran negara, adalah sangat sentral, dan harus ditempatkan pada posisi yang benar, agar dapat menjadi "*strong state*". Perlu ketegasan Pimpinan Nasional khususnya dalam bidang politik dan ekonomi dengan mengedepankan kepentingan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan dalam bidang sosial budaya seperti pembentukan/pembangunan karakter building dan nasional building, sekaligus meminimalisir atau mengurangi situasi ketidakpastian (situasi anomie) di Aceh. Meskipun hal tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pemimpinnya, yaitu kemampuan untuk membuat dan melengkapi perencanaan pembangunan, kebijakan publik dan berbagai tindakan aksi yang mendukung. Termasuk juga kemampuan untuk melibatkan masyarakat, mengatur hubungan sosial dan pengelolaan sumber daya yang ada secara baik. Karena kekuatan politik, kekuatan sumber daya, kekuatan wewenang dan kekuatan reformasi lebih sering dimiliki oleh instansi pemerintah. Sehingga tidak hanya menonjolkan kekuatan TNI/POLRI saja, tapi perlu penguatan dan pengelolaan kekuatan-kekuatan lain yang seirama dengan dinamika demokrasi di Langsa untuk membangun perdamaian permanen. Proses menuju Aceh Baru melalui rekonstruksi sosial bagi Langsa (Aceh) melalui program-program yang nyata seperti pengentasan kemiskinan, meminimalkan pengangguran, rehabilitasi korban konflik dan pendampingan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta peningkatan pendidikan (Wawasan Kebangsaan Indonesia, dan peningkatan SDM). Diperlukan program yang bermanfaat bagi ketahanan hidup dan peningkatan kualitas hidup (khususnya pekerjaan dan masalah kemiskinan) adanya peningkatan derajat hidup para korban konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

3) Membangun forum komunikasi baik antar warga masyarakat dan institusi didalamnya, serta komunikasi dengan pemerintah lokal. Forum bersama menjadi penting untuk menjembatani kelompok-kelompok yang saling berseberangan di Langsa (Aceh). Forum tersebut dapat menggagas melalui pertemuan-pertemuan bersama dalam rangka merencanakan dan merealisasikan konsep-konsep perdamaian, membangun tali silaturahmi, mencoba melupakan masa lalu untuk tidak saling mencurigai. Pada akhirnya saling mengenal dan dilanjutkan dengan pengembangan program yang mendukung terciptanya suasana damai di Aceh dan tetap dalam wadah NKRI.

4) Membuka industri bagi kesejahteraan rakyat melalui kesempatan bagi mereka untuk berperan membangun daerah Langsa (Aceh) berdasarkan spesifikasi dasar masing-masing wilayah dengan pelibatan unsur masyarakat sebagai subyek pembangunan. Disamping perlu dilibatkannya struktur lokal (adat dan agama) untuk membangun kepercayaan, sebagai bagian dari resolusi konflik. Terutama dalam meningkatkan partisipasinya, bersama masyarakat dalam menentukan corak dan kebijakannya melalui mekanisme demokrasi. Untuk mengubah derajat hidup dan mengentaskan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik di Aceh dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

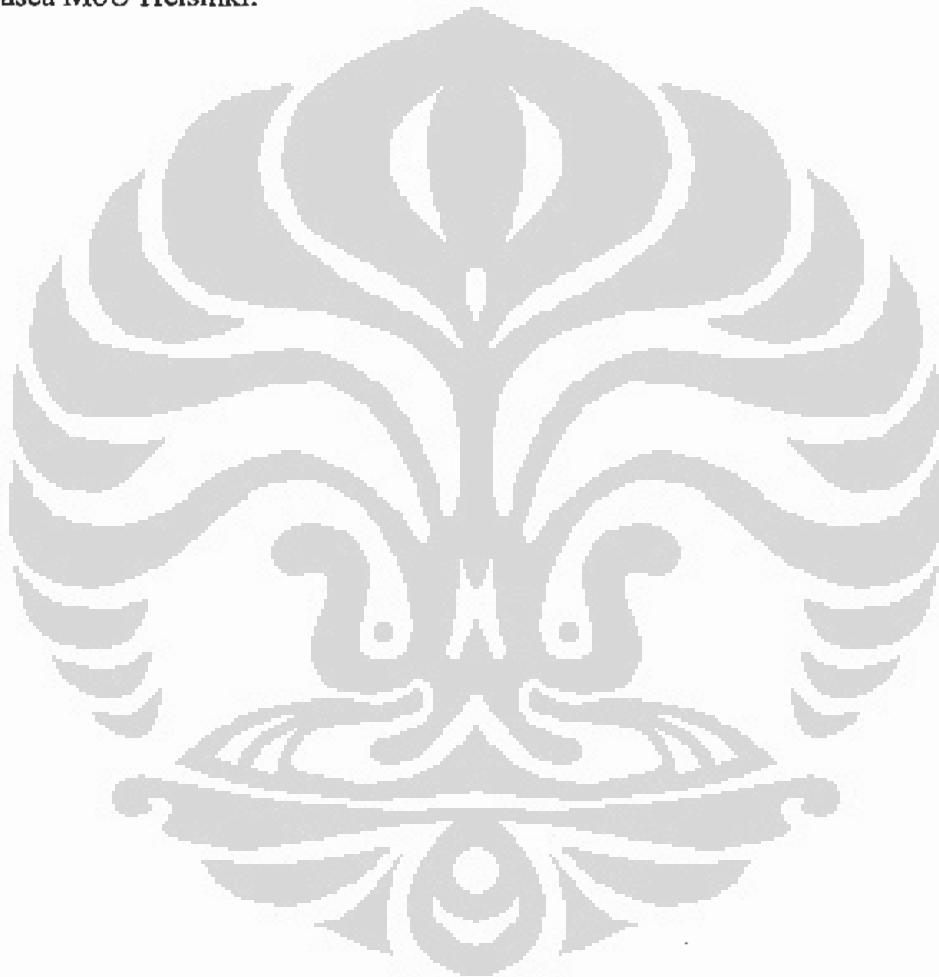
5) Para pelaku usaha di Langsa (Aceh) hendaknya dapat membantu pemerintah dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat, khususnya para lulusan sekolah/ perguruan tinggi, agar tidak hanya disiapkan untuk menjadi tenaga siap bekerja, tetapi mereka juga dibekali dengan kemampuan membuka lapangan kerja sendiri. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan pelaku usaha baru yang berkualitas, amanah dan mempunyai komitmen untuk membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.

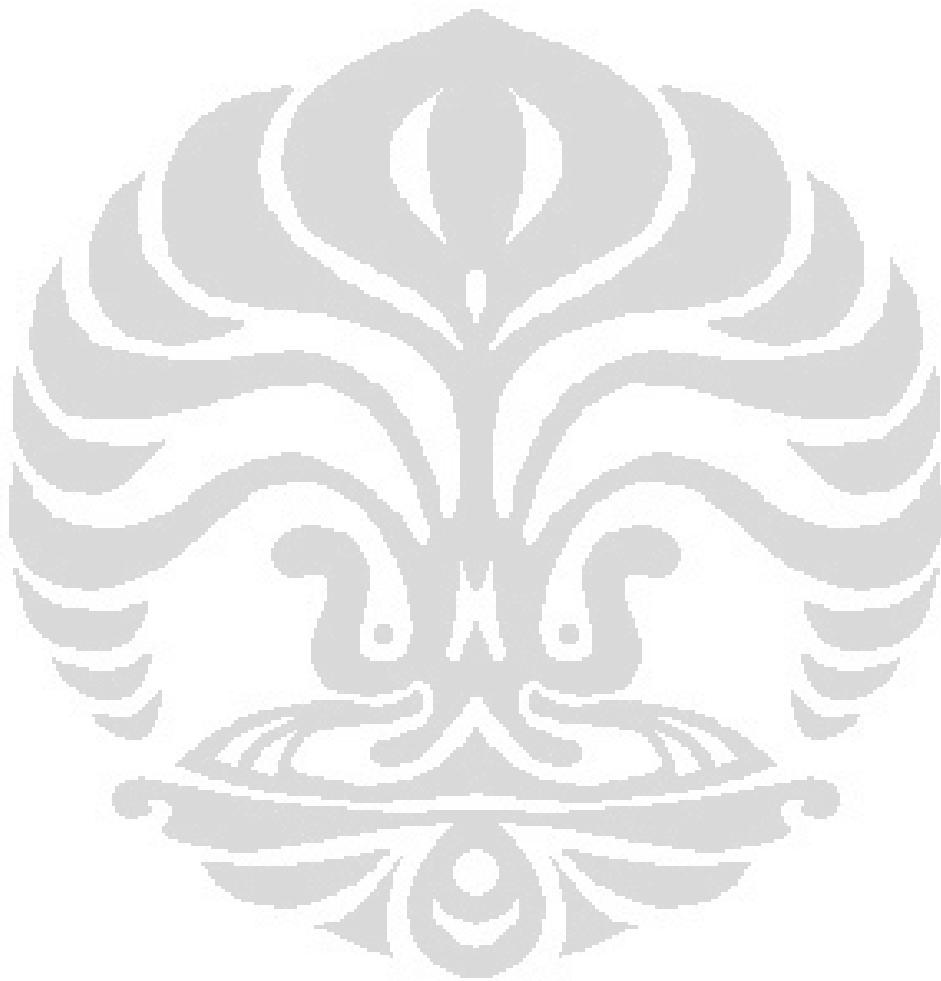
6) Penegakan Hukum. Peningkatan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum yang independen, dan dapat menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi oleh Rakyat Aceh khususnya Langsa. Sehingga mendukung terwujudnya suasana kondusif dan damai.

7) Perlu dibentuk semacam komisi atau semacam lembaga analisis konflik Aceh, dalam rangka melaksanakan kontrol sosial dengan memberikan tanggung



jawab pada kelompok/individu profesional dalam pengertian adat atau agama, akademik tidak kalah pentingnya adalah dengan melibatkan secara aktif peran perempuan maupun ketokohan lainnya yang secara nyata dapat mempengaruhi dinamika perubahan ke arah perdamaian positif. Agar dapat memberikan rasa aman lingkungan dan rasa aman terhadap hari depan yang lebih baik dan secara optimal dapat langsung melibatkan potensi masyarakat dalam upaya komprehensif untuk menyelesaikan konflik serta permasalahan yang masih tertinggal di Langsa (Aceh) pasca MoU Helsinki.





## DAFTAR PUSTAKA

- AB, Sulaeman (2005); *Aceh Bakal Lepas*, Jakarta, Taman Iskandar Muda.
- Abubakar, Irfan (2006); *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Alvin Y. SO dan Suwarsono (1990); *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : LP3ES.
- Amstrong, Warrick and T.G. Mc Gee (1982); *Theaters of Accumulation*, Methuen.
- Ananta, Aris (2007); *The Population and Conflict Aceh*, Singapore : ISEAS.
- Anwar, Zaky (1999); *Hari-Hari Terakhir Timor-Timur, Sebuah Kesaksian*. Jakarta : PT. Sportif Media Informasindo.
- Arendt, Hannah (1970); *The Origins of Totalitarianism*, New York : Harcourt, Brace & Co.
- Asnawi, Sahlan (2002); *Teori Motivasi (Dalam Pendekatan Psikologi, Industri, Organisasi)*, Jakarta : Studi Press.
- Baskoro Niti, Rony TB (2002); *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Peradaban.
- Bhakti, Ikrar Nusa (2008); *Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Bock, Philip K. (1980); *Continuities in Psychological Anthropology*, San Fransisco, E.H. Fremman Company.
- Brown, E. Michael (1993); *Ethnic Conflict an International Security*, Princetion, New Jersey.
- Chaedar, AL. (1999); *Aceh Bersimbah Darah*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar.
- Coser, LA. (1967); *Continuities in The Study of Social Conflict*, New York : Free Press.
- Cresswell, John W. (2003); *Research Design, Qualitative and Quantitative Approach*, Sage Publication. Thousand Oaks.
- Darwis, Djamaludin (2007); *Mengelola Konflik Membangun Damai, Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang : WMC (Walisongo Mediation Centre).

- Djopari, John R.G (1999); *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta : PT. Gramedia Widhiarsana Indonesia.
- Fatabi, Abdoel (2005); *Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Galtung, Johan (1996); *Studi Perdamaian, "Perdamaian Atau Konflik, Pembangunan Dan Konflik, Perkembangan Dan Peradaban"*, Surabaya : Pustaka Pelajar.
- Gonggong, Anhar (2005); *Abdul Qahar Muzakar, Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Green, Gary Paul, Anna (2002); *Asset Building and Community Development*, Thousand Oaks : Sage Publications, Inc.
- Gurr, Ted R. (1970); *Why Men Rebel*, Princeton : Princeton University Press.
- Hacker, Frederick (1996); *Crusaders, Criminals, Crazyies, Terror and Our Time*, New York : Norton.
- Hadi, Syamsul dkk. (2007); *Dis Integrasi Pasca Orde Baru, Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta : Yayasan Obor.
- Hamid, Ahmad Farhan (2006); *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat*, Jakarta : Suara Bebas.
- Helly P. Soetjipto, Mulyantini Sri S. (2004); *Teori Konflikional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Human, Bruce (1993); *Holy Terror*, Santa Monica, Rand.
- Huntington, Samuel P. (1994); *Partisipasi Politik Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ismiuha (1988); *Bunga Rampai Temu Budaya Nusantara*, PKA3, Banda Aceh : Syiah Kuala University Press.
- James, Black. A, Champion J. Dean (1999); *Methods and Issues in Social Research*, Terjemahan Koeswara E, Salam Dira dan Ruzhendi Alfin, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. PT. Refika.
- Jihad, Abu (2001); *Korban-Korban kebiadaban GAM Hasan Tiro*. Banda Aceh : FPMA.
- \_\_\_\_\_ (2000); *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro Dalam GAM*, Banda Aceh : Titian Ilmu Insani.
- Julan, Ting (2005); *Penyelesaian Konflik di Aceh, "Aceh Dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi*, Jakarta : LIPI Pers.

- Kivimaki, Timo (2005); *Konflik Kekerasan Internal, Konflik Suku Dalam Masyarakat Multi Budaya*, Jakarta : Yayasan Obor.
- Kraemer, E. (2004); *A Phylosophic Looks at Terrorism*, in Nyatepe, Co, A. And Zeisler-Vralsted, D. (eds) *Understanding Terrorism : Threats in an Uncertain World*. Upper Saddle River. New Yorks : Prentice Hall.
- Kraybill, Ronald S, Alice Frazer Evans dan Robert A Evans (2002); *Panduan Mediator, Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta : Karnisius.
- Kurdi, Muliadi (2006); *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa, Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Atjeh*, Banda Aceh : Yayasan Pena.
- Lawang, Robert MZ (1986); *Teori Sosiologi Klasi Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Lederach, J.P. Building Peace (1997); *Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington D.C. United State Institute of Peace.
- Lerrisa, R.Z (1997); *PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Lombard, Denys (1991); *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Magenda, Burhan D. (1982); *Aspek Keadilan Sosial Dalam Budaya Politik Indonesia*, Jakarta, Editor.
- Markas Besar TNI AD, (1978); *"Penumpasan Pemberontakan Separatisme di Indonesia"*, Jakarta : Dinas Sejarah TNI AD.
- Maxwell, Joseph (1996); *Qualitative Research Design, An Interactive Approach*, California, Sage Publication.
- Merton, Robert K. (1986); *Social Theory and Social Structure*, New York: The Free Press.
- Miall, Hugh (2002); *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ et.al. (1999); *Contemporary Conflict Resolutions, The Prevention Management and Transformation of Ready Conflict*, Polity Press, Cambridge, Page, 156-157.
- Miles B. Matthew dan Hubermans A, Michael (1992); *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Ruhendi, Rohidi. Jakarta : UI -- Press.

- Muhamad, Farouk dan Djaali H. (2003); *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*. Jakarta : PTIK Press.
- Mulyana, Deddy (2004); *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhasim, Moch, dkk (2003); *Konflik Aceh, Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik Aceh, Aktor Konflik, Kepentingan Dan Upaya Penyelesaian*.  
 \_\_\_\_\_(2008); *Integrasi Politik di Aceh Paska MoU Helsinki, Peluang Dan Kendala*, Banda Aceh.
- Pitaloka, Diah Rieke (2004); *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*, Jakarta : Galang Press.
- Prayogo, Dody (2007); *Konflik Antara Korporasi Dengan Komunitas Lokal. Studi Kasus Pada Industri Geotermal di Kecamatan Pengalengan Kab. Bandung, Jawa Barat*. Depok : Disertasi FISIP UI.
- Rani, Usman A. (2003); *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta : Yayasan Obor, Indonesia.
- Ranstorp, Magnus (1996); *Terrorism in the Name of Religion in Russell How Ard and Reid Sawyer (eds) Terrorism and Counter Terrorism*. Guilford, etc : The Graw-Hill TM.
- Rasmussen, J. Lewis (1997); *Peace Making in the Twenty First Century L New Roles, New Actors in I*, William Zartman and J. Lewis Rasmussen, *Peace Making in International Conflict : Methods and Technique*, Washington D.C, USIP.
- Reagen Ijie, Origenes (2003); *Kongres Rakyat Papua II, Merupakan Resolusi Dasar Menuju Papua Merdeka*, Jakarta : PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Reid, Anthony (2005); *Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke 19*, Jakarta : Yayasan Obor.  
 \_\_\_\_\_(2006); *The Background to the Aceh Problem*, Singapore : Singapore University Press.
- Rousseou, Jean Dacques (1968); *The Social Contract*, Penguin Books.
- Rozi, Safuan, dkk (2006); *Kekerasan Komunal, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Rukminto Adi, Isbandi (2008); *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Rynen, R.G. (2004); *Memutus Siklus Kekerasan, Penegakan Konflik Dalam Krisis Intra Negara*, Jakarta, Patricia.
- Santoso, Thomas (2002); *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Gitalia Indonesia.
- Sevilla, Consuelo G. (1988); *An Introduction to Research Methods*, Philippines : Printing company Inc.
- Sheley, Joseph (1987); *Exploring Crime, Reading in Criminology and Criminal Justice*, Belwort, California : Woodsworth Publishing Company.
- Siegel, James T. Shadow and Sound (1979); *The Historical Thought of The Sumatran People*, Chicago and London : The University of Chicago Press.
- Simon, Fisher, dkk (2001); *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta : The British Council.
- Smelser, Neil J. (1962); *Theory of Collective Behavior*, New York : The Tree Press.
- Stift, B. Grant (2003); *The Understanding of Evil : Joint Quest for Criminology and Theology*" R. Chairs and B. Chilton (eds) Stars Visions of Law and Justice Dallas : AC, Press.
- Sunarto, Kamanto (2004); *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : LP. Fak. Ekonomi UI.
- Suradi (2003); *Analisis Kriminologis Terhadap Perlawanan GAM Kepada Pemerintah Pusat Studi Kasus Konflik Aceh*, Thesis, Depok, FISIP UI.
- Syarif, Sanusi M. (2005); *Gampong dan Mumik di Aceh, Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Bogor : Pustaka Latin.
- Tilly, Charles (1978); *From Mobilization to Revolution*, USA : New Award Records.
- Tipe, Syarifudin, (2000); *Aceh Dalam Persimpangan Jalan*, Jakarta : Cidencindo Pustaka.
- Tomagola, Tamrin Amal (2006); *Republik Kapling*, Yogyakarta : Resist Book.
- Turner, HJ. (1991); *The Structure of Sociology Theory*, California : Wodsworth Publishing Company.
- Ury, William (1999); *Getting to Peace : Transforming Conflict at Home, at Work and in the World*. New York : Viking.
- Waller S. Jones, Steven J. Rosen (1982); *The Logic of International Relation*, Boston, Toronto : Brown.

Weda, Made Darma (1996); *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

William III, Frank P. Dan Marilyn Mc. Shane (1988); *Criminological Theory*. Prince hall : New Jersey.

Yin Robert, K. (2003); *Case Study Research Design and Methods*, USA, Sage Inc.

Zainudin, H.C. (1961); *Tarich Atjeh Dan Nusantara*, Medan : Pustaka Iskandar Muda.

### **Jurnal, Laporan Penelitian dan Berita**

Aditjondro, Geroge Yunus (2008); *Dua Tahun Setelah MoU Helsinki, Siapa Mengambil Untung*, Jakarta.

Azwar, Nasrul (2007); *Agama, Nasionalisme, Gerakan Separatisme Aceh*.

Bahri, Samsul (2008); *Depkum HAM Dalam Menyongsong Aceh Damai Di Masa Depan Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Politik*, Banda Aceh.

BRA, (2007); *Rencana Strategi Badan Rekonstruksi, Damai Aceh (Draf Naskah BRA)* Banda Aceh.

Crisis Group Asia Report No. 39, Aceh, *Post Conflict Complication*, Jakarta/Brussel 4 Oktober 2007.

Diyat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik di Propisi Nanggroe Aceh Darussalam (suatu penelitian di Kabupaten Bireuen), Azhari Yahya dan M. Jafar Hussein, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2003.

Explaining The Violent Solution in Indonesia, Freek Colombijn, Leiden University, Spring 2002\_ volume IX, issue 1.

Gardono, Iwan (2004); *Perdamaian dan Pembangunan Aceh, Artikel disajikan dalam "Seminar Nasional Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia"*, UNDP Bappenas, Jakarta, 1 Nopember 2004, Konflik Aceh dan MoU Helsinki (2007).

---

*"From Peace Making to Peace Building (The Case of Aceh)"*, Paper Presented at session 5, RC 01, the XV World Congress of Sociology (International Sociological Association), Juli 25 2006, Durban, South Africa.

H. Hafifudin (2008); *Menyongsong Aceh Damai Masa Depan Dari Perspektif Syariat Islam*, Lhokseumawe Prop. NAD.



- Horizontal Inequalities, Ethnic Separatism and Violent Conflict, The Case of Aceh, Indonesia, Graham K. Brown, University of Oxford, Human Development Report 2005.
- Human Rights Watch, Vol 15 No. 10 (c) Desember 2003, Vol. 13 No. 4 (c) Agustus 2001.
- IFES, *National Public Opinion Survey 2007 Republic of Indonesia*, Agustus 2003.
- Keynote Speech, Pangdam Iskandar Muda, Disampaikan Dalam Lokakarya Menyongsong Aceh Damai Di Masa Depan. Pada Tanggal 27 Mei 2008. Lhokseumawe, Provinsi NAD.
- Kontras, Seri Aceh, *Mempertimbangkan Aceh di bawah Darurat Militer*, Jakarta, Februari 2004 dan *Kontras Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta, Februari 2006.
- Makarim, A. Mufti (2007); *Law and Security Arrangement Pasca Konflik Bersenjata, Langkah Penting Untuk Memperkuat Rekonsiliasi*, Jakarta.
- Manaf, Muzakir (2008); *Menyongsong Aceh Damai Masa Depan dari Perspektif Perdamaian Pasca MoU Helsinki*, Lhokseumawe Propinsi NAD.
- Poerwandari, E. Kristi (2002); *Kekerasan Dalam Perspektif Subyek-Obyek: Telaah Perihal Negeri "Yang Lain"*, (Disertasi) Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya; Universitas Indonesia.
- Prospect for Peace and Indonesia's Survival, M.N. Djuli (Communication Director International Forum for Aceh) dan Robert Jereski (Former Executif Director International Forum for Aceh), Spring 2002\_volume IX, issue 1.
- Rachman, Abdul, Moch Nurhasim, Fadri Alibar, Lamijo (2004); *Negara Dan Masyarakat Dalam Konflik Aceh, Studi Tentang Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Aceh*.
- Santosa, Eka (2008); *Meneropong Masa Depan Aceh Pembentukan Propinsi ALA dan ABAS, Sebagai Solusi*, Jakarta, Komisi II DPR RI.
- Tavares J.D (1999); *Profil dan Tantangan Pasukan Pejuang Timor-Timur (PPTT). Kumpulan Tulisan Mantan Pejuang Integrasi*, Kupang NTT.
- The Coca Connection, Conflict and Drugs in Colombia and Peru, Vanda Febbab-Brown, The Jurnal of Conflict Studies, Harvard University.
- Wahyudi Bambang (2005), *Kekerasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Aceh Timur Propinsi NAD*. (thesis) Depok Universitas Indonesia.

*Why The Madurese ? Ethnic Conflict in West and East Kalimantan Compared*, Huub De Jonge dan Gerben Nooteboom, Jurnal AJSS 34,3\_FB\_456-474 II. 6/7/06 page 456-472.

Zulkarnaen, Iskandar dkk, (2005); *Peran Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Konflik Internal di Aceh, Analisa Terhadap Pera dan Kegagalan HDC Serta Prospek MoU Helsinki di Masa Yang Akan Datang*, Banda Aceh.

Amnesty Internasional, AI, Indek ASA, 21/07/93.

Darwis, Haba Rakyat, Agustus 2007.

Haba Rakyat, Edisi 11 Agustus 2007.

Harian Bisnis Indonesia, Tanggal 11 Juli 2007.

Harian Serambi Indonesia, Tanggal 25 November 2007.

Jurnal Paskal : 4 No. 17, Agustus 2005.

Kompas, 10 Desember 2002, 13 Desember 2004, 16 Desember 2002, 16 Juni 2000, 18 Agustus 2005, 24 Desember 2002, 28 Desember 2005, 29 Maret 2006, 4 Desember 2002, Agustus 1994.

Kontras, Juli No. 124, Juli 2003.

Majalah Hukum, Ultimatum, Agustus 2003.

Majalah Taman Iskandar Muda Edisi Juli 2008.

Media Indonesia, 30 Desember 1999.

Profil FORKAB (2005) Banda Aceh.

Profil FPSG (2003) Bireuen.

Profil NAD (2004) Banda Aceh.

Serambi 18 Agustus 2002, 22 Juni 2008, 23 Maret 2007.

Sinar Harapan, 2 Januari 2003.

Suara Karya, 11 Oktober 2003.

Tempo, 17 Juli 2007, Mei 2003, 7 Juli 2003, Januari 2003

UU No. 15 Th. 2003, Tentang Terorisme.

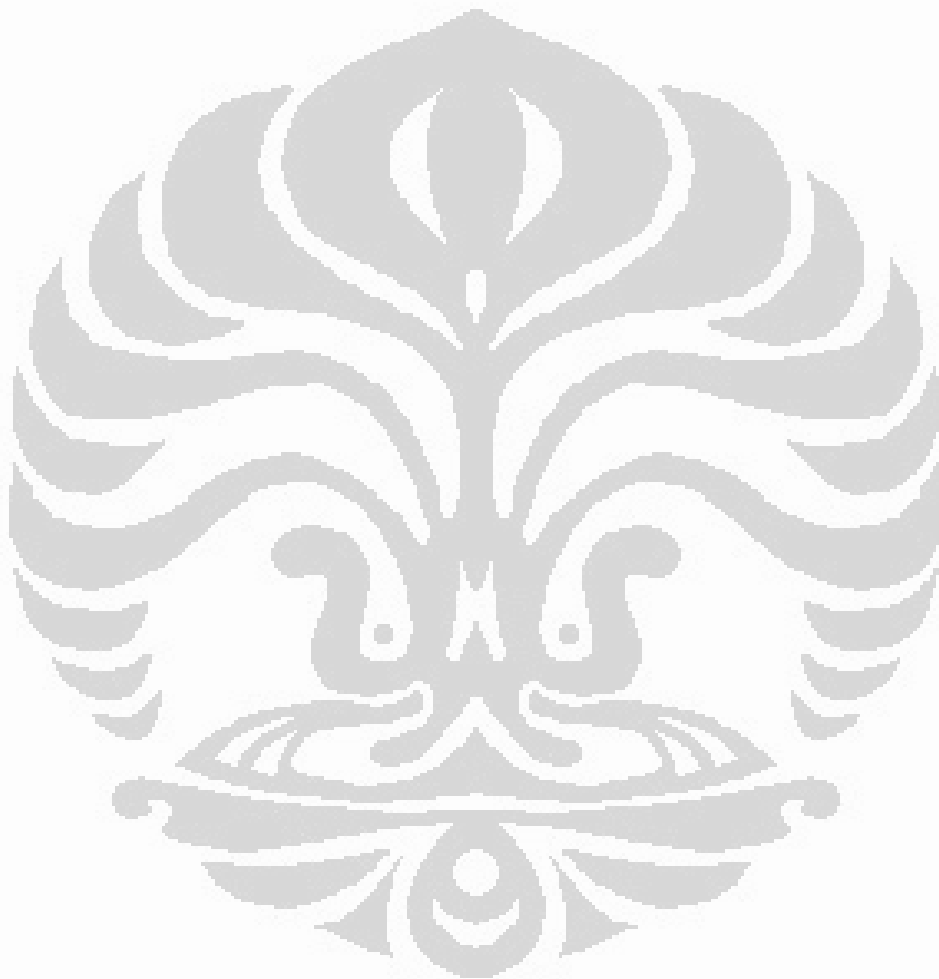
Waspada Online, 31 Agustus 2005.

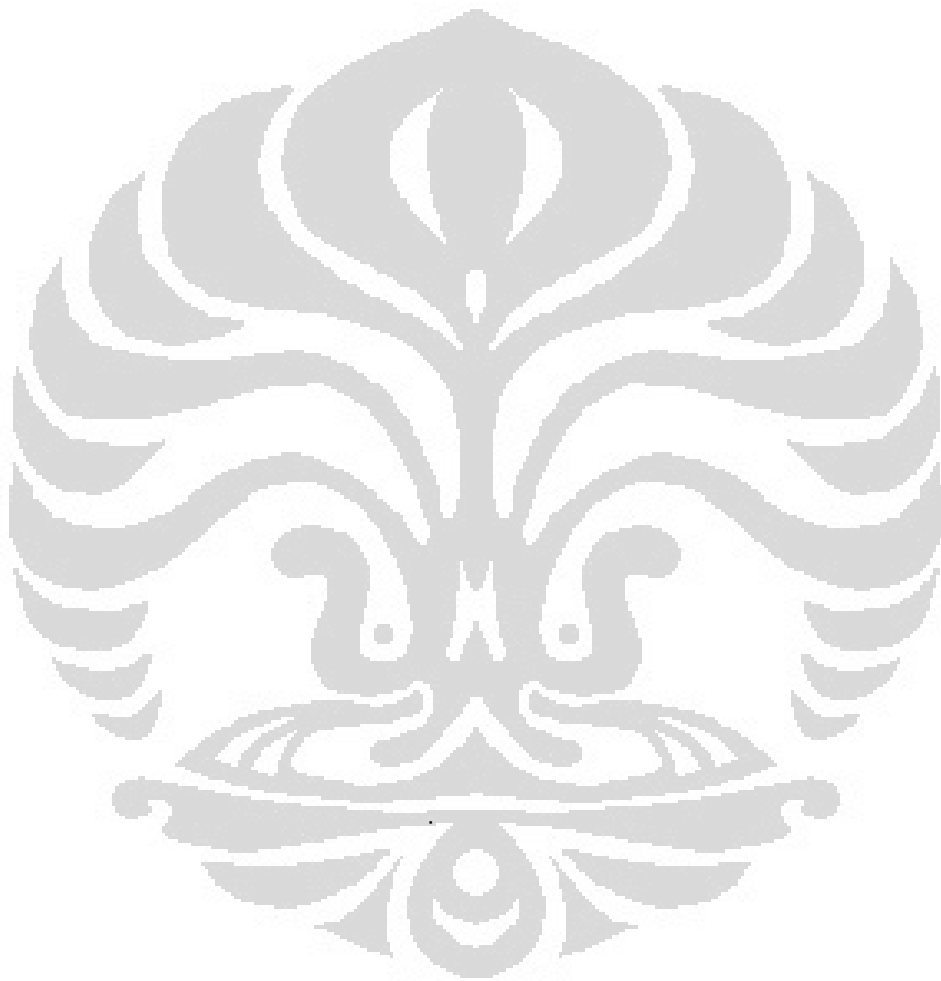
Waspada, 2 Mei 2000, 23 April 2002, 2 Agustus 2003.

World Bank, 1 Mei s/d 30 Juni 2008.

<http://article.melayu.online.com>

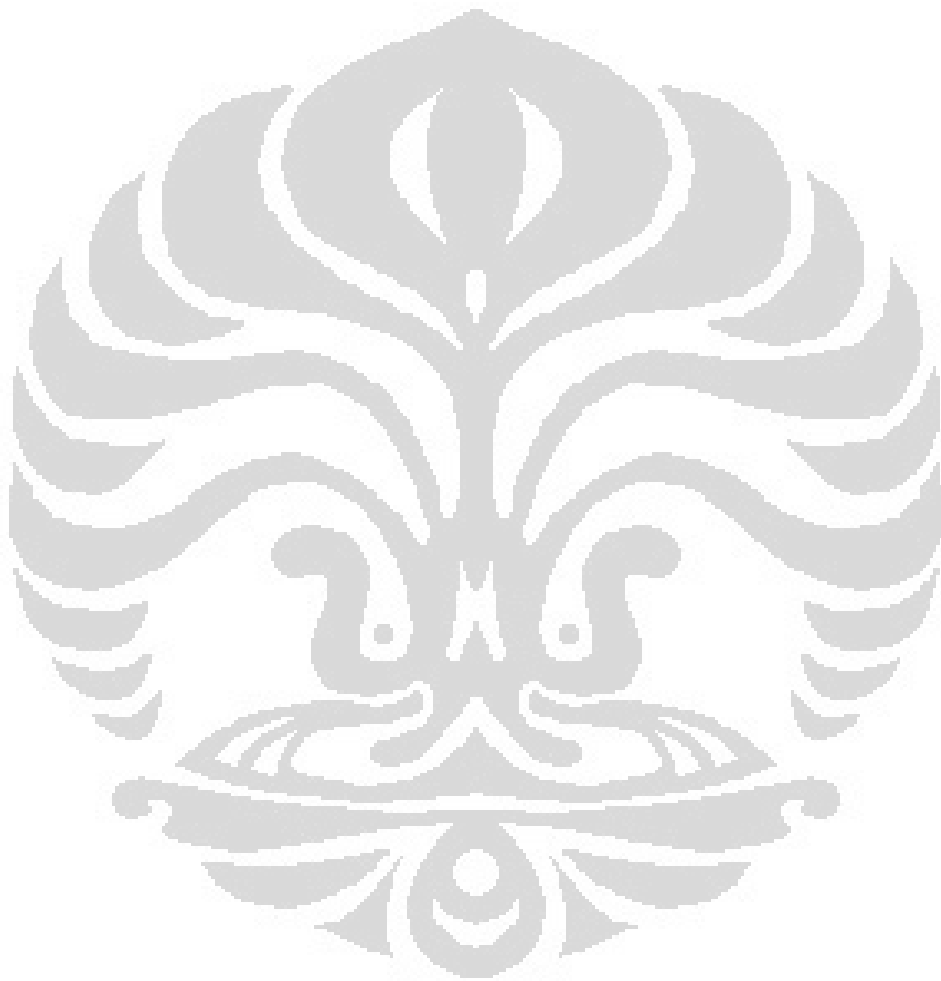
[www.acchstitute.org](http://www.acchstitute.org)





**CATATAN LAPANGAN  
(FIELD NOTE)**





**Wawancara Informan A**  
**Biureun, 10 Pebruari 2008**

*Bagaimana terbentuknya Front ?*

GAM menganggap kafir bagi masyarakat Aceh yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menghalalkan darah orang Jawa untuk dibunuh karena dianggap sebagai bangsa penjajah serta memeras, merampok, menculik, menyiksa dan membunuh masyarakat yang bertentangan dengan GAM, sebagai teror agar mereka patuh terhadap kekuasaan GAM.

Front dibentuk karena melihat situasi Aceh yang tidak jelas persoalannya, karena pada saat itu sudah dibentuk UU Darurat Militer, jadi masyarakat harus berdiri pada garis tegak, mau berpihak dipihak TNI kita diintimidasi dengan GAM, sedangkan kalau berpihak dengan GAM kita ada tekanan dari TNI. Jadi kita harus tegak, harus berdiri pada garis NKRI.

Di Aceh itu bukan hanya GAM saja, di Aceh ada rakyat yang tidak suka pada GAM yaitu anti teroris yang selama ini mengintimidasi masyarakat. Di Aceh itu tidak semua masyarakat adalah GAM, disana ada masyarakat yang berpihak pada NKRI yaitu Front Separatis GAM Aceh.

*Apakah visi dan misinya dengan terbentuknya Front itu?*

Visinya, membangun ke Indonesiaan masyarakat Aceh kedalam bingkai NKRI, sedangkan misinya adalah mengikis habis paham separatis, karena semua masyarakat Aceh sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Separatis. Oleh karena itu tugas kita sebagai Front adalah melawan secara politis dan memberikan input-input kepada masyarakat bahwasanya garis tegak itu adalah kita harus berpihak tegas pada pemerintah.

*Siapa saja yang masuk dalam Front itu?*

Front itu dimasuki dari semua masyarakat dari tingkat elit sampai tingkat awam yang merasakan banyak berpihak pada Negara itu lebih baik daripada orang yang menjadi separatis.

*Kaitannya dengan korban konflik?*

Korban konflik adalah orang yang tertindas, disini korban konflik ada 2 kategori yaitu kategori orang yang tertindas oleh GAM dan kategori orang yang berpihak pada diri sendiri, tetapi semua itu menyadari bahwa penyebab dan asal musababnya adalah karena memang GAM sehingga datang pihak TNI kesana.

Disini orang atau masyarakat itu lebih sedikit yang benci pada TNI daripada yang berpihak pada GAM, tanpa disadari orang ini mengintimidasi masyarakat untuk berpihak pada Negara dan rakyat.

*Kekuatan Front itu seperti apa ?*

Orang yang tidak punya satu kekuatan hukum, karena kita memang tidak bentuk dengan satu kekuatan hukum, spontanitas masyarakat yang jumlah anggotanya cukup besar karena orang berpihak pada RI. Jadi tidak terbatas orang itu hebat

atau elit jadi anggota, saya bentuk seluruh Aceh, saya lantik di depan pemerintah dan diakui oleh pemerintah walaupun tidak secara legal tetapi itu tidak ada UU Pasal 30 tentang Hak Bela Negara.

*Bagaimana dukungan pemerintah terhadap Front ?*

Kita tidak pernah berharap dukungan pemerintah, kita hanya berharap dukungan moral kalau dari dukungan financial kita tidak pernah membetulkan masyarakat banyak, hanya kalau kita mau mengadakan suatu kegiatan pemerintah membantu saya.

*Bagaimana dengan dukungan TNI/Polri ?*

Waktu itu Darmil, maka kita harus tunduk pada pemerintahan karena waktu itu militer yang berkuasa maka kita memberikan informasi agar tidak terjadi kesalahan pelanggaran HAM, misalnya A bersalah maka jangan dia ambil si B, maka waktu Darmil tidak ada prosedur yang salah karena sudah didampingi oleh rakyat agar tidak terjadi *slah prosedur*.

*Pengaruhnya terhadap kegiatan GAM ?*

Karena sudah ada rakyat yang sudah melawan mereka, maka GAM merasa sudah tidak diterima oleh rakyat, merasa dikucilkan oleh masyarakat karena sudah ada rakyat yang melawan, anti dia. Kami sudah siap melawan kamu dengan sendirinya terusik jadi dia tidak leluasa didaerahnya.

*Anggota Front terdiri dari siapa saja ?*

Masyarakat, PNS, tidak terbatas semua lini ada dan mayoritas pemuda-pemuda dan didukung para orang tua yang mengerti kenegaraan ini.

*Pandangan terhadap Mou Helsinki ?*

Pandangan Front dengan adanya Mou Helsinki ini bagus, karena dari dulu kita mengajak mereka untuk bergabung dengan NKRI. Setelah adanya Perdamaian, saya lihat Reintegrasi tidak berjalan, setelah Mou seolah-olah ada masyarakat kelas satu dan kelas dua.

Seperti kami yang sekarang ini disebut PETA tidak berfungsi di Aceh. Kami ditinggalkan, malah pemerintah memberikan angin pada mereka, karena sekarang pemerintahan di Aceh sudah dikuasai sama mereka. Kami ini dilihat sebagai rakyat yang tidak punya hak di sana, hanya dilihat sebelah mata tetapi kami tidak pernah merasa tersingkir karena kami merasa hidup di NKRI dan hari ini mereka sedang hiforia dengan apa yang mereka dapatkan, tapi hanya semu artinya tidak bisa berakhir untuk selamanya, perdamaian mereka hiforianya semu, hanya sementara.

*Ada pendapat bahwa perdamaian sekarang ini semu dan sementara, bagaimana menurut Bapak ?*

Ya, karena mereka masih mempunyai senjata-senjata dan dimana-mana ada kriminal-kriminal bersenjata. Mengapa senjata itu masih ada ? Waktu Darmil mereka lari keluar daerah, senjatanya ditanam. Setelah Mou, ada sebagian senjata



sudah dihancurkan tetapi yang ditanamnya sekarang dia buka kembali yang dulu disimpan sekarang dibongkar yang sekarang ini untuk mengintimidasi masyarakat.

*Konflik antara Aceh RI dengan Aceh GAM atau PETA dan KPA ?*

Itu karena KPA takut kehilangan wibawa dengan adanya PETA, makanya sedikit-sedikit persoalan mereka memojokkan PETA, padahal PETA tidak bergerak untuk itu. PETA bergerak menjaga eksistensi pemerintah dan mendukung program pemerintah. Kalau hari ini ada perdamaian kita mendukung itu, bukan kita menjadi perusuh. Image mereka kita menjadi perusuh, jadi mereka salah image. Nama PETA dipojokkan oleh mereka terus.

Reintegrasi tidak berjalan, tidak ada satu elemen masyarakat yang menjembatani untuk dudukkan mereka ini. Orang yang menjadikan mereka duduk untuk menyatakan misi dan visinya ini tidak ada sehingga reintegrasi tidak berjalan.

*Pihak mana yang tepat untuk menjadi mediator penyelesaian konflik di Aceh ?*

Itu dari namanya tidak masalah, perlu ada orang yang memang mengerti tentang ini, karena petinggi-petinggi belum menyentuh sampai kesini, karena masalah Aceh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

*Bagaimana perkembangan PETA-Front sekarang ?*

Kekompakan masih ada, masih eksis, silaturahmi masih ada tetapi kenapa kami dikucilkan, kayaknya kami ini kelompok yang hina, seolah-olah mereka berjuang betul. Kami yang salah, mereka tidak sadar bahwa kembali kepangkuan NKRI. Kami memang sudah NKRI tulen, inilah perlunya kita didudukkan kembali dengan mereka untuk persamaan persepsi agar tidak terjadi perselisihan.

*Bagaimana peran BRR dan BRA di Aceh terhadap penanggulangan korban konflik di Aceh ?*

BRA tugasnya hanya membagi-bagikan duit, bukan bagaimana mereka mensosialisasikan. Semestinya ada satu badan untuk mendudukkan kami sama-sama kerja dengan mereka, kepada siapa sumbangan ini kita berikan. Baik PETA maupun KPA karena kita yang sama-sama mengerti tentang konflik ini, pernah saya masuk kerja sama mereka tapi mereka mau keluar jika kami ada. Ini apa artinya, sama saja mereka tidak mau terima terhadap kami berarti reintegrasi tidak berjalan. Pemerintah terlalu memberikan keleluasaan pada mereka, Irwandi selaku Gubernur. Suasannya sekarang mereka ada diatas angin, kami tidak mengerti dengan pemerintah seolah-olah kami ini warga Negara kelas dua.

*Perubahan gerakan dari bersenjata ke politik merupakan opini yang berkembang. Bagaimana menurut Bapak ?*

Gerakan politik ini semestinya demokrasi sama dengan di daerah-daerah lain. Kenapa di Aceh dengan adanya politik hanya lambang Aceh saja yang muncul yang lain tidak ada, apa ini artinya. Jadi ada kultur seolah-olah hanya mereka yang boleh berpolitik disana, yang lain tidak boleh hidup. Sejumlah 38 partai, kita lihat lagi datangnya Hasan Tiro yang menyambut hanya PA, kenapa hanya PA, kenapa

semua orang diajak masuk PA, yang identik dengan KPA dan GAM, ini yang perlu disikapi.

*Bagaimana perkembangan PETA ke depan ?*

Kita harapkan semua di Indonesia dibentuk suatu organisasi yang dinamakan PETA untuk menanamkan benih-benih kecintaan pada Indonesia, sama dengan orang-orang dulu yang cinta tanah air.

*Apakah bisa PETA berdampingan dengan GAM ?*

Saya pikir asal tidak ada perbedaan pendapat tentang Negara tidak ada masalah. Jadi hari ini kita dapat berdampingan dengan mereka itu harapan yang kita tuju. Tapi selama mereka tidak sama idiologinya dengan kita maka tidak akan pernah ketemu, kita sudah terdoktrin cinta pada NKRI dan kita ikuti dengan perlawanan dan perjuangan, sedangkan mereka hanya datang menyatakan perdamaian apakah NKRI atau tidak. Mereka tidak terdoktrin, karena tidak ada satu badan yang memberikan pada mereka peraturan tentang kewaspadaan nasional.

Ini pasti akan berbeda, sedang yang menerima hanya kita. Jadi perlu menumbuhkembangkan fasilitas-fasilitas melalui sekolah-sekolah agar difasilitasi rasa cinta tanah air, dilatihkan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu Heroik. Mulai dari sekolah SD sampai SMA diajari Nasionalisme sehingga Visi kami adalah "Membangun Ke Indonesiaan wawasan masyarakat yang cinta NKRI" dan mengikis habis paham separatis. Kalau hanya diucapkan tanpa diimplementasikan di lapangan ini tidak bisa ketemu antara mereka dengan kita. Misalkan kita duduk bersanding, tetapi paham tetap beda hanya dipermukaan kita bagus tetapi bathin dia akan mengatakan kita sebagai pengkhianat dan kita juga mengatakan dia sebagai pengkhianat.

Jadi apa yang menjadi titik temu adalah reintegrasi punya tugas menyatukan persepsi ke seluruh masyarakat di Aceh. Tidak hanya GAM atau PETA saja tetapi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan membekali lewat penataran-penataran tentang wawasan kebangsaan, dan ini belum pernah dilakukan di Aceh. Wawasan kebangsaan sangat perlu khususnya di Aceh dan ini tugas pemerintah.

Misalnya calon Legislatif harus bisa mengaji, karena syariat Islam tetapi apa salahnya mereka juga dibekali tentang wawasan kebangsaan. Sampai dimana dia cinta pada tanah air ini, begitu juga anak tamat SD sampai SMP, eks kontraktor yang cinta tanah air membangun untuk kepentingan bangsa, jangan amburadul. Anda ingin menjadi Bupati maka harus dapat membangun bangsa dan cinta tanah air, jadi perlu untuk semua lini karena di Aceh adalah daerah konflik yang pola pikir mereka sudah terkontaminasi dengan paham Separatis. Ini perlu dirubah pola pikirnya lewat LSM, pemerintah, pendidikan. Begitu juga perlu pada kombatan-kombatan GAM, misalnya di kecamatan-kecamatan anggota mereka ada berapa dipanggil untuk diberikan penataran dan pelatihan bersama-sama dengan anggota PETA.

Hasil wawasan kebangsaan kalau ini tidak ada, maka sampai kapanpun rakyat akan amburadul, mereka tidak tahu siapa pemerintahnya. Hukum membunuh karena mereka tidak cinta pada sesama bangsa. Jadi dia tidak merasa memiliki. Hal ini tugas kita selanjutnya, kita bias bersanding apabila itu sudah sepaham

semuanya. Kita ada satu warga yang merasa dia tidak merdeka di negaranya, bahasa apa itu. Contohnya kami tidak mau bersanding dengan mereka, bukan kami, mereka yang tidak mau terima kami, bukan kami tidak mau terima mereka yang semestinya kan kami yang harus menerima mereka karena mereka menerima kami. Berarti ada satu ganjalan yang ada di Aceh yaitu reintegrasi tidak berjalan, sistem ini tidak berjalan yang mendirikan BRA ini salah, pemimpinnya orang BRA harusnya orang yang netral. Ketua itu orang netral, stafnya boleh orang KPA dan kami dimasukkan disitu, duduklah kami dengan mereka disitu untuk membaur sehingga reintegrasi berjalan sehingga masyarakat akan melihat bahwa itu unsur pimpinan KPA dan PETA mereka kerja bersama. Ini kesempatan sangat baik untuk memperbaiki diri yang selama ini kita berkonflik, tanpa sadar kita sudah membangun bangsa ini dengan baik, tetapi hari ini yang terjadi tidak di BRA itu diketuai mantan GAM stafnya semua mantan GAM. Saya coba masuk kesana di BRA tetapi saya dipecah tidak diterima bahkan mereka mau keluar kalau saya ada disitu. Disitu ada sistem yang tidak berjalan, mereka tidak mau berbaur. Kalau mereka tidak mau berbaur, bagaimana ada perdamaian ini bisa terjalin, sedangkan pemerintah dengan mereka sudah berdamai, tapi kan masih ada konflik dengan PETA yang dulu melawan mereka. Memang kami bukan suatu dan seperti mereka, yang perlu dipikirkan adalah kesenjangan diantara mereka. Tugas pemerintah hari ini menjembatani orang yang menjadi mediator agar masalah ini tidak muncul sampai hari ini belum ada, karena pemerintah menganggap remeh apa yang terjadi persoalan belakangan ini.

*Prinsip mediasi harus dipercaya keduanya, pihak mana yang cocok ?*

Karena mediasi harus netral, pihak pemerintahlah yang memanggil kedua belah pihak. Mari kita duduk, orang pemerintah DPR, posisi eksekutif ya pemerintahlah. Disitu diceritakan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, apa yang sudah terjadi adalah merupakan sejarah yang mulai hari ini kita akan bangun kembali bangsa ini bersama-sama. Ini tidak ada. Jadi kalau hari ini Gubernurnya adalah GAM, apakah saya bisa diterima Gubernur. Jangankan diterima, dipintunayapun saya tidak bisa nyampe, begitu juga Bupati. Sekian persen mereka hari ini mau cari makan kemana, mau jumpa Bupati kalau dia tahu kita dari PETA, ya tidak akan diterima apa lagi saya pribadi Yan PT. Untuk menjumpai orang-orang disana, sekarang juga pegang dapur dan alat-alat memasak mereka, gimana kita mau cari makan. Makanya kami jadi orang yang tersisih, akhirnya timbul kebencian baru pada mereka, ini akan timbul gejala baru di Aceh, makanya jangan lagi hancurkan Aceh.

*Apakah permasalahan dendam di Aceh masih dominant sebagai potensi konflik ?*

Kita tidak pernah dendam sama mereka, mereka sudah 30 tahun membuat ini konflik, kita baru muncul tahun 2003 dengan harapan mereka mau turun. Jadi kita tidak dendam pada mereka, tetapi mereka yang dendam pada kami karena mereka tidak mau mengakui kita, karena kita telah melakukan perlawanan dan dianggap pengkhianat dalam perjuangan mereka. Jadi mereka yang marah ke kita.

*Dengan melihat dinamika konflik di Aceh paska Helsinki masih diperlukan Resolusi Konflik, bagaimana menurut Bapak ?*

Secara sosial, damai dianggapnya selesai, tetapi ada sinisme dan mereka tetap menganggap kita sebagai musuh karena tidak ada yang menjembatani ini. Makanya sampai kapanpun persoalan di Aceh tidak akan ketemu kalau tidak ada badan yang menangani ini. Damai ya damai tetapi rasa sakit hati pada si A dan B masih tetap ada, dendam belum terselesaikan. Sekarang mereka bukan merasa sekarang itu damai, tetapi mereka merasa sekarang itu menang. Ini yang susah, pemahaman mereka merasa menang, misalnya ada satu kejadian, ada juru bicaranya kita taidak mau begitu karena hari ini Negara sudah dipimpin oleh pemerintah yang punya bicara pemerintah, eksekutif, yudikatif, polisi. Setiap ada kejadian itu bukan anggota saya, kalau mantan GAM anggota KPA dibilangnya dulu memang ya tetapi sekarang tidak lagi, itu sudah disersi kami. Jadi dia bisa membuat delik-delik seperti itu. Jadi dia masih menganggap dia itu dominan eks. Datang Hasan Tiro semua orang dataing kesana, dikoran dia bilang dia akan dikawal oleh mantan-mantan GAM eks Libya, kok masih disebut-sebut itu lagi. Kalau Hasan Tiro GAM, menagapa harus datang dan kenapa mobil-mobil itu hanya dihiasai Bendera Partai Aceh. Jadi ini ada pengkulturan berarti Hasan Tiro punya PA dan tidak ada partai lain, jadi damai demokrasi kita sekarang. Konflik ada, letusan senjata masih ada tetapi itu dianggap sebagai kriminal, tetapi kriminal ini semua dari eks GAM. Kami bukan biang kerusuhan di Aceh, kami dukung pemerintah kalau kami bikin kekacauan berarti membuat separatis baru karena melawan pemerintah. Pemerintah buang uang untuk perdamaian bagitu banyak, kok kami yang dibilang bikin perusuh, ini salah dan dia membuang fitnah. Jadi kami mempunyai cita-cita yang bagus kecuali mereka mempunyai tujuan lain, tidak tahu kita.

**Kutipan Hasil Wawancara  
Wartawan The Asahi Shimbun Jepang, Takeshi  
Dengan Yan PT. Ketua FPSG NAD**

Pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2005 pukul 14.00 Wib, telah dilaksanakan Konferensi Pers wawancara antara Bapak Yan PT. Ketua Front Perlawanan Separatis GAM Propinsi NAD dengan wartawan The Asahi Shimbun Jepang An. Takeshi Futitani dan Muhamad Surya sebagai juru bicara dan didampingi jurnalistik The Asahi Shimbun Lhokseumawe Sdr. Ayi Jupriana seputar perdamaian Helsinki. Dalam Pembicaraan tersebut Tuan Takeshi Futitani mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

*Menurut pendapat Bapak, bagaimana agar perdamaian ini tercapai dengan baik?*

GAM jangan membunuh, menculik, mengambil pajak Nanggroe, namun kenyataan dimana-mana GAM tetap membunuh, menculik, intimidasi sedangkan saya dan rakyat Aceh menginginkan perdamaian, tetapi yang ada kehancuran.

*Bapak Ketua Front se NAD, berapa jumlah personel Front seluruh Aceh?*

Jumlah keseluruhan yang ada di Aceh 356.000 tersebar di 21 Kabupaten dan kota seluruh Aceh dan 36.000 orang tersebar di Sumatra Utara, mereka masyarakat Transmigran yang diusir dan dibunuh GAM.

*Apakah tugas Front selama ini dan bagaimana dengan yang di daerah ?*

Tugasnya sama diseluruh wilayah Aceh yaitu melindungi rakyat, memberikan informasi tentang kedudukan orang yang dinyatakan GAM kepada TNI/Polri, serta mengajak GAM agar turun untuk sama-sama membangun Aceh.

*Bagaimana latar belakang terbentuknya Front?*

Negara saya dalam UUD 1945 pada pasal 30 menerangkan bahwa apabila Negara dalam keadaan bahaya, semua warga Negara wajib bela Negara dan pada saat itu pemerintah menyatakan Darurat Militer untuk Aceh secara bersama-sama tergugah untuk membela Negara sesuai pada UUD 1945 dan pasal 30.

*Apakah ada organisasi yang membawahi Front ini?*

Tidak ada, kita murni rakyat namun di daerah ada cabang-cabang dan namanya juga sendiri-sendiri namun semua itu Front dan dibawah saya.

*Apakah aktifitas Front di daerah sama yang dilakukan?*

Semuanya sama menginginkan perdamaian dan melindungi rakyat.

*Ada GAM yang menyandera masyarakat dan dibalas oleh Front menyandera keluarga GAM menurut Ketua Front Sigli ?*

Ya, memang itu yang menginformasikan saya hanya eskalasinya yang hanya menyandera adalah di Sigli pada tahun 2002 saya juga menyandera keluarga

GAM yang menyandera Sekcam pada waktu itu diculik setelah kita balas dilepaskan.

*Apakah Front itu membantu TNI/Polri ?*

Tidak, karena pada waktu itu ada bermacam-macam nama JSC, HDC, COH dan semuanya tidak dapat berbuat. Setelah pemerintah mengambil sikap Darurat Militer kita semuapun berani memberikan informasi kepada TNI/Polri supaya tidak salah ambil seperti jaman DOM, nama Muhammad ada 4 semuanya dibunuh, dengan dapatnya informasi yang benar dari Front maka yang mati benar-benar GAM.

*Apakah Front ini menggunakan senjata, sedangkan GAM bersenjata, bagaimana Front melawannya ?*

Front itu tidak ada senjata, melawan bukan arti kata fisik tetapi yang kita lawan idiologinya yaitu ajakan untuk membunuh, menculik, merampas dll.

*Setelah perjanjian ditandatangani, TNI ditarik. Apakah bapak tidak takut dengan GAM?*

Asal GAM jujur mengikuti perdamaian, kenapa takut ? Berarti GAM tidak akan membunuh, menculik, tidak menakuti rakyat dan akan merangkul masyarakat, maka gentian saya bertanya apakah GAM di Swedia dan GAM di Aceh akan mengikuti perlawanan?

*Apabila TNI tidak ada lagi dan GAM tidak mengikuti perdamaian bagaimana sikap Bapak?*

Itu yang berperan wasit, apakah UNI Eropa dan Asean akan bisa menegor GAM atau tidak, dan Front akan mendukung TNI/Polri apabila GAM mengingkari maka Front bekerja lagi mencari dimana GAM baik titik persembunyian dan akan diberitahukan ke TNI/Polri.

*Apa pandangan organisasi agar tercapainya perdamaian?*

Mereka jangan membunuh, meminta pajak Nanggroe menculik tetapi kenyataan yang ada dimana-mana yang membunuh GAM. Seharusnya sama-sama menunggu perdamaian dengan aman dan tenang.

*Menurut anda, apakah Tim Monitoring dapat Netral?*

Saya tidak bisa mengukur, yang penting jangan sampai seperti JSC dan rakyat benar-benar menginginkan perdamaian.

*Dahulu ada local staf JSC dibunuh dan kantor JSC dibakar, bagaimana itu?*

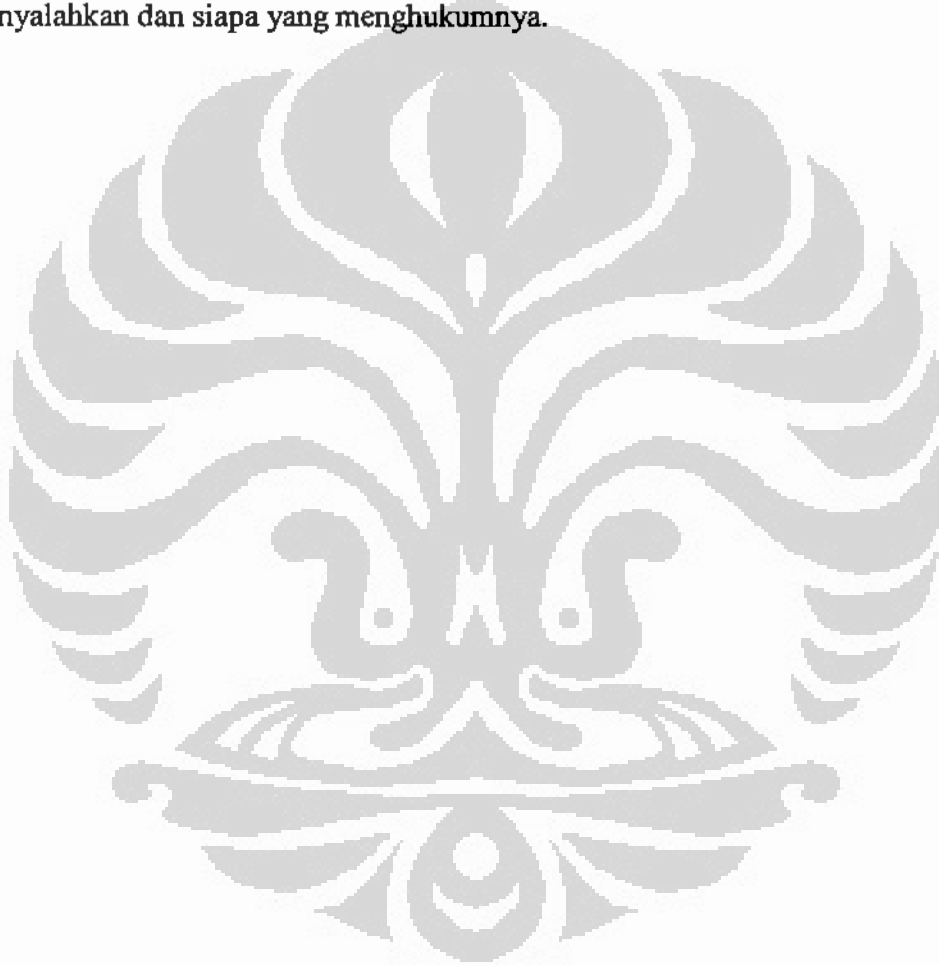
Saya tidak bisa memprediksi kesitu dan saya berharap agar perdamaian ini berjalan bagus dan aman.

*TNI pada tanggal 23 Juli harus ofensif, bagaimana Pak ?*

Benar, TNI sudah ofensif namun GAM masih menculik, membunuh, mengintimidasi dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, bahkan habis tsunami saja GAM menembak TNI, menyandera logistik milik pengungsi.

*Disamping penduduk di Intimidasi GAM, ada juga penduduk yang di intimidasi TNI. Bagaimana pendapat bapak ?*

Kalau TNI ada yang melakukan kesalahan, ada yang menghukumnya bahkan ada yang sampai dipecat seperti kita baca dikoran. Dari sekian banyak TNI, yang sebagian kecil sekali yang melakukan, itu oknum. Sedangkan kalau GAM siapa yang menyalahkan dan siapa yang menghukumnya.



**Wawancara Informan B**  
**Bireun, 9 Februari 2008, 2 September 2008**

*Bagaimana Front bisa berdiri di Aceh?*

Masalah keamanan, khususnya di Bireun dan umumnya di NAD dari segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh GAM dan atas kesadaran sendiri dan tanggung jawab, kami dari masyarakat perlu untuk membentuk front perlawanan separatis GAM (FPSG) untuk dapat memberantas GAM tersebut sampai ke akar-akarnya karena GAM telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang membawa penderitaan secara berkepanjangan dan tidak dapat ditolerir.

Seperti rumah kakek dan nenek saya dibakar, mereka dibunuh hanya karena rumahnya dekat dengan Pos TNI dan sering bergaul dengan TNI, dan baru tahun 2003 saya berani mencari dan menemukan makam mereka, setelah dikasih tahu orang kampung yang disuruh membantu membuat lubang makam. Saya dari kecil ikut kakek dan nenek saya, maka saya bergabung dengan front. FPSG pertama kali didirikan di Bireun, berkantor di jalan komplek PJKA Bireun, selanjutnya dijadikan Kantor Pusat FPSG dan Paska MoU Helsinki berubah menjadi PETA, kantor pusatnya pindah ke Banda Aceh di jalan S.A Mahmudsyah. Jumlah kader anggota PETA yang militan sekitar 6.500 orang dari jumlah itu yang sudah menerima bantuan sebanyak 5.000 orang, sisanya masih menunggu, per orang mendapat 10 juta rupiah, meski tidak terlalu menyolok karena alasan keamanan.

*Bagaimana setelah adanya MoU Helsinki?*

Orang kita yang dianggap cuak dan dibunuh oleh GAM, tidak sedikit jumlahnya bahkan sampai Paska MoU Helsinki, kami masih dijadikan sasaran, seperti yang terjadi di Aceh Tengah dan Bireun.

*Bagaimana Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG), Paska MoU Helsinki berubah menjadi nama PETA?*

Paska MoU Helsinki nama PETA mungkin datang dari pemerintah sendiri dalam APBN langsung disebutkan nama PETA yang akan mendapatkan bantuan dampak konflik sebanyak 6.500 orang dan itu sudah merupakan paket, tapi yang keluar sekarang baru untuk 5.000 orang. Nama FPSG tidak boleh muncul lagi dan akan dibubarkan paksa, tapi kesepakatan secara tertutup sebenarnya masih tetap FPSG karena sudah ada legalitas hukumnya juga dengan nama FPSG.

*Sejauh mana hubungan PETA dengan KPA?*

Kami sekarang terjepit bahkan selalu diawasi, karena KPA ada dimana-mana dan dia bisa memanggil siap saja untuk diperiksa, semua orang tahu itu, bahkan kalau ada kejadian dari orang kita cepat sekali diproses tapi kalau mereka yang berbuat ditutup-tutupi, kami tidak tahu lagi kemana harus mengadu. Abdul Wahab (35) Ketua PETA Kecamatan Cot Girik meninggal, kemungkinan gara-gara Wahab melarang orang untuk membayar pajak nanggroe dan menyarankan untuk menyumbang meunasah. Diberondong dengan senjata Ak, didekat rumah tetangganya yang sedang pesta dan pelaku sempat menanyakan "siapa lagi" sebelum pergi dengan motor Jupiter MX. Kejadian tersebut bisa juga terjadi ada



kaitannya dengan kejadian Tahun 2006 lalu ketika salah seorang keponakan Wahab yang bekerja diculik oleh kelompok KPA (kelompok sikliwon) dan ketika itu kita lakukan tindakan culik balasan, yang kami culik saat itu ipar sikliwon (Ibrami) sebagai barter. Dengan peristiwa ini, maka catatan pahit sudah bertambah buat kami orang-orang yang cinta NKRI. Oleh karena itu, kami sangat berharap pada yang berwenang untuk benar-benar dapat mengambil kebijakan yang tidak menguntungkan sepihak. Kami menilai proses perdamaian di Aceh, hanya menguntungkan pihak-pihak yang anti NKRI.

*Untuk perdamaian di Aceh, biasanya juga ada acara adat, yang bisa digunakan untuk saling bertemu dan memaafkan?*

Ada, sebenarnya Peusejeuk Sayam, semacam tepung tawar, itu sudah lama kita usulkan agar dilakukan, untuk kita berdamai, GAM kita suruh ngomong bahwa perbuatannya selama ini salah dan minta maaf secara terbuka pada rakyat atau kurban konflik, kalau perlu potong lembu, kita berpeluk-pelukan bila perlu nangis untuk menunjukkan bahwa dia menyesal tapi hal itu tidak pernah didengar, dan tidak pernah dilakukan. Bahkan ada ulama yang sudah bersumpah dimana bila suatu daerah di Aceh pimpinannya adalah GAM. Saya tidak mau masuk ke dalam gedungnya, ulama itu dulu paling berani menentang GAM, secara terbuka, tapi sekarang tidak ada lagi yang open sama dia.

**Wawancara Informan C  
Langsa, 17 Maret 2008**

*Bagaimana anda melihat perdamaian di Aceh?*

Peace is the dream all people in Aceh, dengan damai orang bisa kembali ke habitat masing-masing, ke kebun, sawah dan lain-lain, namun potensi konflik mungkin masih ada, tapi horizontal, nanti kita lihat setelah pemilu. Perdamaian belum sesuai harapan, damai dan merdeka, tidak dijajah secara moral, adil dan kondusif, memang masyarakat secara umum tidak tahu permasalahan, hanya ikut gelombang tidak punya sikap, cukup begini saja enggak perlu yang lain.

*Bagaimana dengan posisi parlok sekarang?*

Setelah pemilu dimenangkan parlok, mungkin mereka akan meneruskan perjuangannya, paska MoU Helsinki nampak sekali efosianya dan slogan-slogannya. Parlok kesemuanya sama, maka semakin mudah untuk lepas dari NKRI.

*Bagaimana dengan eksistensi GAM kedepan?*

Dalam MoU Helsinki tidak menyebutkan pembubaran GAM, maka sampai kapanpun tetap GAM akan wujud, tidak bubar, Pemerintah RI tidak bisa membubarkan GAM. Termasuk status keberadaan Wali Nanggroe Hasan Tiro, secara turun menurun sampai kapanpun, kecuali GAM sendiri yang membubarkan diri. Tapi kalau dipaksa maka jika GAM bubar, NKRI juga harus bubar.

*GAM dalam MoU Helsinki, mengklaim mengatasnamakan masyarakat Aceh. Bagaimana dengan hal tersebut?*

Penandatanganan damai dilakukan GAM, dan kami bukan GAM, jadi apa urusannya dengan GAM, karena kami sudah damai dengan RI. Apa yang dilakukan GAM untuk Rakyat Aceh dan Pemerintah RI juga klaim mengatasnamakan Rakyat Indonesia dan Rakyat Aceh Non GAM. Sekarang yang tertinggal di Aceh masalah bagaimana perdamaian antara kelompok yang pro NKRI dan yang pro GAM hal itu justru semakin meruncing, perlu sosialisasi perdamaian dan bagaimana untuk berdamai. Perdamaian semua setuju perlu rekonsiliasi.

*Bagaimana permasalahan dendam bagi masyarakat Aceh?*

Dendam di Aceh susah dihilangkan karena sudah bersifat turun temurun; konflik di Aceh ada yang bilang klaim keturunan, mengapa muncul DI/TII dan GAM, karena di Aceh unsur dendam tidak bisa dihilangkan. Untuk mengurangi bisa juga dengan perbaikan kesejahteraan, yang konflik di Aceh justru mereka yang sudah sejahtera, yang lain-lain kena Imbasnya.

**Wawancara Dengan Informan D  
Banda Aceh, 25 Agustus 2008**

*Bagaimana Bapak melihat perjanjian Helsinki?*

Upaya dialog dan perundingan dengan GAM, sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah Aceh, dilakukan meskipun ada yang bersifat informal, karena mulai April 2005 sudah sering diadakan perundingan antara delegasi pemerintah dan delegasi GAM, sudah beberapa kali bertemu tatap muka dan merundingkan solusi politik (perdamaian) untuk mengakhiri konflik Aceh di Helsinki, dan secara formal baru pada tanggal 15 Agustus 2005 disepakati penandatanganan MoU Helsinki.

*Sejauhmana peluang Aceh untuk merdeka?*

Sebaiknya Gubernur menjadi pemimpin Rakyat Aceh bukan memimpin kelompoknya saja dan saya tidak setuju kalau Aceh merdeka karena tidak akan bisa berperan apa-apa di tingkat internasional contohnya seperti Brunei Darussalam. Saya lebih setuju federasi atau serikat, karena sekarang juga sudah seperti itu. Jadi ibarat sebuah keluarga biar mereka menentukan rumah tangganya sendiri. Meski dalam keluarga sekarang masih ribut sendiri, tapi harus dibenahi dan diawali dari perbaikan ekonomi.

*Sebaiknya bagaimana Aceh kedepan?*

Yang pertama Irwandi seharusnya memposisikan diri sebagai pemimpin Aceh, bukan pemimpin salah satu kelompok saja, sehingga punya kewajiban untuk mempersatukan kelompok-kelompok yang masih berseberangan di Aceh, kedua kalau Indonesia terpecah-pecah, maka kekuatan akan melemah, Indonesia sebagai Negara Islam terbesar, itu yang diinginkan oleh non Muslim, ketiga Indonesia masih ada nilai tawar dengan status NKRI dengan dunia internasional sehingga jika Aceh lepas dari Indonesia maka Islamnya tidak punya pengaruh di dunia internasional seperti Brunei, meskipun kondisi sumber daya alamnya tinggi.

*Sejauhmana implementasi MoU Helsinki dapat mencairkan kelompok-kelompok yang ada di Aceh, agar tidak menimbulkan konflik?*

Yang sudah disepakati dilaksanakan dengan tulus, kita harus sadar lebih dahulu bahwa konflik di Aceh berjalan lama jadi tidak bisa satu atau dua hari diselesaikan, karena kita hidup memang diciptakan untuk berkelompok-kelompok dan masing-masing punya ego sendiri-sendiri. Hakekat sebagai manusia punya naluri yang berbeda-beda persatuan akan kuat bila masing-masing kelompok diberi keleluasaan. Filosofinya keluarga, dalam kehidupan rumah tangga anak akan tumbuh kemudian punya keluarga bisa sebagai kepala keluarga dan punya kehendak untuk bersatu serta pasi pada saat-saat tertentu akan berkumpul untuk melepas kerinduan dan bercengkrama satu sama lain, dan merasa sebagai sebuah keluarga yang hidup rukun dan damai.

**Wawancara Dengan Informan E  
Langsa, 26 Oktober 2008**

*Fenomena konflik di Aceh Paska MoU Helsinki belum menunjukkan akan segera tuntas, artinya konflik masih dapat dilihat atau mungkin dirasakan oleh masyarakat Aceh, hal tersebut juga sering diberitakan oleh media baik lokal maupun nasional, bagaimana menurut Ustad?*

Ya, Konfliknya masih ada tapi lain, ada pergeseran konflik dari bersifat vertikal antara GAM atau KPA dengan RI, beralih kepada konflik horizontal, yang menurut pengamatan saya konflik horizontal itu terbagi menjadi dua item penting, yaitu :

*Pertama*, konflik internal KPA antara kombatan dengan non kombatan atau inti motifnya ekonomi dan fasilitas antara tentara GAM dengan sipil GAM. Kemudian konflik kombatan yang turun pra helsinki dengan kombatan yang turun pasca helsinki ini motifnya sosial ekonomi juga khususnya berkaitan dengan prestise dan keterlantaran GAM pra helsinki. Kemudian konflik antara petinggi KPA dengan para Inang Bale ini juga motifnya sosial ekonomi dimana mereka tidak diperhatikan, mereka mau diposisikan dengan para kombatan atau non kombatan/sipil, mereka tidak punya skill atau keahlian tertentu. Sehingga akhirnya mereka tergeser baik oleh kombatan maupun kombatan sipil lain dari kalangan GAM, sehingga nasib mereka diterlantarkan oleh petinggi KPA.

*Kedua*, konflik yang bersifat eksternal ini khususnya antara PETA, FORKAB dengan KPA motifnya adalah HANKAM IDO (Pertahanan Keamanan dan Ideologi). Kemudian konflik dari kalangan keagamaan, ini berkaitan dengan trust (kepercayaan), kekuasaan politik masyarakat antara Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) NAD dengan Majelis Ulama NA atau MUNA yang didirikan oleh partai politik PA. Kemudian konflik antara MADA (Majelis Anak Dayak Aceh) dengan IASA yaitu Ikatan Anak Santri Aceh ini juga sama berkaitan dengan trust (kepercayaan) politik di Aceh kekuasaan dan keagamaan, kemudian konflik antara LAKA (Lembaga Adat Kebudayaan Aceh) dengan KPA, berkaitan dengan persoalan kekuasaan adat Wali Nanggroe, dimana LAKA itu menginginkan Wali Nanggroe itu dipilih karena tokoh Aceh itu bukan hanya Hasan Tiro, tetapi itu dari pihak KPA menginginkan agar Wali Nanggroe itu adalah Hasan Tiro yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan sistem keturunan anak beliau atau orang yang diwasiatkan oleh beliau untuk meneruskan jabatan kewalian negara. Kemudian konflik antara birokrat nasionalis dengan birokrat etnis – etno nasionalis yang berada pada kekuasaan pemerintahan yang ada sekarang khususnya berkaitan dengan karir struktur yang ada di pemerintahan, jadi birokrat yang nasionalis ini jadi cenderung tergeser disemua lini di wilayah-wilayah Aceh yang sekarang dikuasai oleh birokrat etno nasionalis. Seperti misalnya di Aceh Timur, bupatinya dari pihak KPA birokratnya juga yang memegang posisi strategis semuanya dari KPA yang pengertiannya tinggi-tinggi yang sudah mengikuti jenjang pendidikan struktural yang sudah diatur pemerintah RI itu justru dibangun panjangkan sehingga banyak kemudian mereka pindah ke Kota Langsa, karena di Aceh Timur itu tidak lagi dipakai, kemudian konflik berkaitan dengan wilayah yaitu utara, timur dengan ALA ABAS ini berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan keadilan pembangunan. Kemudian konflik etno

nasionalis yang cenderung kultur dengan kawan agamis yang cenderung menginginkan syariat islam, ini motifnya sosial keagamaan.

*Sejauh mana Bapak melihat potensi konflik laten di Aceh?*

Kalau kita perhatikan dari konflik internal dan konflik eksternal KPA ini justru potensi konflik laten ini lebih cenderung tetap terpelihara dari pada terselesaikan, kenapa demikian karena *pertama* ini ada milad GAM setiap 4 Desember, milad GAM ini secara teori sosiologis dia ada manifest ada laten jadi kegiatan manifest itu 2 (dua) : pertama, doa untuk syuhada dan kedua santunan yatim syuhada.

“Efek daripada manifest dan syuhada dalam milad GAM itu, ini punya fungsi laten ada phiak yang dituduh sebagai kafir harbi (kafir yang harus diperangi), karena telah membunuh syuhada, kemudian kondisi laten yang kedua dari manifest santunan yatim syuhada ini juga ada 2, pertama anak syuhada itu sama dengan anak pahlawan sehingga harus diperlakukan sebagai pahlawan juga, kemudian anak syuhada ini harus “tumbila” (harus membalas dendam atas kematian bapaknya yang syahid itu). Jadi dengan adanya milad GAM setiap 4 Desember yang secara manifest acaranya pertama doa syuhada dan kedua santunan yatim syuhada secara laten punya potensi konflik/memelihara konflik, karena dipandang orang yang terbunuh itu syuhada, berarti yang membunuh itu kafir harbi (kafir yang harus diperangi). Bicara anak syuhada berarti bicara anak pahlawan yang harus diberikan posisi yang prestise dimasyarakat dan bicara anak syuhada adalah bicara tumbila (bicara balas dendam atas kematian orang tuanya). Kemudian yang *kedua* NAD I ini menggunakan penasihat asing dalam sistem potilik, pemerintah beliau seperti Darmin Carbury dari Australia kemudian Relin Halonback dari Amerika Serikat ini terus menerus mendampingi beliau. Dari Carbury ini jarak jauh dan kabarnya ada pertemuan bulanan di Singapore ini setiap bulan, jadi besar kemungkinan asing punya interest punya maksud tersembunyi dari nasihat-nasihat itu yang bisa mengancam keberlangsungan konflik, itu tidak akan beda. Kemudian yang *ketiga* ideologi konsultanan Aceh atau ideologi etno nasionalis Aceh ini seperti diungkapkan terus menerus tentang kanun mandaita alam atau kanun Al Asyi (kaum yang dibuat pada kesultanan Iskandar Muda) kemudian dari hasil pengamatan yang kita lihat ini Hasan Tiro sejak datang ke Aceh, yang pertama tidak pernah muncul kata-kata mohon maaf dan penyesalan atas korban dan konflik yang terjadi di Aceh baik kepada TNI/Polri maupun korban-korban lain yang non KPA atau non GAM. Yang kedua Hasan Tiro selalu berbicara damai tapi tidak pernah bicara NKRI damai yang dalam pengertian umum beliau damai dalam pengertian dalam bingkai NKRI. Jadi tidak pernah bilang ucapan semenjak beliau ke Aceh. Kemudian ketiga, merah putih tidak pernah dikibarkan dalam acara-acara seremonial dalam rangka menyambut kehadiran Hasan Tiro di Aceh, cenderung dikibarkan itu adalah bendera PA yang mirip dengan bendera GAM. Keempat semua yang diziarahi oleh Hasan Tiro disaat beliau kembali ke Aceh kemarin itu bertitik tumpu pada 4 hal :

Pertama, makam Sultan. Kedua, makam ulama yang mendampingi sultan seperti makam Abdul Raud Singlie/Syeh. Ketiga, beliau hanya menziarahi keluarga sultan yang juga keluarga beliau. Keempat, beliau menziarahi pejuang-pejuang GAM, makam-makam pejuang GAM.

Sedangkan tempat-tempat lain yang berkaitan nuansa ke NKRI an itu tidak pernah disinggung dan itu tidak pernah disebut. Kecuali yang berkaitan dengan musibah kemanusiaan secara umum yaitu camp massal tsunami terlebih dari itu tidak ada, semuanya bernuansa kepada ideologi kesultanan Aceh atau etno nasionalis Aceh. Kemudian yang *keempat* potensi laten konflik itu masih tetap ada, bendera PA itu mirip dengan bendera GAM. Jadi biar bagaimanapun orang-orang PETA dan orang Aceh yang non simpatisan KPA itu merasa miris melihat warna bendera yang memang tidak jauh berbeda itu, jadi asal melihat bendera itu menjadi trauma dan ada perasaan berjarak. Jadi potensi laten konflik itu tersimpan disitu. Kemudian yang *kelima* eksistensi KPA ini yang dalam prakteknya sama dengan GAM dalam perilaku sehari-hari sama saja GAM main senjata saja. Pada masa GAM mereka nenteng-nenteng senjata pada saat KPA mereka tidak nenteng-nenteng senjata tetapi pajak nanggroe, minta ke kantor-kantor, kemudian untuk acara-acara tertentu mereka mendatangi kontraktor-kontraktor tertentu dan sebagainya. Tetap berjalan pada saat konflik bersifat vertikal itu terjadi meskipun ini konflik mengarah kepada horizontal tetapi beberapa perilaku pada saat konflik vertikal itu masih terbawa pada saat konflik horizontal itu terjadi. Kemudian yang *keenam* parlok ini jelas memiliki agenda politik etno nasionalis Aceh yang tersembunyi, dan ada kesan mereka membuat pluralitas parlok dengan satu istilah yang pernah diucapkan oleh Wakil Gubernur Nazar “saboh toke na pading-pading toko” yang dalam bahasa Indonesia artinya “satu toke yang punya banyak toko” hakikatnya toko yang beragam itu memiliki satu toke yang sama, itu adalah strategi dari lahirnya beberapa parlok yang berbeda ada PA, ada SIRA dan sebagainya yang kesemuanya itu yang menurut keterangan Nazar itu yang pernah diexpos di Serambi itu pada hakikatnya punya KPA atau punya GAM yang sudah berganti baju menjadi KPA itu dikemas dengan parlok, itu potensi latin konflik yang harus dicermati untuk dicarikan jalan keluarnya atau solusinya.

*Melihat konflik atau potensi konflik semacam itu langkah apa yang dapat menyelesaikan konflik tersebut?*

Analisis saya untuk solusi ini diperlukan mediator dengan multi pendekatan. Pendekatan adat dan budaya ini sepertinya ini tidak bisa lagi diberlakukan untuk solusi konflik ini, karena pelaku adat budaya sudah terlibat dalam konflik, ulama sudah terlibat, KPU dengan MUNA tadi, kemudian santri ada dua model santri, kemudian dari segi LAKA juga tadi yang menginginkan Wali Nanggroe itu keturunan ini mereka terlibat konflik semuanya. Sehingga alternatif yang masih nampak tidak ada konflik interest keinginan terjun ke dalam konflik ini, ini sepertinya “forum rektor di NAD atau tokoh kampung yang netral ini alternatif yang bisa menjadi mediator konflik atau ormas atau organisasi sosial keagamaan yang cenderung nasionalis yang tidak kedaerahan dan tidak terlibat dalam kancab konflik selama ini, jadi misalnya NU yang ada di Aceh, Muhamadiyah yang ada di Aceh, Alwasliyah seperti yang mereka ini nasionalis tapi tidak terjun juga dalam konflik yang ada secara horizontal ini bisa dijadikan alternatif untuk mediator”.

*Kalau masyarakat melihat perdamaian yang sekarang ini, seperti apa?*

Jadi masyarakat, meskipun tidak dikatakan, dari perilaku masyarakat itu jelas mengatakan bahwa perdamaian yang ada sekarang ini adalah perdamaian yang semu, perdamaian yang nampak dipermukaanya damai tapi didalamnya tidak

damai. Banyak agenda-agenda yang tersimpan, karena itu, jadi beberapa dari perilaku pada saat konflik vertikal antara Pemerintah dengan GAM itu masih tetap berlangsung, itu berlangsung pada saat damai dikumandangkan termasuk pajak nanggroe, kemudian persen dari pembangunan yang bersumber dari dana APBD, dana APBA tetap berlangsung.

*Kemudian sejauhmana efektivitas lembaga-lembaga yang diharapkan bisa menetralsir pasca konflik seperti BRR, BRA terakhir yang akan muncul KRR?*

Jadi kalau kita melihat lembaga-lembaga seperti BRR, BRA kemudian KRR nya itu hanya efektif ditingkat elit tertentu tidak menyentuh kepada level akar rumputnya. Sehingga sampai hari ini kita masih melihat yaitu tadi kalau memang lembaga-lembaga itu efektif untuk menyelesaikan paling tidak di internal KPA sendiri itu tidak ada konflik. Petinggi KPA dengan Inang Bale, antara helsinki dengan pasca helsinki, kombatan dengan non kombatan, kemudian begitu juga antara PETA dengan KPA itu, mestinya itu kalau memang efektif tidak akan terjadi, jadi terjadinya itu membuktikan bahwa lembaga-lembaga itu tidak efektif secara keseluruhan, mungkin efektif pada sebagian elit tertentu, tetapi bagi gressput akar rumputnya tidak tersentuh.

*Banyak orang yang melihat reintegrasi itu nampaknya kurang berhasil, dinamika kegagalannya itu dimana?*

Jadi yang pertama, banyak pihak barangkali yang menanggapi konflik Aceh ini sebatas konflik kesenjangan sosial. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh arah kepada konflik ideologi itu sebenarnya lebih nyata daripada konflik yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi, karenanya pada saat MoU Helsinki ditandatangani, reintegrasi dicanangkan, itu kita melihat banyak sekali sama-sama pemerintahan banyak sekali mengalir ke Aceh, begitu juga dana bantuan asing itu mengalir ke Aceh. Kalau memang persoalannya itu kesenjangan sosial dan ekonomi itu tentunya tanda-tanda potensi konflik Aceh itu akan berakhir itu 80% lah sudah kelihatan, tapi nyatanya kalau kita lihat untuk mencapai 20% saja itu tidak terlihat, perampokan masih terjadi dimana-mana, senjata masih beredar karena perampokan itu menggunakan senjata laras pendek atau laras panjang yang itu menandakan bahwa masih ada pengumpulan senjata, itu menandakan masih ada keinginan melanjutkan konflik yang ada, sepanjang jalur alternatif lain yang ditempuh itu tidak efektif, tapi kalau jalur lain yang sedang ditempuh itu efektif yaitu jalur politik itu efektif, maka mungkin jalur penggunaan senjata itu hilang dengan sendirinya tapi agenda sembunyi mereka itu dalam perdamaian itu jelas terlihat ada yaitu referendum dan mengarah kepada kemerdekaan, kenapa? Karena adanya sebuah kendaraan politik itu menurut pengamatan kita dilapangan pun tidak semata-mata Beli itu keluasaan untuk mensejahterakan berarti ada agenda lain untuk mendirikan etno nasiolis Aceh itu.

*Kalau kita lihat setiap ada kegiatan separatist kemudian muncul kelompok-kelompok anti separatist ini dinamika lokalnya seperti apa?*

Jadi, karena yang ada di Aceh ini mayoritas beragama Islam pada saat separatist hidup kemudian mereka melakukan hal-hal yang destruktif terhadap masyarakat sipil yang lain, maka kemudian mulai dengan konsep Islam apabila hak-hak kita

itu diganggu maka kita punya kewajiban mempertahankan hak-hak kita itu. Jadi dengan dasar konsep seperti itulah kemudian timbul perlawanan-perlawanan kepada pihak separatis GAM itu dengan rasa nasionalis kebanggaan yang kuat, karena mereka tahu bahwa dengan nasionalis kebanggaan yang ada pada diri mereka itu, mereka bisa hidup dengan damai dengan tenang di Aceh, tetapi dengan timbulnya separatis yang cenderung etnis nasionalis itu, nasionalis mereka kebanggaan mereka itu merasa terganggu atau diusik sehingga munculah perlawanan-perlawanan masyarakat sipil dalam bentuk Front PETA atau laskar-laskar lainnya.

Dalam pandangan Islam, yang namanya mukharadin atau gerakan pengacau keamanan atau bugha pemberontakan yang dilakukan pada sebuah kekuasaan negara yang syah, maka hukumnya sangat berat di dalam Islam, tidak hanya dihukum mati tapi mayatnya harus disalib selama tiga hari tiga malam baru boleh dikebumikan, itulah tegasnya hukum Islam berkaitan dengan gerakan pengacau keamanan, mukharadin atau bugha, pemberontakan terhadap sebuah negara yang syah.

*Adanya 2 kelompok yaitu separatis dan anti separatis, sejauh mana bisa rekonsiliasi ini terjadi di Aceh?*

Dalam pandangan saya pihak separatis dengan pihak pembela tanah air atau laskar merah putih misalnya itu akan bisa terselesaikan apabila persoalan ideologi itu terselesaikan karena antara PETA atau laskar merah putih itu dengan separatis GAM, itu persoalan bukan persoalan kesenjangan ekonomi. Tapi persoalan pertahanan keamanan dan ideologi serta hak-hak sipil mereka yang merasa terganggu hak-hak kebanggaan mereka yang merasa terkotori oleh separatis jadi tidak akan pernah ada rekonsiliasi antara PETA dengan gerakan separatis itu sepanjang persoalan pertahanan dan keamanan dan ideologi itu tidak terselesaikan tapi kalau ada satu kesepakatan bahwa ideologi kita itu adalah UUD 1945 dan Pancasila serta kita ini adalah satu nasionalis kebanggaan Indonesia bukan etno nasionalis Aceh misalnya, maka itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Jadi sepanjang ada agenda tersembunyi yang sifatnya itu mengabaikan UUD 1945, mengabaikan Pancasila dan mengabaikan hak-hak sipil lainnya maka persoalan rekonsiliasi antara PETA dan KPA atau separatis GAM itu tidak pernah akan selesai.

*Apakah hal itu ada hubungannya dengan permasalahan dendam yang ada di Aceh?*

Karena tadi, baik PETA maupun separatis itu mayoritas adalah Islam atau kita katakan semua itu adalah Islam. Mungkin persoalan dendam akan lebih mudah diselesaikan karena memang Islam mengajarkan tidak boleh ada dendam, jadi pendekatan agama untuk persoalan itu sangat efektif. Sepanjang itu tadi tidak muncul ideologi-ideologi lain disamping UUD 1945 dan Pancasila tadi, tapi sepanjang masih ada itu meskipun tanpa dendam konflik akan tetap berlanjut bukan motifnya dendam, tetapi motifnya PETA tidak mau UUD 1945 dan Pancasila itu terganggu hak-hak mereka sebagai warga negara yang mempunyai nasionalis itu, kebanggaan nasionalis Indonesia itu terganggu sepanjang tidak ada masalah konflik akan terselesaikan.



*Dengan melihat dinamika sekarang ini apakah mungkin kelompok-kelompok itu akan mencair nantinya?*

Kita berharap kepada Hasan Tiro yang dalam pertemuan dengan Pak Wapres ke NAD melontarkan keinginan untuk tetap tinggal di Aceh, jadi kita berharap memang betul-betul mereka itu ingin damai dalam bingkai NKRI, kalau mereka ingin damai dalam bingkai NKRI maka Insya Allah tidak ada masalah lagi, masalah Aceh akan selesai dengan baik damai dalam bingkai NKRI, yah itu yang harus digaris bawahi.

*Sesudah rekonsiliasi mungkin kita bisa melangkah pada tahap transformasi konflik, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun budaya damai dalam rangka untuk mencairkan komunikasi mereka untuk mengatasi mis komunikasi yang selama ini terjadi?*

Saya rasa, jadi itu sangat penting, membangun trust satu kepercayaan bersama dengan diawali dengan bentuk-bentuk komunikasi yang sederhana memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih konkrit bahwa dengan damai helsinki itu, bahwa dengan damai mereka itu tidak mempunyai keinginan untuk mengarahkan kepada referendum/merdeka atau mengkhianati Pancasila dan UUD 45 itu bisa dipahami oleh pihak PETA dan pihak sana juga bisa memahami bahwa mengapa PETA melakukan perlawanan tidak lebih hanya mencintai negaranya dengan melawan kekerasannya. Jika kesadaran itu ada pada kedua belah pihak maka itu cara yang paling baik untuk menyelesaikan konflik.

*Apakah ada kemungkinan dibentuk forum bersama? Forum apapun namanya yang terdiri dari orang-orang PETA atau orang-orang KPA?*

Jadi saya rasa itu sangat pokok, karena tanpa ada satu kebersamaan yang diawali dengan komunikasi kemudian membentuk forum bersama, maka tidak akan pernah ada titik temu yang ada saling curiga tapi kalau sudah berada dalam satu forum yang sama atau paling tidak saling curiga itu mulai berkurang dan dengan dialog-dialog lanjutan akan terselesaikan.

*Bagaimana pengaruh LSM lokal atau LSM asing ini terhadap permasalahan perdamaian di Aceh?*

Kita harapkan bahwa LSM-LSM asing yang masuk ke Aceh ini tidak menyuarakan dalam bentuk ilustrasi pisahnya timor-timur dengan Indonesia, karena sering sekali yang dibicarakan LSM-LSM asing di Aceh ini adalah mengilustrasikan Timor-Timur, bagaimana Timor-Timur bisa lepas dari Indonesia. Jadi itu yang sering dibicarakan daripada membicarakan bagaimana damai yang sudah dicanangkan di Helsinki itu bisa dilanjutkan. Jadi lebih banyak cenderung memprovokasi pisahnya Timor-Timur dari Indonesia yang itu bisa dijadikan sebuah contoh bagi Aceh atau memberikan contoh seperti satu wilayah yang dengan cara politik bisa memisahkan diri dari Indonesia.

*Berarti mereka secara tidak tersirat sudah masuk ke arena politik?*

Secara tidak langsung secara tersirat mereka masuk ke arena politik, sehingga menurut hemat kita pemerintah harus mempunyai satu sikap dalam menyikapi kehadiran-kehadiran LSM-LSM asing itu, karena untuk kasus Aceh LSM-LSM

asing itu selalu bermasalah untuk 2 hal yang pertama itu berkaitan dengan pendangkalan dengan akidah, kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi sering memberikan ilustrasi bagaimana Timor-Timur bisa pisah dari Indonesia kemudian Suriah negara seperti negara yang ada di Rusia itu sebuah wilayah propinsi bisa merdeka dengan jalan damai karena didukung oleh Uni Eropa itu dijadikan ilustrasi-ilustrasi di masyarakat. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak punya jalan pikiran bagaimana sebuah propinsi bisa menjadi sebuah negara hanya karena dukungan Uni Eropa itu kemudian tercerdaskan oleh ide-ide seperti itu. Jadi 2 hal itulah yang kita lihat ini adalah gangguan pada proses damai ini.

Yang pertama pendangkalan agama itu banyak tatanan dari tokoh-tokoh agama adanya misi agama lain di Aceh dan yang kedua itu tadi ilustrasi-ilustrasi yang membawa pencerahan negatif bagi keutuhan NKRI.

*Kemudian untuk peran pengusaha baik dari luar maupun dari dalam Aceh terkait dengan dinamika pembangunan secara moral maupun spiritual itu seperti apa?*

Kalau kita lihat bicara secara moril sudah banyak pengusaha-pengusaha dari luar itu yang berkeinginan untuk berinvestasi di Aceh. Karena melihat kondisi akan Aceh yang memang menjanjikanlah sangat prospek bagi sebuah kegiatan bisnis tapi secara realitanya tidak lain pimpinan diantara mereka itu yang berani melangkah kaki untuk benar-benar mewujudkan usaha nyata di Aceh. Karena kenapa, kru pertimbangan mereka kembali kepada keamanan. Sepanjang masih ada orang diculik, masih ada orang yang dirampok dan rampoknya menggunakan senjata api maka mereka tidak cukup punya keberanian untuk secara ril berinvestasi di Aceh meskipun secara moril tadi itu banyak barangkalijuga pura-pura Aceh yang ada di luar Aceh itu punya keinginan untuk menanamkan modalnya di Aceh. Tapi untuk melangkah dalam wujud yang nyata itu belum, sampai hari ini belum ada.

*Sejauhmana peran sinergi antar lembaga di dalam hal menangani masalah Aceh?*

Sesuai dengan pergeseran konflik dari vertikal ke horizontal maka negara harus berperan mencari solusi, dari pihak-pihak yang berkonflik secara horizontal tadi sesuai dengan motifnya. Kalau yang motifnya itu sosial ekonomi yang terapi sosial ekonomi, kalau apa namanya konfliknya itu kaitannya dengan pertahanan dan keamanan dan ideologi ya pendekatannya pertahanan dan keamanan dan ideologi. Sehingga tidak ada rasa saling curiga, makanya tadi sangat dibutuhkan sebuah forum, karena rasa curiga akan hilang manakala kita dalam satu forum yang sama duduk sama rendah berdiri sama tinggi.

Tapi kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah pusat bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah jadi pemerintah pusat memberikan satu rancangan dasar, pemikirannya itu kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun yang saling bagus itu sebenarnya ya sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan terkesan dengan demikian pemerintah pusat pun lebih maksimal dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah Aceh secara keseluruhan.

*Fenomena persaingan parlok dan formas seperti apa?*

Yang sudah pasti persaingan itu masih ada, yang kita ketahui sepanjang masih ada agenda tersembunyi, maka sepanjang pemilihan legislatif dan pemlihan kepada

daerah, pertarungan antara ada dan tidak ada, mempertaruhkan eksistensi, dirinya akan menggunakan kekuatan dari segala taktif yang ada padanya, sebab kalau parlok tidak mendapatkan kursi yang signifikan sesuai dengan yang mereka harapkan sesuai dengan pilkada, mereka akan sangat malu atau sangat kehilangan muka. Yang selama itu mereka dapat mengumpulkan orang jutaan, ternyata mereka orang yang tidak disukai. Kalau mereka gagal, seperti harapan kursi yang mereka canangkan, selanjutnya mereka akan menggunakan cara apapun agar hasilnya itu signifikan.

Sedangkan parnas juga demikian sebagai senior dipangung politik, mereka juga punya harga diri, mereka bilang orang tua kalau dengan anak-anak, sehingga parnas juga akan berusaha maksimal cuma itu bisa berlangsung secara sehat, cuma manakala ada hal-hal yang berlangsung secara tidak sehat, kita melihat peluang parnas sangat kecil karena dengan semangat juang juga kalah, semangat juang parlok lebih tinggi dari parnas, dan karena parlok tidak hanya memperjuangkan kursi saja, ada agenda lain di balik itu. Sedangkan parnas semangatnya hanya untuk memperoleh kursi, kalau tidak memperoleh tidak apa-apa tidak ada marwah yang mereka pertaruhkan, hanya harga diri sebagai senioritas saja sedangkan parlok tidak begitu.

*Melihat eforia semacam itu, sejauh mana peluang Aceh untuk merdeka lepas dari NKRI?*

Memang kalau terbukti parlok punya agenda tersembunyi dengan mereka memperoleh kursi signifikan, seperti yang mereka perjuangkan, maka yang sering diilustrasikan oleh LSM asing dimana ada sebuah propinsi yang bisa merdeka, maka dengan adanya dukungan dari Uni Eropa, plus naik dalam kasus Aceh legislatifnya lebih dari 2/3 adalah pihak mereka, kemudian pihak aparaturnya adalah mereka dalam hal ini eksekutif, maka secara otomatis status mereka mewakili masyarakat Aceh sudah signifikan, jadi dengan tanda tangan rame-rame saja, bukti hitam di atas putih, legislatif, eksekutif kemudian didukung oleh tokoh non formal, maka dibentuklah seperti tadi MUNA lalu dibentuk lembaga adat baru menyaingi LAKA, maka komplitalah bahwa masyarakat Aceh itu mayoritas layak untuk dilepas, karena mereka sudah mewakili kemauan rakyat, dimana 2/3 legislatif dan eksekutif ditambah dengan lembaga-lembaga yang non formal yang mewakili rakyat.

*Dilihat dari keterorganisasian penduduk Aceh, suku Aceh merupakan bagian dari suku yang ada di Aceh, apakah mereka juga akan setuju atau justru akan timbul konflik?*

Ya kalau itu terjadi, maka Aceh akan terpuruk dalam, kubangan konflik yang berkepanjangan. Aceh kan multi etnis, ada gayo, jamee, alas, aceh, tamiang dan ada beberapa suku lainnya, dan tidak semua suku di Aceh sepeka dengan keinginan referendum, keinginan merdeka. Cuma karena dibawah bayang-bayang kekerasan, intimidasi, mungkin mereka tidak melakukan perlawanan, namun manakala itu terjadi, terpaksa mereka akan melawan, jadi akan terjadi benturan sesama etnis bila itu terjadi, itulah yang membuat mereka akan berada dalam kubangan konflik yang berkepanjangan.

**Wawancara Dengan Informan F  
Banda Aceh, 25 Agustus 2008**

*Paska MoU Helsinki, apakah masih terjadi konflik di Aceh?*

Siapa bilang Aceh sudah tidak ada konflik, memang kalau dilihat dari luar nampaknya aman, tetapi kalau kita masuk ke dalam nampak sekali konflik, sekarang masyarakat Aceh sendiri yang konflik. Saya pernah dipanggil KPA dan ditanya kenapa saya susah ditebak dan dikatakan bukan Aceh asli, gara-gara saya katakan bersama kawan-kawan di Ule Kareng Banda Aceh tempat kami ngobrol bahwa yang melanggar HAM tidak TNI/POLRI saja tapi GAM juga melanggar HAM. Karena keluarga saya ada yang dibunuh oleh TNI, dan ada juga yang dibunuh oleh GAM, dan saya tidak setuju kalau Aceh merdeka.

*Kalau masih ada konflik, bagaimana solusinya atau resolusi konflik di Aceh?*

Sebaiknya dalam setiap langkah resolusi dan rekonsiliasi konflik, perlu melibatkan perempuan, jangan perempuan hanya dijadikan tukang masak, atau maaf hanya dijadikan pemuas nafsu saja. Karena perempuan adalah kurban yang tidak berdaya dan terbesar, sehingga punya kepentingan dalam resolusi konflik dan perempuan adalah penduduk yang terbesar di Aceh, bila ingin memenangkan hati orang Aceh maka menangkan dulu hati perempuan Aceh.

**Wawancara Dengan Informan G  
Aceh Tengah, 24 Februari 2008**

*Bagaimana Aceh sebelum MoU Helsinki dan sesudah MoU Helsinki?*

Tidak ada perbedaan situasi keamanan antara sekarang dengan sebelum MoU Helsinki, terbukti dengan aksi pemberondongan rumah salah seorang anggota PETA di Bener Meriah atas nama Ardiansyah oleh OTK bersenjata pada 30 Juni 2008 yang diperkirakan terjadi pukul 08.20 WIB.

*Melihat MoU Helsinki, GAM mengklaim mewakili masyarakat Aceh, sementara fakta di lapangan mengatakan bahwa tidak seluruhnya masyarakat Aceh adalah GAM, hal itu bisa dilihat dari heteroginitas penduduk, bagaimana Bapak melihat hal ini?*

Sebenarnya secara historis, suku Aceh terjadi karena adanya integrasi, imigrasi atau pendatang dari luar, sehingga lahirnya etnik Aceh yang kebanyakan tinggal di sepanjang pantai utara dan timur. Disamping ada etnik lain yang mengaku sebagai suku asli Aceh seperti etnik gayo, tamiang, alas, etnik jamee, etnik melayu singkil. Dalam perkembangan menjadi masyarakat yang heterogin, pluralis. Jadi etnik Aceh merupakan bagian dari etnik yang lain yang ada di Propinsi NAD. Kalau obyektif kita melihat dari jumlah penduduk Aceh secara keseluruhan, maka akan terlihat penduduk yang kontra dengan GAM lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk yang pro GAM, meskipun sulit direpresentasikan dengan data statistik, jadi tidak semua masyarakat Aceh adalah GAM.

*Bagaimana latar belakang terbentuknya kelompok anti separatis?*

Itu terdiri dari orang-orang yang lemah, pada akhirnya membentuk suatu kelompok dan merasa senasib untuk mengadakan perlawanan. Anggota front bukan menganggap saudara kita berbeda faham sebagai musuh apabila mereka tidak menjadikan dirinya sebagai musuh, mereka tidak memusuhi masyarakat yang cinta kepada tanah air maka saat itu pula menjadi musuh kita bersama.

*Paska MoU Helsinki, seharusnya masyarakat Aceh bisa hidup damai dan kembali pada habitatnya masing-masing seperti petani, pegawai dan pedagang?*

Benar, yang diharapkan idealnya seperti itu, tapi dilapangan atau fakta lihat sendiri. Seperti kejadian penucukan, pembunuhan, masih ada senjata beredar membuat situasi tidak aman. Masih was-was untuk beraktivitas, disamping damai juga konflik masih ada meski frekwensi berubah, itu mungkin antara KPA dan PETA. Rasa aman dan nyaman, sebagai landasan membangun saling percaya antara berbagai kelompok yang ada di Aceh nampaknya belum sepenuhnya pulih. Masyarakat belum sepenuhnya nyaman untuk beraktivitas, khususnya yang di desa-desa.

**Wawancara Dengan Informan H  
Banda Aceh, 24 Juli 2008**

*Bagaimana Tengku melihat GAM Paska MoU Helsinki?*

GAM sekarang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, terutama GAM yang benar-benar ingin damai, kedua GAM yang setengah hati untuk damai, kemudian GAM yang sama sekali tidak mau menyerah untuk damai, dengan alasan sudah banyak korban di pihak GAM yang rela mempertaruhkan nyawa untuk memerdekakan Aceh. Itu tidak hanya cukup ditukar dengan uang beberapa juta rupiah dan tanah beberapa hektar. Saya juga mantan GAM, sekarang ada teman-teman seperjuangan yang dijadikan ajudan, ada yang dapat proyek tapi tidak seluruhnya dapat, saya dulu juga berjuang. Tapi sekarang kami dianggap pengkhianat dan tidak layak mendapatkan bantuan.

*Bagaimana hubungan antara masyarakat yang pro merah putih dan pro GAM seperti apa?*

Tidak cocok, karena kemauan orang itu tetap menang diri sendiri, sedang masyarakat yang pro harus menang nasional, oleh sebab itu kalau Aceh merdeka, Aceh justru susah, karena semua barang-barang di Aceh didatangkan dari luar, tidak ada pabrik di Aceh, bahan bangunan tidak ada, ini yang paling kecil telur ayam tidak ada semua ada di luar, maka masyarakat yang tidak pro pada GAM, maka tidak senang, karena sudah berapa tahun di pimpin orang itu 2005 sampai 2009 mau empat tahun, ini masyarakat yang tidak pro pada orang itu paling susah, karena semua proposal masyarakat yang tidak pro kepada orang itu, tidak ditanggapi, ini sama kondisinya dengan kita FORKAB, tapi orang-orang yang pro pada mereka sudah kaya, proyek, segala macam orang itu, orang yang tidak pro GAM tidak diopen. Perjuangan yang paling buruk di Aceh pertama jabatan, kedua pembunuhan, pemerasan. Misalnya sudah jadi pemimpin untuk mencari duit paling enak dengan kekerasan, curi dan senjata pun masih ada banyak. Meski harusnya senjata sudah tidak ada sesuai perjanjian, sekarang banyak senjata, sekarang perampokan, penculikan, alasannya kriminal, lalu siapa yang berbuat kriminal.

## Wawancara Dengan Informan I Meulaboh, 15 April 2008

*Bagaimana perkembangan Aceh Paska MoU Helsinki, khususnya terkait dengan munculnya tuntutan ALA dan ABAS?*

Sebenarnya Aceh terbagi menjadi tiga bagian, pesisir utara sampai timur adalah orang-orang Aceh yang berasal dari luar, mereka yang banyak mendukung GAM, kecuali Langsa dan Tamiang ada dari suku Jawa. Kemudian bagian tengah banyak suku Gayo dan bagian barat selatan campuran dari Batak, Jawa, Padang dan lain-lain. Sebelum reformasi bukan daerah konflik. Tapi setelah reformasi GAM mulai mengembangkan sayapnya dengan merekrut pemuda-pemuda pengangguran dan sebelum MoU Helsinki sudah ada upaya pemekaran propinsi ALA dan ABAS.

*GAM dalam MoU Helsinki, mengatas namakan Rakyat Aceh, bagaimana dengan hal tersebut?*

GAM bukan berarti Rakyat Aceh karena kami bukan GAM, dan tidak ikut tekan MoU Helsinki, kalau perlu bubarkan dulu GAM atau KPA, PETA dan FORKAB biar kita bisa menyatu dan tidak ada kelompok-kelompok yang bertentangan, bisa menimbulkan konflik baru di Aceh. Kalau kita semua bubar, kembali pada ormas atau partai yang layak biar Aceh damai betul.

Latar belakangnya, pertama keamanan Aceh yang kurang/tidak kondusif, karena rentan kendati daerah sangat luas. Kedua, peningkatan ekonomi untuk pecahkan, memudahkan ekonomi pembangunan sosial kemasyarakatan. Ketiga, memudahkan pembangunan, memudahkan pembinaan, peningkatan sosial kemasyarakatan.

Latar belakang ini disepakati oleh tokoh masyarakat, ulama, pemuda, DPRD, Bupati (6 Kabupaten). Setelah disepakati kesepakatan itu kemudian dibentuk panitia pelaksana putusan Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Jaya, Kab. Madang Raya, Kab. Simeleu, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan. Hasil musyawarah tokoh-tokoh ke 6 Kabupaten ditunjuk H. Cut Agam sebagai ketua, Suparjo sebagai sekretaris.

Aceh ini kan masih NKRI, tapi ada maksud-maksud lain Abya dengan adanya MoU ini, pemerintah sudah Abya, sebagai MoU ini, MoU ini sudah disepakati semua, kenapa UU PA ini bukan berdasarkan MoU semua, berdasarkan UUD 45, UU 40, UU No. 18, ini digabung. Kenapa Aceh ada partai-partai GAM, ini adalah orang luar bukan orang dalam, ini yang paling mengganjal.

Ada opini ini, adalah strategi dari pusat untuk memecah belah Aceh, pusat kalau enggak ada usul dari Rakyat Aceh dari mana? Pemberontakan kalau enggak dibikin dari daerah bagaimana dengan pusat? Karena diperkuat oleh daerah yaitu kesepakatan para ulama, masyarakat yang diwakili oleh mereka diajukan pemerintah ini diatur oleh masyarakat.

*Aceh sudah damai tetapi ternyata situasi dilapangankan ternyata tidak demikian?*

Boleh dikatakan damai tetapi tiap hari orang-orang dicuri, tiap hari orang-orang dibunuh, apakah hal ini dikatakan damai? Damaikan tidak saling menuduh si A, menuduh si B, B menuduh si C, C menuduh si D dan sebagainya. Damai kan tidak

begini di Aceh ini pantang orang mencuri, pantang orang merokok, tapi kok sekarang malah menjadi budaya, apakah ini dikatakan damai.

Menurut Cut Agam, damai-damai di Aceh ini adalah seperti kedondong, diluar mulus, indah, bagus, dilihat oleh orang luar kelihatannya bagus, tetapi didalamnya berserabut. Makanya saya menghimbau kalau diluarnya bagus, maka didalamnya juga bagus, jangan diluar bagus didalamnya tidak bagus. Diluar bagus orang takut sama GAM, seperti saya melihat ada seorang wanita cantik sekali, tetapi saya dikerjai, begitu naik mobil ternyata wanita yang cantik tadi adalah banci.

Aceh kan ada beberapa : Aceh Tengah, Gayo, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Singkil, Aceh Barat, Simeleu, Ala (6 Kabupaten), (Abas 6 Kabupaten), Aceh Besar, Aceh Pidie, Bireun, Lhokseumawe dan Aceh Utara.

*Bagaimana dengan adanya parlok di Aceh?*

Pendirian partai lokal, atau partai GAM yang pernah diusulkan oleh GAM, bertentangan dengan semangat perdamaian, harusnya dicegah timbulnya partai lokal yang mengancam integrasi, pemerintah ada 2 hal semangat yang harus dipegang, pertama semangat perdamaian, kedua semangat reintegrasi, ketiga tidak melahirkan faktor-faktor dis integrasi baru. Meski yang disetujui akhirnya partai PA. Tapi yang ada di otak langsung tangkap Gerakan Aceh Merdeka. Pesan MoU Helsinki jelas tentang perdamaian, reintegrasi baik nasional maupun sosial, kemudian amnesti dan kompensasi yang penting disitu ada kontrak sosial baru, membangun Aceh baru untuk NKRI.

Partai nasional dan partai lokal akan bertarung di Aceh, ada 6 partai lokal dan 30 lebih partai nasional, apa jadinya nanti Aceh kan masih dalam NKRI, kenapa harus ada partai lokal, mak ajangan ada maksud-maksud lain, apa damai abadi enggak ada di Aceh. Seharusnya MoU ini kan bukan undang-undang, sekedar perjanjian sebagian besar yang ada di MoU sudah dimasukkan dalam UUPA, harusnya UUPA hukum didasarkan pada MoU saja, ada UUD 1945, UU No. 18 masalah otonomi daerah, kemudian dengan MoU ini digabung maka tidak ada alasan menghambat pemekaran daerah, ABAS dimulai tahun 2003 dan ALA tahun 1999 kenapa tidak UUPA ini yang kita jadikan dasar untuk mengatur di Aceh, itu ada partai GAM yang dipimipn oleh orang luar, maka tadi saya bilang apa betul damai, oke lah sekarang Irwandi menang 40%, tapi yang 60% juga harus dipimpin juga dan itu justru bukan mendukung GAM.



**Wawancara Dengan Informan J  
Langsa, 24 Juli 2008**

*Bagaimana Bapak melihat kehidupan GAM Paska MoU Helsinki?*

GAM dulu hidup dilayani oleh penduduk yang dibawah ancaman senjata, tidak pernah kesulitan memenuhi kebutuhannya. Namun sekarang mereka harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ditambah lagi menanggung beban keluarga. Sementara realita yang sekarang dihadapi tidak mendukung untuk mencari pekerjaan dan menafkahi keluarganya.

*Bagaimana GAM dan Non GAM bisa hidup damai di Aceh?*

Perlu rujuk atau rekonsiliasi, yah itu salah satu cara terbaik bagi penyelesaian konflik Aceh. Sebab rekonsiliasi merupakan ruhnya perdamaian yang mengecam perbedaan pendapat menjadi sebuah rahmat, bukan saling membunuh. Tidak hanya GAM dan Non GAM, tapi seluruh elemen masyarakat Aceh harus bekerja keras, menciptakan, membangun dan memupuk kembali rasa kebersamaan yang sudah melemah termasuk pemerintah untuk menghindari perpecahan karena provokasi dari pihak-pihak yang menginginkan konflik Aceh terus hidup.

*Bagaimana langkah yang dapat diambil dalam penyelesaian konflik Aceh?*

Penyelesaian konflik Aceh, lewat sentuhan kejiwaan (spiritual) dan keagamaan (religius) akan melahirkan kesadaran-kesadaran batin tentang pemahaman bahwa perang, dendam dan sesuatu yang bersifat keduniawian adalah tidak penting dan tidak berharga dari kehidupan di akherat kelak. Artinya, jika kesadaran pihak-pihak yang bertikai tersentuh bahwa perdamaian dan persaudaraan itu jauh lebih berharga dan mulia dari pada permusuhan, dendam dan perang, maka jalan menuju penyelesaian konflik Aceh secara permanen akan semakin terbuka.

*Bagaimana masyarakat Aceh memahami atau memaknai terhadap perdamaian?*

Prinsip hidup damai dalam lingkungan orang Aceh dikenal pula sebuah ucapan yang berbunyi "Si ket bek rho bah habeh" maksudnya "miring jangan tumpah, habis biarlah". Artinya daripada miring-miring atau tanggung-tanggung biarlah tumpah atau sungguh-sungguh sekali asal tidak sampai malu. Prinsip hidup ini berarti bahwa orang Aceh hanya mengenal sahabat yang setia saja, sahabat yang bener-bener seperasaan dan sepenenderitaan dengannya dan untuk sahabat yang demikian rela mengorbankan apa saja jika perlu nyawapun akan rela.

Memang damai itu rahmat bukan laknat, tapi damai bukan seperti ini kalau mau damai. Damai yang hakiki di Aceh tidak seperti sekarang. Hanya dinikmati sebagian orang Aceh saja, mantan GAM juga orang Aceh tapi mereka hanya sebagian kecil saja, harusnya damai yang hakiki seperti Syayidina Ali dimana Al-Qur'an di taruh di ujung pedang jadi damai berdasarkan Islam. Kalau sekarang perlu islah secara Islam, pemerintah panggil ulama-ulama di Aceh untuk membuat konsep perdamaian. Perlu juga petinggi GAM, petinggi TNI/Polisi datangkan bersama-sama untuk meminta maaf pada Rakyat Aceh, ada kesalahan-kesalahan anak buah dan anggotanya di Aceh. Kemarin seperti kejadian di Perlak, ada yang diculik, petingginya diambil baru dilepas, dibarter. Datangkan Hasan Tiro, suruh dia minta maaf pada Rakyat Aceh yang tetap hidup susah dibuatnya.

**Wawancara Dengan Informan K  
Langsa, 28 Oktober 2008**

*Apakah MoU Helsinki sudah dapat menyelesaikan permasalahan konflik di Aceh?*

Di tingkat internasional, Aceh ini dipandang sebagai daerah yang menguntungkan sebagai kepentingan Uni Eropa dan US, disinilah dipertaruhkan di Aceh, negara donor pun yang paling banyak adalah Uni Eropa dan US. Sekarang pelaku perdamaian Uni Eropa, anda bisa melihat semua penasehat-penasehat Irwandi semua orang asing. Ada apa dibalik itu? Irwandi tidak pernah mengangkat ke Indonesiaan, dia justru mengangkat etno nasionslisme ke Acehan dan kejayaan masa lalu Aceh, dan kalau perlu orang disini berbahasa Aceh semua, hal-hal inilah yang akan mengusung konflik kembali, karena ini tidak egaliter dengan situasi sekarang, dimana bangsa yang maju adalah bangsa yang bermitra.

Kembali ke tingkat internasional, dengan kedatangan Hasan Tiro ini dilegitimasi bahwa GAM itu diakui gerakannya dan RI mengakuinya, walau perjuangan mereka ke GAM, tujuannya sama cuma berganti gaya, baju yang dulu pemberontakan bersenjata diganti baju perjuangan lewat politik dan itu dinyatakan. Sehingga ketika datang kesini apa yang disampaikan. "Saya mengucapkan terima kasih pada Presiden Indonesia SBY jika saya mengucapkan terima kasih pada Sekjen PBB Qopi Anan, saya mengucapkan terima kasih pada Amerika Serikat, Jepang Norwegia dan lain-lain". Pertanyaannya, kenapa sampai sejauh itu? Dan dia melihat dengan perjuangan politik lebih cepat mencapai harapan, pakai senjata sudah 30 tahun tidak ada hasil, baru beberapa hari 2005-2007, gubernur, bupati (eksekutif sudah dikuasai). Helsinki lebih banyak kekuatan asing, kepentingan dua negara tersebut.

Dari sisi nasional, harga diri bangsa sudah tidak ada lagi. Mekopolkam memerintahkan pada Pemda dan Kapolda jangan mengikuti kegiatan Hasan Tiro, tapi anehnya Presiden, Wapres malah menerima, artinya ada kepentingan. Sebab dari saat sekarang, sampai kampanye dan pada saat pemilihan presiden nanti, tidak akan ada keputusan politik yang strategi yang berkaitan dengan Aceh, karena kalkulasi dan resiko politik yang sangat tinggi bagi SBY dan JK untuk memberi ketegasan pada status Aceh. Artinya inilah peluang bagi dia untuk menggalang dukungan dari internasional, belajar dari kosovo, Tim-Tim disutradai oleh kelompok luar negeri dukungan Amerika.

*Bagaimana kalau di tingkat lokal?*

Sangat jelas dengan kedatangan Hasan Tiro, dan dijadikan alat politik ulama untuk membesarkan partai Aceh, sekliagus untuk meraih dukungan pada pemilu 2009. Hasan Tiro dari kondisi manusianya dia sudah tidak memiliki kemampuan, jalan gak bisa lama, gak bisa bicara, tidur pakai infus, diboyong kesana kemari, dan ini yang besar hanya di Pantai Timur dan Utara saja, sebagian Aceh Jaya (Culang).

Kalau dari sisi lokal mereka pasti besar, menguasai, membesarkan dia, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa dia sudah curi start, alasan mereka itu kehendak rakyat kami tidak pernah menyuruh mereka membawa bendera, lepas tangan.

Penurunan bendera merah putih ini sebuah tanda bahwa mereka tetap kuat, PP 77 tentang lambang-lambang daerah, sebenarnya pemerintah sudah kecolongan PA, yang dimotori Irwandi cs, Coby kepada JK. Padahal kalau merujuk PP 77, PA tidak lulus verifikasi, sebab dalam pasal 2 PP 77, bahwa lambang-lambang daerah tidak boleh menyerupai lambang yang pernah digunakan separatis, ini hampir sama, tapi lulus juga. Pimpinan GAM Malik Mahmud kepada SBY-JK dengan sarat dan logo, dia marah masuk media, diterima juga di wapres sekarang. Kesempatan sekarang, abaikan kepentingan politik, didahulukan kepentingan negara.

PA, kehadiran Hasan Tiro di Aceh selama 11 hari, bagi PA, KRA dan mantan GAM dianggap sebuah keberhasilan dan tidak menutup kemungkinan even-even semacam itu akan diulang, terutama menjelang pencoblosan hari H, untuk menggalang semang ke Aceh. Solusinya adalah, pemerintah harus melarang setiap kunjungan warga negara asing untuk kepentingan politik di Aceh dengan seleksi.

Kemungkinan intimidasi, culik, teror, bunuh menjelang pemilu 2009 akan semakin meningkat seiring upaya mereka untuk mempengaruhi rakyat memilih PA.

#### *Bagaimana potensi konflik di kalangan masyarakat, ada Aceh RI – Aceh GAM?*

Jadi begini saya sampaikan, kekuatan mereka besar di pantai timur dan utara, sementara Ala dan Abas mereka kurang. Memang di Abas ada 30%, tapi selebihnya adalah kekuatan yang tidak menyetujui mereka. Kenapa mereka sekarang memiliki kekuatan, karena publik menanggapi mereka masih memiliki senjata, satu-satunya sebagai sumber akan menimbulkan konflik kembali adalah senjata leras panjang Ak 47 dan pistol, yang sering digunakan untuk tindakan kriminal. Jadi jangan salah kalau tindakan kriminal bukan hanya kepentingan ekonomi, tapi menjelang Pemilu 2009 akan lebih kepada kepentingan politik kekerasan.

Kalau dilihat dari permasalahan di atas mungkin ada cara yang mendekati supaya perdamaian di Aceh ini tidak semu, dari sisi pemerintah adalah mengingatkan mereka, tetapi ketika mereka sudah tidak diingatkan harus ada kebijakan yang tegas, sebagai proses yang merupakan kebijakan negara, bahwa di dalam pencegahan kedaulatan negara, akan menggunakan pendekatan mulai dari yang paling lunak, hingga pendekatan yang paling keras (itu pernyataan Presiden tahun 2007 pada waktu ulang tahun).

#### *Bagaimana dengan tindakan selektif yang harus diambil pemerintah/negara menghadapi dinamika di Aceh?*

Pendekatan kalau menurut saya, dengan pendekatan komprehensif itu yang lebih bagus, tetapi dengan titik tekan yang berbeda apa sebenarnya. Sebab berbagai pengalaman mengatasi konflik di Aceh, demikian sulit dan kompleks, 30 tahun sudah, sekarang dengan damai kalau masih ada niat seperti itu, pemerintah mungkin akan dapat membuat pilihan berbalik, dari damai bisa darmil, karena sudah begitu luas ruang yang mereka dapatkan.

Kalau Aceh ini akan membangun dengan baik, bukan membangun desa, membangun transmigran, kalau etno nasionalisme Aceh berjalan terus, itu akan dihabisi transmigrasi yang dari Jawa. Yang jelas sampai sekarang mereka sangat

benci terhadap orang Jawa, yang marga O akan jadi musuh dan diusir dari Aceh, karena itu karakteristik orang Aceh.

Keuangan, ketika taraf hidup dia sudah meningkat, padahal dia ditokohkan, dia akan melupakan. Konflik di Aceh lebih banyak disebabkan oleh karakteristik orang Aceh. Ketika di dalam komunikasi kemasyarakatan, si A kenal dengan camat, ketika camat mengenalkan dengan bupati, kepala desa ini kalau ada urusan tidak lewat camat langsung lewat bupati, dan seterusnya. Sehingga ada peloncatan prosedur, dilewati, sehingga timbul benih-benih konflik dan ini terjadi di Aceh dan Indonesia, sehingga bupati mengendalikan camat atas atensi dari kepala desa. Sehingga apa yang terjadi operasi BRR, BRA, pemberian ekonomi, semula dikendalikan, ini tidak akan ada perubahan kalau si A tetap duduk tanpa melihat fakta yang dilapangan.

*Sejauhmana BRR dan BRA dapat difungsikan sebagai pendorong ke arah perdamaian positif di Aceh?*

Dalam penanganan BRR, BRA dan sebagainya, yang penting adalah penanganan kurban konflik. Kurban konflik macam-macam, ada tentaranya, ada dari GAM nya, ada dari GAM yang menyerah duluan sebelum MoU, dan GAM yang menyerah sebelum MoU dianggap pengkhianat oleh GAM yang sekarang, itu juga merupakan sumber konflik. Bahkan mereka menyebutnya milisi, padahal dia tidak bersenjata, padahal milisi pengertiannya adalah sipil yang dilatih tentara dan dipersenjatai padahal tidak ada bahkan dan tidak punya senjata, justru mereka yang dilatih di Libiya dan punya senjata.

Tapi PETA membela daerahnya, membela negaranya, karena kewajiban, panggilan dan tanggung jawab dia, bukan karena TNI.

*Upaya untuk membangun ke arah perdamaian hakiki peluangnya seperti apa?*

Yang paling berat adalah, ruhnya MoU, di dalam ruhnya MoU yang paling berat itu adalah membangun rasa saling percaya, jadi ketika membangun rasa saling percaya yang harus diperbuat adalah bagaimana seluruh ucapan, tindakan dan perilaku semuanya menghindari konflik, mengarah pada damai. Menghindari konflik berarti menghindari permusuhan, berusaha untuk damai, bagaimana menjaga keamanan, orang tidak akan merasa damai kalau dia tidak aman, jadi damai tidak aman, konflik tidak ada permusuhan, solusinya adalah bangun kepercayaan disetiap lini kehidupan, terutama tokoh-tokoh yakinkan. Proses menyakinkan dari kedua belah pihak yang harus sangat dijaga di lapangan, makanya ada FKK (Forum Koordinasi dan Komunikasi).

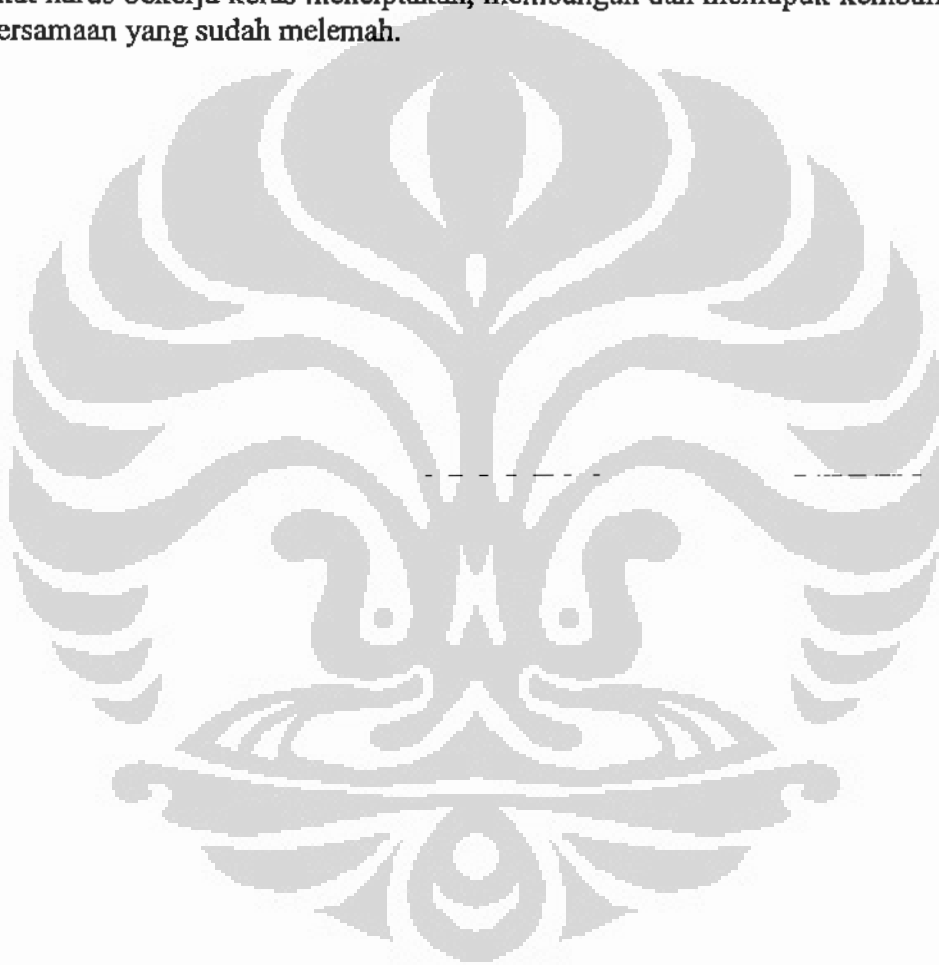
*Di Aceh sekarang sudah ada Parlok, yang dapat mawadahi perjuangan GAM melalui jalur politik, bagaimana Bapak melihat hal itu?*

Masyarakat Aceh ini bingung dengan kehadiran partai Aceh ini, memilih partai Aceh, kalau memang pasti ribut karena hiforianya, kalau partai Aceh kalah diapun akan ribut dengan kekecewaannya, menang dia bermasalah, kalah bermasalah karena akan membuat keributan. Kalau mau memilih partai lain juga nggak bisa karena terancam, bisa diculik, dibunuh, terbelah kecemasan, inilah masyarakat Aceh, ada sebuah karakter di Aceh ini yang sulit, dia lebih menikmati dengan teror itu, makanya ongkos damai lebih mahal dari pada ongkos konflik, cost nya

lebih tinggi, karena tidak berani lapor terhadap situasi, sudah jelas melanggar hukum, sudah jelas membawa senjata di depan mata, dia akan bilang “haha tepu (nggak tahu), karena apa, terancam, itu masyarakat pers pun terancam, ketika dia memberitakan hal-hal yang negatif dia langsung di telepon, diancam, lari dikejar, bahkan diculik, hal itu terjadi di Aceh.

*Bagaimana untuk peran pemerintah untuk menuju perdamaian yang positif di Aceh?*

Untuk menghindari perpecahan karena provokasi dari pihak-pihak yang menginginkan konflik Aceh terus hidup, maka pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bekerja keras menciptakan, membangun dan memupuk kembali rasa kebersamaan yang sudah melemah.



**Wawancara Dengan Informan L  
Langsa, 1 November 2008**

*Bagaimana Perdamaian kehidupan masyarakat Aceh dimasa perdamaian sekarang?*

Sebetulnya perdamaian, sih perdamaian, tapi kalau kita lihat GAM tingkat atas tidak pernah bicara masalah kelanjutan perjuangannya, tapi mereka masih melihat implementasi MoU sesuai dengan kemauan mereka apa tidak, kalau tidak sesuai mereka akan melakukan gerakan naik gunung lagi, tetapi itu kalau kita lihat, *pertama* senjata sudah diserahkan, tapi mereka tetap mengadakan penjagaan senjata apus, tapi dimana tempatnya saya juga tidak tahu, yang pasti arah ke barat.

*Kedua*, apapun konsep merdeka masih tetap ada sama mereka, tapi waktunya kapan saya juga belum bisa memprediksi apalagi sudah ada partai lokal, maka mereka tidak melakukan gerakan bersenjata, tapi politis. Maka mereka harus rebut di legislatif, sedangkan eksekutif sudah mereka rebut. *Ketiga*, jadi kalau kita kurang memberikan arahan pada rakyat, maka rakyat akan terkontaminasi, apalagi dengan adanya intimidasi, sekarang ada orang-orang non Aceh duduk disitu akan mendukung semua kegiatan, itu sudah terjadi sekarang aparat sudah tidak bicara nasionalisme sesuai integrasi. Tidak ada pembinaan ke masyarakat, yang dibina hanya pada tingkat pengurus ormas, seperti FKPP, LSM. Jadi pembinaan tidak mencapai sasaran, sekarang sikap apatis sudah terjadi mau merdeka, ya merdekalah sana yang penting saya masih bisa bertahan hidup.

*Keempat*, maka Pemda dan Pusat harus lakukan pembinaan untuk bisa menasionaliskan republik ini, karena sumpah Pemda sudah pudar. Bahasa di kantor-kantor sudah bahasa Aceh, kami bukan suku Aceh tapi kami bangsa Aceh dan suatu saat itu akan tercipta. Kami dulu bangsa dan suatu saat kami akan menjadi bangsa. Jadi arahnya tetap merdeka, kalau Hasan Tiro tidak melakukan perjuangan Hasan Tiro, maka akan timbul 100 Hasan Tiro untuk membuktikan bahwa Aceh kini bisa lepas, bisa merdeka. Itulah yang terjadi di lapangan, melalui pantauan individu, kelompok-kelompok dan kawan-kawan dari mereka yang sangat kelihatan intimidasi parlok di Pantai Utara. Jangan pilih parnas karena itu milik orang Jawa, tapi pilihlah parlok karena ini milik kita, partainya orang Aceh.

*Bagaimana peluang konflik internal di Aceh?*

Kalau kita lihat konflik-konflik yang terjadi karena masalah ekonomi, kalau orang sudah senang sudah malas, GAM yang banyak duit dan tidak dapat duit, di partai tentang nomor urut caleg, kemudian dari enam parlok, Partai Aceh lah yang paling dominan, mereka berjanji jika menang akan melakukan pembangunan besar-besaran dibantu 30 negara tanpa melalui poros Jakarta, sehingga ada ketergantungan diantara mereka. Sehingga jadi konflik yang ada. Kalau PETA sendiri, saya lihat banyak yang membina, tapi tidak ada kesepakatan dan koordinasi, sehingga masing-masing kelompok merasa besar padahal sesuai pasal-pasal boleh saja membentuk kelompok-kelompok dan mengeluarkan pendapat, seperti di Langsa ada Front Matahari, Front Laskar Rakyat, Front Anak Bangsa, Front Hubul Watani, Front Merah Putih, dan Front FPMP seharusnya disatukan

dan jangan saling mengklaim ini yang syah, itu tidak syah, yang telah mendaftarkan diri sebelum MoU pada Pemerintah, kami yang melantik Pak Gubernur Abdullah Puteh, tapi sekarang terjadi lagi kontra adanya front-front ini, yang berbeda. Sehingga terjadi konflik diantara orang-orang merah putih sendiri, dampaknya menjadi acuh tak acuh dalam perjuangan republik. Kalau PETA dengan KPA secara ideologi kita tetap bertentangan.

Saya kemarin baru ketemu dengan Partai Aceh Langsa, membicarakan agar partai saya jangan diganggu, akhirnya ada kesepakatan kami Partai Aceh tetap jalan.

*Pertemuan merupakan hal yang positif, bisa enggak dikembangkan pada kelompok-kelompok lain?*

Kalau FORKAB selama ini diam, biasa-biasa saja, kalau orang-orang itu macam-macam kita sikat saja lah. Kalau dulu sebelum MoU tidak mau maju, tapi setelah MoU nampaknya ada dana, maka banyak yang mau maju, malah saling berebut, waktu dapat dana saya juga diperiksa polisi, tapi sebenarnya perjuangan itu tadinya kita tidak mengharapkan uang, tapi bagaimana republik ini utuh. Tapi ternyata untuk Aceh ini, tetap masih seperti telur di ujung tanduk. Rasa silaturahmi tidak ada, front sama front mau saling perang kalau kami melayani kelompok sudah perang. GAM juga begitu ada yang nahan diri, ada yang beringas.

*Apakah silaturahmi bisa dibudayakan di Aceh?*

Saya bisa ajak bapak silaturahmi dengan GAM, tapi mereka kalau lihat orang baru dan tidak dikenal tidak mau bicara, sekarang beredar kaset-kaset yang menggambarkan perjuangan GAM dan saya ada kaset itu dikasih mereka. Jadi perjanjian itu orang atas bener-bener apa tidak. Tapi biasanya kita ini orang Aceh, janji ya janji jalan, perjuangan ya tetap perjuangan jalan. Jadi janji dan tipu di Aceh ini tidak bisa mulus seperti harapan. Mereka punya trik-trik, dia akan lakukan invasi, dan kemerdekaan yang diharapkan bukan batas Langsa Tamiang tapi sampai ujung Sumatra. Karena mereka kembali pada dasar pemerintahan tahun 1511 dibawah pemerintahan Ratu Safiafudin, panglima perangnya Alaidin Musa, bisa sampai menguasai sampai ke kerajaan baru di ujung Sumatra, dan itu akan dikembalikan, jadi walaupun Aceh merdeka ini akan melakukan invasi-invasi ke sebelah tetangga, jadi mereka tidak akan diam. Itupun tidak semua suku Aceh pingin merdeka, tetapi karena sudah intimidasi, doktrin untuk merdeka akhirnya seperti air jatuh di batu, akhirnya berlobang juga. Akhirnya saya lihat sampai sekarang tidak ada pembinaan ilmu-ilmu yang bersifat nasionalisme, dari Kesbang juga tidak ada. Sekarang demi jabatan berbahasa Indonesia pun tidak mau, padahal dulu orang merah putih sebelum MoU disitu sudah ada satu bentuk kelenturan merah putih baik dari tingkat NAD sampai ke tingkat kota dan kabupaten. Sekarang ada dua kepala dan agak berat ke kiri, karena Irwandi Gubernur dan Nasar Sira dua-duanya GAM. Sekarang dia bisa jadi kepala dinas, dimana saat sebelum Irwandi dia tidak punya kesempatan untuk itu bagaimanapun akhirnya penolong itu yang dijadikan idola.

*Bagaimana dengan permasalahan dendam bagi mereka yang pernah konflik?*

Kalau dendam, terutama dari bantuan finansial BRA, sekarang saya perut koyak hanya dapat 500 ribu, nanti kalau konflik lagi saya ikut bapak, biar saya embat sendiri mereka-mereka itu yang dapat banyak, mana perjuangan bersama kalau begitu, kalau kurban konflik, baik yang dibunuh TNI/POLRI atau dibunuh oleh orang yang tidak dikenal dia tetap salahkan TNI, nah itu cukup dendam mereka, macam mana cara dia tetap dendam. Karena dendam orang Aceh ini tidak akan berakhir, kalau dia nyata-nyata tahu dibunuh oleh GAM, maka dia akan dendam dengan orang yang membunuhnya, tapi kalau yang dibunuh oleh TNI, mereka ada yang ngompori GAM atau KPA, mereka olah tentang kekejaman TNI, maka dia lebih tinggi rasa dendamnya. Maka terjadilah cerita lama, perang sabil harus kita lakukan dalam rangka menghantam penjajah Jawa ini, penjajah republik ini. Jadi seperti panglima GAM ini, dulu bapaknya juga panglima ditahan di Jawa, sebagai napi, setelah dilepas pulang ke Aceh meninggal, sebelum meninggal pesan dalam amanahnya, teruskan perjuangan ayah, apapun hasilnya berhasil atau tidak karena itu amanah ayah dan saya yakin nantinya akan berhasil. Maka Aceh ini berat kalau kesejahteraan tidak bisa terjamin jadi konsep saya bagaimana Aceh ini bisa aman dimasa depan.

Adanya satu putaran asimilasi suku, putaran kalau saya lihat yang salah ini pihak guru, guru waktu dia sekolah dikampungnya, kemudian mengajar di kampungnya sendiri. Sehingga jiwa nasionalis tidak terpakai, tiap hari pakai bahasa daerah lagi, sebaiknya ada perputaran para pejabat seperti awal Pak Harto menjabat, dari Padang buang ke Aceh, dari Aceh buang ke Jawa dan seterusnya, termasuk guru-gurunya, sehingga di sekolah dia benar-benar menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang ada tamat SMA bahasa Indonesiannya tidak bagus, SD kelas lima di Bayen, saya ajak bahasa Indonesia tidak bisa berarti gurunya mengajar menggunakan bahasa Aceh. Maka ada baiknya diputar baik sipilnya atau gurunya, kalau TNI/POLRI mungkin sudah biasa, biar tidak mendoktrin sistem kedaerahan saja. Jadi kalau hanya doktrin-doktrin nasionalis di Aceh ini sudah berat, ini bakal tak didengar kalau cerita republik ini lagi.

*Bagaimana tokoh adat dan tokoh agama bisa mengambil peran positif dalam perdamaian yang diharapkan?*

Kalau dulu tokoh adat dan tokoh agama di Jawa Pak Harto, Pak Karno, yang namanya Kecik atau Imam, orang naik sepeda pun turun, sekarang kecik bebuih mulut, imam bebuih mulut tak didengar itu kan hanya teori tua peut. Misalnya Geuchik bicara masalah gotong royong, nah mau kecik gotong royong sendiri, ada yang datang juga enggak. Pak imam begitu juga, begitu ada yang meninggal orangnya seratus, begitu antar ke kuburan yang antar dua puluh, maka Pak Imam berdirilah disitu sendiri, jadi rasa segan itu tidak ada lagi di Aceh. Siapa ulama di Aceh ini yang disegani, sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu nampak Pak Imam saja, salaman cium tangan, sekarang apa itu Imam, zakat fitrah dia duluan yang banyak, kita dikasih beras murah. Apa itu geuchik bangdes-bangdes, jalan tetap becek. Jadi penghormatan sudah luntur. Kalau dulu ada duduk pak Geuchik orang hormat semua, sekarang tidak ada lagi sudah tidak ada lagi kepercayaan.

Pengangguran di Aceh cukup banyak, PT. Damar Siput total karyawannya PHK, tambang Langsa yang pengangguran bertambah, tukang babat rumput seminggu tiga kali kerja, mantan GAM yang nganggur banyak jadi kontraktor minta proyek



ke Pemda itu yang bisa yang tidak bisa seharian nongkrong di warung kopi, sambil menjadi pengamat politik dan ekonomi, apalagi harga kebutuhan naik, minyak susah didapat, semua kebutuhan didatangkan dari Medan, sampai sebutir telur ayam dan bebek tidak ada di Aceh, semua didatangkan dari luar, tidak pabrik di Aceh yang bisa menyerap tenaga kerja. Apalagi kalau NGO Asing sudah cabut dari Aceh, maka makin banyak pengangguran. Sebenarnya Aceh gampang, bagaimana mengenyangkan rakyat dulu, urusan perut tercukupi, karena dimana ada kemiskinan maka akan mudah di doktrin dan diarahkan, Geuchik kamu ngomong bisa karena perut kenyang, Pak Imam sekarang sudah bergaji, tapi apa yang kita dapat, selop Jepang pun terpaksa kita angkat. Masyarakat di kota kita lihat megah, cerah, tapi sebetulnya isinya enggak. Pembinaan perlu dana, prasarana, perlu jaminan keamanan agar bisa menjangkau sampai ke desa-desa karena mereka tidak begitu mengerti tentang Indonesia, bagi mereka yang penting nyaman agar tidak diganggu oleh GAM, maka apapun namanya kita ikuti saja. Sementara pembinaan ini belum terjadi.

*Bagaimana fenomena partai lokal dan parnas di Aceh?*

Caleg parlok rata-rata tidak cari gaji, tapi cari kekuatan dan kekuasaan lain dengan parnas, apakah motivasinya untuk republik atau hanya ingin cari gaji di situ, belum pasti yang parnas pasti nasionalis lain dengan Partai Aceh. Kalau menang berarti perjuangan dapat dilanjutkan lewat politik. Apa ada kerjasama Pemerintah Pusat dengan parnas. Bagaimana bentuknya, setidaknya bagaimana agar parnas masih dapat tetap eksis. Sekarang di Aceh "Napeng Na Suara".

*Bagaimana dengan peran lembaga yang ada dalam proses perdamaian di Aceh sekarang?*

Masih banyak masyarakat yang tidak makan, masih banyak yang pakai daun lontar, sedangkan di desa sudah tidak ada yang di garap, petani menjerit, biasa sawit harga 3.000 sekarang jadi 300, sehingga banyak sawit yang tidak dipanen. Karena untuk ongkos metiknya saja tidak bisa tertutup. Tapi kalau pegawai tidak terasa, karena kerja berat atau ringan tetap saja dapat gaji. Tingkat ketua SPSI saja gak ada beras. Kemarin masih saja 30 ribu untuk beli beras, mereka diajak ke kirikan ikut saja yang penting keluarganya bisa makan daripada nganggur, kalau konflik lagi masuk GAM saja ngerampok pun jadi, dari pada stres gini, memang gila yang belum, kalau tingkat alur II, 60% nganggur, berjualan juga sudah susah. Bagi saya yang penting, persaudaraan itu dulu, nasionalisme dulu yang dijaga, disamping pembinaan jiwa-jiwa NKRI diberikan perbaikan ekonomi, setidaknya mereka bisa makan kenyang. Dinas-dinas seperti kalau mau memberikan bantuan harusnya turun ke bawah, buat pendampingan, bimbing mereka sampai berhasil. Aceh susah kalau disuruh maju, karena dikit-dikit syariat Islam, sementara orang Aceh bertabur cari hiburan di Medan, kita lihat tempat hiburan dan hotel-hotel di Medan, kalau hari sabtu, minggu isinya banyak orang Aceh. Seharusnya perlu digalakkan pariwisata di Aceh, dan kalau kita kelola banyak menghasilkan duit, orang luar bisa datang ke Aceh, emak-emak bisa jualan pisang goreng, jadi ekonomi bisa hidup. Tapi hal itu susah karena banyak terbentuk oleh adat istiadat, tetapi kita galakkan agraris dan maritim yang betul, ini kalau ada orang luar masuk diganggunya, padahal mereka ke Medan juga cari itu. Kalau pegawai tidak ada masalah, karena banyak petani dan pegawai swasta yang perlu kita tingkatkan kehidupannya.

Sebenarnya, orang kita harus ada batasan bagaimana pariwisata yang sesuai dengan Islam, jangan assalamu alaikum kepala ngelompok keluar tapi pintu tetap ditutup, mestinya mari masuk ke ruang tamu. Sekarang di Aceh sudah mulai banyak dibuka kolam renang, bahkan di Banda Aceh hotel sudah ada, kolam renang di depan mata artinya di lobi hotel. Di Langsa sudah ada tiga kolam renang yang setiap harinya membludak pengunjungnya, berarti mereka haus hiburan, biar orang dari luar Aceh, masuk ke Aceh membawa uang. Langsa kelihatannya megah, mobil dan kereta mewa, itu kan rumah-rumah PNS, tapi berapa banyak penderitaan rakyat yang bukan PNS yang hanya mengandalkan tenaga, bahu dan cangkul ini yang terlantar di desa-desa, bagaimana Aceh mau aman. Di Jawa kelihatan megah dan mewah, itu uang kita di bawa kesana, lalu apa bedanya Jawa dengan Belanda, sama-sama penjajah.

Kalau menurut perhitungan saya 60% rakyat Aceh itu tidak kerja, bukan tidak mau kerja, mana janji GAM mau kasih 2 Ha, sampai sekarang tidak ada ini juga jadi api konflik. Apa pemerintah bisa mengeluarkan dana ekstra, apa sudah cukup hebat, kalau pemerintah manggil negara asing untuk membantu perdamaian itu murni untuk membantu, tidak punya niat lain saya rasa orang ngasih pasti mau menerima, orang menanam pasti mau panen.

Konsep yang dikasih uang itu bukan ukuran "Malom" (ada lagi), namun perdamaian tetap tidak ada, kami mau merdeka, tapi didiklah seperti Timor Raya. Caranya gurunya jangan suku setempat, buka pendidikan gurunya dari luar, mereka anti Jawa, ya jangan orang Jawa dikirim suku lain, jangan sampai ada image batak kafir kirim batak yang jago ngaji yang Islamnya bagus, lulus pesantren.

#### *Bagaimana FKWI ini bisa terbentuk?*

Saat demo-demo atas nama FPMP, tahun 1999, setiap hari suku Jawa diusir-usir karena saya suku Jawa, akhirnya kita bentuk paguyuban suku-suku Jawa, seperti di Merande, Alurdua, orang-orang sudah membuat lubang-lubang jadi barang-barang kalau malam dimasukkan ke lubang. Termasuk untuk bersembunyi dan kalau mereka lari, maka barang-barang tetap tersembunyi, akhirnya saling silaturahmi, dan sepakat untuk melakukan perlawanan karena negara kita belum bubar, jadi kita masih punya hak untuk tinggal dimana saja, di wilayah Indonesia, akhirnya kita buat legalitasnya lewat akta notaris dan kita daftarkan ke Kesbang Humas, dari Sungai Raya sampai Tamiang, dan kita sudah siap melawan, dan jika kalah pertahanan kita buat di Langkat dan Tamiang, sampai sekarang FKWI masih eksis baik di Langsa, Atim, Tamiang sampai ke Langkat, yang masih banyak suku Jawa, akhirnya punya kekuatan sekitar 10.000, saya punya KTP anggota saja 4 gini dan sampai sekarang masih ada sama saya, belum saya buang.

Ketika situasi mulai panas, orang FKWI Abdi Waluyo dan Siregar, diculik sama mereka di Para Tenggara ditangkap di Telaga Mengku, dan Pak Min dibunuh disimpang kapal kemudian asya lapor pada AMM di Hotel Kartika, yang menculik Tengku Puteh dan sudah nego kepada keluarga akhirnya saya sampaikan, kalau dalam waktu 1 x 24 jam tidak dilepas maka kantor saya serang/gempur, dan atas nama front minta ijin untuk demo di kantor AMM biar tidak dibilang anarkis, saya buat surat ancaman kalau orang-orang saya tidak dilepas maka kantor AMM akan saya bakar forum komunikasi warga Jawa.

*Bagaimana solusinya agar tidak terjadi konflik lagi di Aceh?*

Kalau bisa GAM dan KAPA, Front semua di bubarkan, kemudian Hasan Tiro dihibau supaya keluar dari mulutnya statemen, bahwa dengan MoU Helsinki, GAM sudah bubar, kalau kemarin perdamaian gencatan senjata, penyerahan senjata dan kembali ke NKRI lebih sulit, ini hanya perlu mengatakan dari petinggi-petinggi GAM bahwa GAM dan KPA bubar, demikian juga pemerintah mengatakan Front dan PETA maupun FORKAB bubar, semua kembali sebagai warga masyarakat yang akan secara bersama-sama membangun Aceh agar perdamaian enak dirasakan oleh kami semua.

Karena mereka bilang "GAM masih ada Bang belum bubar, kalau bubar pemerintah mau berdamai dengan siapa, dan kami teap akan melakukan perjuangan semampu kami." Kalau itu bisa dibubarkan semua mungkin kedamaian hakiki. Dengan adanya KPA, maka GAM lebih kuat, rasa solidaritasnya tinggi dan senasib sepenanggungannya tinggi mereka bilang kami ini tetap GAM sudah terlanjur basah, nah bagaimana pemerintah bisa mengubah basah ini menjadi kering, agar bisa kembali.

Kalau saya, yang penting jangan ada konflik lagi, buat industri-industri dan pabrik-pabrik yang memungkinkan, biar kita semua bekerja dan dapat mencari makan untuk keluarga agar rakyat bebas dari nganggur. Kesimpulan, bagaimana republik pemerintah pusat ini dapat memajukan pendidikan, dengan menambah sejarah nasional dan segera realisasikan ALA dan ABAS, kalau perlu jangan ada propinsi-propinsi yang bernama Aceh, Syariat Islam perlu digalakkan dengan syiar-syiar agama yang membangun akhlak, kalau perlu melalui guru-guru ngaji dan mereka dibayar termasuk guru-kunci mesjid di Aceh yang kini yang terjadi hanya bisa baca arab, tapi arintya tidak tahu.

Kami disini takut dan gamang kalau sampai Aceh ini lepas, apakah pemerintah pusat memikirkan kami, akan lebih parah dan kita sayangkan kalau kekacauan ini merupakan bagian dari pemilihan legislatif dan untuk kepentingan politik, sehingga pemerintah pusat ragu-ragu terhadap Aceh, maka selalu bilang Aceh aman. Sebenarnya orang-orang republik yang ada sekarang kalau sampai terkontaminasi dengan pemikiran mereka yang sudahlah kemerdekaan Aceh, tinggal sebatang rokok lagi, karena selama ini hanya orang-orang republiklah yang menghambat, dan menurut pendapat mereka, oh itu cuak, itu cuak, sehingga kalau orang-orang front dan republik sudah pro dengan mereka, secara demokrasi apa tidak mungkin Aceh ini minta referendum dan memilih merdeka.

*Sejauh ini bagaimana kurban konflik yang masih belum kembali ke tempatnya dan masih hidup di daerah pengungsian?*

Bagaimanapun kurban konflik Langsa meninggalkan luka dan kenangan yang pahit, mereka yang dipaksa atau terpaksa menjadi pengungsi sangat terpukul dan mengalami trauma mendalam, mungkin trauma tersebut akan terobati, selain dengan saling memaafkan juga para pengungsi tersebut, yang sebagian besar orang kita jawa diperbolehkan kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dengan suasana damai. Karena ditempat itulah kelahiran dan tempat mereka dibesarkan, sekaligus tempat mencari nafkah dengan berdagang dan bertani. Tapi banyak saudara kita jawa yang mengungsi dan tidak berani kembali kerumahnya karena keadaan tidak aman.

**Wawancara Dengan Informan M  
Langsa, 25 Februari 2008**

*Bagaimana kehidupan, para pengungsi transmigrasi yang kembali ke Aceh Pasca MoU Helsinki?*

Sebagian dari mereka sekitar 100 KK, sudah kembali ke Aceh difasilitasi oleh Bupati Bener Meriah. Tapi kehidupannya juga masih memprihatinkan karena tidak mendapat tanah yang cukup untuk digarap dalam rangka mempertahankan hidupnya. Sementara untuk kembali ke daerah asal mereka tidak berani karena alasan keamanan.

*Sejauhmana keterkaitan antara MoU Helsinki dengan dinamika Pemerintahan di Aceh.*

Dengan telah disyahnkannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, seharusnya secara otomatis butir-butir MoU tidak lagi harus dijadikan acuan oleh Pemerintah Aceh sekarang dalam menjalankan kegiatan dan kebijakan pemerintahan dalam pembangunan, namun kenyataannya hingga saat ini, elit pemerintahan NAD masih cenderung untuk menjadikan MoU sebagai dalih dalam menentukan kebijakan dan bahkan yang terjadi adalah masih adanya kelompok atau pihak-pihak yang tidak atau belum menyadari unujuk berintegrasi ke dalam pangkuan ibu pertiwi NKRI.

*Bagaimana keberadaan Wali Nanggroe di Aceh?*

Tentang Wali Nanggroe, belum ada keputusan, pernah dirapatkan tapi belum ada keputusan atau kesepakatan, Wali Nanggroe rencananya akan dikawal oleh pasukan khusus, bukan dari TNI/POLRI tapi dari GAM eks Libya dan dipersenjatai.

*Transformasi konflik diperlukan di Aceh, untuk mentransformasikan perbedaan yang ada menjadi sebuah langkah menuju damai?*

Ya, di Aceh perlu dibentuk semacam forum bersama untuk menjembatani kelompok-kelompok yang berseberangan di Aceh, misalnya forum menuju masyarakat damai yang akan menganggap pertemuan-pertemuan bersama dalam rangka merencanakan dan merealisasikan konsep-konsep perdamaian, melalui orang-orang terdekat kemudian melebar pada lokasi-lokasi lain, kemudian dibangunlah silaturahmi dan mencoba melupakan masa lalu untuk menyambut masa depan Aceh damai.

**Wawancara Dengan Informan N  
Tapak Tuan, 10 November 2008**

*Bagaimana karakter orang Aceh?*

Ada satu penyakit orang Aceh, penyakit keturunan yang sudah mendarah daging yaitu "Tipu Aceh", sebaiknya diketahui oleh orang-orang di luar Aceh terutama para elit (Penyakit tersebut sudah mewabah, terutama dikalangan GAM), untuk mencegahnya :

*Pertama*, jangan berikan sepenuhnya, karena kepercayaan yang diberikan itu akan menghilangkan kewaspadaan kita dan kita akan ditikamnya dari belakang. *Kedua*, untuk melihat penyakit aneh tersebut, pertama jangan sekali-kali percayai pikiran dan ucapannya tetapi lihat dari tindakannya untuk mengukur orang Aceh. Selama hal tersebut dikesampingkan tapi hal tersebut realita.

*Potensi kedepan seperti apa?*

Terjadi kelunturan Nasionalisme, karena disana ada persoalan perut dan lapar, maka siapapun akan menerima tawaran-tawaran yang dapat mengkompensasi tuntutan perut. Hal itu dilakukan GAM sehingga banyak orang-orang kita yang menyeberang kesana dan itu bukan salah mereka dan harus kita pahami karena tentara saya di gebuk, polisi sudah tidak jelas.

TNI yang ada di Aceh 50% apatis, 30% sudah mulai bermain-main dengan KPA hanya 20% yang murni, kenapa dia masih kukuh NKRI karena dia bukan orang Aceh.

Banyak yang murni 20% tapi kepedulian mereka tidak berarti kalau Polisi sudah 70% berbisnis dengan GAM, sudah menjadi kawan GAM. Salah satu sumber GAM di Aceh adalah Ganja dan Sabu yang diselundupkan dari Malaysia dicampur dengan gula dan barang-barang lain dimana di pelabuhan di Aceh mereka selalu lolos untuk jalan dan ini sebuah realita. Boleh diturunkan team khusus untuk melihat kebenaran yang kita sampaikan.

*Dampak domino Mou Helsinki ?*

Sudah bias kemana-mana, contoh masalah partai, masyarakat Aceh mayoritas tinggal di pedesaan, tinggal 37% yang hidup di kota-kota yang diperebutkan Parnas dan 9 s/d 19 % sudah ada orang-orang GAM yang ada ditengah-tengah kota, jadi yang terisi hanya 25% yang diperebutkan Parnas, sementara senjata mereka tetap intimidasi karena masyarakat di desa-desa tidak merasa aman didalam menentukan politiknya.

Sebuah ilustrasi dianggapnya disebuah panggung ada kampanye dari NKRI yang diwakili malaikat-malaikat dengan segala kebaikannya dan panggung lain dari GAM yang diwakili iblis, pilih saya kalau tidak maka anak kalian menjadi yatim, rumah kalian menjadi abu. Cukup dengan kata-kata tersebut, besok paginya setelah Pemilu maka menanglah iblis itu. Kenapa bias menang, padahal rakyat sama sekali tidak menginginkan dia karena kalau tidak pilih dia masyarakat tidak merasa aman.

*Perdamaian sekarang bagaimana Bapak melihat ?*

Lihat dari sebuah kata, kita damai tanpa didampingi oleh kata aman, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat temporer, paduan kata damai ada kata aman yang letaknya di depan sebagai subyek menjadi induk kalimat aman dan damai bukan kalimat damai dan aman. Jadi aman dulu baru damai apabila untuk memperjuangkan kedamaian kita tidak aman, lebih bagus kita robek-robek perdamaian ini demi untuk memperjuangkan keamanan.

Sekarang di permukaan damai, tetapi di bawah merdeka tetap ideologi mereka yang diperjuangkan.

*Sejauhmana potensi konfliknya ?*

Potensi konflik cukup tinggi, karena mereka sudah terlegitimasi bahwa mereka sudah tidak punya senjata di mata Internasional, kalau ada yang punya senjata berarti itu oknum walaupun itu ditangan KPA tetapi itu kriminalitas dari warga Negara RI.

Jika perlu kita ulangi apa yang dilakukan GAM, kita juga punya potensi kalau sudah konflik kita buat lagi perdamaian dimana kita juga akan mendapat amnesty itu adalah hal yang mustahil, tapi kadang-kadang terlintas dibenak saya karena sekarang kita bingung tidak tahu solusi. Solusi Ala Abas sudah dipotong oleh pusat, sementara ada sebuah permainan-permainan di Aceh.

*Pertama*, dalam Pemilu sekarang ada program POLMAS dibawah kendali Kapolres, tetapi yang menjadi Polmas ini sama dengan yang menjadi Polisi hutan dan Pol PP 99% berdasarkan rekomendasi KPA, maka dalam Pemilu akan terjadi kecurangan-kecurangan.

*Kedua*, melihat susunan KPU Aceh juga rekomendasi dari KPA dan dikuasai KPA, dan *ketiga*, toleransi, seluruh KPU terdiri 5 dilantik di Istana Presiden, untuk Aceh dilantik oleh Irwandi 7 orang, semua Panwas sudah selesai dan dilantik oleh Irwandi. Disitu ada diskriminasi hukum, PETA terjadi pengikisan sehingga perlakuan dan kelunturan nasionalisme semua akibat pemerintah pusat, semua itu karena kebijakan-kebijakan pusat.

*Selain konsep button up, obat apa yang bisa menyelesaikan Aceh?*

*Pertama*, jangan berikan kepercayaan sepenuhnya, kepercayaan yang selama ini ditangan kita lalu diambil dandipindahkan ke tangan dia, selama ini mereka pengganggu sekarang ini diambil pengganggu dikasihkan ke kita. Jadi sekarang posisinya terbalik, orang-orang yang nasionalitas dianggap pengganggu sedangkan orang-orang yang mantan pemberontak dipercayai. Ini yang terjadi sehingga ada penikaman dari belakang, yang tahu ini kita dan pusat tidak pernah tahu atau tidak mau tahu karena hasil karya terbesar Kalla adalah perdamaian maka dipeliharalah ini padahal ini sangat temporer, gerak di bawah dan dipermukaan sudah lain, jadi seperti gunung es.

Waktu Irwandi berhari raya di kampungnya dikawal Polisi, senjata AK nya diminta ditambahkannya ke atas, setelah itu dia kembalikan dan dia bilang ini senjata dari kami dulu yang kami rampas sambil mengembalikan senjata tersebut (modus).

*Kedua*, masyarakat sekarang menjadi bingung dan diberikan jawaban oleh GAM dengan sebuah doktrin. Kita inilah yang benar kalau kita tidak benar tidak

mungkin diberikan fasilitas seperti ini, sekarang kita diampuni karena pemerintah RI keliru menghukum kita dulu, sesudah diampuni kita direhabilitasi diberikan bantuan lagi. Ini timbulnya membenaran dari GAM yang dimaklumi oleh masyarakat, itulah doktrinnya bahwa GAM itu benar dan kita disalahkan.

*Dalam situasi sekarang, konteks teknisnya seperti apa itu ?*

Melalui pemberdayaan, kalau mereka dapat diberdayakan kenapa kita tidak, kita harus mempunyai konsultan seperti mereka.

Strategi mereka dalam Parlok, Caleg di tiap dapil dipenuhi bahkan sampai 12 orang kemudian calon jadi dari mereka, calon pelengkap biasanya saudara-saudara dari orang-orang Pornas. Sedangkan caleg Pornas untuk tiap Dapil paling hanya 1 atau 2, tujuannya untuk memecah suara sehingga Caleg Pornas yang jagonya kuat sudah diruntuhkan dengan strategi rekrut memfamili ke Parlok baik melalui kekeluargaan maupun uang dan ini strategi konsultan.

*Dalam menyewa Parlok ada istilah satu toko banyak toko ?*

Betul, dalam strategi dipermukaan mereka seperti pecah dan yang ditampilkan PA saja, tetapi dari 6 Parlok tersebut dapat menampung keberagaman dan didalam bersatu. Terbalik dengan kita, dipermukaan bersatu didalam hancur, jadi kita cukup rapuh disbanding mereka, memang itu tipu Aceh.

Analisa kita, maka tujuan mereka ingin menguasai kelembagaan jadi pasti, kelembagaan di Aceh akan dikuasai mereka. Pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi merekalah yang akan menguasai, akhirnya keputusan kelembagaan adalah keputusan fraksi yang merupakan keputusan kelembagaan atau pleno, demokrasi kita kwanritas bukan kwalitas, sehingga keputusan kelembagaan adalah keputusan mereka. Untuk tingkat pusatnya mereka akan berikan ke Golkar, jadi iming-iming Golkar dengan berkoalisi malah membahayakan karena memberikan ruang gerak kepada merekalebih luas, yang mendapat kepercayaan dari pemerintah ditambah lagi oleh sebuah partai yang selama ini berhasil di Negara kita yaitu Golkar. Dan ini koalisi yang dibangun bukan menguntungkan Golkar malahan menghancurkan kita karena dia memposisikan diri keputusan diatas NKRI tetapi dibawah tetap keputusan mereka. Berarti dia berkoalisi dengan partai pemerintah seolah-olah mereka itu murni NKRI padahal baju didalam lain, tetap idiologi GAM.

*Dari kemenangan Parlok, sejauhmana peluang mereka untuk merdeka, apa melalui referendum ?*

Tidak, mereka langsung minta merdeka, kenapa karena mereka kan sudah menang makanya saya katakan GAM tidak akan minta referendum tapi langsung merdeka. Melihat tokoh yang terlibat dibalik perdamaian Kosovo yakni, Marti Artisari serta negara-negara Uni Eropa, tokoh tersebut merupakan "tokoh perdamaian Aceh". Kosovo pada tanggal 17-02-2008 mendeklarasikan kemerdekaannya pada sidang parlemen, setelah parlok memenangkan pemilu secara sah, 5 jam kemudian disusul oleh pernyataan Uni Eropa yang mendukung kemerdekaan Negara Kosovo dengan mengirim 2000 polisi dan ahli hukum, bahkan dalam pernyataan Amerika mendukung Kosovo karena dianggap keinginan rakyat secara demokratis, sehingga Pemerintah Serbia tidak bisa

berbuat apa-apa, apalagi sampai membuat perang kembali atas Kosovo. Melihat kenyataan damai antara Kosovo dan Aceh, maka besar kemungkinan Aceh juga mencapai kemerdekaannya bila (Partai Aceh) memenangkan Pemilu 2009 dengan mutlak "Aceh akan merdeka".

*Bagaimana tentang pembelahan kelompok di Aceh ?*

Masyarakat jadi terbelah-belah, masyarakat yang trauma miskin dan bodoh akan menganggap bahwa GAM sudah benar sebab kalau tidak benar tidak akan seperti ini maka secara terpaksa atau suka rela dukungan untuk mereka semakin bertambah sedangkan kita yang NKRI semakin tersisihkan.

*Apakah kedepannya akar permasalahan semakin membingungkan ?*

BRR dan BRA juga merupakan kesempatan memberikan modal pada mereka untuk merdeka karena didalamnya mereka dan konsentrasi pembangunannya di daerah pantai timur sementara Ala dan Abas dikesampingkan yang sampai sekarang masih ada pengungsian, itu merupakan diskriminasi.

*Bagaimana bantuan keuangan yang diberikan kepada KPA, PETA dan masyarakat kurban konflik?*

Memberikan bantuan keuangan yang banyak kepada propinsi NAD dan bantuan dana kurban konflik atau kompensasi kepada masing-masing kelompok yang dari sisi jumlah sudah menimbulkan kecemburuan, hal itu justru bukan membantu bahkan sebaliknya dapat dikatakan sebagai racun yang menebarkan bibit-bibit konflik.



**Wawancara Dengan Informan O  
Langsa, 29 Oktober 2008**

*Bagaimana Bapak melihat konflik di Aceh Paska MoU Helsinki?*

GAM termanjakan dengan fasilitas dan ada pembagian dana, justru itu yang menjadi masalah, sehingga saling bunuh-bunuhan seperti kejadian di Atu Lintang, Aceh Tengah, masalah milisi dikomporsi, sekarang ada penyerbuan kantor KPA di Atu Lintang, Aceh Tengah, 5 orang terbunuh diduga ALA bermain, dampak itu ternyata hampir ada 400 KK transmigrasi, keluar Aceh karena ada kekhawatiran dituduh politi dan balas dendam. Sedangkan pemicu konflik di Aceh secara umum :

*Pertama*, adanya BRR dan BRA. BRR masih banyak menimbulkan masalah, waktunya hampir habis tapi masalah banyak, seperti tumpang tindih pemilikan rumah, ada yang kebanyakan dan ada yang tidak dapat, belum terima sampai sekarang. Kemudian yang saling krusial, adalah masalah yang ditangani oleh BRA di kantor banyak laporan, ada di Pidie, Kecamatan Glenggang sampai sekarang belum terima bantuan apapun, Aceh Timur juga banyak. Pidie paling banyak, menurut pengakuan mereka memang belum tersentuh, sehingga itu yang menjadi masalahnya. Pendataannya tidak tepat dan bantuan belum tepat sasaran, untuk pendataan pernah diserahkan lembaga independen, camat, sekarang Nurjuli dengan KPA timbul permainan, yang lain seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, sosial politik, pendidikan.

Yang paling berpotensi menimbulkan konflik adalah yang ditangani oleh BRA, rakyat tahunya menyalurkan uang, pengakuan BRA walaupun Yusuf Kalla sudah tanda tangan bawah lainnya BRA narik uang itu, kami serahkan uang untuk pelicin. Sementara rakyat kurban konflik tidak mau tahu sekarang banyak kantor BRA yang diserbu, di Bireuen.

Internal GAM ada juga yang menyerah sebelum dan sesudah MoU, ada yang pro dan kontra terhadap Helsinki, namun yang kontra sedikit termasuk keluarga saya, termasuk teman satu tahanan dulu, karena petinggi GAM yang menghasilkan dari keadaan itu tapi tidak menyantuni kebawah. Ada dua sumber masalah di Aceh, yaitu BRR masalah perumahan, dan BRA masalah dana bantuan kurban konflik.

KKR sampai sekarang ini kan belum, tapi penggodokan sering, tapi sampai sekarang asyik saja diseminarkan. tapi sebenarnya KKR nasionalnya kan belum, untuk dipaksakan di Aceh sandarannya kemana, apa bisa dibuat secara khusus di Aceh, sandarannya UU No. 17 UU PA, sampai sekarang belum.

Kemudian timbul masalah Diyat/Restitusi kalau diyat dalam kasus Islam 100 unta, atau kita minta fatwa kepada ulama. tetap namanya diyat, tapi mengingat kondisi standar di Aceh, bisa nggak, mampu nggak pemerintah membiayai itu, memang sementara diyat dikasih dalam 10 tahap. tiap tahun 3 juta, namun itupun ada yang tersendat.

*Sejauh ini berarti banyak permasalahan di Aceh Paska MoU Helsinki, khususnya terkait kurban konflik?*

Kurban konflik yang tidak ikut-ikutan, ada keluarga GAM, ada keluarga TNI/POLRI. Masalah banyak klaim dari masyarakat terkait pemberdayaan

ekonomi rakyat, masalah rumah, kurban-kurban yang terlantar, diyat untuk orang cacat, kemudian Tapol/Napol, kalau saya sebagai Napol sudah terima bantuan, tapi orang tua saya belum. Jadi, yang jadi masalah, pengakuan Nurjuli katanya sudah tapi faktanya orang mengadu lewat hukum Ham malah di meja saya sudah ada sekitar 112 berkas.

*Secara umum potensi konflik di Aceh masih cukup rentan?*

Wah masih, jadi perdamaian itu masih semu, perdamaian negatif, tapi walaupun begitu kalau kita lihat seara riil seperti pengakuan petinggi-petinggi GAM, Hasan Tiro. Cuma masalahnya banyak sekali kantor-kantor KPA yang di bom, kantor-kantor PA di bakar, disini juga banyak kejadian, jadi kita nggak tahu apa ya kira-kira permasalahan ini persepsi kita yang mengganggu mantan GAM itu, apakah lawannya dulu apakah FORKAB, apakah milisi, atau ada pihak lain lagi.

*Bagaimana peluang untuk adanya rekonsiliasi di Aceh?*

Sebenarnya begini, dengan lembaga yang sudah ada sekarang ini seharusnya sudah bisa, cuma masalahnya perlu ditambah pendekatan agama. Karena KKR belum jelas, KKR itu kan harus pendekatan adat, agama! Memang di Bener Meriah sudah ada, diadakan oleh mereka diadakan perdamaian, cuma masalahnya selama ada kepentingan pihak ketiga, maka hal tersebut susah dilaksanakan.

*Untuk mengatasi suasana seperti itu, cara yang mana yang tepat?*

Caranya, kalau tidak dicekoki oleh kepentingan lain, karena ada pihak-pihak tertentu yang enak sekali cari duit di Aceh, apabila Aceh tidak aman, dan ada untuk keperluan politik diuntungkan, ada kekhawatiran kalau damai langgeng di Aceh, ada suatu pengusutan pelanggaran HAM di Aceh.

*Apakah pelanggaran HAM hanya dapat dikenakan pada aparat, dalam kasus di Aceh?*

Syah-syah saja, HAM itu untuk dikenakan pada GAM, cuma masalahnya ada suatu ketentuan di MoU, adanya pengadilan HAM di Aceh, itu juga timbul masalah sekarang. Masalah pengadilan HAM di UU No. 11 UU PA pengadilan HAM yang akan diberlakukan di Aceh, adalah pengadilan sejak UU itu disahkan, jadi ini juga menimbulkan perbedaan persepsi, karena menurut GAM harus ada pengadilan HAM yang berlaku reproaktif (surut). Ada kekhawatiran mereka dipermasalahkan, kalau memang pihak GAM itu susah kalau kita bawa ke peradilan HAM, kalau ke pengadilan kriminal boleh, karena bukan hanya lembaga yang diaku. Yang kenakan pengadilan HAM adalah lembaga resmi yang mengadakan preser ke rakyat itu ketentuannya. Sedangkan GAM ini resmi nggak, kalau resmi kan sudah merdeka, berarti GAM ini rakyat diadili di pengadilan kriminal, meskipun ia melanggar HAM, GAM ini kan rakyat.

*Dalam Amnesti Salernasional, bahkan ada gambarnya Bang Amir, disitu pelanggaran HAM bisa ditujukan pada TNI/POLRI, tapi juga bisa di tujuan pada GAM?*

Memang GAM melanggar HAM, cuma proses penyelesaiannya berbeda.

*Dalam menuju/proses ke perdamaian positif, dengan melihat dinamika di Aceh seperti ini, pola apa yang tepat untuk diterapkan?*

Sebenarnya begini, kalau KKR itu memang ada dan resmi, ada juga melalui pendekatan agama potong sapi, bagus, yang penting jangan pada kepentingan lagi dari pihak lain. Karena kalau kacau perdamaian di Aceh, berarti pemerintah salah mengambil langkah menyalahi konstitusi.

*Pendekatan seperti apa yang tepat untuk mendukung keberhasilan tersebut, apa bisa dibentuk forum bersama yang di dalamnya duduk dari berbagai komponen?*

Ya, sebenarnya dengan adanya perdamaian-perdamaian sudah cukup, contoh di Aceh Tengah etnik Jawa dan Gayo sudah berbaur dari dulu, enggak ada gesekan, sudah malas rakyat dengan konflik, karena kebun terlantar. Perdamaian melalui pendekatan agama dan adat sudah bagus selama tidak ada kepentingan-kepentingan itu yang jadi masalah.

Selama semasih adanya kekhawatiran-kekhawatiran, masalahnya ada suatu kekhawatiran yang berlebihan tentang itikad, apa GAM itu betul konsekwen dengan perdamaian, dan kalau saya lihat GAM juga punya kekhawatiran kalau orang lain tidak konsekwen dengan perdamaian, ini yang menjadi masalah, “ada kecurigaan yang berlebihan” karena melihat fakta penggranatan. Tapi saya yakin, bahwa GAM itu sebenarnya betul, konsekwen dengan perdamaian.

*Bagaimana dengan adanya dominasi, antar kelompok di Aceh?*

Ini kan mau pemilihan legislatif, memang hal ini nampak, khususnya di pedalaman, nampak ada suatu kelompok-kelompok tertentu, menggiring masyarakat/ada di intimidasi saya dengar, ini juga untuk kepentingan politik, karena di Aceh agak spesifik baru, lebih-lebih dibumbui dengan isu. Seperti ini, kedatangan Hasan Tiro, jadi ada stiker, pamflet, GAM itu tidak mengaku dia yang buat “jadi Hasan Tiro datang, rakyat senang merdeka udah dekat” jadi mengganggu GAM sendiri stiker itu, jadi hal ini siapa yang buat. Penurunan bendera merah putih, itu boleh jadi rakyat sendiri, karena yang mengambil kemarin itu ada yang enggak pernah datang ke Banda Aceh, ditawarkan makan gratis, dia eforia dengan pengetahuan yang minim, mungkin banyak faktor.

*Dengan melihat banyak faktor, bagaimana Aceh ini bisa menuju proses perdamaian yang positif?*

Ya itu tadi, konsepnya masing-masing pihak apakah pemerintah plus TNI/POLRI maupun GAM, maunya mereka itu adalah tidak ada lagi kekhawatiran, saling curiga, kemudian itu demi untuk rakyat. Kalau masih ada curiga bermasalah terus Aceh ini, tapi fakta dilapangan, yang sering diserang adalah kepentingan mantan orang-orang GAM seperti partainya.

Rencananya besar dalam benak saya, keberadaan KPA itu kan sebelum ada partai, itu lembaga, sekarang partai sudah ada apa KPA itu baru bubar, setelah orang itu punya perwakilan di dewan, ini saya masih ragu, ini kalau menurut saya setelah ada partai yang syah secara hukum, partai sudah ada jadi untuk apa KPA ini.

*Ada opini bahwa parlok di Aceh ini seperti satu toke punya banyak toko, seperti apa itu?*

Oh ya, memang ada isu, maksudnya mereka mendirikan ini muara akhirnya satu, tapi nampaknya saya lihat enggak juga karena kebetulan saya terlibat dalam verifikasi. Tapi enggak tahu juga namanya politik, kan dalam sedetik bisa berubah kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan, karena politik. Ya, jadi makanya payah ini Aceh kita prediksi, kesimpulannya sementara. Perdamaian di Aceh itu, kalau rakyat ingin tetap tenang damai karena sudah betul-betul trauma dengan masa lalu, semoga KPA, FORKAB, PETA punya positif thinking, dan ada pihak-pihak tertentu apakah ALA dan ABAS, berjuanglah sesuai koridor hukum, jangan pengaruhi rakyat seperti mengingat masa lalu, buru sana buru sini, jadi jangan dipaksa, itu yang menyebabkan perdamaian akan terganggu.

*Bagaimana untuk membangun budaya damai di Aceh, seperti apa teknisnya?*

Ya, pendekatan agama, adat, cuma yang bermasalah secara formal lembaganya ini masih pasif.

*Bagaimana kaum intelektual?*

Ya, saya rasa mereka itu ingin sekali adanya ketenangan, kan pada masa konflik terbatas untuk mengekspresikan ilmunya.

*Apa mereka bisa dijadikan barisan depan untuk mediasi, dalam rangka menetralkan masalah-masalah yang ada di masyarakat?*

Ya, cuma masalahnya, umumnya rakyat ini rasa percayanya pada intelektual yang terjun ke lembaga formal ini sudah payah, tergeser, jadi kadang-kadang sama ulama juga rakyat sudah bermasalah, ada krisis kepercayaan.

Kita ambil yang obyeknya di Aceh menyangkut syariat Islam. Syariat Islam ini kan sudah menimbulkan gesekan-gesekan juga, apa dikalangan LSM ada yang anti malah dengan syariat Islam, dan dari birokrat, kan syariat Islam yang diatur dalam 3 Qanun, (12,13,14) jadi rupanya akibat cambuk, investor agak tersendat masuk ke Aceh agak berlebihan karena 3 Qanun itu beratas personal, untuk orang Aceh yang beragama Islam, tapi ada kekhawatiran yang non Islam yang mempertanyakan cambuk itu sehingga tersendat, jadi ini mempengaruhi gubernur, sehingga gubernur mengundang mukim-mukim seluruh Aceh di Banda Aceh, dan disarankan pelanggaran terhadap Qanun itu dilakukan dengan pendekatan adat, jangan dicambuk dan kalau dicambuk juga agar mass media itu jangan membesar-besarkan, ini mengganggu lajunya pertumbuhan ekonomi, karena investor segan masuk ke Aceh. Jadi juga timbul masalah, seolah-olah gubernur anti terhadap syariat Islam sedangkan ini sudah disahkan oleh dewan, sehingga 3 Qanun direvisi untuk disempurnakan, dan sampai sekarang belum disahkan, lama ngendap di Biro Hukum Pemda, ini bermasalah juga. Jadi dinas syariat agak kecewa juga.

*Kendala investor masuk ke Aceh disayangi, interpretasi pada syariat Islam, juga sejauh mana jaminan keamanan pada usahanya, sesudah 2009. Hal lain mereka belum percaya bahwa Aceh kondusif untuk mengembangkan usaha?*

Ini salah satunya, KPA, secara resmi bilang kami sudah tidak punya senjata lagi, kalau memang ada senjata liar itu kan tugas polisi, memang faktanya apapun ceritanya banyak sekali terjadi penculikan, pemerasan dan yang jadi masalah kurbannya juga orang asing seperti baru-baru ini adalah perwakilan Bank Dunia, ini yang jadi bermasalah, cuma kita heran kenapa polisi susah mengusut, ini yang tidak jelas, kita itu lamban. Apa memang polisi tidak sanggup meredam itu, ya libatkanlah TNI. Memang senjata-senjata itu betul mengganggu sekali.

Selalu ini yang jadi masalah, apakah dana itu yang disalurkan BRR, BRA, sering sekali oknum pejabat mengajukan bantuan, padahal itu hak kurban konflik atau kurban tsunami. Jadi kalau sering mengajukan bantuan, jadi bantuan itu konotasinya pasti dikurangi juga, jadi syah-syah saja kalau dipotong, padahal itu kan hak. Sehingga rakyat yang sudah tahu jadi brutal, jadi diserbulah itu, dan kadang-kadang dana itu memang belum turun, tapi karena krisis kepercayaan rakyat maka diserbulah itu kantor-kantor BRR, BRA. Ini juga jadi masalah, itu harus diluruskan padahal yang seharusnya diterima rakyat itu hak, bukan bantuan.

*Apakah secara teknis perlu untuk membangun budaya damai, yang bersifat praktis dan kerakyatan, seperti olah raga, UKM yang dapat melibatkan semua unsur?*

Itu belum pernah, saya rasa cocoklah itu, dilibatkan, dibaurkan, memang seperti pembukaan kebun sawit untuk mantan polan jadi memang harus ada kebijakan dibaurkan. Program pembauran bisa diberi contoh yang sesuai dengan situasi Aceh sekarang, baik dilihat dari fungsi, Pemda, Negara maupun tokoh masyarakat. Sebaiknya tidak ada kepentingan lagi masalah di Aceh mudah-mudahan Aceh jadi damai.

Menguat perdamaian di Aceh, belum kokoh sudah diganggu jadi kapan waktunya, saya yakin sekali kalau gak ada kepentingan, gak ada masalah lagi, dan satu lagi adanya senjata liar, itu kinerja polisi lah, kita pegang aja statemen dari GAM, kami gak punya senjata, kalau ada mantan anggota kami, itu bukan anggota kami, kita pegang saja komitmen GAM.

Memang itu betul, perlu kebijakan-kebijakan, tapi namanya menyekap, menculik, apalagi pihak asing, itu saya rasa sudah tidak bisa ditolerir lagi, itu menculik, memeras pengaruhnya ke rakyat kecil dan pelaku-pelaku ekonomi.

*Peran LSM di Aceh seperti apa?*

LSM di Aceh, idialisme, motivasinya dulunya dimanjakan dengan uang, banyak sekali dulu beredar uang di Aceh, tiba-tiba sekarang ini, lembaga-lembaga dunia sudah mulai meninggalkan Aceh, sementara dulu terlena dan termanjakan dengan fasilitas, sehingga apa aktivitas LSM asing ini sudah mulai berkurang, sehingga nampak sekali mereka lesu, meski tidak semua begitu.

*Reintegrasi tetap dilakukan tapi dinamika belum mengarah kepada hasil yang diharapkan, atau mungkin karena keterbatasan dana?*

Ini ada satu masalah, dana yang dari pusat itu kadang-kadang terlambat cerita orang BRA, Yusuf Kalla sudah acc, tapi yang dibawah-bawah minta pelicin, orang ini tidak berani mengeluarkan uang pelicin, takut diusut KPK, sehingga tersendat, sehingga timbul masalah ke rakyat. Rakyat tidak mau tahu itu. Akibatnya perdamaian di Aceh masih rentan, yang jadi masalah rakyat kurang percaya lagi pada pemerintah, sehingga ada pejabat juga sudah tidak dipercaya. Aceh perdamaian tidak tercipta kalau masih ada kepentingan.

*Prediksi perdamaian ke depan, kalau dilihat seperti itu?*

Saya yakin, perdamaian itu akan tetap jalan, karena mantan GAM realistis akan keadaan, mau apa, misalnya kita akan begini, kan dunia internasional enggak dukung kita. Makanya kalau adalah kekhawatiran baha ini akan ini, seperti inilah contohnya jika partai Aceh eksis dan menang maka akan minta merdeka, itu saya kekhawatiran yang berlebihan, kita lihatlah itu butir-butir MoU enggak mungkin.

*Sebenarnya persepsi merdeka bukan harus dipersentasikan lepas dari NKRI?*

Betul, merdeka perasaan juga merdeka, self government juga merdeka, satu lagi secara internal di Aceh mentang-mentang pejabatnya tidak mendukung perdamaian di Aceh, itu yang menjadi kunci, banyak terjadi penggerogotan uang rakyat, ini yang jadi masalah di Aceh, setiap pejabat maunya adalah langsung jawab moralnya, kasihanlah itu, ini kan dalam skala kabupaten dengan propinsi yang lain.

Kita juga konflik, kalau suku gayo kalah kita juga tidak akan maju-maju, dan akan selalu di sekat kepentingan kita.

Di Aceh Tengah juga ada suku Gayo asal Aceh, ada asal Batak ada suku asli. Jadi ini juga masalah, jadi kalau ini naik, disikat kubu ini. Jadi di Aceh yang terpikir bagaimana membuat kekuatan kelompok, tidak memikirkan rakyat, jadi dalam kelompok saja asilng sikut, kemudian sambil aji mumpung semua sama seperti kebudayaan Gayo itu, "Didong" (melingkar) tariannya geser sama sikut. Kalau menghujat orang lain, lewat syair-syair yang dilantunkan "jadi falsafah "dadong", gerak kanan, gerak kiri, jadi ibaratkan sikut kanan, sikut kiri dan pantun itu dilontarkan untuk menghujat kelompok suku lain". Jadi dalam pembangunan. Kalau naik kelompok ini, daerah dialah yang dibangun, dan itu potensi konflik, masalahnya pembangunan rakyat yang dirugikan.

*Sebenarnya lem apa yang paling bagus untuk merekatkan kelompok-kelompok yang berseberangan?*

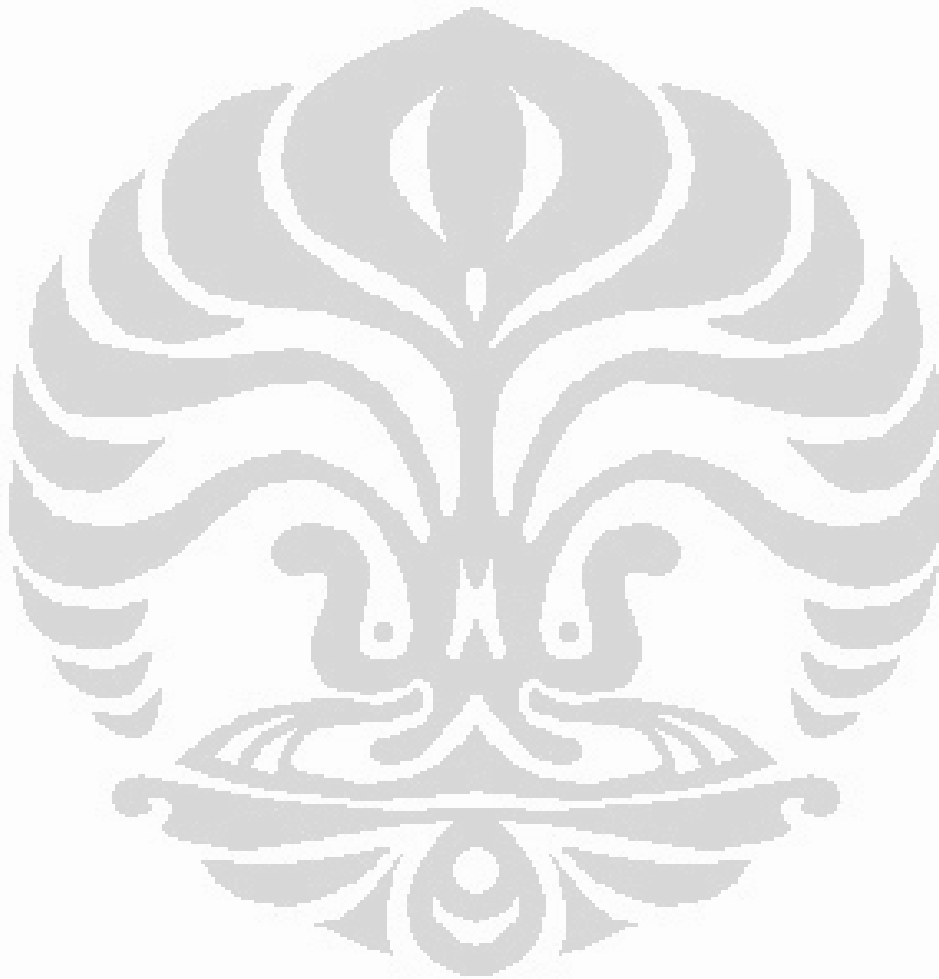
Bagaimana upaya kita menyakinkan rakyat, dengan pendekatan adat, agama, jangan ada kepentingan, jadi aman kita hidup sesuai kepentingan masing-masing, jangan hanya mengatas namakan rakyat karena saya tahu, itu kan kebanyakan famili saya itu saya tahu motivaisnya.

Berapa ribu nyawa di Aceh ini yang jadi kurban, jadi tunda dulu itulah supaya rakyat itu aman. Perdamaian positif masih memerlukan proses panjang, sejauh masih ada kepentingan-kepentingan, perlu *good will* untuk membangun budaya

damai dan mengurangi miss komunikasi, dengan membangun sesuai kondisi daerah masing-masing.

Pendekatan adat dan agama, kedua lembaga tersebut kurang ada kekuatan, jadi KKR itulah nanti harapannya yang sudah ada sumber hukum. Pendekatan agama masih berupaya inisiatif, enggak seganlah itu orang yang punya kepentingan. KKR tidak akan egektif sejauh tidak ada kesamaan persepsi itulah karena rasa saling curiga.

Perlu komunikasi yang baik diantara kelompok-kelompok yang masih berseberangan yang ada di Aceh, untuk menghilangkan aroma buruk konflik.



**Wawancara Dengan Informan P  
Langsa, 25 Oktober 2008**

*Bagaimana kondisi Aceh, Paska MoU Helsinki?*

Setelah MoU, Front bagaikan anak haram, kami ragu dengan keberadaan merah putih di Aceh. Hukum tidak berjalan dan tidak maksimal, meski berdasarkan pasal 30 mengadakan perlawanan, tapi tidak ada arti paska MoU terutama di Tk I dan kota/kabupaten sampai dengan kecamatan, seolah-olah ada pihak nomor satu, di Aceh yaitu pihak GAM, KPA sekarang. Kita sedih karena kita tersisih sama dengan ayam kehilangan induk, apalagi kekuatan terbesar disini adalah kekuatan rakyat bukan TNI polri maka maunya pemerintah harus ada desakan khusus yang netral, jangan hanya mendengarkan satu pihak, dia mengatakan Aceh aman. Tapi intimidasi masih berjalan, perampokan, pembunuhan pelakunya orang KPA semua, mantan GAM, gak ada anggota PETA, semua mereka mayoritas. Perlu penegakan hukum, kalau dulu orang kita dipukul orang GAM seperti Alaidin sampai masuk rumah sakit tapi tidak ada pihak yang dapat ambil sikap bahwa itu salah, tapi sekarang sudah mulai bagus.

Prinsip MoU Helsinki mereka dibawah NKRI ternyata mereka masih pakai lambang singa dua dan identik dengan GAM, kemudian masih berlaku saya Panglima Sagoe, saya Panglima wilayah hal itu sebenarnya tidak etis. Karena sudah ada MoU Helsinki harus ada reintegrasi yang benar, ini tidak, malah masih ada sampai sekarang orang ini kita ini dianggap pengkhianat oleh pemerintah Aceh, sementara kita ini orang-orang yang cinta republik sementara berbalik kami yang teraniaya di Aceh, meski tidak secara fisik, tapi seara moral teraniaya. Yang dulu orang-orang duduk dikedai kopi seolah-olah najis melihat kita. Sementara sebelum MoU kita bagaikan raja, jadi kita ngomong apa adanya aja, kalau seandainya KPA salah tangkap, PETA salah, ini tidak salah mereka selesai sudah. Seolah-olah dia super power, dia punya power yang bagus. Jadi hal tersebut belum berlaku reintegasi yang sebenarnya. Dulu Pemda membuat penataran-penataran wawasan kebangsaan, sekarang tidak ada, sudah krisis, tidak fokus, jangan dari TNI dan POLRI, tapi Pemda, karena mereka dilantik dengan atribut burung garuda, meski bupati mantan GAM bukan dengan kepala singa tidak memandang siapa dia meskipun mereka berbasis GAM tapi mereka tidak, kalau TNI tidak berbuat semua orang sudah tahu jadi saya nyatakan krisis wawasan kebangsaan di Aceh.

*Apa masih ada konflik di Aceh?*

Kalau yang mengatakan tidak ada konflik di Aceh, oh itu salah mereka hanya mendengar. Kalau mau tahu konflik di Aceh turun ke lapangan paska MoU masih konflik, kami dimusuhi sama mereka, kalau kita memang orang NKRI. Jadi sudah solid dan menghormati MoU, kita tidak menganggap mereka musuh, tapi sebaliknya mereka yang menganggap kita musuh. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang pertama masalah penegakan hukum, kedua kalau ada penculikan dan perampokan sampai hari ini masih terjadi di Aceh dan mereka minta tebusan. Jadi kalau pemerintah jangan lamban mengatasi ini.



Hasan Tiro datang ke Aceh bukan berarti dia tulus pada NKRI terbukti tidak ada atribut bendera merah putih. Kalau tulus dia mestinya instruksikan hal kita sudah damai, meskipun semua bendera PA, seharusnya pasang juga merah putih karena kita sudah damai, seperti kejadian di Banda Aceh, di mesjid, biasanya ada bendera merah putih kok tidak ada, yang muncul bendera PA disitu. Jadi kalau kita kehadiran Hasan Tiro tidak tulus tidak hanya diucapkan saya tapi perhatikan di lapangan, tidak lagi mengatakan kita lokal referendum dan merdeka. Seandainya PA menang, apalagi asing sudah datang.

*Konsep apa untuk mengatasi persoalan di Aceh?*

Ada dua sistem, yang pertama, antara GAM dengan RI harus ada konstruksi yang permanen tentang damai berarti tidak ada dusta di kedua belah pihak. Kedua, pihak-pihak GAM dan seluruh anggotanya dilapangan tampil dengan reintegrasi yang benar, tidak ada manusia super di Aceh ini, sama kita tidak ada beda karena kita sudah damai.

*Fenomena parlok di Aceh seperti apa?*

Parlok, persoalannya syah-syah saja, tapi jangan intimidasi, berdemokrasi secara sehat, intimidasi masih terjadi dilapangan, angkat risiko dengan tergelarnya pemilu di Aceh.

*Bagaimana dengan perubahan gerakan senjata ke gerakan politik yang dilakukan GAM?*

Itu otomatis, itu fakta, mereka tidak mungkin dapat melawan dengan senjata, maka mereka berjuang mengumpulkan sebesar-besarnya legislatif disetiap kabupaten, kota sampai ke tingkat I, kalau legislatif sudah mereka kuasai, tinggal mengambil kebijakan dalam DPR, berarti mengedepankan untuk referendum dan dapat merdeka.

*Prospek perdamaian hakiki di Aceh seperti apa?*

Perdamaian di Aceh tidak ada sebuah keikhlasan dari pihak mereka khususnya Hasan Tiro cs (Malik Mahmud, Zain Abdullah, Bahtiar Abdullah) saya rasa pemerintah pusat ikhlas, untuk membuktikan penghentian pertikaian ini.

*Kegiatan apa yang dapat dibangun untuk menyatukan Aceh RI dan Aceh GAM?*

Sebenarnya kalau kita mau jujur Aceh ini bukan milik suku Aceh, tapi milik semua suku yang ada di Aceh, berarti milik orang Aceh, sebagaimana orang Aceh hidup layak di Jakarta atau daerah lain. Jadi kalau ada asumsi Aceh milik suku Aceh saya juga orang Aceh, saya juga suku Aceh, tidak berarti Aceh adalah milik saya.

Aceh milik semua etnis yang ada di Aceh, kita Bhineka Tunggal Ika. GAM bilang semua orang Aceh mendukung perjuangan mereka itu hanya bahasa mereka, sedangkan orang Aceh hanya sekitar 4 juta yang pro kepada separatis hanya sebagian kecil, mereka tidak sadar bahwa masih banyak orang yang cinta republik. Kenapa Pemda dan Pemerintah Pusat justru menganggap seakan-akan kita yang cinta NKRI sebagai pengkhianat dan tersisihkan, malah pemerintah

sekarang menjadikan mereka yang berkhianat terhadap negara sebagai anak kandung, sedangkan kita seperti anak tiri dan ada juga anak haram.

*Perdamaian yang diharapkan seperti apa?*

Kita sebagai warga negara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bermartabat, mari kita capai perdamaian hakiki, perdamaian ini bukan hanya milik orang Aceh, tapi milik semua bangsa di dunia. Jadi tidak hanya dengan tanda tangan saja, tapi di lapangan tidak sesuai, percuma saja. Menurut saya pemerintah Indonesia sudah kecolongan satu langkah sudah buat perdamaian dengan separatistis, apalagi MoU Helsinki tidak ada instrumen yang permanen, mana yang boleh dan tidak, disini masih ada diskriminasi hukum. Masyarakat selalu berdiskusi dengan komunitas GAM, tidak ada spesialnya pemerintah menyatakan GAM sudah damai dengan pemerintah, sudah selesai, sedangkan kita mayoritas masyarakat yang cinta republik belum ada salah satu mediator, atau pihak-pihak khusus yang menyatukan pihak kami dari PETA dengan pihak yang bertikai seperti GAM, yang menganggap kami musuh dan sebaliknya, sampai hari ini kami belum ada MoU dengan mereka.

*Dalam rangka mediasi, siapa yang bisa menyatukan antara yang separatistis dan anti separatistis?*

Kalau pertemuan antara pihak GAM yang sekarang sudah berubah KPA, dengan kami dulu yang namanya FPSG dan sekarang menjadi PETA. Kami juga mengharap apa dari pihak-pihak pemerintah, dan kita tidak mengacu ke asing, karena ini persoalan dalam negeri. Jangan sekali-kali mereka mengatakan kita ini milisi, sementara senjata tidak punya, dan tidak sedikit orang-orang kita yang jadi kurban, banyak mereka yang punya senjata, mereka itulah milisi dan pemberontak. Padahal yang berbuat mereka. Apakah itu ada muatan politis untuk menonjolkan kami saya rasa itu tidak fear. Kenapa kita yang hanya kenal dengan tentara, masyarakat yang tidak melawan kepada negara dikatakan milisi. Kenapa tidak ada satu LSM yang menyatakan bahwa senjata yang mereka miliki setelah MoU adalah ilegal, kenapa yang dituding ini pasti PETA. Sementara kami tidak punya senjata, tapi kalau kita mampu akan membuat rakitan untuk bertahan.

*Kalau kita lihat, sudah ada lembaga yang menangani Paska Helsinki?*

Apapun bantuan asing, dan NGO sekalipun belum bisa menyentuh orang-orang yang pejuang NKRI seperti PETA, semua mengarah ke mereka, apalagi nominasi di BRR, Komaruzaman, dengan panggilan amponman itu juga elit politik GAM yang ditanam disitu, tidak ada orang PETA yang ada disitu. Kalau lembaga adat, Aceh lah yang sungguh permanen, mereka ada LAKA (Lembaga Adat Aceh), disitu tergabung orang-orang yang mengerti persoalan agama, masalah adat istiadat, sejarah, tapi mereka tidak pernah dilibatkan dalam penyelesaian masalah Aceh, sekarang saya melihat masalah Aceh sifatnya terkolak-kolak secara umum dikatakan Aceh sudah aman, tapi secara fakta, boleh silahkan datang ke Aceh sendiri.

*Secara teknis program apa yang tepat untuk membangun budaya damai di Aceh?*

Program pertama, keikhlasan, yang kedua harus ada pertemuan baik pemerintah, GAM, masyarakat ALA dan ABAS, PETA dengan separatis. Sekarang yang belum selesai di Aceh yaitu orang-orang PETA dengan orang-orang KPA, sampai hari ini belum ada sentuhan yang menyatukan dua elemen ini belum ada sampai hari ini belum ada.

*Bagaimana perkembangan PETA kedepan?*

Kalau seandainya persoalan PETA kedepan, kita harus bangga dan jujur. Kita orang-orang yang berjuang dari barisan rakyat yang cinta RI tidak benci bagi mereka yang ingin memisahkan diri dari NKRI, tapi kita melihat setelah beberapa tahun MoU ini, satu-satunya harapan kami, mengharapkan pemerintah pusat atau mediator-mediator lain agar bisa menyatukan kami, agar tidak ada pertikaian-pertikaian yang berkepanjangan lagi, ini sudah jadi segitiga konflik, malah GAM sudah bisa duduk bareng sama TNI, di warung-warung kopi mesra, kami dari barisan PETA tidak bisa duduk bareng dengan GAM padahal sudah damai. Berarti kita juga sudah hilang akal tidak bisa menjelaskan seperti ini yang terjadi di lapangan.

Apapun perubahan di Aceh, kita tetap konsisten sesuai pasal 30 ayat, UUD 1945 kepada NKRI, kita melihat sekarang tidak ada yang mampu melindungi orang-orang PETA termasuk TNI, secara institusi tidak mungkin mereka bertahun-tahun melindungi kami meski secara hati nurani mungkin lain.

*Melihat fenomena Aceh sekarang, kira-kira seperti apa Aceh kedepan?*

Kita relatif, yang pertama, kepulangan Hasan Tiro ada dua versi meskipun dia warga negara asing, tapi dia suku Aceh yang sudah meninggalkan Aceh sekitar 30 tahun, dia kembali ke Aceh dengan kelengkapannya sah-sah saja dia pulang ke Aceh, tetapi disisi lain kalau dia pulang ke Aceh, lebih membuat persoalan di Aceh tidak stabil. Saya rasa tidak ada kapasitas bagi dia untuk pulang ke Indonesia.

Kita melihat masih ada kegiatan sendiri, kita tetap eksis, kita melihat, menyikapi bagaimana MoU itu bergulir di Aceh, kita hanya mengevaluasi secara pribadi masing-masing.

*KPA bisa membentuk partai, apa PETA tidak punya niat buat partai lokal?*

Kalau PETA membentuk partai lokal, saya rasa kita sudah punya pamas dan banyak yang baru, tapi untuk membuat partai lokal tidak punya dana, tidak segampang GAM mengumpulkan dana di lapangan membentuk partai lokal. Mereka masih bisa datang door to door dan dari pajak nanggroe. coba kalau KPA datang ke Pemda mereka dihormati.

*Melihat dinamika tersebut, sejauhmana potensi konflik di Aceh, Paska MoU Helsinki?*

Masih banyaknya tindakan intimidasi dan kekerasan di Aceh yang nampaknya belum segera diselesaikan secara bijak dan tuntas. Ada beberapa hal yang diprediksi dapat merusak perdamaian di Aceh. Seperti isu kesetiaan pada NKRI, banyaknya senjata liar yang beredar di Aceh, masalah pembubaran GAM dan PETA, FORKAB, kompensasi yang tidak adil, konsolidasi masalah parpol lokal.

**Wawancara Dengan Informan Q  
Langsa, 2 Nopember 2008**

*Di Aceh, dari luar nampak damai, setelah masuk ke dalam ternyata konflik itu ada?*

Pertama dari Aceh, mengapa Aceh sulit selesai persoalan banyak faktor-faktornya. Pastinya dilihat 5 hal sebagai berikut :

*Pertama*, tidak berperannya ulama, bahkan ulama sudah masuk politik praktis. *Kedua*, mahasiswa yang ditunggangi sejumlah uang oleh para elit politik untuk menyuarakan tentang kepentingan dia, dimana mahasiswa berbuat cenderung untuk kepentingan pribadi, menyangkut uang, karena dia butuh biaya pendidikan.

*Ketiga*, para elit politik, tokoh-tokoh Aceh yang tinggal yang mengelabui masyarakat tentang informasi tipuan tentang kharismatik seorang tokoh. *Keempat*, piranti hukum yang ada ikut melakukan secara pembelaan, karena tidak menegakkan supremasi hukum sesuai dengan aturan, terjadi karena sektor politik yang berubah. Karena Kapolda diminta oleh Gubernur sehingga secara psikologis akan berusaha untuk mempertahankan jabatan.

*Kelima*, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, dimana masyarakat tidak memahami tentang konflik politik imbasnya, begitu mudahnya dipolitesir pemikiran-pemikiran masyarakat awam, sehingga mereka melakukan kegiatan sebenarnya mereka tidak tahu apa yang dia lakukan.

Ulama, kenapa tidak berjalan, dulu Aceh dikenal sebagai Tanah Rencong, Serambi Mekah, malah lebih tertib, aman. Tapi sekarang setelah adanya lembaga syariat Islam, tidak dibarengi dengan syiar. Mahasiswa hanya dicekoki politisi, untuk kepentingan dia, dia membuat semacam propaganda itu yang besarnya, gampangnya, masyarakat di intimidasi, digertak, sehingga tidak berani melakukan perlawanan dan melakukan secara sporadis.

Betapa menderitanya masyarakat kita yang ada di pedesaan dengan harga-harga komoditi yang separo, sementara pajak nanggroe masih tetap ada, saya nyatakan bahwa ada oknum polisi yang terlibat didalamnya, pertama modal, kedua membuat sektor mafia seperti kota-kota besar. You berbuat, nanti kalau ada apa-apa, you lari kesana, jadi kami.

*Dinamika potensi konflik muncul karena apa?*

Kalau saya melihat, yang pertama, keterbelakangan wawasan akibat tingkat pemahaman politik rendah, maka masuk dari sektor itu, maka gampang dia lakukan, propaganda, intimidasi dan manuver-manuver politik untuk mencapai tujuannya.

Kalau di pedesaan, siapa bilang hari ini tidak ada intimidasi dan mereka patuh, karena dipedesaan tidak ada yang bela saya, harapan mereka adalah polisi, tapi hari ini polisi dimata masyarakat Aceh minim sekali di dalam melakukan kerjanya, dan yang kita sampaikan dapat kita lihat, dapat kita survey.

Saya melihat, ketika partai-partai PA menang waktu pemilihan gubernur, dia datang bawa granat. Asalamu'alaikum, Tengku, walaikum salam, terus dia bilang begini, "nyo teuku kukubake," dengan pakai bahasa daerah artinya ni tengku, maka saya taroh ini sebentar, jawab oh saya gak mau oh jadi kalau gak mau,

kayak mana yang maunya, bawa pulang aja, boleh saya bawa pulang, tapi kalau tidak terpilih seperti apa yang saya sampaikan, ini saya kembalikan pada kamu. Jika dia tidak menang, maka dia akan kembali akan dia ledakkan, atau ditembaknya masyarakat, siapa masyarakat. Saya berani dihadapan siapapun mengatakan, bahwa TNI, diharapkan dapat melakukan pembelaan terhadap masyarakat, tidak langsung, misalnya di desa-desa terisolir untuk ditaruh pos-pos disitu, jumlah kecil sekitar 6/7, sehingga ketika mereka terancam, terganggu keamanan dan kenyamanannya dia bisa melapor, tapi ini pemerintahan tidak mau. Bagaimana di sebuah daerah konflik, kalau tidak ada jaminan keamanan. Aceh sepuluh tahun ke depan, tidak akan bisa nyaman dan tentram, pasti apalagi menghadapi ekskalasi pemilu 2009 bulan April.

*Bagaimana Bapak melihat adanya banyak kelompok-kelompok yang ada di Aceh?*

Persaingan kelompok sangat kental, pada prinsipnya kita perlu tindakan preventif, harus ada pos-pos, bahwa disitu adalah tempat akhir pengaduan masyarakat, untuk tidak bergolak. Tapi hari ini, mereka mau tidak mau harus membela PA, atau parlok, kalau tidak nanti dia marah dan mereka tidak akan aman, karena saya tinggal di pedesaan, di kaki bukit, di pojok hutan, pada siapa mereka akan melakukan pengaduan. Tapi kalau ada pos-pos TNI di tempat-tempat rawan, saya yakin Aceh ini aman.

*Apakah ada perbedaan resepsi terhadap perdamaian di Aceh?*

Jelas beda, kalau kita menghalalkan perdamaian, proses apa bisa lahir perdamaian helsinki, dimintakah keterwakilan masyarakat, dimintakah ulama, dimintakah mahasiswa tertentu saya elit politik, tidak, jadi siapa hanya orang-orang yang nota bene sekarang kita lihat orang DPD, DPR yang berada di Jakarta, kenapa mereka kan tidak melihat bagaimana di dalam kampung saya, ketika dia mendengar sebuah persoalan di mass media, elektronik, oh kacau kampung saya, sengsara warga saya, maka dia menyuarakan secara spontanitas tanpa melihat lapangan, tanpa dia melihat situasi dan kondisi seperti itu. Kami memahami bagaimana kultur dan idiologi maka kami merah putih, menyebar di parnas. "Tujuan akhir dari mereka yang harus diwaspadai adalah MERDEKA"

Dengan kepulangan Hasan Tiro, waktu ke Banda Aceh, apakah dia sholat, dia orang Islam, yang mana kita tahu secara turun menurun orang Aceh kuat sekali dengan agama, tapi kenapa dia tidak sholat.

Ketika berada di parlok, saya sendiri melihat, ketika mengucapkan assalamu'alaikum pun itu dibisikan oleh Zaini Abdullah, lihat kampung halaman, parlok kampung siapa, dia kampungnya di Pidie sana Tiro.

Mengapa di ketika Hasan Tiro datang ke Aceh, bendera PA yang dibawa kemana-mana, itu kan sama curi start dimana hari ini belum dibolehkan oleh KPU lokal maupun nasional, kita tidak boleh melakukan kampanye terbuka, mengapa KPU, elit politik diam, tujuannya apa.

He masyarakat Aceh, pilih PA kalau kau senagn dengan saya melawan itu pada orang yang punya pengetahuan, jangan membuat program pada orang yang tidak punya pengetahuan mereka tidak tahu apa-apa, ini kan sebuah kekeliruan yang terakhir dia ucapkan Allahu Akbar 3x, kemudian bilang thank you. Kenapa bila begitu tidak asslamu'alaikum lagi, maka bagi orang yang punya

wawasan/pengetahuan dia itu sudah enggak ngerti lagi agama Islam, secara psikologis bisa kita uji.

Kata Zaini Abdullah yang coba saya artikan harapannya Aceh seperti daerah-daerah lain yang sudah merdeka, daerah-daerah lain itu kan negara, jadi harapannya ke depan Aceh harus sama dengan mereka, bukankah itu melanggar MoU, tapi siapa pemimpin-pemimpin kita yang mau teriak siapa elit-elit politik kita yang mau teriak bahwa ini adalah start kampanye lebih awal yang secara terbuka.

Maka kalau kalian bicara, lawanlah audien yang punya wawasan, karena ketika kalian bicara di depan orang-orang yang tidak punya wawasan wajar-wajar saja kau di bilang hebat.

“Siapa yang berani mengatakan bahwa peristiwa tsunami itu laknat, tapi dalam agama sudah jelas, kalau ada sebuah kampung karena azab Allah”.

Hari ini kita lihat lagi di Aceh, tingkat korupsi sangat hebat, berapa banyak orang yang terserang HIV/AIDS di Aceh khususnya di Sigli, coba kita lihat ini darimana, ini dari orang-orang yang bekas dari Banda Aceh.

*Sejauh mana tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya yang diajak dalam resolusi konflik di Aceh?*

Mereka ada tapi tidak mau kan, tidak mau bantu, satu lagi secara nasional, karena sudah tidak ada lagi pelajaran sejarah yang ada kita hanya PKN, PMP, mana sejarah Aceh, mana sejarah nasional yang membuat kita terkikis secara pelan-pelan. Ulama, urus yang besar tidak sanggup, karena urusan rumah tangganya pun kacau, banyak istrinya sekarang semua mengedepankan bisnis, termasuk di Aceh. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan di Aceh dari mana kita mau menyelesaikan persoalan, karena masalahnya terlalu banyak kita mulai saja dari bawah, masing-masing pemimpin daerah, menyelesaikan persoalan dari bawah, komandonya tetap, belum lagi hari ini egonya orang-orang pusat, bahwa orang-orang di daerah goblok, tidak, saya bicara saya harus benar kata orang pusat, jadi disitu semua akar masalah, cukup rumit.

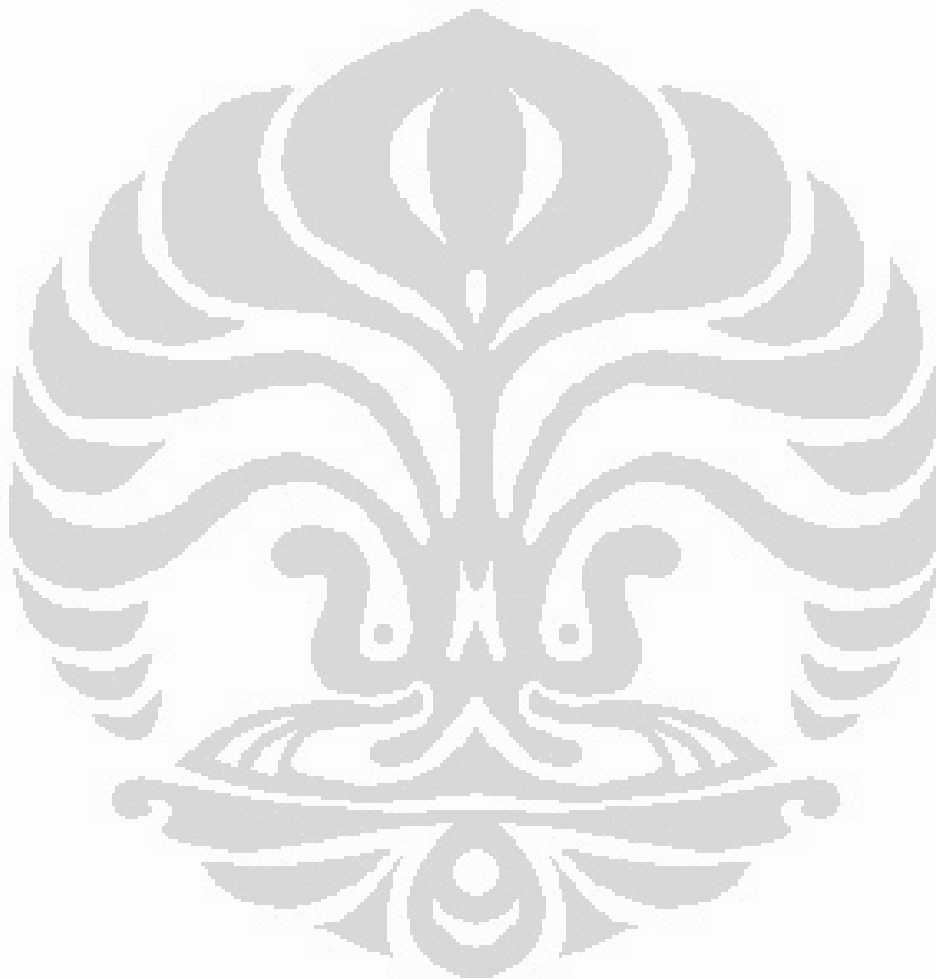
*Pendekatan top down, cenderung mengesampingkan follow up, apakah MoU Helsinki merupakan jalan untuk perdamaian hakiki, apa tidak perlu diikuti dengan program lain, untuk solusi konflik di Aceh, karena belum melibatkan masyarakat Aceh, khususnya yang Non GAM?*

Jadi dalam hal ini, kita ambil contoh di Kota Langsa DPR membuat keputusan, membuat kanun, apakah itu mewakili rakyat, sedangkan dia hanya punya status wakil rakyat, saya bicara mewakili rakyat, rakyat yang mana, dia gak bisa jawab, rakyat partai kalian, saya bukan rakyat partai kalian, karena tugas yang dilakukan, bukan tugas kepentingan rakyat, tapi tugas kepentingan pribadi kalau yang saya sampaikan salah, saya siap kemanapun akan dihadapkan.

“Waktu kalian kampanye, kalian dekati kami, perlu dukungan, itupun kami dukung karena kami perlu pemimpin, perlu tokoh, tapi setelah kalian jadi pernahkah kalian lihat kami.”

*Bagaimana masyarakat Aceh, melihat bantuan yang diberikan?*

Memang sebagian kultur orang Aceh ada yang merupakan refleksi dari ajaran Islam, dimana kalau salah satu anak atau keluarganya ada yang dibantu oleh pihak lain dan kehidupannya menjadi berguna bagi keluarga dan masyarakat, maka seluruh keluarga dan saudara akan merasa berhutang budi selama-lamanya pada yang membantu, dan mereka akan mengikuti pada orang yang membantu. Sehingga ada gaung dalam kehidupan masyarakat Aceh yang artinya “kalau orang berani bulunya maka wajib dibalas dengan darah”.



**Wawancara Dengan Informan R  
Langsa, 30 Oktober 2008**

*Bagaimana pembinaan PETA ke depan ?*

Saya secara pribadi dengan kawan-kawan sekarang sedang mengurus ijin lahan sekitar 3500 HA di daerah Aceh Timur. Di Aceh ada Qanu No 22 Tahun 2004 disitu ada usaha hutan tanaman. Nah itu yang sedang kita ambil untuk mengurus ijin usaha hutan tanaman, untuk kesejahteraan masyarakat tetapi kita ikut juga mendukung program pemerintah untuk melindungi hutan. Kita boleh ambil lahan itu tetapi kita harus tanam karet, sementara hutan yang masih utuh tetap kita lindungi. Jadi bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat, itu yang sedang kita kerjakan sekarang tetapi sampai hari ini saya belum tahu dimana dapat dana untuk melaksanakan program ini. Inilah salah satu yang saya laksanakan melalui usaha koperasi Tani Mandiri.

*Dana itu mungkin bias diajukan lewat BRR,*

Saya mengurus ijin ini tidak memakai nama PETA tetapi melalui kelompok Tani Mandiri Sejahtera yang sudah punya legatilis hokum, supaya jangan ada pandangan dari pemuda bahwa itu ada kelompok-kelompok tertentu yang sedang mengurus ijin, itu saya yakin kalau kita munculkan PETA disitu ijin tidak akan keluar.

*Kelompok Tani Mandiri Sejahtera bisa dikembangkan melalui kegiatan apa saja ?*

Perkebunan seperti PIR (Perkebunan Inti Rakyat) kita bangun sekitar 2000, per KK kita masih sekitar 2 HA sehingga sekitar 700 sampai 800 KK, kita akan membangun disitu seperti perumahannya, segala macamlah seperti fasilitas umumnya. Perkembangannya kalau memungkinkan kita juga kembangkan PIR disitu tergantung kesepakatan kawan-kawan nanti.

Sampai hari ini sudah saya urus ijinnya sampai ke Banda Aceh tetapi belum keluar, kalau surveynya dan pemetaan lahan sudah lengkap.

Saya tetap optimis karena ini untuk kepentingan orang banyak. Jadi apapun halangan akan saya tempuh, karena ini merupakan jalan terbaik yang kita tunjukkan untuk masyarakat, meski tanpa bantuan pemerintah kita juga bisa berbuat.

*Dengan suasana Aceh seperti sekarang, sejauh mana kendala yang akan menghambat program itu ?*

Kalau kendala, kalau situasi sekarang yaitu keamanan tetapi kembali karena kita bernaung di bawah PETA, jadi kita siap menghadapi situasi itu. Masyarakat bukan milik orang Aceh saja, bahwa mayoritas GAM adalah orang Aceh tetapi tidak semua orang Aceh itu GAM, tidak semua orang Aceh KPA dan tidak semua orang Aceh mendukung Hasan Tiro. Yang bernaung di Kelompok Tani Mandiri Sejahtera juga banyak orang Aceh, juga pendatang sama seperti kita hari ini mereka juga pendatang Cuma mereka datang duluan dibandingkan dengan orang-



orang kita disini seperti orang Jawa, Padang dan Batak. Jadi kita punya sikap bahwa bumi yang kita pijak ini di Aceh ini adalah milik satu golongan ataupun suku. Jadi nenek kita, kakek kita lahir di sini, orang tua kita lahir disini, jadi tidak ada alasan bahwa kita harus takut ke mereka.

*Bagaimana masyarakat melihat dan merasakan Perdamaian yang ada sekarang?*

Kita pesimis dengan melihat perdamaian ini, karena inilah karakter dari orang-orang kita yang ada disini. Ketika terjadi perdamaian kelompok-kelompok tertentu bisa muncul dengan kemampuan dan kelebihanannya tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang tertinggal. Inilah yang menjadi kesenjangan yang selama ini kita lihat terjadi penyanderaan, perampokan dimana-mana karena dalam perjanjian damai kalau kita bilang GAM punya senjata hanya 800 pucuk, itu kita tidak benar. Sampai hari ini kita dapat melihat senjata berkeliaran dimana-mana, maka dengan adanya senjata mereka bisa berbuat apapun akibat terjadinya kesenjangan mereka berbuat perampokan, penyanderaan dengan tujuan tebusan.

*Bagaimana potensi konflik sekarang ?*

Potensi konflik masih sangat besar, kita malah khawatirkan konflik itu terjadi antar mereka cuma kita berusaha untuk merangkul sebagian mereka mungkin yang sudah sadar mereka sering minta bantuan kita seperti mereka akan membuka lahan tidak tahu prosedurnya maka kami jelaskan, kita kasih saran.

*Dalam Kelompok Tani Sejahtera apakah ada anggota mantan GAM ?*

Ada beberapa orang, mereka punya komitmen sekarang saya akan berbuat untuk keluarga saya, karena mereka mungkin sudah sering melakukan perbuatan semacam itu dan tidak untungnya. Apalagi dengan turunnya Wali Nanggroe, itu menjadi pelajaran sangat besar bagimereka. Aceh sangat terkenal dengan Syariat Islamnya, tetapi Wali Nanggroe terus ke Banda Aceh ke Mesjid Baitu Rahman tidak sholat. Minimal kita turun dari mana-mana masuk ke Mesjid itu sholat sunah tahiyat Masjid 2 rekaat minimal tetapi ini tidak dilakukan. Kalau kita orang Islam sudah seperti wajib kalau kita masuk ke Mesjid.

*Bagaimana hubungan antara KPA dengan PETA sekarang ?*

Untuk saat ini, kita masing-masing jaga jarak, yang penting prinsipnya mereka tidak melanggar kita, kita juga tidak akan mengganggu mereka tetapi mereka selalu mencari permasalahan-permasalahan baru terhadap kita, tapi kita nggak pernah ambil peduli. Hari ini kita melihat fasilitas yang diberikan ke mereka, ini juga terjadi kesenjangan antara KPA dengan PETA tetapi yang memberikan fasilitas mereka pemerintah dengan aparat sendiri. Pernah ada kejadian kemarin di Rantau Panjang Perlak, oke secara hukum kita laporkan ke Polisi setelah ditangkap Polisi tindakan hukum tidak ada. Ini yang kita sesalkan karena yang membesarkan mereka seperti aparat pemerintah aparat penegak hukum mungkin ke depan kalau situasinya masih seperti ini akan terjadi benturan sementara KPA dengan PETA.

*Sejauhmana manfaat dana bantuan yang diterima PETA dari BRA ?*

Kita berharap kedepan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bias mengkafer, bagi mereka yang kecewa karena dengan turunnya dana banyak masyarakat yang bernaung di bawah PETA merasa kecewa dengan hasil apa yang di dapat kemarin. Jadi dana itu turun hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, tidak sesuai dengan nama yang sesuai dengan organisasi PETA itu sendiri yang pernah berbuat untuk PETA.

*Benarkah hal tersebut dibicarakan pada tingkat pengurus PETA kota atau NAD ?*

Situasi kota Langsa mulai kacau dengan dana, maka waktu itu turunlah Panglima FPMP, setelah perjanjian damai turun menjadi Laskar kemudian berubah menjadi PETA. Di PETA sebagai penasehat, akhirnya saya konsolidasikan PETA di Langsa dibawah saya untuk meredam jangan sampai masalah ini muncul kepermukaan dan ribut dengan masalah dana, Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi meributkan masalah dana.

*Bagaimana peran lembaga adat dan agama di Aceh ?*

Fungsi lembaga adat dan social di tingkat Gampong dan mukim di wilayah Propinsi NAD belum ada yang dilibatkan secara efektif dalam proses penyelesaian konflik dan memfasilitasi perdamaian dikarenakan masih adanya beberapa kendala. Diantaranya pejabat yang belum dapat berfungsi optimal karena masih adanya trauma konflik yang mengakibatkan pada tindakan kekerasan, disamping semakin menguatnya peran mantan anggota GAM dalam KPA yang sampai di tingkat Gampong dan mukim.

**Wawancara Dengan Informan S  
Langsa, 15 Maret 2008**

*Bagaimana anda melihat perdamaian di Aceh?*

Masyarakat Aceh menginginkan perdamaian yang sesungguhnya, yaitu damai dalam kehidupan, damai dalam hati dan pikiran agar mudah mencari rejeki, mudah dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi serta bersilaturahmi dengan sanak saudara, kini perdamaian sudah ada untuk kehidupan masyarakat Aceh damai yang abadi. Sehingga ada kewajiban bagi kita untuk menyebarkan dan mensosialisasikan perdamaian dalam kehidupan.

*Dari pandangan pengusaha, sebaiknya langkah apa yang dapat diambil untuk menuju damai yang diharapkan masyarakat?*

Perlu keamanan dan kepastian hukum di NAD yang belum begitu baik. Masih adanya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu terhadap berbagai sektor usaha, yang sampai saat ini masih berlangsung dan jelas-jelas hal tersebut melanggar aturan, akan tetapi seakan-akan itu menjadi hal yang resmi dan wajar. Fakta lain, di hampir semua media cetak dan elektronik memberitakan kejadian-kejadian kriminalitas yang terjadi di masyarakat Aceh semakin tinggi, sehingga prediksi ke arah Aceh yang damai menjadi rusak. Kedepan banyak pengangguran di Aceh, karena tidak ada pabrik, apalagi kalau bantuan asing sudah dihentikan, itu yang menyebabkan kemiskinan meningkat dan naiknya kriminalitas, karena aparat tidak profesional, tidak adil, pajak nanggroe masih ada karena saja sendiri mengalami hal itu. Kalau dari KPA yang berbuat seolah-olah dibiarkan, kalau masyarakat umum dan kita yang berbuat salah langsung diusut dan diperiksa.

Sekarang banyak dari mereka yang tidak punya pekerjaan, akhirnya jadi kontraktor, cari-cari proyek, kemudian di sub kan atau dijual, dari situ nilai proyek sudah berkurang dan hasilnya juga tidak jelas. Situasinya cukup ruwet, pemerintah harus tegas, perlu sosialisasi. Panggil semua kontraktor, kasih tahu cara mengikuti tender, bagi-bagi yang baik sehingga semua kebagian. Saya pernah tanyakan itu sama Pak Wapres waktu pertemuan di Makasar, kenapa proyek banyak dikerjakan oleh orang luar, kita yang putra daerah tidak dapat apa-apa, dimana rasa keadilannya sementara banyak orang luar yang bisnis di Aceh, kita hanya jadi penonton.

*Sejauh mana Bapak melihat perjalanan MoU Helsinki, mungkin dari sisi pengusaha?*

Perjalanan MoU sampai dengan hari ini belum terlihat secara signifikan upaya-upaya melakukan perbaikan dibidang dunia usaha yang berdampak cukup besar bagi kepercayaan para investor untuk melakukan investasi di NAD. Hal ini diakibatkan oleh faktor stabilitas keamanan dan kepastian hukum yang belum begitu baik. Hal ini dapat kita lihat masih adanya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap berbagai sektor usaha, yang sampai saat ini masih berlangsung dan jelas-jelas hal tersebut melanggar aturan. Akan tetapi seakan-akan itu menjadi hal yang resmi/wajar. Fakta lain, di hampir semua

media cetak dan elektronik memberitakan kejadian-kejadian kriminalitas yang terjadi di masyarakat Aceh semakin tinggi sehingga prediksi ke arah Aceh yang damai menjadi rusak. Banyak kalangan investor yang ingin menanamkan modalnya di Aceh, tetapi masih melihat dan menunggu (*wait and see*), sejauh mana keseriusan pemerintah Aceh dalam menciptakan stabilitas keamanan dan kepastian hukum terhadap pelaku dunia usaha. Hal inilah yang masih menjadi kendala bagi pelaku ekonomi sehingga mereka tidak dapat berbuat lebih jauh ke arah pembukaan lapangan kerja terutama yang bersifat investasi jangka panjang di NAD.

*Bapak melihat kondisi Aceh masih seperti itu, bagaimana merubah atau kiat apa untuk membangkitkan Prpopinsi NAD, agar perekonomian Aceh dapat lebih maju dan berkembang?*

Mungkin yang perlu di Aceh, penguatan ekonomi, penegakan hukum tanpa pandang bulu dan regulasi tender proyek, jelasnya ada hal-hal yang perlu diambil langkah pertama Pemerintah Aceh dan jajarannya harus dapat bersinergi dalam merumuskan regulasi, birokrasi dan stabilitas keamanan serta kebijakan-kebijakan yang berpihak pada dunia usaha. Kedua, adanya penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai pelaku tindak kriminal yang mengganggu ketertiban dan keamanan dalam iklim investasi di NAD. Kemudian pemerintah juga diharapkan dapat merubah mindset/pola pikir masyarakat dan kalangan pendidik bahwa lulusan-lulusan sekolah/ perguruan tinggi tidak hanya disiapkan untuk menjadi tenaga siap bekerja, tetapi mereka juga harus mampu membuka lapangan pekerjaan. Ini semua bertujuan untuk menciptakan enterpreneur/pelaku usaha yang baru yang siap membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.

Pemerintah dan perbankan diharapkan dapat memberikan fasilitas permodalan bagi kalangan usahawan sehingga setiap program bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal.

Perlu adanya kesamaan hak dan kesempatan bagi masing-masing pelaku ekonomi dalam melaksanakan aktifitasnya dalam hal mendapatkan proyek maupun dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di NAD.

Pelaku usaha diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas profesionalisme, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen, jujur, kerja keras, pantang menyerah serta amanah.

**Wawancara Dengan Informan T  
Langsa, 3 November 2008**

*Bagaimana program reintegrasi Aceh antara mantan GAM dengan masyarakat, khususnya yang non GAM?*

Problem dan prospek Aceh Paska MoU Helsinki, terkait dengan integrasi masyarakat dan anggota-anggota mantan GAM, karena perang selalu menghasilkan kebencian, dendam dan trauma di dalam masyarakat persoalan dendam di Aceh susah dihilangkan karena sudah bersifat turun temurun dan itu bisa menjadi konflik di masyarakat Aceh sendiri, yang ada di Aceh juga masalah ekonomi, kecemburuan dan kesenjangan sosial karena GAM mendapat tanah luas, sedang kami yang membela NKRI tidak dapat apa-apa, tapi GAM atau KPA sekarang enak.

*Bagaimana perkembangan Aceh sekarang?*

Yang pertama yang diperhitungkan ekonomi, anggota saya enggak ada yang mampu di bidang ekonomi kere semua, jadi jelas, setiap ngumpul ngeluhnya seperti ini, yang GAM itu yang enggak pernah bergerak sekarang sudah dapat posisi, mobil bagus, macam kita ini gimana, saya sebagai pemimpin mereka, saya akan berikan saya enggak punya, enggak berikan mereka perlu ditolong kalau keadaan ini kita biarkan, saya tidak bohong krisis merah putih itu sudah betul-betul terjadi, kalau orang KPA sudah jelas habis pula merah putihnya kan. Apalagi sekarang yang dihasilkan petani kopi, kelapa sawit harganya menurun dan semakin terpuruklah ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang hanya mengharapkan dari kopi sedang harga kopi sudah anjlok. Katanya ada pembatasan ekspor sehingga kopi ini enggak laku, pada saat ekonomi masyarakat tiarap datanglah Irwandi dengan NGO membawa bantuan, mereka terima bantuan itu tapi ada dengan catatan, tapi apa pusat mikir seperti itu, partai lokal pasti akan koalisi, dan apapun ceritanya partai nasional bakal terpuruk, hanya di daerah ALA inilah partai nasional masih ada. Kalau di Aceh yang lain, kayaknya semua mengarah ke partai lokal, karena cara mereka untuk kampanye sama dengan pemilihan gubernur, dengan intimidasi.

Safari Ramadhan Irwandi mengatakan bahwa Aceh ini kaya, yang selama ini diambil oleh pemerintah pusat, jadi sekarang saatnya Aceh bangkit, itu kampanye Safari Ramadhan orang itu seperti itu, memang tujuannya untuk merdeka enggak ada lain, hanya merdeka. Apapun ceritanya kalau merdeka saya harus angkat kaki dari Aceh, walaupun saudara-saudara kita banyak yang terpaksa kita ajak lari. Karena orang-orang merah putih okelah tahun pertama dan kedua enggak diapa-apakan, tahun ketiga dan selanjutnya kita akan dibunuh secara perlahan-lahan, secara sosial kita sudah enggak digunakan, apa enggak dibunuh namanya. Sekarang tergantung pemerintah pusat tolong lihat kondisi Aceh sekarang dan betul-betul ditanggapi, kalau enggak ya enggak usah. Kalau pemerintah pusat enggak jeli, ya tunggu aja kedepan Aceh merdeka, sekarang kita masih terikat sama MoU, tapi kalau nanti sudah ada referendum ingin merdeka sudah ada pihak dunia lain yang mengatur.

